



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

# LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

TAHUN  
2020



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 ini, kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini. Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sehingga terwujud tata kelola keuangan daerah yang baik.

Pangkalan Balai, Mei 2021





## **BUPATI BANYUASIN**

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, Mei 2021

**BUPATI BANYUASIN,**  
  
**H. ASKOLANI, S.H., M.H.**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 34.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 8 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 8 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Harry Purwaha, Ak., CA., CSFA**  
**Register Negara Akuntan No. RNA - 7704**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>7</b>
1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	7
2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	9
3 NERACA.....	10
4 LAPORAN OPERASIONAL.....	12
5 LAPORAN ARUS KAS.....	14
6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	16
7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	17
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 2.1.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019.....	28
Tabel 2.1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Banyuwasin Tahun 2015 s.d 2019 .....	29
Tabel 3.1.1	Rincian Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 .....	32
Tabel 3.1.2	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020.....	32
Tabel 3.1.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2020.....	32
Tabel 3.1.4	Realisasi per Jenis Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 .....	33
Tabel 3.1.5	Realisasi Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2020 .....	33
Tabel 3.1.6	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2020 .....	35
Tabel 3.1.7	Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020.....	36
Tabel 3.18	Realisasi Belanja Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat Tahun Anggaran 2020 .....	36
Tabel 5.1.1	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LRA Tahun 2020.....	102
Tabel 5.1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun 2020.....	103
Tabel 5.1.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2020.....	104
Tabel 5.1.4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2020.....	106
Tabel 5.1.5	Rincian Retribusi Jasa Umum - LRA Tahun 2020 .....	107
Tabel 5.1.6	Rincian Retribusi Jasa Usaha - LRA Tahun 2020 .....	109
Tabel 5.1.7	Rincian Retribusi Perizinan Tertentu - LRA Anggaran 2020.....	111
Tabel 5.1.8	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2020.....	112
Tabel 5.1.9	Rincian Bunga Deposito yang Diterima RKUD Tahun 2020.....	113
Tabel 5.1.10	Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 .....	113
Tabel 5.1.11	Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2020 .....	115
Tabel 5.1.12	Rincian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dari BPJS Per Puskesmas Tahun 2020 .....	115
Tabel 5.1.13	Rincian Realisasi Pendapatan Lelang Lebak Lebung Tahun 2020.....	117
Tabel 5.1.14	Rincian Pendapatan Transfer - LRA Tahun Anggaran 2020.....	117
Tabel 5.1.15	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun Anggaran 2020 .....	118
Tabel 5.1.16	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA Tahun Anggaran 2020 dan 2019 .....	119
Tabel 5.1.17	Rincian Penerimaan DBH Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2020 .....	120
Tabel 5.1.18	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020 .....	122
Tabel 5.1.19	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - LRA Tahun 2020 dan 2019 .....	123
Tabel 5.1.20	Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke RKUD Tahun Anggaran 2020 .....	123
Tabel 5.1.21	Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020.....	124
Tabel 5.1.22	Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	125
Tabel 5.1.23	Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 .....	126
Tabel 5.1.24	Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020.....	127
Tabel 5.1.25	Rincian Realisasi Belanja Bunga.....	128
Tabel 5.1.26	Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020.....	129

Tabel 5.1.27	Rincian Belanja Hibah Uang Tahun Anggaran 2020 .....	129
Tabel 5.1.28	Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 .....	131
Tabel 5.1.29	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020.....	132
Tabel 5.1.30	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020.....	134
Tabel 5.1.31	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 .....	135
Tabel 5.1.32	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020.....	136
Tabel 5.1.33	Daftar Belanja Modal menjadi Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 .....	136
Tabel 5.1.34	Daftar Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap Per SKPD Tahun Anggaran 2020 .....	137
Tabel 5.1.35	Rincian Setoran Belanja Tidak Tertuga (BTT) Tahun Anggaran 2020.....	139
Tabel 5.1.36	Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 .....	155
Tabel 5.1.37	Rincian Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 .....	155
Tabel 5.1.38	Transfer dari RKUN dan RKUD dke RKD Tahun Anggaran 2020 .....	157
Tabel 5.1.39	Rincian Bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2020 .....	159
Tabel 5.1.40	Rincian Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 .....	161
Tabel 5.3.1	Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2020 dan 2019 .....	165
Tabel 5.3.2	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019.....	166
Tabel 5.3.3	Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019.....	166
Tabel 5.3.4	Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019.....	167
Tabel 5.3.5	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019....	167
Tabel 5.3.6	Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019.....	168
Tabel 5.3.7	Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2020 dan 2019.....	168
Tabel 5.3.8	Rincian <i>Deposito on Call</i> .....	169
Tabel 5.3.9	Rincian Kas di Bendahara Sekolah.....	170
Tabel 5.3.10	Rincian Mutasi Investasi Jangka Pendek.....	171
Tabel 5.3.11	Rincian Piutang per 31 Desember 2020 .....	171
Tabel 5.3.12	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 .....	171
Tabel 5.3.13	Umur Piutang Pajak Daerah .....	172
Tabel 5.3.14	Rincian Piutang Pajak Restoran.....	173
Tabel 5.3.15	Rincian Piutang PBB per 31 Desember 2020.....	174
Tabel 5.3.16	Rincian Umur Piutang PBB per 31 Desember 2020.....	174
Tabel 5.3.17	Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 .....	175
Tabel 5.3.18	Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 .....	176
Tabel 5.3.19	Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2020 .....	176
Tabel 5.3.20	Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2020 .....	176
Tabel 5.3.21	Rincian Mutasi Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2020 .....	177
Tabel 5.3.22	Rincian Mutasi Piutang Dana Transfer Pusat per 31 Desember 2020.....	177
Tabel 5.3.23	Rincian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2020...178	
Tabel 5.3.24	Rincian Piutang Lain-Lain.....	179
Tabel 5.3.25	Rincian Mutasi Piutang TP/TGR.....	179
Tabel 5.3.26	Rincian Piutang Lainnya.....	180
Tabel 5.3.27	Rincian Mutasi Piutang BLUD.....	180
Tabel 5.3.28	Rincian Mutasi Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2020 .....	181
Tabel 5.3.29	Rincian Perhitungan Piutang Deposito per 31 Desember 2020 .....	182



Tabel 5.3.30	Rincian Umur Piutang Retribusi dan Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2020 .....	182
Tabel 5.3.31	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020.....	183
Tabel 5.3.32	Rincian Penyisihan Piutang PBB per 31 Desember 2020 per Kecamatan ...	183
Tabel 5.3.33	Mutasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 .....	184
Tabel 5.3.34	Rincian Persediaan per Jenis Persediaan per 31 Desember 2020 .....	185
Tabel 5.3.35	Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020.....	186
Tabel 5.3.36	Rincian Penyertaan yang Menjadi Saham per 31 Desember 2020 .....	187
Tabel 5.3.37	Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada PDAM Tirta Betuah...	187
Tabel 5.3.38	Perbedaan Nilai Aset antara BAST dan Perda Penyertaan Modal .....	188
Tabel 5.3.39	Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada PUMD Sei Sembilang .....	188
Tabel 5.3.40	Rincian Mutasi Aset tetap Pemerintah Kabupaten Banyuwasin .....	189
Tabel 5.3.41	Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah .....	189
Tabel 5.3.42	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	191
Tabel 5.3.43	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	195
Tabel 5.3.44	Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	198
Tabel 5.3.45	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya .....	200
Tabel 5.3.46	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	201
Tabel 5.3.47	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020.....	202
Tabel 5.3.48	Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2020.....	203
Tabel 5.3.49	Rincian Aset Lainnya .....	204
Tabel 5.3.50	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2020 .....	205
Tabel 5.3.51	Rincian Mutasi Amortisasi Aset Lainnya .....	205
Tabel 5.3.52	Rincian Aset Lain-Lain.....	206
Tabel 5.3.53	Rincian <i>Detail Engineering Design</i> (DED).....	207
Tabel 5.3.54	Rincian Kekurangan Volume per SKPD .....	208
Tabel 5.3.55	Rincian Mutasi Aset Dobel Pencatatan .....	208
Tabel 5.3.56	Rincian Aset Kondisi Rusak Berat .....	208
Tabel 5.3.57	Rincian Aset yang Digunakan Pihak Lain.....	210
Tabel 5.3.58	Rincian Mutasi Aset Pinjam Pakai .....	211
Tabel 5.3.59	Rincian Aset Pinjam Pakai .....	211
Tabel 5.3.60	Rincian Penyusutan Aset Lain-Lain .....	214
Tabel 5.3.61	Rincian Kewajiban Tahun 2020 .....	215
Tabel 5.3.62	Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	215
Tabel 5.3.63	Rincian Utang Pihak Ketiga (PFK) per Jenis .....	216
Tabel 5.3.64	Rincian Utang PFK per SKPD .....	216
Tabel 5.3.65	Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat .....	217
Tabel 5.3.66	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 .....	217
Tabel 5.3.67	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD per 31 Desember 2020 .....	218
Tabel 5.3.68	Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per SKPD 31 Desember 2020 .....	218
Tabel 5.3.69	Rincian Utang per Jenis Tahun 2020.....	219
Tabel 5.3.70	Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2020.....	219
Tabel 5.3.71	Rincian Utang Beban Transfer SKPD per 31 Desember 2020 .....	220
Tabel 5.4.1	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	222

Tabel 5.4.2	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO dan LRA Tahun 2020 .....	222
Tabel 5.4.3	Realisasi Pendapatan - LO per SKPD Tahun 2020 dan 2019.....	223
Tabel 5.4.4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019.....	223
Tabel 5.4.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA Tahun 2020.....	223
Tabel 5.4.6	Pajak Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	224
Tabel 5.4.7	Pajak Daerah - LO dan Pajak Daerah - LRA Tahun 2020.....	225
Tabel 5.4.8	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	226
Tabel 5.4.9	Pendapatan Retribusi Daerah - LO per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	226
Tabel 5.4.10	Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA Tahun 2020 .....	226
Tabel 5.4.11	Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA per SKPD Tahun 2020 .....	227
Tabel 5.4.12	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	227
Tabel 5.4.13	Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2020 .....	228
Tabel 5.4.14	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	228
Tabel 5.4.15	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2020 .....	229
Tabel 5.4.16	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	229
Tabel 5.4.17	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan LRA Tahun 2020 .....	229
Tabel 5.4.18	Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	230
Tabel 5.4.19	Lain-Lain PAD yang Sah - LO per SKPD Tahun 2020 dan 2019.....	230
Tabel 5.4.20	Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2020 .....	231
Tabel 5.4.21	Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA per SKPD Tahun 2020.....	232
Tabel 5.4.22	Pendapatan Transfer - LO Tahun 2020 dan 2019.....	233
Tabel 5.4.23	Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2020.....	233
Tabel 5.4.24	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	233
Tabel 5.4.25	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO dan LRA Tahun 2020 .....	235
Tabel 5.4.26	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	237
Tabel 5.4.27	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dan LRA Tahun 2020 .....	237
Tabel 5.4.28	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2020 dan 2019 .....	238
Tabel 5.4.29	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan LRA Tahun 2020 .....	239
Tabel 5.4.30	Beban Daerah per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	241
Tabel 5.4.31	Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019 .....	242
Tabel 5.4.32	Beban Pegawai per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	242
Tabel 5.4.33	Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2020.....	244
Tabel 5.4.34	Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2020 .....	244
Tabel 5.4.35	Beban Persediaan per Rekening Tahun 2020 dan 2019.....	246
Tabel 5.4.36	Beban Persediaan per SKPD Tahun 2020 dan 2019.....	247
Tabel 5.4.37	Beban dan Belanja Persediaan per Rekening Tahun 2020 .....	248
Tabel 5.4.38	Beban dan Belanja Persediaan per SKPD Tahun 2020 .....	249
Tabel 5.4.39	Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019 .....	251
Tabel 5.4.40	Beban Jasa per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	253
Tabel 5.4.41	Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2020.....	254
Tabel 5.4.42	Beban dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2020 .....	259
Tabel 5.4.43	Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019 .....	261
Tabel 5.4.44	Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	261
Tabel 5.4.45	Beban dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2020 .....	263

Tabel 5.4.46	Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan per SKPD Tahun 2020 .....	265
Tabel 5.4.47	Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019 .....	267
Tabel 5.4.48	Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2020 dan 2019.....	267
Tabel 5.4.49	Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020.....	269
Tabel 5.4.50	Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019 .....	270
Tabel 5.4.51	Beban Hibah Barang per SKPD Tahun 2020 dan 2019.....	271
Tabel 5.4.52	Beban dan Belanja Hibah Tahun 2020 .....	271
Tabel 5.4.53	Beban dan Belanja Hibah per SKPD Tahun 2020.....	275
Tabel 5.4.54	Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019 .....	275
Tabel 5.4.55	Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2020 dan 2019.....	276
Tabel 5.4.56	Beban dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 .....	276
Tabel 5.4.57	Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019 .....	277
Tabel 5.4.58	Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	279
Tabel 5.4.59	Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019 .....	281
Tabel 5.4.60	Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2020 dan 2019 .....	281
Tabel 5.4.61	Beban Lain-Lain Tahun 2020 dan 2019 .....	281
Tabel 5.4.62	Beban dan Belanja Lain-Lain Tahun 2020 .....	282
Tabel 5.4.63	Rincian Saldo Defisit Penjualan Aset Non Lancar.....	284
Tabel 5.5.1	Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2020 dan 2019.....	286
Tabel 5.5.2	Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	286
Tabel 5.5.3	Komparasi Pendapatan LRA dengan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi LAK.....	287
Tabel 5.5.4	Komparasi Belanja LRA Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi LAK .....	288
Tabel 5.5.5	Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	289
Tabel 5.5.6	Komparasi Belanja LRA Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi LAK.....	290
Tabel 5.5.7	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	290
Tabel 5.5.8	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	291
Tabel 5.5.9	Rincian PFK per SKPD per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	292
Tabel 5.5.10	Rincian Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 .....	293
Tabel 5.5.11	Rincian Perbandingan Saldo Akhir Kas dengan SiLPA Tahun 2020.....	293
Tabel 5.6.1	Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019 .....	295
Tabel 5.6.2	Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar .....	295
Tabel 5.6.3	Koreksi Lebih Salur Dana Bagi Hasil .....	295
Tabel 5.6.4	Koreksi Kurang Salur Dana Bagi Hasil.....	296
Tabel 5.6.5	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu.....	298

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 5.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 ..... 102
Gambar 5.1.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... 103
Gambar 5.1.3	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 ..... 125
Gambar 5.1.4	Komposisi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2020 ..... 126
Gambar 5.1.5	Persentase Realisasi Belanja Modal Terhadap Anggaran Tahun 2020 ..... 132
Gambar 5.3.1	Perbandingan Komposisi Aset Per 31 Desember 2020 ..... 165
Gambar 5.3.2	Perbandingan Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2020 ..... 189
Gambar 5.4.1	Komposisi Realisasi Pendapatan – LO 2020 ..... 222
Gambar 5.4.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO 2020 ..... 224
Gambar 5.5.1	Perbandingan Pendapatan LRA dan Arus Masuk Kas LAK per 31 Desember 2020 ..... 288
Gambar 5.5.2	Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Bantuan Keuangan LRA dan Arus Keluar Kas LAK per 31 Desember 2020 ..... 289

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
- Lampiran 3 : Rincian Belanja Hibah Uang PPKD Tahun 2020
- Lampiran 4 : Rincian Belanja Hibah Barang dan Jasa yang Diserahkan per 31 Desember 2020
- Lampiran 5 : Daftar Belanja Modal SKPD Tahun Anggaran 2020 yang Tidak Menjadi Aset per SKPD
- Lampiran 6 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Dana BOS Reguler
- Lampiran 7 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Dana BOS Afirmasi
- Lampiran 8 : Rekapitulasi Laporan Realisasi Dana BOS Kinerja
- Lampiran 9 : Daftar Piutang TP/TGR
- Lampiran 10 : TP/TGR (Kasus Kerugian Daerah yang Sedang Dalam Proses Penetapan Pembebanan)
- Lampiran 11 : Rincian Piutang Anggota DPRD Tahun 2020
- Lampiran 12 : Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka
- Lampiran 13 : Daftar Persediaan per 31 Desember 2020
- Lampiran 14 : Mutasi Persediaan per Rekening per 31 Desember 2020
- Lampiran 15 : Mutasi Persediaan per SKPD per 31 Desember 2020
- Lampiran 16 : Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
- Lampiran 17 : Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 18 : Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 19 : Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 20 : Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 21 : Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 22 : Rincian Utang Pihak Ketiga
- Lampiran 23 : Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	153.730.000.000,00	123.984.849.438,59	80,65	127.726.414.584,48
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.788.193.408,75	10.587.020.785,00	89,81	9.356.813.859,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	6.427.488.649,72	6.427.408.649,72	100,00	5.411.498.182,71
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	67.840.958.290,96	61.820.843.525,81	106,88	58.121.621.644,20
7	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)</b>		<b>229.788.620.409,43</b>	<b>202.820.182.399,12</b>	<b>88,28</b>	<b>200.616.348.210,39</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
9	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	84.877.339.890,00	57.994.104.860,00	68,33	69.657.720.910,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	118.100.293.873,00	126.808.026.768,00	107,37	175.481.568.005,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	896.097.109.000,00	878.495.803.000,00	99,14	979.541.981.000,00
13	Dana Alokasi Khusus FISIK	5.1.1.2.1.4	136.047.749.000,00	134.208.142.167,00	98,65	168.126.987.485,00
14	Dana Alokasi Khusus Non FISIK		207.275.296.228,00	207.225.186.878,00	99,98	200.988.944.953,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 14)</b>		<b>1.432.397.787.791,00</b>	<b>1.404.731.283.673,00</b>	<b>98,07</b>	<b>1.593.797.202.353,00</b>
16	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	5.1.1.2.2				
17	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Penyesuaian		34.033.249.000,00	34.033.249.000,00	100,00	35.281.887.000,00
19	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17+18)</b>		<b>34.033.249.000,00</b>	<b>34.033.249.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.281.887.000,00</b>
20	<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	67.622.273.049,00	59.723.908.317,01	88,32	125.498.141.216,46
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		29.906.934.183,00	35.045.260.919,00	117,18	29.285.476.855,00
23	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (21+22)</b>		<b>97.529.207.232,00</b>	<b>94.769.169.236,01</b>	<b>97,17</b>	<b>154.783.618.071,46</b>
24	<b>Bantuan Keuangan</b>	5.1.1.2.4				
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.2.4.1	70.728.832.000,00	64.877.737.953,60	91,73	52.126.675.547,76
26	<b>Jumlah Bantuan Keuangan (25)</b>		<b>70.728.832.000,00</b>	<b>64.877.737.953,60</b>	<b>91,73</b>	<b>52.126.675.547,76</b>
27	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15+19+23+26)</b>		<b>1.634.889.078.023,00</b>	<b>1.698.411.419.882,61</b>	<b>97,78</b>	<b>1.835.989.382.972,22</b>
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3				
29	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	126.451.640.000,00	126.205.514.955,00	99,81	114.029.064.715,00
30	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	297.112.067.000,00	296.569.512.200,00	99,82	299.148.252.213,00
32	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (29 s.d. 31)</b>		<b>423.563.707.000,00</b>	<b>422.775.027.155,00</b>	<b>99,81</b>	<b>413.177.318.928,00</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7+27+32)</b>		<b>2.288.039.403.432,43</b>	<b>2.224.008.629.416,73</b>	<b>97,20</b>	<b>2.449.783.048.210,61</b>
34	<b>BELANJA</b>	5.1.2				
35	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
36	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	791.843.470.481,04	778.157.769.580,80	98,27	801.972.252.593,63
37	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	617.337.846.423,19	588.919.199.812,75	95,39	681.043.618.989,35
38	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	6.180.000.000,00	6.071.257.122,86	98,24	1.591.500.000,00
39	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	100.247.446.400,00	94.011.117.113,63	93,77	92.162.721.570,78
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	81.916.000,00	81.916.000,00	100,00	225.875.000,00
41	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI (36 s.d 40)</b>		<b>1.515.890.479.304,23</b>	<b>1.487.241.259.630,04</b>	<b>98,80</b>	<b>1.576.995.968.153,76</b>
42	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
43	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	11.859.294.128,00	11.173.619.758,00	94,21	2.718.461.818,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	91.384.270.337,68	86.207.313.243,95	94,33	115.271.959.386,79
45	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	46.961.790.351,00	46.269.351.733,32	98,52	107.067.706.327,93
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	430.201.994.329,00	421.459.755.370,02	97,96	172.575.951.051,76
47	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	18.612.991.433,00	17.666.875.466,00	94,91	27.272.495.605,00
48	<b>JUMLAH BELANJA MODAL (43 s.d 47)</b>		<b>598.020.340.578,68</b>	<b>582.778.915.571,29</b>	<b>97,28</b>	<b>424.906.574.189,48</b>
49	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3				
50	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	95.397.418.200,53	83.437.934.386,50	87,46	1.315.136.250,00
51	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (50)</b>		<b>95.397.418.200,53</b>	<b>83.437.934.386,50</b>	<b>87,46</b>	<b>1.315.136.250,00</b>
52	<b>JUMLAH BELANJA (42+49+52)</b>		<b>2.210.108.238.083,44</b>	<b>2.133.456.109.587,83</b>	<b>96,53</b>	<b>2.003.217.678.593,24</b>
53	<b>TRANSFER</b>	5.1.3				
54	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.1	417.623.432.590,50	415.956.152.489,78	99,60	420.206.826.705,61
55	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2	1.292.564.886,00	1.292.564.886,00	100,00	1.275.946.834,00
56	<b>JUMLAH TRANSFER (54 s.d 55)</b>		<b>418.915.997.476,50</b>	<b>417.248.717.375,78</b>	<b>99,60</b>	<b>421.482.773.539,61</b>
57	<b>SURPLUS / (DEFISIT) (33-52-56)</b>		<b>-340.984.832.127,51</b>	<b>-326.698.187.648,88</b>	<b>95,81</b>	<b>25.082.596.077,78</b>

No	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
58	PEMBIAYAAN	5.1.4				
59	PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.1				
60	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.1.1	157.434.947.861,94	152.209.548.344,14	96,68	137.352.351.784,18
61	Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.1.2	273.067.043.387,57	273.067.043.387,57	100,00	0,00
62	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (60 s.d 61)		430.501.991.249,51	425.276.591.731,71	98,78	137.352.351.784,18
63	PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.2				
64	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	11.369.054.785,00	11.261.257.971,00	99,05	5.000.000.000,00
65	Pembayaran Pokok Utang	5.1.4.2.2	78.148.104.337,00	78.148.104.337,44	100,00	0,00
66	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (64 s.d 65)		89.517.159.122,00	89.409.362.308,44	99,88	5.000.000.000,00
67	PEMBIAYAAN NETTO (62-66)		340.884.832.127,51	335.867.229.423,27	98,50	132.352.351.784,18
68	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (57+67)		0,00	9.189.031.876,39	0,00	157.434.947.861,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok



## 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	157.434.947.861,94	156.687.797.250,18
2	Koreksi Kesalahan SAL Awal	5.2.2	(5.225.399.517,80)	(19.335.445.466,00)
	- Koreksi Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pusat		(5.237.937.155,00)	(19.335.445.466,00)
	- Koreksi atas Saldo Awal FKTP Tahun Lalu		12.537.637,20	0,00
3	Saldo Setelah Koreksi (1+2)	5.2.3	152.209.548.344,14	137.352.351.784,18
4	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	5.2.4	152.209.548.344,14	137.352.351.784,18
5	<b>Sub Total (3-4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.5	9.169.031.876,39	157.434.947.861,94
7	<b>Sub Total (5+6)</b>		<b>9.169.031.876,39</b>	<b>157.434.947.861,94</b>
8	Lain-Lain	5.2.6	0,00	0,00
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (7+8)</b>		<b>9.169.031.876,39</b>	<b>157.434.947.861,94</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok

  
**BUPATI BANYUASIN,**  
  
**H. ASKOLANI, SH., MH**



## 3. NERACA



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

## NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Uralan	Ref	2020	2019
1	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
3	<b>Kas dan setara kas</b>	<b>5.3.1.1.1</b>		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	2.345.445.063,72	37.622.729.581,25
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	225.839.463,00	47.025.861,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	207.100.860,00	6.589.700,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	1.164.855.599,79	2.246.845.658,09
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.1.5	1.367.017.664,88	1.773.830.037,80
9	Deposito on Call	5.3.1.1.1.6	500.000.000,00	60.000.000.000,00
10	Kas Bendahara Sekolah	5.3.1.1.1.7	4.391.182.756,00	15.732.996.457,00
11	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0,00	40.000.000.000,00
12	Piutang	5.3.1.1.3		
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.3.1	113.697.819.378,31	100.329.814.510,41
14	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3.2	12.293.734,00	12.293.734,00
15	Piutang Transfer	5.3.1.1.3.3	27.923.819.429,00	20.319.598.522,56
16	Piutang Lain-lain	5.3.1.1.3.4	9.150.929.244,79	17.596.799.897,10
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(65.703.983.750,79)	(56.217.818.912,69)
18	Beban dibayar dimuka	5.3.1.1.5	302.809.602,37	860.900.769,24
19	Persediaan	5.3.1.1.6	110.214.556.051,47	59.266.848.638,10
20	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s.d 19)</b>		<b>205.799.685.096,54</b>	<b>299.598.454.453,86</b>
21	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
22	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>5.3.1.2</b>		
23	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	190.750.295.398,25	221.058.528.555,68
24	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (23)</b>		<b>190.750.295.398,25</b>	<b>221.058.528.555,68</b>
25	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
26	Tanah	5.3.1.3.1	414.065.191.762,78	370.674.136.763,99
27	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	828.286.801.377,82	730.366.863.487,16
28	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.290.854.395.705,82	1.237.493.494.645,54
29	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	3.224.938.396.551,05	2.762.378.264.116,09
30	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	94.168.239.389,89	79.895.433.832,89
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	167.330.206.276,66	139.759.178.408,72
32	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.198.865.141.899,56)	(1.944.289.170.536,24)
33	<b>Jumlah Aset Tetap ( 26 s.d 32)</b>		<b>3.820.778.089.164,46</b>	<b>3.376.278.200.718,15</b>
34	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.4</b>		
35	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.1	17.269.873.124,20	17.170.928.124,20
36	Amortisasi	5.3.1.4.2	(13.608.178.479,18)	(11.469.674.607,30)
37	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.3	323.573.220.831,11	329.554.667.758,87
38	Penyusutan	5.3.1.4.4	(16.711.128.277,63)	(16.449.899.980,63)
39	<b>Jumlah Aset Lainnya (35 s.d 38)</b>		<b>310.523.787.198,50</b>	<b>318.806.021.295,14</b>
40	<b>JUMLAH ASET (20+24+33+39)</b>		<b>4.527.851.856.857,75</b>	<b>4.215.741.205.022,83</b>

No	Uralan	Ref	2020	2019
41	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
42	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>		
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1.017.400.919,00	81.756.796,00
44	Utang Bunga	5.3.2.1.2	568.764.110,04	0,00
45	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	104.197.472.450,00	0,00
46	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	5.3.2.1.4	12.221.853.360,00	12.832.152.277,00
47	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.5	99.546.931,82	471.452.751,24
48	Utang Pengadaan Aset tetap	5.3.2.1.6	20.109.643.142,39	3.137.787.273,00
49	Utang Beban	5.3.2.1.7	6.376.156.399,80	6.102.595.635,99
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.8	2.405.490.768,00	2.405.490.768,00
51	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ( 43 s.d 50)</b>		<b>146.996.328.081,05</b>	<b>25.031.235.501,23</b>
52	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>		
53	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	5.3.2.2.1	90.721.466.600,13	0,00
54	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (53)</b>		<b>90.721.466.600,13</b>	<b>0,00</b>
55	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (51+54)</b>		<b>237.717.794.681,18</b>	<b>25.031.235.501,23</b>
56	<b>EKUITAS</b>			
57	Ekuitas	5.3.3	4.290.134.062.176,57	4.190.709.969.521,60
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (62+65)</b>		<b>4.527.851.856.857,75</b>	<b>4.215.741.205.022,83</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



## 4. LAPORAN OPERASIONAL



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

No	Laporan Keuangan	Ref	2020	2019
1	Laporan Operasional	5.4.		
2	Pendapatan	5.4.1		
3	Pendapatan Asli Daerah	5.4.1.1		
4	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	137.352.854.306,49	144.573.313.841,58
5	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	10.587.020.785,00	9.356.813.899,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	0,00	6.427.468.649,72
7	Lain-Lain PAD yang Sah	5.4.1.1.4	59.729.728.203,40	60.333.536.256,98
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d.7)		207.669.603.294,89	220.691.132.647,28
9	Pendapatan Transfer	5.4.1.2		
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.4.1.2.1		
11	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	5.4.1.2.1	42.618.138.800,00	50.711.391.400,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	5.4.1.2.1	76.288.983.970,00	108.919.106.053,00
13	Dana Alokasi Umum-LO	5.4.1.2.1	878.495.803.000,00	979.541.981.000,00
14	Dana Alokasi Khusus-LO	5.4.1.2.1	341.433.329.045,00	369.115.932.438,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.4.1.2.2		
16	Dana Penyesuaian - LO	5.4.1.2.2	34.033.249.000,00	35.281.887.000,00
17	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.1.2.3		
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.3	94.597.961.688,01	97.921.828.469,99
19	Bantuan Keuangan Provinsi - LO	5.4.1.2.3	60.181.790.088,04	52.126.675.547,76
20	Jumlah Pendapatan Transfer (11 s.d.19)		1.527.649.255.591,05	1.693.618.801.908,75
21	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.4.1.3		
22	Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	234.516.947.774,00	157.112.590.929,00
23	Dana Darurat		0,00	0,00
24	Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	0,00	0,00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (22 s.d.24)		234.516.947.774,00	157.112.590.929,00
26	Jumlah Pendapatan		1.969.835.806.659,94	2.071.422.525.485,03
27	Beban	5.4.2		
28	Beban Pegawai	5.4.2.1	778.147.469.580,80	801.983.412.593,63
29	Beban Persediaan	5.4.2.2	110.760.307.621,44	105.132.645.384,63
30	Beban Jasa	5.4.2.3	325.091.134.991,07	316.897.128.505,21
31	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	48.413.467.036,90	68.436.694.122,12
32	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	114.909.742.979,00	186.863.590.783,20
33	Beban Bunga	5.4.2.6	6.640.021.232,90	1.591.500.000,00
35	Beban Hibah	5.4.2.7	70.937.102.569,23	52.136.415.474,72
36	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	52.776.764.000,00	156.975.000,00
37	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	268.658.964.522,20	236.141.402.002,26
38	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10	10.155.560.674,31	9.753.496.699,77
39	Beban Lain-lain	5.4.2.11	13.811.312.675,28	29.072.529.722,95
40	Beban Transfer	5.4.2.12	119.928.098.241,78	124.604.510.433,61
41	Jumlah Beban (28 s.d 40)		1.920.229.946.124,91	1.932.770.300.722,10
42	Surplus/Defisit dari Operasi (26-41)		49.605.860.535,03	138.652.224.762,93

No	Laporan Keuangan	Ref	2020	2019
43	Kegiatan Non Operasional	5.4.3		
44	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
45	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
46	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1	14.303.678.138,21	2.391.082.519,28
47	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(1.011.538.161,00)	0,00
48	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
49	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2	(41.734.947.128,43)	20.938.631.824,42
50	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (44 s.d. 49)		(28.442.807.153,22)	(18.547.569.305,14)
51	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (42 s.d. 50)		21.163.053.381,81	120.104.655.457,79
52	Pos Luar Biasa	5.4.4		
53	Pendapatan Luar Biasa	5.4.4.1	0,00	0,00
54	Beban Luar Biasa	5.4.4.2	0,00	185.171.250,00
55	Jumlah Pos Luar Biasa (53 s.d. 54)		0,00	185.171.250,00
56	Surplus/Defisit (51-55)		21.163.053.381,81	119.919.484.207,79

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



## 5. LAPORAN ARUS KAS



**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Ref	2020	2019
1	2	3	4	5
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	123.984.849.438,59	127.726.414.584,48
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	10.587.020.785,00	9.356.813.899,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	6.427.468.649,72	5.411.498.182,71
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	61.820.843.525,81	58.002.021.644,20
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	57.994.104.860,00	57.191.542.634,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	121.570.089.813,00	168.697.515.815,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	878.495.803.000,00	975.360.613.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	341.433.329.045,00	369.030.717.438,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.1.9	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.10	34.033.249.000,00	35.281.887.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.1.11	94.769.169.236,01	151.007.901.431,46
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.1.12	64.877.737.953,80	52.126.675.547,76
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah	5.5.1.1.13	422.775.027.155,00	413.177.316.928,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)</b>		<b>2.218.768.692.261,73</b>	<b>2.422.370.918.104,61</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.1.2		
18	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	778.157.769.580,80	801.972.252.593,63
19	Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	588.919.199.812,75	673.086.534.349,35
20	Pembayaran Bunga	5.5.1.2.3	6.071.257.122,86	1.591.500.000,00
21	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	94.011.117.113,63	92.162.721.570,78
22	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	81.916.000,00	225.875.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.6	417.248.717.375,78	421.482.773.539,61
24	Pembayaran Bantuan Subsidi	5.5.1.2.7	0,00	0,00
25	Pembayaran Belanja tak terduga	5.5.1.2.8	83.437.934.386,50	1.315.136.250,00
26	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d 25)</b>		<b>1.967.927.911.392,32</b>	<b>1.991.836.793.303,37</b>
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26)</b>		<b>250.840.780.869,41</b>	<b>430.534.124.801,24</b>
28	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan</b>	5.5.2		
29	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.2.1		
30	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.5.2.1.2	0,00	119.600.000,00
31	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (30)</b>		<b>0,00</b>	<b>119.600.000,00</b>
32	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.2.2		
33	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	11.173.619.758,00	2.718.461.818,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	86.207.313.243,95	115.271.959.386,79
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	46.269.351.733,32	107.067.706.327,93
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	421.459.755.370,02	172.575.951.051,76
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	17.666.875.466,00	27.272.495.605,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6	11.261.257.971,00	5.000.000.000,00
39	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d 38)</b>		<b>594.038.173.542,29</b>	<b>429.906.574.189,48</b>
40	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-39)</b>		<b>-594.038.173.542,29</b>	<b>-429.786.974.189,48</b>
41	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	5.5.3		
42	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.3.1		
43	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1.1	273.067.043.387,57	0,00
44	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (43)</b>		<b>273.067.043.387,57</b>	<b>0,00</b>
45	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.5.3.2		
46	Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.2.1	78.148.104.337,44	0,00
47	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (46)</b>		<b>78.148.104.337,44</b>	<b>0,00</b>
48	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (44-47)</b>		<b>194.918.939.050,13</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4		
50	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.5.4.1		
51	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.5.4.1.1	151.871.997.171,00	135.751.261.771,00
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD	5.5.4.1.2	9.169.339.209,00	11.357.417.430,06
53	Koreksi SILPA Bunga Deposito tahun lalu	5.5.4.1.3	0,00	12.537.637,20
54	Pendapatan LRA ditangguhkan	5.5.4.1.4	15.008.612,00	0,00
55	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (51 s.d 54)</b>		<b>161.056.344.992,00</b>	<b>147.121.216.838,26</b>

No	Uraian	Ref	2020	2019
1	2	3	4	5
56	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-PPKD	5.5.4.2.1	151.772.772.171,00	135.850.486.771,00
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)-Bendahara SKPD	5.5.4.2.2	8.233.695.086,00	11.837.086.289,06
59	Pengeluaran Rekening Penampungan PBB	5.5.4.2.3	0,00	1.752.334,00
60	Jumlah Arus Keluar Kas (57 s.d 59)		160.006.467.257,00	147.689.325.394,06
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55-60)		1.049.877.735,00	(588.108.555,80)
62	Kenaikan/Penurunan Kas (27+40+48+61)		(147.228.575.887,75)	179.042.055,96
63	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara		157.430.017.295,14	157.250.975.239,18
64	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas Dibendahara Pengeluaran		10.201.441.407,39	157.430.017.295,14
65	Kas Sekolah yang tidak masuk LRA 2017 (PSG)		0,00	0,00
66	Saldo Akhir KAS		10.201.441.407,39	157.430.017.295,14
67	Kas Di Kas Daerah	5.5.5	2.345.445.063,72	37.622.729.581,25
68	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.5.6	207.100.860,00	6.589.700,00
69	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	225.839.463,00	47.025.861,00
70	Kas di Bendahara FKTP	5.5.8	1.367.017.664,88	1.773.830.037,80
71	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.9	1.164.855.599,79	2.246.845.658,09
72	Kas di Sekolah - BOS	5.5.10	4.391.182.758,00	15.732.996.457,00
73	Deposito	5.5.11	600.000.000,00	80.000.000.000,00
74	Investasi Jangka Pendek	5.5.12	0,00	40.000.000.000,00
75	Saldo Akhir Kas		10.201.441.407,39	157.430.017.295,14

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok



## 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	2020	2019
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>5.6.1</b>	<b>4.190.709.969.521,60</b>	<b>4.018.435.287.001,09</b>
2	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>5.6.2</b>	<b>21.163.053.381,81</b>	<b>119.919.484.207,79</b>
3	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>	<b>5.6.3</b>		
4	Koreksi saldo awal kas FKTP	5.6.3.1	0,00	12.795.357,20
5	Koreksi Piutang tahun lalu	5.6.3.2	0,00	(167.687.534,00)
6	Koreksi Saldo Awal Piutang Lain-Lain	5.6.3.3	0,00	(15.025.588,00)
7	Koreksi lebih salur	5.6.3.4	(4.627.638.238,00)	(3.580.341.533,00)
8	Koreksi kurang salur	5.6.3.5	78.366.385.178,00	55.843.764.791,98
9	Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.6	0,00	167.687.534,00
10	Koreksi Saldo Awal Persediaan	5.6.3.7	692.027.738,93	577.390.312,77
11	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	5.6.3.8	(4.251.838.314,25)	43.848.000,00
12	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	5.6.3.9	8.747.619.889,00	(2.496.945,05)
13	Koreksi Saldo Awal Hutang Tahun Lalu	5.6.3.10	0,00	(257.720,00)
14	Koreksi Pendapatan Tahun Lalu		0,00	(68.181.818,18)
15	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu	5.6.3.11	337.452.751,24	0,00
16	Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	5.6.3.12	(1.197.605.427,76)	(476.296.545,00)
17	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Lalu	5.6.3.13	194.635.696,00	0,00
18	<b>Total Koreksi (4 s.d. 16)</b>		<b>78.261.039.273,16</b>	<b>52.355.198.312,72</b>
19	<b>EKUITAS AKHIR (1+2+17)</b>	<b>5.6.4</b>	<b>4.290.134.062.176,57</b>	<b>4.190.709.969.521,60</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan LO;
10. Beban; dan
11. Arus kas.



Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan perubahannya;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 406 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 136 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

29. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 245 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 205 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 17 November 2020.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **II. Kebijakan Keuangan/Fiskal dan Ekonomi Makro**

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Ekonomi Makro

#### **III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Anggaran
- 3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 3.3 Dana Diluar APBD

#### **IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

#### **V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1 Pendapatan-LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Transfer
  - 5.1.4 Pembiayaan
  - 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
  - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
  - 5.2.2 Koreksi Kesalahan Saldo Anggaran Lebih Awal
  - 5.2.3 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
  - 5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- 5.2.5 Lain-lain
  - 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)
    - 5.3.1 Pendapatan-LO
    - 5.3.2 Beban Daerah
    - 5.3.3 Kegiatan Non Operasional
    - 5.3.4 Pos Luar Biasa
  - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca
    - 5.5.1 Aset
    - 5.5.2 Kewajiban
    - 5.5.3 Ekuitas
  - 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
    - 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    - 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
    - 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
    - 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD**
- 6.1 Struktur Organisasi
- VII. Penutup**

**BAB II**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL**  
**DAN EKONOMI MAKRO**

**2.1 Kebijakan Keuangan**

**2.1.1 Kebijakan Pendapatan**

Pendapatan daerah merupakan faktor sangat penting berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan umum bagi masyarakat, melaksanakan pembangunan disamping menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri di daerah. Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2020, kebijakan pendapatan dilakukan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juli tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Banyuasin diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mempertimbangkan:
  - a. Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
  - b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester 2 tahun anggaran 2020;
2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Migas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Penyesuaian Alokasi Dana Penyesuaian yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa PNSD berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Peraturan Presiden.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
  - b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya;
  - c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
  - d. Bantuan Keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pemerintah daerah menciptakan suatu kebijakan perencanaan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat dan tidak memberatkan dunia usaha terutama masyarakat kurang mampu. Kaitannya dengan kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan. Disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, *income* perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesenjangan fiskal terutama dengan pengurangan Dana Bagi Hasil Migas yang dikucurkan pemerintah Pusat dan selama ini menjadi andalan penerimaan daerah termasuk Kabupaten Banyuasin.

Pada Tahun Anggaran 2020, tiga kebijakan penting sebagaimana yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya akan terus dilaksanakan dimasa depan yaitu:

1. Menumbuh kembangkan pemikiran kewirausahaan pada masing-masing SKPD untuk tidak hanya berorientasi kepada belanja, tetapi sebaliknya juga berorientasi kepada sikap/perilaku menghasilkan, termasuk pelayanan prima yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah;
2. Menggalang potensi-potensi daerah yang dapat memperbesar skala ekonomi masyarakat Banyuasin sehingga dapat bertambah objek-objek pajak dan atau retribusi baru; dan
3. Melaksanakan secara kontinu upaya intensifikasi pendapatan daerah, tanpa menyebabkan pemberatan ekonomi dalam masyarakat di daerah.

### **2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu

dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah pada perubahan tahun 2020 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsenkuensi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD. Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penganggulangan kemiskinan.
2. Belanja daerah berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar – benar bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Penyesuaian alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus mempunyai tolak ukur yang jelas serta *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time* (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demi terwujudnya 7 (tujuh) program prioritas.
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut.
  - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
  - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang – undangan;
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan lain – lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait dengan peraturan perundang – undangan; dan

- e. Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari pusat maupun provinsi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
6. Kebijakan Belanja Pegawai mempedomani :
  - a. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi; dan
  - c. Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
7. Kebijakan Belanja Hibah didasarkan :
  - a. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
  - b. Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
  - c. Hibah diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  - d. Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tetapi dibutuhkan oleh kelompok masyarakat/perorangan.
8. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial  
 Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
9. Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan penggunaannya didasarkan:
  - a. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa penerima bantuan.
  - b. Bantuan keuangan bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana



pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Penerima Bantuan.

- c. Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyuasin urusan pemerintahan daerah yang bukan merupakan kewenangan kabupaten tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Kabupaten, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Bantuan keuangan tersebut disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan.
10. Belanja Tidak Terduga  
Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, COVID-19 dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti – bukti yang sah.
11. Belanja dalam Rangka Memenuhi Kewajiban pada Pihak Ketiga  
Belanja pada kategori ini diperuntukan untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga berupa Hutang terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi tidak tersedia dana untuk pembayarannya termasuk jaminan pekerjaan. Ketidakmampuan membayar tersebut dikarenakan perubahan kebijakan ditingkat Pusat maupun Provinsi, sehingga pendapatan yang telah direncanakan untuk membiayai kegiatan tersebut tidak terpenuhi sebagai akibat penundaan dana transfer maupun pengurangan dana transfer ke daerah.

## 2.2 Ekonomi Makro

Visi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2022 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banyuasin yang Berdaya Saing, Aman, Nyaman, yang Warganya Guyub dan Kreatif berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan menuju Keadilan dan Kesejahteraan untuk semua” (Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera)**. Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan dimasa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Banyuasin untuk periode 2018-2022, sebagai berikut.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan demokratis di Banyuasin;
3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dengan nilai-nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang;
4. Meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Ekonomi menuju Banyuasin yang sejahtera; dan
5. Meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.

Kabupaten Banyuasin dibentuk karena dengan pertimbangan pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya Kabupaten

Musi Banyuasin serta diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Banyuasin dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 yang diresmikan tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ibu kota Pangkalan Balai.

Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 km<sup>2</sup>, terletak di 1,3°-4° Lintang Selatan dan 104 ° 40' - 105 ° 15' Bujur Timur dan terbagi menjadi 21 Kecamatan, 17 Kelurahan serta 288 Desa. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.494,48Km<sup>2</sup> sekitar 30,70% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Karang Agung Ilir dengan wilayah seluas 137,92 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,16% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80% wilayah berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan 20% berombak sampai bergelombang berupa lahan kering, dengan sebaran ketinggian 0-40 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Selat Bangka.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan dan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

### **2.2.1. Struktur Ekonomi**

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

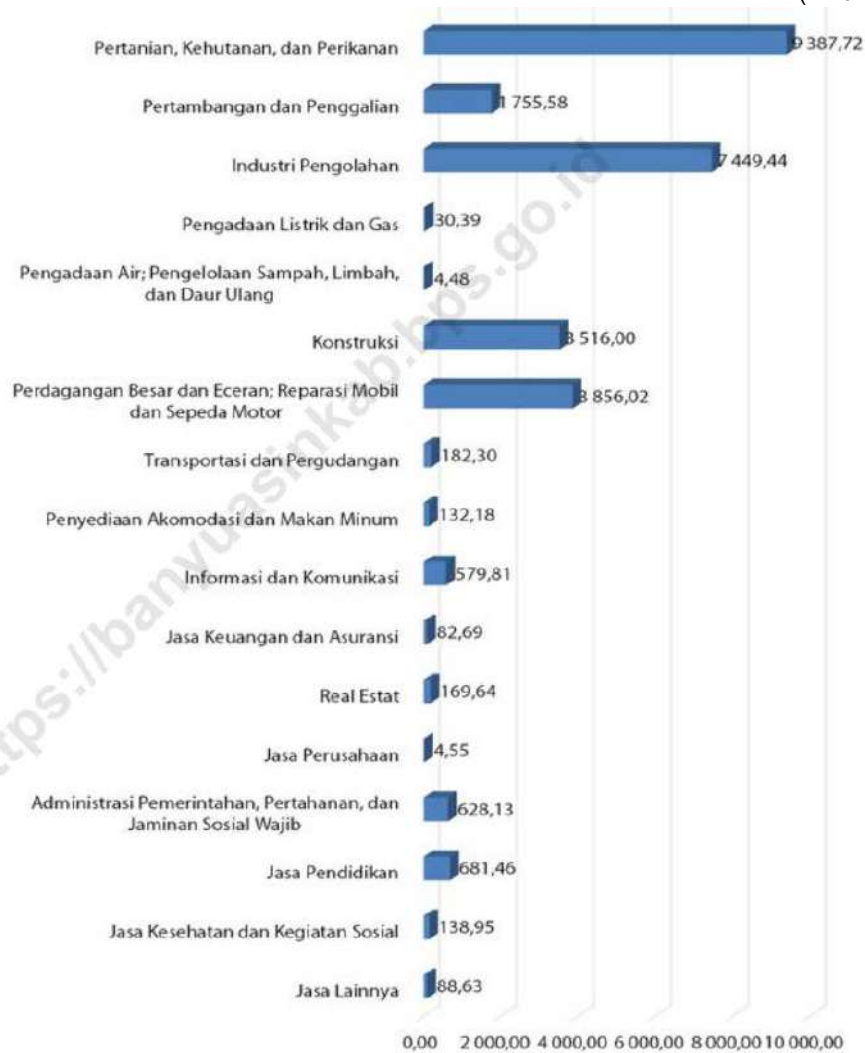
### **2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Tabel berikut menggambarkan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banyuasin tahun 2019.

**Tabel 2.1.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banyuasin, 2019**  
*(miliar rupiah)*



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin/ BPS- Statistics of Banyuasin Regency

Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi Produk Domestik Bruto menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Tabel berikut menggambarkan PDB atas dasar harga berlaku menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Banyuasin tahun 2015-2019.

**Tabel 2.1.2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Banyuasin**  
**Tahun 2015 s.d. 2019**

(miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran/Type of Expenditure	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption Expenditure</b>	14 371,21	15 619,93	16 513,03	18 018,60	...
<b>Pengeluaran Konsumsi LNPR/NPISH Consumption Expenditure</b>	274,73	299,64	324,28	370,79	...
<b>Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/Government Consumption Expenditure</b>	1 687,29	1 691,69	1 887,02	2 020,02	...
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto/Gross Fixed Capital Formation</b>	6 186,79	6 872,83	7 374,80	7 672,23	...
<b>Perubahan Inventori/Changes in Inventories</b>	603,23	428,28	447,57	- 156,15	...
<b>Ekspor Barang dan Jasa/Exports of Goods and Services</b>	5 547,04	6 041,46	6 554,45	7 427,67	...
<b>Dikurangi: Impor Barang dan Jasa/Less: Import of Goods and Services</b>	7 847,88	8 220,89	8 597,35	8 812,53	...
<b>Diskrepansi Statistik <sup>1</sup>/Statistical Discrepancies <sup>1</sup></b>	...	...	...	...	...
<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	20 822,41	22 732,94	24 503,79	26 540,63	...

## BAB III

### IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Bagian Ketiga Pasal 160 menyebutkan bahwa:

1. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
2. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
3. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
5. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
6. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
7. Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.

Selain itu, terkait penanganan pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan aturan terkait percepatan penanganan pandemi diantaranya :

1. Instruksi Presiden No. 04 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19.
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.

7. Salinan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Terkait dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuasin, terdapat tiga kali pergeseran anggaran, satu kali perubahan anggaran dan dua kali pergeseran setelah perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020, rincian pergeseran dan perubahan APBD dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Desember 2019.
2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Desember 2019.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 7 Februari 2020.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 13 April 2020.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 22 April 2020.
6. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 19 Mei 2020.
7. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 162 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 186 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 30 Juli 2020.
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 205 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 12 Oktober 2020.
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 205 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 09 November 2020.
11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 245 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 205 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 17 November 2020.

Rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 terdapat pada lampiran 1.

Rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin yang tergambar dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 245 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 205 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 3.1.1**  
**Rincian Struktur APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	2.288.039.403.432,43	2.224.006.629.416,73	97,20
Belanja	2.210.108.238.083,44	2.133.456.109.634,83	96,53
Transfer	418.915.997.476,50	417.248.717.375,78	99,60
Surplus (Defisit)	(340.984.832.127,51)	(326.698.197.546,88)	95,81
Pembiayaan Netto	340.984.832.127,51	335.867.229.423,27	98,50
SILPA	0,00	9.169.031.876,39	

### 3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

#### 3.2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2020 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp2.288.039.403.432,43 dalam rangka membiayai operasional SKPD mencapai sebesar Rp2.224.006.629.416,73, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1.2**  
**Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	229.786.620.409,43	202.820.182.399,12	26.966.438.010,31	88,26
2	Pendapatan Transfer	1.634.689.076.023,00	1.598.411.419.862,61	36.277.656.160,39	97,78
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	423.563.707.000,00	422.775.027.155,00	788.679.845,00	99,81
	<b>Jumlah</b>	<b>2.288.039.403.432,43</b>	<b>2.224.006.629.416,73</b>	<b>64.032.774.015,70</b>	<b>97,20</b>

Dari tabel tersebut diatas, realisasi pendapatan tahun 2020 lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp64.032.774.015,70 atau sebesar 2,80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019 sebesar Rp225.776.418.793,88.

Tabel berikut menggambarkan anggaran dan realisasi pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2020:

**Tabel 3.1.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	25.101.391.200,00	25.200.651.933,00	100,40
2	RSUD	19.905.597.900,00	21.148.819.506,00	106,25
3	SAT POL PP, Damkar Dan Penyelamatan	47.250.000,00	48.723.915,00	103,12
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.620.000.000,00	1.313.692.800,00	81,09
5	Dinas Perhubungan	1.564.150.000,00	1.070.868.589,00	68,46
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.350.000.000,00	1.492.742.693,00	110,57

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.514.925.000,00	2.073.693.000,00	82,46
8	Dinas Perikanan	567.000.000,00	708.900.000,00	125,03
9	Sekretariat Daerah	186.310.968,75	191.200.000,00	102,62
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4.457.970.000,00	4.369.977.488,00	98,03
11	Kecamatan Rambutan	2.362.500,00	350.000,00	14,81
12	Kecamatan Talang Kelapa	4.725.000,00	875.000,00	18,52
13	BPKAD	18.734.937.840,68	20.416.319.252,64	108,97
14	PPKD	2.058.252.783.023,00	2.021.186.447.017,61	98,20
15	Badan Pendapatan Daerah	153.730.000.000,00	124.783.368.222,48	81,17
	<b>Jumlah</b>	<b>2.288.039.403.432,43</b>	<b>2.224.006.629.416,73</b>	<b>97,20</b>

Secara rinci penjelasan hambatan yang ditemui dalam mencapai target pendapatan dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

### 3.2.2 Belanja dan Transfer

Total realisasi Belanja dan Transfer sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.550.704.826.963,61 atau 97,02% dari anggaran sebesar Rp2.629.024.235.559,94. Belanja terealisasi sebesar Rp2.133.456.109.587,83 atau 96,53% sedangkan transfer terealisasi sebesar Rp417.248.717.375,78 atau 99,60%. Berikut rincian realisasi belanja dan transfer:

**Tabel 3.1.4**  
**Realisasi per Jenis Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	(%)
1	Belanja Operasi	1.515.690.479.304,23	1.467.241.259.630,04	48.449.219.674,19	96,80
2	Belanja Modal	599.020.340.578,68	582.776.915.571,29	16.243.425.007,39	97,29
3	Belanja Tidak Terduga	95.397.418.200,53	83.437.934.386,50	11.959.483.814,03	87,46
		<b>2.210.108.238.083,44</b>	<b>2.133.456.109.587,83</b>	<b>76.652.128.495,61</b>	<b>96,53</b>
4	Transfer	418.915.997.476,50	417.248.717.375,78	1.667.280.100,72	99,60
	<b>Total</b>	<b>2.629.024.235.559,94</b>	<b>2.550.704.826.963,61</b>	<b>78.319.408.596,33</b>	<b>97,02</b>

Secara terinci penyerapan belanja per masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.5**  
**Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2020**

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	681.168.357.163,12	671.212.350.371,44	9.956.006.791,68	98,54
2	Dinas Kesehatan	257.953.066.748,44	238.198.466.783,20	19.754.599.965,24	92,34
3	Rumah Sakit Umum Daerah	44.252.645.155,21	43.656.795.669,99	595.849.485,22	98,65
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	115.881.179.193,11	114.427.481.444,50	1.453.697.748,61	98,75
5	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	415.119.646.983,25	405.265.534.679,84	9.854.112.303,41	97,63
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	12.850.950.464,83	12.188.088.094,00	662.862.370,83	94,84
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	16.023.842.249,81	15.835.939.445,00	187.902.804,81	98,83



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
8	Dinas Sosial	7.185.211.472,21	6.932.007.044,80	253.204.427,41	96,48
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.148.387.060,43	7.929.761.660,00	218.625.400,43	97,32
10	Dinas Ketahanan Pangan	5.320.791.749,17	5.121.716.278,00	199.075.471,17	96,26
11	Dinas Lingkungan Hidup	14.458.344.827,24	13.581.111.014,29	877.233.812,95	93,93
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.617.975.592,00	11.089.876.046,00	528.099.546,00	95,45
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.232.040.153,23	9.074.880.576,00	157.159.577,23	98,30
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.360.599.514,67	15.033.545.334,00	327.054.180,67	97,87
15	Dinas Perhubungan	37.231.800.848,44	35.566.343.773,00	1.665.457.075,44	95,53
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.274.342.961,68	14.783.864.213,00	490.478.748,68	96,79
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.951.332.443,10	11.541.727.898,21	409.604.544,89	96,57
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	10.871.926.947,03	10.715.079.317,00	156.847.630,03	98,56
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.346.794.822,32	7.210.855.862,00	135.938.960,32	98,15
20	Dinas Perikanan	7.625.684.424,76	7.371.114.420,00	254.570.004,76	96,66
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	35.522.444.239,01	30.422.897.261,00	5.099.546.978,01	85,64
22	Dinas Perkebunan dan Perternakan	8.284.961.959,56	8.011.568.491,00	273.393.468,56	96,70
23	DPRD	26.801.066.287,09	26.209.034.004,00	592.032.283,09	97,79
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.068.527.000,00	748.153.320,00	320.373.680,00	70,02
25	Sekretariat Daerah	82.097.256.430,44	80.858.444.265,00	1.238.812.165,44	98,49
26	Sekretariat DPRD	76.721.450.532,58	75.615.737.291,00	1.105.713.241,58	98,56
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	7.048.817.345,29	6.321.848.384,00	726.968.961,29	89,69
28	Kecamatan Banyuasin I	5.470.111.050,73	5.355.124.341,00	114.986.709,73	97,90
29	Kecamatan Banyuasin III	8.391.280.591,54	8.261.863.704,00	129.416.887,54	98,46
30	Kecamatan Betung	4.570.294.446,63	4.388.511.534,00	181.782.912,63	96,02
31	Kecamatan rantau Bayur	2.219.760.560,90	2.146.298.434,00	73.462.126,90	96,69
32	Kecamatan Pulau Rimau	2.324.553.140,52	2.252.205.600,00	72.347.540,52	96,89
33	Kecamatan Talang Kelapa	15.938.816.411,63	15.655.919.559,00	282.896.852,63	98,23
34	Kecamatan Rambutan	4.106.780.610,21	4.030.110.508,00	76.670.102,21	98,13
35	Kecamatan Tungkal Ilir	2.019.136.875,40	1.939.882.584,00	79.254.291,40	96,07
36	Kecamatan Tanjung Lago	2.409.588.761,58	2.268.207.166,00	141.381.595,58	94,13
37	Kecamatan Sembawa	2.095.487.333,42	2.052.938.240,00	42.549.093,42	97,97
38	Kecamatan Suak Tapeh	2.109.334.023,66	2.043.201.884,00	66.132.139,66	96,86
39	Kecamatan Banyuasin II	2.264.688.409,59	2.219.273.002,00	45.415.407,59	97,99
40	Kecamatan Makarti Jaya	3.390.365.394,67	3.275.063.025,00	115.302.369,67	96,60
41	Kecamatan Muara Padang	2.769.605.407,95	2.692.626.044,00	76.979.363,95	97,22
42	Kecamatan Muara Sugihan	2.425.867.305,01	2.305.059.361,00	120.807.944,01	95,02
43	Kecamatan Muara Telang	2.228.334.019,66	2.132.861.303,00	95.472.716,66	95,72
44	Kecamatan Air Salek	2.159.008.424,46	2.081.942.269,00	77.066.155,46	96,43
45	Kecamatan Sumber Marga Telang	1.872.259.946,44	1.784.481.371,00	87.778.575,44	95,31
46	Kecamatan Air Kumbang	2.162.233.741,78	2.088.685.487,00	73.548.254,78	96,60
47	Kecamatan Selat Penuguan	1.940.800.272,02	1.800.056.279,00	140.743.993,02	92,75

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
48	Kecamatan Karang Agung Ilir	1.439.572.271,43	1.284.263.931,00	155.308.340,43	89,21
49	Inspektorat Daerah	7.521.532.291,98	7.265.708.967,00	255.823.324,98	96,60
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.198.842.496,04	10.825.291.067,20	373.551.428,84	96,66
51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.132.065.275,81	19.203.152.935,00	928.912.340,81	95,39
52	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	124.596.218.200,53	111.395.141.509,36	13.201.076.691,17	89,40
53	Badan Pendapatan Daerah	22.086.568.345,00	20.466.904.760,00	1.619.663.585,00	92,67
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.845.687.906,83	7.317.111.783,00	528.576.123,83	93,26
	<b>Jumlah</b>	<b>2.210.108.238.083,44</b>	<b>2.133.456.109.587,83</b>	<b>76.652.128.495,61</b>	<b>96,53</b>

Pencairan belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar 97,02%, secara rinci penjelasan atas efisiensi dan hambatan yang ditemui dalam mencapai realisasi belanja dan transfer dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

Rincian Belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.6**  
**Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
Pelayanan Umum	481.778.888.943,67	457.961.669.102,56	23.817.219.841,11
Ketertiban dan Keamanan	28.874.792.714,64	28.024.027.539,00	850.765.175,64
Ekonomi	118.224.846.506,53	110.133.055.879,21	8.091.790.627,32
Lingkungan Hidup	27.631.244.707,41	26.192.283.737,29	1.438.960.970,12
Perumahan dan Fasilitas Umum	517.778.553.296,19	507.032.762.401,34	10.745.790.894,85
Kesehatan	316.966.572.418,32	296.289.084.787,19	20.677.487.631,13
Pariwisata dan Budaya	3.061.902.000,00	2.944.077.000,00	117.825.000,00
Pendidikan	696.375.241.432,47	686.244.273.050,44	10.130.968.382,03
Perlindungan Sosial	19.416.196.064,21	18.634.876.090,80	781.319.973,41
	<b>2.210.108.238.083,44</b>	<b>2.133.456.109.587,83</b>	<b>76.652.128.495,61</b>

### 3.3 Dana Diluar APBD

Selain Dana yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terdapat Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari dana Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat. Berikut rincian dana diluar APBD:

#### 3.3.1 Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp591.363.100,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp592.598.000,00. Rincian belanja Dana Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.7**  
**Realisasi Belanja Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020**

Tahun	Sumber Dana	SKPD	Anggaran	Realisasi				Total
				Non Aset	Gedung/ Bangunan	Jalan/ Jaringan	Jumlah Aset	
2020	TUGAS PEMBANTUAN (TP)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>592.598.000</b>	<b>591.363.100</b>				<b>591.363.100</b>
		- BINAPETA dan PKK (110942)	446.890.000	446.511.600	-	-	-	446.511.600
		- PKP2T (350170)	145.708.000	144.851.500				144.851.500
		<b>Jumlah</b>	<b>592.598.000</b>	<b>591.363.100</b>	-	-	-	<b>591.363.100</b>

### 3.3.2 Dana Dekonsentrasi

Dana Dekonsentrasi Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.326.004.650,00,00 atau 99,76% dari anggaran sebesar Rp3.333.805.000,00. Rincian Dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.8**  
**Realisasi Belanja Dana Urusan Bersama dan Sektoral Kantor Pusat**  
**Tahun Anggaran 2020**

Tahun	Sumber Dana	SKPD	Anggaran	Realisasi		Realisasi
				Non Aset	Aset	
2020	DEKONSENTRASI	Badan Ketahanan Pangan	718.680.000,00	710.879.650,00	0,00	710.879.650,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		- Peralatan TIK SD	353.000.000,00	88.250.000,00	264.750.000,00	353.000.000,00
		- Peralatan TIK SMP	2.262.125.000,00	271.455.000,00	1.990.670.000,00	2.262.125.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>3.333.805.000,00</b>	<b>1.070.584.650,00</b>	<b>2.255.420.000,00</b>	<b>3.326.004.650,00</b>

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi**

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan SKPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional, sedangkan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

##### **4.4.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) dan dilaporkan dalam Neraca.

Setara Kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin mencakup Kas dan Setara Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah, seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Kas dan Setara Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara Kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

## **Pengakuan**

### **1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD.

### **2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Pengeluaran**

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Pengakuan Kas yang dikeluarkan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh bendahara untuk uang persediaan.

### **3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C (*Letter of Credit*), pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - 1) Kas diterima di kas umum daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

### **4. Pengeluaran Kas dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

- a. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang;
- b. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang;

- c. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal pemerintah, menyebabkan pertambahan investasi pada sisi aset;
- d. Pembentukan dana cadangan menyebabkan pertambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu;
  - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

#### **5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer**

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah kepada pemerintah Kabupaten Banyuwasin dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

#### **6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Kabupaten Banyuwasin. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

#### **7. Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya**

Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/pengeluaran non anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi LRA, tetapi mempengaruhi kas secara umum seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas lainnya dengan akun lawan ekuitas.

Pada tahun berikutnya saat jasa giro di terima di rekening kas daerah dicatat sebagai kas dengan akun lawan kas lainnya dan ekuitas dengan akun lawan pendapatan jasa giro.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian Kas dan Setara Kas;
2. Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas Piutang untuk Penyisihan Piutang tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur Piutang, jenis/karakteristik Piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Piutang yang timbul dari peristiwa perjanjian/perikatan lainnya, terdiri atas: Pemberian Pinjaman, Penjualan, Kemitraan dan Pemberian fasilitas;
- c. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Kekurangan Transfer; dan

- d. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah dan penjualan secara angsuran atas aset daerah, terdiri atas: Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Piutang yang timbul akibat penjualan angsuran.

### **Pengakuan**

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, tetapi belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah Piutang dapat diukur.

Pengakuan Piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan Piutang:

1. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat tagihan baik berupa ketetapan dan/atau dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
4. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat diakui apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya atau kurang salur, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau Piutang bagi daerah penerima.
5. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
6. Piutang TP/TGR Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur



pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

## **Pengukuran dan Penilaian**

### **1. Pengukuran**

a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b. Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

#### 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

#### 2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

#### 3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

#### 4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut.

- 1) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

- 2) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka Piutang atas DBH tidak disajikan; dan
  - 3) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang sampai akhir periode pelaporan belum ditransfer.
- d. Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
  - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

### Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Penggolongan kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

No.	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau</li> <li>2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau</li> <li>3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau</li> <li>4) Wajib Pajak likuid; dan/atau</li> <li>5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.</li> </ol>
2	Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau</li> <li>2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau</li> <li>3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau</li> <li>4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding</li> </ol>
3	Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau</li> <li>2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau</li> <li>3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau</li> <li>4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.</li> </ol>
4	Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau</li> <li>2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau</li> <li>3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau</li> <li>4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).</li> </ol>

## 2. Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan.

### Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas Piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, tetapi bila kualitas Piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

### Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian Piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan Piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan Piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel menjadi extrakomptabel*.

Penghapusbukuan Piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan Piutang. Penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan Piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

## 2. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.

### Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun Piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian Piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan Kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan lain-lain.

#### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk Beban Dibayar Dimuka diantaranya:

1. Asuransi yang belum jatuh tempo; dan
2. Sewa yang belum jatuh tempo.

### Pengakuan

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran, tetapi pemerintah daerah belum menerima manfaat atas pembayaran tersebut, yang selanjutnya pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas manfaat yang telah diperoleh. Beban Dibayar Dimuka harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban serta periode masa manfaat yang jelas.

## **Pengukuran dan Penilaian**

Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai nominal pembayaran dikurangi dengan perhitungan nilai manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah. Perhitungan nilai manfaat dilakukan secara bulanan yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. Nilai manfaat yang telah diterima dicatat sebagai beban pada akhir periode pelaporan.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban Dibayar Dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun Beban Dibayar Dimuka diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai Persediaan.

Persediaan dapat meliputi:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

## **Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengakuan nilai persediaan tersebut sebagai pengurang atas Beban Persediaan tahun berjalan. Untuk persediaan hewan dan tanaman yang jumlahnya sulit diukur, maka inventarisasi fisik dilakukan dengan perhitungan sampling terhadap persediaan tersebut. Sebagai contoh, untuk mendapatkan nilai persediaan bibit ikan yang akan dijual pada akhir periode pelaporan, Dinas Perikanan melakukan perhitungan persediaan bibit ikan dengan metode sampling. Metode ini diawali dengan pemisahan ukuran ikan (sortir), selanjutnya hasil klasifikasi dihitung per 500 ekor secara manual, kemudian ditimbang dalam satuan kilogram. Hasil penimbangan 500 ekor pertama merupakan satuan yang digunakan untuk mendapatkan 500 ekor berikutnya. Setelah mendapatkan total berat bibit ikan, dikonversikan kembali menjadi satuan per ekor, untuk mendapatkan nilai satuan per ekor, dikalikan dengan harga wajar. Hasil inventarisasi persediaan bibit ikan tersebut dituangkan dalam berita acara inventarisasi fisik persediaan.

## **Pengukuran dan Penilaian**

Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada Beban Persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi serta rampasan.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang Persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang

disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3. Jenis, jumlah, dan nilai Persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.5 Kebijakan Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.

##### **a. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwasin dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan Kas; dan
3. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok Investasi Jangka Pendek antara lain adalah:

1. Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
2. Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
3. Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai Investasi Jangka Pendek, antara lain:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
4. Reksadana.

## **b. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

### **2. Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **Pengakuan**

### **1. Perolehan Investasi**

Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan biaya lainnya dari pasar modal. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

### **2. Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil



investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada LRA.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada LRA.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada LRA.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada Neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada Neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam CaLK.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di Neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam CaLK.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam CaLK.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas investasi tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.

Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada Neraca, hal ini diungkapkan dalam CaLK.

### **3. Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

#### **Pengukuran dan Penilaian**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

#### **1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek**

- a. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
  - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
  - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

#### **2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:**

- a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen:
  - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
  - 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
  - 3) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- c. Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
- d. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter.
- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- g. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam Laporan Operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
- h. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

**a. Metode Biaya**

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

**b. Metode Ekuitas**

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

### c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan: (i) dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, dan (ii) dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi; dan
- c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

### Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan pada Neraca dengan membandingkan nilai investasi tahun sebelumnya. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;

- g. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil/negatif;
- h. Perubahan klasifikasi pos investasi; dan
- i. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

#### **4.4.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau untuk kepentingan umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **Pangakuan**

#### **1. Perolehan Aset Tetap**

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal dalam bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat

dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

***Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.*** Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah yang dibuktikan secara hukum.

## **2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu Aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya serta jalan, irigasi dan jaringan kecuali barang bercorak kebudayaan adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan Aset Tetap Lainnya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- b. Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

### **Pengukuran dan Penilaian**

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya lainnya sampai dengan Aset Tetap dapat dipergunakan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan Neraca Awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca Awal tersebut disusun jika biaya perolehan tidak ada.

#### **1. Komponen Biaya**

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya perencanaan;
- b. Biaya lelang;
- c. Biaya persiapan tempat;
- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);

- e. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- g. Biaya konstruksi;
- h. Biaya pematangan; dan
- i. Biaya dokumen kepemilikan aset.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun, kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan Aset Tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan Aset Tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional, maksudnya adalah sebagai berikut.

- a. Penggunaan atribusi secara proporsional diterapkan jika dalam pengadaan tidak terdapat nilai perolehan barang yang lebih dari 80 % dari harga total; dan
- b. Penggunaan nilai terbesar diterapkan jika dalam pengadaan barang terdapat nilai perolehan barang yang nilai satuannya lebih dari 80% dari harga total.

Namun, untuk aset tetap tanah berapapun nilai perolehan seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai perolehan masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut.

#### **a. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai (termasuk biaya yang dikeluarkan dalam tahap perencanaan dan tahap persiapan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum). Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai Aset Tetap Tanah, melainkan disajikan sebagai Persediaan. Apabila ada tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca pemerintah melainkan hanya diungkap secara memadai pada CaLK.

#### **b. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### **c. Gedung dan Bangunan**

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini

antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

#### **d. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, irigasi, jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

#### **e. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Nilai Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman dicatat sebesar nilai wajar, dan tidak dilakukan penyusutan terhadap aset tetap lainnya tersebut, melainkan dilakukan penghapusan pada saat hewan dan tanaman dinyatakan kadaluarsa atau mati.

#### **f. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Kebijakan perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam Kebijakan Akuntansi tersendiri.

### **2. Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan.

Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

### **3. Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh perolehan aset secara gabungan diantaranya pembangunan gedung bertingkat yang terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning)*, dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk



masing-masing komponen gedung bertingkat. Alokasi biaya masing-masing komponen adalah nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **4. Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Banyuwangi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset Tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

#### **5. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum**

Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos/fasum diperoleh.

#### **6. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari proses tersebut diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun - nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut.

- a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.
- c. Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan Aset Tetap.

#### 7. Aset Donasi

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun.

Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### 8. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi kriteria (a) dan minimal salah satu kriteria (b) atau (c) atau (d) sebagai berikut.

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas, manfaat atau mutu produksi; dan
- d. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

##### a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	Lebih dari 75%
3.	Gedung dan Bangunan	Lebih dari 25%
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Lebih dari 30%
5.	Aset Tetap Lainnya	Lebih dari 75%

## b. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan lima tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan baik berupa *overhaul* atau renovasi. Berikut uraian penambahan masa manfaat sesuai persentase renovasi dan *overhaul*:

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/Masa Manfaat	
			% dari nilai buku tanpa penyusutan	Tahun
1	Alat-Alat Besar Darat	10	>75%	5
2	Alat-Alat Besar Apung	8	>75%	4
3	Alat-alat Bantu	7	>75%	4
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	>75%	4
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	>75%	1
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	>75%	6
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	>75%	2
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	>75%	12
9	Alat Bengkel Bermesin	10	>75%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	>75%	1
11	Alat Ukur	5	>75%	3
12	Alat Pengolahan Pertanian	4	>75%	5
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4	>75%	5
14	Alat Kantor	5	>75%	3
15	Alat Rumah Tangga	5	>75%	3
16	Alat Studio	5	>75%	3
17	Alat Komunikasi	5	>75%	3
18	Peralatan Pemancar	10	>75%	5
19	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	>75%	9
20	Alat Kedokteran	5	>75%	3
21	Alat Kesehatan	5	>75%	3
22	Unit-Unit Laboratorium	8	>75%	4
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	>75%	8
24	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	>75%	5
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	>75%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	>75%	4
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	>75%	4
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & instrumentasi	10	>75%	5
29	Senjata Api	10	>75%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	3	>75%	1
31	Senjata Sinar	5	>75%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	4	>75%	2
33	Komputer Unit	4	>75%	2

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/Masa Manfaat	
			% dari nilai buku tanpa penyusutan	Tahun
34	Peralatan Komputer	4	>75%	2
35	Alat Explorasi Topografi	5	>75%	3
36	Alat Explorasi Geofisika	10	>75%	5
37	Alat Pengeboran Mesin	10	>75%	7
38	Alat Pengeboran non Mesin	10	>75%	2
39	Peralatan Sumur	10	>75%	2
40	Peralatan Produksi	10	>75%	2
41	Pengolahan dan Pemurnian	15	>75%	8
42	Alat Bantu Explorasi	10	>75%	7
43	Alat Bantu Produksi	10	>75%	7
44	Alat Deteksi	5	>75%	3
45	Alat Pelindung	5	>75%	2
46	Alat SAR	2	>75%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	10	>75%	6
48	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	>75%	5
49	Unit Peralatan Proses / Produksi	8	>75%	4
50	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	7	>75%	4
51	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	>75%	4
52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	>75%	9
53	Peralatan Olahraga	3	>75%	2
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	>75%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	>45%	15
56	Candi	50	>45%	15
57	Bangunan Menara Perambuan	40	>45%	15
58	Tugu / Tanda Batas	50	>45%	15
59	Jalan	10	>60%	10
60	Jembatan	50	>45%	15
61	Bangunan Air Irigasi	50	>10%	10
62	Bangunan Air Pasang Surut	50	>10%	10
63	Bangunan Pemebangan Rawa dan Polder	25	>10%	5
64	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	>10%	3
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	>10%	3
66	Bangunan Air Bersih/Baku	40	>45%	15
67	Bangunan Air Kotor	40	>45%	15
68	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	>45%	10
69	Instalasi Air Kotor	30	>45%	10
70	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10	>45%	5
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	>45%	5
72	Instalasi Pembangkit Listrik	40	>45%	15
73	Instalasi Gardu Listrik	40	>45%	15
74	Instalasi Pertahanan	30	>45%	5
75	Instalasi Gas	30	>45%	15
76	Instalasi Pengaman	20	>45%	3
77	Instalasi Lain	5	>45%	3
78	Jaringan Air Minum	30	>45%	10
79	Jaringan Listrik	40	>45%	15
80	Jaringan Telepon	20	>45%	10

No	Kelompok Aset	Umur/ Masa Manfaat	Penambahan Umur/Masa Manfaat	
			% dari nilai buku tanpa penyusutan	Tahun
81	Jaringan Gas	30	>45%	10
82	Alat Musik Modern/Band		>75%	2

Untuk penambahan masa manfaat sebagai akibat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang melebihi dari batas masa manfaat standar/ yang telah ditetapkan, maka masa manfaat aset tersebut ditetapkan sebesar batas maksimal masa manfaat aset semula.

## 9. Menambah Kapasitas dan Mutu Produksi

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas produksi atau mengembalikan ke kapasitas produksi normal karena adanya perbaikan/pemeliharaan terhadap Aset Tetap yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya mesin *fotocopy* mempunyai kapasitas produksi sebesar 5.000 lembar dan sudah terpakai sebesar 4.000 lembar sehingga masih terdapat sisa kapasitas produksi 1.000 lembar. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan yang mengembalikan kapasitas produksi mesin *fotocopy* menjadi 5.000 lembar lagi.

Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Sebagai contoh, misalnya jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung kantor dengan luas 200 m<sup>2</sup> ditambah ruangan dengan luas 10 m<sup>2</sup> sehingga luas gedung kantor menjadi 210 m<sup>2</sup>.

Belanja pemeliharaan yang tidak memenuhi unsur tersebut diatas tidak menambah nilai Aset Tetap.

## 10. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap.

## 11. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, bukan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa Aset Tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
28	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	40
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
47	Jalan	10
48	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25

No.	Kelompok Aset	Umur
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara bulanan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- b. untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan dan manfaatnya bahkan bertambah nilainya antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

## 12. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Aset Tetap dibukukan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## 13. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Harga perolehan suatu Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen

dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang. Apabila Aset Tetap dihapuskan atau dilepaskan dan terdapat nilai yang berbeda antara nilai buku dengan nilai jual, maka dicatat di LO.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan;
  - b. Pelepasan;
  - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
  - a. Nilai penyusutan;
  - b. Metode penyusutan yang digunakan;
  - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, tetapi dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan



- disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
  3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, tetapi tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
  4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, tetapi tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca pemerintah. Namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

#### **4.4.7 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu, periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan Konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
4. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

### **Pengakuan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

KDP ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan/diterima direklasifikasi menjadi Aset Tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

### **Pengukuran dan Penilaian**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
4. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke dalam kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan informasi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi untuk KDP;
2. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

3. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
4. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
5. Uang muka kerja yang diberikan; dan
6. Retensi.

#### **4.4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dan Dana Cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah yang belum di proses SKTJM;
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4. Aset Tidak Berwujud; dan
5. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

1. Bangun Guna Serah (BGS)

BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

2. Bangun Serah Guna (BSG)

BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

3. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

4. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Definisi aset tidak berwujud mensyaratkan bahwa aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset tidak berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Berdasarkan jenis sumber daya, aset tidak berwujud pemerintah dapat berupa:

1. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak Paten dan Hak Cipta;
4. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
5. Aset tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
6. Aset tidak berwujud dalam Pengerjaan.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Termasuk aset lainnya biaya perencanaan pembangunan berupa DED yang lebih dari empat tahun periode pelaporan belum diikuti dengan pembangunan fisik. Jika telah diikuti dengan pembangunan fisik, biaya perolehan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

### **Pengakuan**

Tagihan untuk penjualan angsuran diakui pada saat kontrak/berita acara penjualan aset dengan masa jatuh tempo pembayaran lebih dari 12 bulan. Jika angsuran atas tagihan

penjualan angsuran tersebut sudah jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan maka diklasifikasikan sebagai piutang.

Aset yang timbul atau digunakan oleh pihak ketiga diakui sebagai aset lainnya pada saat:

1. Penyerahan Aset Tetap untuk digunakan sebagai aset yang akan diguna usahakan, diantaranya tanah atau bangunan yang dipakai oleh pihak ketiga.
2. Penyerahan Aset Tetap oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah atas perjanjian kerjasama BGS.

Aset tidak berwujud berupa *software* diakui jika terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan untuk operasi normal entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tidak berwujud berupa *software* yang manfaatnya sampai dengan 12 bulan diklasifikasikan sebagai belanja habis pakai, contohnya antivirus yang hanya memiliki masa manfaat sampai dengan satu tahun.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian sebagai berikut:

1. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
2. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai.
3. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
4. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Termasuk Aset Lainnya biaya perencanaan pembangunan berupa Aset Tetap yang lebih dari empat tahun belum diikuti dengan pembangunan fisik. Jika telah diikuti dengan pembangunan fisik, biaya perencanaan pembangunan tersebut akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

### **Pengukuran dan Penilaian**

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo

tagihan penjualan angsuran dan jatuh temponya lebih dari 12 bulan.

2. Uang tunai kerugian negara/daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut, kerugian Negara/daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga. Kerugian negara/daerah berbentuk barang milik Negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan Bendahara.
3. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
  - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
4. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama empat tahun.

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar. Cara perolehan aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

a. Pembelian

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

b. Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c. Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

d. Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di Neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang rusak berat, Aset Tetap yang hilang, dan Aset Tetap yang dipinjam pakai disajikan sebesar nilai buku yang dipindahkan dari Aset Tetap dengan penjelasan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

a. Amortisasi untuk Aset Tak Berwujud dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.



b. Amortisasi untuk Aset Tak Berwujud dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

### Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Aset Lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi;
2. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG);
3. Rincian Aset Lainnya; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*rollover*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun, dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

## **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

### **1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

### **2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

### **3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government - Related events*)**

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan transaksi, tetapi berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya

dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

#### **4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government - Acknowledged Events*)**

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, tetapi kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun, biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut.

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Pemberian izin usaha tertentu yang masa berlakunya lebih dari satu periode akuntansi dan telah diterima pembayarannya tidak termasuk dalam Pendapatan Dibayar Dimuka, tetapi diakui sebagai Pendapatan LO;
- e. Utang Beban, diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
  - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
  - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah, tetapi belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
  - g. Utang Aset Tetap diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
    - 1) Barang yang dibeli sudah diterima; atau
    - 2) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - h. Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui atau dana titipan dari pemerintah pusat untuk disalurkan kembali namun belum disalurkan oleh pemerintah daerah sebesar nilai yang belum disalurkan, misalnya Dana Desa; dan
  - i. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

### **Penghapusan Utang**

Penghapusan Utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pemerintah Daerah baik sebagian maupun seluruhnya. Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan Utang kepada Penyedia Barang/Jasa di Neraca dengan memenuhi persyaratan diantaranya:

1. Penyedia Barang/Jasa membuat Surat Pernyataan Penghapusan Piutang kepada Pemerintah Daerah, dan
2. Melampirkan Berita Acara Selesai Masa Pemeliharaan/*Final Hand Over (FHO)* atas kegiatan yang akan dihapus hutangnya, atau
3. Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerangkan bahwa rekanan telah menyelesaikan masa pemeliharaan pekerjaan tersebut.

Penghapusan Utang yang dilakukan Pemerintah daerah dicatat dengan mengurangi nilai hutang dan menambah surplus dari kegiatan non operasional-penyelesaian kewajiban.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan

perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee* dan sebagainya; dan
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut.

1. Utang PFK, pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
2. Utang PFK, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
3. Utang Transfer, dicatat sebesar nilai kelebihan transfer atau terdapat dana titipan dari pemerintah pusat untuk disalurkan kembali namun belum disalurkan oleh pemerintah daerah sebesar nilai yang belum disalurkan, misalnya Dana Desa;
4. Utang Bunga atas utang pemerintah, harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
6. Pendapatan Diterima Dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, tetapi kasnya telah diterima;
7. Utang Beban, merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan
8. Kewajiban Lancar Lainnya, merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam

kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Kewajiban dalam Laporan Keuangan disajikan di Neraca dengan klasifikasi pos Kewajiban Jangka Pendek untuk Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Transfer, Utang Surat Perbendaharaan Negara dan Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Biaya dan Pendapatan Diterima Dimuka). Sedangkan penyajian pada klasifikasi pos Kewajiban Jangka Panjang Untuk Utang Luar Negeri, Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya.

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan.

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi tentang Kewajiban;
2. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman;
3. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
4. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
5. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

- 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
6. Informasi atas penghapusan utang antara lain mengungkapkan nilai penghapusan utang, nama pihak penyedia barang jasa dan uraian pekerjaan.

#### **4.4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Kabupaten Banyuasin tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

#### **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas  
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
3. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas  
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

#### **Pengukuran dan Penilaian**

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah bersih/netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat



dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan sesuai kelompok Bagan Akun Standar (BAS).

Disamping disajikan pada LO, Pendapatan-LO juga harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari Pendapatan-LO. Pengungkapan Pendapatan-LO dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan-LO;
2. Klasifikasi Pendapatan-LO;
3. Informasi lain yang relevan.

#### **4.4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

#### **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan pendapatan transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:

1. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
2. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## **Pengukuran dan Penilaian**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Pendapatan-LRA;
2. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
3. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **4.4.12 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari: beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan, beban transfer, pos luar biasa, dan beban lain lain.

#### **Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.

Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

### **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Penerimaan kembali dan koreksi beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam LO yang diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Persediaan, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional

Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

### 3. Beban Luar Biasa

Beban ini disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam CaLK.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Beban;
2. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
3. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

#### Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Terkait dengan perolehan aset tetap, entitas akuntansi menganggarkan dan mencatat pengadaan aset tetap ke dalam belanja modal dan belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap. Kriteria untuk memperoleh Belanja Modal sebagai berikut.

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;

3. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
4. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan;
5. Nilai satuan barang yang dibeli lebih dari batasan minimal kapitalisasi; dan
6. Untuk pemeliharaan aset tetap yang melebihi nilai diatas kapitalisasi dan menambah masa manfaat aset.

Pengeluaran/belanja untuk pengadaan Aset Tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi dianggarkan dalam belanja operasional/barang jasa.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal yang perlu disajikan dalam CaLK terkait dengan belanja adalah:

1. Kebijakan Akuntansi tentang belanja;
2. Anggaran dan realisasi belanja sesuai dengan objek belanja berkenaan;
3. Penjelasan mengenai capaian belanja dan penjelasan dan penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah;
4. Penguraian belanja per objek belanja;
5. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
6. Kejadian luar biasa; dan
7. Informasi yang dianggap perlu.

#### **4.4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer dibagi menjadi:

1. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
2. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

### **Klasifikasi**

- a. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber transfer dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar.
- b. Klasifikasi transfer menurut sumber diklasifikasikan antara lain:
  - 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.
  - 2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya.
  - 3) Transfer Pemerintah Provinsi.
  - 4) Transfer/Bagi hasil ke Desa.
  - 5) Transfer/Bantuan Keuangan.

### **Pengakuan**

#### **1. Pendapatan Operasional Transfer**

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer disajikan dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer yaitu:

- a. Pada saat kas diterima; dan
- b. Pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.

#### **2. Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan pada saat diterima dokumen pendukung pembayaran sedangkan untuk dana desa tidak masuk ke beban transfer tetapi merupakan pelunasan hutang.

## **Pengukuran dan Penilaian**

### **1. Pendapatan Operasional Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO, tetapi jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

### **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan

3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi tentang transfer;
2. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan:

- a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman kepada masyarakat berupa dana bergulir, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

#### **Pengakuan**

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan
  - a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;



- b. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
  - c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
    - a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; dan
    - b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

### **Pengukuran dan Penilaian**

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Jika dalam penerimaan pinjaman dari dana bergulir terdapat penerimaan bunga maka harus dipisahkan pokok dan bunganya, untuk penerimaan pokok masuk ke dalam penerimaan pembiayaan sedang untuk pendapatan bunga masuk pada Pendapatan Asli Daerah.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan), Neraca serta diungkap dalam CaLK.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening Kas Umum Daerah) oleh Entitas Akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah, seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto sedangkan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Pembiayaan;
2. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
3. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan;
4. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penyertaan pemerintah daerah;
5. Informasi lain yang dianggap perlu.

#### **4.4.16 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan**

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana Cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

1. Dana Cadangan Pembangunan Jembatan;
2. Dana Cadangan Pembangunan Gedung;
3. Dana Cadangan Pembangunan Waduk;
4. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada; dan
5. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

#### **Pengakuan**

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, dan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan, sedangkan penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan, proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang pencairannya menggunakan mekanisme SP2D LS.

#### **Pengukuran dan Penilaian**

Terdapat tiga jenis pengukuran Dana Cadangan sesuai dengan waktu pengukurannya, yaitu:

1. Pembentukan Dana Cadangan  
Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan  
Penerimaan hasil atas pengelolaan Dana Cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah Dana Cadangan atau dikapitalisasi ke Dana Cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan  
Apabila Dana Cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

## **Penyajian dan Pengungkapan**

Dana Cadangan disajikan di LRA dan Neraca, Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi tentang Dana Cadangan;
2. Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan Dana Cadangan;
3. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
4. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
5. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
6. Sumber Dana Cadangan; dan
7. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

### **4.4.17 Kebijakan Akuntansi BLUD**

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

### **Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

### **Tanggungjawab Pelaporan Keuangan**

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

#### **1. Laporan Realiasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Surplus/defisit-LRA;
- d. Penerimaan pembiayaan;
- e. Pengeluaran pembiayaan;
- f. Pembiayaan neto; dan
- g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

- c. pendapatan hasil kerja sama;
- d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. pendapatan BLUD lainnya.

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

- a. saldo anggaran lebih awal;
- b. penggunaan saldo anggaran lebih;
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. lain-lain; dan
- f. saldo anggaran lebih akhir.

Disamping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam CaLK.

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

- a. Kas dan Setara Kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang dari Kegiatan BLUD;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Aset Lainnya;
- h. Kewajiban Jangka Pendek;
- i. Kewajiban Jangka Panjang; dan
- j. Ekuitas.

Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. Dana titipan pihak ketiga;
- b. Uang jaminan; dan
- c. Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.

Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.

### 4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur LO BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO;

- b. Beban;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d. Kegiatan non operasional;
- e. Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f. Pos luar biasa; dan
- g. Surplus/defisit-LO.

BLUD menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan dari alokasi APBD;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. Pendapatan hasil kerja sama;
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f. Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.

Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLU diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

## **5. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Aktivitas operasi;
- b. Aktivitas investasi;
- c. Aktivitas pendanaan; dan
- d. Aktivitas transitoris.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi.

## **6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut.

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
  - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

## **7. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan**

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.



## **8. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Menjadi Satuan Kerja Biasa**

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun Laporan Keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun Laporan Keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

### **4.4.18 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan**

#### **Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang, kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Jenis koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berikutnya, diantaranya:

1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

2) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

### **Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :

1. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
2. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

### **Perubahan Estimasi Akuntansi**

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

### **Operasi yang Tidak Dilanjutkan**

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, dicatat dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;

2. Fungsi tersebut tetap ada;
3. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

**5.1.1 Pendapatan - LRA**

Jumlah anggaran pendapatan - LRA Tahun 2020 sebesar Rp2.288.039.403.432,43 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 245 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 205 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020. Target pendapatan dapat terealisasi sebesar Rp2.224.006.629.416,73 atau 97,20%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.1**  
**Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	229.786.620.409,43	202.820.182.399,12	200.616.348.310,39	88,26
2	Pendapatan Transfer	1.634.689.076.023,00	1.598.411.419.862,61	1.835.989.382.972,22	97,78
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	423.563.707.000,00	422.775.027.155,00	413.177.316.928,00	99,81
	<b>Jumlah</b>	<b>2.288.039.403.432,43</b>	<b>2.224.006.629.416,73</b>	<b>2.449.783.048.210,61</b>	<b>97,20</b>

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah di atas terlihat bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 88,26%. Tidak optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah diantaranya disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah hanya sebesar 80,65%, Pendapatan Retribusi Daerah hanya sebesar 89,81%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 100,00% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 106,88%, sedangkan Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 97,78% dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 99,81%.

Penyajian pendapatan secara grafik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 5.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020**



Berdasarkan gambar di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki ketergantungan yang besar dari Pendapatan Transfer sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1.598.411.419.862,61 atau 97,78% dari target sebesar Rp1.634.689.076.023,00, rincian pendapatan transfer diuraikan lebih lanjut pada Penjelasan Pos Pendapatan Transfer - LRA.

### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA sebesar Rp202.820.182.399,12 atau 88,26% dari anggaran sebesar Rp229.786.620.409,43. Tidak tercapainya target PAD karena tidak seluruh penerimaan daerah yang ditargetkan dapat mencapai 100,00%. Nilai realisasi PAD memberikan kontribusi terhadap keseluruhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar 9,11%. Berikut realisasi komponen PAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

**Tabel 5.1.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	153.730.000.000,00	123.984.849.438,59	127.726.414.584,48	80,65
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.788.193.468,75	10.587.020.785,00	9.356.813.899,00	89,81
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.427.468.649,72	6.427.468.649,72	5.411.498.182,71	100,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA	57.840.958.290,96	61.820.843.525,81	58.121.621.644,20	106,88
	<b>Jumlah</b>	<b>229.786.620.409,43</b>	<b>202.820.182.399,12</b>	<b>200.616.348.310,39</b>	<b>88,26</b>

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 5.1.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**



### 5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp123.984.849.438,59 atau 80,65% dari anggaran sebesar Rp153.730.000.000,00. Rincian Pendapatan Pajak Daerah pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.3**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Pajak Hotel - LRA	9.500.000.000,00	2.174.805.147,10	3.450.668.375,20	22,89
2	Pajak Restoran - LRA	17.800.000.000,00	6.768.652.571,00	10.108.968.469,30	38,02
3	Pajak Hiburan - LRA	7.000.000.000,00	1.404.762.291,49	3.555.778.410,72	20,06
4	Pajak Reklame - LRA	4.950.000.000,00	793.339.430,00	755.925.599,50	16,02
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	40.000.000.000,00	40.295.094.610,00	39.411.218.614,65	100,73
6	Pajak Parkir - LRA	3.300.000.000,00	752.670.927,00	1.288.100.934,00	22,80
7	Pajak Air Tanah - LRA	4.200.000.000,00	4.410.876.705,00	3.361.698.025,11	105,02
8	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	80.000.000,00	31.942.000,00	25.670.000,00	39,92
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	5.400.000.000,00	1.727.934.668,00	785.969.600,00	31,99
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	22.500.000.000,00	24.881.985.646,00	15.173.063.862,00	110,58
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	39.000.000.000,00	40.742.785.443,00	49.809.352.694,00	104,46
	<b>Jumlah</b>	<b>153.730.000.000,00</b>	<b>123.984.849.438,59</b>	<b>127.726.414.584,48</b>	<b>80,65</b>

Tabel diatas menggambarkan bahwa hanya empat jenis dari 11 jenis Pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target yang dianggarkan. Rincian masing-masing pendapatan pajak diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp2.174.805.147,10 atau 22,89% dari target sebesar Rp9.500.000.000,00. Rendahnya capaian realisasi Pajak Hotel diantaranya karena:
  - a. Terbitnya Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 333 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Pembatalan Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Banyuwasin akibat dampak wabah Covid-19.
  - b. Menurunnya omset pemasukan hotel akibat rendahnya okupansi sehingga turut menurunkan setoran pajak hotel yang diterima oleh Kabupaten Banyuwasin.
2. Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp6.768.852.571,00 atau 38,02% dari target sebesar Rp17.800.000.000,00. Tidak tercapainya target ini diantaranya karena:
  - a. Terbitnya Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 333 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Pembatalan Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Banyuwasin akibat dampak wabah Covid-19.
  - b. Dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak pelaku usaha menutup usahanya.

- c. Sepinya pengunjung dan berkurangnya daya beli masyarakat sehingga menurunkan omset penjualan yang mengakibatkan banyak pelaku usaha mengurangi jumlah pegawai.
3. Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp1.404.762.291,49 atau 20,06% dari target sebesar Rp7.000.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi pajak hiburan ini diantaranya karena:
  - a. Terbitnya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 333 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Pembatalan Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Banyuasin akibat dampak wabah Covid-19.
  - b. Dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak pelaku usaha menutup usahanya.
  - c. Sepinya pengunjung sehingga menurunkan omset yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak hiburan.
4. Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp793.339.430,00 atau 16,02% dari target sebesar Rp4.950.000.000,00. Rendahnya capaian target ini diantaranya karena:
  - a. Terbitnya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 333 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Pembatalan Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Banyuasin akibat dampak wabah Covid-19.
  - b. Dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya wajib pajak reklame yang memasang reklame di wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terealisasi sebesar Rp40.295.094.610,00 atau 100,73% dari target sebesar Rp40.000.000.000,00. Dapat dicapainya target ini karena Wajib Pajak Penerangan Jalan tidak terdampak secara langsung dengan pandemi Covid-19 sehingga Pajak Penerangan Jalan masih dapat mencapai target yang ditetapkan.
6. Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp752.670.927,00 atau 22,80% dari target sebesar Rp3.300.000.000,00. Rendahnya capaian target ini diantaranya karena:
  - a. Terbitnya Keputusan Bupati Nomor 333 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Pembatalan Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Banyuasin akibat dampak wabah Covid-19.
  - b. Dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak pelaku usaha menutup usahanya sehingga juga berimbas kepada Pajak Parkir yang diterima oleh Kabupaten Banyuasin.
7. Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp4.410.876.705,00 atau 105,02% dari target sebesar Rp4.200.000.000,00. Tercapainya realisasi Pajak Air Tanah karena Wajib Pajak Air Tanah tidak terdampak secara langsung dengan pandemi Covid-19 sehingga Pajak Air Tanah masih dapat mencapai target yang ditetapkan.
8. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp31.942.000,00 atau 39,92% dari target sebesar Rp80.000.000,00. Tidak tercapainya target ini diantaranya karena sulitnya dijangkau Objek Pajak Sarang Burung Walet dimana lokasi Objek Pajak yang lebih banyak di daerah perairan dan sulitnya menemui Wajib Pajak untuk melakukan konfirmasi serta semakin menurunnya kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak.



9. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp1.727.934.668,00 atau 31,99% dari target sebesar Rp5.400.000.000,00. Rendahnya capaian target karena dengan beredarnya wabah Covid-19 ini membuat kegiatan pembangunan yang menggunakan mineral bukan logam dan batuan lainnya berkurang sehingga berdampak atas penerimaan pajak yang seharusnya diterima Kabupaten Banyuasin.
10. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp24.881.985.646,00 atau 110,58% dari target sebesar Rp22.500.000.000,00. Dapat dicapainya target PBB diantaranya karena terus dioptimalkannya potensi pendapatan PBB P2 baik melalui pendataan, pemutakhiran data, pendaftaran, penilaian individual dan penagihan.
11. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp40.742.785.443,00 atau 104,46% dari target sebesar Rp39.000.000.000,00. Dapat dicapainya target realisasi ini karena semakin meningkatnya transaksi jual beli untuk perumahan komersil serta adanya penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dan terdapat lelang pabrik kelapa sawit yang nilainya cukup besar.

#### 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tercapai sebesar Rp10.587.020.785,00 atau 89,81% dari anggaran sebesar Rp11.788.193.468,75. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.4**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Retribusi Jasa Umum - LRA	5.597.175.000,00	4.735.080.908,00	4.353.881.149,00	84,59
2	Retribusi Jasa Usaha - LRA	1.725.960.968,75	1.480.737.389,00	1.382.181.181,00	85,79
3	Retribusi Perizinan Tertentu – LRA	4.465.057.500,00	4.371.202.488,00	3.620.751.569,00	97,89
	<b>Jumlah</b>	<b>11.788.193.468,75</b>	<b>10.587.020.785,00</b>	<b>9.356.813.899,00</b>	<b>89,81</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan pendapatan Retribusi Daerah - LRA tidak mencapai target. Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp4.735.080.908,00 atau 84,59% dari anggaran sebesar Rp5.597.175.000,00. Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.480.737.389,00 atau 85,79% dari anggaran sebesar Rp1.725.960.968,75 dan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp4.371.202.488,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp4.465.057.500,00.

#### 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp4.735.080.908,00 atau 84,59% dari anggaran sebesar Rp5.597.175.000,00. Rincian Retribusi Jasa umum dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.5**  
**Rincian Retribusi Jasa Umum – LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	1.579.500.000,00	1.149.636.000,00	1.225.578.000,00	72,78
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	205.000.000,00	128.242.300,00	130.755.000,00	62,55
3	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	999.000.000,00	798.929.000,00	803.826.000,00	79,97
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	593.100.000,00	490.059.000,00	456.443.000,00	82,62
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	353.925.000,00	278.515.000,00	243.149.000,00	78,69
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Barang/Beban - Truck - LRA	400.000.000,00	242.302.000,00	280.215.000,00	60,57
7	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	47.250.000,00	47.623.915,00	40.498.220,00	100,79
8	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	1.350.000.000,00	1.492.742.693,00	1.108.531.929,00	110,57
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	52.650.000,00	44.700.000,00	44.390.000,00	84,90
10	Retribusi Pelayanan Tera Ulang - LRA	10.000.000,00	43.731.000,00	0,00	437,31
11	Retribusi Bea balik Nama - LRA	6.750.000,00	18.600.000,00	20.495.000,00	275,55
	<b>Jumlah</b>	<b>5.597.175.000,00</b>	<b>4.735.080.908,00</b>	<b>4.353.881.149,00</b>	<b>84,59</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa empat jenis retribusi jasa umum melebihi target anggaran dan tujuh jenis retribusi jasa umum tidak mencapai target yang dianggarkan. Rincian Retribusi Jasa Umum dijelaskan sebagai berikut.

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA terealisasi sebesar Rp1.149.636.000,00 atau 72,78% dari anggaran sebesar Rp1.579.500.000,00. Jenis Retribusi ini merupakan Retribusi Pengambil/pengumpul sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, tidak tercapainya target retribusi ini dikarenakan kurang optimalnya kegiatan penagihan retribusi ke objek retribusi karena dampak dari pandemi Covid-19 yang menimbulkan kekhawatiran untuk pelaksanaan penagihan yang dilakukan langsung ke objek retribusi serta juga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat.

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA terealisasi sebesar Rp128.242.300,00 atau 62,55% dari anggaran sebesar Rp205.000.000,00. Target retribusi ini tidak dapat tercapai diantaranya karena kenaikan target pendapatan yang hanya bersisa tiga bulan sebelum akhir tahun sangat mempengaruhi kemampuan pencapaian target pendapatan, selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 dimana pemerintah melakukan pembatasan pergerakan/aktivitas serta kesadaran masyarakat untuk berdiam di rumah juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi.

3. **Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA**

Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA terealisasi sebesar Rp798.929.000,00 atau 79,97% dari anggaran sebesar Rp999.000.000,00, tidak tercapainya target ini diantaranya karena akibat pengaruh pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya penjualan di Pasar yang ada dalam Kabupaten Banyuasin.
4. **Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA**

Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA terealisasi sebesar Rp490.059.000,00 atau 82,62% dari anggaran sebesar Rp593.100.000,00. Tidak tercapainya target ini karena dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas di pasar menurun sehingga juga menurunkan retribusi yang diterima pemerintah daerah.
5. **Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA**

Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA terealisasi sebesar Rp278.515.000,00 atau 78,69% dari anggaran sebesar Rp353.925.000,00. Tidak optimalnya pencapaian target ini karena adanya pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas di pasar tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga juga berpengaruh terhadap retribusi yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah.
6. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Barang/Beban - LRA**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Mobil Barang/Beban - Truk - LRA terealisasi sebesar Rp242.302.000,00 atau 60,57% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Retribusi ini tidak dapat dicapai diantaranya karena Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap penurunan perekonomian masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi juga menurun.
7. **Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA**

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA terealisasi sebesar Rp47.623.915,00 atau 100,79% dari anggaran sebesar Rp47.250.000,00. Dapat dicapainya jenis retribusi ini karena maksimalnya petugas pemeriksa dan penagih retribusi dalam melakukan tugasnya memungut retribusi.
8. **Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA**

Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA terdapat terealisasi sebesar Rp1.492.742.693,00 atau 110,57% dari anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00. Dapat tercapainya target retribusi ini karena diantaranya karena terdapat pembayaran sisa retribusi tahun 2019 sebesar Rp153.813.372,00, sedangkan sisa pendapatan retribusi berasal dari pembayaran tahun 2020 sebesar Rp1.338.929.321,00.
9. **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA**

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA terealisasi sebesar Rp44.700.000,00 atau 84,90% dari anggaran sebesar Rp52.650.000,00. Hal ini tidak dapat dicapai diantaranya karena dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas di pasar menurun sehingga juga berpengaruh kepada masyarakat yang beraktivitas di pasar.

#### 10. Retribusi Pelayanan Tera Ulang - LRA

Retribusi Pelayanan Tera Ulang - LRA terealisasi sebesar Rp43.731.000,00 atau 437,31% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Dapat dicapainya target retribusi ini diantaranya karena pandemi Covid-19 tidak berpengaruh secara langsung dengan kebutuhan tera ulang dari perusahaan sehingga masih tingginya permintaan tera ulang oleh perusahaan yang masa teranya telah habis.

#### 11. Retribusi Bea Balik Nama - LRA

Retribusi Bea Balik Nama - LRA terdapat terealisasi sebesar Rp18.600.000,00 atau 275,55% dari anggaran sebesar Rp6.750.000,00. Retribusi dapat dicapai karena semakin patuhnya masyarakat dalam membayar retribusi.

#### 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.480.737.389,00 atau 85,79% dari anggaran sebesar Rp1.725.960.968,75. Rincian Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.6**  
**Rincian Retribusi Jasa Usaha - LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LRA	540.000.000,00	561.602.100,00	400.560.400,00	104,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - LRA	23.973.468,75	17.000.000,00	21.300.000,00	70,91
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor - LRA	15.525.000,00	11.100.000,00	12.900.000,00	71,49
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LRA	152.212.500,00	168.500.000,00	148.230.000,00	110,70
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	953.750.000,00	691.365.289,00	769.095.781,00	72,48
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	40.500.000,00	31.170.000,00	30.095.000,00	76,96
	<b>Jumlah</b>	<b>1.725.960.968,75</b>	<b>1.480.737.389,00</b>	<b>1.382.181.181,00</b>	<b>85,79</b>

Tabel di atas menggambarkan dari enam jenis pendapatan Retribusi Jasa Usaha diketahui bahwa dua jenis melebihi target yang dianggarkan dan empat jenis retribusi tidak mencapai target. Rincian Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LRA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium terealisasi sebesar Rp561.602.100,00 atau 104,00% dari anggaran sebesar Rp540.000.000,00. Hal ini dapat dicapai karena meningkatnya jumlah objek retribusi dan tingkat kepatuhan perusahaan untuk melakukan analisa di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain itu, dengan bertambahnya Parameter Contoh Uji yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup juga menambah pelanggan yang melakukan pemeriksaan.

2. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - LRA**  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - LRA terealisasi sebesar Rp17.000.000,00 atau 70,91% dari anggaran sebesar Rp23.973.468,75. Tidak tercapainya target retribusi ini diantaranya dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 ini secara langsung mempengaruhi berkurangnya kegiatan yang ada di masyarakat, sehingga retribusi pemakaian ruangan tidak tercapai.
3. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor - LRA**  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor - LRA terealisasi sebesar Rp11.100.000,00 atau 71,49% dari anggaran sebesar Rp15.525.000,00. Sewa Retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor terbagi dua SKPD, yakni Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan.  
Untuk sewa bus milik Pemkab Banyuasin pada Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp5.700.000,00. Tidak tercapainya target retribusi ini karena dengan adanya pandemi Covid-19 ini kegiatan yang ada di masyarakat berkurang, sehingga jenis retribusi ini juga terdampak penurunan penerimaan.  
Sedangkan untuk sewa mobil Derek milik Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp5.400.000,00. Masih dapat dicapainya target penerimaan retribusi ini karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa penderekan terutama pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
4. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA**  
Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp168.500.000,00 atau 110,70% dari anggaran sebesar Rp152.212.500,00. Dapat optimalnya penerimaan retribusi ini diantaranya karena pengelola mess terus melakukan sosialisasi terhadap fasilitas penginapan yang dimiliki sehingga pengguna dari Aula Mess dan tamu yang menginap baik dari masyarakat umum maupun SKPD yang menyewa mess untuk acara kedinasan semakin meningkat.
5. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA**  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA terealisasi sebesar Rp691.365.289,00 atau 72,48% dari anggaran sebesar Rp953.750.000,00. Rendahnya capaian retribusi ini diantaranya karena adanya dampak pandemi Covid-19 membuat banyak perusahaan yang mengurangi kegiatan bongkar muat maupun berlayar sehingga menurunkan penerimaan retribusi daerah, selain itu juga belum adanya penertiban dari pihak Pemerintah Daerah selaku penegak Peraturan Daerah sehingga banyak dermaga kecil yang belum mau membayar retribusi.
6. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA**  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp31.170.000,00 atau 76,96% dari anggaran sebesar Rp40.500.000,00. Target retribusi ini tidak tercapai diantaranya karena akibat pandemi Covid-19 mempengaruhi turunnya aktivitas ekonomi yang secara langsung juga mempengaruhi permintaan benih dari masyarakat dan sistem kerja yang diatur bergantian selama masa pandemi Covid-19 juga mempengaruhi hasil produksi benih. Selain itu, terdapat kendala dimana akses menuju Balai Benih Ikan (BBI) masih kurang baik sehingga pada musim penghujan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor yang berimbas pada aktifitas distribusi benih.

### 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

Retribusi Perizinan Tertentu - LRA terealisasi sebesar Rp4.371.202.488,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp4.465.057.500,00. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu - LRA dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.7**  
**Rincian Retribusi Perizinan Tertentu - LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	4.462.087.500,00	4.369.937.488,00	3.619.816.569,00	97,93
2	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	2.970.000,00	1.265.000,00	935.000,00	42,59
	<b>Jumlah</b>	<b>4.465.057.500,00</b>	<b>4.371.202.488,00</b>	<b>3.620.751.569,00</b>	<b>97,89</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa kedua jenis Retribusi Perizinan Tertentu tidak mencapai target. Rincian masing-masing pendapatan retribusi dapat dilihat pada uraian berikut:

#### 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - LRA

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - LRA terealisasi sebesar Rp4.369.937.488,00 atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp4.462.087.500,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi dua objek pemungut, Retribusi yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terealisasi sebesar Rp4.368.712.488,00 serta Retribusi yang dipungut oleh SKPD Kecamatan yakni Kecamatan Rambutan terealisasi sebesar Rp350.000,00 dan Kecamatan Talang Kelapa sebesar Rp875.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 membuat menurunnya pertumbuhan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang serta menurunnya perusahaan-perusahaan baru yang mendirikan bangunan-bangunan baru baik pabrik maupun pergudangan di Kabupaten Banyuasin. Untuk target penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Kecamatan yang tidak tercapai disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait kewajiban pengurusan IMB dan hanya mengurus IMB apabila ada keperluan sebagai persyaratan usaha.

#### 2. Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi - LRA

Retribusi Izin Trayek Orang Pribadi - LRA terealisasi sebesar Rp1.265.000,00 atau 42,59% dari anggaran sebesar Rp2.970.000,00. Target retribusi ini tidak dapat dicapai diantaranya karena akibat pandemi Covid-19 mempengaruhi turunnya aktivitas ekonomi yang secara langsung juga mempengaruhi perekonomian masyarakat sehingga keinginan masyarakat untuk mengurus perizinan trayek juga menurun.

### 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Pangkalan Balai. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal sebesar Rp6.427.468.649,72 atau 100,00% dari target sebesar Rp6.427.468.649,72. Realisasi tersebut merupakan penerimaan deviden tunai tahun buku 2019 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2019.

### 5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

Lain-Lain PAD yang Sah - LRA terealisasi sebesar Rp61.820.843.525,81 atau 106,88% dari anggaran sebesar Rp57.840.958.290,96 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.1.8**  
**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.476.458.765,00	2.542.612.688,00	3.167.690.133,90	102,67
2	Penerimaan Bunga Deposito - LRA	6.000.000.000,00	6.684.862.492,40	10.345.411.545,77	111,41
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	87.750.000,00	101.578.225,16	49.985.193,00	115,75
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	82.706.381,00	20.183.288,50	100,00
5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	0,00	779.505.257,20	310.529.524,76	100,00
6	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	5.172.700,00	5.688.800,00	100,00
7	Pendapatan Dari Pengembalian - LRA	0,00	504.170.019,51	1.008.484.136,64	100,00
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0,00	29.115.000,00	84.000.000,00	100,00
9	Pendapatan BLUD - LRA	19.905.597.900,00	21.148.819.506,00	13.945.699.315,00	106,24
10	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0,00	1.100.000,00	7.650.000,00	100,00
11	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	162.000.000,00	0,00	119.600.000,00	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	25.101.391.200,00	25.200.651.933,00	24.740.114.729,00	100,39
13	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	4.107.760.425,96	4.740.549.323,54	4.316.584.977,63	115,40
	<b>Jumlah</b>	<b>57.840.958.290,96</b>	<b>61.820.843.525,81</b>	<b>58.121.621.644,20</b>	<b>106,88</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari seluruh tiga belas rincian Lain-Lain PAD yang Sah melampaui target. Penjelasan masing-masing Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada uraian berikut:

#### 1. Penerimaan Jasa Giro - LRA

Penerimaan Jasa Giro - LRA terealisasi sebesar Rp2.542.612.688,00 atau 102,67% dari anggaran sebesar Rp2.476.458.765,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan jasa giro yang diterima di rekening kas umum daerah sebesar

Rp2.542.448.647,00 dan Jasa Giro dari Rekening RSUD Makarti Jaya Kelas D Pratama sebesar Rp28.233,00 dan Pendapatan jasa giro tahun yang masih ada di rekening penampungan iuran JKN KIS sebesar Rp135.808,00.

2. Penerimaan Bunga Deposito - LRA

Penerimaan Bunga Deposito - LRA terealisasi sebesar Rp6.684.862.492,40 atau 111,41% dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00. Penerimaan bunga deposito merupakan penerimaan bunga atas penempatan dana *idle* pada beberapa Bank. Berikut tabel rincian bunga deposito yang diterima RKUD Tahun 2020.

**Tabel 5.1.9**  
**Rincian Bunga Deposito yang diterima RKUD Tahun 2020**

No	Nama Bank	Nilai
1	Rincian Bunga Deposito pada Bank Mandiri Cabang Sukajadi	533.835.616,40
2	Rincian Bunga Deposito pada BRI KCP Sako Palembang	825.753.519,00
3	Rincian Bunga Deposito pada BRI KCP Pangkalan Balai	1.961.233.142,00
4	Rincian Bunga Deposito pada Bank Jawa Barat dan Banten Cab. Palembang	1.548.971.475,00
5	Rincian Bunga Deposito pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai	1.815.068.740,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.684.862.492,40</b>

3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA terealisasi sebesar Rp101.578.225,16 atau 115,75% dari anggaran sebesar Rp87.750.000,00. Pendapatan tersebut merupakan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atas suatu kerugian daerah/negara.

4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA terealisasi sebesar Rp82.706.381,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaan.

5. Pendapatan Denda Pajak - LRA

Pendapatan Denda Pajak - LRA terealisasi sebesar Rp779.505.257,20 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan pada sembilan jenis Pendapatan Pajak Daerah. Rincian per pendapatan denda pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.10**  
**Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	0,00	2.930.050,30	471.438,27	100,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA	0,00	54.847.835,00	3.037.458,00	100,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	0,00	3.237.322,00	440.630,00	100,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	0,00	7.743.020,00	9.328.843,69	100,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA	0,00	15.767.147,44	26.237.050,65	100,00



No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
6	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C - LRA	0,00	785.500,00	861.671,00	100,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah - LRA	0,00	4.503.878,46	3.752.904,15	100,00
8	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0,00	335.020,00	74.000,00	100,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0,00	689.355.484,00	266.325.529,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	0,00	<b>779.505.257,20</b>	<b>310.529.524,76</b>	<b>100,00</b>

6. Pendapatan Denda Retribusi - LRA

Pendapatan Denda Retribusi - LRA terealisasi sebesar Rp5.172.700,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp00,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.559.000,00 dan denda keterlambatan Retribusi Jasa Analisa Laboratorium sebesar Rp1.613.700,00.

7. Pendapatan dari Pengembalian - LRA

Pendapatan dari Pengembalian - LRA terealisasi sebesar Rp504.170.019,51 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp298.621.686,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp205.548.333,51.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA terealisasi sebesar Rp29.115.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jenis retribusi ini terdiri dari:

- a. Penerimaan atas sewa kantor operasional Koperasi Mekar Sari di Jalan Tanjung Api-Api KM 42 sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemkab Banyuasin dengan Koperasi Mekar Sari Mandiri tanggal 24 Februari Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 183/KPTS/DISNAKERTRANS/2020 tentang Penetapan Sewa Barang Milik Daerah dan Tarif Sewa sebagian dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin sebesar Rp24.480.000,00.
- b. Penerimaan atas sewa lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sumsel Babel yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Jl. H. Bass M. Amin Nomor 01 Pangkalan Balai sesuai dengan Berita Acara Negosiasi Sebagian Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang Digunakan sebagai ATM antara Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan PT. BPD Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai tanggal 6 November Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 775/KPTS/VII/2020 tentang Penetapan Tarif Sewa Sebagian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Lingkungan Gedung Kantor Bupati Banyuasin sebesar Rp4.635.000,00.

9. Pendapatan BLUD - LRA

Pendapatan BLUD - LRA terealisasi sebesar Rp21.148.819.506,00 atau 106,24% dari anggaran sebesar Rp19.905.597.900,00. Rincian realisasi pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.11**  
**Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2020**

No	Pendapatan BLUD	Nilai
1	Penerimaan Klaim Pasien BPJS	10.913.580.200,00
2	Penerimaan Klaim Pasien Jamkesda dan jampersal	1.905.137.400,00
3	Penerimaan Klaim Pasien PT. Jasa Raharja	42.793.300,00
4	Penerimaan Klaim Pasien PT. Taspen	2.363.100,00
5	Penerimaan Klaim Pasien Covid - 19	6.457.429.700,00
6	Penerimaan Pasien Umum	1.615.734.800,00
7	Penerimaan Ambulance	15.447.000,00
8	Penerimaan Diklat	48.600.000,00
9	Penerimaan Parkir	2.000.000,00
10	Penerimaan Jasa Giro	36.904.439,00
11	Lain - Lain	108.829.567,00
	<b>Total</b>	<b>21.148.819.506,00</b>

10. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA terealisasi sebesar Rp1.100.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan atas Pelanggaran Perda yang di terapkan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

11. Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA terealisasi sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggaran sebesar Rp162.000.000,00. Anggaran pendapatan tersebut merupakan rencana penjualan aset daerah. Tidak terealisasinya pendapatan tersebut karena pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak ada penjualan aset daerah.

12. Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA

Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA terealisasi sebesar Rp25.200.651.933,00 atau 100,39% dari anggaran sebesar Rp25.101.391.200,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp24.527.122.733,00 dan Dana Non Kapitasi melalui RKUD sebesar Rp673.529.200,00. Rincian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dari BPJS Per Puskesmas Tahun 2020 pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.12**  
**Rincian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN dari BPJS**  
**Per Puskesmas Tahun 2020**

NO	NAMA PUSKESMAS	KAPITASI	NON KAPITASI	JUMLAH
1	PKM SUMBER	543.886.729,00	0,00	543.886.729,00
2	PKM TANJUNG LAGO	980.129.306,00	15.394.200,00	995.523.506,00

NO	NAMA PUSKESMAS	KAPITASI	NON KAPITASI	JUMLAH
3	PKM TIRTA HARJA	448.015.650,00	8.672.600,00	456.688.250,00
4	PKM KARANG MANUNGGAL	400.232.550,00	0,00	400.232.550,00
5	PKM MARYANA	1.983.594.000,00	37.257.000,00	2.020.851.000,00
6	PKM CINTA MANIS BARU	716.143.896,00	45.762.700,00	761.906.596,00
7	PKM SRIKATON	1.121.375.300,00	0,00	1.121.375.300,00
8	PKM DAYA UTAMA	793.451.625,00	357.100,00	793.808.725,00
9	PKM SIMPANG RAMBUTAN	559.689.150,00	55.966.900,00	615.656.050,00
10	PKM MARGO MULYO	331.415.400,00	0,00	331.415.400,00
11	PKM SUNGAI DUA	614.614.500,00	4.833.700,00	619.448.200,00
12	PKM SUNGSANG	569.866.200,00	40.960.500,00	610.826.700,00
13	PKM MAKARTI JAYA	686.976.600,00	46.576.200,00	733.552.800,00
14	PKM TALANG JAYA TELANG	952.245.203,00	0,00	952.245.203,00
15	PKM MUARA TELANG	1.081.827.287,00	11.875.600,00	1.093.702.887,00
16	PKM PANGKALAN BALAI	1.851.995.502,00	99.109.000,00	1.951.104.502,00
17	PKM TALANG JAYA BETUNG	484.796.448,00	35.871.800,00	520.668.248,00
18	PKM PENGUMBUK	559.609.950,00	33.672.700,00	593.282.650,00
19	PKM DANA MULYA	455.564.279,00	2.862.600,00	458.426.879,00
20	PKM SUKARAJA	350.065.650,00	0,00	350.065.650,00
21	PKM BETUNG KOTA	1.165.380.000,00	39.108.300,00	1.204.488.300,00
22	PKM SEMBAWA	889.401.850,00	5.590.700,00	894.992.550,00
23	PKM MEKAR SARI	308.855.177,00	0,00	308.855.177,00
24	PKM PETALING	475.761.150,00	0,00	475.761.150,00
25	PKM SEMENTUL	915.371.000,00	21.918.100,00	937.289.100,00
26	PKM KARANG AGUNG ILIR	575.123.071,00	0,00	575.123.071,00
27	PKM SUKAJADI	1.653.192.025,00	99.321.900,00	1.752.513.925,00
28	PKM KENTEN LAUT	1.081.202.850,00	66.073.400,00	1.147.276.250,00
29	PKM GASING LAUT	314.385.595,00	0,00	314.385.595,00
30	PKM SIDO MULYO	294.495.513,00	0,00	294.495.513,00
31	PKM SUAK TAPEH	478.798.317,00	2.344.200,00	481.142.517,00
32	PKM JAKABARING	210.263.400,00	0,00	210.263.400,00
33	PKM TANJUNG API-API	114.949.800,00	0,00	114.949.800,00
34	RSUD Makarti Jaya Kelas D Pratama	201.052.472,00	0,00	201.052.472,00
35	RSUD Sukajadi Kelas D Pratama	363.395.288,00	0,00	363.395.288,00
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>24.527.122.733,00</b>	<b>673.529.200,00</b>	<b>25.200.651.933,00</b>

### 13. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA terealisasi sebesar Rp4.740.549.323,54 atau 115,40% dari anggaran sebesar Rp4.107.760.425,96. Pendapatan tersebut terdiri dari setoran PT. Taspen sebesar Rp140.314.681,00, Tindak Lanjut Hasil Audit sebesar Rp3.752.454.567,14, Penerimaan Lainnya sebesar Rp170.050.075,40 dan pendapatan lelang Lebak Lebung sebesar Rp677.730.000,00.

Pendapatan lelang Lebak Lebung terealisasi sebesar 128,72% dari anggaran sebesar Rp526.500.000,00. Tercapainya penerimaan ini karena penawaran peserta (peminat lelang) terhadap beberapa objek lelang mengalami peningkatan. Rincian realisasi pendapatan lelang Lebak Lebung per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.13**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Lelang Lebak Lebung Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	REALISASI
1	Kecamatan Banyuasin III	35.169.000,00
2	Kecamatan Betung	11.457.000,00
3	Kecamatan Pulau Rimau	1.140.000,00
4	Kecamatan Rambutan	27.683.000,00
5	Kecamatan Sumber Marga Telang	34.386.200,00
6	Kecamatan Talang Kelapa	3.116.000,00
7	Kecamatan Rantau Bayur	340.138.000,00
8	Kecamatan Makarti Jaya	27.113.000,00
9	Kecamatan Muara Sugihan	13.680.000,00
10	Kecamatan Banyuasin I	3.100.800,00
11	Kecamatan Tanjung Lago	75.924.000,00
12	Kecamatan Banyuasin II	85.120.000,00
13	Kecamatan Muara Telang	9.443.000,00
14	Kecamatan Selat Penuguan	10.260.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>677.730.000,00</b>

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer - LRA mencapai sebesar Rp1.598.411.419.862,61 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp1.634.689.076.023,00. Berikut realisasi komponen Pendapatan Transfer - LRA Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

**Tabel 5.1.14**  
**Rincian Pendapatan Transfer - LRA Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.432.397.787.791,00	1.404.731.263.673,00	1.593.797.202.353,00	98,06
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	34.033.249.000,00	34.033.249.000,00	35.281.887.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	97.529.207.232,00	94.769.169.236,01	154.783.618.071,46	97,17
4	Bantuan Keuangan - LRA	70.728.832.000,00	64.877.737.953,60	52.126.675.547,76	91,72
	<b>Jumlah</b>	<b>1.634.689.076.023,00</b>	<b>1.598.411.419.862,61</b>	<b>1.835.989.382.972,22</b>	<b>97,78</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya satu dari empat jenis pendapatan transfer yang mencapai target penerimaan dan sisanya tidak mencapai target.

### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA terealisasi sebesar Rp1.404.731.263.673,00 atau 98,06% dari anggaran sebesar Rp1.432.397.787.791,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.15**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Bagi Hasil Pajak - LRA	84.877.339.690,00	57.994.104.860,00	69.657.720.910,00	68,32
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	118.100.293.873,00	126.808.026.768,00	175.481.568.005,00	107,37
3	Dana Alokasi Umum - LRA	886.097.109.000,00	878.495.803.000,00	979.541.981.000,00	99,14
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	136.047.749.000,00	134.208.142.167,00	168.126.987.485,00	98,64
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	207.275.296.228,00	207.225.186.878,00	200.988.944.953,00	99,97
	<b>Jumlah</b>	<b>1.432.397.787.791,00</b>	<b>1.404.731.263.673,00</b>	<b>1.593.797.202.353,00</b>	<b>98,06</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya satu jenis pendapatan yang mencapai target dan empat jenis pendapatan tidak mencapai target. Penjelasan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LRA sebagai berikut:

#### 1. Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Bagi Hasil Pajak - LRA terealisasi sebesar Rp57.994.104.860,00 atau 68,32% dari target sebesar Rp84.877.339.690,00. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan yang terealisasi sebesar Rp44.837.891.888,00 dari anggaran sebesar Rp70.095.025.599,00 dan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 terealisasi sebesar Rp13.156.212.972,00 dari anggaran sebesar Rp14.782.314.091,00.

#### 2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, Anggaran Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA sebesar Rp118.100.293.873,00 dan terealisasi sebesar Rp126.808.026.768,00 atau 107,37%. Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.16**  
**Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	3.741.865.919,00	3.613.511.308,00	2.063.227.015,00	96,56
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Land-Rent</i> ) - LRA	1.328.308.536,00	3.736.490.150,00	2.151.114.396,00	281,29
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	36.228.280.380,00	34.078.215.233,00	46.218.374.977,00	94,06
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	1.647.661.150,00	788.276.289,00	689.340.471,00	47,84
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	15.460.343.000,00	14.361.998.800,00	23.623.621.549,00	92,89
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	59.416.885.916,00	70.019.632.607,00	100.633.737.393,00	117,84
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	243.954.818,00	185.915.100,00	20.519.685,00	76,20
8	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LRA	32.994.154,00	23.987.281,00	81.632.519,00	72,70
	<b>Jumlah</b>	<b>118.100.293.873,00</b>	<b>126.808.026.768,00</b>	<b>175.481.568.005,00</b>	<b>107,37</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari delapan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA terdapat dua jenis pendapatan yang mencapai target dan enam pendapatan yang tidak mencapai target. Penjelasan atas Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA sebagai berikut:

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp3.741.865.919,00 dan realisasi sebesar Rp3.613.511.308,00 atau 96,56%.
- b. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) dialokasikan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp1.328.308.536,00 dan realisasi sebesar Rp3.736.490.150,00 atau 281,29%.
- c. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp36.228.280.380,00 dan realisasi sebesar Rp34.078.215.233,00 atau 94,06%.
- d. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp1.647.661.150,00 dan realisasi sebesar Rp788.276.289,00 atau 47,84%.

- e. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp15.460.343.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.361.998.800,00 atau 92,89%.
- f. Penganggaran Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp59.416.885.916,00 dan realisasi sebesar Rp70.019.632.607,00 atau 117,84%.
- g. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pertambangan Panas Bumi dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp243.954.818,00 dan realisasi sebesar Rp185.915.100,00 atau 76,20%.
- h. Penganggaran Dana bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau dialokasikan berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebesar Rp32.994.154,00 dan realisasi sebesar Rp23.987.281,00 atau 72,70%.

Dari penerimaan Bagi hasil pajak sebesar Rp57.994.104.860,00 dan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp126.808.026.768,00 diketahui bahwa terdapat penerimaan dari kurang/lebih salur sebesar Rp5.237.937.155,00. Rincian penerimaan dana bagi hasil bukan pajak/SDA dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.17**  
**Rincian Penerimaan DBH Pajak dan Bukan Pajak**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		Total
			Penerimaan DBH yang Diperhitungkan Dengan Lebih Salur	Penerimaan DBH yang Tidak Diperhitungkan Dengan Lebih Salur	
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	<b>84.877.339.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.994.104.860,00</b>	<b>57.994.104.860,00</b>
	- Bagi Hasil Pajak Sektor Pertambangan	70.095.025.599,00	0,00	44.837.891.888,00	44.837.891.888,00
	- Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh)	14.782.314.091,00	0,00	13.156.212.972,00	13.156.212.972,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	<b>118.100.293.873,00</b>	<b>5.237.937.155,00</b>	<b>121.570.089.613,00</b>	<b>126.808.026.768,00</b>
	- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	3.741.865.919,00	5.360.807,00	3.608.150.501,00	3.613.511.308,00

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		Total
			Penerimaan DBH yang Diperhitungkan Dengan Lebih Salur	Penerimaan DBH yang Tidak Diperhitungkan Dengan Lebih Salur	
	- Bagi Hasil dari Dana Reboisasi – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LRA	1.328.308.536,00	0,00	3.736.490.150,00	3.736.490.150,00
	- Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Iuran Eksploitasi (Royalti) – LRA	36.228.280.380,00	5.232.576.348,00	28.845.638.885,00	34.078.215.233,00
	- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.647.661.150,00	0,00	788.276.289,00	788.276.289,00
	- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	15.460.343.000,00	0,00	14.361.998.800,00	14.361.998.800,00
	- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	59.416.885.916,00	0,00	70.019.632.607,00	70.019.632.607,00
	- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	243.954.818,00	0,00	185.915.100,00	185.915.100,00
	- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LRA	32.994.154,00	0,00	23.987.281,00	23.987.281,00
	<b>Jumlah</b>	<b>202.977.633.563,00</b>	<b>5.237.937.155,00</b>	<b>179.564.194.473,00</b>	<b>184.802.131.628,00</b>

### 3. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA terealisasi sebesar Rp878.495.803.000,00 atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp886.097.109.000,00. Anggaran DAU yang tidak terealisasi merupakan anggaran pembayaran gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Tidak terealisasinya DAU dikarenakan Kabupaten Banyuwasin belum mengadakan pengangkatan P3K sehingga anggaran untuk pembayaran tersebut tidak ditransfer ke daerah.

### 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA terealisasi sebesar Rp134.208.142.167,00 atau 98,64% dari anggaran sebesar Rp136.047.749.000,00. Tidak terealisasinya penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA diantaranya karena terbitnya surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-24/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses barang jasa DAK Fisik 2020.

### 5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA terealisasi sebesar Rp207.225.186.878,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp207.275.296.228,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 5.1.18**  
**Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	136.644.343.000,00	136.644.343.000,00	139.764.242.526,00	100,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	1.869.075.000,00	1.869.075.000,00	1.852.275.000,00	100,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini - LRA	11.139.000.000,00	11.139.000.000,00	9.555.600.000,00	100,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	32.841.033.228,00	38.303.653.228,00	22.035.885.440,00	116,63
5	Akreditasi Puskesmas - LRA	1.286.295.000,00	0,00	4.210.150.000,00	0,00
6	Jaminan Persalinan - LRA	4.000.773.000,00	0,00	3.429.000.000,00	0,00
7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LRA	6.139.478.000,00	6.131.347.300,00	5.803.887.000,00	99,86
8	Dana Tunjangan Khusus Guru - LRA	7.423.435.000,00	7.423.435.000,00	8.464.978.000,00	100,00
9	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	2.734.512.000,00	2.731.333.350,00	2.035.156.987,00	99,88
10	Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	752.170.000,00	100,00
11	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA	3.021.800.000,00	2.983.000.000,00	3.085.600.000,00	98,71
12	Bantuan Operasional Pengawasan Obat dan Makanan - LRA	175.552.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>207.275.296.228,00</b>	<b>207.225.186.878,00</b>	<b>200.988.944.953,00</b>	<b>99,97</b>

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA terealisasi sebesar Rp34.033.249.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp34.033.249.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA merupakan pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 18 Juni 2020 sebesar Rp9.556.980.000,00, pada tanggal 18 September 2020 sebesar Rp14.069.932.000,00 dan pada tanggal 9 November 2020 sebesar Rp10.406.337.000,00.

#### 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah/Provinsi - Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA dari anggaran sebesar Rp97.529.207.232,00 terealisasi sebesar Rp94.769.169.236,01 atau 97,17%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1.19**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	15.759.446.295,00	16.918.861.548,00	29.861.511.733,81	107,35
2	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Diatas Air - LRA	4.644.706,00	3.581.035,01	6.396.669,93	77,09
3	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	17.790.280.782,00	13.488.511.246,00	34.274.255.711,85	75,81
4	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air - LRA	799.412,00	32.514,00	980.212,88	4,06
5	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	33.783.300.842,00	28.993.109.766,00	60.689.727.221,43	85,82
6	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	283.801.012,00	319.812.208,00	665.269.666,56	112,68
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	29.906.934.183,00	35.045.260.919,00	29.285.476.855,00	117,18
	<b>Jumlah</b>	<b>97.529.207.232,00</b>	<b>94.769.169.236,01</b>	<b>154.783.618.071,46</b>	<b>97,17</b>

Tabel di atas menggambarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA merupakan Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang terealisasi sebesar 97,17%.

#### **5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan - LRA**

Bantuan Keuangan - LRA merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA yang terealisasi sebesar Rp64.877.737.953,60 atau 91,72% dari anggaran sebesar Rp70.728.832.000,00. Bantuan Keuangan - LRA merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan berupa Bantuan Berobat Gratis dari Provinsi Sumatera Selatan dan Dana Alokasi Umum Kelurahan. Rincian transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke RKUD dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 5.1.20**  
**Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke RKUD Tahun Anggaran 2020**

No	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Penyaluran dari Provinsi ke RKUD	
		Tanggal	Nilai
1	Belanja Bantuan Keuangan Tahap I (Jembatan Rantau Bayur)	02/11/2020	11.004.589.989,31
2	Belanja Bantuan Keuangan (Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan/BPBD Kesbangpol)	10/11/2020	4.779.585.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan (Dermaga dan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan/Dinas Lingkungan Hidup)	24/11/2020	2.866.283.100,30
4	Belanja Bantuan Keuangan Tahap II (Jembatan Rantau Bayur dan Dermaga)	11/12/2020	16.461.655.652,82
5	Belanja Bantuan Keuangan (Jalan Lingkar)	11/12/2020	1.783.596.870,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Tahap III (Jembatan Rantau Bayur dan Dermaga)	21/12/2020	12.346.241.739,61
7	PBI PROV TH 2020 (JAMSOSKES)	22/12/2020	6.778.111.706,00
8	Belanja Bantuan Keuangan (Piutang JAMSOSKES TAHUN 2018)	23/12/2020	4.695.947.865,56

No	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Penyaluran dari Provinsi ke RKUD	
		Tanggal	Nilai
9	Belanja Bantuan Keuangan Tahap III (Jalan Lingkar)	30/12/2020	1.783.596.870,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Tahap II (Jalan Lingkar)	30/12/2020	2.378.129.160,00
	<b>Jumlah</b>		<b>64.877.737.953,60</b>

### 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp422.775.027.155,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp423.563.707.000,00. Lain-Lain Pendapatan yang sah terbagi menjadi Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Sebesar Rp126.205.514.955,00 dan Pendapatan dari Dana Desa sebesar Rp296.569.512.200,00.

Pendapatan hibah dari Pemerintah pusat sebesar Rp126.205.514.955,00 terdiri dari Pendapatan dari hasil *reimbursement* kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* sesuai Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin untuk *Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program (IPDMIP)*/Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu yang terdapat pada Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Bappeda sebesar Rp593.784.955,00, Penerimaan Hibah Irigasi pada Dinas PERKIMTAN sebesar Rp180.000.000,00 dan penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp125.431.730.000,00. Berikut rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

**Tabel 5.1.21**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020**

No.	Uraian	SKPD	Penerimaan di Kas Daerah	
			Tanggal	Nilai
<b>1</b>	<b>Hibah IPDMIP</b>			<b>593.784.955,00</b>
		Dinas PUTR	22/12/2020	54.055.436,00
		Bappeda	14/07/2020	87.756.073,00
		Bappeda	14/07/2020	17.555.427,00
		Dinas PUTR	14/07/2020	190.970.495,00
		Dinas PUTR	14/07/2020	38.203.266,00
		Dinas Pertanian	11/12/2020	114.041.176,00
		Bappeda	16/12/2020	66.988.487,00
		Bappeda	16/12/2020	13.400.913,00
		Dinas PUTR	22/12/2020	10.813.682,00
<b>2</b>	<b>Hibah Irigasi</b>	Dinas Perkimtan	16/12/2020	<b>180.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Dana BOS</b>			<b>125.431.730.000,00</b>
		Bos Afirmasi	30/12/2020	11.580.000.000,00
		Bos Kinerja	30/12/2020	3.840.000.000,00
		Bos Reguler SMT II	30/12/2020	33.024.330.000,00

No.	Uraian	SKPD	Penerimaan di Kas Daerah	
			Tanggal	Nilai
		Bos Reguler SMT I	30/06/2020	76.987.400.000,00
		<b>Total</b>		<b>126.205.514.955,00</b>

Pendapatan dari Dana Desa sebesar Rp296.569.512.200,00 merupakan dana desa yang bersumber dari APBN yang langsung ditransfer ke Rekening Kas Desa. Pengakuan pendapatan dana desa ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan sebanyak 16 kali, sesuai dengan informasi yang didapat dari *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN)*. Rincian Transfer ke Rekening Kas Desa terdapat pada lampiran 2.

### 5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2020, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai Rp2.133.456.109.587,83 atau 96,53% dari anggaran sebesar Rp2.210.108.238.083,44 dengan sisa anggaran sebesar Rp76.652.128.496,61. Berikut tabel rincian belanja daerah tahun anggaran 2020.

**Tabel 5.1.22**  
**Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Operasi	1.515.690.479.304,23	1.467.241.259.630,04	1.576.995.968.153,76	96,80
2	Belanja Modal	599.020.340.578,68	582.776.915.571,29	424.906.574.189,48	97,28
3	Belanja Tidak Terduga	95.397.418.200,53	83.437.934.386,50	1.315.136.250,00	87,46
	<b>Jumlah</b>	<b>2.210.108.238.083,44</b>	<b>2.133.456.109.587,83</b>	<b>2.003.217.678.593,24</b>	<b>96,53</b>

Berdasarkan tabel realisasi di atas, seluruh jenis belanja terserap di bawah alokasi anggaran dan secara keseluruhan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,47% atas penghematan pemakaian dana dari berbagai kegiatan dan non kegiatan. Gambar berikut menunjukkan perbandingan anggaran dan realisasi belanja tahun 2020.

**Gambar 5.1.3**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020**



Berdasarkan gambar di atas, belanja terbesar dialokasikan untuk Operasi, yang kedua untuk Belanja Modal dan yang terakhir Belanja Tidak Terduga. Gambar berikut menunjukkan komposisi realisasi terhadap anggaran belanja tahun anggaran 2020.



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal memiliki persentase realisasi terbesar dari seluruh jenis belanja Kabupaten Banyuasin yaitu sebesar 97,28%, sedangkan Belanja Operasi sebesar 96,80% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 87,46%. Tingginya realisasi Belanja Tidak Terduga dikarenakan penggunaan dana tersebut untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Kabupaten Banyuasin. Rincian terkait penggunaan dana tersebut akan dijelaskan pada pos-pos penjelasan belanja Tidak Terduga.

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp1.467.241.259.630,04 atau 96,80%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp48.449.219.674,19 dari anggaran sebesar Rp1.515.690.479.304,23. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp778.157.769.580,80.
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp588.919.199.812,75.
- 3) Belanja Bunga sebesar Rp6.071.257.122,86.
- 4) Belanja Hibah sebesar Rp94.011.117.113,63.
- 5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp81.916.000,00.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai sebesar Rp778.157.769.580,80 atau lebih rendah sebesar Rp13.685.700.900,24 dari anggaran sebesar Rp791.843.470.481,04. Realisasi belanja pegawai menyerap dana 98,27% dari anggaran yang tersedia. Rincian belanja pegawai tahun anggaran 2020 pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.23**  
**Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	512.229.377.981,10	506.059.872.004,00	506.275.255.760,00	98,79
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	213.325.635.421,06	208.921.029.288,80	209.205.371.916,63	97,93

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.508.900.000,09	17.508.900.000,00	16.904.200.000,00	100,00
4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	95.523.300,00	79.664.225,00	77.893.188,00	83,39
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.880.606.619,00	4.701.892.771,00	4.917.784.418,00	79,95
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	113.205.659,79	77.840.617,00	36.190.042,00	68,76
7	Belanja Uang Lembur	98.204.000,00	77.452.000,00	65.256.000,00	78,86
8	Belanja Honorarium PNS	21.862.974.000,00	20.656.054.875,00	32.472.937.719,00	94,47
9	Belanja Honorarium Non PNS	14.909.675.000,00	14.409.225.000,00	28.039.500.000,00	96,64
10	Belanja Uang Rapat	51.547.000,00	48.000.000,00	64.870.000,00	93,11
11	Belanja Pegawai BOS	5.767.821.500,00	5.617.838.800,00	3.912.993.550,00	97,39
	<b>Jumlah</b>	<b>791.843.470.481,04</b>	<b>778.157.769.580,80</b>	<b>801.972.252.593,63</b>	<b>98,27</b>

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa mencapai sebesar Rp588.919.199.812,75 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp617.337.646.423,19. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.1.24**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	27.402.397.562,63	26.746.783.644,00	46.602.237.434,61	97,60
2	Belanja Bahan/Material	21.795.814.101,37	20.512.576.121,82	13.488.165.500,86	94,11
3	Belanja Jasa Kantor	181.481.793.579,66	176.704.278.190,00	156.710.931.131,00	97,36
4	Belanja Premi Asuransi	62.891.991.071,94	49.735.757.300,00	52.297.618.881,30	79,08
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.522.897.509,45	13.054.236.350,00	19.188.595.900,00	96,53
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.199.197.665,78	12.900.270.079,00	17.147.533.506,00	97,73
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.557.871.878,00	3.357.977.500,00	8.951.542.672,00	94,38
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.276.320.000,00	1.156.730.000,00	4.202.771.571,00	90,63
9	Belanja Sewa Alat Berat	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.555.826.400,00	2.519.882.292,00	5.066.568.056,00	98,59
11	Belanja Makanan dan Minuman	21.025.729.047,89	20.364.285.826,20	30.897.075.235,00	96,85
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.132.211.380,00	2.053.165.925,00	5.073.058.750,00	96,29
13	Belanja Pakaian Kerja	1.892.492.000,00	1.801.319.500,00	1.743.624.000,00	95,18
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.455.508.000,00	2.408.327.657,00	2.780.979.136,00	98,07
15	Belanja Perjalanan Dinas	112.510.499.137,45	109.413.973.629,00	179.805.149.386,20	97,24
16	Belanja Pemeliharaan	44.535.460.837,22	44.163.631.097,44	50.114.876.980,38	99,16
17	Belanja Jasa Konsultansi	3.671.897.446,00	3.592.621.170,00	6.235.490.260,00	97,84
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.857.641.232,00	4.152.897.998,00	7.832.963.140,00	85,49
19	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	42.780.000,00	42.780.000,00	85.650.000,00	100,00

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
20	Belanja Barang/Jasa yang akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	71.299.000,00	0,00
21	Beban Pengadaan Barang dan Jasa Non-Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	4.118.620.776,80	3.927.185.497,29	1.755.336.103,00	95,35
22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	92.381.896.797,00	90.281.720.036,00	70.992.152.346,00	97,72
	<b>Jumlah</b>	<b>617.337.646.423,19</b>	<b>588.919.199.812,75</b>	<b>681.043.618.989,35</b>	<b>95,39</b>

### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp6.071.257.122,86 atau 98,24% dari anggaran sebesar Rp6.180.000.000,00 yang terdiri dari Bunga Utang Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.25**  
**Rincian Realisasi Belanja Bunga**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Provisi Pinjaman</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>278.862.500,00</b>	<b>99,59</b>
<b>Bunga Pinjaman</b>	<b>5.900.000.000,00</b>	<b>5.792.394.622,86</b>	<b>98,17</b>
Pembayaran Kewajiban Angsuran Bunga Bulan April - Juni 2020		952.330.217,01	
Pembayaran Kewajiban Angsuran Bunga Bulan Juni - September 2020		1.641.561.950,44	
Pembayaran kewajiban angsuran Bunga bulan September - Desember 2020		3.198.502.455,41	
<b>Jumlah</b>	<b>6.180.000.000,00</b>	<b>6.071.257.122,86</b>	<b>98,24</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Belanja Bunga terdiri dari Provisi Pinjaman dan Bunga Pinjaman. Provisi pinjaman terealisasi sebesar Rp278.862.500,00 atau 99,59% dari anggaran sebesar Rp280.000.000,00 yang direalisasikan sesuai dengan surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 1784/KRD/2/B/2020 tanggal 03 November 2020 Perihal Biaya Sehubungan dengan Pinjaman Daerah, sedangkan bunga pinjaman terealisasi sebesar Rp5.792.394.622,86 atau 98,17% dari anggaran sebesar Rp5.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran kewajiban angsuran Bunga bulan April s.d. Juni 2020 terealisasi sebesar Rp952.330.217,01 sesuai surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 951/KRD/2/B/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Angsuran Pertama.
2. Pembayaran kewajiban angsuran Bunga bulan Juni s.d. September 2020 terealisasi sebesar Rp1.641.561.950,44 sesuai surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 1334/KRD/2/B/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Angsuran Kedua.
3. Pembayaran kewajiban angsuran Bunga bulan September s.d. Desember 2020 terealisasi sebesar Rp3.198.502.455,41 sesuai surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 2279/KRD/2/B/2020 tanggal 07 Desember 2020 Perihal Angsuran Ketiga.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Untuk Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp94.011.117.113,63 atau 93,77% dari anggaran Rp100.247.446.400,00. Rincian Belanja Hibah tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 5.1.26**  
**Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	750.000.000,00	750.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	15.725.800.000,00	14.592.950.000,00	14.602.800.000,00	92,79
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.543.000.000,00	6.543.000.000,00	4.863.000.000,00	100,00
4	Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan	74.610.466.400,00	69.510.987.113,63	58.889.425.420,43	93,16
5	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.618.180.000,00	2.614.180.000,00	11.507.496.150,35	99,84
	<b>Jumlah</b>	<b>100.247.446.400,00</b>	<b>94.011.117.113,63</b>	<b>92.162.721.570,78</b>	<b>93,77</b>

Belanja Hibah terbagi menjadi Belanja Hibah Uang yang dikelola oleh SKPKD dan Belanja Hibah Barang yang dikelola oleh SKPD.

#### 5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah Uang (SKPKD)

Realisasi Belanja Hibah yang dikelola SKPKD sebesar Rp21.885.950.000,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp23.018.800.000,00. Berikut rincian Belanja Hibah Uang tahun anggaran 2020 yang dikelola SKPKD.

**Tabel 5.1.27**  
**Rincian Belanja Hibah Uang Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	750.000.000,00	750.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	15.725.800.000,00	14.592.950.000,00	14.602.800.000,00	92,79
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.543.000.000,00	6.543.000.000,00	4.863.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.018.800.000,00</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>21.765.800.000,00</b>	<b>95,07</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat Belanja Hibah kepada Pemerintah terealisasi sebesar Rp750.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00 berupa Hibah kepada Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Polres Banyuasin.

Sedangkan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp14.592.950.000,00 atau 92,79% dari anggaran sebesar Rp15.725.800.000,00. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan terealisasi sebesar Rp13.352.950.000,00 atau 92,33% dari anggaran sebesar Rp14.460.800.000,00 dan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Bidang



Keagamaan terealisasi sebesar Rp1.240.000.000,00 atau 98,02% dari anggaran sebesar Rp1.265.000.000,00.

Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan yang terealisasi sebesar Rp13.352.950.000,00 atau 92,33% dari anggaran sebesar Rp14.460.800.000,00 merupakan Belanja Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Belanja Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Kesetaraan pada Kabupaten Banyuasin yang penganggarannya tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran XVI dan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. Rincian realisasi Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BOP PAUD Tahap I terealisasi sebesar Rp5.334.900.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/DISDIKBUD/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan Satuan PAUD Sejenis Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk 457 penerima.
2. BOP PAUD Tahap II terealisasi sebesar Rp5.030.700.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 879/KPTS/DISDIKBUD/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penetapan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan Satuan PAUD Sejenis Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk 459 penerima
3. Pendidikan Kesetaraan Tahap I terealisasi sebesar Rp1.522.500.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 444/KPTS/DISDIKBUD/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk 49 Penerima.
4. Pendidikan Kesetaraan Tahap II terealisasi sebesar Rp1.499.300.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 881/KPTS/DISDIKBUD/2020 tanggal 04 November 2020 tentang Penetapan Bantuan Dana Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk 62 Penerima.

Total realisasi SP2D Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan sebesar Rp13.387.400.000,00. Namun, terdapat setoran yang diakui sebagai pengurang Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Bidang Pendidikan dengan total sebesar Rp34.450.000,00 dengan rincian setoran BOP PAUD Tahap I sebesar Rp30.600.000,00 dan setoran BOP Kesetaraan Tahap I (49 Penerima) sebesar Rp3.850.000,00 sehingga realisasi yang diakui sebesar Rp13.352.950.000,00.

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp6.543.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.543.000.000,00. Belanja

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan kepada beberapa Lembaga Kemasyarakatan yang berada di Wilayah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Belanja Hibah Uang yang dikelola SKPKD hanya terealisasi sebesar 95,07% diantaranya karena tidak ada permintaan penyaluran hibah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku verifikator dan juga terdapat penerima Hibah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan penyaluran Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat. Rincian Belanja Hibah Uang SKPKD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

#### **5.1.2.1.4.2 Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (SKPD)**

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp72.125.167.113,63 atau 93,39% dari anggaran sebesar Rp77.228.646.400,00. Rincian Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Pihak Ketiga per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat pada **Lampiran 4**.

#### **5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial berupa barang terealisasi sebesar Rp81.916.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp81.916.000,00 yang merupakan Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan. Belanja ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin terealisasi sebesar Rp49.916.000,00 dan Kecamatan Muara Telang sebesar Rp32.000.000,00.

Realisasi sebesar Rp49.916.000,00 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan belanja pengadaan *Buffer Stock* berupa sembilan bahan pokok (sembako) yang diperuntukkan sebagai stok apabila terjadi bencana dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, sedangkan realisasi sebesar Rp32.000.000,00 merupakan bantuan Sosial Barang/Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan yang diperuntukkan kepada honorarium guru tahfidz dan belanja Kitab Al-quran.

#### **5.1.2.2 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp582.776.915.571,29 atau 97,28%. Terdapat efisiensi sebesar Rp16.243.425.007,39 dari anggaran sebesar Rp599.020.340.578,68. Rincian Belanja Modal tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.28**  
**Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Modal Tanah	11.859.294.128,00	11.173.619.758,00	2.718.461.818,00	94,21
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.384.270.337,68	86.207.313.243,95	115.271.959.386,79	94,33
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.961.790.351,00	46.269.351.733,32	107.067.706.327,93	98,52
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	430.201.994.329,00	421.459.755.370,02	172.575.951.051,76	97,96

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.612.991.433,00	17.666.875.466,00	27.272.495.605,00	94,91
	<b>Jumlah</b>	<b>599.020.340.578,68</b>	<b>582.776.915.571,29</b>	<b>424.906.574.189,48</b>	<b>97,28</b>

Belanja Modal jika dibandingkan dengan total belanja kabupaten telah mencapai 27,32%. Berikut ini disajikan grafik mengenai persentase Belanja Modal terhadap anggaran untuk tahun anggaran 2020.



#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar sebesar Rp11.173.619.758,00 atau 94,21% dari anggaran sebesar Rp11.859.294.128,00. Belanja Modal Tanah terdiri dari pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dalam Kabupaten Banyuasin sehubungan dengan program pembangunan jalan dan perkotaan serta jembatan dalam Kabupaten Banyuasin.

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai sebesar Rp86.207.313.243,95 atau 94,33% dari anggaran sebesar Rp91.384.270.337,68. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2020 terdiri dari:

**Tabel 5.1.29**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	9.939.600.000,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Bantu	7.763.000.000,00	7.551.870.169,95	1.267.132.701,18	97,28
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.066.000.000,00	8.717.130.000,00	22.249.182.763,00	96,15
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	387.500.000,00	383.896.000,00	482.400.000,00	99,06

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	350.000.000,00	349.206.000,00	3.350.000,00	99,77
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	203.088.650,00	202.988.650,00	767.764.000,00	99,95
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	6.000.000,00	6.000.000,00	808.661.347,00	100,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	7.625.889.389,15	0,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.523.956.000,00	1.523.931.050,00	307.073.000,00	99,99
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	34.655.018.209,68	33.369.391.400,00	9.286.944.938,00	96,29
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.148.815.752,80	7.004.314.099,00	11.695.797.836,80	97,97
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.947.636.681,00	3.908.940.620,00	22.981.680.637,00	99,01
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	766.770.000,00	764.499.000,00	1.696.952.100,00	99,70
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	425.877.300,00	423.164.299,00	1.615.349.430,00	99,36
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	310.575.000,20	306.101.600,00	405.630.000,00	98,55
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	192.500.000,00	0,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	18.671.966.400,00	16.223.173.025,00	11.257.666.048,00	86,88
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.119.000.000,00	2.075.802.686,00	8.691.512.971,66	97,96
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	36.260.000,00	100,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	512.676.344,00	509.262.800,00	3.267.403.100,00	99,33
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	56.440.000,00	56.225.700,00	32.850.000,00	99,62
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.000.000.000,00	1.524.631.350,00	231.500.000,00	76,23
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00	100.000.000,00	100,00

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika				
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	448.450.000,00	438.154.850,00	328.859.125,00	97,70
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00	847.129.945,00	0,00	84,71
<b>Jumlah</b>		<b>91.384.270.337,68</b>	<b>86.207.313.243,95</b>	<b>115.271.959.386,79</b>	<b>94,33</b>

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.269.351.733,32 atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp46.961.790.351,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2020 terdiri dari:

**Tabel 5.1.30**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.375.590.351,00	45.936.787.733,32	105.869.246.827,93	99,05
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	196.145.000,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	392.550.000,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	296.900.000,00	0,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	336.200.000,00	332.564.000,00	312.864.500,00	98,91
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>46.961.790.351,00</b>	<b>46.269.351.733,32</b>	<b>107.067.706.327,93</b>	<b>98,52</b>

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp421.459.755.370,02 atau 97,96% dari anggaran sebesar Rp430.201.994.329,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2020 terdiri dari:

**Tabel 5.1.31**  
**Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	367.441.837.989,00	363.618.448.928,14	121.700.457.979,83	98,95
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	40.634.100.000,00	36.040.301.194,15	9.559.653.740,69	88,69
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	360.000.000,00	359.340.000,00	17.586.825.817,51	99,81
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	4.189.329.000,00	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	6.755.587.000,00	6.691.629.261,26	0,00	99,05
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	8.679.969.823,00	8.625.957.567,46	5.878.631.602,72	99,37
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	69.836.425,00	69.536.425,00	125.837.000,00	99,57
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.467.089.874,00	2.455.609.595,01	3.057.497.327,00	99,53
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	236.821.426,00	236.323.500,00	3.494.512.349,01	99,78
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.108.958.400,00	2.103.972.400,00	3.971.593.050,00	99,76
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	149.600.000,00	0,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	49.948.200,00	49.948.200,00	24.435.000,00	100,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	8.000.000,00	7.728.144,00	0,00	96,60
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.108.502.292,00	1.097.274.437,00	2.643.633.185,00	98,98
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	122.620.000,00	0,00
16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	131.342.900,00	103.685.718,00	71.325.000,00	78,94
17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BLUD	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>430.201.994.329,00</b>	<b>421.459.755.370,02</b>	<b>172.575.951.051,76</b>	<b>97,96</b>

#### 5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.666.875.466,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp18.612.991.433,00. Rincian belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2020 terdiri dari:

**Tabel 5.1.32**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	16.333.645.533,00	15.409.194.866,00	24.061.217.630,00	94,34
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	990.000.000,00	985.150.100,00	296.650.000,00	99,51
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	400.620.000,00	399.620.000,00	469.642.000,00	99,75
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	0,00	0,00	199.000.000,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	18.725.900,00	4.999.500,00	5.870.000,00	26,69
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	870.000.000,00	867.911.000,00	2.240.115.975,00	99,75
	<b>Jumlah</b>	<b>18.612.991.433,00</b>	<b>17.666.875.466,00</b>	<b>27.272.495.605,00</b>	<b>94,91</b>

Dari total realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp582.776.915.571,29 tidak seluruhnya diakui sebagai penambah aset tetap tahun 2020. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 136 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Belanja Modal harus dikecualikan dari aset tetap jika diperuntukkan sebagai Hibah ke masyarakat dan atau secara nilai tidak dapat dikapitalisasi.

Rincian mutasi Belanja Modal yang dihibahkan/pakai habis dan yang tidak dapat dikapitalisasi karena kebijakan akuntansi (aset ekstrakomptabel) dan reklasifikasi antar akun belanja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.1.33**  
**Daftar Belanja Modal menjadi Aset Tetap Tahun Anggaran 2020**

Jenis Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Belanja Modal menjadi Aset
		Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Total	
Tanah	11.173.619.758,00	0,00	0,00	0,00	11.173.619.758,00
Peralatan dan mesin	86.207.313.243,95	18.859.604,00	6.057.800.318,99	6.076.659.922,99	80.130.653.320,96
Gedung Bangunan	46.269.351.733,32	1.601.216.600,00	231.354.000,00	1.832.570.600,00	44.436.781.133,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	421.459.755.370,02	2.102.386.893,46	0,00	2.102.386.893,46	419.357.368.476,56
Aset Tetap Lainnya	17.666.875.466,00	812.911.000,00	1.442.549.915,00	2.255.460.915,00	15.411.414.551,00
<b>JUMLAH</b>	<b>582.776.915.571,29</b>	<b>4.535.374.097,46</b>	<b>7.731.704.233,99</b>	<b>12.267.078.331,45</b>	<b>570.509.837.239,84</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp11.173.619.758,00 seluruhnya diakui menjadi penambah aset tetap tanah.

2. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp86.207.313.243,95 yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin hanya sebesar Rp80.130.653.320,96, sedangkan mutasi kurang atas Belanja Modal sebesar Rp18.859.604,00 merupakan Belanja Pemeliharaan, mutasi kurang atas Belanja Modal sebesar Rp6.057.800.318,99 merupakan barang ekstrakomptabel.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari realisasi sebesar Rp46.269.351.733,32 yang menjadi Aset sebesar Rp44.436.781.133,32. Sedangkan mutasi kurang atas Belanja Modal sebesar Rp1.601.216.600,00 merupakan Belanja Pemeliharaan dan mutasi kurang atas Belanja Modal sebesar Rp231.354.000,00 merupakan barang ekstrakomptabel.
4. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp421.459.755.370,02 yang menjadi Aset sebesar Rp419.357.368.476,56, mutasi kurang atas Belanja Modal sebesar 2.102.386.893,46 merupakan Belanja Pemeliharaan.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya dari realisasi sebesar Rp17.666.875.466,00 yang menjadi Aset hanya sebesar Rp15.411.414.551,00, mutasi kurang atas Belanja Modal sebesar Rp812.911.000,00 merupakan Belanja Pemeliharaan dan mutasi kurang atas Belanja Modal sebesar Rp1.442.549.915,00 merupakan barang ekstrakomptabel.

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 yang tidak menjadi Aset Tetap per SKPD tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.34**  
**Rincian Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap Per SKPD**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Belanja Modal menjadi Aset
			Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Total	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78.588.359.384,44	693.683.000,00	5.902.191.157,00	6.595.874.157,00	71.992.485.227,44
2	Dinas Kesehatan	36.735.693.055,48	707.801.600,00	696.948.705,99	1.404.750.305,99	35.330.942.749,49
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.959.778.045,97	0,00	27.328.700,00	27.328.700,00	3.932.449.345,97
4	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	45.627.561.354,79	0,00	0,00	0,00	45.627.561.354,79
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	374.712.970.857,23	1.727.635.193,46	1.800.000,00	1.729.435.193,46	372.983.535.663,77
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	4.449.077.000,00	0,00	384.415.000,00	384.415.000,00	4.064.662.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	189.780.000,00	189.780.000,00	0,00	189.780.000,00	0,00
8	Dinas Sosial	31.799.000,00	0,00	0,00	0,00	31.799.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	873.010.000,00	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	854.310.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	128.105.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	119.105.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.064.061.250,00	0,00	550.275,00	550.275,00	2.063.510.975,00
12	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (likuidasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	879.107.170,00	0,00	14.733.110,00	14.733.110,00	864.374.060,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.107.717.000,00	0,00	0,00	0,00	1.107.717.000,00
15	Dinas Pengendalian	925.982.500,00	279.800.000,00	1.095.000,00	280.895.000,00	645.087.500,00



No	SKPD	Realisasi Belanja Modal	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Belanja Modal menjadi Aset
			Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Total	
	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA					
16	Dinas Perhubungan	9.127.323.907,00	9.952.000,00	2.850.000,00	12.802.000,00	9.114.521.907,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	716.393.904,00	18.859.604,00	0,00	18.859.604,00	697.534.300,00
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	647.918.256,38	0,00	15.290.000,00	15.290.000,00	632.628.256,38
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.351.945.800,00	0,00	0,00	0,00	2.351.945.800,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	358.477.430,00	0,00	0,00	0,00	358.477.430,00
21	Dinas Perikanan	147.436.425,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	134.936.425,00
22	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	425.850.000,00	119.700.000,00	13.650.000,00	133.350.000,00	292.500.000,00
24	Sekretariat Daerah	9.842.991.820,00	0,00	372.595.300,00	372.595.300,00	9.470.396.520,00
25	Sekretariat DPRD	1.798.204.000,00	413.411.000,00	83.185.000,00	496.596.000,00	1.301.608.000,00
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	962.590.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	945.590.000,00
27	Kecamatan Banyuasin I	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
28	Kecamatan Banyuasin III	1.378.443.629,00	0,00	75.584.000,00	75.584.000,00	1.302.859.629,00
29	Kecamatan Betung	525.701.840,00	0,00	0,00	0,00	525.701.840,00
30	Kecamatan rantau Bayur	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
31	Kecamatan Pulau Rimau	63.860.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	55.860.000,00
32	Kecamatan Talang Kelapa	1.486.157.700,00	374.751.700,00	14.100.000,00	388.851.700,00	1.097.306.000,00
33	Kecamatan Rambutan	307.100.000,00	0,00	0,00	0,00	307.100.000,00
34	Kecamatan Tungkal Ilir	8.300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.300.000,00
35	Kecamatan Tanjung Lago	70.997.000,00	0,00	0,00	0,00	70.997.000,00
36	Kecamatan Sembawa	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
37	Kecamatan Suak Tapeh	40.900.000,00	0,00	77.986,00	77.986,00	40.822.014,00
38	Kecamatan Banyuasin II	271.100.000,00	0,00	0,00	0,00	271.100.000,00
39	Kecamatan Makarti Jaya	278.097.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	277.047.000,00
40	Kecamatan Muara Padang	23.508.892,00	0,00	0,00	0,00	23.508.892,00
41	Kecamatan Muara Sugihan	24.250.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	15.500.000,00
42	Kecamatan Muara Telang	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700.000,00
43	Kecamatan Air Salek	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	47.349.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	44.649.000,00
45	Kecamatan Air Kumbang	108.500.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	93.500.000,00
46	Kecamatan Selat Penuguan	68.660.000,00	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	61.100.000,00
47	Kecamatan Karang Agung Ilir	60.000.000,00	0,00	24.050.000,00	24.050.000,00	35.950.000,00
48	Inspektorat Daerah	7.480.000,00	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	255.467.200,00	0,00	0,00	0,00	255.467.200,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	248.417.200,00	0,00	0,00	0,00	248.417.200,00

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Belanja Modal menjadi Aset
			Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Total	
51	Badan Pendapatan Daerah	727.292.950,00	0,00	0,00	0,00	727.292.950,00
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>582.776.915.571,29</b>	<b>4.535.374.097,46</b>	<b>7.731.704.233,99</b>	<b>12.267.078.331,45</b>	<b>570.509.837.239,84</b>

Rincian lebih lanjut Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 yang menjadi Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp83.437.934.386,50 atau 87,46% dari anggaran sebesar Rp95.397.418.200,53. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikeluarkan melalui SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp88.028.850.306,50. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp4.590.915.920,00 sehingga realisasi Belanja Tidak Terduga yang diakui sebesar Rp83.437.934.386,50. Rincian realisasi dan setoran pengurang Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2020 terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.35**  
**Rincian Realisasi dan Setoran Pengurang Belanja Tidak Terduga (BTT)**  
**Tahun Anggaran 2020**

No	URAIAN	SP2D	SETORAN PENGURANG BELANJA	REALISASI
1	<b>BTT RECOFUSING I+II+III DANA TANGGAP COVID 19</b>			
1.1	BTT melalui BPBD - Kembangpol ke-I	308.919.000,00	18.700.000,00	290.219.000,00
1.2	BTT melalui BPBD - Kembangpol ke-II	212.750.000,00	0,00	212.750.000,00
1.3	BTT melalui Dinas Kesehatan ke-I	297.030.000,00	2.727,00	297.027.273,00
1.4	BTT melalui Dinas Kesehatan ke-II	351.609.350,00	0,00	351.609.350,00
1.5	BTT melalui Dinas Kesehatan ke-III	990.930.000,00	0,00	990.930.000,00
1.6	BTT melalui Dinas Kesehatan ke-IV	1.959.325.000,00	0,00	1.959.325.000,00
1.7	BTT melalui RSUD ke-I	733.750.000,00	1.055.968,00	732.694.032,00
1.8	BTT melalui RSUD ke-II	543.750.000,00	1.072.610,00	542.677.390,00
1.9	BTT melalui RSUD ke-III	222.500.000,00	709.397,00	221.790.603,00
1.10	BTT melalui RSUD ke-IV	1.200.000.000,00	14.032.580,00	1.185.967.420,00
1.11	BTT melalui Dinas Sosial ke-I	31.000.000,00	10.500.000,00	20.500.000,00
1.12	BTT melalui Dinas Sosial ke-II	14.897.400.000,00	1.133.900.000,00	13.763.500.000,00
1.13	BTT melalui Dinas Sosial ke-III	7.034.500.000,00	0,00	7.034.500.000,00
1.14	BTT melalui Dinas Sosial ke-IV	27.613.636,00	2.613.636,00	25.000.000,00
1.15	BTT melalui Dinas Sosial ke-V	331.975.000,00	0,00	331.975.000,00

No	URAIAN	SP2D	SETORAN PENGURANG BELANJA	REALISASI
1.16	BTT melalui Dinas Sosial ke-VI	43.687.000,00	0,00	43.687.000,00
1.17	BTT melalui Dinas Sosial ke-VII	14.897.400.000,00	1.531.800.000,00	13.365.600.000,00
1.18	BTT melalui Dinas Sosial ke-VIII	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1.19	BTT melalui Dinas Sosial ke-IX	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
1.20	BTT melalui Dinas Sosial ke-X	30.250.000,00	0,00	30.250.000,00
1.21	BTT melalui Dinas Sosial ke-XI	2.150.622.512,50	0,00	2.150.622.512,50
1.22	BTT melalui Dinas Sosial ke-XII	14.897.400.000,00	1.575.000.000,00	13.322.400.000,00
1.23	BTT melalui Dinas Sosial ke-XIII	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
1.24	BTT melalui Dinas Sosial ke-XIV	196.950.000,00	0,00	196.950.000,00
1.25	BTT melalui Dinas Sosial ke-XV	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.26	BTT melalui Dinas Sosial ke-XVI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		<b>61.464.161.498,50</b>	<b>4.289.386.918,00</b>	<b>57.174.774.580,50</b>
<b>2</b>	<b>DID TAMBAHAN PERIODE KEDUA</b>			
2.1	BTT melalui RSUD (DID Periode Kedua)	10.069.932.000,00	127.525.002,00	9.942.406.998,00
2.2	BTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DID Periode Kedua)	4.000.000.000,00	122.000.000,00	3.878.000.000,00
		<b>14.069.932.000,00</b>	<b>249.525.002,00</b>	<b>13.820.406.998,00</b>
<b>3</b>	<b>DID TAMBAHAN PERIODE KETIGA</b>			
3.1	BTT melalui RSUD (DID Periode Ketiga)	1.006.337.000,00	3.552.000,00	1.002.785.000,00
3.2	BTT melalui Dinas Kesehatan (DID Periode Ketiga)	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
3.3	BTT melalui Dinas Sosial (DID Periode Ketiga)	4.000.000.000,00	1.000.000,00	3.999.000.000,00
3.4	BTT melalui DPKUKM (DID Periode Ketiga)	2.400.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00
3.5	BTT melalui Dinas (DID Periode Ketiga)	2.000.000.000,00	47.452.000,00	1.952.548.000,00
		<b>10.406.337.000,00</b>	<b>52.004.000,00</b>	<b>10.354.333.000,00</b>
<b>4</b>	<b>SISA DANA DESA TAHUN 2019</b>			
4.1	BTT Pengembalian Sisa Dana Desa TA 2019	2.088.419.808,00	0,00	2.088.419.808,00
		<b>2.088.419.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.419.808,00</b>
	<b>Total</b>	<b>88.028.850.306,50</b>	<b>4.590.915.920,00</b>	<b>83.437.934.386,50</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2019 sebesar Rp1.315.136.250,00 maka terdapat peningkatan sebesar 6.344,43% di realisasi Belanja

Tidak Terduga tahun 2020 sebesar Rp83.437.934.386,50. Peningkatan realisasi Belanja Tidak Terduga di tahun 2020 disebabkan adanya penanggulangan dampak Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Berikut penjelasan masing-masing realisasi Belanja Tidak Terduga berdasarkan tabel 5.1.35 di atas:

- 1.1. BTT melalui BPBD-Kesbangpol ke-I dengan realisasi SP2D sebesar Rp308.919.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp18.700.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp290.219.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
  - 1) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 312/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 dan Nomor 312/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 Bulan Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 3) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 309/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.
  - 4) Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Nomor 360/086/BPBD-Kesbangpol/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 5) Nota dinas yang telah disetujui Bupati Banyuasin Nomor 360/019/BPBD-Kesbangpol/2020 Tanggal 24 Maret 2020 perihal Pengajuan Permintaan Rincian Anggaran Unit Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyuasin.
- 1.2. BTT melalui BPBD-Kesbangpol ke-II dengan realisasi sebesar Rp212.750.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
  - 1) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 312/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 3) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 309/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.

- 4) Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 322/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
  - 5) Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Nomor 360/119/BPBD-Kesbangpol/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 6) Nota Dinas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin Nomor 360/019/2020/BPBD-Kesbangpol/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Pengajuan Permintaan Rincian Anggaran Unit Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyuasin.
- 1.3. BTT melalui Dinas Kesehatan ke-I dengan realisasi SP2D sebesar Rp297.030.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp2.727,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp297.027.273,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 3) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19).
  - 5) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 309/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.
  - 6) Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 440/686/Kes/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Kesiapsiagaan Menghadapi Penyebaran Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 7) Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor 801.1/498/Kes/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 1.4. BTT melalui Dinas Kesehatan ke-II dengan realisasi sebesar Rp351.609.350,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 2) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 4) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
  - 5) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19).
  - 6) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 309/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.
  - 7) Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 440/686/Kes/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Kesiapsiagaan Menghadapi Penyebaran Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 8) Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor 801.1/294/Kes/III/2020 tanggal 04 Juni 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 9) Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor 900/315/Kes/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal Usulan Penambahan Dana BTT Percepatan Penanganan Covid 19 di Kabupaten Banyuasin.
- 1.5. BTT melalui Dinas Kesehatan ke-III dengan realisasi sebesar Rp990.930.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 3) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- 4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19).
  - 5) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 452/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
  - 6) Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 440/686/Kes/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Kesiapsiagaan Menghadapi Penyebaran Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 7) Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor 800.1/531/Kes/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap II.
- 1.6. BTT Melalui Dinas Kesehatan ke-IV dengan realisasi sebesar Rp1.959.325.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 3) Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/DINKES/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19).
  - 5) Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor 440/686/Kes/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Kesiapsiagaan Menghadapi Penyebaran Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - 6) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 452/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
  - 7) Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor 800.1/1036/Kes/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap II Termin II.
  - 8) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 900/315/Kes/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal Usulan Penambahan Dana BTT Percepatan Penanganan Covid 19 di Kabupaten Banyuasin.

- 1.7. BTT melalui RSUD ke-I dengan realisasi SP2D sebesar Rp733.750.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp1.055.968,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp732.694.032,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 312/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 Bulan Maret 2020 tentang Penetapan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 3) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 309/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.
  - 4) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Nomor 445/251.a/RSUD/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 5) Nota Dinas yang telah disetujui Direktur RSUD Kab. Banyuasin Nomor 445/251/RSUD/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penyampaian Usulan Kebutuhan Penanganan COVID-19 pada APBD RSUD Banyuasin Tahun 2020.
- 1.8. BTT melalui RSUD ke-II dengan realisasi SP2D sebesar Rp543.750.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp1.072.610,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp542.677.390,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 312/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 3) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 309/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.
  - 4) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Nomor 445/606/RSUD/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 5) Nota Dinas yang telah disetujui Direktur RSUD Kab. Banyuasin Nomor 445/251/RSUD/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penyampaian Usulan Kebutuhan Penanganan COVID-19 pada APBD RSUD Banyuasin Tahun 2020.



- 1.9. BTT melalui RSUD ke-III dengan realisasi SP2D sebesar Rp222.500.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp709.397,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp221.790.603,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 312/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 Bulan Maret 2020 tentang Penetapan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 3) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 309/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.
  - 4) Surat Pengantar dari RSUD Kabupaten Banyuasin Nomor 445/251/RSUD/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Perihal Penyampaian Usulan Kebutuhan Penanganan COVID-19 pada APBD RSUD Banyuasin Tahun 2020.
  - 5) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Nomor 445/658/RSUD/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 1.10. BTT melalui RSUD ke-IV dengan realisasi SP2D sebesar Rp1.200.000.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp14.032.580,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp1.185.967.420,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 312/KPTS/BPBD-Kesbangpol/2020 Bulan Maret 2020 tentang Penetapan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyuasin.
  - 3) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 719/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 07 September 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 Untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Wabah COVID 19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.
  - 4) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Nomor 445/734/RSUD/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Perihal Usulan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga.
  - 5) Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin Nomor 445/798/RSUD/2020 tanggal 24 September 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 1.11. BTT melalui Dinas Sosial ke-I dengan realisasi SP2D sebesar Rp31.000.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp10.500.000,00 sehingga

realisasi yang dicatat sebesar Rp20.500.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 337/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin Pada Dinas Sosial.
- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/222/Dinsos/2020 Tanggal 07 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/440/Dinsos/2020 tanggal 02 April 2020 Perihal Usul Permohonan Dana Tanggap Darurat COVID-19 di Banyuasin.

1.12. BTT melalui Dinas Sosial ke-II dengan realisasi SP2D sebesar Rp14.897.400.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp1.133.900.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp13.763.500.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 427/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Penularan COVID-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.
- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/344/Dinsos/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/460/Dinsos/2020 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Usul Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

1.13. BTT melalui Dinas Sosial ke-III dengan realisasi sebesar Rp7.034.500.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 410/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Penularan COVID-19 berupa Bantuan Sembako Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Banyuasin.
- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/349/Dinsos/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/400/Dinsos/2020 tanggal 29 April 2020 Perihal Rencana Pengadaan Sembako Untuk Keluarga Penerima Manfaat yang Terdampak COVID-19 di Banyuasin.

1.14. BTT melalui Dinas Sosial ke-IV dengan realisasi SP2D sebesar Rp27.613.636,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp2.613.636,00 sehingga

realisasi yang dicatat sebesar Rp25.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 337/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak COVID-19 di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Sosial.
- 2) Surat Dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/316/Dinsos/2020 tanggal 22 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/440/Dinsos/2020 tanggal 02 April 2020 Perihal Usul Permohonan Dana Tanggapi Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyuasin.

1.15. BTT melalui Dinas Sosial ke-V dengan realisasi sebesar Rp331.975.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 448/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 berupa Bantuan Sosial Makan Minum keluarga Pasien COVID 19 dan Petugas Medis di Mess Pemda dan Rusunawa Pemda Banyuasin, serta Operasional Satgas Penyaluran Bansos.
- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/370/Dinsos/2020 tanggal 19 Mei 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/530/Dinsos/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Usul Biaya Makanan dan Minuman Petugas Medis dan Keluarga Pasien COVID-19 di Mess Pemerintah Daerah dan Rusunawa Kabupaten Banyuasin.

1.16. BTT melalui Dinas Sosial ke-VI dengan realisasi sebesar Rp43.687.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 502/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 berupa Bantuan Sosial Makan Minum keluarga Pasien COVID 19 dan Petugas Medis Di Mess Pemda dan Rusunawa Pemda Banyuasin, serta Kelengkapan Operasional Penyaluran Bansos.
- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/448/Dinsos/2020 tanggal 22 Juni 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/530/Dinsos/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Usul Biaya Makanan dan Minuman Petugas Medis dan Keluarga Pasien COVID-19 di Mess Pemerintah Daerah dan Rusunawa Kabupaten Banyuasin.

1.17. BTT melalui Dinas Sosial ke-VII dengan realisasi SP2D sebesar Rp14.897.400.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar

Rp1.531.800.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp13.365.600.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 427/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/454/Dinsos/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/460/Dinsos/2020 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Usul Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

1.18. BTT melalui Dinas Sosial ke-VIII dengan realisasi sebesar Rp26.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 337/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Sosial.

2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/495/Dinsos/2020 tanggal 03 Juli 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/440/Dinsos/2020 tanggal 02 April 2020 Perihal Usul Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

1.19. BTT melalui Dinas Sosial ke-IX dengan realisasi sebesar Rp19.200.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 542/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Peluran COVID-19 berupa Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/489/Dinsos/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/569/Dinsos/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Usul Tambahan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

1.20. BTT melalui Dinas Sosial ke-X dengan realisasi sebesar Rp30.250.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:

1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 502/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 berupa Bantuan Sosial Makan Minum

keluarga Pasien COVID 19 dan Petugas Medis di Mess Pemda dan Rusunawa Pemda Banyuasin, serta Kelengkapan Operasional Penyaluran Bansos.

- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/563/Dinsos/2020 tanggal 24 Juli 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/530/Dinsos/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Usul Biaya Makanan dan Minuman Petugas Medis dan Keluarga Pasien COVID-19 di Mess Pemerintah Daerah dan Rusunawa Kabupaten Banyuasin.
- 1.21. BTT melalui Dinas Sosial ke-XI dengan realisasi sebesar Rp2.150.622.512,50. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 550/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Penularan COVID-19 berupa Penambahan Pengadaan Bantuan Sembako Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin No.800/557/Dinsos/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin No.800/556/Dinsos/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Usulan Penambahan Pengadaan Sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat yang terdampak COVID-19 di Banyuasin.
- 1.22. BTT melalui Dinas Sosial ke-XII dengan realisasi SP2D sebesar Rp14.897.400.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp1.575.000.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp13.322.400.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 427/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Penularan COVID-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.
  - 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/598/Dinsos/2020 tanggal 04 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/460/Dinsos/2020 tanggal 12 Mei 2020 Perihal Usul Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.
- 1.23. BTT melalui Dinas Sosial ke-XIII dengan realisasi sebesar Rp9.600.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 542/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Peluran COVID-19 berupa Tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/598/Dinsos/2020 tanggal 04 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/569/Dinsos/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Usul Tambahan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.
- 1.24. BTT melalui Dinas Sosial ke-XIV dengan realisasi sebesar Rp196.950.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 627/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak Peluran COVID-19 berupa Biaya Transportasi Pendistribusian Bantuan Pangan untuk Keluarga Penerima Manfaat Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.
  - 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/524/Dinsos/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pencairan Biaya Transportasi Pendistribusian Pangan.
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/712/Dinsos/2020 tanggal 27 Juli 2020 Perihal Usul Biaya Transportasi Pendistribusian Bantuan Pangan Terdampak COVID-19 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Banyuasin.
- 1.25. BTT melalui Dinas Sosial Ke-XV dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 502/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 berupa Bantuan Sosial Makan Minum Keluarga Pasien COVID 19 dan Petugas Medis di Mess Pemda dan Rusunawa Pemda Banyuasin, serta Kelengkapan Operasional Penyaluran Bansos.
  - 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/800/Dinsos/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/530/Dinsos/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Usul Biaya Makanan dan Minuman Petugas Medis dan Keluarga Pasien COVID-19 di Mess Pemerintah Daerah dan Rusunawa Kabupaten Banyuasin.
- 1.26. BTT melalui Dinas Sosial Ke-XVI dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 885/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 berupa Biaya Makan Minum keluarga Pasien COVID 19 dan Petugas Medis di Mess Pemda dan Rusunawa Pemda Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

- 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/246/Dinsos/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/957/Dinsos/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Usul Biaya Makanan dan Minuman Petugas Medis dan Keluarga Pasien COVID-19 di Mess Pemerintah Daerah dan Rusunawa Kabupaten Banyuasin.
- 2.1. BTT dari DID Periode Kedua melalui RSUD dengan realisasi SP2D sebesar Rp10.069.932.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp127.525.002,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp9.942.406.998,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 914/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yang Berasal dari Dana Insentif Daerah Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 Bidang Kesehatan di RSUD Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari RSUD Kabupaten Banyuasin Nomor 445/906/RSUD/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Usulan Penggunaan Anggaran Dana Insentif Daerah.
  - 3) Surat dari RSUD Kabupaten Banyuasin Nomor 445/917/RSUD/2020 tanggal 13 November 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 2.2. BTT dari DID Periode Kedua melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi SP2D sebesar Rp4.000.000.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp122.000.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp3.878.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasar dengan :
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 915/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yang Berasal Dari Dana Insentif Daerah Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 Bidang Sosial di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/2108/Disdikbud-PSMP/2020 tanggal 23 November 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/2037/Disdikbud-PSMP/2020 tanggal 23 November 2020 Perihal Usul Dana Bantuan kepada Mahasiswa/i Terdampak Covid 19 yang Berasal dari Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.
- 3.1. BTT dari DID Periode Ketiga melalui RSUD dengan realisasi SP2D sebesar Rp1.006.337.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp3.552.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp1.002.785.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan:

- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 925/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yang Berasal dari Dana Insentif Daerah Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 Bidang Kesehatan di RSUD Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari RSUD Kabupaten Banyuasin Nomor 445/905/RSUD/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Usulan Penggunaan Anggaran Dana Insentif Daerah.
  - 3) Surat dari RSUD Kabupaten Banyuasin Nomor 445/916/RSUD/2020 tanggal 13 November 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 3.2. BTT dari DID Periode Ketiga melalui Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 923/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yang Berasal dari Dana Insentif Daerah Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor 800.1/1879/Kes/XI/2020 tanggal 13 November 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana BTT DID.
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Nomor 900/1878/Kes/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Usulan Pengajuan Dana BTT DID Percepatan Penanganan Covid 19 di Kabupaten Banyuasin.
- 3.3. BTT dari DID Periode Ketiga melalui Dinas Sosial dengan realisasi SP2D sebesar Rp4.000.000.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp1.000.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp3.999.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 927/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yang Berasal dari Dana Insentif Daerah Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 Bidang Ekonomi di Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/829/Dinsos/2020 tanggal 13 November 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/593/Dinsos/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Usul Penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 di Kabupaten Banyuasin
- 3.4. BTT dari DID Periode Ketiga melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) dengan realisasi sebesar Rp2.400.000.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:



- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 922/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yang Berasal dari Dana Insentif Daerah Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 Bidang Ekonomi di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin Nomor 094/895/DPKUKM/2020 tanggal 13 November 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ke-3
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Nomor 800/593/Dinsos/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Usul Penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 di Kabupaten Banyuasin
- 3.5. BTT dari DID Periode Ketiga melalui Dinas Perikanan dengan realisasi SP2D sebesar Rp2.000.000.000,00. Namun, terdapat setoran pengurang belanja sebesar Rp47.452.000,00 sehingga realisasi yang dicatat sebesar Rp1.952.548.000,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- 1) Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 926/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 yang Berasal dari Dana Insentif Daerah Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Dampak COVID-19 Bidang Ekonomi di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin.
  - 2) Surat dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Nomor 523/921/Diskan/2020 tanggal 13 November 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga
  - 3) Nota Dinas dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Nomor 523/911/Diskan/2020 tanggal 09 November 2020 Perihal Usulan Penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 di Kabupaten Banyuasin
- 4.1. Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian sisa Dana Desa Tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp2.088.419.808,00. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga di atas berdasarkan hal berikut:
- a. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 986/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Pengembalian Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang Tidak Digunakan di RKUD.
  - b. Surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sekayu Nomor S-379/WPB.07/KP.04/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Penyampaian Kode *Billing* Setoran Sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan 2019.
  - c. Surat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 900/1515/BPKAD-Pb/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Penyetoran/Pemindahbukuan Sisa Dana Desa yang ada di RKUD Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Banyuasin.

### 5.1.3 Transfer

Realisasi belanja transfer tahun 2020 terealisasi sebesar Rp417.248.717.375,78 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp418.915.997.476,50. Belanja transfer terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Rincian belanja transfer tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 5.1.36**  
**Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja Transfer	Anggaran	Realisasi		%
			2020	2019	
1	Bantuan Keuangan ke Desa	417.623.432.590,50	415.956.152.489,78	420.206.826.705,61	99,60
2	Bantuan Keuangan Lainnya	1.292.564.886,00	1.292.564.886,00	1.275.946.834,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>418.915.997.476,50</b>	<b>417.248.717.375,78</b>	<b>421.482.773.539,61</b>	<b>99,60</b>

#### 5.1.3.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp415.956.152.489,78 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp417.623.432.590,50. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terbagi menjadi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp118.438.785.203,78 dan Bantuan Keuangan kepada Desa atau Dana Desa (DD) sebesar Rp297.517.367.286,00.

Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 dan pembayaran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Rincian realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.37**  
**Rincian Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	REALISASI
1	BANYUASIN I	4.783.740.522,58
2	BANYUASIN II	4.421.978.871,58
3	BANYUASIN III	7.853.706.399,58
4	PULAU RIMAU	6.492.934.152,88
5	BETUNG	3.909.746.521,94
6	RAMBUTAN	7.770.650.883,34
7	MUARA PADANG	6.190.416.479,92
8	MUARA TELANG	6.864.767.924,92
9	MAKARTI JAYA	4.455.317.908,56
10	TALANG KELAPA	2.702.354.540,26
11	RANTAU BAYUR	8.513.732.838,26
12	TANJUNG LAGO	6.066.891.071,14
13	MUARA SUGIHAN	9.115.329.574,00

NO	URAIAN	REALISASI
14	AIR SALEK	6.169.792.512,96
15	TUNGKAL ILIR	5.953.417.319,16
16	SUAK TAPEH	4.043.706.215,74
17	SEMBAWA	4.386.596.871,62
18	SUMBER MARGA TELANG	4.223.708.808,64
19	AIR KUMBANG	6.211.086.844,08
20	KARANG AGUNG ILIR	2.868.697.033,20
21	SELAT PENUGUAN	4.959.253.389,42
	Jumlah	<b>117.957.826.683,78</b>
22	Iuran BPJS ( <i>Virtual Account</i> )	480.958.520,00
	<b>TOTAL</b>	<b>118.438.785.203,78</b>

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa terdapat dua jenis penyaluran alokasi dana desa yakni penyaluran penghasilan tetap dan operasional desa dengan total sebesar Rp117.957.826.683,78 dan pembayaran BPJS melalui *Virtual Account* sebesar Rp480.958.520,00.

Penyaluran BPJS melalui *Virtual Account* dengan total sebesar Rp480.958.520,00 menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) melalui 3 (tiga) kali penyaluran dengan uraian sebagai berikut.

1. Penyaluran pertama untuk bulan Oktober berdasarkan surat dari Kepala BPJS Kantor Cabang Palembang Nomor 2537/III-01/1020 tanggal 2 Oktober 2020 Hal Tagihan Iuran Aparatur Desa Kabupaten Banyuasin, telah disalurkan dengan total realisasi sebesar Rp41.579.825,00 yang terdiri dari iuran 1% sebesar Rp8.315.965,00 melalui SP2D Nomor 2995/LS/4.04.01.02.00/5.1/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan iuran 4% sebesar Rp33.263.860,00 melalui SP2D Nomor 3043/LS/4.04.01.02.00/5.1/2020 tanggal 8 Oktober 2020.
2. Penyaluran kedua untuk bulan November berdasarkan surat dari Kepala BPJS Kantor Cabang Palembang Nomor 2826/III-01/1120 tanggal 4 November 2020 Hal Tagihan Iuran Aparatur Desa Kabupaten Banyuasin, telah disalurkan dengan total realisasi sebesar Rp207.257.925,00 yang terdiri dari iuran 1% sebesar Rp41.451.585,00 melalui SP2D Nomor 3708/LS/4.04.01.02.00/5.1/2020 tanggal 13 November 2020 dan iuran 4% sebesar Rp165.806.340,00 melalui SP2D Nomor 3709/LS/4.04.01.02.00/5.1/2020 tanggal 13 November 2020.
3. Penyaluran ketiga untuk bulan Desember sesuai surat dari Kepala BPJS Kantor Cabang Palembang Nomor 3093/III-01/1220 tanggal 4 Desember 2020 Hal Tagihan Iuran Aparatur Desa Kabupaten Banyuasin, telah disalurkan dengan total realisasi sebesar Rp232.120.770,00 yang terdiri dari iuran 1% sebesar Rp46.424.154,00 melalui SP2D Nomor 4912/LS/4.04.01.02.00/5.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan iuran 4% sebesar Rp185.696.616,00 melalui SP2D Nomor 4913/LS/4.04.01.02.00/5.1/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Sedangkan Bantuan Keuangan kepada Desa atau Dana Desa (DD) pada Kabupaten Banyuasin yang terealisasi sebesar Rp297.517.367.286,00 tercantum dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI dan pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penggunaan dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi serta Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2020.

Tabel berikut menggambarkan transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran 2020.

**Tabel 5.1.38**  
**Transfer dari RKUN ke RKD dan RKUD ke RKD Tahun Anggaran 2020**

No.	URAIAN	SP2D			Mekanisme Penyaluran	KET
		Nomor	Tanggal	Nilai		
	<b>DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020</b>			<b>297.517.367.286,00</b>		
I	<b>DANA DESA TAHAP I (RKUN ke RKD)</b>			<b>119.786.656.850,00</b>		<b>288 Desa</b>
I.a	<b>MEKANISME REGULER (40%)</b>			<b>88.793.462.400,00</b>		<b>213 Desa</b>
1	Tahap 1 Batch 1	201601302000164	22/04/20	5.334.989.600,00	REGULER (40%)	12 DESA
2	Tahap 1 Batch 2	201601302000176	04/05/20	63.322.370.800,00	REGULER (40%)	153 DESA
3	Tahap 1 Batch 3	201601302000183	05/05/20	20.136.102.000,00	REGULER (40%)	48 DESA
I.b	<b>MEKANISME BULANAN</b>			<b>30.993.194.450,00</b>		<b>75 DESA</b>
I.b.1	<b>PENYALURAN PERTAMA (15%)</b>			<b>11.635.618.950,00</b>		<b>75 DESA</b>
1	Tahap 1 Batch 4	201601302000194	08/05/20	1.944.171.000,00	BULANAN (TAHAP I (15%) BULAN 1 (1))	13 DESA
2	Tahap 1 Batch 5	201601302000206	14/05/20	4.059.424.500,00	BULANAN (TAHAP I (15%) BULAN 1 (2))	27 DESA
3	Tahap 1 Batch 6	201601302000214	18/05/20	1.876.487.400,00	BULANAN (TAHAP I (15%) BULAN 1 (3))	12 DESA
4	Tahap 1 Batch 7	201601302000213	18/05/20	1.185.471.450,00	BULANAN (TAHAP I (15%) BULAN 1 (4))	7 DESA
5	Tahap 1 Batch 8	201601302000220	20/05/20	2.570.064.600,00	BULANAN (TAHAP I (15%) BULAN 1	16 DESA

No.	URAIAN	SP2D			Mekanisme Penyaluran	KET
		Nomor	Tanggal	Nilai		
					(5))	
<b>I.b.2</b>	<b>PENYALURAN KEDUA (15%)</b>			<b>11.614.545.300,00</b>		<b>75 DESA</b>
1	Tahap 1 Batch 9	201601302000242	03/06/20	11.614.545.300,00	BULANAN (TAHAP I (15%) BULAN 2)	75 DESA
<b>I.b.3</b>	<b>PENYALURAN KETIGA (10%)</b>			<b>7.743.030.200,00</b>		<b>75 DESA</b>
1	Tahap 1 Batch 10	201601302000263	18/06/20	7.743.030.200,00	BULANAN (TAHAP I (10%) BULAN 3)	75 DESA
<b>II</b>	<b>PENYALURAN SISA DANA DESA TAHUN 2019 (RKUD ke RKD)</b>			<b>947.855.086,00</b>		<b>2 DESA</b>
1	Tahap 3 Desa Upang Ceria (40%)	1920/LS/4.04.01.02.00/5.1/ DDS/2020	29/6/20	489.812.611,00	SISA DANA DESA TA 2019	1 Desa
2	Tahap 3 Desa Maju Ria (40%)	1921/LS/4.04.01.02.00/5.1/ DDS/2020	29/6/20	458.042.475,00	SISA DANA DESA TA 2019	1 Desa
<b>III</b>	<b>DANA DESA TAHAP II (RKUN ke RKD)</b>			<b>118.844.826.800,00</b>		<b>288 DESA</b>
1	Tahap 2 Batch 1	201601302000287	02/07/20	44.566.810.050,00	BULANAN (TAHAP II (15%) BULAN 4)	288 DESA
2	Tahap 2 Batch 2	201601302000308	20/07/20	44.566.810.050,00	BULANAN (TAHAP II (15%) BULAN 5)	288 DESA
3	Tahap 2 Batch 3	201601302000327	03/08/20	29.711.206.700,00	BULANAN (TAHAP II (10%) BULAN 6)	288 DESA
<b>IV</b>	<b>DANA DESA TAHAP III (RKUN ke RKD)</b>			<b>57.938.028.550,00</b>		<b>286 DESA</b>
1	Tahap 3 Batch 1	201601302000554	19/11/20	55.373.936.000,00	REGULER (20%)	275 DESA
2	Tahap 3 Batch 2	201601302000555	19/11/20	2.059.818.350,00	REGULER (20%)	9 DESA
3	Tahap 3 Batch 3	201601302000644	15/12/20	504.274.200,00	REGULER (20%)	2 DESA

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 pada Rekening Kas Desa yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya antara Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin sebanyak 288 desa dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuasin dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin). Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tersebut terdapat 109 Pemerintah Desa dari 288 dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin yang masih mempunyai sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan total sebesar Rp356.725.676,00.

Sisa Dana Desa tahun 2019 s.d. bulan Juli 2020 di RKUD yang tidak disalurkan ke RKD sebesar Rp2.088.419.808,00 sehingga total dana desa yang masih di RKD dan RKUD sebesar Rp2.445.145.484,00 sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Kepala BPKAD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan Nomor BAR-1109/403601/2020 tanggal 16 November 2020.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020, jumlah pemerintah desa yang telah menyetorkan sisa Dana Desa di RKD TA 2015 s.d. 2018 hasil rekonsiliasi ke RKUD sebanyak 107 desa dari 109 desa dalam wilayah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp260.806.900,00. Terdapat dua pemerintah desa yang belum melakukan penyetoran hasil rekonsiliasi dengan jumlah sebesar Rp95.918.716,00 yaitu Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa sebesar Rp43.990.906,00 dan Desa Sumber Rejeki Kecamatan Karang Agung Ilir sebesar Rp51.927.870,00.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menyetorkan Sisa Dana Desa ke RKUN dengan total sebesar Rp2.349.226.708,00 pada tanggal 23 Desember 2020 yang terdiri dari dua kali penyetoran yaitu penyetoran Sisa Dana Desa di RKUD yang tidak disalurkan ke RKD sebesar Rp2.088.419.808,00 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) nomor 9A8026U8DPTQ9OP1 dan penyetoran Sisa Dana Desa di RKD yang telah disetorkan ke RKUN sebesar Rp260.806.900,00 dengan NTPN nomor 49C4548VUA6L2OV2. Sementara sisa Dana Desa yang belum disetor ke RKUN hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan KPPN sebesar Rp95.918.716,00 akan menjadi perhitungan pemotongan DAU dan/atau DBH tahun anggaran berikutnya.

### 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kepada Partai Politik Dalam Kabupaten Banyuasin, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.292.564.886,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.292.564.886.000,00. Bantuan kepada Partai Politik Periode Tahun 2019 s.d. 2024 berdasarkan pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 161 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Rincian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 5.1.39**  
**Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2020**

No	Nama Partai Politik	Realisasi
1	Partai Golongan Karya (Golkar)	202.174.803,00
2	Partai Demokrat (PD)	69.368.251,00

No	Nama Partai Politik	Realisasi
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	141.114.564,00
4	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	55.960.482,00
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	96.731.169,00
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	46.843.564,00
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	101.353.489,00
8	Partai Kabangkitan bangsa (PKB)	137.845.489,00
9	Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	25.310.243,00
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	198.604.669,00
11	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	91.494.567,00
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	125.763.596,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.292.564.886,00</b>

#### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

##### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp425.276.591.731,71 atau 98,78% dari anggaran Rp430.501.991.249,51. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp152.209.548.344,14 dan Pinjaman dalam negeri sebesar Rp273.067.043.387,57.

##### 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp89.409.362.308,44 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp89.517.159.122,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp11.261.257.971,00 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp11.369.054.785,00 dan Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp78.148.104.337,44 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp78.148.104.337,00.

##### 5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp11.261.257.971,00 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp11.369.054.785,00. Tabel berikut menggambarkan rincian Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

**Tabel 5.1.40**  
**Rincian Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>PENYERTAAN MODAL BANK SUMSEL BABEL PANGKALAN BALAI</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Pembayaran Penyertaan Modal (Saham) Pemerintah Kab. Banyuasin Ke Bank Sumsel Babel Cab. Pangkalan Balai		5.000.000.000,00	
2	<b>PENYERTAAN MODAL PDAM TIRTA BETUAH</b>	<b>3.369.054.785,00</b>	<b>3.261.257.971,00</b>	<b>96,80</b>
	Tagihan Listrik Bulan Januari dan Februari 2020		583.823.007,00	
	Tagihan Listrik Bulan Maret 2020		244.868.200,00	
	Tagihan Listrik Bulan April 2020		248.585.626,00	
	Tagihan Listrik Bulan Mei 2020		226.037.003,00	
	Tagihan Listrik Bulan Juni 2020		265.740.913,00	
	Tagihan Listrik Bulan Juli 2020		267.376.628,00	
	Tagihan Listrik Bulan Agustus 2020		280.798.657,00	
	Tagihan Listrik Bulan September 2020		283.475.878,00	
	Tagihan Listrik Bulan Oktober 2020		289.384.464,00	
	Tagihan Listrik Bulan November dan Desember 2020		571.167.595,00	
3	<b>PENYERTAAN MODAL BUMD SEI SEMBILANG</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Biaya pengeluaran pembiayaan daerah (Penyertaan Modal Pemda ke BUMD Perumda SEI SEMBILANG Perda No.06 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah)		3.000.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.369.054.785,00</b>	<b>11.261.257.971,00</b>	<b>99,05</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran pembiayaan daerah terbagi menjadi tiga jenis yaitu penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, penyertaan modal PDAM Tirta Betuah dan penyertaan modal BUMD Sei Sembilang, dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyertaan modal (saham) Pemerintah Kab. Banyuasin Ke Bank Sumsel Babel Cab. Pangkalan Balai yang terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 184/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 serta surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalan Balai Nomor 103/PBL/4/B/2020 perihal Setoran Saham.
2. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Betuah terealisasi sebesar Rp3.261.257.971,00 direalisasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Betuah diperuntukkan untuk membayar tagihan listrik dengan rincian sebagai berikut.



- a. Realisasi sebesar Rp583.823.007,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 03 Maret 2020 Nomor 690.14/PDAM-TB/BA/III/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Januari tahun 2020 dan Februari Tahun 2020.
  - b. Realisasi sebesar Rp244.868.200,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 01 April 2020 Nomor 690/PDAM-TB/BA/III/2020 perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Maret Tahun 2020.
  - c. Realisasi sebesar Rp248.585.626,00 sesuai dengan surat Dari PDAM Tirta Betuah tanggal 28 April 2020 Nomor 690.45/PDAM-TB/BA/IV/2020 perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan April Tahun 2020.
  - d. Realisasi sebesar Rp226.037.003,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 02 Juni 2020 Nomor 690.54/PDAM-TB/BA/VI/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Mei Tahun 2020.
  - e. Realisasi sebesar Rp265.740.913,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal tanggal 10 Juli 2020 Nomor 690.70/PDAM-TB/BA/VII/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Juni Tahun 2020.
  - f. Realisasi sebesar Rp267.376.628,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 690.78/PDAM-TB/BA/VIII/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Juli Tahun 2020.
  - g. Realisasi sebesar Rp280.798.657,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 07 September 2020 Nomor 690.88/PDAM-TB/BA/XI/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Agustus Tahun 2020.
  - h. Realisasi sebesar Rp283.475.878,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 07 Oktober 2020 Nomor 690.107/PDAM-TB/BA/X/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan September Tahun 2020.
  - i. Realisasi sebesar Rp289.384.464,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 690.115/PDAM-TB/BA/X/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Oktober Tahun 2020.
  - j. Realisasi sebesar Rp571.167.595,00 sesuai dengan surat dari PDAM Tirta Betuah tanggal 14 Desember 2020 Nomor 690.130/PDAM-TB/BA/XII/2020 Perihal Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal Ke PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin untuk Bulan November dan Desember Tahun 2020.
3. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD Sei Sembilang terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai dengan surat dari Perusahaan Umum Daerah Sei

Sembilang tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 18/PM/Mk.00/SS/X/2020 Perihal Permohonan Penyertaan Modal.

#### **5.1.4.2.2 Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp78.148.104.337,44 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp78.148.104.337,00 sesuai Surat Bupati Banyuasin Nomor: 900/1362/BPKAD-Pb/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan Nomor 900/1387/BPKAD-Pb/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut.

1. Angsuran Pokok bulan April s.d. Juni Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp26.049.368.112,48 sesuai surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 951/KRD/2/B/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Angsuran Pertama.
2. Angsuran Pokok Bulan Juni s.d. September Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp26.049.368.112,48 sesuai surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 1334/KRD/2/B/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Angsuran Kedua.
3. Angsuran Pokok Bulan September s.d. Desember Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp26.049.368.112,48 sesuai surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 2279/KRD/2/B/2020 tanggal 07 Desember 2020 perihal Angsuran Ketiga.

#### **5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.169.031.876,39 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto.

## **5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal**

Saldo anggaran lebih awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp157.434.947.861,94.

### **5.2.2 Koreksi Kesalahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal**

Koreksi kurang saldo anggaran lebih awal sebesar Rp5.225.399.517,80 terdiri dari penyesuaian pendapatan kurang bayar atas Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp5.360.807,00, Bagi hasil dari iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp5.232.576.348,00 yang dipotong langsung oleh pemerintah pusat dan koreksi atas SiLPA pada 4 (empat) Puskesmas tahun 2019 (Puskesmas Sidomulyo, Puskesmas Petaling, Puskesmas Mariana dan Puskesmas Tanjung Lago) sebesar Rp12.537.637,20 yang merupakan koreksi kas pada Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2019 namun belum mengoreksi Laporan Perubahan SAL sehingga pada tahun 2020 masuk ke dalam koreksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal.

### **5.2.3 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai Penerimaan Tahun Berjalan**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar Rp152.209.548.344,14 merupakan selisih dari Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp157.434.947.861,94 dikurangi dengan koreksi SAL Awal sebesar Rp5.225.399.517,80.

### **5.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp9.169.031.876,39 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus/Defisit	: (Rp 326.698.197.546,88)
- Pembiayaan Netto	: <u>Rp 335.867.229.423,27</u>
SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan	: Rp 9.169.031.876,39

### **5.2.5 Lain-Lain**

Tidak terdapat saldo koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020.

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.3.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp4.527.851.856.857,75 dan Rp4.215.741.205.022,83 disajikan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.1**  
**Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 dan 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	%
Aset lancar	205.799.685.096,54	299.598.454.453,86	(93.798.769.357,32)	(31,31)
Investasi Jangka Panjang	190.750.295.398,25	221.058.528.555,68	(30.308.233.157,43)	(13,71)
Aset Tetap	3.820.778.089.164,46	3.376.278.200.718,15	444.499.888.446,31	13,17
Aset Lainnya	310.523.787.198,50	318.806.021.295,14	(8.282.234.096,64)	(2,60)
<b>Jumlah</b>	<b>4.527.851.856.857,75</b>	<b>4.215.741.205.022,83</b>	<b>312.110.651.834,92</b>	<b>7,40</b>

Berdasarkan rincian pada tabel 5.3.1 diatas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp312.110.651.834,92 atau 7,40%. Penyebab terjadinya kenaikan aset dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Kabupaten Banyuasin.

**Gambar 5.3.1**

**Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2020**



### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp205.799.685.096,54 dan Rp299.598.454.453,86 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.2**  
**Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan
Kas dan setara kas	10.201.441.407,39	117.430.017.295,14	(107.228.575.887,75)
Investasi Jangka Pendek	0,00	40.000.000.000,00	(40.000.000.000,00)
Piutang	150.784.861.786,10	138.258.506.664,07	12.526.355.122,03
Penyisihan Piutang	(65.703.983.750,79)	(56.217.818.912,69)	(9.486.164.838,10)
Beban Dibayar Dimuka	302.809.602,37	860.900.769,24	(558.091.166,87)
Persediaan	110.214.556.051,47	59.266.848.638,10	50.947.707.413,37
<b>Jumlah</b>	<b>205.799.685.096,54</b>	<b>299.598.454.453,86</b>	<b>(93.798.769.357,32)</b>

#### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp10.201.441.407,39 dan Rp117.430.017.295,14 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.3**  
**Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019
Kas di Kas Daerah (BUD)	2.345.445.063,72	37.622.729.581,25
Kas di Bendahara Pengeluaran	225.839.463,00	47.025.861,00
Kas di Bendahara Penerimaan	207.100.860,00	6.589.700,00
Kas di BLUD	1.164.855.599,79	2.246.845.658,09
Kas di Bendahara FKTP	1.367.017.664,88	1.773.830.037,80
<i>Deposito on Call</i>	500.000.000,00	60.000.000.000,00
Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	4.391.182.756,00	15.732.996.457,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.201.441.407,39</b>	<b>117.430.017.295,14</b>

Saldo kas dan setara kas di atas sudah termasuk dana titipan atas nama Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp2.405.490.768,00 yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan Kuasa Pertambangan sebesar Rp2.373.490.768,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp32.000.000,00.

#### 1) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.345.445.063,72 dan Rp37.622.729.581,25 merupakan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.4**  
**Rincian Kas di Kas Daerah 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019
Kas di Kas Daerah (BUD)		
• Rek. 1673000002 Rekening Dana Rutin	2.345.309.255,72	37.586.348.162,25
• Rek. 1673000004 Rekening Gaji	0,00	36.381.419,00
• Rek. Penampungan JKN KIS No 1673000032	135.808,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.345.445.063,72</b>	<b>37.622.729.581,25</b>

## 2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp225.839.463,00 dan Rp47.025.861,00 merupakan saldo yang belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.5**  
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	2020	2019
1	Dinas Sosial	15.000.000,00	33.979.386,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	189.000.000,00	0,00
3	Kecamatan Muara Padang	21.839.416,00	0,00
4	Kecamatan Tungkal Ilir	47,00	0,00
5	Kecamatan Makarti Jaya	0,00	11.321.476,00
6	Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.724.999,00
	<b>Jumlah</b>	<b>225.839.463,00</b>	<b>47.025.861,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial sebesar Rp15.000.000,00 merupakan sisa dana pengembalian Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Langsung Tunai yang belum disetor ke Kas Daerah dan telah disetor pada tanggal 15 Februari 2021. Saldo Kas di Bendahara Dinas Kominfo sebesar Rp189.000.000,00 dan Kecamatan Tungkal Ilir sebesar Rp47,00 merupakan sisa UYHD sedangkan saldo kas di Bendahara Kecamatan Muara Padang sebesar Rp21.839.416,00 merupakan saldo pajak yang belum disetor per 31 Desember 2020.

Saldo diatas tidak termasuk saldo kas di rekening bendahara pengeluaran yang akan digunakan untuk belanja modal tanah pelebaran jalan senilai Rp479.779.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum diperoleh kesepakatan harga sehingga dana tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan berita acara penitipan uang ganti kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pkb tanggal 8 Januari 2021.

## 3) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp207.100.860,00 dan Rp6.589.700,00. Saldo kas di Bendahara Penerimaan

merupakan saldo yang masih terdapat di rekening penampungan sembilan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah.

#### 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Saldo Kas di BLUD yang terdapat di RSUD Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.164.855.599,79 dan Rp2.246.845.658,09 merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sementara Kas di Bendahara Penerimaan telah disajikan di akun Kas di Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.6**  
**Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	Saldo Bank	1.146.930.971,91	2.243.925.553,21
2	Saldo Kas Tunai	17.924.627,88	2.920.104,88
<b>Jumlah</b>		<b>1.164.855.599,79</b>	<b>2.246.845.658,09</b>

#### 5) Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan sisa penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.367.017.664,88 dan Rp1.773.830.037,80 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.7**  
**Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(dalam rupiah)*

No	FKTP	2020	2019
1	PKM Sumber	3.404.702,20	104.133,20
2	PKM Tanjung Lago	59.968.971,00	83.662.233,00
3	PKM Tirta Harja	20.495.185,00	61.661.604,00
4	PKM Karang Manunggal	15.192.354,28	14.022.739,20
5	PKM Maryana	1.929.341,00	76.708.528,00
6	PKM Cinta Manis Baru	43.146.756,00	15.778.280,00
7	PKM Srikaton	69.605.060,00	111.176.246,00
8	PKM Daya Utama	58.305.138,00	65.378.011,00
9	PKM Simpang Rambutan	45.290.774,00	13.601.111,00
10	PKM Margo Mulyo	21.633.309,40	61.499.267,40
11	PKM Sungai Dua	4.680.570,00	2.772.848,00
12	PKM Sungsang	10.638.805,00	85.134.106,00
13	PKM Makarti Jaya	17.676.393,60	67.719.486,60
14	PKM Talang Jaya Telang	209.602.321,00	245.842.663,00
15	PKM Muara Telang	36.267.486,00	45.321.123,00
16	PKM Pangkalan Balai	59.436.756,00	105.236.873,00
17	PKM Talang Jaya Betung	52.963.869,00	98.698.684,00
18	PKM Pengumbuk	2.046.121,00	545.065,00
19	PKM Dana Mulya	49.727.479,20	20.998.807,20
20	PKM Sukaraja	34.838.580,00	97.296.160,00
21	PKM Betung Kota	48.034.360,00	36.485.895,00
22	PKM Sembawa	11.488.340,00	92.363.826,00
23	PKM Mekar Sari	7.186.012,00	1.261.989,00

No	FKTP	2020	2019
24	PKM Petaling	24.214.662,20	86.670.745,20
25	PKM Sementul	13.024.528,00	18.279.700,00
26	PKM Karang Agung Ilir	59.487.101,00	44.752.556,00
27	PKM Sukajadi	183.049.328,00	115.132.060,00
28	PKM Kenten Laut	76.329.978,00	87.060.197,00
29	PKM Gasing Laut	237,00	213,00
30	PKM Sido Mulyo	31.741.478,00	10.884.168,00
31	PKM Suak Tapeh	9.977.409,00	7.513.887,00
32	PKM Jakabaring	24.888.541,00	258.127,00
33	PKM Tanjung Api-Api	4.952.291,00	8.706,00
34	RSUD Makarti Jaya Kelas D Pratama	1.878.878,00	0,00
35	RSUD Sukajadi Kelas D Pratama	53.914.550,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.367.017.664,88</b>	<b>1.773.830.037,80</b>

#### 6) *Deposit on Call*

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp60.000.000.000,00 merupakan dana yang didepositokan berupa *Deposit on Call* (DOC), dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.8**  
**Rincian DOC (*Deposit on Call*)**

(dalam rupiah)

Rekening	URAIAN	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
1130204744548	Penempatan Deposito Bank Mandiri Cabang Sukajadi	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
1130204744530	Penempatan Deposito Bank Mandiri Cabang Sukajadi	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
220601000410409	Penempatan Deposito Bank BRI KCP Sako Palembang	10.000.000.000,00	500.000.000,00	10.000.000.000,00	500.000.000,00
220601000495409	Penempatan Deposito Bank BRI KCP Sako Palembang	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
220601000500408	Penempatan Deposito Bank BRI KCP Sako Palembang	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
1674003620	Penempatan Deposito Bank Sumselbabel	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
1674003720	Penempatan Deposito Bank Sumselbabel	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
1674003820	Penempatan Deposito Bank Sumselbabel	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
1674003920	Penempatan Deposito Bank Sumselbabel	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
110001000334400	Penempatan Deposito Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
110001000363409	Penempatan Deposito Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
110001000372408	Penempatan Deposito Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00



Rekening	URAIAN	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
110001000392408	Penempatan Deposito Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
110001000403403	Penempatan Deposito Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
110001000410400	Penempatan Deposito Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
110001000411406	Penempatan Deposito Ke Bank BRI KCP Pangkalan Balai	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
A654933 / 2020IDR000119	Penempatan Deposito BJB Cabang Palembang	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
A654934 / 2020IDR000120	Penempatan Deposito BJB Cabang Palembang	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
A654935 / 2020IDR000121	Penempatan Deposito BJB Cabang Palembang	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
A654936 / 2020IDR000122	Penempatan Deposito BJB Cabang Palembang	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
A400460	Penempatan Deposito BJB Cabang Palembang	0,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.000.000.000,00</b>	<b>180.500.000.000,00</b>	<b>240.000.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>

## 7) Kas di Bendahara Sekolah

Saldo Kas di Bendahara Sekolah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.391.182.756,00 dan Rp15.732.996.457,00 merupakan dana BOS yang berada di rekening sekolah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.9**  
**Rincian Kas di Bendahara Sekolah**

*(dalam rupiah)*

No	Jenis	Uraian	2020	2019
1	Dana BOS	Sekolah Dasar (SD)	2.069.683.474,00	692.362.068,00
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	388.622.109,00	134.634.389,00
		<b>Sub jumlah</b>	<b>2.458.305.583,00</b>	<b>826.996.457,00</b>
2	BOS Afirmasi	Sekolah Dasar (SD)	1.345.101.696	9.780.000.000,00
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	196.145.446	3.432.000.000,00
		<b>Sub jumlah</b>	<b>1.541.247.142,00</b>	<b>13.212.000.000,00</b>
3	BOS Kinerja	Sekolah Dasar (SD)	245.051.461	889.000.000,00
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	146.578.570	805.000.000,00
		<b>Sub jumlah</b>	<b>391.630.031,00</b>	<b>1.694.000.000,00</b>
<b>Total</b>			<b>4.391.182.756,00</b>	<b>15.732.996.457,00</b>

Rincian saldo Kas di Bendahara Sekolah pada **Lampiran 6, 7 dan 8**.

### 5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40.000.000.000,00 merupakan penempatan deposito yang kurang dari 6 bulan di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Palembang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.10**  
**Rincian Mutasi Investasi Jangka Pendek**

*(dalam rupiah)*

Rekening	URAIAN	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
0391220200360/ A654684	Deposito BJB Cabang Palembang	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
0391220200360/ A654685	Deposito BJB Cabang Palembang	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
0391220200360/ A654686	Deposito BJB Cabang Palembang	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
0391220200360/ A654687	Deposito BJB Cabang Palembang	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>40.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3.1.1.3 Piutang

Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Banyuasin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp150.784.861.786,10 dan Rp138.258.506.664,07 terdiri dari:

**Tabel 5.3.11**  
**Rincian Piutang Per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Tambah	Kurang	
Piutang Pajak Daerah	100.329.814.510,41	137.166.393.307,49	123.798.388.439,59	113.697.819.378,31
Piutang Retribusi Daerah	12.293.734,00	0,00	0,00	12.293.734,00
Piutang Dana Transfer Pusat	9.824.849.629,00	78.366.385.178,00	65.895.008.858,00	22.296.225.949,00
Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	5.798.801.028,00	5.627.593.480,00	5.798.801.028,00	5.627.593.480,00
Piutang Jamsoskes	4.695.947.865,56	0,00	4.695.947.865,56	0,00
Piutang Lain-Lain	17.596.799.897,10	2.221.154.530,95	10.667.025.183,26	9.150.929.244,79
<b>Total</b>	<b>138.258.506.664,07</b>	<b>223.381.526.496,44</b>	<b>210.855.171.374,41</b>	<b>150.784.861.786,10</b>

### 1) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp113.697.819.378,31 dan Rp100.329.814.510,41 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.12**  
**Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Tambah	Kurang	
Pajak Hotel	31.147.265,10	2.143.657.882,00	2.174.805.147,10	0,00
Pajak Restoran	114.078.457,00	6.493.604.170,00	6.582.191.572,00	25.491.055,00
PBB	100.182.886.391,00	38.031.794.065,00	24.881.985.646,00	113.332.694.810,00
Pajak Hiburan	0,40	1.404.762.291,49	1.404.762.291,49	0,40

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Tambah	Kurang	
Pajak Reklame	1.650.000,00	811.243.930,00	793.339.430,00	19.554.500,00
Pajak Penerangan Jalan	8.366,11	40.306.893.275,00	40.295.094.610,00	11.807.031,11
Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya	0,00	2.031.003.168,00	1.727.934.668,00	303.068.500,00
Pajak Air Bawah Tanah	44.030,80	4.416.036.156,00	4.410.876.705,00	5.203.481,80
Pajak Walet	0,00	31.942.000,00	31.942.000,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	752.670.927,00	752.670.927,00	0,00
BPHTB	0,00	40.742.785.443,00	40.742.785.443,00	0,00
<b>Total</b>	<b>100.329.814.510,41</b>	<b>137.166.393.307,49</b>	<b>123.798.388.439,59</b>	<b>113.697.819.378,31</b>

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, menetapkan kategori Piutang pajak Daerah berdasarkan umur Piutang yaitu kategori lancar dengan umur < 1 Tahun, kurang lancar 1-3 tahun, diragukan 3-5 tahun, dan macet > 5 tahun. Rincian umur Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.13**  
**Umur Piutang Pajak Daerah**

*(dalam rupiah)*

Jenis Pajak	UMUR PIUTANG				JUMLAH
	< 1 TAHUN	1 -3 TAHUN	3 - 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
Pajak Restoran	24.790.535,00	700.520,00	0,00	0,00	25.491.055,00
PBB	17.885.648.214,00	28.461.544.950,00	22.883.268.366,00	44.102.233.280,00	113.332.694.810,00
Pajak Hiburan	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
Pajak Reklame	19.554.500,00	0,00	0,00	0,00	19.554.500,00
Pajak Penerangan Jalan	11.798.665,00	8.366,11	0,00	0,00	11.807.031,11
Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya	303.068.500,00	0,00	0,00	0,00	303.068.500,00
Pajak Air Bawah Tanah	5.159.451,00	44.030,80	0,00	0,00	5.203.481,80
<b>Jumlah</b>	<b>18.250.019.865,00</b>	<b>28.462.297.867,31</b>	<b>22.883.268.366,00</b>	<b>44.102.233.280,00</b>	<b>113.697.819.378,31</b>

Penjelasan saldo piutang pajak daerah tersebut sebagai berikut.

**a. Piutang Pajak Hotel**

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dikarenakan semua wajib pajak membayar tagihannya sebelum tanggal 31 Desember 2020.

**b. Piutang Pajak Restoran**

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.491.055,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.14**  
**Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

No	Nama WP	No Ketetapan	Tahun Ketetapan	Nilai
1	Warung Makan Fikram Jaya/H. Andi Saleh	7/SPTPD.2041/1.8/2/12/18	2018	50.000,00
2	RM. Pondok Lintas	1/SPTPD.2065/1.1/2.5/18	2018	25.000,00
3	RM. Tahu Sumedang Renyah	8/SPTPD.935/1.7/2/3/18	2018	20,00
4	RM. Yulia Ampera	5/SPTPD.1240/1.8/2/12/18	2018	360.000,00
5	Resto Ayam Jfc	4/SPTPD.1713/2.6/2/3/18	2018	500,00
6	RM. Ampera Indah	4/SPTPD.2446/2.8/2/10/18	2018	500,00
7	CFC Jakabaring	900005174/RES/21	2020	10.311.889,00
8	CFC Opi Mall	900005175/RES/21	2020	7.773.710,00
9	Bakso Sido Maju	900001650/RES/20	2020	50.000,00
10	RM Bareh Solok	900001847/RES/20	2020	50.000,00
11	Kedai Kopi Hag	900001176/RES/20	2020	100.000,00
12	Wr. Nasi Monggo Mampir	900001177/RES/20	2020	50.000,00
13	Purnomo	900001184/RES/20	2020	50.000,00
14	Warung Makan Fikram Jaya	900000974/RES/20	2020	150.000,00
15	Ridho	900002691/RES/20	2020	50.000,00
16	RM. Salero Anda 3	900004971/RES/20	2020	40.000,00
17	RM. Sudih Mampir	900004973/RES/21	2020	100.000,00
18	RM. Palapa Perima	900000418/RES/20	2020	760.000,00
19	Vee Dee	900000498/RES/20	2020	150.000,00
20	Pkk. Kec. Suak Tapeh	900000636/RES/20	2020	45.000,00
21	RM. Gerbang Elok	900000822/RES/20	2020	160.000,00
22	Warung Makan Apa Bae	900000867/RES/20	2020	27.000,00
23	RM Minang Raya	900000847/RES/20	2020	42.000,00
24	Incha Snack Katering	900001013/RES/20	2020	100.000,00
25	RM. Palapa	900001014/RES/20	2020	114.000,00
26	Chetring Dona Doni	900001015/RES/20	2020	100.000,00
27	Rm. Simpang Tigo	900001306/RES/20	2020	600.500,00
28	Kantin Minarni	900001319/RES/20	2020	87.500,00
29	RM. Wing'S Wow	900001364/RES/20	2020	115.000,00
30	Warung Mba Menis	900001391/RES/20	2020	200.000,00
31	Wm. Indah Sari	900001712/RES/20	2020	48.000,00
32	RM. Ayam Bakar Solo Berseri	900001911/RES/20	2020	400.000,00
33	RM. Bayo Angin	900001933/RES/20	2020	200.000,00
34	Wn Pak Kumis 3 Putri	900001823/RES/20	2020	85.700,00
35	RM. Wing'S Wow	900001824/RES/20	2020	11.500,00
36	RM. Gunawan	900002592/RES/20	2020	382.000,00
37	RM. Bunda Tiara	900004156/RES/20	2020	162.500,00
38	Ocha Kake & Catering	900004339/RES/20	2020	363.636,00
39	Kantin Sehat	900004535/RES/20	2020	160.000,00
40	Warung Makan At	900004551/RES/20	2020	84.000,00
41	Warung Makan Lestari	900004586/RES/20	2020	113.600,00
42	RM. Usaho Minang	900000044/RES/20	2020	457.500,00
43	Jasa Boga Rafha	900000106/RES/20	2020	1.360.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>25.491.055,00</b>

**c. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp113.332.694.810,00 dan Rp100.182.886.391,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.15**  
**Rincian Piutang PBB per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Nama Kecamatan	Saldo Awal	SPPT Terbit	Pembayaran	Saldo Akhir
Banyuasin III	5.664.547.841,00	1.265.619.153,00	366.380.464,00	6.563.786.530,00
Sembawa	2.902.020.165,00	782.145.116,00	179.635.874,00	3.504.529.407,00
Betung	6.981.740.572,00	1.758.871.130,00	739.542.723,00	8.001.068.979,00
Suak Tapeh	1.166.717.747,00	769.670.175,00	187.801.094,00	1.748.586.828,00
Pulau Rimau	2.362.148.611,00	566.669.542,00	319.335.245,00	2.609.482.908,00
Tungkal Ilir	1.529.048.524,00	341.997.501,00	142.755.052,00	1.728.290.973,00
Selat Penuguan	2.043.223.002,00	389.784.805,00	182.971.893,00	2.250.035.914,00
Banyuasin I	6.563.678.990,00	8.461.229.752,00	7.373.820.516,00	7.651.088.226,00
Air Kumbang	1.822.096.087,00	503.881.125,00	217.274.429,00	2.108.702.783,00
Rambutan	7.772.455.670,00	3.593.756.647,00	1.516.377.092,00	9.849.835.225,00
Banyuasin III	657.286.326,00	211.386.007,00	88.148.543,00	780.523.790,00
Karang Agung Ilir	709.035.930,00	107.882.037,00	3.131.518,00	813.786.449,00
Muara Padang	1.526.411.322,00	306.719.529,00	51.728.469,00	1.781.402.382,00
Muara Sugih	1.651.812.994,00	327.703.037,00	206.732.381,00	1.772.783.650,00
Air Saleh	1.128.357.706,00	242.195.986,00	73.238.914,00	1.297.314.778,00
Muara Telang	2.424.824.908,00	387.930.110,00	296.457.418,00	2.516.297.600,00
Sumber Marga Telang	714.357.978,00	305.761.650,00	231.088.315,00	789.031.313,00
Makarti Jaya	1.030.012.044,00	257.171.110,00	137.816.058,00	1.149.367.096,00
Talang Kelapa	47.673.420.443,00	16.424.567.149,00	12.120.137.377,00	51.977.850.215,00
Rantau Bayur	1.454.513.861,00	341.771.467,00	149.293.731,00	1.646.991.597,00
Tanjung Lago	2.405.175.670,00	685.081.037,00	298.318.540,00	2.791.938.167,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.182.886.391,00</b>	<b>38.031.794.065,00</b>	<b>24.881.985.646,00</b>	<b>113.332.694.810,00</b>

Rincian lebih lanjut atas umur piutang PBB per kecamatan disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.16**  
**Rincian Umur Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Nama Kecamatan	Kategori Piutang				Jumlah
	1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	
Banyuasin III	931.998.830,00	1.831.391.664,00	1.563.464.132,00	2.236.931.904,00	6.563.786.530,00
Sembawa	626.777.554,00	1.027.569.547,00	865.689.046,00	984.493.260,00	3.504.529.407,00
Betung	1.309.196.239,00	2.267.240.896,00	1.927.993.301,00	2.496.638.543,00	8.001.068.979,00
Suak Tapeh	586.372.198,00	389.810.990,00	321.771.579,00	450.632.061,00	1.748.586.828,00
Pulau Rimau	263.634.832,00	567.110.477,00	527.339.805,00	1.251.397.794,00	2.609.482.908,00
Tungkal Ilir	204.651.704,00	325.816.392,00	248.017.855,00	949.805.022,00	1.728.290.973,00
Selat Penuguan	228.689.933,00	533.143.613,00	368.652.639,00	1.119.549.729,00	2.250.035.914,00

Nama Kecamatan	Kategori Piutang				
	1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	> 5 Tahun	Jumlah
Banyuasin I	1.128.013.338,00	2.051.534.725,00	1.866.990.127,00	2.604.550.036,00	7.651.088.226,00
Air Kumbang	301.022.374,00	456.387.522,00	340.830.614,00	1.010.462.273,00	2.108.702.783,00
Rambutan	2.690.572.915,00	2.746.348.268,00	2.324.216.365,00	2.088.697.677,00	9.849.835.225,00
Banyuasin II	130.002.670,00	176.466.888,00	120.844.199,00	353.210.033,00	780.523.790,00
Karang Agung Ilir	104.825.319,00	159.509.704,00	77.806.941,00	471.644.485,00	813.786.449,00
Muara Padang	258.016.076,00	347.322.021,00	246.753.415,00	929.310.870,00	1.781.402.382,00
Muara Sugih	128.091.242,00	296.657.124,00	236.462.000,00	1.111.573.284,00	1.772.783.650,00
Air Saleh	169.244.643,00	203.777.227,00	154.206.918,00	770.085.990,00	1.297.314.778,00
Muara Telang	109.216.379,00	244.208.178,00	197.258.876,00	1.965.614.167,00	2.516.297.600,00
Sumber Marga Telang	96.654.704,00	168.785.388,00	123.514.956,00	400.076.265,00	789.031.313,00
Makarti Jaya	119.712.455,00	255.127.589,00	131.755.347,00	642.771.705,00	1.149.367.096,00
Talang Kelapa	7.900.979.698,00	13.337.419.977,00	10.426.464.781,00	20.312.985.759,00	51.977.850.215,00
Rantau Bayur	193.178.549,00	363.993.086,00	298.411.966,00	791.407.996,00	1.646.991.597,00
Tanjung Lago	404.796.562,00	711.923.674,00	514.823.504,00	1.160.394.427,00	2.791.938.167,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.885.648.214,00</b>	<b>28.461.544.950,00</b>	<b>22.883.268.366,00</b>	<b>44.102.233.280,00</b>	<b>113.332.694.810,00</b>

**d. Piutang Pajak Hiburan**

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,40 yang merupakan Piutang Kidzoon OPI MALL Jakabaring sesuai dengan SPTPD Nomor:1/SPTPD.2436/3/6/18 Tahun 2019.

**e. Piutang Pajak Reklame**

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.554.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.17**  
**Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

No	Nama Wajib Pajak	Tahun Ketetapan	Nilai
1	M. Herman. S	2020	8.600.000,00
2	Toko Sepatu Dan Sandal Stars	2020	375.000,00
3	M. Herman. S	2020	1.125.000,00
4	Adam Rahka Sauqi	2020	225.000,00
5	PT. Xiaomi Technology Indonesia	2020	1.290.000,00
6	PT. Awfa Smart Media	2020	2.998.500,00
7	Rm. Palapa	2020	562.500,00
8	PT. Xiaomi Technology Indonesia	2020	2.016.000,00
9	PT. Karya Satria	2020	1.862.500,00
10	Zed Advertising	2020	500.000,00
<b>Total</b>			<b>19.554.500,00</b>

**f. Piutang Pajak Penerangan Jalan**

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.807.031,11 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.18**  
**Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020**  
*(dalam rupiah)*

No	Nama Wajib Pajak	Tahun Ketetapan	Nilai
1	PT. Pertamina (Persero) Ru III Plaju	2018	5.000,00
2	PT. Karya Sawit Lestari	2018 & 2019	3.360,67
3	PT. Tunas Baru Lampung, Tbk	2019	0,12
4	PT. Cahaya Cemerlang Lestari	2019	2,61
5	PT. Hindoli	2019	0,55
6	PT. Transpacific Agro Industry	2019	0,05
7	PT. Sutopo Lestari Jaya	2019	2,11
8	PT. Mitra Aneka Rezki	2020	535,00
9	PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia	2020	81,00
10	PT. Hindoli	2020	11.790.021,00
11	PT. Indofood	2020	8.028,00
<b>Total</b>			<b>11.807.031,11</b>

**g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam**

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2020 sebesar Rp303.068.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.19**  
**Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2020**  
*(dalam rupiah)*

No	Uraian	NPWPD	Nilai
1	PT. Durga Mandirijaya Abadi	P200029280618	278.068.500,00
2	Zone Chandra, S. Kom	P100030800000	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>303.068.500,00</b>

**h. Piutang Pajak Air Bawah Tanah**

Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.203.481,80 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.20**  
**Rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2020**  
*(dalam rupiah)*

No	Nama Wajib Pajak	No Ketetapan	Nilai
1	CV. Global Sarana	2/SKPD.2030/10/6/18	21.600,00
2	PT. Segara Makmur Sejahtera	3/SKPD.1341/10/10/18	70,00
3	CV. Global Sarana	3/SPKD/2030/10/6/18	21.600,00
4	Indra	3/SPKD.2714/10/10/18	500,00
5	PT. Mars Lestari	9/SKPD.769/10/10/19	200,00
6	PT. Sriwijaya Alam Segar	4/SKPD.873/10/10/19	0,20
7	PT. Es Hupindo	8/STPD.594/10/01/19	0,60
8	PT. Mars Lestari	4/STPD.769/10/10/19	60,00
9	PT. Bumi Pasir Putih	900000256/AIR/20	1.794.330,00
10	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	900000296/AIR/21	1.705.641,00
11	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	900000258/AIR/20	1.659.480,00
<b>Total</b>			<b>5.203.481,80</b>

## 2) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.293.734,00, tidak mengalami perubahan dari saldo tahun 2019. Piutang tersebut merupakan Piutang Retribusi Menara Tower Bersama Group (TBG) pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

## 3) Piutang Dana Transfer

Saldo Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp27.923.819.429,00 dan Rp20.319.598.522,56 yang terdiri dari Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.21**  
**Rincian Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
1	Dana Transfer Pusat	9.824.849.629,00	78.366.385.178,00	65.895.008.858,00	22.296.225.949,00
2	Dana Bagi Hasil Provinsi	5.798.801.028,00	5.627.593.480,00	5.798.801.028,00	5.627.593.480,00
3	Piutang Jamsoskes	4.695.947.865,56	0,00	4.695.947.865,56	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.319.598.522,56</b>	<b>83.993.978.658,00</b>	<b>76.389.757.751,56</b>	<b>27.923.819.429,00</b>

Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut.

### a. Piutang Dana Transfer Pusat

Saldo Piutang Dana Transfer Pusat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp22.296.225.949,00 dan Rp9.824.849.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.22**  
**Rincian Piutang Dana Transfer Pusat per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020	
		Tambah	Kurang		
<b>Bagi Hasil Pajak</b>					
a	PPH 21, 25, 29	564.534.581,00	6.128.097.191,00	6.692.631.772,00	0,00
b	PBB	6.799.760.847,00	22.136.683.091,00	8.683.334.288,00	20.253.109.650,00
	<b>Jumlah 1</b>	<b>7.364.295.428,00</b>	<b>28.264.780.282,00</b>	<b>15.375.966.060,00</b>	<b>20.253.109.650,00</b>
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>					
a	PSDH	2.454.313.701,00	1.808.499.919,00	2.459.674.508,00	1.803.139.112,00
b	Royalty	0,00	10.383.917.583,00	10.383.917.583,00	0,00
c	Perikanan	3.677.289,00	229.300.150,00	3.677.289,00	229.300.150,00
d	Gas Bumi	0,00	37.669.210.207,00	37.669.210.207,00	0,00
e	Panas Bumi	0,00	7.657.934,00	0,00	7.657.934,00
f	Cukai Tembakau	2.563.211,00	3.019.103,00	2.563.211,00	3.019.103,00
	<b>Jumlah 2</b>	<b>2.460.554.201,00</b>	<b>50.101.604.896,00</b>	<b>50.519.042.798,00</b>	<b>2.043.116.299,00</b>
<b>Jumlah</b>		<b>9.824.849.629,00</b>	<b>78.366.385.178,00</b>	<b>65.895.008.858,00</b>	<b>22.296.225.949,00</b>



Piutang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.296.225.949,00 terdiri dari piutang bagi hasil pajak sebesar Rp20.253.109.650,00 dan dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp2.043.116.299,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) Nomor 22/KM.7/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 6/PK/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020. Penyaluran ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020.

**b. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi**

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.627.593.480,00 dan Rp5.798.801.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.23**  
**Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Pajak Kendaraan Bermotor	1.371.896.852,00	1.685.201.709,00	1.371.896.852,00	1.685.201.709,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.749.131.398,00	1.307.233.124,00	1.749.131.398,00	1.307.233.124,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.648.162.091,00	2.606.628.494,00	2.648.162.091,00	2.606.628.494,00
Pajak Kendaaran Atas Air	2.424.473,00	37.474,00	2.424.473,00	37.474,00
Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air	20.788,00	0,00	20.788,00	0,00
Pajak Air Permukaan	27.165.426,00	28.492.679,00	27.165.426,00	28.492.679,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.798.801.028,00</b>	<b>5.627.593.480,00</b>	<b>5.798.801.028,00</b>	<b>5.627.593.480,00</b>

**c. Piutang Jamsoskes**

Piutang Jamsoskes adalah piutang jaminan kesehatan program Gubernur Sumatera Selatan dengan sistem *cost sharing*. Saldo Piutang Jamsoskes per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dimana Pemerintah Provinsi telah melakukan pembayaran piutang jamsoskes pada tanggal 23 Desember 2020. Selain nilai tersebut, terdapat Piutang Jampersal dan Jamsoskes pada tahun 2020 sebesar Rp1.535.829.600,00 yang merupakan tagihan Puskesmas ke Dinas Kesehatan dengan rincian Piutang Jampersal di 31 Puskesmas sebesar Rp392.000.000,00 dan Piutang Jampersal RSUD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp915.416.900,00 serta Piutang Jamsoskes di RSUD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp228.412.700,00.

#### 4) Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.150.929.244,79 dan Rp17.596.799.897,10 dengan rincian piutang lain-lain sebagai berikut.

**Tabel 5.3.24**  
**Rincian Piutang Lain-lain**

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Bagian Lancar TP/TGR	266.547.285,00	61.800.225,16	101.578.225,16	226.769.285,00
Puitang Anggota DPRD	6.877.009.035,00	0,00	0,00	6.877.009.035,00
Piutang Lainnya	41.925.700,00	124.203.381,00	154.129.081,00	12.000.000,00
Piutang PPh Ps 21	99.225.000,00	0,00	99.225.000,00	0,00
Piutang BLUD	3.704.898.200,00	1.938.397.500,00	3.704.898.200,00	1.938.397.500,00
Piutang Bunga Deposito	179.726.027,38	96.753.424,79	179.726.027,38	96.753.424,79
Piutang Dividen	6.427.468.649,72	0,00	6.427.468.649,72	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.596.799.897,10</b>	<b>2.221.154.530,95</b>	<b>10.667.025.183,26</b>	<b>9.150.929.244,79</b>

##### a. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp226.769.285,00 dan Rp266.547.285,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.25**  
**Rincian Mutasi Piutang TP/TGR**

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo Awal 1 Jan 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Bagian Tuntutan Perbendaharaan	6.814.525,00	0,00	500.000,00	6.314.525,00
Bagian Lancar TGR	259.732.760,00	61.800.225,16	101.078.225,16	220.454.760,00
<b>Jumlah</b>	<b>266.547.285,00</b>	<b>61.800.225,16</b>	<b>101.578.225,16</b>	<b>226.769.285,00</b>

Rincian Bagian Lancar TP/TGR pada **Lampiran 9**. Selain nilai tersebut terdapat TP/TGR yang masih dalam proses SKTJM pada **Lampiran 10**.

##### b. Piutang Anggota DPRD

Saldo Bagian Lancar Piutang terhadap Anggota DPRD per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.877.009.035,00. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan dari saldo Tahun 2019. Rincian lebih lanjut pada **Lampiran 11**.

##### c. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp41.925.700,00. Saldo tersebut merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji pegawai yang telah pensiun dan akan dipotong

langsung melalui PT Taspen. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pensiun oleh Badan Kepegawaian Nasional. Mutasi piutang lainnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.26**  
**Rincian Piutang Lainnya**

(dalam rupiah)

No	Nama	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
1	Sujisna	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2	Warsiyah	8.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00
3	Rukiati	4.425.700,00	0,00	4.425.700,00	0,00
4	M. Nuh	13.000.000,00	0,00	6.000.000,00	7.000.000,00
5	Johansyah	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6	Rustani	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7	Widjanarko	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
8	Rita Lusiana	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
9	Sunaryo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10	Zulkarnain	0,00	11.467.252,00	11.467.252,00	0,00
11	Roni Aryani	0,00	14.188.360,00	14.188.360,00	0,00
12	Idial Ismadi	0,00	4.365.522,00	4.365.522,00	0,00
13	Edy Dwiyanto	0,00	15.583.488,00	15.583.488,00	0,00
14	Abdul Somad	0,00	3.127.938,00	3.127.938,00	0,00
15	Saipul	0,00	4.847.914,00	4.847.914,00	0,00
16	Soni	0,00	23.256.177,00	23.256.177,00	0,00
17	Suyadi	0,00	4.158.030,00	4.158.030,00	0,00
18	Reni Rahayu	0,00	8.829.200,00	8.829.200,00	0,00
19	Akhmad	0,00	11.469.200,00	8.469.200,00	3.000.000,00
20	Sujatmi	0,00	2.649.100,00	2.649.100,00	0,00
21	Biner Samosir	0,00	13.814.400,00	13.814.400,00	0,00
22	Dedi Irawansya	0,00	6.446.800,00	6.446.800,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.925.700,00</b>	<b>124.203.381,00</b>	<b>154.129.081,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

**d. Piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Saldo Piutang BLUD merupakan piutang klaim kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.938.397.500,00 dan Rp3.704.898.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.27**  
**Rincian Mutasi Piutang BLUD**

(dalam rupiah)

Klaim BPJS	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Bulan September 2019	799.418.600,00	0,00	799.418.600,00	0,00
Susulan Bulan Juni 2019	75.579.000,00	0,00	75.579.000,00	0,00
Susulan Bulan Juli 2019	98.841.400,00	0,00	98.841.400,00	0,00
Bulan Oktober 2019	856.770.300,00	0,00	856.770.300,00	0,00

Klaim BPJS	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Bulan November 2019	942.863.900,00	0,00	942.863.900,00	0,00
Bulan Desember 2019	931.425.000,00	0,00	931.425.000,00	0,00
Susulan Bulan Agustus 2020	0,00	22.305.200,00	0,00	22.305.200,00
Susulan Bulan September 2020	0,00	47.140.200,00	0,00	47.140.200,00
Bulan November 2020	0,00	559.550.100,00	0,00	559.550.100,00
Bulan Desember 2020	0,00	507.189.100,00	0,00	507.189.100,00
Covid- 19	0,00	802.212.900,00	0,00	802.212.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.704.898.200,00</b>	<b>1.938.397.500,00</b>	<b>3.704.898.200,00</b>	<b>1.938.397.500,00</b>

#### e. Piutang Bunga Deposito

Saldo Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp96.753.424,79 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.28**  
**Rincian Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Rekening	Uraian	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
				Tambah	Kurang	
1130204744548	Bank Mandiri Cabang Sukajadi	20/05/2020	18.493.150,68	0,00	18.493.150,680	0,00
1130204744530	Bank Mandiri Cabang Sukajadi	20/05/2020	18.493.150,68	0,00	18.493.150,680	0,00
220601000410409	BRI Capem Sako Palembang	29/06/2020	3.287.671,23	18.397.260,410	3.287.671,230	18.397.260,41
110001000334400	BRI Capem Pangkalan Balai	20/06/2020	18.082.191,78	0,00	18.082.191,780	0,00
110001000410400	BRI Capem Pangkalan Balai	21/11 s.d 17/12/2020	0,00	39.178.082,190	0,00	39.178.082,19
110001000411406	BRI Capem Pangkalan Balai	21/11 s.d 17/12/2020	0,00	39.178.082,190	0,00	39.178.082,19
110001000363409	BRI Capem Pangkalan Balai	18/05/2020	21.369.863,01	0,00	21.369.863,010	0,00
110001000372408	BRI Capem Pangkalan Balai	04/06/2020	44.383.561,64	0,00	44.383.561,640	0,00
DEP- 2019IDR0000166	BJB Cabang Palembang	14/05/2020	13.904.109,59	0,00	13.904.109,590	0,00
DEP- 2019IDR0000167	BJB Cabang Palembang	14/05/2020	13.904.109,59	0,00	13.904.109,590	0,00
DEP- 2019IDR0000168	BJB Cabang Palembang	14/05/2020	13.904.109,59	0,00	13.904.109,590	0,00
DEP- 2019IDR0000169	BJB Cabang Palembang	14/05/2020	13.904.109,59	0,00	13.904.109,590	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>179.726.027,38</b>	<b>96.753.424,79</b>	<b>179.726.027,38</b>	<b>96.753.424,79</b>

Penambahan piutang deposito sebesar Rp96.753.424,79 merupakan bunga yang harus diterima per 31 Desember 2020 dari tanggal jatuh tempo bunga deposito periode sebelumnya, dengan rincian perhitungan piutang bunga deposito dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.29**  
**Rincian Perhitungan Piutang Deposito per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Rekening	U R A I A N	Tgl Jatuh Tempo	Nilai Deposito	Suku Bunga	Hari Piutang	Piutang 2020
220601000410409	Penempatan Deposito Berjangka BRI Capem Sako Palembang	29 Nov -29 Des 2020	10.000.000.000,00	4,00%	30	18.301.370,00
220601000410409	Penempatan Deposito Berjangka BRI Capem Sako Palembang	29 Des - 31 Des 2020	500.000.000,00	3,50%	2	95.890,41
110001000410400	Penempatan Deposito Berjangka BRI Capem Pangkalan Balai	21 Nov - 17 Des 2020	10.000.000.000,00	5,50%	26	39.178.082,19
110001000411406	Penempatan Deposito Berjangka BRI Capem Pangkalan Balai	21 Nov - 17 Des 2020	10.000.000.000,00	5,50%	26	39.178.082,19
<b>JUMLAH</b>						<b>96.753.424,79</b>

**f. Piutang Dividen**

Saldo Piutang Dividen per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Saldo piutang dividen ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp6.427.468.649,72. Hal ini disebabkan belum terdapat keputusan RUPS terkait dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada PT Bank Sumsel Babel.

Kebijakan akuntansi Pemkab Banyuasin menetapkan kategori Piutang Retribusi dan Piutang Lain-Lain berdasarkan umur yaitu kategori lancar dengan umur <1 bulan, kurang lancar 1-3 bulan, diragukan 3-12 bulan, dan macet >12 bulan. Rincian umur Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

**Tabel 5.3.30**  
**Rincian Umur Piutang Retribusi dan Piutang lain-lain Per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

No	Nama	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 BULAN	1 -3 BULAN	3 - 12 BULAN	> 12 BULAN	
1	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	12.293.734,00	12.293.734,00
2	Piutang Lain-lain					
	Bagian lancar TP/TGR	0,00	0,00	0,00	226.769.285,00	226.769.285,00
	Piutang Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	6.877.009.035,00	6.877.009.035,00
	Piutang lainnya	0,00	3.000.000,00	0,00	9.000.000,00	12.000.000,00
	Piutang BLUD	1.309.402.000,00	559.550.100,00	69.445.400,00	0,00	1.938.397.500,00
<b>Jumlah Seluruhnya</b>		<b>1.309.402.000,00</b>	<b>562.550.100,00</b>	<b>69.445.400,00</b>	<b>7.125.072.054,00</b>	<b>9.066.469.554,00</b>

### 5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp65.703.983.750,79 dan Rp56.217.818.912,69, dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut.

**Tabel 5.3.31**  
**Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Kategori Piutang				Penyisihan 2020	Penyisihan 2019
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
	0,5%	10%	50%	100%		
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>91.250.099,33</b>	<b>2.846.269.414,45</b>	<b>11.441.634.183,00</b>	<b>44.102.233.280,00</b>	<b>58.481.386.976,79</b>	<b>48.967.602.000,69</b>
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.736,33
Pajak Restoran	123.952,68	70.052,00	0,00	0,00	194.004,68	636.941,69
PBB	89.428.241,07	2.846.154.495,00	11.441.634.183,00	44.102.233.280,00	58.479.450.199,07	48.966.795.858,23
Pajak Hiburan	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
Pajak Reklame	97.772,50	0,00	0,00	0,00	97.772,50	8.250,00
Pajak Penerangan Jalan	58.993,33	836,61	0,00	0,00	59.829,94	836,10
Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan lainnya	1.515.342,50	0,00	0,00	0,00	1.515.342,50	0,00
Pajak Air Bawah Tanah	25.797,26	44.030,80	0,00	0,00	69.828,06	4.378,30
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.293.734,00</b>	<b>12.293.734,00</b>	<b>12.293.734,00</b>
Retribusi Menara	0,00	0,00	0,00	12.293.734,00	12.293.734,00	12.293.734,00
<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>6.547.010,00</b>	<b>56.255.010,00</b>	<b>34.722.700,00</b>	<b>7.112.778.320,00</b>	<b>7.210.303.040,00</b>	<b>7.237.923.178,00</b>
Bagian lancar TP/TGR	0,00	0,00	0,00	226.769.285,00	226.769.285,00	236.669.185,00
Piutang Dewan	0,00	0,00	0,00	6.877.009.035,00	6.877.009.035,00	6.877.009.035,00
Piutang lainnya	0,00	300.000,00	0,00	9.000.000,00	9.300.000,00	29.775.700,00
Piutang BLUD	6.547.010,00	55.955.010,00	34.722.700,00	0,00	97.224.720,00	94.469.258,00
<b>Total</b>	<b>97.797.109,33</b>	<b>2.902.524.424,45</b>	<b>11.476.356.883,00</b>	<b>51.227.305.334,00</b>	<b>65.703.983.750,79</b>	<b>56.217.818.912,69</b>

Penjelasan lebih lanjut tentang penyisihan piutang pajak PBB per Kecamatan sebesar Rp58.479.450.199,07 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.32**  
**Rincian Penyisihan Piutang PBB per 31 Desember 2020 per Kecamatan**

(dalam rupiah)

Nama Kecamatan	Penyisihan				Saldo Akhir
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Banyuasin III	4.659.994,15	183.139.166,40	781.732.066,00	2.236.931.904,00	3.206.463.130,55
Sembawa	3.133.887,77	102.756.954,70	432.844.523,00	984.493.260,00	1.523.228.625,47
Betung	6.545.981,19	226.724.089,60	963.996.650,50	2.496.638.543,00	3.693.905.264,29
Suak Tapeh	2.931.860,99	38.981.099,00	160.885.789,50	450.632.061,00	653.430.810,49
Pulau Rimau	1.318.174,16	56.711.047,70	263.669.902,50	1.251.397.794,00	1.573.096.918,36
Tungkal Ilir	1.023.258,52	32.581.639,20	124.008.927,50	949.805.022,00	1.107.418.847,22
Selat Penuguan	1.143.449,66	53.314.361,30	184.326.319,50	1.119.549.729,00	1.358.333.859,46
Banyuasin I	5.640.066,69	205.153.472,50	933.495.063,50	2.604.550.036,00	3.748.838.638,69
Air Kumbang	1.505.111,87	45.638.752,20	170.415.307,00	1.010.462.273,00	1.228.021.444,07
Rambutan	13.452.864,58	274.634.826,80	1.162.108.182,50	2.088.697.677,00	3.538.893.550,88
Banyuasin II	650.013,35	17.646.688,80	60.422.099,50	353.210.033,00	431.928.834,65
Karang Agung Ilir	524.126,59	15.950.970,40	38.903.470,50	471.644.485,00	527.023.052,49
Muara Padang	1.290.080,38	34.732.202,10	123.376.707,50	929.310.870,00	1.088.709.859,98

Nama Kecamatan	Penyisihan				Saldo Akhir
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Muara Sugih	640.456,21	29.665.712,40	118.231.000,00	1.111.573.284,00	1.260.110.452,61
Air Saleh	846.223,22	20.377.722,70	77.103.459,00	770.085.990,00	868.413.394,92
Muara Telang	546.081,89	24.420.817,80	98.629.438,00	1.965.614.167,00	2.089.210.504,69
Sumber Marga Telang	483.273,52	16.878.538,80	61.757.478,00	400.076.265,00	479.195.555,32
Makarti Jaya	598.562,28	25.512.758,90	65.877.673,50	642.771.705,00	734.760.699,68
Talang Kelapa	39.504.898,49	1.333.741.997,70	5.213.232.390,50	20.312.985.759,00	26.899.465.045,69
Rantau Bayur	965.892,75	36.399.308,60	149.205.983,00	791.407.996,00	977.979.180,35
Tanjung Lago	2.023.982,81	71.192.367,40	257.411.752,00	1.160.394.427,00	1.491.022.529,21
<b>TOTAL</b>	<b>89.428.241,07</b>	<b>2.846.154.495,00</b>	<b>11.441.634.183,00</b>	<b>44.102.233.280,00</b>	<b>58.479.450.199,07</b>

### 5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban tahun 2020 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2020 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp302.809.602,37 dan Rp860.900.769,24 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.33**  
**Mutasi Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	165.508.750,00	83.295.075,00	172.450.006,26	76.353.818,74
Dinas Kesehatan	71.134.266,63	0,00	71.134.266,63	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	39.885.940,00	56.320.871,00	53.966.157,75	42.240.653,25
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	54.192.980,00	0,00	54.192.980,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.452.084,17	39.841.150,00	42.653.042,50	6.640.191,67
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	37.221.920,00	34.120.093,31	3.101.826,69
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	20.949.200,00	19.203.433,34	1.745.766,66
Dinas Sosial	2.333.333,33	24.492.850,00	24.785.112,51	2.041.070,82
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.267.803,33	9.310.100,00	16.698.695,00	3.879.208,33
Dinas Lingkungan Hidup	25.758.079,17	57.706.050,00	73.846.454,14	9.617.675,03
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.150.329,17	9.060.200,00	32.660.362,50	7.550.166,67
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.267.350,00	5.000.000,00	48.517.350,00	3.750.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.919.537,50	25.991.700,00	37.583.437,50	17.327.800,00
Dinas Perhubungan	24.079.654,75	0,00	24.079.654,75	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	36.657.045,00	0,00	36.657.045,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.264.086,67	49.394.400,00	45.309.886,67	12.348.600,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	0,00	24.238.000,00	22.218.166,67	2.019.833,33

SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Pariwisata				
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	372.979,17	11.308.500,00	10.739.104,17	942.375,00
Dinas Perikanan	12.689.791,67	5.528.250,00	15.453.916,67	2.764.125,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	31.869.493,33	0,00	31.869.493,33	0,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	5.885.000,00	2.942.500,00	2.942.500,00
Sekretariat Daerah	16.644.706,75	199.686.465,00	216.331.171,75	0,00
Sekretariat DPRD	70.520.566,67	94.788.380,00	125.813.788,33	39.495.158,34
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	19.221.860,00	0,00	19.221.860,00	0,00
Kecamatan Rantau Bayur	383.741,67	4.604.900,00	4.604.900,00	383.741,67
Kecamatan Talang Kelapa	1.280.666,67	7.689.800,00	7.688.833,34	1.281.633,33
Kecamatan Tanjung Lago	5.717.250,00	5.945.000,00	5.717.250,00	5.945.000,00
Kecamatan Sembawa	2.209.687,50	7.366.500,00	7.120.687,50	2.455.500,00
Kecamatan Banyuasin II	1.417.500,00	5.846.840,00	5.592.170,00	1.672.170,00
Kecamatan Makarti Jaya	626.375,00	7.516.500,00	7.516.500,00	626.375,00
Kecamatan Muara Telang	4.931.000,00	4.931.000,00	4.931.000,00	4.931.000,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	3.961.666,67	5.690.000,00	5.858.333,34	3.793.333,33
Kecamatan Karang Agung Ilir	0,00	882.232,00	441.116,00	441.116,00
Inspektorat Daerah	46.320.661,00	14.771.825,00	46.320.661,00	14.771.825,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	35.550.608,00	7.983.000,00	41.537.858,00	1.995.750,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.768.002,92	61.023.062,00	82.799.176,42	26.991.888,50
Badan Pendapatan Daerah	0,00	26.299.000,00	23.539.499,99	2.759.500,01
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.542.972,50	0,00	2.542.972,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>860.900.769,24</b>	<b>920.567.770,00</b>	<b>1.478.658.936,87</b>	<b>302.809.602,37</b>

Rincian Beban Dibayar Dimuka pada **Lampiran 12**.

### 5.3.1.1.6 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp110.214.556.051,47 dan Rp59.266.848.638,10 merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meliputi persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, obat-obatan, barang habis pakai (BHP) alat kesehatan, bahan kimia/bibit, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.34**  
**Rincian Persediaan per Jenis Persediaan per 31 Desember 2020**  
*(dalam rupiah)*

Jenis Persediaan	2020	2019
<b>Persediaan Bahan Habis Pakai</b>		
Persediaan ATK	736.234.991,00	351.608.943,00
Persediaan Alat Listrik	44.924.460,00	31.172.860,00



Jenis Persediaan	2020	2019
Persediaan Benda Pos	6.253.309,00	1.616.000,00
Persediaan Bahan Pembersih	175.583.986,00	224.223.550,00
Persediaan Minyak / Gas	300.000,00	62.543.170,00
Persediaan Cetak	1.105.483.157,00	1.112.684.982,00
Persediaan Habis Pakai Lainnya	3.882.271.246,00	2.849.003.466,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>5.951.051.149,00</b>	<b>4.632.852.971,00</b>
<b>Persediaan Barang Material</b>		
Persediaan Obat-obatan	9.773.994.376,59	10.571.004.557,12
Persediaan Makanan Pokok	447.648.161,49	636.211.723,92
Persediaan Bibit Ternak	75.000,00	4.350.000,00
Persediaan Material/Bahan Lainnya	0,00	0,00
Persediaan Material/Bahan Kimia	61.083.600,00	194.053.700,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>10.282.801.138,08</b>	<b>11.405.619.981,04</b>
<b>Persediaan Lainnya</b>		
Persediaan Barang Hibah	93.931.110.264,39	43.187.192.686,06
Persediaan Barang Bansos	49.593.500,00	41.183.000,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>93.980.703.764,39</b>	<b>43.228.375.686,06</b>
<b>Jumlah</b>	<b>110.214.556.051,47</b>	<b>59.266.848.638,10</b>

Nilai persediaan tersebut termasuk persediaan kadaluarsa berupa barang persediaan cetak yang terdapat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.304.000,00 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp598.582.600,00. Rincian saldo dan mutasi persediaan per 31 Desember 2020 pada masing-masing SKPD pada **Lampiran 13, 14, dan 15**.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Saldo Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp190.750.295.398,25 dan Rp221.058.528.555,68. yang terdiri dari penyertaan modal pada Bank Sumselbabel, PDAM Tirta Betuah dan Perusahaan Umum Daerah Sei Sembilang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.35**  
**Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Nama BUMD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
PT Bank Sumsel Babel	51.000.752.000,00	5.000.000.000,00	0,00	56.000.752.000,00
PDAM Tirta Betuah	170.057.776.555,68	3.261.257.971,00	41.451.695.903,43	131.867.338.623,25
PUD Sei Sembilang	0,00	3.000.000.000,00	117.795.225,00	2.882.204.775,00
<b>Jumlah</b>	<b>221.058.528.555,68</b>	<b>11.261.257.971,00</b>	<b>41.569.491.128,43</b>	<b>190.750.295.398,25</b>

#### 1) Penyertaan Modal ke Bank Sumselbabel

Saldo Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel terjadi penambahan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 3.438 lembar saham yang didasarkan pada Keputusan

Bupati Banyuasin Nomor 184/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai Tahun 2020. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebanyak 38.514 lembar saham (nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham) dengan nilai pasar per lembar saham sebesar Rp1.454.000,00. Dengan demikian terdapat nilai setoran investasi yang belum dijadikan saham sebesar Rp1.396.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.36**  
**Rincian Penyertaan yang Menjadi Saham per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
1	Modal Saham	35.076.000.000,00	3.438.000.000,00	0,00	38.514.000.000,00
2	Agio Saham	15.924.504.000,00	1.560.852.000,00	0,00	17.485.356.000,00
3	Sisa penyertaan yang belum menjadi modal saham	248.000,00	1.148.000,00	0,00	1.396.000,00
	<b>Total</b>	<b>51.000.752.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000.752.000,00</b>
	<b>Total Lembar Saham</b>	<b>35.076,00</b>	<b>3.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.514,00</b>

## 2) Penyertaan Modal ke PDAM Tirta Betuah

Saldo Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Tirta Betuah per 31 Desember 2020 sebesar Rp131.867.338.623,25. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menghitung nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas dengan tincian perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.37**  
**Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada PDAM Tirta Betuah**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Penyertaan	Akumulasi Kerugian	Kerugian Berjalan	Nilai Investasi
Pemkab Banyuasin	245.357.734.650,63	(104.818.989.689,71)	(8.671.406.337,67)	131.867.338.623,25
<b>Penyertaan yang belum ditetapkan statusnya</b>				
Pemerintah Provinsi	10.705.012.130,00	(4.573.275.660,86)	(378.335.372,88)	-
Pemerintah Pusat	49.049.095.000,00	(20.954.206.275,24)	(1.733.487.773,86)	-
	<b>305.111.841.780,63</b>	<b>(130.346.471.625,81)</b>	<b>(10.783.229.484,42)</b>	-

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Betuah berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah tanggal 17 Mei 2019. Dalam perda tersebut aset yang baru ditetapkan statusnya sebesar Rp200.628.117.492,22 dan telah dilengkapi dengan BAST senilai Rp155.894.322.554,24 sesuai dengan BAST nomor 030/84/BPKAD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. Penelusuran lebih lanjut antara aset dalam BAST dan Perda menunjukkan bahwa terdapat nilai untuk tujuh aset yang diserahkan berbeda dengan Perda, yaitu.

**Tabel 5.3.38**  
**Perbedaan Nilai Aset antara BAST dan Perda Penyertaan Modal**

*(dalam rupiah)*

Tahun Perolehan	Uraian	Nilai		Selisih	
		Perda	BAST	Lebih	Kurang
2007	Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih, Betung	12.250.412.975,00	8.430.150.000,00	0,00	3.820.262.975,00
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Kenten Laut	13.622.000.000,00	13.582.230.000,00	0,00	39.770.000,00
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Betung	13.975.000.000,00	13.869.437.819,75	0,00	105.562.180,25
	Optimalisasi pipa distribusi PDAM Lokasi RSUD Pangkalan Balai	2.920.270.000,00	2.970.080.000,00	(49.810.000,00)	0,00
	Peningkatan layanan PDAM Talang Kelapa kapasitas 150 l/Detik	7.812.200.000,00	7.796.856.818,27	0,00	15.343.181,73
2013 Diserahkan 2017	Bantuan Program Penyehatan PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin	2.126.572.010,00	2.126.572.012,00	(2,00)	0,00
2013 Diserahkan 2017	Pembangunan SPAM PDT Desa Perajen Kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin	2.590.047.290,00	2.590.047.287,00	3,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.296.502.275,00</b>	<b>51.365.373.937,02</b>	<b>(49.809.999,00)</b>	<b>3.980.938.336,98</b>

### 3) Penyertaan Modal ke BUMD Sei Sembilang

Saldo Penyertaan Modal pada BUMD Sei Sembilang per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.882.204.775,00. Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah Sei Sembilang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 4 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menghitung nilai penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.39**  
**Perhitungan Alokasi Kerugian atas Penyertaan pada BUMD Sei Sembilang**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Penyertaan	Akumulasi Kerugian	Kerugian Berjalan	Nilai Investasi
Pemkab Banyuasin	3.000.000.000,00	0,00	(117.795.225,00)	2.882.204.775,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.795.225,00)</b>	<b>2.882.204.775,00</b>

#### 5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.820.778.089.164,46 dan Rp3.376.278.200.718,15 merupakan aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin terdiri dari:

**Tabel 5.3.40**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuasin**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	370.674.136.763,99	47.937.467.798,79	4.546.412.800,00	414.065.191.762,78
Peralatan dan Mesin	730.366.863.487,16	116.258.168.527,61	18.338.230.636,95	828.286.801.377,82
Gedung dan Bangunan	1.237.493.494.645,54	89.444.934.026,10	36.084.032.965,82	1.290.854.395.705,82
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.762.378.264.116,09	523.634.906.153,90	61.074.773.718,94	3.224.938.396.551,05
Aset Tetap Lainnya	79.895.433.832,89	15.705.464.651,00	1.432.659.094,00	94.168.239.389,89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.759.178.408,72	37.398.914.967,94	9.827.887.100,00	167.330.206.276,66
Akumulasi Penyusutan	(1.944.289.170.536,24)	(266.599.147.599,32)	(12.023.176.236,00)	(2.198.865.141.899,56)
<b>Total</b>	<b>3.376.278.200.718,15</b>	<b>563.780.708.526,02</b>	<b>119.280.820.079,71</b>	<b>3.820.778.089.164,46</b>

Berdasarkan rincian pada tabel 5.3.40 di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2020. Penyebab terjadinya kenaikan Aset Tetap dikarenakan adanya aktivitas belanja yang menambah aset yang dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Tetap Kabupaten Banyuasin.

**Gambar 5.3.2**  
**Perbandingan Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2020**



### 5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp414.065.191.762,78 terjadi peningkatan sebesar Rp43.391.054.998,79 dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.41**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Tanah	
	2020	2019
Saldo Awal	370.674.136.763,99	366.535.741.520,96
Mutasi Tambah	47.937.467.798,79	5.112.955.423,03
Belanja Modal	11.173.619.758,00	2.718.461.818,00

Uraian	Tanah	
	2020	2019
Atribusi Belanja Modal	9.300.000,00	0,00
Hibah	21.959.133.000,00	0,00
Mutasi Antar SKPD	972.247.000,00	931.280.080,00
Penilaian	13.634.282.300,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Bangunan dan Gedung	154.905.640,79	0,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.980.100,00	0,00
Hibah/Bansos/Bos	0,00	500.000,00
Reklasifikasi dari Aset Bangunan dan Gedung	0,00	1.462.713.525,03
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(4.546.412.800,00)</b>	<b>(974.560.180,00)</b>
Hibah	(2.204.850.000,00)	0,00
Mutasi Antar SKPD	(972.247.000,00)	(931.280.080,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(479.779.000,00)	0,00
Reklasifikasi Ke Beban jasa	(889.536.800,00)	(9.300.000,00)
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(33.980.100,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>414.065.191.762,78</b>	<b>370.674.136.763,99</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp47.937.467.798,79 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah tahun 2020 sebesar Rp11.173.619.758,00 yang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan untuk pelebaran jalan di sepanjang jalan Palembang-Betung, tanah bangunan pabrik air minum dalam kemasan dan tanah jalan lainnya sebesar Rp10.534.971.773,00 dengan luas persil tanah 33 persil serta Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang atas lanjutan pembayaran tanah untuk pelebaran jembatan senilai Rp638.647.985,00 dengan luas 772 m<sup>2</sup>;
- b. Atribusi ke belanja modal tanah berupa honorarium Tim Pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang sebesar Rp9.300.000,00;
- c. Hibah tanah Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pembangunan Pasar Desa Karang Sari senilai Rp24.500.000,00 dan penyerahan oleh Pihak Pengembang/developer perumahan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman senilai Rp21.934.633.000,00;
- d. Mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin senilai Rp972.247.000,00 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- e. Penilaian aset dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah terhadap 50 persil bidang tanah yang semula masih memiliki nilai Rp0,00 dan Rp1,00 dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai sebesar Rp13.634.282.300,00;
- f. Reklasifikasi dari belanja Bangunan dan Gedung pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang realisasinya berupa pematangan lahan untuk pembangunan IKM Sentra Industri senilai Rp154.905.640,79; dan

- g. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp33.980.100,00 berupa belanja Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menetapkan nilai belanja modal tanah.

Sedangkan Mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.546.412.800,00 terdiri dari:

- Hibah kepada instansi vertikal di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuasin, antara lain Komando Distrik Militer 0430 Banyuasin senilai Rp300.000.000,00, Pengadilan Agama Pangkalan Balai senilai Rp348.850.000,00, Kepolisian Resort Banyuasin untuk Kantor Lantas Banyuasin senilai Rp1.256.000.000,00 dan TNI Angkatan Laut Palembang untuk pembangunan fasilitas lapangan tembak senilai Rp300.000.000,00;
- Mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin senilai Rp972.247.000,00 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura berupa kegiatan Penimbunan dan Pematangan Lahan untuk Taman Teknologi Pertanian (TPP);
- Reklasifikasi ke Aset lainnya, yaitu uang titipan ke Pengadilan Negeri Sekayu terhadap belanja pembebasan lahan untuk pelebaran jalan yang belum mendapatkan kesepakatan harga dengan pemilik lahan senilai Rp479.779.000,00; dan
- Reklasifikasi ke beban jasa atas belanja modal tanah pada Dinas Lingkungan Hidup berupa kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) yang diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi sebesar Rp689.703.800,00 dan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp199.833.000,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada **Lampiran 16**.

### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp828.286.801.377,82 terjadi peningkatan sebesar Rp97.919.937.890,66 dari tahun sebelumnya. Perubahan atas Aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

**Tabel 5.3.42**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

Uraian	Peralatan dan Mesin	
	2020	2019
<b>Saldo Awal</b>	<b>730.366.863.487,16</b>	<b>621.493.577.995,69</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>116.258.168.527,61</b>	<b>148.963.776.236,20</b>
Belanja Modal	80.130.653.320,96	106.858.388.802,84
Kapitalisasi/Atribusi	1.000.000,00	1.400.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	378.582.388,65	354.154.599,00
Hutang	2.161.790.815,00	0,00
Mutasi Antar SKPD (intrakompatabel)	4.253.757.200,00	15.861.731.470,35
Mutasi Antar SKPD (ekstrakompatabel)	0,00	125.061.467,00
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN/BTT/CSR	24.477.904.711,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	3.018.979.000,00	4.766.505.000,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.030.210.292,00	221.901.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	805.290.800,00	202.556.800,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	0,00	10.500.010.450,00

Uraian	Peralatan dan Mesin	
	2020	2019
Permendagri 108		
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ekstrakompatebel (Permendagri 108)	0,00	2.456.261,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Permendagri 108	0,00	9.625.754.236,01
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ekstrakompatebel (Permendagri 108)	0,00	439.026.150,00
Koreksi atas Reklasifikasi aset Peralatan dan Mesin (ekstrakompatebel)	0,00	4.830.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(18.338.230.636,95)</b>	<b>(40.090.490.744,73)</b>
Penghapusan	(1.026.413.161,00)	0,00
Mutasi Antar SKPD	(4.253.757.200,00)	(15.861.731.470,35)
Hibah/Bansos/Bos	(3.309.680.000,00)	(3.271.529.640,00)
Ekstrakompatebel	(144.698.984,00)	(646.619.015,00)
Reklasifikasi Ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(2.078.384.500,00)	(14.594.774.201,20)
Reklasifikasi Ke piutang	0,00	(12.200.000,00)
Penyesuaian ke Barang dan Jasa	(2.587.523.222,00)	(1.437.469.132,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(247.386.000,00)	(694.975.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.530.187.469,95)	(1.728.547.461,18)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(160.200.100,00)	(64.920.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Permendagri 108	0,00	(540.571.800,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Permendagri 108	0,00	(1.237.153.025,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>828.286.801.377,82</b>	<b>730.366.863.487,16</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp116.258.168.527,61 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp80.130.653.320,96;
- b. Atribusi dari Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Perikanan;
- c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada beberapa SKPD yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp378.582.388,65 yang terdiri dari dana APBD sebesar Rp206.470.208,65 dan dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin senilai Rp172.112.180,00;
- d. Hutang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp2.161.790.815,00 yakni pada Dinas Kesehatan untuk empat paket pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran;
- e. Mutasi Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp4.253.757.200,00 sesuai dengan kebutuhan dan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan;
- f. Hibah/Bansos/BOS/JKN/BLUD/BTT/CSR Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.477.904.711,00 yang terdiri dari:
  - 1) Hibah dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI berupa Penerangan Jalan Umum (PJU)

- Tenaga Surya sebanyak 50 unit sebesar Rp740.628.167,00 pada Dinas Perhubungan;
- 2) Hibah dari Kementerian Pertanian RI senilai Rp647.400.000,00 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  - 3) Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Bus Air senilai Rp2.644.986.300,00 pada Dinas Perhubungan;
  - 4) Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berupa mesin pengolah padi terintegrasi, *vertical dryer*, mesin industri pupuk organik dan water treatment senilai Rp6.860.976.637,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 5) Hibah dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah berupa PC Unit dan printer senilai Rp58.000.000,00 pada Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Muara Sugihan;
  - 6) Hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa Mobil Perlindungan (Molin) senilai Rp271.700.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 7) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa sarana pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) senilai Rp2.255.420.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 8) Belanja peralatan dan mesin yang bersumber dari dana Bantuan Tak terduga (BTT) untuk penanggulangan wabah *covid-19* sebesar Rp10.119.203.607,00 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin; dan
  - 9) Bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) berupa PC Unit pada Kantor Camat Kecamatan Tungkal Ilir senilai Rp14.160.000,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp25.200.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp288.480.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp551.450.000,00 dan Kecamatan Muara Telang senilai Rp300.000,00.
- g. Reklasifikasi dari Belanja Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.018.979.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Reklasifikasi dari Belanja Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.030.210.292,00 pada Dinas Perhubungan; dan
- i. Reklasifikasi dari Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp805.290.800,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Banyuasin II, dan Kecamatan Karang Agung Ilir.

Sedangkan Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.338.230.636,95 terdiri dari:

- a. Penghapusan aset Peralatan dan Mesin tindak lanjut atas pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk lima unit kendaraan roda empat dan roda dua senilai Rp1.026.413.161,00 pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kecamatan Sumber Marga Telang;



- b. Mutasi Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp4.253.757.200,00 sesuai dengan kebutuhan dan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan;
- c. Hibah kepada pihak lainnya sebesar Rp3.309.680.000,00, terdiri dari hibah kepada SMA Negeri 1 Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, berupa Alat Musik senilai Rp198.800.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan hibah peralatan penanggulangan karhutla kepada pemerintah desa senilai Rp3.110.880.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Aset Ekstrakompatabel sebesar Rp144.698.984,00 yang merupakan Aset Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari:
- 1) Bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa sarana pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) senilai Rp22.270.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka penanggulangan wabah *covid-19* senilai Rp10.711.704,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin;
  - 3) Dana yang bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin senilai Rp107.017.280,00;
  - 4) Aset Peralatan dan Mesin yang bersumber dari rekening belanja barang dan jasa yang di reklasifikasi ke belanja modal yang merupakan aset ekstrakompatabel senilai Rp500.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - 5) Aset ekstrakompatabel bersumber dari bantuan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.900.000,00 dan Kecamatan Muara Telang senilai Rp300.000,00;
- 6) Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada pos aset lain-lain sebesar Rp2.078.384.500,00, yang terdiri belanja Peralatan dan Mesin berupa alat musik, *sound system* dan lapangan bola *volley* sebesar Rp447.200.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang diserahkan pada pihak lainnya, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum dilengkapi dengan dokumen penyerahannya, hasil inventarisasi terhadap tiga unit kendaraan dinas roda empat dalam kondisi rusak berat senilai Rp345.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup serta aset pinjam pakai pada pihak lainnya berupa sepuluh unit kendaraan roda dua beserta kelengkapannya untuk karhutla pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak senilai Rp369.976.000,00, satu unit kendaraan roda dua pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp2.552.000,00 untuk Polres Banyuasin, satu unit kendaraan roda dua pada Dinas Sosial senilai Rp16.156.500,00 untuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan empat unit kendaraan roda empat pada Sekretariat Daerah senilai Rp897.000.000,00 untuk lembaga/organisasi di wilayah Kabupaten Banyuasin;
- 7) Penyesuaian atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak sesuai dengan kriteria aset tetap ke Barang dan Jasa sebesar Rp2.587.523.222,00, terdiri dari belanja barang pakai habis, pemeliharaan peralatan serta perlengkapan gedung dan kantor senilai Rp885.010.110,00 yang bersumber dari dana APBD dan senilai

Rp1.702.513.112,00 yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN/SMPN di wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

- 8) Reklasifikasi Belanja Peralatan dan Mesin ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp247.386.000,00 berupa pembangunan garasi dan pagar pengaman pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) Reklasifikasi Belanja Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp4.530.187.469,95 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 10) Reklasifikasi Belanja Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp160.200.100,00 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada **Lampiran 17**.

Terdapat Aset Donasi berupa Ambulan Terapung dan alat kesehatan Baitulmaal Muamalat pada tiga Puskesmas yaitu Karang Agung Ilir, Muara Telang dan Telang Jaya Telang. Namun, belum dicatat pada BMD Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan karena belum dilengkapi dengan dokumen serah terima dan nilai perolehan aset, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perahu longboat 6 Meter sebanyak 3 unit;
- b. Mesin Yamaha 40 PK sebanyak 3 unit;
- c. Safety Jacket (pelampung) sebanyak 3 unit;
- d. Kursi roda sebanyak sebanyak 3 unit;
- e. Tabung Oksigen sebanyak 3 unit;
- f. Regulator oksigen sebanyak 3 unit; dan
- g. Tandu sebanyak 3 unit.

**5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp1.290.854.395.705,82 terjadi peningkatan sebesar Rp53.360.901.060,28 dari tahun sebelumnya, rincian mutasi Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.43**  
**Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Gedung dan Bangunan	
	2020	2019
<b>Saldo Awal</b>	<b>1.237.493.494.645,54</b>	<b>1.124.310.604.064,64</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>89.444.934.026,10</b>	<b>156.967.392.180,17</b>
Belanja Modal	44.436.781.133,32	103.733.001.598,30
Kapitalisasi/Atribusi	2.476.433.500,00	94.000.000,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	719.716.000,00	9.641.456.347,89
Mutasi Antar SKPD	28.875.505.259,78	20.291.012.457,39
Hibah/Bansos/Bos/JKN/BLUD/BTT	12.684.762.633,00	2.173.716.330,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	247.386.000,00	694.975.000,00
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	984.583.450,00
Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	581.700.000,00

Uraian	Gedung dan Bangunan	
	2020	2019
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya	4.349.500,00	74.736.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya Permendagri 108	0,00	18.488.960.996,59
Reklasifikasi Dari Aset Tetap Lainnya ekstrakompetabel (Permendagri 108)	0,00	90.447.000,00
Koreksi atas reklasifikasi aset ke JIJ	0,00	118.803.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(36.084.032.965,82)</b>	<b>(43.784.501.599,27)</b>
Mutasi Antar SKPD	(28.875.505.259,78)	(20.291.012.457,39)
Penyesuaian ke beban barang dan jasa	(1.412.089.065,25)	(105.806.000,00)
Hibah	(353.319.000,00)	0,00
Ekstrakompetabel	(25.000.000,00)	(90.447.001,00)
Reklasifikasi ke Aset Tanah	(154.905.640,79)	(1.462.713.525,03)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(3.018.979.000,00)	(4.766.505.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.244.235.000,00)	(34.600.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	(3.408.747.668,21)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin Permendagri 108	0,00	(10.502.466.711,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Permendagri 108	0,00	(3.003.400.236,64)
Reklasifikasi ke Aset JIJ ekstrakompetabel (Permendagri 108)	0,00	(118.803.000,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.290.854.395.705,82</b>	<b>1.237.493.494.645,54</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp89.444.934.026,10 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp44.436.781.133,32;
- b. Kapitalisasi dan atribusi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.476.433.500,00 berupa jasa perencanaan (*detail engineering detail*) terhadap perolehan Gedung dan Bangunan kegiatan Penataan Halaman Masjid Al-Amir sebesar Rp49.815.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan belanja rehabilitasi gedung dan bangunan kesehatan yang memenuhi nilai kapitalisasi sebesar Rp2.426.618.500,00 pada Dinas Kesehatan;
- c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp719.716.000,00 berupa pembangunan pos jaga pada Kantor Camat Kecamatan Tungkal Ilir sebesar Rp25.000.000,00 dan pembangunan mushollah rumah dinas Bupati pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp694.716.000,00;
- d. Mutasi antar SKPD sebesar Rp28.875.505.259,78 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- e. Hibah/Bansos/BOS/JKN/BLUD/BTT berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.684.762.633,00 yang terdiri dari:
  - 1) Penambahan dari penyerahan berupa fasum dan fasos oleh pihak pengembang/developer perumahan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp1.050.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- 2) Hibah Kementerian Pertanian RI Senilai Rp1.841.772.300,00 berupa bangunan gudang pakan, rumah produksi, laboratorium diseminasi dan kandang, bangunan kantor utama dan RMU serta bangunan gedung pabrik permanen pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  - 3) Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI berupa bangunan rumah produksi padi terintegrasi (RMP), bangunan rumah industri pupuk organik (IPOG) dan bangunan kantor UPT senilai Rp6.587.661.333,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 4) Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah berupa bangunan gedung kantor, bangunan gedung pertemuan dan rumah negara golongan II senilai Rp2.571.033.000,00 pada Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Muara Sugihan; dan
  - 5) Belanja gedung dan bangunan yang bersumber dari Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam rangka penanggulangan wabah *Covid-19* berupa Pembangunan Ruang Isolasi dan Sarana Penunjang Untuk Perawatan Pasien Covid-19 di RS.Pratama Sukajadi senilai Rp256.000.000,00, Pembangunan Ruang Isolasi dan Sarana Penunjang Untuk Perawatan Pasien *Covid-19* Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya senilai Rp378.296.000,00.
- f. Reklasifikasi dari belanja Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp247.386.000,00 berupa pembangunan garasi dan pagar pengaman pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Lingkungan Hidup; dan
- g. Reklasifikasi Belanja Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.349.500,00 berupa bangunan taman bersumber dari dana JKN Dinas Kesehatan.

Sedangkan Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.084.032.965,82 terdiri dari:

- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp28.875.505.259,78 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- b. Penyesuaian ke Belanja Barang dan Jasa atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak sesuai dengan kriteria Aset Tetap berdasarkan hasil inventarisasi barang milik daerah Tahun 2019 sebesar Rp1.391.806.065,25 dan belanja yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dianggarkan dalam belanja modal namun bukan merupakan kriteria aset tetap bangunan dan gedung senilai Rp20.283.000,00;
- c. Hibah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Banyuasin terhadap aset Bangunan dan Gedung yang berskala lokal desa senilai Rp353.319.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Pengakuan Aset Ekstrakomptabel berupa bangunan pos jaga bernilai Rp25.000.000,00 yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi perolehan Aset Tetap intrakomptabel berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- e. Reklasifikasi ke Aset Tanah sebesar Rp154.905.640,79 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang merupakan kegiatan Pematangan Lahan untuk konstruksi IKM;

- f. Reklasifikasi Belanja ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.018.979.000,00 sebagian besar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang di dalam realisasi belanjanya terdapat Belanja Peralatan dan Mesin berupa meja dan kursi (*meubelair*); dan
- g. Reklasifikasi Belanja ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.244.235.000,00 berupa bangunan sanitasi sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada **Lampiran 18**.

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp3.224.938.396.551,05 terjadi peningkatan sebesar Rp462.560.132.434,96 dari tahun sebelumnya, perubahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.44**  
**Rincian Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan**

(dalam rupiah)

Uraian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	2020	2019
<b>Saldo Awal</b>	<b>2.762.378.264.116,09</b>	<b>2.698.925.591.508,54</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>523.634.906.153,90</b>	<b>267.304.124.800,21</b>
Belanja Modal	419.357.368.476,56	171.178.266.212,75
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	17.355.543.165,00	0,00
Utang Belanja Modal	14.810.065.054,39	19.658.400,00
Mutasi Antar SKPD	3.700.582.840,00	52.279.192.805,64
Hibah/Bansos/Bos/BLUD/JKN/BTT	61.636.924.148,00	38.401.084.884,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	4.530.187.469,95	1.728.547.461,18
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	2.244.235.000,00	34.600.000,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin Permendagri 108	0,00	540.571.800,00
Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan Permendagri 108	0,00	3.122.203.236,64
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(61.074.773.718,94)</b>	<b>(203.851.452.192,66)</b>
Mutasi Antar SKPD	(3.700.582.840,00)	(52.279.192.805,64)
Hibah	(4.837.578.000,00)	0,00
Penghapusan	0,00	(150.324.477.937,02)
Penyesuaian ke beban barang dan jasa	(18.268.632.619,00)	(41.297.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(1.030.210.292,00)	(221.901.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	0,00	(984.583.450,00)
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(33.013.769.967,94)	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(224.000.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.224.938.396.551,05</b>	<b>2.762.378.264.116,09</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp523.634.906.153,90 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp419.357.368.476,56;
- b. Kapitalisasi dan reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa berupa kegiatan Rehabilitasi Jalan Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa senilai Rp7.767.906.135,00, pemeliharaan Jalan Lingkar Gerbang 1 (Kel. Kayuara Kuning) - Lingkar Gerbang 2 (Kel. Seterio) senilai Rp5.945.322.900,00, pemeliharaan Jalan

Seterio-Sedang senilai Rp989.928.430,00, pemeliharaan Jalan Poros Tungkal Ilir Kec. Tungkal Ilir senilai Rp741.425.300,00, Perbaikan Jalan Menuju TPU Desa Sukarela Kec. Rantau Bayur senilai Rp197.367.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pekerjaan Penataan Pelataran Parkir Rumah Dinas Bupati senilai Rp1.708.593.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta kapitalisasi belanja jasa perencanaan kegiatan Pemasangan Vynil Lantai dan Pemasangan Instalasi Gas senilai Rp5.000.000,00 pada Dinas Kesehatan;

- c. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp14.810.065.054,39 yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk kegiatan tujuh paket pekerjaan dan rehabilitasi jalan;
- d. Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.700.582.840,00 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- e. Hibah/Bansos/BOS/BLUD/JKN/BTT sebesar Rp61.636.924.148,00 terdiri dari:
  - 1) Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat berupa jaringan instalasi air yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp28.777.025.387,00;
  - 2) Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berupa jalan, jembatan dan saluran sekunder senilai Rp7.581.558.000,00;
  - 3) Penyerahan oleh Pihak Pengembang/developer perumahan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman senilai Rp25.128.340.761,00; dan
  - 4) Pekerjaan konstruksi pemasangan gas buang dan *vaccum* serta sarana penunjang ruang operasi Rumah Sakit Pratama Sukajadi yang bersumber dari dana Bantuan Tak Terduga (BTT) senilai Rp150.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- f. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.530.187.469,95 pada Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.224.235.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp61.074.773.718,94 terdiri dari:

- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.700.582.840,00 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- b. Hibah kepada pemerintah desa di wilayah pemerintah Kabupaten Banyuasin berupa aset yang berskala lokal desa senilai Rp4.837.578.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Penyesuaian ke Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak sesuai dengan kriteria Aset Tetap berupa pekerjaan normalisasi sungai dan saluran air sebesar Rp18.268.632.619,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp17.739.339.419,00, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp198.940.000,00 dan Kecamatan Talang Kelapa senilai Rp296.958.300,00 serta belanja yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dianggarkan dalam belanja

modal namun bukan merupakan kriteria aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp33.394.900,00;

- d. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.030.210.292,00 pada Dinas Perhubungan berupa kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp33.013.769.967,94 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur; dan
- f. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp224.000.000,00 berupa jalan produksi Dinas Perkebunan dan Peternakan yang akan diserahkan ke kelompok tani /masyarakat desa.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada **Lampiran 19**.

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.168.239.389,89 terjadi peningkatan sebesar Rp14.272.805.557,00 dari tahun sebelumnya, perubahan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

**Tabel 5.3.45**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Aset Tetap Lainnya	
	2020	2019
<b>Saldo Awal</b>	<b>79.895.433.832,89</b>	<b>101.211.338.447,49</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>15.705.464.651,00</b>	<b>8.527.937.268,00</b>
Belanja Modal	15.411.414.551,00	6.511.292.243,00
Mutasi antar SKPD	59.850.000,00	714.572.000,00
Hibah	74.000.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	160.200.100,00	64.920.000,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Permendagri 108	0,00	1.237.153.025,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(1.432.659.094,00)</b>	<b>(29.843.841.882,60)</b>
Mutasi antar SKPD	(59.850.000,00)	(714.572.000,00)
Penyesuaian ke Barang dan Jasa	(363.418.794,00)	(207.788.700,00)
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	(805.290.800,00)	(202.556.800,00)
Reklasifikasi ke Bangunan dan Gedung	(4.349.500,00)	(74.736.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(199.750.000,00)	0,00
Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin Permendagri 108	0,00	(10.064.780.386,01)
Reklasifikasi ke Bangunan dan Gedung Permendagri 108	0,00	(18.579.407.996,59)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>94.168.239.389,89</b>	<b>79.895.433.832,89</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.705.464.651,00 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.411.414.551,00;
- b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp59.850.000,00 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- c. Hibah dari Kementerian Pertanian RI berupa hewan ternak sapi Bangkalan sebanyak empat ekor senilai Rp74.000.000,00; dan

- d. Reklasifikasi dari Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp160.200.100,00 yang terdiri dari belanja buku sebesar Rp60.700.100,00 yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan belanja lukisan senilai Rp99.500.000,00 pada Sekretariat Daerah.

Sedangkan Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.432.659.094,00 terdiri dari:

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp59.850.000,00 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Penyesuaian ke Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak sesuai dengan kriteria Aset Tetap sebesar Rp363.418.794,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp104.797.430,00 serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp258.621.364,00;
- Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp805.290.800,00 pada empat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.349.500,00 berupa bangunan taman pada Dinas Kesehatan; dan
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp199.750.000,00 berupa belanja buku pengetahuan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya pada **Lampiran 20**.

### 5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp167.330.206.276,66 terjadi peningkatan sebesar Rp27.571.027.867,94 dari tahun sebelumnya, perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.46**  
**Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	2020	2019
<b>Saldo Awal</b>	<b>139.759.178.408,72</b>	<b>141.777.100.150,58</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>37.398.914.967,94</b>	<b>4.173.879.268,21</b>
Mutasi antar SKPD	3.926.385.000,00	0,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa/DED	458.760.000,00	731.151.500,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	3.408.747.668,21
Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.013.769.967,94	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tanah	0,00	33.980.100,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(9.827.887.100,00)</b>	<b>(6.191.801.010,07)</b>
Mutasi antar SKPD	(3.926.385.000,00)	0,00
Penghapusan Aset KDP	0,00	(5.558.009.010,07)
Reklasifikasi ke Aset Tanah	(33.980.100,00)	0,00
Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan	(49.815.000,00)	(581.700.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud	(5.817.707.000,00)	(40.480.000,00)
Koreksi Saldo Awal	0,00	(11.612.000,00)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>167.330.206.276,66</b>	<b>139.759.178.408,72</b>



Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp37.398.914.967,94 terdiri dari:

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.926.385.000,00 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa Perencanaan/DED (*Detail Engineering Design*) yang belum dikapitalisasi ke Aset Tetap sebesar Rp458.760.000,00 untuk lima paket belanja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; dan
- Reklasifikasi dari Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp33.013.769.967,94 untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.827.887.100,00 terdiri dari:

- Mutasi antar SKPD sebesar Rp3.926.385.000,00 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;
- Reklasifikasi ke Aset Tanah sebesar Rp33.980.100,00 berupa belanja Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam rangka penetapan nilai Belanja Modal Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Kapitalisasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp49.815.000,00 yang merupakan belanja Perencanaan Penataan Halaman Masjid Al-Amir yang telah dilaksanakan kegiatannya pada tahun 2020 pada Sekretariat Daerah; dan
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya/Rusak/Aset tak berwujud sebesar Rp5.817.707.000,00 yang merupakan Belanja Jasa Perencanaan/DED yang umur teknisnya telah melewati batas pengakuan pada Aset Tetap KDP yaitu empat tahun sejak perolehannya.

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 21**.

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.198.865.141.899,56 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.47**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	484.046.186.046,80	82.163.602.121,59	1.482.319.808,00	564.727.468.360,39
Gedung dan Bangunan	194.598.210.051,64	23.553.518.283,36	356.526.628,00	217.795.201.707,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.265.644.774.437,80	160.882.027.194,37	10.184.329.800,00	1.416.342.471.832,17
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Penyelesaian	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.944.289.170.536,24</b>	<b>266.599.147.599,32</b>	<b>12.023.176.236,00</b>	<b>2.198.865.141.899,56</b>

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp266.599.147.599,32 merupakan pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2020. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp12.023.176.236,00 merupakan:

- a. Koreksi Ekuitas dari Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lainnya yang terdiri dari aset rusak berat berupa kendaraan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp455.863.993,00, penghapusan aset rusak berat sebesar Rp980.682.055,00 dan penyusutan dari aset hibah sebesar Rp45.773.760,00;
- b. Koreksi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp356.526.628,00 merupakan penghapusan aset rusak berat Gedung dan bangunan; dan
- c. Penghapusan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.184.329.800,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5.3.48**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183.065.510.121,10	31.780.799.490,00	0,00	214.846.309.611,10
Dinas Kesehatan	99.860.499.699,00	17.662.393.683,00	322.500,00	117.522.570.882,00
Rumah Sakit Umum Daerah	27.646.038.761,40	7.093.841.888,00	0,00	34.739.880.649,40
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	82.174.711.915,13	28.837.785.367,85	2.779.727.199,00	108.232.770.083,98
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.158.449.989.350,00	120.695.213.487,37	7.428.185.586,00	1.271.717.017.251,37
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	9.733.452.254,00	2.731.172.962,00	72.988.050,00	12.391.637.166,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.206.608.956,00	924.548.759,00	3.073.270,00	7.128.084.445,00
Dinas Sosial	2.803.497.212,00	249.432.219,00	20.567.465,00	3.032.361.966,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.554.168.377,00	7.569.639.830,00	9.077.697,00	34.114.730.510,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.844.267.108,10	7.198.599.868,00	0,00	12.042.866.976,10
Dinas Lingkungan Hidup	23.880.308.886,00	1.972.864.863,00	346.940.000,00	25.506.233.749,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.601.297.632,20	1.443.043.498,00	0,00	9.044.341.130,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.866.680.850,00	467.884.842,00	363.442.625,00	4.971.123.067,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.822.799.676,00	986.660.342,00	0,00	11.809.460.018,00
Dinas Perhubungan	34.759.585.755,29	6.014.460.644,00	560.000,00	40.773.486.399,29
Dinas Komunikasi dan Informatika	12.027.073.196,02	1.842.882.314,00	49.877.054,00	13.820.078.456,02
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.846.480.182,00	4.333.995.329,00	28.535.230,00	21.151.940.281,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.019.845.599,00	444.456.009,00	0,00	4.464.301.608,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8.401.151.452,00	545.341.868,00	60.775.468,00	8.885.717.852,00
Dinas Perikanan	12.717.672.870,00	1.394.896.462,00	25.340.004,00	14.087.229.328,00
Dinas Pertanian	24.971.097.484,00	1.648.408.814,00	0,00	26.619.506.298,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.060.024.534,00	1.282.312.831,00	0,00	5.342.337.365,00
Sekretariat Daerah	92.736.089.439,00	8.365.588.709,00	769.915.482,00	100.331.762.666,00

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
Sekretariat DPRD	37.636.942.094,00	3.266.516.846,10	0,00	40.903.458.940,10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	4.290.802.759,00	336.462.136,00	0,00	4.627.264.895,00
Kecamatan Banyuasin I	640.174.440,00	178.817.296,00	0,00	818.991.736,00
Kecamatan Banyuasin III	1.834.610.761,00	287.396.036,00	0,00	2.122.006.797,00
Kecamatan Betung	673.153.680,00	163.450.710,00	0,00	836.604.390,00
Kecamatan rantau Bayur	614.658.884,00	108.658.680,00	0,00	723.317.564,00
Kecamatan Pulau Rimau	1.030.502.385,00	181.569.839,00	0,00	1.212.072.224,00
Kecamatan Talang Kelapa	1.160.776.352,00	403.318.732,00	36.344.440,00	1.527.750.644,00
Kecamatan Rambutan	580.344.668,00	146.946.670,00	0,00	727.291.338,00
Kecamatan Tungkal Ilir	814.434.165,00	126.423.086,00	0,00	940.857.251,00
Kecamatan Tanjung Lago	495.162.599,00	468.283.433,00	0,00	963.446.032,00
Kecamatan Sembawa	715.200.255,00	136.207.220,00	0,00	851.407.475,00
Kecamatan Suak Tapeh	663.898.918,00	133.154.627,00	0,00	797.053.545,00
Kecamatan Banyuasin II	876.568.239,00	171.266.620,00	0,00	1.047.834.859,00
Kecamatan Makarti Jaya	832.598.288,00	196.321.723,00	0,00	1.028.920.011,00
Kecamatan Muara Padang	1.142.147.623,00	164.674.802,00	0,00	1.306.822.425,00
Kecamatan Muara Sugihan	575.875.862,00	563.121.667,00	0,00	1.138.997.529,00
Kecamatan Muara Telang	941.999.026,00	133.195.704,00	0,00	1.075.194.730,00
Kecamatan Air Salek	658.738.259,00	94.836.299,00	0,00	753.574.558,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	557.416.390,00	156.422.981,00	10.270.833,00	703.568.538,00
Kecamatan Air Kumbang	657.263.614,00	135.874.167,00	0,00	793.137.781,00
Kecamatan Selat Penuguan	13.624.310,00	45.364.572,00	0,00	58.988.882,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	17.242.556,00	33.058.692,00	0,00	50.301.248,00
Inspektorat Daerah	5.336.305.235,00	496.419.600,00	0,00	5.832.724.835,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.721.430.080,00	540.288.731,00	0,00	6.261.718.811,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.015.601.593,00	1.107.154.359,00	17.233.333,00	9.105.522.619,00
Badan Pendapatan Daerah	3.897.987.033,00	936.844.514,00	0,00	4.834.831.547,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.844.859.159,00	400.873.778,00	0,00	5.245.732.937,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.944.289.170.536,24</b>	<b>266.599.147.599,32</b>	<b>12.023.176.236,00</b>	<b>2.198.865.141.899,56</b>

### 5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp310.523.787.198,50 dan Rp318.806.021.295,14 terdiri dari:

**Tabel 5.3.49**  
**Rincian Aset Lainnya**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Tambah	Kurang	
Aset Tak Berwujud	17.170.928.124,20	98.945.000,00	0,00	17.269.873.124,20
Amortisasi	(11.469.674.607,30)	(2.138.503.871,88)	0,00	(13.608.178.479,18)
Aset Lain-Lain	329.554.667.758,87	9.573.499.001,00	15.554.945.928,76	323.573.220.831,11
Penyusutan	(16.449.899.980,63)	(455.863.993,00)	(194.635.696,00)	(16.711.128.277,63)
<b>Jumlah</b>	<b>318.806.021.295,14</b>	<b>7.078.076.136,12</b>	<b>15.360.310.232,76</b>	<b>310.523.787.198,50</b>

#### 5.3.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.269.873.124,20, terjadi penambahan sebesar Rp98.945.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Sistem Teknologi Elektronik *Government* yang terdapat pada 14 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.3.50**  
**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Sekretariat DPRD	42.350.000,00	0,00	0,00	42.350.000,00
Sekretariat Daerah	350.461.000,00	0,00	0,00	350.461.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.673.115.700,00	98.945.000,00	0,00	4.772.060.700,00
Dinas Kesehatan	276.325.500,00	0,00	0,00	276.325.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.703.408.424,00	0,00	0,00	8.703.408.424,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.772.500,00	0,00	0,00	272.772.500,00
Dinas Perikanan	340.900.000,00	0,00	0,00	340.900.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	275.902.500,00	0,00	0,00	275.902.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	396.170.000,00	0,00	0,00	396.170.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	412.522.500,00	0,00	0,00	412.522.500,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	529.500.000,20	0,00	0,00	529.500.000,20
Dinas Perhubungan	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	476.500.000,00	0,00	0,00	476.500.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	223.000.000,00	0,00	0,00	223.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.170.928.124,20</b>	<b>98.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.269.873.124,20</b>

#### 5.3.1.4.2 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.608.178.479,18 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.51**  
**Rincian Mutasi Amortisasi Aset Lainnya**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.230.767.323,74	1.614.776.538,50	0,00	5.845.543.862,24
Dinas Kesehatan	248.223.020,83	23.498.875,00	0,00	271.721.895,83
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272.772.500,00	0,00	0,00	272.772.500,00

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Perhubungan	57.750.000,00	49.500.000,00	0,00	107.250.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.285.171.658,36	4.122.708,34	0,00	4.289.294.366,70
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55.937.500,00	83.545.000,00	0,00	139.482.500,00
Dinas Perikanan	262.777.083,33	49.500.000,00	0,00	312.277.083,33
Sekretariat Daerah	227.451.770,83	0,00	0,00	227.451.770,83
Sekretariat DPRD	42.350.000,00	79.787.500,00	0,00	122.137.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	375.970.625,00	17.000.000,00	0,00	392.970.625,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	412.522.500,00	37.425.000,00	0,00	449.947.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	230.569.166,67	0,00	0,00	230.569.166,67
Badan Pendapatan Daerah	329.918.750,00	167.805.750,04	0,00	497.724.500,04
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	437.492.708,54	11.542.500,00	0,00	449.035.208,54
<b>Jumlah</b>	<b>11.469.674.607,30</b>	<b>2.138.503.871,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.608.178.479,18</b>

### 5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 terjadi penambahan sebesar Rp323.573.220.831,11 dengan rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.52**  
**Rincian Aset Lain-lain**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Detail Engineering Design (DED)	5.120.927.000,00	5.817.707.000,00	0,00	10.938.634.000,00
Kekurangan Volume Pekerjaan	2.423.357.782,11	0,00	1.190.367.836,76	1.232.989.945,35
Investasi di BUMD Dalam Proses Likuidasi	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
Aset Ganda Pencatatan	213.637.592,00	0,00	213.637.592,00	0,00
Aset Kondisi Rusak Berat	17.049.769.902,98	345.500.001,00	0,00	17.395.269.903,98
Aset Digunakan Pihak Lainnya	293.899.215.606,78	1.070.477.000,00	13.576.589.000,00	281.393.103.606,78
Aset Pinjam Pakai	9.047.759.875,00	1.860.036.000,00	574.351.500,00	10.333.444.375,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Hukum	0,00	479.779.000,00	0,00	479.779.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>329.554.667.758,87</b>	<b>9.573.499.001,00</b>	<b>15.554.945.928,76</b>	<b>323.573.220.831,11</b>

### 1) Detail Engineering Design (DED)

Saldo Aset Lain-Lain berupa *Detail Engineering Design (DED)* per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.938.634.000,00 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.817.707.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang umur teknisnya telah melewati batas pengakuan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu empat tahun sejak perolehannya. Mutasi DED per SKPD pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.53**  
**Rincian Detail Engineering Design (DED)**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.599.480.000,00	1.146.118.000,00	0,00	2.745.598.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	149.420.000,00	3.166.555.000,00	0,00	3.315.975.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.480.000,00	0,00	0,00	40.480.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.111.880.000,00	0,00	0,00	1.111.880.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	768.711.000,00	1.311.534.000,00	0,00	2.080.245.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63.763.000,00	0,00	0,00	63.763.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	793.468.000,00	0,00	0,00	793.468.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	593.725.000,00	0,00	0,00	593.725.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	193.500.000,00	0,00	193.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.120.927.000,00</b>	<b>5.817.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938.634.000,00</b>

### 2) Kekurangan Volume

Saldo Kekurangan Volume per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.232.989.945,35. Terdapat penurunan nilai kekurangan volume sebesar Rp1.190.367.836,76 dari saldo tahun lalu karena telah dilakukan pembayaran ke RKUD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Kesehatan. Rincian Kekurangan Volume pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.54**  
**Rincian Kekurangan Volume**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.303.689.118,58	0,00	965.200.369,84	338.488.748,74
Dinas Perhubungan	496.657.747,74	0,00	0,00	496.657.747,74
Dinas Kesehatan	623.010.915,79	0,00	225.167.466,92	397.843.448,87
<b>Jumlah</b>	<b>2.423.357.782,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.367.836,76</b>	<b>1.232.989.945,35</b>

### 3) Investasi di BUMD dalam Proses Likuidasi

Saldo Aset Lain-Lain Investasi di BUMD dalam proses likuidasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.800.000.000,00. Saldo tersebut merupakan koreksi reklasifikasi dari Investasi Permanen lainnya (Penyertaan Modal pada PT Basin Resources) yang telah dibubarkan/dibekukan berdasarkan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources tanggal 24 Oktober 2013. Likuidasi atas BUMD Basin Resources sampai 31 Desember 2020 belum dapat diselesaikan.

### 4) Aset Dobel Pencatatan

Saldo Aset Lain-Lain Aset Dobel Pencatatan sebesar Rp0,00, terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp213.637.592,00, berupa aset kendaraan operasional dinas roda empat sebanyak dua unit yang dicatat ganda pada Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta kendaraan operasional dinas roda dua sebanyak tiga unit pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihapus berdasarkan hasil inventarisasi dan konsolidasi pada tahun 2019. Mutasi Aset Dobel Pencatatan per SKPD pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.3.55**  
**Rincian Aset Dobel Pencatatan**

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Sosial	5.565.000,00	0,00	5.565.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	154.325.000,00	0,00	154.325.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	53.747.592,00	0,00	53.747.592,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>213.637.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.637.592,00</b>	<b>0,00</b>

### 5) Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Aset Kondisi Rusak Berat sebesar Rp17.395.269.903,98. Penambahan sebesar Rp345.500.001,00 merupakan aset Peralatan dan Mesin kendaraan dinas roda empat sebanyak tiga unit pada Dinas Lingkungan Hidup yang berdasarkan hasil inventarisasi dan konsolidasi aset tersebut dalam keadaan kondisi rusak berat dan koreksi saldo awal aset rusak berat.

**Tabel 5.3.56**  
**Rincian Aset Kondisi Rusak Berat**

*(dalam rupiah)*

Nama OPD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Sekretariat DPRD	1.630.347.000,00	0,00	0,00	1.630.347.000,00
Sekretariat Daerah	4.101.072.500,00	0,00	0,00	4.101.072.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.969.692.282,00	0,00	0,00	4.969.692.282,00

Nama OPD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	406.258.000,00	0,00	0,00	406.258.000,00
Dinas Perhubungan	2.369.901.272,00	0,00	0,00	2.369.901.272,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	62.802.376,00	0,00	0,00	62.802.376,00
Dinas Kesehatan	553.935.000,00	0,00	0,00	553.935.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	608.238.898,00	0,00	0,00	608.238.898,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	201.311.000,00	0,00	0,00	201.311.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141.150.000,00	0,00	0,00	141.150.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	361.036.000,00	0,00	0,00	361.036.000,00
Dinas Pertanian	34.700.000,00	0,00	0,00	34.700.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	388.223.801,98	1,00	0,00	388.223.802,98
Dinas Perikanan	184.383.773,00	0,00	0,00	184.383.773,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95.169.000,00	0,00	0,00	95.169.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	575.184.000,00	0,00	0,00	575.184.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	208.065.000,00	345.500.000,00	0,00	553.565.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	22.850.000,00	0,00	0,00	22.850.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	115.950.000,00	0,00	0,00	115.950.000,00
Kecamatan Air Kumbang	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.049.769.902,98</b>	<b>345.500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395.269.903,98</b>

## 6) Aset Yang Digunakan Pihak Lain

Saldo Aset yang Digunakan Pihak Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp281.393.103.606,78 dan terjadi penurunan sebesar Rp12.506.112.000,00 dari tahun sebelumnya. Mutasi Aset yang Digunakan Pihak Lain per SKPD disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.3.57**  
**Rincian Aset yang Digunakan Pihak Lain**

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Sekretariat Daerah	24.384.056.603,00	0,00	0,00	24.384.056.603,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	185.988.178.096,00	0,00	13.576.589.000,00	172.411.589.096,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	55.079.452.000,00	0,00	0,00	55.079.452.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.148.720.907,78	0,00	0,00	13.148.720.907,78
Dinas Ketahanan Pangan	15.298.808.000,00	0,00	0,00	15.298.808.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	447.200.000,00	0,00	447.200.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	199.750.000,00	0,00	199.750.000,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	224.000.000,00	0,00	224.000.000,00
Kecamatan Talang Kelapa	0,00	199.527.000,00	0,00	199.527.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>293.899.215.606,78</b>	<b>1.070.477.000,00</b>	<b>13.576.589.000,00</b>	<b>281.393.103.606,78</b>

Penjelasan atas saldo Aset yang Digunakan Pihak Lain adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah sebesar Rp24.384.056.603,00 merupakan aset yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas lanjutan Penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan aset sebesar Rp172.411.589.096,00 yang berasal dari DID dan APBD Kabupaten yang dibangun dan digunakan di atas tanah milik desa ataupun lembaga/organisasi lainnya dan belum dilakukan penyerahan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp55.079.452.000,00 merupakan aset yang berasal dari Dana Infrastruktur Desa (DID) pada tahun 2014, 2015 dan 2016 yang belum diserahkan kepada Pemerintah Desa;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp13.148.720.907,78 merupakan Aset yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada SMA/MK Negeri atas lanjutan Penyerahan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp15.298.808.000,00 merupakan Aset yang digunakan oleh Kelompok Tani pada desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tetapi belum dilakukan penyerahan;
- f. Kecamatan Talang Kelapa senilai Rp199.527.000,00 yang merupakan mutasi antar SKPD dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan

- g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp447.200.000,00 berupa alat musik, soundsystem dan lapangan bola volley, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah senilai Rp199.750.000,00 berupa buku ilmu pengetahuan umum dan Dinas Perkebunan dan Peternakan senilai Rp224.000.000,00 berupa jalan produksi yang akan diserahkan kepada pihak lainnya, namun belum dilengkapi dengan dokumen penyerahannya.

## 7) Aset Pinjam Pakai

Saldo Aset Pinjam Pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.333.444.375,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin yang dipinjam-pakaikan kepada pihak lainnya dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.58**  
**Rincian Mutasi Aset Pinjam Pakai**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Sekretariat Daerah	8.707.459.875,00	897.000.000,00	574.351.500,00	9.030.108.375,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	340.300.000,00	2.552.000,00	0,00	342.852.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	574.351.500,00	0,00	574.351.500,00
Dinas Sosial	0,00	16.156.500,00	0,00	16.156.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	369.976.000,00	0,00	369.976.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.047.759.875,00</b>	<b>1.860.036.000,00</b>	<b>574.351.500,00</b>	<b>10.333.444.375,00</b>

Adapun rincian kendaraan yang dipinjam-pakaikan kepada pihak lainnya sebagai berikut.

**Tabel 5.3.59**  
**Rincian Aset Pinjam Pakai Per SKPD**

*(dalam rupiah)*

Jenis Barang	Merk	No. Polisi	Harga (Rupiah)	Pemakai
<b>Sekretariat Daerah</b>				
Station Wagon	Strada Triton	BG 8036 JZ	60.900.000,00	Kepala Kantor Pertanahan Kab.BA
Jeep	Mitsubishi Stada Triton	BG 9090 JZ	348.206.375,00	Ir. Syahril A. Rachman (Komandan Batalyon Arhanud 12/SBP)
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Kijang	BG 1026 JZ	192.145.000,00	Ketua DPD LDII Kab.BA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota	BG 1091 JZ	201.427.000,00	Sekretaris KORPRI Kab.BA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Kijang	BG 1025 JZ	192.145.000,00	Ketua LPTQ Kab.BA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Allnew Fortuner	BG 1364 JZ	645.860.000,00	Kepala Kepolisian Resor Banyuasin
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Allnew Fortuner	BG 1366 JZ	645.860.000,00	Pgs. Dandim 0430 Banyuasin
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Allnew Kijang Innova	BG 1363 JZ	437.390.000,00	Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai

Jenis Barang	Merk	No. Polisi	Harga (Rupiah)	Pemakai
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Hiace Commuter Manual Vin	BG 7021 JZ	463.820.000,00	Komandan Kodim 0430 Banyuasin
Pick Up	Toyota New Hilux Double Cabin 2.4 G	BG 8119 JZ	417.660.000,00	Kepala Kepolisian Resor Banyuasin
Pick Up	Toyota New Hilux Double Cabin 2.4 G	BG 8117 JZ	417.660.000,00	Kepala Kepolisian Resor Banyuasin
Pick Up	Toyota New Hilux Double Cabin 2.4 G	BG 8115 JZ	417.660.000,00	Kepala Kepolisian Resor Banyuasin
Pick Up	Toyota Hilux	BG 9039 JZ	348.690.000,00	Kepala Kepolisian Resor Banyuasin
Pick Up	Toyota New Hilux Double Cabin 2.4 G	BG 8114 JZ	417.660.000,00	Kepala Kepolisian Resor Banyuasin
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Nissan	BG 1192 JZ	344.792.000,00	Ketua Pengadilan Negeri P.Balai
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Mitsubishi	BG 7002 JZ	21.660.000,00	Ketua PDD-Polenila Kab.BA (Hasil Penilaian di tahun 2016)
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Avanza	BG 2085 JZ	99.700.000,00	Sekretaris Dewan Masjid Kab.BA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Nissan	BG 1151 JZ	315.275.000,00	Pengadilan Negeri P.Balai
Jeep	Nissan Xtraill	BG 1181 JZ / BG 12 J	344.792.000,00	Ketua Pengadilan Negeri P.Balai
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Nissan	BG 1180 JZ	344.792.000,00	Ketua Pengadilan Negeri P.Balai
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Suzuki	BG 1159 JZ	157.761.500,00	Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Kab.BA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Rush	BG 1204 JZ	205.500.000,00	Ketua Koni Kab.BA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota New Rush	BG 1294 JZ	211.090.000,00	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Hutang 2015 (KNPI)
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota	BG 1083 JZ	201.427.000,00	Ketua Badan Amil Zakat
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota	BG 1090 JZ	201.427.000,00	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kab.Banyuasin
Pick Up	Mitsubishi	BG 8031 JZ	261.000.000,00	Ka. Polsek Tungkal Ilir Kab.BA
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Mitsubishi	BG 1032 JZ	-	Kepala Kanminvetcad II/15 Sekayu
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Mitsubishi	BG 1119 JZ	373.500.000,00	eks. Bupati Banyuasin
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota	BG 8121 JZ	417.660.000,00	Ajudan Bupati/Polres
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota New Avanza	BG 1410 JZ	197.000.000,00	Pinjam Pakai Ponpes Sabilul Hasanah
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota New Avanza	BG 1417 JZ	197.000.000,00	Pinjam Pakai PC Anshor
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota all New Rush	BG 1413 JZ	270.000.000,00	Pinjam Pakai PCNU
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Mitsubishi Xpander	BG 1425 JZ	233.000.000,00	Pinjam Pakai ke PAUD LPNU
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Mobil Pick Up Daubel Cabin	BG-1249-JZ	340.300.000,00	Pembina Adat Kab. Banyuasin

Jenis Barang	Merk	No. Polisi	Harga (Rupiah)	Pemakai
Sepeda Motor	Mega Pro	BG 5030 JZ	2.552.000,00	Anggota Polres Banyuasin
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Kepala Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Sekretaris Desa Lubuk Karet Kec. Betung
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Kepala Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Kepala Desa Sako Kec. Rambutan
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Kepala Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Pj. Kepala Desa Duren Ijo Kec. Banyuasin I
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Pj. Kepala Desa Sido Mulyo Kec. Air Kumbang
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Kepala Desa Muara Sugih Kec. Tanjung Lago
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Kepala Desa Terlangu Kec. Banyuasin III
Sepeda Motor Patroli	Kawasaki LX 150F Vin2019		36.997.600,00	Kepala Desa Beringin Agung Kec. Muara Sugihan
<b>Dinas Sosial</b>				
Sepeda Motor	Honda Supra X CW	BG 2621 JZ	16.156.500,00	Pinjam Pakai BNK
<b>Jumlah</b>			<b>10.333.444.375,00</b>	

Selain Aset Pinjam Pakai di atas, terdapat satu unit Kendaraan Roda Empat Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BG 1032 JZ pada Sekretariat Daerah yang dipinjampakaikan kepada Kepala Kanminvetcad II/15 Sekayu sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor 0281/57/BA/VIII/2017 tanggal 18 Januari 2017, tetapi tidak tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Pemkab Banyuasin karena pada saat penilaian saldo awal aset tetap tahun 2007 tidak tercatat.

#### 8) Kas di Bendahara yang masih dalam proses pengadilan

Merupakan saldo kas di rekening bendahara pengeluaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman untuk belanja modal tanah pelebaran jalan senilai Rp479.779.000,00, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum diperoleh kesepakatan harga sehingga dana tersebut dititipkan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan berita acara penitipan uang ganti kerugian Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pkb tanggal 8 Januari 2021.

#### 5.3.1.4.4 Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.711.128.277,63 dan terjadi penambahan sebesar Rp261.228.297,00 dari tahun 2019

karena koreksi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya yang rusak berat. Mutasi Penyusutan Aset Lain-Lain pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.60**  
**Rincian Penyusutan Aset Lain-lain**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	675.683.681,34	0,00	0,00	675.683.681,34
Dinas Kesehatan	433.868.451,00	0,00	0,00	433.868.451,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.207.955.998,67	0,00	0,00	1.207.955.998,67
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	406.258.000,00	0,00	0,00	406.258.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	57.176.172,19	8.214.290,00	40.310.696,00	25.079.766,19
Dinas Sosial	5.565.000,00	15.002.465,00	0,00	20.567.465,00
Dinas Ketahanan Pangan	388.223.802,98	0,00	0,00	388.223.802,98
Dinas Lingkungan Hidup	135.816.498,33	345.500.000,00	0,00	481.316.498,33
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	436.886.905,00	2.552.000,00	0,00	439.438.905,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	315.097.575,52	0,00	0,00	315.097.575,52
Dinas Perhubungan	1.031.559.242,84	0,00	0,00	1.031.559.242,84
Dinas Komunikasi dan Informatika	62.802.376,00	0,00	0,00	62.802.376,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95.169.000,00	0,00	0,00	95.169.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	195.076.668,00	0,00	0,00	195.076.668,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	115.950.000,00	0,00	0,00	115.950.000,00
Dinas Perikanan	71.841.987,93	0,00	0,00	71.841.987,93
Dinas Pertanian	42.383.333,33	0,00	0,00	42.383.333,33
Sekretariat Daerah	8.431.300.538,00	84.595.238,00	0,00	8.515.895.776,00
Sekretariat DPRD	1.630.347.000,00	0,00	0,00	1.630.347.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Kecamatan Talang Kelapa	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00
Kecamatan Air Kumbang	5.875.000,00	0,00	0,00	5.875.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	154.325.000,00	0,00	154.325.000,00	0,00

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	528.637.750,00	0,00	0,00	528.637.750,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(0,5)	0,00	0,00	(0,5)
	<b>16.449.899.980,63</b>	<b>455.863.993,00</b>	<b>194.635.696,00</b>	<b>16.711.128.277,63</b>

### 5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp237.717.794.681,18 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.61**  
**Rincian Kewajiban Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Kewajiban Jangka Pendek	25.031.235.501,23	133.432.175.790,23	11.467.083.210,41	146.996.328.081,05
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	90.721.466.600,13	0,00	90.721.466.600,13
<b>Jumlah</b>	<b>25.031.235.501,23</b>	<b>224.153.642.390,36</b>	<b>11.467.083.210,41</b>	<b>237.717.794.681,18</b>

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp146.996.328.081,05 dan Rp25.031.235.501,23 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo tidak lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.62**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Tambah	Kurang	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	81.756.796,00	1.017.400.919,00	81.756.796,00	1.017.400.919,00
Utang Bunga	0,00	568.764.110,04	0,00	568.764.110,04
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	104.197.472.450,00	0,00	104.197.472.450,00
Utang Kepada Pemerintah Pusat	12.832.152.277,00	4.627.638.238,00	5.237.937.155,00	12.221.853.360,00
Pendapatan diterima dimuka	471.452.751,24	11.728.750,00	383.634.569,42	99.546.931,82
Utang Pengadaan Aset Tetap	3.137.787.273,00	16.971.855.869,39	0,00	20.109.643.142,39
Utang Beban	6.102.595.635,99	6.037.315.453,80	5.763.754.689,99	6.376.156.399,80
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.405.490.768,00	0,00	0,00	2.405.490.768,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.031.235.501,23</b>	<b>133.432.175.790,23</b>	<b>11.467.083.210,41</b>	<b>146.996.328.081,05</b>

### 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.017.400.919,00 dan Rp81.756.796,00 merupakan pungutan atau potongan Pajak Penghasilan Ps 21, Ps 22, Ps 23 dan PPN yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara dan telah disetor di tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.63**  
**Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per Jenis**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Pajak Penghasilan Ps 21	19.104.115,00	287.193.516,00	19.104.115,00	287.193.516,00
Pajak Penghasilan Ps 22	2.203.109,09	16.615.533,00	2.203.109,09	16.615.533,00
Pajak Penghasilan Ps 23	2.134.748,00	9.174.275,00	2.134.748,00	9.174.275,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	58.314.823,91	704.417.595,00	58.314.823,91	704.417.595,00
<b>Jumlah</b>	<b>81.756.796,00</b>	<b>1.017.400.919,00</b>	<b>81.756.796,00</b>	<b>1.017.400.919,00</b>

Perhitungan rincian PFK per SKPD dapat dilihat dalam rincian berikut.

**Tabel 5.3.64**  
**Rincian Utang Fihak Ketiga (PFK) per SKPD**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.934.211,00	995.561.503,00	43.934.211,00	995.561.503,00
Dinas Kesehatan	2.118.200,00	0,00	2.118.200,00	0,00
Dinas Sosial	33.979.386,00	0,00	33.979.386,00	0,00
Kecamatan Muara Padang	0,00	21.839.416,00	0,00	21.839.416,00
Badan Pendapatan Daerah	1.724.999,00	0,00	1.724.999,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>81.756.796,00</b>	<b>1.017.400.919,00</b>	<b>81.756.796,00</b>	<b>1.017.400.919,00</b>

Rincian Utang PFK pada **Lampiran 22**.

### 2) Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2020 sebesar Rp568.764.110,04 merupakan utang bunga dari pinjaman Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Bank Sumsel Babel yang belum dibayar per 31 Desember 2020.

### 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp104.197.472.450,00 merupakan angsuran pokok hutang akan dibayar pada tahun anggaran 2021 dan telah dianggarkan pada APBD 2021.

#### 4) Utang Kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.221.853.360,00 merupakan kelebihan transfer pemerintah pusat atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Bukan Pajak yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020 dan dikurangkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 6/PK/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.65**  
**Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
<b>Bagi Hasil Pajak</b>					
A	PPh 21, 25, 29	0,00	0,00	0,00	0,00
B	PBB	953.695.492,00	0,00	953.695.492,00	0,00
	<b>Jumlah 1</b>	<b>953.695.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.695.492,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>					
A	CHT	4.600.949,00	0,00	4.600.949,00	0,00
B	LandRent	3.417.547.464,00	1.980.995.516,00	3.417.547.464,00	1.980.995.516,00
C	Royalti	132.502.678,00	9,00	132.502.687,00	0,00
D	Minyak Bumi	(2.687.801.222,00)	2.687.801.222,00	0,00	0,00
E	Gas Bumi	11.011.489.800,00	(41.158.509,00)	729.473.447,00	10.240.857.844,00
F	Panas Bumi	117.116,00	0,00	117.116,00	0,00
	<b>Jumlah 2</b>	<b>11.878.456.785,00</b>	<b>4.627.638.238,00</b>	<b>4.284.241.663,00</b>	<b>12.221.853.360,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.832.152.277,00</b>	<b>4.627.638.238,00</b>	<b>5.237.937.155,00</b>	<b>12.221.853.360,00</b>

#### 5) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp99.546.931,82 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.66**  
**Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
			Tambah	Kurang	
1	BPKAD	134.000.000,00	11.728.750,00	46.181.818,18	99.546.931,82
2	Badan Pendapatan Daerah	337.452.751,24	0,00	337.452.751,24	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>471.452.751,24</b>	<b>11.728.750,00</b>	<b>383.634.569,42</b>	<b>99.546.931,82</b>



Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD sebesar Rp99.546.931,82 merupakan pendapatan atas sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.67**  
**Rincian Pendapatan Dimuka pada BPKAD per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	TMT	Nilai Kontrak	Saldo Awal	Pendapatan LO TA 2020	Pendapatan LRA	Kelebihan setor	Pendapatan Diterima Dimuka
Sewa Kantor BRI Unit KTM Telang	1-1-20 s.d 31-12-22	84.000.000,00	84.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
Sewa Kantor KCU Mandiri Tanjung Api-api	1-10-17 s.d 30-9-22	90.909.090,91	50.000.000,00	18.181.818,18	0,00	0,00	31.818.181,82
Koperasi Mekar Sari KTM Telang	1-3-20 s.d 31-8-25	20.400.000,00	0,00	17.000.000,00	20.400.000,00	4.080.000,00	7.480.000,00
ATM Bank Sumsel Komplek Perkantoran	1-8-20 s.d 1-8-25	4.635.000,00	0,00	386.250,00	4.635.000,00	0,00	4.248.750,00
<b>Jumlah</b>			<b>134.000.000,00</b>	<b>63.568.068,18</b>	<b>25.035.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>99.546.931,82</b>

#### 4) Utang Pengadaan Aset Tetap

Saldo Utang pengadaan aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp20.109.643.142,39 dan Rp3.137.787.273,00 dengan rincian per SKPD disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.3.68**  
**Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per SKPD per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	141.419.287,00	0,00	0,00	141.419.287,00
Dinas Kesehatan	9.954.211,00	2.161.790.815,00	0,00	2.171.745.026,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.159.988.075,00	0,00	0,00	1.159.988.075,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	992.612.525,00	14.810.065.054,39	0,00	15.802.677.579,39
Dinas Lingkungan Hidup	10.688.550,00	0,00	0,00	10.688.550,00
Dinas Perhubungan	502.952.850,00	0,00	0,00	502.952.850,00
Dinas Perikanan	238.704.900,00	0,00	0,00	238.704.900,00
Dinas PertanianTanaman Pangan dan Holtikultural	36.118.150,00	0,00	0,00	36.118.150,00
Dinas Perkebunan dan Perternakan	8.680.000,00	0,00	0,00	8.680.000,00
Sekretariat DPRD	36.068.725,00	0,00	0,00	36.068.725,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.137.787.273,00</b>	<b>16.971.855.869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.109.643.142,39</b>

Rincian Mutasi Utang Pengadaan Aset tetap pada **Lampiran 23**.

## 5) Utang Beban

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp6.376.156.399,80 dan Rp6.102.595.635,99 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.69**  
**Rincian Utang Beban per Jenis per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Utang Beban Barang dan Jasa	3.066.320.741,99	5.840.567.301,80	2.727.479.795,99	6.179.408.247,80
Utang Beban Transfer	3.036.274.894,00	196.748.152,00	3.036.274.894,00	196.748.152,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.102.595.635,99</b>	<b>6.037.315.453,80</b>	<b>5.763.754.689,99</b>	<b>6.376.156.399,80</b>

### a. Utang Beban Barang dan Jasa

Saldo Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.376.156.399,80 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.70**  
**Rincian Utang Beban Barang dan Jasa SKPD per 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan	52.661.496,00	0,00	0,00	52.661.496,00
Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	77.178.650,00	0,00	0,00	77.178.650,00
Dinas Kesehatan	2.032.471.300,00	5.103.233.333,00	2.032.471.300,00	5.103.233.333,00
Rumah Sakit Umum Daerah	695.008.495,99	737.333.968,80	695.008.495,99	737.333.968,80
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80.943.300,00	0,00	0,00	80.943.300,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	9.915.750,00	0,00	0,00	9.915.750,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	73.669.250,00	0,00	0,00	73.669.250,00
Sekretariat Daerah	6.325.000,00	0,00	0,00	6.325.000,00
Sekretariat DPRD	28.447.500,00	0,00	0,00	28.447.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.066.320.741,99</b>	<b>5.840.567.301,80</b>	<b>2.727.479.795,99</b>	<b>6.179.408.247,80</b>

Rincian Mutasi Utang Beban Barang dan Jasa pada **Lampiran 23**.

### b. Utang Beban Transfer

Saldo Utang Beban Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp196.748.152,00 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.71**  
**Rincian Utang Beban Transfer SKPD per 31 Desember 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
		Tambah	Kurang	
Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Padang	926.122.670,00	0,00	926.122.670,00	0,00
Desa Mekar Mukti Kecamatan Muara Padang	0,00	0,00	0,00	0,00
Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang	489.812.611,00	0,00	489.812.611,00	0,00
Desa Maju Ria Kecamatan Banyuasin II	458.042.475,00	0,00	458.042.475,00	0,00
Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung	386.541.142,00	0,00	386.541.142,00	0,00
Desa Pulau Borang Kecamatan Banyuasin I	775.755.996,00	0,00	775.755.996,00	0,00
PPKD	0,00	196.748.152,00	0,00	196.748.152,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.036.274.894,00</b>	<b>196.748.152,00</b>	<b>3.036.274.894,00</b>	<b>196.748.152,00</b>

#### **6) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.405.490.768,00 adalah saldo Jaminan kesungguhan merupakan jaminan berupa dana yang dicadangkan oleh perusahaan sebagai bentuk jaminan kesungguhan atas kesanggupan melakukan penambangan dan akan dicairkan pada saat perusahaan tersebut melakukan eksplorasi sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kewenangan berpindah ke Provinsi Sumatera Selatan dan Saldo Jaminan Kesungguhan yang ditempatkan pada Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.405.490.768,00 yang akan ditransfer ke Rekening Provinsi pada tahun 2021.

Sebagai informasi tambahan terdapat hutang jampersal dan jamsoskes di tahun 2020 yang ada di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.535.829.600,00 yg terdiri dari Jampersal di 31 Puskesmas sebesar Rp392.000.000,00 dan RSUD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp915.416.900,00 serta Jamsoskes di RSUD Kabupaten Banyuasin sebesar Rp228.412.700,00.

#### **5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp90.721.466.600,13 merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada pihak perbankan dalam hal ini Bank Sumsel Babel yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Hal ini berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding*) antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang rencana pembiayaan pinjaman daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 1203/Mou/VIII/2019, Nomor 055/DIR/P/2019 tanggal 2 Juli 2019. Dan juga memperhatikan Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah Nomor 162 Tahun 2019 serta Surat Persetujuan Penegasan Pemberian Kredit Nomor 739/DIR/III/B/2019 tanggal 16 September 2019.

### **5.3.3 Ekuitas**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.290.134.062.176,57 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban.

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Laporan Operasional.

### 5.4.1 Pendapatan - LO

Jumlah Pendapatan - LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.969.835.806.659,94. Perbandingan antara Pendapatan - LO tahun 2020 dengan Pendapatan - LO tahun 2019 menunjukkan bahwa adanya penurunan Pendapatan Daerah - LO sebesar Rp101.586.718.825,09 jika dibandingkan dengan Pendapatan - LO tahun 2019 sebesar Rp2.071.422.525.485,03 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.1**  
**Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Asli Daerah - LO	207.669.603.294,89	220.691.132.647,28	(13.021.529.352,39)
Pendapatan Transfer - LO	1.527.649.255.591,05	1.693.618.801.908,75	(165.969.546.317,70)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	234.516.947.774,00	157.112.590.929,00	77.404.356.845,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.969.835.806.659,94</b>	<b>2.071.422.525.485,03</b>	<b>(101.586.718.825,09)</b>

Perbandingan antara Pendapatan - LO dengan Pendapatan - LRA TA 2020 sebesar Rp2.224.006.629.416,73 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp254.170.822.756,79). Rincian Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA per kelompok Pendapatan sebagai berikut.

**Tabel 5.4.2**  
**Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO dan LRA Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pendapatan Asli Daerah - LO	207.669.603.294,89	202.820.182.399,12	4.849.420.895,77
Pendapatan Transfer - LO	1.527.649.255.591,05	1.598.411.419.862,61	(70.762.164.271,56)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	234.516.947.774,00	422.775.027.155,00	(188.258.079.381,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.969.835.806.659,94</b>	<b>2.224.006.629.416,73</b>	<b>(254.170.822.756,79)</b>

**Gambar 5.4.1**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2020**



Rincian realisasi Pendapatan - LO per masing-masing SKPD TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.3**  
**Realisasi Pendapatan - LO per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Perbedaan
Dinas Kesehatan	25.200.660.045,00	24.740.114.729,00	460.545.316,00
Rumah Sakit Umum Daerah	19.382.318.806,00	16.721.015.115,00	2.661.303.691,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	48.723.915,00	48.148.220,00	575.695,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.313.692.800,00	1.228.236.700,00	85.456.100,00
Dinas Perhubungan	1.070.868.589,00	1.189.732.781,00	(118.864.192,00)
Dinas Komunikasi dan Informasi	1.492.742.693,00	1.108.531.929,00	384.210.764,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.073.693.000,00	1.968.363.000,00	105.330.000,00
Dinas Perikanan	708.900.000,00	586.152.800,00	122.747.200,00
Sekretariat Daerah	191.200.000,00	177.230.000,00	13.970.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	4.369.977.488,00	3.618.066.569,00	751.910.919,00
Kecamatan Talang Kelapa	875.000,00	1.400.000,00	(525.000,00)
Kecamatan Rambutan	350.000,00	350.000,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.684.867.728,51	17.990.372.121,46	(4.305.504.392,95)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.762.166.203.365,05	1.857.158.861.487,48	(94.992.658.122,43)
Badan Pendapatan Daerah	138.130.733.230,38	144.885.950.033,09	(6.755.216.802,71)
<b>Jumlah</b>	<b>1.969.835.806.659,94</b>	<b>2.071.422.525.485,03</b>	<b>(101.586.718.825,09)</b>

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp207.669.603.294,89. Perbandingan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2020 dengan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebesar Rp13.021.529.352,39 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.4**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Pajak Daerah - LO	137.352.854.306,49	144.573.313.841,58	(7.220.459.535,09)
Retribusi Daerah - LO	10.587.020.785,00	9.356.813.899,00	1.230.206.886,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	6.427.468.649,72	(6.427.468.649,72)
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	59.729.728.203,40	60.333.536.256,98	(603.808.053,58)
<b>Jumlah</b>	<b>207.669.603.294,89</b>	<b>220.691.132.647,28</b>	<b>(13.021.529.352,39)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah - LO dan Pendapatan Asli Daerah - LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp4.849.420.895,77 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.5**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pajak Daerah - LO	137.352.854.306,49	123.984.849.438,59	13.368.004.867,90

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Daerah - LO	10.587.020.785,00	10.587.020.785,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	6.427.468.649,72	(6.427.468.649,72)
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	59.729.728.203,40	61.820.843.525,81	(2.091.115.322,41)
<b>Jumlah</b>	<b>207.669.603.294,89</b>	<b>202.820.182.399,12</b>	<b>4.849.420.895,77</b>

Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Banyuasin tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 5.4.2**

**Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO 2020**



**5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO**

Pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp137.352.854.306,49. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun sebelumnya sebesar Rp144.573.313.841,58 maka terdapat penurunan sebesar Rp7.220.459.535,09 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.6**

**Pajak Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Pajak Hotel - LO	2.143.657.882,00	3.480.895.640,30	(1.337.237.758,30)
Pajak Restoran - LO	6.680.065.169,00	10.220.346.406,30	(3.540.281.237,30)
Pajak Hiburan - LO	1.404.762.291,49	3.553.778.410,72	(2.149.016.119,23)
Pajak Reklame - LO	811.243.930,00	394.712.548,26	416.531.381,74
Pajak Penerangan Jalan - LO	40.306.893.275,00	36.096.495.177,09	4.210.398.097,91
Pajak Parkir - LO	752.670.927,00	1.237.315.601,00	(484.644.674,00)
Pajak Air Tanah - LO	4.416.036.156,00	3.361.698.285,91	1.054.337.870,09
Pajak Sarang Burung Walet - LO	31.942.000,00	25.670.000,00	6.272.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	2.031.003.168,00	785.969.600,00	1.245.033.568,00
Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	38.031.794.065,00	35.607.079.478,00	2.424.714.587,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	40.742.785.443,00	49.809.352.694,00	(9.066.567.251,00)
<b>Jumlah</b>	<b>137.352.854.306,49</b>	<b>144.573.313.841,58</b>	<b>(7.220.459.535,09)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp13.368.004.867,90 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.7**  
**Pajak Daerah - LO dan Pajak Daerah - LRA Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Kenaikan/Penurunan
Pajak Hotel - LO	2.143.657.882,00	2.174.805.147,10	(31.147.265,10)
Pajak Restoran - LO	6.680.065.169,00	6.768.652.571,00	(88.587.402,00)
Pajak Hiburan - LO	1.404.762.291,49	1.404.762.291,49	0,00
Pajak Reklame - LO	811.243.930,00	793.339.430,00	17.904.500,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	40.306.893.275,00	40.295.094.610,00	11.798.665,00
Pajak Parkir - LO	752.670.927,00	752.670.927,00	0,00
Pajak Air Tanah - LO	4.416.036.156,00	4.410.876.705,00	5.159.451,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	31.942.000,00	31.942.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	2.031.003.168,00	1.727.934.668,00	303.068.500,00
Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO	38.031.794.065,00	24.881.985.646,00	13.149.808.419,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	40.742.785.443,00	40.742.785.443,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>137.352.854.306,49</b>	<b>123.984.849.438,59</b>	<b>13.368.004.867,90</b>

Perbedaan sebesar Rp13.368.004.867,90 sebagaimana pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan atas Pajak Hotel - LO dan LRA sebesar Rp31.147.265,10 merupakan pengurangan Piutang Pajak Hotel karena pembayaran di tahun 2020.
2. Perbedaan atas Pajak Restoran - LO dan LRA sebesar Rp88.587.402,00 merupakan penambahan pengakuan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp186.461.000,00 dan penambahan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp24.790.535,00. Pengurangan Piutang karena pembayaran sebesar (Rp113.377.937,00) dan Pajak Restoran yang masih terdapat dalam rekening penampungan sembilan pajak sebesar (Rp186.461.000,00).
3. Perbedaan atas Pajak Reklame - LO dan LRA sebesar Rp17.904.500,00 merupakan penambahan pengakuan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp19.554.500,00 dan pengurangan Piutang karena pembayaran sebesar (Rp1.650.000,00).
4. Perbedaan atas Pajak Penerangan Jalan - LO dan LRA sebesar Rp11.798.665,00 merupakan penambahan pengakuan Piutang Pajak Daerah tahun 2020.
5. Perbedaan atas Pajak Air Tanah - LO dan LRA sebesar Rp5.159.451,00 merupakan penambahan pengakuan Piutang Pajak Daerah tahun 2020.
6. Perbedaan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO dan LRA sebesar Rp303.068.500,00 merupakan penambahan pengakuan Piutang Pajak Daerah tahun 2020.
7. Perbedaan atas Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan - LO dan LRA sebesar Rp13.149.808.419,00 merupakan penambahan pengakuan piutang pajak daerah sebesar Rp38.031.794.065,00 dan pengurangan piutang karena pembayaran di tahun 2020 sebesar (Rp24.881.985.646,00).



#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO dikelola oleh 11 SKPD. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.587.020.785,00. Jika dibandingkan dengan dengan Retribusi Daerah - LO tahun 2019 sebesar Rp9.356.813.899,00 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp1.230.206.886,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.8**  
**Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Jasa Umum - LO	4.735.080.908,00	4.353.881.149,00	381.199.759,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	1.480.737.389,00	1.382.181.181,00	98.556.208,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	4.371.202.488,00	3.620.751.569,00	750.450.919,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.587.020.785,00</b>	<b>9.356.813.899,00</b>	<b>1.230.206.886,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah - LO per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.9**  
**Pendapatan Retribusi Daerah - LO per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Perbedaan
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	47.623.915,00	40.498.220,00	7.125.695,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.312.079.100,00	1.226.078.400,00	86.000.700,00
Dinas Perhubungan	1.067.309.589,00	1.186.200.781,00	(118.891.192,00)
Dinas Komunikasi dan Informasi	1.492.742.693,00	1.108.531.929,00	384.210.764,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.073.693.000,00	1.968.363.000,00	105.330.000,00
Dinas Perikanan	31.170.000,00	30.095.000,00	1.075.000,00
Sekretariat Daerah	191.200.000,00	177.230.000,00	13.970.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	4.369.977.488,00	3.618.066.569,00	751.910.919,00
Kecamatan Talang Kelapa	875.000,00	1.400.000,00	(525.000,00)
Kecamatan Rambutan	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.587.020.785,00</b>	<b>9.356.813.899,00</b>	<b>1.230.206.886,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.10**  
**Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Jasa Umum - LO	4.735.080.908,00	4.735.080.908,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	1.480.737.389,00	1.480.737.389,00	0,00

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	4.371.202.488,00	4.371.202.488,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.587.020.785,00</b>	<b>10.587.020.785,00</b>	<b>0,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.11**  
**Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA per SKPD Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	47.623.915,00	47.623.915,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.312.079.100,00	1.312.079.100,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.067.309.589,00	1.067.309.589,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informasi	1.492.742.693,00	1.492.742.693,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.073.693.000,00	2.073.693.000,00	0,00
Dinas Perikanan	31.170.000,00	31.170.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	191.200.000,00	191.200.000,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	4.369.977.488,00	4.369.977.488,00	0,00
Kecamatan Talang Kelapa	875.000,00	875.000,00	0,00
Kecamatan Rambutan	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.587.020.785,00</b>	<b>10.587.020.785,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LO

Retribusi Jasa Umum terdiri dari 10 jenis Retribusi dimana Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2020 sebesar Rp4.735.080.908,00. Jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum tahun 2019 sebesar Rp4.353.881.149,00 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp381.199.759,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.4.12**  
**Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.149.636.000,00	1.225.578.000,00	(75.942.000,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	128.242.300,00	130.755.000,00	(2.512.700,00)
Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran - LO	798.929.000,00	803.826.000,00	(4.897.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar Los - LO	490.059.000,00	456.443.000,00	33.616.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar Kios - LO	278.515.000,00	243.149.000,00	35.366.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	242.302.000,00	280.215.000,00	(37.913.000,00)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	47.623.915,00	40.498.220,00	7.125.695,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	44.700.000,00	44.390.000,00	310.000,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	43.731.000,00	0,00	43.731.000,00
Retribusi Bea Balik Nama - LO	18.600.000,00	20.495.000,00	(1.895.000,00)
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	1.492.742.693,00	1.108.531.929,00	384.210.764,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.735.080.908,00</b>	<b>4.353.881.149,00</b>	<b>381.199.759,00</b>

Perbandingan antara Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bawah tidak terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.13**  
**Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.149.636.000,00	1.149.636.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	128.242.300,00	128.242.300,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran - LO	798.929.000,00	798.929.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar Los - LO	490.059.000,00	490.059.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar Kios - LO	278.515.000,00	278.515.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	242.302.000,00	242.302.000,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	47.623.915,00	47.623.915,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	43.731.000,00	43.731.000,00	0,00
Retribusi Bea Balik Nama - LO	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO	1.492.742.693,00	1.492.742.693,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.735.080.908,00</b>	<b>4.735.080.908,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LO

Retribusi Jasa Usaha - LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.480.737.389,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun sebelumnya sebesar Rp1.382.181.181,00 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp98.556.208,00.

**Tabel 5.4.14**  
**Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LO	561.602.100,00	400.560.400,00	161.041.700,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - LO	17.000.000,00	21.300.000,00	(4.300.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan - LO	11.100.000,00	12.900.000,00	(1.800.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	168.500.000,00	148.230.000,00	20.270.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan -	691.365.289,00	769.095.781,00	(77.730.492,00)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
LO			
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	31.170.000,00	30.095.000,00	1.075.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.480.737.389,00</b>	<b>1.382.181.181,00</b>	<b>98.556.208,00</b>

Perbandingan antara Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.15**  
**Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium - LO	561.602.100,00	561.602.100,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan - LO	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan - LO	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LO	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	691.365.289,00	691.365.289,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	31.170.000,00	31.170.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.480.737.389,00</b>	<b>1.480.737.389,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.371.202.488,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun sebelumnya sebesar Rp3.620.751.569,00 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp750.450.919,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.16**  
**Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	4.369.937.488,00	3.619.816.569,00	750.120.919,00
Retribusi Izin Trayek - LO	1.265.000,00	935.000,00	330.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.371.202.488,00</b>	<b>3.620.751.569,00</b>	<b>750.450.919,00</b>

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.17**  
**Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan LRA Tahun 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	4.369.937.488,00	4.369.937.488,00	0,00
Retribusi Izin Trayek - LO	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.371.202.488,00</b>	<b>4.371.202.488,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Daerah - LO untuk tahun 2020 diketahui bahwa tidak ada realisasi. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2019 maka terdapat penurunan sebesar Rp6.427.468.649,72. Hal tersebut disebabkan belum adanya ketetapan RUPS Bank Sumsel Babel untuk pembagian deviden tahun 2020.

#### 5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp59.729.728.203,40. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp60.333.536.256,98 menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebesar Rp603.808.053,58 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.18**  
**Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	0,00	119.600.000,00	(119.600.000,00)
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.542.621.300,00	3.167.693.060,90	(625.071.760,90)
Pendapatan Bunga - LO	6.601.889.889,81	10.318.568.817,29	(3.716.678.927,48)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	61.800.225,16	39.140.000,00	22.660.225,16
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	82.706.381,00	20.183.288,50	62.523.092,50
Pendapata Denda Pajak - LO	779.505.257,20	310.529.524,76	468.975.732,44
Pendapatan Denda Retribusi - LO	5.172.700,00	5.688.800,00	(516.100,00)
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	1.100.000,00	7.650.000,00	(6.550.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian - LO	504.170.019,51	1.008.484.136,64	(504.314.117,13)
Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	63.568.068,18	18.181.818,18	45.386.250,00
Pendapatan BLUD - LO	19.382.318.806,00	16.721.015.115,00	2.661.303.691,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	4.504.223.623,54	3.856.689.893,71	647.533.729,83
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	25.200.651.933,00	24.740.111.802,00	460.540.131,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.729.728.203,40</b>	<b>60.333.536.256,98</b>	<b>(603.808.053,58)</b>

Rincian atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO per SKPD tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.19**  
**Lain-Lain PAD yang Sah - LO per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Kesehatan	25.200.660.045,00	24.740.114.729,00	460.545.316,00
Rumah Sakit Umum Daerah	19.382.318.806,00	16.721.015.115,00	2.661.303.691,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.100.000,00	7.650.000,00	(6.550.000,00)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Lingkungan Hidup	1.613.700,00	2.158.300,00	(544.600,00)
Dinas Perhubungan	3.559.000,00	3.532.000,00	27.000,00
Dinas Perikanan	677.730.000,00	556.057.800,00	121.672.200,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.684.867.728,51	17.990.372.121,47	(4.305.504.392,96)
Badan Pendapatan Daerah	777.878.923,89	312.636.191,51	465.242.732,38
<b>Jumlah</b>	<b>59.729.728.203,40</b>	<b>60.333.536.256,98</b>	<b>(603.808.053,58)</b>

Perbandingan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp2.091.115.322,41) sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.20**  
**Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.542.621.300,00	2.542.612.688,00	8.612,00
Pendapatan Bunga Deposito - LO	6.601.889.889,81	6.684.862.492,40	(82.972.602,59)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	61.800.225,16	101.578.225,16	(39.778.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	82.706.381,00	82.706.381,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	779.505.257,20	779.505.257,20	0,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	5.172.700,00	5.172.700,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	504.170.019,51	504.170.019,51	0,00
Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	63.568.068,18	29.115.000,00	34.453.068,18
Pendapatan BLUD - LO	19.382.318.806,00	21.148.819.506,00	(1.766.500.700,00)
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO	4.504.223.623,54	4.740.549.323,54	(236.325.700,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	25.200.651.933,00	25.200.651.933,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.729.728.203,40</b>	<b>61.820.843.525,81</b>	<b>(2.091.115.322,41)</b>

Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dan LRA sebesar (Rp2.091.115.322,41) dengan uraian sebagai berikut.

1. Perbedaan atas Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp8.612,00 merupakan pengakuan Pendapatan Jasa Giro - LO pada rekening Puskesmas Tanjung Api-api yang belum disetorkan ke kas daerah.
2. Perbedaan atas Pendapatan Bunga Deposito - LO sebesar (Rp82.972.602,59) merupakan pengurangan Piutang tahun sebesar (Rp179.726.027,38) dan penambahan Piutang Bunga Deposito tahun 2020 sebesar Rp96.753.424,79.
3. Perbedaan atas pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah - LO dan Pendapatan TGR - LRA sebesar (Rp39.778.000,00) merupakan selisih perhitungan

penambahan Piutang TGR sebesar Rp61.800.225,16 dengan pembayaran TGR sebesar (Rp101.578.225,16).

4. Perbedaan atas Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp34.453.068,18 terdiri Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa bangunan di KTM Telang dan ATM Bank Sumsel Babel di komplek perkantoran sebesar (Rp25.035.000,00) dan Pendapatan Dimuka yang telah menjadi Pendapatan sebesar Rp63.568.068,18 serta kelebihan pembayaran senilai (Rp4.080.000) yang akan ditambahkan atau mengurangi dengan pembayaran sewa tahun berikutnya sesuai dengan Surat Nomor 059/1162/Nakertrans/1/2020 tanggal 26 Februari 2020.
5. Perbedaan atas Pendapatan BLUD sebesar (Rp1.766.500.700,00) merupakan penambahan atas Piutang BLUD tahun 2020 sebesar Rp1.938.397.500,00 dan pembayaran Piutang BLUD tahun 2019 sebesar (Rp3.704.898.200).
6. Perbedaan atas Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya sebesar (Rp236.325.700,00) merupakan penambahan Piutang Lain-Lain tahun 2020 atas kelebihan pembayaran gaji pegawai yang telah pensiun ke PT Taspen sebesar (Rp29.925.700,00) dan setoran kurvol Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar (Rp206.400.000,00).

Perbandingan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dan LRA per SKPD tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.21**  
**Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA per SKPD Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dinas Kesehatan	25.200.660.045,00	25.200.651.433,00	8.612,00
Rumah Sakit Umum Daerah	19.382.318.806,00	21.148.819.506,00	(1.766.500.700,00)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.613.700,00	1.613.700,00	0,00
Dinas Perhubungan	3.559.000,00	3.559.000,00	0,00
Dinas Perikanan	677.730.000,00	677.730.000,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.684.867.728,51	14.009.490.962,92	(324.623.234,41)
Badan Pendapatan Daerah	777.878.923,89	777.878.923,89	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.729.728.203,40</b>	<b>61.820.843.525,81</b>	<b>(2.091.115.322,41)</b>

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Jumlah Pendapatan Transfer - LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.527.649.255.591,05. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer - LO tahun 2019 sebesar Rp1.693.618.801.908,75 maka terdapat penurunan sebesar Rp165.969.546.317,71 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.22**  
**Pendapatan Transfer - LO tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.338.836.254.815,00	1.508.288.410.891,00	(169.452.156.076,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	34.033.249.000,00	35.281.887.000,00	(1.248.638.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	154.779.751.776,05	150.048.504.017,75	4.731.247.758,30
<b>Jumlah</b>	<b>1.527.649.255.591,05</b>	<b>1.693.618.801.908,75</b>	<b>(165.969.546.317,71)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp70.762.164.271,56) yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.23**  
**Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.338.836.254.815,00	1.404.731.263.673,00	(65.895.008.858,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	34.033.249.000,00	34.033.249.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	154.779.751.776,05	159.646.907.189,61	(4.867.155.413,56)
<b>Jumlah</b>	<b>1.527.649.255.591,05</b>	<b>1.598.411.419.862,61</b>	<b>(70.762.164.271,56)</b>

#### 5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan - LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak - LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - LO, Dana Alokasi Umum (DAU) - LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO. Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.338.836.254.815,00. Jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tahun sebelumnya sebesar Rp1.508.288.410.891,00 maka terdapat penurunan sebesar (Rp169.452.156.076,00) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.24**  
**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>42.618.138.800,00</b>	<b>50.711.391.400,00</b>	<b>(8.093.252.600,00)</b>
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	36.154.557.600,00	43.560.941.800,00	(7.406.384.200,00)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	6.463.581.200,00	7.150.449.600,00	(686.868.400,00)
<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>76.288.983.970,00</b>	<b>108.919.106.053,00</b>	<b>(32.630.122.083,00)</b>
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	1.153.836.800,00	735.612.699,00	418.224.101,00



Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Bagi Hasil dari luran Tetap ( <i>Land-Rent</i> ) - LO	3.736.490.150,00	2.003.338.750,00	1.733.151.400,00
Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) - LO	23.694.297.650,00	31.955.323.777,00	(8.261.026.127,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	784.599.000,00	590.155.800,00	194.443.200,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	14.361.998.800,00	16.997.709.300,00	(2.635.710.500,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	32.350.422.400,00	56.540.517.527,00	(24.190.095.127,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	185.915.100,00	14.893.200,00	171.021.900,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LO	21.424.070,00	81.555.000,00	(60.130.930,00)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>878.495.803.000,00</b>	<b>979.541.981.000,00</b>	<b>(101.046.178.000,00)</b>
Dana Alokasi Umum - LO	878.495.803.000,00	979.541.981.000,00	(101.046.178.000,00)
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>341.433.329.045,00</b>	<b>369.115.932.438,00</b>	<b>(27.682.603.393,00)</b>
<b>DAK Fisik</b>			
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	36.324.886.584,00	38.502.724.415,00	(2.177.837.831,00)
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	0,00	14.712.655.071,00	(14.712.655.071,00)
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	8.202.199.000,00	3.394.367.998,00	4.807.831.002,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO	23.583.044.000,00	13.850.500.000,00	9.732.544.000,00
DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	0,00	398.706.250,00	(398.706.250,00)
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	2.501.460.000,00	0,00	2.501.460.000,00
DAK Bidang Kesehatan - LO	31.322.823.826,00	24.157.588.477,00	7.165.235.349,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	1.084.739.000,00	1.010.997.000,00	73.742.000,00
DAK Bidang Perdagangan - LO	0,00	6.321.915.824,00	(6.321.915.824,00)
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO	0,00	638.400.500,00	(638.400.500,00)
DAK Bidang Pertanian - LO	664.846.000,00	1.898.985.762,00	(1.234.139.762,00)
DAK Bidang Pendidikan - LO	29.126.487.000,00	40.765.276.743,00	(11.638.789.743,00)
DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah - LO	536.830.257,00	16.068.161.223,00	(15.531.330.966,00)
DAK Bidang Transportasi - LO	860.826.500,00	6.406.708.222,00	(5.545.881.722,00)
<b>DAK Non Fisik</b>			
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	136.644.343.000,00	139.764.242.526,00	(3.119.899.526,00)
Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	1.869.075.000,00	1.852.275.000,00	16.800.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini - LO	11.139.000.000,00	9.555.600.000,00	1.583.400.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	38.303.653.228,00	22.035.885.440,00	16.267.767.788,00
Akreditasi Puskesmas - LO	0,00	4.210.150.000,00	(4.210.150.000,00)
Jaminan Persalinan - LO	0,00	3.429.000.000,00	(3.429.000.000,00)
Bantuan Operasional Keluarga	6.131.347.300,00	5.803.887.000,00	327.460.300,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Berencana - LO			
Dana Tunjangan Khusus Guru - LO	7.423.435.000,00	8.464.978.000,00	(1.041.543.000,00)
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	2.731.333.350,00	2.035.156.987,00	696.176.363,00
Pelayanan Kepariwisata	0,00	752.170.000,00	(752.170.000,00)
Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kedinasaan - LO	2.983.000.000,00	3.085.600.000,00	(102.600.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.338.836.254.815,00</b>	<b>1.508.288.410.891,00</b>	<b>(169.452.156.076,00)</b>

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp65.895.008.858,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.25**  
**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO dan LRA Tahun 2020**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>42.618.138.800,00</b>	<b>57.994.104.860,00</b>	<b>(15.375.966.060,00)</b>
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	36.154.557.600,00	44.837.891.888,00	(8.683.334.288,00)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	6.463.581.200,00	13.156.212.972,00	(6.692.631.772,00)
<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>76.288.983.970,00</b>	<b>126.808.026.768,00</b>	<b>(50.519.042.798,00)</b>
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	1.153.836.800,00	3.613.511.308,00	(2.459.674.508,00)
Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Land-Rent</i> ) - LO	3.736.490.150,00	3.736.490.150,00	0,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	23.694.297.650,00	34.078.215.233,00	(10.383.917.583,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	784.599.000,00	788.276.289,00	(3.677.289,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	14.361.998.800,00	14.361.998.800,00	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	32.350.422.400,00	70.019.632.607,00	(37.669.210.207,00)
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	185.915.100,00	185.915.100,00	0,00
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau - LO	21.424.070,00	23.987.281,00	(2.563.211,00)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>878.495.803.000,00</b>	<b>878.495.803.000,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Alokasi Umum - LO	878.495.803.000,00	878.495.803.000,00	0,00
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>341.433.329.045,00</b>	<b>341.433.329.045,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DAK Fisik</b>			
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	36.324.886.584,00	36.324.886.584,00	0,00
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO	8.202.199.000,00	8.202.199.000,00	0,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO	23.583.044.000,00	23.583.044.000,00	0,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO	2.501.460.000,00	2.501.460.000,00	0,00
DAK Bidang Kesehatan - LO	31.322.823.826,00	31.322.823.826,00	0,00

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	1.084.739.000,00	1.084.739.000,00	0,00
DAK Bidang Pertanian - LO	664.846.000,00	664.846.000,00	0,00
DAK Bidang Pendidikan - LO	29.126.487.000,00	29.126.487.000,00	0,00
DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah - LO	536.830.257,00	536.830.257,00	0,00
DAK Bidang Transportasi - LO	860.826.500,00	860.826.500,00	0,00
<b>DAK Non Fisik</b>			
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	136.644.343.000,00	136.644.343.000,00	0,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	1.869.075.000,00	1.869.075.000,00	0,00
Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini - LO	11.139.000.000,00	11.139.000.000,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	38.303.653.228,00	38.303.653.228,00	0,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LO	6.131.347.300,00	6.131.347.300,00	0,00
Dana Tunjangan Khusus Guru - LO	7.423.435.000,00	7.423.435.000,00	0,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	2.731.333.350,00	2.731.333.350,00	0,00
Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kedinasan - LO	2.983.000.000,00	2.983.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.338.836.254.815,00</b>	<b>1.404.731.263.673,00</b>	<b>(65.895.008.858,00)</b>

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO dan LRA tahun 2020 sebesar (Rp65.895.008.858,00) merupakan penerimaan atas kurang salur Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tahun sebelumnya sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2020 yang disalurkan melalui KMK Nomor 22/KM.7/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2020.

#### 5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO berupa Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp34.033.249.000. Jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tahun 2019 sebesar Rp35.281.887.000,00 menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp1.248.638.000,00). Jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan LRA maka tidak terdapat perbedaan saldo pada tahun 2020.

#### 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO tahun 2020 yaitu sebesar Rp154.779.751.776,05. Jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO tahun 2019 sebesar Rp150.048.504.017,76 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp4.731.247.758,29 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.26**

**Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>94.597.961.688,01</b>	<b>97.921.828.470,00</b>	<b>(3.323.866.781,99)</b>
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	17.232.166.405,00	16.212.621.585,00	1.019.544.820,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan di atas Air - LO	1.194.036,01	6.887.335,00	(5.693.298,99)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	13.046.612.972,00	18.713.797.401,00	(5.667.184.429,00)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air - LO	11.726,00	230.988,00	(219.262,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	28.951.576.169,00	33.377.164.355,00	(4.425.588.186,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	321.139.461,00	325.649.951,00	(4.510.490,00)
Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	35.045.260.919,00	29.285.476.855,00	5.759.784.064,00
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>60.181.790.088,04</b>	<b>52.126.675.547,76</b>	<b>8.055.114.540,28</b>
Pendapatan Jamsoskes	60.181.790.088,04	52.126.675.547,76	8.055.114.540,28
<b>Jumlah</b>	<b>154.779.751.776,05</b>	<b>150.048.504.017,76</b>	<b>4.731.247.758,29</b>

Perbandingan antara Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp4.867.155.413,56) dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.27**

**Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dan LRA Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>94.597.961.688,01</b>	<b>94.769.169.236,01</b>	<b>(171.207.548,00)</b>
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	17.232.166.405,00	16.918.861.548,00	313.304.857,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan di Atas Air - LO	1.194.036,01	3.581.035,01	(2.386.999,00)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	13.046.612.972,00	13.488.511.246,00	(441.898.274,00)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air - LO	11.726,00	32.514,00	(20.788,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	28.951.576.169,00	28.993.109.766,00	(41.533.597,00)
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	321.139.461,00	319.812.208,00	1.327.253,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	35.045.260.919,00	35.045.260.919,00	0,00
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>60.181.790.088,04</b>	<b>64.877.737.953,60</b>	<b>(4.695.947.865,56)</b>
Pendapatan Jamsoskes	60.181.790.088,04	64.877.737.953,60	(4.695.947.865,56)
<b>Jumlah</b>	<b>154.779.751.776,05</b>	<b>159.646.907.189,61</b>	<b>(4.867.155.413,56)</b>

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dan LRA sebesar Rp4.867.155.413,56 dengan rincian sebagai berikut.

1. Perbedaan atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO dan LRA sebesar Rp313.304.857,00 merupakan pelunasan Piutang DBH tahun lalu sebesar

- (Rp1.371.896.852,00) dan koreksi Piutang Dana Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/BPKAD/2021 sebesar Rp1.685.201.709,00.
2. Perbedaan atas Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan di Atas Air - LO dan LRA sebesar (Rp2.386.999,00) merupakan pelunasan Piutang DBH tahun lalu sebesar (Rp2.424.473,00) dan koreksi Piutang Dana Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/BPKAD/2021 sebesar Rp37.474,00.
  3. Perbedaan atas Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO dan LRA sebesar (Rp441.898.274,00) merupakan pelunasan Piutang DBH tahun lalu sebesar (Rp1.749.131.398,00) dan koreksi Piutang Dana Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/BPKAD/2021 sebesar Rp1.307.233.124,00.
  4. Perbedaan atas Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air - LO dan LRA sebesar (Rp20.788,00) merupakan pelunasan Piutang DBH tahun lalu.
  5. Perbedaan atas Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO dan LRA sebesar (Rp41.533.597,00) merupakan pelunasan Piutang DBH tahun lalu sebesar (Rp2.648.162.091,00) dan koreksi Piutang Dana Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/BPKAD/2021 sebesar Rp2.606.628.494,00.
  6. Perbedaan atas Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO sebesar Rp1.327.253,00 merupakan pelunasan Piutang DBH tahun lalu sebesar (Rp27.165.426,00) dan koreksi Piutang Dana Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/BPKAD/2021 sebesar Rp28.492.679,00.
  7. Perbedaan atas Bantuan Keuangan LO dan LRA sebesar Rp4.695.947.865,56 merupakan pelunasan atas Piutang Jaminan Kesehatan (Jamsoskes) program Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

#### 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO tahun 2020 sebesar Rp234.516.947.774,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp157.112.590.929,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp77.404.356.845,00. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.28**  
**Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2020 dan 2019**  
*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Hibah Uang	126.205.514.955,00	114.029.064.715,00	12.176.450.240,00
Pendapatan Hibah Barang	108.311.432.819,00	43.083.526.214,00	65.227.906.605,00
<b>Jumlah</b>	<b>234.516.947.774,00</b>	<b>157.112.590.929,00</b>	<b>77.404.356.845,00</b>

Perbandingan antara Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO dan LRA tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp188.258.079.381,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.29**  
**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan LRA Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pendapatan Hibah Pemerintah	171.241.020.809,00	126.205.514.955,00	45.035.505.854,00
Pendapatan Hibah Swasta	63.275.926.965,00	0,00	63.275.926.965,00
Pendapatan Dana Desa	0,00	296.569.512.200,00	(296.569.512.200,00)
<b>Jumlah</b>	<b>234.516.947.774,00</b>	<b>422.775.027.155,00</b>	<b>(188.258.079.381,00)</b>

Perbedaan antara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan LRA Tahun 2020 sebesar (Rp188.258.079.381,00) dengan uraian sebagai berikut.

1. Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ke Kecamatan Muara Sugihan dan Kecamatan Tanjung Lago berupa gedung kantor dan perangkat komputer sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/2956/BANGDA senilai Rp2.629.033.000,00.
2. Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa gedung bangunan kantor UPT, jalan, jembatan dan dermaga sesuai dengan Berita Acara Nomor 105/KU.09.05/II/2020 senilai Rp7.300.038.000,00.
3. Hibah dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar IKK Tanjung Kerang, Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang IKK Pangkalan Balai dan Jaringan Induk Kapasitas Kecil di Cinta Manis melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara Nomor 262.1/BA/DC/2020 senilai Rp28.777.025.387,00.
4. Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa *water treatment* dan saluran sekunder sesuai Berita Acara Nomor S.26/KU.09.04/III/2020 senilai Rp663.875.000,00.
5. Hibah dari Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan berupa bus air sesuai dengan Berita Acara Nomor PL.301/15/01/TSDP/V/2020 BAST Hibah Nomor PL/301/15/01/TSDP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 senilai Rp2.644.986.300,00.
6. Hibah dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dinas Perhubungan berupa penerangan jalan umum tenaga surya melalui Berita Acara Nomor 1148.BAST/92.02/SDE/2020 senilai Rp740.628.167,00.
7. Hibah dari Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar sesuai dengan SK Penetapan Nomor 16401/C3/KPA/VI/KP/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp2.255.420.000,00.

8. Hibah dari Desa Karang Sari melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa Tanah seluas satu hektar sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/148/BAST/DPKUKM/2020 senilai Rp24.500.000,00.
9. Hibah dari Perusahaan/Pengembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa fasilitas sosial atau fasilitas umum di Puri Gading Mas 3, *Green Residence* 2, Puri Athena 1 dan 2, dan Griya Gading Pesona 1, 2, 3, 4 sesuai dengan Berita Acara Nomor 1123/BA/PERKIMTAN/XIII/2020 senilai Rp16.673.446.230,00.
10. Hibah dari Perusahaan/Pengembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa fasilitas sosial atau fasilitas umum di Bukit Indah tahap 1, 2, dan 3 sesuai dengan Berita Acara Nomor 1123/BA/PERKIMTAN/XII/2020 senilai Rp6.975.282.343,00.
11. Hibah dari Perusahaan/Pengembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa fasilitas sosial atau fasilitas umum di *Golden Asri* 1, 2, 3 dan *Dream Land* 2, serta fasilitas umum di Perajin *Trade Center* sesuai Berita Acara Nomor 1124/BA/PERKIMTAN/XII/2020 senilai Rp13.888.410.840,00.
12. Hibah dari Perusahaan/Pengembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa fasilitas sosial atau fasilitas umum di *Tara Residence* sesuai dengan Berita Acara Nomor 1125/BA/PERKIMTAN/XII/2020 senilai Rp2.716.621.751,00.
13. Hibah dari Perusahaan/Pengembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa fasilitas sosial atau fasilitas umum di Griya Permata IV sesuai dengan Berita Acara Nomor 1126/BA/PERKIMTAN/XII/2020 senilai Rp2.282.334.550,00.
14. Hibah dari Perusahaan/Pengembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa fasilitas sosial atau fasilitas umum di *Mutiara Regency* sesuai dengan Berita Acara Nomor 1127/BA/PERKIMTAN/XII/2020 senilai Rp1.277.057.468,00.
15. Hibah dari Perusahaan/Pengembang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa fasilitas sosial atau fasilitas umum di *Golden Land Regency* sesuai dengan Berita Acara Nomor 1128/BA/PERKIMTAN/XII/2020 senilai Rp4.299.820.579,00.
16. Pendapatan Dana Desa yang langsung ditransfer pemerintah pusat ke desa melalui KPPN sebesar (Rp296.569.512.200,00) yang bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
17. Hibah masuk pada Kecamatan Tungkal Ilir bersumber dari CSR PEP Aset 1 *Field Ramba* berupa bantuan fasilitas perkantoran komputer untuk kantor Kecamatan Tungkal Ilir senilai Rp14.160.000,00.
18. Hibah masuk pada Dinas Sosial dari pihak luar selama pandemi covid sebesar Rp580.457.500,00.
19. Hibah masuk pada BPBD Kesbangpol dari pihak luar selama pandemi covid sebesar Rp1.423.594.080,00.

20. Penyesuaian tambah atas hibah masuk pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berupa bantuan alat-alat kesehatan selama pandemi covid sebesar Rp77.321.500,00.
21. Hibah masuk pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura berupa bantuan alat-alat pertanian sebesar Rp5.330.617.200,00.
22. Hibah masuk pada DPPKB dan P3A berupa alat/obat kontrasepsi dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.606.426.118,00.
23. Hibah masuk pada Dinas Kesehatan dari pihak luar selama pandemi covid sebesar Rp3.235.900.146,00.
24. Hibah masuk pada RSUD dari pihak luar selama pandemi covid sebesar Rp886.606.660,00.
25. Hibah masuk pada Kecamatan Pulau Rimau dari pihak luar selama pandemi covid sebesar Rp7.470.000,00.
26. Hibah masuk pada Kecamatan Muara Telang dari pihak luar selama pandemi covid sebesar Rp400.000,00.

#### 5.4.2 Beban Daerah

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.920.229.946.124,91. Jika dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp1.932.770.300.722,10 maka terdapat penurunan beban sebesar (Rp12.540.354.597,19) sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.30**  
**Beban per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Pegawai	778.147.469.580,80	801.983.412.593,63	(23.835.943.012,83)
Beban Persediaan	110.760.307.621,44	105.132.645.384,63	5.627.662.236,81
Beban Jasa	325.091.134.991,07	316.897.128.505,21	8.194.006.485,86
Beban Pemeliharaan	48.413.467.036,90	68.436.694.122,12	(20.023.227.085,22)
Beban Perjalanan Dinas	114.909.742.979,00	186.863.590.783,20	(71.953.847.804,20)
Beban Bunga	6.640.021.232,90	1.591.500.000,00	5.048.521.232,90
Beban Hibah	70.937.102.569,23	52.136.415.474,72	18.800.687.094,51
Beban Bantuan Sosial	52.776.764.000,00	156.975.000,00	52.619.789.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	268.658.964.522,20	236.141.402.002,26	32.517.562.519,94
Beban Penyisihan Piutang	10.155.560.674,31	9.753.496.699,77	402.063.974,54
Beban Lain-Lain	13.811.312.675,28	29.072.529.722,95	(15.261.217.047,67)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	118.635.533.355,78	123.328.563.599,61	(4.693.030.243,83)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.292.564.886,00	1.275.946.834,00	16.618.052,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.920.229.946.124,91</b>	<b>1.932.770.300.722,10</b>	<b>(12.540.354.597,19)</b>

##### 5.4.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp778.147.469.580,80. Jika dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2019 sebesar Rp801.983.412.593,63 maka terdapat penurunan Beban Pegawai sebesar (Rp23.835.943.012,83) dengan rincian pada tabel di bawah ini.



**Tabel 5.4.31**  
**Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	506.059.872.004,00	506.275.255.760,00	(215.383.756,00)
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	208.921.029.288,80	209.205.371.916,63	(284.342.627,83)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	17.508.900.000,00	16.904.200.000,00	604.700.000,00
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	79.664.225,00	77.893.188,00	1.771.037,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.701.892.771,00	4.917.784.418,00	(215.891.647,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	77.840.617,00	36.190.042,00	41.650.575,00
Beban Uang Lembur - LO	77.452.000,00	65.256.000,00	12.196.000,00
Belanja Honorarium PNS	20.645.754.875,00	32.480.837.719,00	(11.835.082.844,00)
Belanja Honorarium Non PNS	14.409.225.000,00	28.039.500.000,00	(13.630.275.000,00)
Beban Uang Rapat	48.000.000,00	64.870.000,00	(16.870.000,00)
Beban Pegawai - Dana BOS	5.617.838.800,00	3.916.253.550,00	1.701.585.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>778.147.469.580,80</b>	<b>801.983.412.593,63</b>	<b>(23.835.943.012,83)</b>

Rincian Beban Pegawai per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.32**  
**Beban Pegawai per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	475.980.995.462,00	491.076.109.415,00	(15.095.113.953,00)
Dinas Kesehatan	66.997.346.976,00	68.160.460.360,00	(1.163.113.384,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	11.283.212.881,00	11.115.001.307,00	168.211.574,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.543.376.400,00	4.638.703.602,00	(95.327.202,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	6.575.771.332,00	6.257.570.753,00	318.200.579,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	3.525.487.945,00	3.503.586.479,00	21.901.466,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.937.467.652,00	10.020.670.258,00	(5.083.202.606,00)
Dinas Sosial	3.165.138.865,80	3.376.460.594,00	(211.321.728,20)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.303.351.348,00	3.212.969.233,00	90.382.115,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.784.979.502,00	3.024.445.540,00	(239.466.038,00)
Dinas Lingkungan Hidup	3.905.365.466,00	3.792.059.947,00	113.305.519,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.441.558.310,00	3.131.193.017,00	1.310.365.293,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.576.686.873,00	3.863.688.965,00	(287.002.092,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.317.045.292,00	5.352.553.490,00	(1.035.508.198,00)
Dinas Perhubungan	4.024.893.624,00	4.027.258.926,00	(2.365.302,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.932.074.022,00	3.845.281.321,00	(913.207.299,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha	4.952.814.622,00	5.454.492.651,00	(501.678.029,00)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Kecil dan Menengah			
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.051.092.202,00	622.463.367,00	2.428.628.835,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.357.001.193,00	3.229.946.316,00	127.054.877,00
Dinas Perikanan	3.555.722.379,00	3.526.021.698,00	29.700.681,00
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	18.895.542.324,00	18.976.228.339,00	(80.686.015,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.875.118.863,00	797.493.554,00	3.077.625.309,00
DPRD	26.209.034.004,00	26.532.071.635,00	(323.037.631,00)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	748.153.320,00	878.361.406,00	(130.208.086,00)
Sekretariat Daerah	12.107.105.992,00	13.842.066.847,00	(1.734.960.855,00)
Sekretariat DPRD	6.105.657.930,00	6.242.793.364,00	(137.135.434,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	3.006.177.571,00	3.549.953.346,00	(543.775.775,00)
Kecamatan Banyuasin I	3.884.239.508,00	3.654.716.247,00	229.523.261,00
Kecamatan Banyuasin III	4.602.711.313,00	4.575.932.229,00	26.779.084,00
Kecamatan Betung	2.504.306.322,00	2.429.248.783,00	75.057.539,00
Kecamatan Rantau Bayur	1.625.847.240,00	1.574.997.588,00	50.849.652,00
Kecamatan Pulau Rimau	1.694.502.254,00	1.690.511.146,00	3.991.108,00
Kecamatan Talang Kelapa	11.005.291.209,00	10.112.212.955,00	893.078.254,00
Kecamatan Rambutan	3.171.603.473,00	3.054.072.702,00	117.530.771,00
Kecamatan Tungkal Ilir	1.351.239.158,00	1.357.024.301,00	(5.785.143,00)
Kecamatan Tanjung Lago	1.720.772.516,00	1.662.524.291,00	58.248.225,00
Kecamatan Sembawa	1.459.256.870,00	1.489.169.728,00	(29.912.858,00)
Kecamatan Suak Tapeh	1.492.874.408,00	1.380.590.252,00	112.284.156,00
Kecamatan Banyuasin II	1.213.665.820,00	1.125.714.305,00	87.951.515,00
Kecamatan Makarti Jaya	2.281.551.751,00	2.199.028.701,00	82.523.050,00
Kecamatan Muara Padang	2.154.119.001,00	2.036.713.855,13	117.405.145,87
Kecamatan Muara Sugihan	1.767.964.287,00	1.854.913.776,00	(86.949.489,00)
Kecamatan Muara Telang	1.537.762.252,00	1.611.324.287,00	(73.562.035,00)
Kecamatan Air Salek	1.498.128.416,00	1.508.871.691,50	(10.743.275,50)
Kecamatan Sumber Marga Telang	1.135.594.560,00	1.281.713.058,00	(146.118.498,00)
Kecamatan Air Kumbang	1.483.314.727,00	1.304.714.253,00	178.600.474,00
Kecamatan Selat Penuguan	1.305.949.137,00	1.468.433.525,00	(162.484.388,00)
Kecamatan Karang Agung Ilir	757.757.271,00	666.875.427,00	90.881.844,00
Inspektorat Daerah	4.421.174.159,00	5.533.425.746,00	(1.112.251.587,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.528.952.255,00	6.315.525.932,00	(1.786.573.677,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.775.037.993,00	19.912.296.952,00	(8.137.258.959,00)
Badan Pendapatan Daerah	12.564.389.462,00	5.208.771.530,00	7.355.617.932,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.051.291.868,00	4.924.183.603,00	(1.872.891.735,00)
<b>Jumlah</b>	<b>778.147.469.580,80</b>	<b>801.983.412.593,63</b>	<b>(23.835.943.012,83)</b>

Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp778.157.769.580,80 menunjukkan adanya perbedaan sebesar (Rp10.300.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.33**  
**Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	506.059.872.004,00	506.059.872.004,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	208.921.029.288,80	208.921.029.288,80	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	17.508.900.000,00	17.508.900.000,00	0,00
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	79.664.225,00	79.664.225,00	0,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.701.892.771,00	4.701.892.771,00	0,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	77.840.617,00	77.840.617,00	0,00
Beban Uang Lembur - LO	77.452.000,00	77.452.000,00	0,00
Belanja Honorarium PNS	20.645.754.875,00	20.656.054.875,00	(10.300.000,00)
Belanja Honorarium Non PNS	14.409.225.000,00	14.409.225.000,00	0,00
Beban Uang Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
Beban Pegawai - BOS	5.617.838.800,00	5.617.838.800,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>778.147.469.580,80</b>	<b>778.157.769.580,80</b>	<b>(10.300.000,00)</b>

Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai tahun 2020 sebesar Rp10.300.000,00 merupakan penyesuaian atas kapitalisasi Beban Honorarium tim pengadaan pada Dinas Perikanan sebesar (Rp1.000.000,00) dan kapitalisasi atas honorarium tim panitia pengadaan tanah yang dianggarkan pada Belanja Modal Tanah di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar (Rp9.300.000,00).

Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per SKPD tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.34**  
**Beban dan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	475.980.995.462,00	475.980.995.462,00	0,00
Dinas Kesehatan	66.997.346.976,00	66.997.346.976,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	11.283.212.881,00	11.283.212.881,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.543.376.400,00	4.543.376.400,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.575.771.332,00	6.585.071.332,00	(9.300.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	3.525.487.945,00	3.525.487.945,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.937.467.652,00	4.937.467.652,00	0,00
Dinas Sosial	3.165.138.865,80	3.165.138.865,80	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.303.351.348,00	3.303.351.348,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.784.979.502,00	2.784.979.502,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.905.365.466,00	3.905.365.466,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.441.558.310,00	4.441.558.310,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	3.576.686.873,00	3.576.686.873,00	0,00

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Desa			
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.317.045.292,00	4.317.045.292,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.024.893.624,00	4.024.893.624,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.932.074.022,00	2.932.074.022,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.952.814.622,00	4.952.814.622,00	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.051.092.202,00	3.051.092.202,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.357.001.193,00	3.357.001.193,00	0,00
Dinas Perikanan	3.555.722.379,00	3.556.722.379,00	(1.000.000,00)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	18.895.542.324,00	18.895.542.324,00	0,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.875.118.863,00	3.875.118.863,00	0,00
DPRD	26.209.034.004,00	26.209.034.004,00	0,00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	748.153.320,00	748.153.320,00	0,00
Sekretariat Daerah	12.107.105.992,00	12.107.105.992,00	0,00
Sekretariat DPRD	6.105.657.930,00	6.105.657.930,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	3.006.177.571,00	3.006.177.571,00	0,00
Kecamatan Banyuasin I	3.884.239.508,00	3.884.239.508,00	0,00
Kecamatan Banyuasin III	4.602.711.313,00	4.602.711.313,00	0,00
Kecamatan Betung	2.504.306.322,00	2.504.306.322,00	0,00
Kecamatan Rantau Bayur	1.625.847.240,00	1.625.847.240,00	0,00
Kecamatan Pulau Rimau	1.694.502.254,00	1.694.502.254,00	0,00
Kecamatan Talang Kelapa	11.005.291.209,00	11.005.291.209,00	0,00
Kecamatan Rambutan	3.171.603.473,00	3.171.603.473,00	0,00
Kecamatan Tungal Ilir	1.351.239.158,00	1.351.239.158,00	0,00
Kecamatan Tanjung Lago	1.720.772.516,00	1.720.772.516,00	0,00
Kecamatan Sembawa	1.459.256.870,00	1.459.256.870,00	0,00
Kecamatan Suak Tapeh	1.492.874.408,00	1.492.874.408,00	0,00
Kecamatan Banyuasin II	1.213.665.820,00	1.213.665.820,00	0,00
Kecamatan Makarti Jaya	2.281.551.751,00	2.281.551.751,00	0,00
Kecamatan Muara Padang	2.154.119.001,00	2.154.119.001,00	0,00
Kecamatan Muara Sugihan	1.767.964.287,00	1.767.964.287,00	0,00
Kecamatan Muara Telang	1.537.762.252,00	1.537.762.252,00	0,00
Kecamatan Air Salek	1.498.128.416,00	1.498.128.416,00	0,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	1.135.594.560,00	1.135.594.560,00	0,00
Kecamatan Air Kumbang	1.483.314.727,00	1.483.314.727,00	0,00
Kecamatan Selat Penuguan	1.305.949.137,00	1.305.949.137,00	0,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	757.757.271,00	757.757.271,00	0,00
Inspektorat Daerah	4.421.174.159,00	4.421.174.159,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.528.952.255,00	4.528.952.255,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.775.037.993,00	11.775.037.993,00	0,00

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Badan Pendapatan Daerah	12.564.389.462,00	12.564.389.462,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.051.291.868,00	3.051.291.868,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>778.147.469.580,80</b>	<b>778.157.769.580,80</b>	<b>(10.300.000,00)</b>

#### 5.4.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp110.760.307.621,44. Jika dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2019 sebesar Rp105.132.645.384,63 maka terdapat peningkatan Beban Persediaan sebesar Rp5.627.662.236,81. Perbandingan Beban Persediaan tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan dijelaskan dalam **Lampiran 14**.

**Tabel 5.4.35**  
**Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	15.747.392.035,00	17.742.841.158,00	(1.995.449.123,00)
Beban Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	13.804.000,00	(13.804.000,00)
Beban Persediaan Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.219.908.243,00	2.427.221.488,00	(207.313.245,00)
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	699.559.899,00	882.889.891,00	(183.329.992,00)
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.577.391.243,00	3.751.806.551,00	825.584.692,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.665.692.912,00	3.130.001.409,00	(464.308.497,00)
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	27.779.200,00	30.031.000,00	(2.251.800,00)
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	143.165.083,00	365.096.900,00	(221.931.817,00)
Beban Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	0,00	0,00	0,00
Beban Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan lainnya	30.941.085.179,71	24.784.412.104,98	6.156.673.074,73
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	4.779.715.302,00	3.450.392.682,00	1.329.322.620,00
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	296.642.672,00	189.395.000,00	107.247.672,00
Beban Persediaan Bibit Ternak	122.900.000,00	89.719.000,00	33.181.000,00
Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan	11.328.005.813,80	11.571.506.554,80	(243.500.741,00)
Beban Persediaan Bahan Kimia	627.473.500,00	477.375.950,00	150.097.550,00
Beban Persediaan Makanan Pokok	9.906.532.374,93	833.148.688,85	9.073.383.686,08
Beban Hadiah	782.897.600,00	1.567.086.219,00	(784.188.619,00)
Beban Bahan Percontohan	1.330.428.500,00	1.061.394.777,00	269.033.723,00
Beban Persediaan BLUD	0,00	0,00	0,00
Beban Cetak	10.717.775.518,00	12.927.183.743,00	(2.209.408.225,00)
Beban Penggandaan	7.501.999.464,00	10.078.447.382,00	(2.576.447.918,00)
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	800.200.000,00	899.540.000,00	(99.340.000,00)
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	331.793.000,00	758.816.000,00	(427.023.000,00)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.918.300,00	273.345.000,00	(234.426.700,00)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	632.313.125,00	2.152.077.500,00	(1.519.764.375,00)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.000.000,00	7.200.000,00	(1.200.000,00)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	224.741.500,00	569.816.000,00	(345.074.500,00)
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.200.000,00	412.264.250,00	(393.064.250,00)
Beban Pakaian Kerja Lapangan	1.825.769.500,00	1.722.809.000,00	102.960.500,00
Beban Tas Kerja	7.350.000,00	20.815.000,00	(13.465.000,00)
Beban Pakaian KORPRI	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	421.500.000,00	253.710.000,00	167.790.000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	1.163.279.657,00	1.085.189.995,00	78.089.662,00
Beban Pakaian Olahraga	830.118.000,00	1.419.359.141,00	(589.241.141,00)
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	68.300.000,00	(68.300.000,00)
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	42.780.000,00	17.350.000,00	25.430.000,00
Beban Barang/Jasa yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	0,00	71.299.000,00	(71.299.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>110.760.307.621,44</b>	<b>105.132.645.384,63</b>	<b>5.627.662.236,81</b>

Perbandingan Beban Persediaan per masing-masing SKPD tahun 2020 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

**Tabel 5.4.36**  
**Beban Persediaan per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.253.425.992,00	34.410.080.500,00	(7.156.654.508,00)
Dinas Kesehatan	20.924.638.150,68	14.682.733.511,94	6.241.904.638,74
Rumah Sakit Umum Daerah	11.601.056.174,76	8.890.330.076,19	2.710.726.098,57
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	882.451.800,00	1.273.358.250,00	(390.906.450,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	545.156.070,00	1.078.422.220,00	(533.266.150,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.622.311.302,50	645.298.510,50	1.977.012.792,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	217.572.500,00	929.486.828,00	(711.914.328,00)
Dinas Sosial	10.883.673.912,50	706.288.300,00	10.177.385.612,50
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	497.880.300,00	445.429.350,00	52.450.950,00
Dinas Ketahanan Pangan	696.879.839,00	993.105.300,00	(296.225.461,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.892.980.300,00	2.400.029.510,00	(507.049.210,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.501.904.336,00	2.594.086.030,00	(92.181.694,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	789.836.000,00	1.339.278.200,00	(549.442.200,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.069.424.876,00	3.250.175.795,00	1.819.249.081,00
Dinas Perhubungan	1.090.365.275,00	626.346.300,00	464.018.975,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	875.808.624,00	932.013.651,00	(56.205.027,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	979.010.156,00	1.110.110.350,00	(131.100.194,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.026.562.600,00	1.003.719.500,00	22.843.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	699.898.300,00	1.140.101.400,00	(440.203.100,00)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Perikanan	469.938.100,00	531.035.650,00	(61.097.550,00)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.052.514.800,00	1.211.894.745,00	(159.379.945,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	420.730.950,00	333.060.850,00	87.670.100,00
Sekretariat Daerah	6.705.243.967,00	8.165.505.292,00	(1.460.261.325,00)
Sekretariat DPRD	4.344.265.349,00	6.603.637.548,00	(2.259.372.199,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	372.403.150,00	674.797.950,00	(302.394.800,00)
Kecamatan Banyuasin I	705.895.981,00	222.145.200,00	483.750.781,00
Kecamatan Banyuasin III	344.132.500,00	509.675.128,00	(165.542.628,00)
Kecamatan Betung	278.817.037,00	181.626.075,00	97.190.962,00
Kecamatan Rantau Bayur	89.446.600,00	94.295.000,00	(4.848.400,00)
Kecamatan Pulau Rimau	67.429.950,00	124.841.500,00	(57.411.550,00)
Kecamatan Talang Kelapa	140.698.900,00	246.525.000,00	(105.826.100,00)
Kecamatan Rambutan	47.721.000,00	131.580.000,00	(83.859.000,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	109.410.000,00	81.750.000,00	27.660.000,00
Kecamatan Tanjung Lago	42.713.000,00	66.593.000,00	(23.880.000,00)
Kecamatan Sembawa	101.026.281,00	160.785.100,00	(59.758.819,00)
Kecamatan Suak Tapeh	98.797.950,00	63.558.525,00	35.239.425,00
Kecamatan Banyuasin II	111.700.000,00	84.092.945,00	27.607.055,00
Kecamatan Makarti Jaya	147.562.800,00	125.291.319,00	22.271.481,00
Kecamatan Muara Padang	86.109.750,00	104.290.000,00	(18.180.250,00)
Kecamatan Muara Sugihan	64.755.280,00	131.930.000,00	(67.174.720,00)
Kecamatan Muara Telang	57.030.700,00	85.439.500,00	(28.408.800,00)
Kecamatan Air Salek	149.376.500,00	86.134.650,00	63.241.850,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	78.885.350,00	53.884.650,00	25.000.700,00
Kecamatan Air Kumbang	51.327.000,00	80.845.500,00	(29.518.500,00)
Kecamatan Selat Penuguan	55.673.000,00	107.101.000,00	(51.428.000,00)
Kecamatan Karang Agung Ilir	75.672.000,00	59.589.000,00	16.083.000,00
Inspektorat Daerah	354.121.170,00	627.862.232,00	(273.741.062,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	691.193.050,00	1.530.672.174,00	(839.479.124,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.213.096.362,00	2.286.335.467,00	(1.073.239.105,00)
Badan Pendapatan Daerah	703.427.245,00	929.837.733,00	(226.410.488,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	478.355.391,00	985.639.069,00	(507.283.678,00)
<b>Jumlah</b>	<b>110.760.307.621,44</b>	<b>105.132.645.384,63</b>	<b>5.627.662.236,81</b>

Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan tahun 2020 per rekening dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.37**  
**Beban dan Belanja Persediaan per Rekening Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Kenaikan/ Penurunan
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	15.747.392.035,00	10.637.690.960,00	5.109.701.075,00
Beban Persediaan Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.219.908.243,00	1.822.410.546,00	397.497.697,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	699.559.899,00	256.768.700,00	442.791.199,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.577.391.243,00	2.417.312.322,00	2.160.078.921,00

Uraian	LO	LRA	Kenaikan/ Penurunan
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.665.692.912,00	2.418.540.648,00	247.152.264,00
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	27.779.200,00	27.779.200,00	0,00
Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	143.165.083,00	82.633.000,00	60.532.083,00
Beban Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	0,00	5.598.211.682,00	(5.598.211.682,00)
Beban Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	30.941.085.179,71	3.485.436.586,00	27.455.648.593,71
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	4.779.715.302,00	897.335.250,00	3.882.380.052,00
Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	296.642.672,00	190.422.400,00	106.220.272,00
Beban Persediaan Bibit Ternak	122.900.000,00	118.625.000,00	4.275.000,00
Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan	11.328.005.813,80	8.172.577.629,52	3.155.428.184,28
Beban Persediaan Bahan Kimia	627.473.500,00	454.008.400,00	173.465.100,00
Beban Persediaan Makanan Pokok	9.906.532.374,93	538.071.300,00	9.368.461.074,93
Beban Hadiah	782.897.600,00	514.694.200,00	268.203.400,00
Beban Bahan Percontohan	1.330.428.500,00	1.281.709.500,00	48.719.000,00
Beban Persediaan BLUD	0,00	8.345.132.442,30	(8.345.132.442,30)
Beban Cetak	10.717.775.518,00	8.814.272.825,00	1.903.502.693,00
Beban Penggandaan	7.501.999.464,00	4.085.997.254,00	3.416.002.210,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	800.200.000,00	800.200.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	331.793.000,00	331.793.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.918.300,00	38.918.300,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	632.313.125,00	632.313.125,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	224.741.500,00	224.741.500,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
Beban Pakaian Kerja lapangan	1.825.769.500,00	1.793.969.500,00	31.800.000,00
Beban Tas Kerja	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	421.500.000,00	421.500.000,00	0,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	1.163.279.657,00	1.163.279.657,00	0,00
Beban Pakaian Olahraga	830.118.000,00	823.548.000,00	6.570.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	42.780.000,00	42.780.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa Dana BOS - LO	0,00	90.281.720.036,00	(90.281.720.036,00)
<b>Jumlah</b>	<b>110.760.307.621,44</b>	<b>156.746.942.962,82</b>	<b>(45.986.635.341,38)</b>

Perbandingan antara Beban Persediaan dan Belanja Persediaan tahun 2020 per masing-masing SKPD disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.4.38**  
**Beban dan Belanja Persediaan per SKPD s.d 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.253.425.992,00	94.464.439.236,00	(67.211.013.244,00)
Dinas Kesehatan	20.924.638.150,68	12.720.957.939,80	8.203.680.210,88
Rumah Sakit Umum Daerah	11.601.056.174,76	9.471.146.849,02	2.129.909.325,74
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	882.451.800,00	705.536.300,00	176.915.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	545.156.070,00	480.960.700,00	64.195.370,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.622.311.302,50	881.318.350,00	1.740.992.952,50



Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	217.572.500,00	253.747.000,00	(36.174.500,00)
Dinas Sosial	10.883.673.912,50	910.445.900,00	9.973.228.012,50
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	497.880.300,00	432.634.900,00	65.245.400,00
Dinas Ketahanan Pangan	696.879.839,00	717.979.839,00	(21.100.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	1.892.980.300,00	1.877.173.300,00	15.807.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.501.904.336,00	2.880.742.690,00	(378.838.354,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	789.836.000,00	831.756.000,00	(41.920.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.069.424.876,00	1.434.378.817,00	3.635.046.059,00
Dinas Perhubungan	1.090.365.275,00	1.110.896.875,00	(20.531.600,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	875.808.624,00	3.537.408.624,00	(2.661.600.000,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	979.010.156,00	1.074.214.706,00	(95.204.550,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.026.562.600,00	1.244.053.900,00	(217.491.300,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	699.898.300,00	784.812.300,00	(84.914.000,00)
Dinas Perikanan	469.938.100,00	472.322.950,00	(2.384.850,00)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.052.514.800,00	890.867.900,00	161.646.900,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	420.730.950,00	431.999.600,00	(11.268.650,00)
Sekretariat Daerah	6.705.243.967,00	6.791.167.917,00	(85.923.950,00)
Sekretariat DPRD	4.344.265.349,00	5.262.675.575,00	(918.410.226,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	372.403.150,00	393.022.800,00	(20.619.650,00)
Kecamatan Banyuasin I	705.895.981,00	709.841.981,00	(3.946.000,00)
Kecamatan Banyuasin III	344.132.500,00	393.401.000,00	(49.268.500,00)
Kecamatan Betung	278.817.037,00	283.385.037,00	(4.568.000,00)
Kecamatan Rantau Bayur	89.446.600,00	94.685.600,00	(5.239.000,00)
Kecamatan Pulau Rimau	67.429.950,00	59.911.200,00	7.518.750,00
Kecamatan Talang Kelapa	140.698.900,00	169.537.900,00	(28.839.000,00)
Kecamatan Rambutan	47.721.000,00	52.721.000,00	(5.000.000,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	109.410.000,00	110.728.500,00	(1.318.500,00)
Kecamatan Tanjung Lago	42.713.000,00	42.713.000,00	0,00
Kecamatan Sembawa	101.026.281,00	99.734.000,00	1.292.281,00
Kecamatan Suak Tapeh	98.797.950,00	101.109.450,00	(2.311.500,00)
Kecamatan Banyuasin II	111.700.000,00	115.700.000,00	(4.000.000,00)
Kecamatan Makarti Jaya	147.562.800,00	111.866.800,00	35.696.000,00
Kecamatan Muara Padang	86.109.750,00	91.985.000,00	(5.875.250,00)
Kecamatan Muara Sugihan	64.755.280,00	64.755.280,00	0,00
Kecamatan Muara Telang	57.030.700,00	55.920.200,00	1.110.500,00
Kecamatan Air Salek	149.376.500,00	152.626.500,00	(3.250.000,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	78.885.350,00	81.885.000,00	(2.999.650,00)
Kecamatan Air Kumbang	51.327.000,00	51.530.000,00	(203.000,00)
Kecamatan Selat Penuguan	55.673.000,00	59.673.000,00	(4.000.000,00)
Kecamatan Karang Agung Ilir	75.672.000,00	78.172.000,00	(2.500.000,00)
Inspektorat Daerah	354.121.170,00	354.860.420,00	(739.250,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	691.193.050,00	777.914.950,00	(86.721.900,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.213.096.362,00	1.247.731.559,00	(34.635.197,00)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Daerah			
Badan Pendapatan Daerah	703.427.245,00	803.458.727,00	(100.031.482,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	478.355.391,00	524.433.891,00	(46.078.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>110.760.307.621,44</b>	<b>156.746.942.962,82</b>	<b>(45.986.635.341,38)</b>

Perbedaan antara Beban Persediaan dan Belanja Persediaan tahun 2020 sebesar Rp45.986.635.341,38 dijelaskan dalam **Lampiran 15**.

#### 5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp325.091.134.991,07. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp316.897.128.505,21 maka terdapat kenaikan Beban Jasa sebesar Rp8.194.006.485,86 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.39**  
**Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Jasa Telepon	847.291.971,00	718.065.134,00	129.226.837,00
Beban Jasa Air	1.999.211.004,00	1.767.857.431,00	231.353.573,00
Beban Jasa Listrik	23.155.532.875,00	21.695.439.552,00	1.460.093.323,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.683.336.250,00	9.962.629.084,00	(8.279.292.834,00)
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	7.419.269.876,00	5.202.291.576,00	2.216.978.300,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	109.459.220,00	58.352.500,00	51.106.720,00
Beban Jasa Sertifikasi	42.623.800,00	55.866.680,00	(13.242.880,00)
Beban Jasa Transaksi Keuangan	312.756.873,00	392.513.500,00	(79.756.627,00)
Beban Penyediaan Jasa Iuran FKDPM	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
Beban Jasa Administrasi Pendamping Kegiatan	988.000.000,00	1.344.136.009,00	(356.136.009,00)
Beban Jasa Umum Laboratorium Migas	0,00	6.177.600,00	(6.177.600,00)
Beban Jasa Izin Pemasangan	51.860.516,00	159.452.000,00	(107.591.484,00)
Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan	2.304.133.700,00	4.442.958.150,00	(2.138.824.450,00)
Beban Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	9.920.088.400,00	5.416.686.500,00	4.503.401.900,00
Beban Jasa Pengurusan Perizinan	26.870.926,00	5.082.576,00	21.788.350,00
Beban Jasa Kebersihan	10.307.317.698,00	8.344.135.229,00	1.963.182.469,00
Beban Jasa Keamanan	7.162.485.200,00	5.562.327.500,00	1.600.157.700,00
Beban Jasa Operator	13.456.324.000,00	11.671.518.500,00	1.784.805.500,00
Beban Jasa Pelayanan SKPD	119.417.790.207,00	102.042.805.415,00	17.374.984.792,00
Beban Jasa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ Desa	3.243.000.000,00	3.243.000.000,00	0,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	11.498.265.450,00	15.533.232.572,00	(4.034.967.122,00)
Beban Jasa BLUD	11.739.249.133,75	0,00	11.739.249.133,75
Beban Jasa Lainnya	1.090.849.500,00	0,00	1.090.849.500,00
Beban Jasa Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	6.143.069.632,00	541.182.550,00	5.601.887.082,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	50.331.352.872,00	45.908.740.741,80	4.422.612.130,20
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	41.669.706,75	446.731.324,58	(405.061.617,83)
Beban Premi Asuransi Kematian	744.172.888,00	940.050.719,00	(195.877.831,00)
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	226.437.392,00	214.723.009,00	11.714.383,00
Beban Premi Asuransi Kendaraan	1.428.431.778,37	1.571.401.380,83	(142.969.602,46)
Beban Medical <i>Check Up</i> DPRD	45.152.000,00	56.779.000,00	(11.627.000,00)
Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	2.953.454.000,00	7.916.216.100,00	(4.962.762.100,00)
Beban Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	404.523.500,00	1.037.114.072,00	(632.590.572,00)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	597.610.000,00	2.343.065.000,00	(1.745.455.000,00)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	794.400.000,00	1.907.468.571,00	(1.113.068.571,00)
Beban Sewa Alat Berat Lainnya	28.800.000,00	0,00	28.800.000,00
Beban Sewa Meja Kursi	194.300.000,00	382.453.000,00	(188.153.000,00)
Beban Sewa Komputer dan Printer	6.000.000,00	40.125.000,00	(34.125.000,00)
Beban Sewa Proyektor	4.000.000,00	20.430.000,00	(16.430.000,00)
Beban Sewa Generator	78.950.000,00	161.850.000,00	(82.900.000,00)
Beban Sewa Tenda	407.647.000,00	984.645.000,00	(576.998.000,00)
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.100.000,00	67.100.000,00	(56.000.000,00)
Beban Sewa Audio Video	339.100.000,00	628.110.000,00	(289.010.000,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya	1.517.417.292,00	2.867.621.056,00	(1.350.203.764,00)
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.079.873.874,00	2.424.030.750,00	(344.156.876,00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.318.376.312,20	12.169.314.898,00	(2.850.938.585,80)
Beban Makanan dan Minuman Tamu	5.362.146.172,00	7.510.820.700,00	(2.148.674.528,00)
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	1.749.004.910,00	5.367.465.475,00	(3.618.460.565,00)
Beban Snack Rapat	1.495.090.200,00	2.342.314.900,00	(847.224.700,00)
Beban Snack Kegiatan	2.323.256.020,00	4.872.918.150,00	(2.549.662.130,00)
Beban Snack Tamu	1.668.825.174,00	1.416.681.000,00	252.144.174,00
Beban Makanan dan Minuman Kompetisi/ Pentas/ Pameran	289.165.500,00	697.566.500,00	(408.401.000,00)
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	122.200.000,00	243.494.800,00	(121.294.800,00)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	1.221.009.570,00	4.110.211.960,00	(2.889.202.390,00)
Beban Jasa Konsultansi	1.403.775.000,00	677.140.000,00	726.635.000,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Pengawasan			
Beban Jasa Konsultasi Lainnya	386.876.600,00	374.272.000,00	12.604.600,00
Beban Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	2.208.018.000,00	5.171.282.268,00	(2.963.264.268,00)
Beban Sosialisasi	30.960.000,00	579.341.500,00	(548.381.500,00)
Beban Bimbingan Teknis	1.960.987.998,00	2.957.156.572,00	(996.168.574,00)
Beban Pengiriman Peserta PIM II	151.305.000,00	90.783.000,00	60.522.000,00
Beban Pengiriman Peserta PIM III	246.960.000,00	220.000.000,00	26.960.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>325.091.134.991,07</b>	<b>316.897.128.505,21</b>	<b>8.194.006.485,86</b>

Perbandingan Beban Jasa per masing-masing SKPD tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

**Tabel 5.4.40**  
**Beban Jasa per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66.437.369.627,26	60.341.542.779,00	6.095.826.848,26
Dinas Kesehatan	105.600.194.912,63	95.758.907.238,50	9.841.287.674,13
Rumah Sakit Umum Daerah	17.584.270.416,75	12.438.261.483,67	5.146.008.933,08
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.681.374.037,00	15.153.803.021,00	(10.472.428.984,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.177.068.993,50	4.091.035.333,16	86.033.660,34
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.173.788.772,31	4.117.213.451,00	(1.943.424.678,69)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.055.782.499,34	4.111.675.310,00	4.944.107.189,34
Dinas Sosial	2.152.778.983,51	2.131.890.550,25	20.888.433,26
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.809.155.598,00	1.474.245.945,34	334.909.652,66
Dinas Ketahanan Pangan	552.758.336,00	873.175.958,00	(320.417.622,00)
Dinas Lingkungan Hidup	4.530.521.767,14	4.684.197.553,83	(153.675.786,69)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.929.788.999,50	1.944.291.199,00	(14.502.199,50)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.978.471.038,00	4.692.985.224,67	(2.714.514.186,67)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.853.307.939,50	3.672.078.763,00	(818.770.823,50)
Dinas Perhubungan	17.110.061.872,75	7.121.745.399,33	9.988.316.473,42
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.641.240.458,00	9.563.954.139,67	(922.713.681,67)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.979.150.051,67	3.622.522.781,41	(643.372.729,74)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.160.370.381,67	1.706.891.907,00	1.453.478.474,67
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.440.255.973,17	1.654.429.374,00	(214.173.400,83)
Dinas Perikanan	1.041.010.309,67	1.517.340.790,91	(476.330.481,24)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.952.110.352,33	2.803.490.045,67	(851.379.693,34)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.072.827.331,00	417.904.467,00	654.922.864,00
Sekretariat Daerah	26.594.125.292,75	30.440.806.660,33	(3.846.681.367,58)
Sekretariat DPRD	11.077.217.114,33	11.823.450.279,00	(746.233.164,67)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1.346.594.324,00	1.065.960.702,33	280.633.621,67
Kecamatan Banyuasin I	580.902.515,00	742.984.452,00	(162.081.937,00)
Kecamatan Banyuasin III	1.560.994.687,00	1.683.388.365,00	(122.393.678,00)
Kecamatan Betung	917.348.335,00	1.164.575.293,00	(247.226.958,00)
Kecamatan Rantau Bayur	284.280.594,00	460.724.861,00	(176.444.267,00)
Kecamatan Pulau Rimau	238.530.546,00	349.917.868,00	(111.387.322,00)
Kecamatan Talang Kelapa	2.672.890.883,34	3.031.030.874,33	(358.139.990,99)
Kecamatan Rambutan	312.856.035,00	449.932.765,00	(137.076.730,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	393.939.926,00	348.834.147,00	45.105.779,00
Kecamatan Tanjung Lago	242.403.500,00	290.502.424,99	(48.098.924,99)
Kecamatan Sembawa	274.049.656,50	300.950.503,50	(26.900.847,00)
Kecamatan Suak Tapeh	316.372.768,00	295.351.749,00	21.021.019,00
Kecamatan Banyuasin II	286.310.712,00	300.670.559,00	(14.359.847,00)
Kecamatan Makarti Jaya	538.015.026,00	525.966.862,83	12.048.163,17
Kecamatan Muara Padang	181.643.076,00	213.813.624,00	(32.170.548,00)
Kecamatan Muara Sugihan	264.748.044,00	304.282.765,00	(39.534.721,00)
Kecamatan Muara Telang	285.558.101,00	353.482.598,00	(67.924.497,00)
Kecamatan Air Salek	240.768.328,00	320.293.579,00	(79.525.251,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	264.257.540,34	231.675.099,66	32.582.440,68
Kecamatan Air Kumbang	334.340.760,00	344.280.872,00	(9.940.112,00)
Kecamatan Selat Penuguan	251.054.142,00	222.805.399,00	28.248.743,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	237.709.544,00	190.311.103,00	47.398.441,00
Inspektorat Daerah	844.244.527,00	1.247.064.818,50	(402.820.291,50)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.276.907.972,20	4.238.483.207,50	(961.575.235,30)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.933.758.765,42	3.896.121.206,33	(962.362.440,91)
Badan Pendapatan Daerah	2.654.656.943,99	1.458.185.857,00	1.196.471.086,99
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.770.996.681,50	6.707.697.294,50	(3.936.700.613,00)
<b>Jumlah</b>	<b>325.091.134.991,07</b>	<b>316.897.128.505,21</b>	<b>8.194.006.485,86</b>

Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp63.477.904.714,87 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.41**  
**Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Kenaikan/ Penurunan
Beban Jasa Telepon	847.291.971,00	697.547.013,00	149.744.958,00
Beban Jasa Air	1.999.211.004,00	1.823.483.885,00	175.727.119,00
Beban Jasa Listrik	23.155.532.875,00	22.345.506.212,00	810.026.663,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.683.336.250,00	1.350.349.250,00	332.987.000,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	7.419.269.876,00	4.671.512.189,00	2.747.757.687,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	109.459.220,00	109.459.220,00	0,00
Beban Jasa Sertifikasi	42.623.800,00	42.623.800,00	0,00
Beban Jasa Transaksi Keuangan	312.756.873,00	312.756.873,00	0,00
Beban Jasa Administrasi Pendamping Kegiatan	988.000.000,00	988.000.000,00	0,00
Beban Jasa Izin Pemasangan	51.860.516,00	51.860.516,00	0,00
Beban Jasa Perencanaan dan	2.304.133.700,00	2.304.133.700,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Kenaikan/ Penurunan
Pengawasan			
Beban Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan	9.920.088.400,00	1.257.557.000,00	8.662.531.400,00
Beban Jasa Pengurusan Perizinan	26.870.926,00	26.870.926,00	0,00
Beban Jasa Kebersihan	10.307.317.698,00	9.170.658.848,00	1.136.658.850,00
Beban Jasa Keamanan	7.162.485.200,00	4.609.700.000,00	2.552.785.200,00
Beban Jasa Operator	13.456.324.000,00	10.431.700.000,00	3.024.624.000,00
Beban Jasa Pelayanan SKPD	119.417.790.207,00	92.289.750.871,00	27.128.039.336,00
Beban Jasa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/ Desa	3.243.000.000,00	3.243.000.000,00	0,00
Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	11.498.265.450,00	8.443.123.600,00	3.055.141.850,00
Beban Jasa BLUD	11.739.249.133,75	11.781.489.787,00	(42.240.653,25)
Beban Jasa Lainnya	1.090.849.500,00	753.194.500,00	337.655.000,00
Beban Jasa Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	6.143.069.632,00	0,00	6.143.069.632,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	50.331.352.872,00	47.850.225.355,00	2.481.127.517,00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	41.669.706,75	25.025.000,00	16.644.706,75
Beban Premi Asuransi Kematian	744.172.888,00	744.172.888,00	0,00
Beban Premi Asuransi Kecelakaan	226.437.392,00	226.437.392,00	0,00
Beban Premi Asuransi Kendaraan	1.428.431.778,37	844.744.665,00	583.687.113,37
Beban Medical Check Up DPRD	45.152.000,00	45.152.000,00	0,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.953.454.000,00	2.953.454.000,00	0,00
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	404.523.500,00	404.523.500,00	0,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	597.610.000,00	364.730.000,00	232.880.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	794.400.000,00	792.000.000,00	2.400.000,00
Beban Sewa Alat Berat Lainnya	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
Beban Sewa Meja Kursi	194.300.000,00	191.300.000,00	3.000.000,00
Beban Sewa Komputer dan Printer	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Beban Sewa Proyektor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Beban Sewa Generator	78.950.000,00	78.250.000,00	700.000,00
Beban Sewa Tenda	407.647.000,00	407.647.000,00	0,00
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.100.000,00	9.000.000,00	2.100.000,00
Beban Sewa Audio Video	339.100.000,00	339.100.000,00	0,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya	1.517.417.292,00	1.490.585.292,00	26.832.000,00
Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.079.873.874,00	769.893.198,00	1.309.980.676,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	9.318.376.312,20	8.365.335.312,20	953.041.000,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	5.362.146.172,00	5.343.187.172,00	18.959.000,00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	1.749.004.910,00	1.061.191.500,00	687.813.410,00
Beban Snack Rapat	1.495.090.200,00	1.207.064.200,00	288.026.000,00
Beban Snack Kegiatan	2.323.256.020,00	1.681.812.270,00	641.443.750,00
Beban Snack Tamu	1.668.825.174,00	1.666.575.174,00	2.250.000,00
Beban Makanan dan Minuman Kompetisi/Pentas/Pameran	289.165.500,00	269.227.000,00	19.938.500,00
Beban Jasa Konsultasi Penelitian	122.200.000,00	122.200.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	1.221.009.570,00	1.679.769.570,00	(458.760.000,00)
Beban Jasa Konsultasi Pengawasan	1.403.775.000,00	1.403.775.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultasi Lainnya	386.876.600,00	386.876.600,00	0,00
Beban Kursus-Kursus Singkat/	2.208.018.000,00	1.955.138.000,00	252.880.000,00

Uraian	Beban	Belanja	Kenaikan/ Penurunan
Pelatihan			
Beban Sosialisasi	30.960.000,00	15.145.000,00	15.815.000,00
Beban Bimbingan Teknis	1.960.987.998,00	1.784.349.998,00	176.638.000,00
Beban Pengiriman Peserta PIM II	151.305.000,00	151.305.000,00	0,00
Beban Pengiriman Peserta PIM III	246.960.000,00	246.960.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>325.091.134.991,07</b>	<b>261.613.230.276,20</b>	<b>63.477.904.714,87</b>

Perbedaan Beban Jasa dan Belanja Jasa sebesar Rp63.477.904.714,87 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Telepon sebesar Rp149.744.958,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan biaya telepon untuk operasional sekolah.
2. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Air sebesar Rp175.727.119,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan pemanfaatan air untuk operasional sekolah.
3. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Listrik sebesar Rp810.026.663,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan pemanfaatan listrik untuk operasional sekolah.
4. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah sebesar Rp332.987.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan biaya surat kabar/majalah.
5. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet sebesar Rp2.747.757.687,00 terdiri dari penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan langganan internet untuk operasional sekolah sebesar Rp2.750.747.687,00 dan reklasifikasi atas pengadaan faksimili di Dinas Ketahanan Pangan yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar (Rp2.990.000,00).
6. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan sebesar Rp8.662.531.400,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan tenaga honor di sekolah.
7. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Kebersihan sebesar Rp1.136.658.850,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan honorarium tenaga kebersihan di sekolah.
8. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Keamanan sebesar Rp2.552.785.200,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan honorarium pengamanan di sekolah.
9. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Operator sebesar Rp3.024.624.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan honorarium operator komputer di sekolah.
10. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Pelayanan SKPD sebesar Rp27.128.039.336,00 terdiri dari penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan honorarium harian lepas di sekolah sebesar Rp27.495.095.000,00, penambahan Utang Jampersal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.124.681.236,00 dan reklasifikasi Beban atas BTT *Refocusing* melalui RSUD

Banyuasin sebesar Rp88.200.000,00 serta pelunasan Utang Jampersal tahun lalu sebesar (Rp1.579.936.900,00) pada Dinas Kesehatan.

11. Perbedaan antara Beban dan Belanja Narasumber/Tenaga Ahli sebesar Rp3.055.141.850,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan honorarium tenaga narasumber kegiatan di sekolah.
12. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa BLUD sebesar (Rp42.240.653,25) merupakan penyesuaian Beban atas Belanja BLUD berupa pembebanan asuransi pada RSUD Banyuasin.
13. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp337.655.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Jasa Lainnya yang dikapitalisasi ke Aset sebesar (Rp98.945.000,00) pada Dinas Komunikasi dan Informatika, reklasifikasi Beban atas BTT *Refocusing* melalui BPBD Kesbangpol sebesar Rp90.000.000,00 dan reklasifikasi Beban atas BTT *Refocusing* melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp33.600.000,00 serta reklasifikasi Beban atas BTT *Refocusing* melalui Dinas Sosial sebesar Rp313.000.000,00.
14. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi sebesar Rp6.143.069.632,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Persediaan Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi.
15. Perbedaan antara Beban dan Belanja Beban Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp2.481.127.517,00 merupakan penyesuaian Beban pada Dinas Kesehatan atas penambahan Utang Jamsoskes sebesar Rp2.933.661.917,00 dan pelunasan Utang Jamsoskes tahun lalu sebesar (Rp452.534.400,00).
16. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp16.644.706,75 merupakan penyesuaian Beban Dibayar Dimuka atas premi asuransi yang telah jatuh tempo pada Sekretariat Daerah.
17. Perbedaan antara Beban dan Belanja Premi Asuransi Kendaraan sebesar Rp583.687.113,37 merupakan penyesuaian Beban Dibayar Dimuka atas premi asuransi pada 32 SKPD dengan penambahan Beban Dimuka sebesar (Rp836.279.399,00) dan premi asuransi yang telah dibebankan sebesar Rp1.419.966.512,37.
18. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp232.880.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan sekolah sebesar Rp35.930.000,00 dan reklasifikasi Beban atas BTT *Refocusing* melalui Dinas Sosial sebesar Rp196.950.000,00.
19. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air sebesar Rp2.400.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan sewa kendaraan air untuk pelaksanaan kegiatan sekolah.
20. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sewa Meja dan Kursi sebesar Rp3.000.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan sewa komputer untuk pelaksanaan kegiatan sekolah.



21. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sewa Komputer dan Printer sebesar Rp6.000.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS atas pembebanan sewa komputer untuk pelaksanaan kegiatan sekolah.
22. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sewa Generator sebesar Rp700.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan sewa genset untuk pelaksanaan kegiatan sekolah.
23. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional sebesar Rp2.100.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan sewa pakaian adat untuk pelaksanaan kegiatan sekolah.
24. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp26.832.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan sewa perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan sekolah.
25. Perbedaan antara Beban dan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai sebesar Rp1.309.980.676,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan makanan dan minuman harian pegawai di sekolah.
26. Perbedaan antara Beban dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp953.041.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan makanan dan minuman rapat di sekolah.
27. Perbedaan antara Beban dan Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp18.959.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS atas pembebanan makanan dan minuman tamu di sekolah.
28. Perbedaan antara Beban dan Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan sebesar Rp687.813.410,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS atas pembebanan makanan dan minuman pelatihan di sekolah.
29. Perbedaan antara Beban dan Belanja Snack Rapat sebesar Rp288.026.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan snack rapat di sekolah.
30. Perbedaan antara Beban dan Belanja Snack Kegiatan sebesar Rp641.443.750,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan snack kegiatan sekolah.
31. Perbedaan antara Beban dan Belanja Snack Tamu sebesar Rp2.250.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan snack tamu di sekolah.
32. Perbedaan antara Beban dan Belanja Makanan dan Minuman Kompetisi/Pentas/Pameran sebesar Rp19.938.500,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan makanan dan minuman kompetisi/pentas/pameran.
33. Perbedaan antara Beban dan Belanja Konsultasi Perencanaan sebesar (Rp458.760.000,00) merupakan penyesuaian Beban atas kapitalisasi Belanja DED pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

34. Perbedaan antara Beban dan Belanja Kursus singkat/pelatihan sebesar Rp252.880.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan biaya pelatihan sekolah.
35. Perbedaan antara Beban dan Belanja Sosialisasi sebesar Rp15.815.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan kegiatan sosialisasi dalam mendukung kinerja sekolah.
36. Perbedaan antara Beban dan Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp176.638.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan kegiatan bimbingan teknis dalam mendukung kinerja sekolah.

Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa per masing-masing SKPD tahun 2020 sebagai berikut.

**Tabel 5.4.42**  
**Beban Jasa dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66.437.369.627,26	11.030.824.683,00	55.406.544.944,26
Dinas Kesehatan	105.600.194.912,63	103.024.496.293,00	2.575.698.619,63
Rumah Sakit Umum Daerah	17.584.270.416,75	17.498.425.130,00	85.845.286,75
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.681.374.037,00	5.066.016.057,00	(384.642.020,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.177.068.993,50	4.174.257.101,00	2.811.892,50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.173.788.772,31	2.166.990.599,00	6.798.173,31
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.055.782.499,34	9.023.055.266,00	32.727.233,34
Dinas Sosial	2.152.778.983,51	1.615.156.721,00	537.622.262,51
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.809.155.598,00	1.781.122.003,00	28.033.595,00
Dinas Ketahanan Pangan	552.758.336,00	534.648.336,00	18.110.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.530.521.767,14	4.512.581.363,00	17.940.404,14
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.929.788.999,50	1.846.051.837,00	83.737.162,50
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.978.471.038,00	1.897.813.688,00	80.657.350,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.853.307.939,50	2.692.466.202,00	160.841.737,50
Dinas Perhubungan	17.110.061.872,75	17.064.832.218,00	45.229.654,75
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.641.240.458,00	6.041.928.413,00	2.599.312.045,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.979.150.051,67	2.886.664.565,00	92.485.486,67
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.160.370.381,67	2.942.980.215,00	217.390.166,67
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.440.255.973,17	1.354.125.369,00	86.130.604,17
Dinas Perikanan	1.041.010.309,67	1.023.807.143,00	17.203.166,67
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan	1.952.110.352,33	1.906.285.859,00	45.824.493,33

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
dan Holtikultura			
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.072.827.331,00	1.065.371.331,00	7.456.000,00
Sekretariat Daerah	26.594.125.292,75	26.472.275.586,00	121.849.706,75
Sekretariat DPRD	11.077.217.114,33	10.044.011.706,00	1.033.205.408,33
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1.346.594.324,00	1.307.922.464,00	38.671.860,00
Kecamatan Banyuasin I	580.902.515,00	576.902.515,00	4.000.000,00
Kecamatan Banyuasin III	1.560.994.687,00	1.511.494.687,00	49.500.000,00
Kecamatan Betung	917.348.335,00	912.348.335,00	5.000.000,00
Kecamatan Rantau Bayur	284.280.594,00	279.095.594,00	5.185.000,00
Kecamatan Pulau Rimau	238.530.546,00	238.530.546,00	0,00
Kecamatan Talang Kelapa	2.672.890.883,34	2.665.891.850,00	6.999.033,34
Kecamatan Rambutan	312.856.035,00	307.856.035,00	5.000.000,00
Kecamatan Tungkal Ilir	393.939.926,00	392.439.926,00	1.500.000,00
Kecamatan Tanjung Lago	242.403.500,00	242.631.250,00	(227.750,00)
Kecamatan Sembawa	274.049.656,50	274.295.469,00	(245.812,50)
Kecamatan Suak Tapeh	316.372.768,00	313.447.768,00	2.925.000,00
Kecamatan Banyuasin II	286.310.712,00	282.565.382,00	3.745.330,00
Kecamatan Makarti Jaya	538.015.026,00	448.015.026,00	90.000.000,00
Kecamatan Muara Padang	181.643.076,00	176.143.076,00	5.500.000,00
Kecamatan Muara Sugihan	264.748.044,00	264.748.044,00	0,00
Kecamatan Muara Telang	285.558.101,00	285.558.101,00	0,00
Kecamatan Air Salek	240.768.328,00	237.518.328,00	3.250.000,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	264.257.540,34	261.089.207,00	3.168.333,34
Kecamatan Air Kumbang	334.340.760,00	334.340.760,00	0,00
Kecamatan Selat Penuguan	251.054.142,00	247.054.142,00	4.000.000,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	237.709.544,00	235.650.660,00	2.058.884,00
Inspektorat Daerah	844.244.527,00	812.695.691,00	31.548.836,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.276.907.972,20	3.156.953.114,20	119.954.858,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.933.758.765,42	2.907.582.651,00	26.176.114,42
Badan Pendapatan Daerah	2.654.656.943,99	2.551.498.262,00	103.158.681,99
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.770.996.681,50	2.722.773.709,00	48.222.972,50
<b>Jumlah</b>	<b>325.091.134.991,07</b>	<b>261.613.230.276,20</b>	<b>63.477.904.714,87</b>

#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.413.467.036,90. Jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp68.436.694.122,12 maka terdapat penurunan beban pemeliharaan tahun berjalan sebesar (Rp20.023.227.085,22) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.43**  
**Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Jasa Service	2.272.729.982,00	4.194.568.768	(1.921.838.786,00)
Beban Penggantian Suku Cadang	3.350.904.688,00	6.195.870.839	(2.844.966.151,00)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.723.686.164,00	8.134.640.782	(1.410.954.618,00)
Beban Jasa KIR	3.950.000,00	2.450.000	1.500.000,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	218.865.033,00	214.984.111	3.880.922,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	485.200.483,00	447.306.400	37.894.083,00
Beban Pemeliharaan Tanah	394.721.292,00	382.409.000	12.312.292,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.240.325.287,92	7.408.498.549	(3.168.173.261,08)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.923.134.133,13	30.411.110.150	(6.487.976.016,99)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	6.347.586.700	(6.347.586.700,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.483.968.186,08	574.599.600	909.368.586,08
Beban Pemeliharaan Fasilitas Umum	2.540.191.324,46	445.505.700	2.094.685.624,46
Beban Pemeliharaan Jembatan	0,00	1.780.418.138	(1.780.418.138,00)
Beban Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	998.324.000,00	698.930.000,00	299.394.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	774.129.443,31	1.197.815.385	(423.685.941,69)
Beban Pemeliharaan BLUD	1.003.337.020,00	0,00	1.003.337.020,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.413.467.036,90</b>	<b>68.436.694.122,12</b>	<b>(20.023.227.085,22)</b>

Perbandingan Beban pemeliharaan per SKPD tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.44**  
**Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

SKPD	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.640.629.257,00	5.142.009.388,00	2.498.619.869,00
Dinas Kesehatan	4.325.870.709,92	3.573.417.613,49	752.453.096,43
Rumah Sakit Umum Daerah	1.602.430.573,00	1.452.205.809,00	150.224.764,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.707.610.639,08	4.502.012.466,63	(1.794.401.827,55)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.293.952.675,07	10.897.862.901,00	(7.603.910.225,93)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	372.216.100,00	858.819.125,00	(486.603.025,00)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	881.007.642,00	881.795.713,00	(788.071,00)
Dinas Sosial	231.956.651,00	707.434.276,00	(475.477.625,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.034.603,00	696.189.642,00	(196.155.039,00)
Dinas Ketahanan Pangan	95.252.250,00	656.318.525,00	(561.066.275,00)
Dinas Lingkungan Hidup	718.963.200,00	1.958.565.192,00	(1.239.601.992,00)

SKPD	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	330.993.985,00	463.895.597,00	(132.901.612,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	534.167.000,00	754.216.736,00	(220.049.736,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	649.826.555,00	660.427.835,00	(10.601.280,00)
Dinas Perhubungan	1.686.624.331,00	2.780.096.114,00	(1.093.471.783,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	458.146.904,00	898.950.850,00	(440.803.946,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	409.509.303,83	1.185.451.653,00	(775.942.349,17)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	249.799.200,00	226.064.000,00	23.735.200,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	233.886.450,00	355.146.741,00	(121.260.291,00)
Dinas Perikanan	117.503.175,00	747.549.875,00	(630.046.700,00)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	128.784.025,00	516.819.489,00	(388.035.464,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	220.561.675,00	113.393.454,00	107.168.221,00
Sekretariat Daerah	14.601.403.675,00	18.341.290.256,00	(3.739.886.581,00)
Sekretariat DPRD	2.202.326.927,00	4.747.166.801,00	(2.544.839.874,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	379.260.050,00	191.788.725,00	187.471.325,00
Kecamatan Banyuasin I	15.000.000,00	45.276.000,00	(30.276.000,00)
Kecamatan Banyuasin III	66.485.575,00	317.610.000,00	(251.124.425,00)
Kecamatan Betung	3.270.000,00	79.867.975,00	(76.597.975,00)
Kecamatan Rantau Bayur	86.970.000,00	96.048.000,00	(9.078.000,00)
Kecamatan Pulau Rimau	59.289.100,00	84.705.900,00	(25.416.800,00)
Kecamatan Talang Kelapa	582.942.600,00	445.308.750,00	137.633.850,00
Kecamatan Rambutan	36.930.000,00	126.282.000,00	(89.352.000,00)
Kecamatan Tungkal Ilir	17.150.000,00	37.050.000,00	(19.900.000,00)
Kecamatan Tanjung Lago	67.143.400,00	105.165.996,00	(38.022.596,00)
Kecamatan Sembawa	54.564.401,00	37.261.125,00	17.303.276,00
Kecamatan Suak Tapeh	37.720.258,00	89.695.125,00	(51.974.867,00)
Kecamatan Banyuasin II	202.837.300,00	27.983.854,00	174.853.446,00
Kecamatan Makarti Jaya	29.652.448,00	45.973.740,00	(16.321.292,00)
Kecamatan Muara Padang	52.620.075,00	97.201.500,00	(44.581.425,00)
Kecamatan Muara Sugihan	29.641.750,00	121.669.499,00	(92.027.749,00)
Kecamatan Muara Telang	91.320.750,00	41.323.176,00	49.997.574,00
Kecamatan Air Salek	49.219.025,00	124.370.945,00	(75.151.920,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	161.633.604,00	85.702.632,00	75.930.972,00
Kecamatan Air Kumbang	4.700.000,00	22.701.600,00	(18.001.600,00)
Kecamatan Selat Penuguan	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	474.000,00	0,00	474.000,00
Inspektorat Daerah	177.547.412,00	244.372.756,00	(66.825.344,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	408.165.065,00	855.623.559,00	(447.458.494,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	571.685.368,00	981.479.532,00	(409.794.164,00)
Badan Pendapatan Daerah	989.314.150,00	881.303.668,00	108.010.482,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.473.200,00	132.128.013,00	(90.654.813,00)

SKPD	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Jumlah	48.413.467.036,90	68.436.694.122,12	(20.023.227.085,22)

Perbandingan Beban Jasa dan Belanja pemeliharaan tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.45**  
**Beban dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Jasa <i>Service</i>	2.272.729.982,00	2.271.629.982,00	1.100.000,00
Beban Penggantian Suku Cadang	3.350.904.688,00	3.350.904.688,00	0,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.723.686.164,00	6.723.686.164,00	0,00
Beban Jasa KIR	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	218.865.033,00	218.865.033,00	0,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	485.200.483,00	485.200.483,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	394.721.292,00	394.721.292,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.240.325.287,92	3.352.533.142,92	887.792.145,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.923.134.133,13	18.167.682.417,13	5.755.451.716,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	15.641.950.165,00	(15.641.950.165,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.483.968.186,08	3.473.866.186,08	(1.989.898.000,00)
Beban Pemeliharaan Fasilitas Umum	2.540.191.324,46	764.363.443,31	1.775.827.881,15
Beban Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	998.324.000,00	998.324.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	774.129.443,31	366.853.431,00	407.276.012,31
Beban Pemeliharaan BLUD	1.003.337.020,00	1.003.337.020,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.413.467.036,90</b>	<b>57.217.867.447,44</b>	<b>(8.804.400.410,54)</b>

Perbedaan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp8.804.400.410,54) dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa *Service* sebesar Rp1.100.000,00 merupakan penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan servis kendaraan dalam operasional sekolah.
2. Perbedaan atas Beban dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp887.792.145,00 terdiri dari:
  - a. Penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa BOS berupa pembebanan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp705.666.841,00.
  - b. Penyesuaian Beban berupa pembebanan biaya kalibrasi peralatan laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp165.015.700,00.
  - c. Penyesuaian Beban atas Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

- Anak berupa pengadaan peralatan dan mesin berupa papan pengumuman sebesar (Rp1.750.000,00).
- d. Penyesuaian Beban atas Belanja Pemeliharaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa servis generator set yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.859.604,00.
3. Perbedaan atas Beban dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.755.451.716,00 terdiri dari:
- a. Penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp5.521.008.416,00.
  - b. Penyesuaian Beban berupa rehabilitasi ruang sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rehabilitasi gedung korwil, pemasangan keramik teras kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rehabilitasi ruang pengawas sekolah dan ruang guru SMPN 6 Talang Kelapa yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal senilai Rp693.683.000,00.
  - c. Penyesuaian Beban berupa pekerjaan pemeliharaan Rumah Sakit Makarti Jaya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp707.801.600,00.
  - d. Penyesuaian Beban atas pengakuan Aset Tetap berupa rehabilitasi puskesmas yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp2.426.618.500,00).
  - e. Penyesuaian Beban berupa rehabilitasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dianggarkan dan direalisasikan dalam belanja modal sebesar Rp202.953.000,00.
  - f. Penyesuaian Beban berupa pengecatan dan rehabilitasi lobi kantor pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp279.800.000,00.
  - g. Penyesuaian Beban berupa pembuatan sekat ruangan pada Dinas Perhubungan yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp9.952.000,00.
  - h. Penyesuaian Beban berupa pemeliharaan rutin gedung kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp119.700.000,00.
  - i. Penyesuaian Beban berupa pemeliharaan gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp318.240.000,00.
  - j. Penyesuaian Beban atas reklasifikasi ke Aset Tetap pada Badan Pendapatan Daerah berupa Rehabilitasi ruang rapat sebesar (Rp169.507.800,00).
  - k. Reklasifikasi Beban atas BTT DID melalui RSUD Banyuasin sebesar Rp498.440.000.
4. Perbedaan atas Beban dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar (Rp15.641.950.165,00) terdiri dari:

- a. Penyesuaian Beban Pemeliharaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas Rehabilitasi Jalan Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar (Rp7.767.906.135,00).
  - b. Penyesuaian Beban Pemeliharaan yang dikapitalisasi ke Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar (Rp7.874.044.030,00).
5. Perbedaan atas Beban dan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.989.898.000,00) terdiri dari:
- a. Penyesuaian Beban berupa pembuatan musholah dan penataan parkir rumah dinas Bupati yang dikapitalisasi ke Aset Tetap pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar (Rp2.403.309.000,00)
  - b. Penyesuaian Beban atas pemeliharaan gedung kantor pada Sekretariat DPRD yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp413.411.000,00.
6. Perbedaan atas Beban dan Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum sebesar Rp1.775.827.881,15 terdiri dari:
- a. Penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS sebesar Rp70.951.000,00.
  - b. Penyesuaian Beban berupa pemeliharaan siring pada Kecamatan Talang Kelapa yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp374.751.700,00.
  - c. Penyesuaian Beban berupa pengadaan bangunan pembuang pengaman sungai yang dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Modal sebesar Rp1.727.635.193,46.
  - d. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Fasilitas Umum ke Beban Pemeliharaan Jaringan (Rp397.510.012,31) karena kesalahan *mapping* Belanja Pemeliharaan.
7. Perbedaan atas Beban dan Belanja Pemeliharaan Jaringan sebesar Rp407.276.012,31 terdiri dari:
- a. Penyesuaian Beban atas Belanja Barang dan Jasa - BOS berupa pembebanan pemeliharaan jaringan di sekolah sebesar Rp9.766.000,00.
  - b. Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Jaringan dari Beban Fasilitas Umum sebesar Rp397.510.012,31 karena kesalahan *mapping* Belanja Pemeliharaan.

Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan per SKPD tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.46**  
**Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan per SKPD Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.640.629.257,00	638.454.000,00	7.002.175.257,00
Dinas Kesehatan	4.325.870.709,92	6.044.687.609,92	(1.718.816.900,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	1.602.430.573,00	1.103.990.573,00	498.440.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	2.707.610.639,08	5.110.919.639,08	(2.403.309.000,00)



Uraian	Beban	Belanja	Kenaikan/ Penurunan
Permukiman dan Pertanahan			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.293.952.675,07	17.208.267.646,61	(13.914.314.971,54)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	372.216.100,00	372.216.100,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	881.007.642,00	678.054.642,00	202.953.000,00
Dinas Sosial	231.956.651,00	231.956.651,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.034.603,00	500.034.603,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	95.252.250,00	95.252.250,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	718.963.200,00	553.947.500,00	165.015.700,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	330.993.985,00	330.993.985,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	534.167.000,00	534.167.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	649.826.555,00	371.776.555,00	278.050.000,00
Dinas Perhubungan	1.686.624.331,00	1.676.672.331,00	9.952.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	458.146.904,00	439.287.300,00	18.859.604,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	409.509.303,83	409.509.303,83	0,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	249.799.200,00	249.799.200,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	233.886.450,00	233.886.450,00	0,00
Dinas Perikanan	117.503.175,00	117.503.175,00	0,00
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	128.784.025,00	128.784.025,00	0,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	220.561.675,00	100.861.675,00	119.700.000,00
Sekretariat Daerah	14.601.403.675,00	14.601.403.675,00	0,00
Sekretariat DPRD	2.202.326.927,00	1.788.915.927,00	413.411.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	379.260.050,00	61.020.050,00	318.240.000,00
Kecamatan Banyuasin I	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kecamatan Banyuasin III	66.485.575,00	66.485.575,00	0,00
Kecamatan Betung	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00
Kecamatan Rantau Bayur	86.970.000,00	86.970.000,00	0,00
Kecamatan Pulau Rimau	59.289.100,00	59.289.100,00	0,00
Kecamatan Talang Kelapa	582.942.600,00	208.190.900,00	374.751.700,00
Kecamatan Rambutan	36.930.000,00	36.930.000,00	0,00
Kecamatan Tungkal Ilir	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00
Kecamatan Tanjung Lago	67.143.400,00	67.143.400,00	0,00
Kecamatan Sembawa	54.564.401,00	54.564.401,00	0,00
Kecamatan Suak Tapeh	37.720.258,00	37.720.258,00	0,00
Kecamatan Banyuasin II	202.837.300,00	202.837.300,00	0,00
Kecamatan Makarti Jaya	29.652.448,00	29.652.448,00	0,00
Kecamatan Muara Padang	52.620.075,00	52.620.075,00	0,00
Kecamatan Muara Sugihan	29.641.750,00	29.641.750,00	0,00
Kecamatan Muara Telang	91.320.750,00	91.320.750,00	0,00
Kecamatan Air Salek	49.219.025,00	49.219.025,00	0,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	161.633.604,00	161.633.604,00	0,00
Kecamatan Air Kumbang	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Kenaikan/ Penurunan
Kecamatan Selat Penuguan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	474.000,00	474.000,00	0,00
Inspektorat Daerah	177.547.412,00	177.547.412,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	408.165.065,00	408.165.065,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	571.685.368,00	571.685.368,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	989.314.150,00	1.158.821.950,00	(169.507.800,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.473.200,00	41.473.200,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.413.467.036,90</b>	<b>57.217.867.447,44</b>	<b>(8.804.400.410,54)</b>

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp114.909.742.979,00. Jika dibandingkan dengan beban perjalanan dinas 2019 sebesar Rp186.863.590.783,20 maka terdapat penurunan beban sebesar Rp71.953.847.804,20 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.47**  
**Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.753.326.343,00	47.329.439.532,00	(9.576.113.189,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.118.972.636,00	134.428.764.944,20	(60.309.792.308,20)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	1.181.529.271,00	(1.181.529.271,00)
Beban Paket Kegiatan/ Pertemuan di Luar Kantor	3.037.444.000,00	3.923.857.036,00	(886.413.036,00)
<b>Jumlah</b>	<b>114.909.742.979,00</b>	<b>186.863.590.783,20</b>	<b>(71.953.847.804,20)</b>

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per SKPD tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.48**  
**Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.204.138.463,00	13.657.540.571,00	(4.453.402.108,00)
Dinas Kesehatan	8.836.996.619,00	12.915.827.084,20	(4.078.830.465,20)
Rumah Sakit Umum Daerah	340.242.191,00	898.664.966,00	(558.422.775,00)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.146.592.322,00	2.677.971.920,00	(1.531.379.598,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.114.389.043,00	2.849.351.194,00	(1.734.962.151,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	743.082.100,00	2.733.772.410,00	(1.990.690.310,00)
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan	753.834.885,00	3.034.102.262,00	(2.280.267.377,00)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Penyelamatan			
Dinas Sosial	946.009.907,00	1.676.460.064,00	(730.450.157,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.039.608.806,00	1.385.265.847,00	(345.657.041,00)
Dinas Ketahanan Pangan	860.751.351,00	2.319.543.273,00	(1.458.791.922,00)
Dinas Lingkungan Hidup	560.424.928,00	1.928.440.769,00	(1.368.015.841,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	711.422.054,00	1.546.374.753,00	(834.952.699,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.126.740.015,00	3.120.895.765,00	(1.994.155.750,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.183.095.968,00	4.807.675.912,00	375.420.056,00
Dinas Perhubungan	785.774.818,00	1.439.803.218,00	(654.028.400,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	918.166.950,00	2.804.703.985,00	(1.886.537.035,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.479.856.445,00	2.748.646.964,00	(1.268.790.519,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	698.708.000,00	728.534.915,00	(29.826.915,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.083.363.120,00	2.325.540.512,00	(1.242.177.392,00)
Dinas Perikanan	866.057.348,00	1.446.182.876,00	(580.125.528,00)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.586.831.229,00	3.789.688.454,00	(2.202.857.225,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.486.861.697,00	724.571.509,00	762.290.188,00
Sekretariat Daerah	10.239.679.275,00	18.086.214.438,00	(7.846.535.163,00)
Sekretariat DPRD	50.616.272.153,00	69.195.950.477,00	(18.579.678.324,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	591.115.499,00	1.605.459.183,00	(1.014.343.684,00)
Kecamatan Banyuasin I	150.640.337,00	327.491.800,00	(176.851.463,00)
Kecamatan Banyuasin III	309.327.500,00	466.147.400,00	(156.819.900,00)
Kecamatan Betung	159.500.000,00	114.235.000,00	45.265.000,00
Kecamatan Rantau Bayur	35.700.000,00	70.850.000,00	(35.150.000,00)
Kecamatan Pulau Rimau	136.112.500,00	131.040.200,00	5.072.300,00
Kecamatan Talang Kelapa	120.850.000,00	320.700.485,00	(199.850.485,00)
Kecamatan Rambutan	153.900.000,00	166.920.000,00	(13.020.000,00)
Kecamatan Tungkai Ilir	60.025.000,00	137.500.000,00	(77.475.000,00)
Kecamatan Tanjung Lago	123.950.000,00	131.500.000,00	(7.550.000,00)
Kecamatan Sembawa	115.587.500,00	213.362.500,00	(97.775.000,00)
Kecamatan Suak Tapeh	57.150.000,00	126.568.000,00	(69.418.000,00)
Kecamatan Banyuasin II	133.404.500,00	230.922.276,00	(97.517.776,00)
Kecamatan Makarti Jaya	90.600.000,00	140.819.500,00	(50.219.500,00)
Kecamatan Muara Padang	194.250.000,00	199.340.000,00	(5.090.000,00)
Kecamatan Muara Sugihan	153.700.000,00	256.619.200,00	(102.919.200,00)
Kecamatan Muara Telang	110.600.000,00	184.345.408,00	(73.745.408,00)
Kecamatan Air Salek	132.950.000,00	188.689.966,00	(55.739.966,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	96.930.000,00	144.223.248,00	(47.293.248,00)
Kecamatan Air Kumbang	106.300.000,00	86.525.000,00	19.775.000,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Kecamatan Selat Penuguan	115.720.000,00	137.694.000,00	(21.974.000,00)
Kecamatan Karang Agung Ilir	152.210.000,00	294.052.114,00	(141.842.114,00)
Inspektorat Daerah	1.491.951.285,00	4.026.634.046,00	(2.534.682.761,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.697.088.483,00	4.218.203.509,00	(2.521.115.026,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.452.698.164,00	8.480.026.768,00	(6.027.328.604,00)
Badan Pendapatan Daerah	2.661.443.409,00	2.862.056.566,00	(200.613.157,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	977.139.115,00	2.759.940.476,00	(1.782.801.361,00)
<b>Jumlah</b>	<b>114.909.742.979,00</b>	<b>186.863.590.783,20</b>	<b>(71.953.847.804,20)</b>

Perbandingan antara Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.49**  
**Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.753.326.343,00	33.594.065.243,00	4.159.261.100,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.118.972.636,00	73.127.226.316,00	991.746.320,00
Beban Paket Kegiatan/Pertemuan di Luar Kantor	3.037.444.000,00	2.642.772.000,00	394.672.000,00
Beban Perjalanan Dinas - BLUD	0,00	49.910.070,00	(49.910.070,00)
<b>Jumlah</b>	<b>114.909.742.979,00</b>	<b>109.413.973.629,00</b>	<b>5.495.769.350,00</b>

Perbedaan atas Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5.495.769.350,00 merupakan penyesuaian Beban Persediaan Barang dan Jasa - BOS dan penyesuaian Beban Perjalanan Dinas - BLUD.

#### 5.4.2.6 Beban Bunga

Beban Bunga untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.640.021.232,90 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman daerah dari Bank Sumsel Babel. Penjelasan lebih lanjut pada uraian Belanja Bunga. Jika dibandingkan dengan Beban Bunga tahun lalu sebesar Rp1.591.500.000,00 maka terdapat kenaikan Beban Bunga sebesar Rp5.048.521.232,90.

#### 5.4.2.7 Beban Subsidi

Tidak terdapat Beban Subsidi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

#### 5.4.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban atas Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Beban Hibah sebesar Rp70.937.102.569,23 yang terdiri dari Beban Hibah dalam bentuk

uang sebesar Rp25.367.515.000,00 dan dalam bentuk barang sebesar Rp45.569.587.569,23.

Jika dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2019 sebesar Rp52.136.415.474,72 menunjukkan kenaikan Beban Hibah sebesar Rp18.800.687.094,51 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.50**  
**Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
<b>Beban Hibah dalam bentuk uang</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>21.765.800.000,00</b>	<b>120.150.000,00</b>
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	750.000.000,00	2.300.000.000,00	(1.550.000.000,00)
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	13.352.950.000,00	12.682.800.000,00	670.150.000,00
Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	1.240.000.000,00	1.920.000.000,00	(680.000.000,00)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.543.000.000,00	4.863.000.000,00	1.680.000.000,00
<b>Beban Hibah dalam bentuk barang</b>	<b>49.051.152.569,23</b>	<b>30.370.615.474,72</b>	<b>18.680.537.094,51</b>
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Pusat	8.625.293.425,23	5.280.078.316,72	3.345.215.108,51
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Pusat Provinsi	198.800.000,00	0,00	198.800.000,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.630.117.000,00	2.571.907.512,00	1.058.209.488,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	13.640.714.624,00	4.347.281.516,00	9.293.433.108,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	274.387.000,00	3.853.549.640,00	(3.579.162.640,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	654.320.000,00	6.795.515.000,00	(6.141.195.000,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian	153.800.000,00	1.262.945.000,00	(1.109.145.000,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	146.500.000,00	0,00	146.500.000,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan	560.311.825,00	154.200.000,00	406.111.825,00
Hibah Barang Modal yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	3.357.735.600,00	2.020.971.890,00	1.336.763.710,00
Hibah Barang Modal yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	0,00	399.400.000,00	(399.400.000,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Desa	17.602.903.595,00	3.007.753.600,00	14.595.149.995,00
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	206.269.500,00	677.013.000,00	(470.743.500,00)
<b>Total</b>	<b>70.937.102.569,23</b>	<b>52.136.415.474,72</b>	<b>18.800.687.094,51</b>

Rincian Beban Hibah dalam bentuk barang yang dianggarkan di SKPD jika dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4.51**  
**Beban Hibah Barang per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
<b>Hibah dalam bentuk uang</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>21.765.800.000,00</b>	<b>120.150.000,00</b>
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	21.885.950.000,00	21.765.800.000,00	120.150.000,00
<b>Hibah dalam bentuk barang</b>	<b>49.051.152.569,23</b>	<b>30.370.615.474,72</b>	<b>18.680.537.094,51</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.999.708.493,00	12.745.369.846,72	(5.745.661.353,72)
Dinas Kesehatan	167.400.000,00	421.666.000,00	(254.266.000,00)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.349.293.127,23	0,00	19.349.293.127,23
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	989.618.000,00	0,00	989.618.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	3.481.565.000,00	0,00	3.481.565.000,00
Dinas Sosial	38.869.500,00	255.347.000,00	(216.477.500,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	1.045.198.512,00	(1.045.198.512,00)
Dinas Perhubungan	2.075.950.000,00	3.007.753.600,00	(931.803.600,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	198.605.000,00	0,00	198.605.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	88.600.000,00	(88.600.000,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	176.500.000,00	0,00	176.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	2.414.895.000,00	(2.414.895.000,00)
Dinas Perikanan	1.187.265.000,00	1.273.029.000,00	(85.764.000,00)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	12.308.203.124,00	2.649.172.516,00	9.659.030.608,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	625.505.325,00	2.017.389.000,00	(1.391.883.675,00)
Sekretariat Daerah	1.452.670.000,00	4.452.195.000,00	(2.999.525.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>70.937.102.569,23</b>	<b>52.136.415.474,72</b>	<b>18.800.687.094,51</b>

Perbandingan antara Beban Hibah dan Belanja Hibah tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp23.074.014.544,40) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.52**  
**Beban dan Belanja Hibah Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
<b>Hibah dalam Bentuk Uang</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Pendidikan	13.352.950.000,00	13.352.950.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat dengan Kegiatan Bidang Keagamaan	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.543.000.000,00	6.543.000.000,00	0,00
<b>Hibah dalam Bentuk Barang</b>	<b>49.051.152.569,23</b>	<b>72.125.167.113,63</b>	<b>(23.074.014.544,40)</b>
Hibah Barang yang akan Diserahkan kepada Pemerintah	8.625.293.425,23	8.426.454.112,77	198.839.312,46

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Pusat			
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Pusat Provinsi	198.800.000,00	0,00	198.800.000,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.630.117.000,00	148.552.000,00	3.481.565.000,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	13.640.714.624,00	8.437.847.424,00	5.202.867.200,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	274.387.000,00	4.422.106.697,44	(4.147.719.697,44)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	654.320.000,00	7.392.235.010,00	(6.737.915.010,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian	153.800.000,00	153.800.000,00	0,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	146.500.000,00	719.994.000,00	(573.494.000,00)
Hibah Barang Modal yang Diserahkan kepada Pemerintah Pusat	0,00	199.747.000,00	(199.747.000,00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan	560.311.825,00	560.311.825,00	0,00
Hibah Barang Modal yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	3.357.735.600,00	3.357.735.600,00	0,00
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Desa	17.602.903.595,00	35.692.203.444,42	(18.089.299.849,42)
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	206.269.500,00	2.614.180.000,00	(2.407.910.500,00)
<b>Jumlah</b>	<b>70.937.102.569,23</b>	<b>94.011.117.113,63</b>	<b>(23.074.014.544,40)</b>

Perbedaan Beban Hibah dan Belanja Hibah sebesar (Rp23.074.014.544,40) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Beban dan Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp198.839.312,46 terdiri dari:
  - a. Hibah berupa tanah seluas 6.000 m<sup>2</sup> kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 0430 Banyuasin untuk pembangunan kantor dan fasilitas lainnya sesuai dengan NPHD Nomor 53/NPHD/BPKAD/2020 - B/39/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan BAST Nomor 030/145/BA/BPKAD/2020 tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp300.000.000,00.
  - b. Hibah berupa tanah seluas 2.512 m<sup>2</sup> kepada Kepolisian Resor Kabupaten Banyuasin untuk pembangunan kantor lantas sesuai dengan NPHD Nomor 03/NPDH/BPKAD/2020 - B/42/II/Polres BA/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan BAST Nomor 030/67/BA/BPKAD/2020 tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp1.256.000.000,00.

- c. Hibah berupa bangunan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Berita Acara Nomor 030/416/BAST/DISPERKIMTAN/2020 tanggal 16 Januari 2020 senilai Rp1.574.311.793,30.
  - d. Hibah berupa tanah kepada TNI AL seluas 20.000 m<sup>2</sup> untuk lapangan tembak dan fasilitas lainnya sesuai NPHD Nomor 223/NPHD/DISHUB/2020 - BA/13/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan BAST Nomor 030/223/BA/DISHUB/2020 tanggal 18 Februari 2020 senilai Rp300.000.000,00.
  - e. Hibah berupa tanah kepada Pengadilan Agama seluas 6.977 m<sup>2</sup> untuk kantor dan fasilitas lainnya sesuai NPHD Nomor W6-A8/481/PL.02/V/2020 - 404/NPHD/VII/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan BAST Nomor 030/550/BA/BPKAD/2020 tanggal 19 Mei 2020 senilai Rp348.850.000,00.
  - f. Penambahan saldo Persediaan atas pembangunan gedung Kodim 0430 Banyuasin dan interiornya yang belum dihibahkan senilai (Rp1.157.724.000,00).
  - g. Penambahan saldo Persediaan atas pembangunan gedung Pengadilan Negeri Sukajadi yang belum dihibahkan senilai (Rp394.015.600,00).
  - h. Penambahan saldo Persediaan atas pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Banyuasin yang belum dihibahkan senilai (Rp2.720.610.619,77).
  - i. Koreksi Beban Hibah kepada Kepolisian Resor Kabupaten Banyuasin sebesar Rp692.027.738,93.
2. Perbedaan antara Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp198.800.000,00 merupakan pemberian Hibah berupa alat musik kepada SMAN 1 Banyuasin III sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 104/KPTS/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah tahun 2020.
  3. Perbedaan antara Beban dan Belanja kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp3.481.565.000,00 terdiri dari:
    - a. Koreksi Belanja Modal yang diserahkan ke masyarakat berupa sarung tangan pemadam dan helm *safety* pada BPBD Kesbangpol dengan Nomor Kontrak 027/164/SP/BPBD-Kesbangpol/PPK/BANGUB/2020 sebesar Rp351.285.000,00.
    - b. Koreksi Belanja Modal yang diserahkan ke masyarakat berupa mesin pompa jinjing dan peralatan penanggulangan karhutla (selang dan nosel) pada BPBD Kesbangpol dengan Nomor Kontrak 027/113/SP/BPBD-Kesbangpol/PPK/BANGUB/2020 sebesar Rp2.991.120.000,00.
    - c. Koreksi Belanja Modal yang diserahkan ke masyarakat berupa *jet shooter* sesuai SPK Nomor 027/032/SP/BPBD-Kesbangpol/PPK/BANGUB/2020 sebesar Rp119.760.000,00.
    - d. Koreksi Belanja Modal yang diserahkan ke masyarakat berupa senter kepala kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD-Kesbangpol sesuai SPK No. 027/090/SP/BPBD-Kesbangpol/PPK/BANGUB/2020 sebesar Rp19.400.000,00.
  4. Perbedaan antara Beban dan Belanja Hibah Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian sebesar Rp5.202.867.200,00 merupakan koreksi tambah atas Hibah sebesar Rp5.330.617.200,00 dan Persediaan



berupa bibit dan pupuk yang belum diserahkan sebesar (Rp37.000.000,00) pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta Persediaan yang belum diserahkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada masyarakat sebesar (Rp90.750.000,00).

5. Perbedaan antara Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan sebesar (Rp4.147.719.697,44) merupakan Persediaan berupa rumah baca, ruang belajar madrasah, ponpes, menara mesjid pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang belum diserahkan.
6. Perbedaan antara Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan sebesar Rp6.737.915.010,00 merupakan Persediaan berupa tempat ibadah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang belum diserahkan.
7. Perbedaan antara Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional sebesar (Rp573.494.000,00) merupakan Persediaan berupa lapangan olahraga pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang belum diserahkan.
8. Perbedaan antara Beban dan Belanja Hibah Barang Modal yang Diserahkan kepada Pemerintah Pusat sebesar (Rp199.747.000,00) merupakan Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang belum diserahkan.
9. Perbedaan antara Beban dan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pemerintah Desa sebesar (Rp18.089.299.849,42) terdiri dari:
  - a. Penyesuaian Beban Hibah atas Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang belum diserahkan sebesar (Rp33.916.253.444,42).
  - b. Penyesuaian Beban Hibah atas Hibah Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp353.319.000,00.
  - c. Penyesuaian Beban Hibah atas Hibah Aset Tetap berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp4.837.578.000,00.
  - d. Penyesuaian Beban Hibah atas penyerahan Hibah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 1028/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari Aset Lainnya setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp10.636.056.595,00.
10. Perbedaan antara Beban dan Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar (Rp2.407.910.500,00) terdiri dari:
  - a. Penyesuaian Beban Hibah atas Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang belum diserahkan sebesar (Rp2.380.000.000,00).
  - b. Penyesuaian Beban Hibah atas penyerahan Persediaan tahun 2019 pada Dinas Sosial sebesar Rp41.183.000,00 dan Persediaan yang belum diserahkan sebesar (Rp33.813.500,00).

- c. Penyesuaian Beban Hibah atas reklasifikasi Persediaan berupa hadiah pada Kecamatan Makarti Jaya sebesar (Rp35.280.000,00).

Perbandingan antara Beban Hibah dan Belanja Hibah dalam bentuk barang yang dianggarkan di SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.53**  
**Beban dan Belanja Hibah per SKPD Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
<b>Hibah dalam bentuk uang</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	0,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	21.885.950.000,00	21.885.950.000,00	0,00
<b>Hibah dalam bentuk barang</b>	<b>49.051.152.569,23</b>	<b>72.125.167.113,63</b>	<b>(23.074.014.544,40)</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.999.708.493,00	6.800.908.493,00	198.800.000,00
Dinas Kesehatan	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	19.349.293.127,23	52.227.479.371,63	(32.878.186.244,40)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	989.618.000,00	989.618.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	3.481.565.000,00	0,00	3.481.565.000,00
Dinas Sosial	38.869.500,00	31.500.000,00	7.369.500,00
Dinas Perhubungan	2.075.950.000,00	1.775.950.000,00	300.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	198.605.000,00	198.605.000,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	90.750.000,00	(90.750.000,00)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	176.500.000,00	176.500.000,00	0,00
Dinas Perikanan	1.187.265.000,00	1.187.265.000,00	0,00
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	12.308.203.124,00	7.014.585.924,00	5.293.617.200,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	625.505.325,00	625.505.325,00	0,00
Sekretariat Daerah	1.452.670.000,00	803.820.000,00	648.850.000,00
Kecamatan Makarti Jaya	0,00	35.280.000,00	(35.280.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>70.937.102.569,23</b>	<b>94.011.117.113,63</b>	<b>(23.074.014.544,40)</b>

#### 5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban atas Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp52.776.764.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp156.975.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp52.619.789.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.54**  
**Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Beban Bansos Kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat dengan Tujuan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	156.975.000,00	(156.975.000,00)
Beban Bansos Kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	49.116.000,00	0,00	49.116.000,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	52.695.648.000,00	0,00	52.695.648.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.776.764.000,00</b>	<b>156.975.000,00</b>	<b>52.619.789.000,00</b>

Adapun Beban Bantuan Sosial per masing-masing SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.55**  
**Beban Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.878.000.000,00	0,00	3.878.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	49.916.000,00	0,00	49.916.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.400.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00
Dinas Perikanan	1.952.548.000,00	0,00	1.952.548.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	156.975.000,00	(156.975.000,00)
Dinas Sosial	44.464.300.000,00	0,00	44.464.300.000,00
Kecamatan Muara Telang	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.776.764.000,00</b>	<b>156.975.000,00</b>	<b>52.619.789.000,00</b>

Jika dibandingkan antar Beban dan Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 maka terdapat perbedaan sebesar Rp52.694.848.000,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.56**  
**Beban dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020**

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
Beban Bansos kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	52.744.764.000,00	49.916.000,00	52.694.848.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.776.764.000,00</b>	<b>81.916.000,00</b>	<b>52.694.848.000,00</b>

Perbedaan antara Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar Rp52.694.848.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyesuaian Beban atas Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan pandemi Covid melalui Dinas Sosial sebesar Rp44.464.300.000,00 yang terdiri dari:
  - a. Beban atas BTT berupa bantuan langsung tunai melalui Dinas Sosial sebesar Rp40.466.100.000,00.
  - b. Beban atas BTT berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui Dinas Sosial sebesar Rp3.999.000.000,00.

- c. Penyesuaian Beban atas BTT berupa pengembalian bantuan langsung tunai melalui Dinas Sosial yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar (Rp800.000,00).
2. Penyesuaian Beban atas Belanja Tak Terduga dalam rangka penanganan pandemi Covid berupa bantuan mahasiswa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.878.000.000,00.
3. Penyesuaian Beban atas Belanja Tak Terduga dalam rangka penanganan pandemi Covid berupa bantuan usaha mikro pedagang pasar melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp2.400.000.000,00.
4. Penyesuaian Beban atas Belanja Tak Terduga dalam rangka penanganan pandemi Covid melalui Dinas Perikanan sebesar Rp1.952.548.000,00.

#### 5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp268.658.964.522,20. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 sebesar Rp236.141.402.002,26 maka terdapat kenaikan sebesar Rp32.517.562.519,94 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.57**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>81.297.331.257,95</b>	<b>69.632.714.327,00</b>	<b>11.664.616.930,95</b>
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	2.567.832.518,00	1.851.183.098,00	716.649.420,00
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung	0,00	3.468.750,00	(3.468.750,00)
Beban Penyusutan Alat-Alat Bantu	267.590.986,00	273.616.717,00	(6.025.731,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	14.754.481.557,00	15.997.567.545,00	(1.243.085.988,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.680.000,00	53.002.083,00	(47.322.083,00)
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	276.290.987,00	410.079.361,00	(133.788.374,00)
Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara	190.000,00	190.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	246.181.782,00	214.154.465,00	32.027.317,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	132.586.561,00	34.199.733,00	98.386.828,00
Beban Penyusutan Alat Ukur	352.832.459,00	501.822.295,00	(148.989.836,00)
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	8.472.378.061,00	1.283.354.686,00	7.189.023.375,00
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	111.379.213,00	(111.379.213,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor	4.495.801.593,00	5.416.834.237,00	(921.032.644,00)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	10.942.384.838,00	11.725.886.704,00	(783.501.866,00)
Beban Penyusutan Komputer	12.906.959.105,95	9.121.617.165,00	3.785.341.940,95
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.183.264.635,00	1.228.717.888,00	(45.453.253,00)
Beban Penyusutan Alat Studio	1.126.577.915,00	1.410.919.143,00	(284.341.228,00)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	367.549.780,00	489.891.833,00	(122.342.053,00)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	610.479.161,00	37.337.591,00	573.141.570,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran	15.003.701.364,00	10.563.588.375,00	4.440.112.989,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Penyusutan Alat Kesehatan	175.390.863,00	416.749.316,00	(241.358.453,00)
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	4.480.895,00	2.367.229.333,00	(2.362.748.438,00)
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.237.215.926,00	5.213.866.956,00	23.348.970,00
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	113.027.245,00	21.816.466,00	91.210.779,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	16.790.759,00	13.545.027,00	3.245.732,00
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	283.520.493,00	136.295.256,00	147.225.237,00
Beban Penyusutan <i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	24.573.772,00	42.950.824,00	(18.377.052,00)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	365.589.270,00	384.970.112,00	(19.380.842,00)
Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	26.724.438,00	32.524.439,00	(5.800.001,00)
Beban Penyusutan Senjata Api	3.554.000,00	3.257.750,00	296.250,00
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	26.873.000,00	3.000.000,00	23.873.000,00
Beban Penyusutan Senjata Sinar	900.000,00	900.000,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.305.927.294,00	266.797.966,00	1.039.129.328,00
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>25.042.094.145,00</b>	<b>22.477.688.238,59</b>	<b>2.564.405.906,41</b>
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.839.608.522,00	21.451.372.314,59	2.388.236.207,41
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	910.460.220,00	751.152.437,00	159.307.783,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara	7.710.543,00	7.710.543,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	100.799.944,00	3.967.270,00	96.832.674,00
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	85.793.030,00	(85.793.030,00)
Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	0,00	21.479.040,00	(21.479.040,00)
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	183.514.916,00	10.674.650,00	172.840.266,00
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	145.538.954,00	(145.538.954,00)
<b>Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>160.181.035.247,37</b>	<b>142.128.823.522,00</b>	<b>18.052.211.725,37</b>
Beban Penyusutan Jalan	123.764.967.562,37	107.383.314.583,00	16.381.652.979,37
Beban Penyusutan Jembatan	7.909.421.950,00	7.516.892.846,00	392.529.104,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	6.048.027.651,00	5.716.832.021,00	331.195.630,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	1.762.524.863,00	1.729.578.575,00	32.946.288,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	494.146.722,00	463.242.536,00	30.904.186,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.590.498.756,00	5.710.795.981,00	879.702.775,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	232.418.466,00	27.950.894,00	204.467.572,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	1.425.832.449,00	1.229.000.037,00	196.832.412,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	830.149.378,00	771.206.518,00	58.942.860,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	188.603.057,00	(188.603.057,00)
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	136.759.987,00	82.965.627,00	53.794.360,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	482.077.604,00	245.290.726,00	236.786.878,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	148.636.348,00	6.676.916.238,00	(6.528.279.890,00)
Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	504.365.862,00	504.107.133,00	258.729,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	905.574.322,00	77.037.417,00	828.536.905,00
Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	6.260.387,00	6.260.387,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gas	16.307.792,00	4.255.882,00	12.051.910,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	7.771.470.467,00	357.126.865,00	7.414.343.602,00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.029.077.540,00	3.329.769.393,00	(2.300.691.853,00)
Beban Penyusutan Jaringan Telepon	120.150.473,00	105.364.306,00	14.786.167,00
Beban Penyusutan Jaringan Gas	216.668,00	162.500,00	54.168,00
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2.138.503.871,88</b>	<b>1.902.175.914,67</b>	<b>236.327.957,21</b>
Beban Amortisasi <i>Goodwill</i>	2.138.503.871,88	1.902.175.914,67	236.327.957,21
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>268.658.964.522,20</b>	<b>236.141.402.002,26</b>	<b>32.517.562.519,94</b>

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per masing-masing SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.4.58**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.395.576.028,50	31.034.461.950,28	2.361.114.078,22
Dinas Kesehatan	17.685.570.058,00	15.859.870.446,00	1.825.699.612,00
Rumah Sakit Umum Daerah	7.093.841.888,00	6.113.126.177,00	980.715.711,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.835.711.667,85	19.355.830.138,00	9.479.881.529,85
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	120.673.774.195,37	109.506.574.324,00	11.167.199.871,37
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.685.399.202,00	2.314.069.881,00	371.329.321,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	924.548.759,00	890.146.470,00	34.402.289,00
Dinas Sosial	249.432.219,00	225.298.152,00	24.134.067,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.560.562.133,00	5.152.468.660,00	2.408.093.473,00
Dinas Ketahanan Pangan	7.198.599.868,00	555.353.376,00	6.643.246.492,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.972.864.863,00	8.694.676.489,00	(6.721.811.626,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.443.043.498,00	1.124.463.816,00	318.579.682,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	467.884.842,00	554.356.341,00	(86.471.499,00)
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	986.660.342,00	1.025.072.943,00	(38.412.601,00)
Dinas Perhubungan	6.063.960.644,00	5.363.556.389,96	700.404.254,04
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.014.810.772,38	2.129.515.324,02	(114.704.551,64)
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.383.495.329,00	2.922.708.130,00	1.460.787.199,00

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	444.456.009,00	346.540.810,00	97.915.199,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	545.341.868,00	667.136.771,00	(121.794.903,00)
Dinas Perikanan	1.394.896.462,00	1.436.178.700,00	(41.282.238,00)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	1.648.408.814,00	2.003.927.322,00	(355.518.508,00)
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.282.312.831,00	562.571.635,00	719.741.196,00
Sekretariat Daerah	8.449.133.709,00	9.090.834.331,00	(641.700.622,00)
Sekretariat DPRD	3.266.516.846,10	3.279.585.120,00	(13.068.273,90)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	348.004.636,00	287.349.486,00	60.655.150,00
Kecamatan Banyuasin I	178.817.296,00	149.784.348,00	29.032.948,00
Kecamatan Banyuasin III	287.396.036,00	197.302.523,00	90.093.513,00
Kecamatan Betung	163.450.710,00	115.213.167,00	48.237.543,00
Kecamatan Rantau Bayur	108.658.680,00	131.016.006,00	(22.357.326,00)
Kecamatan Pulau Rimau	181.569.839,00	205.009.367,00	(23.439.528,00)
Kecamatan Talang Kelapa	403.318.732,00	223.190.543,00	180.128.189,00
Kecamatan Rambutan	146.946.670,00	122.569.898,00	24.376.772,00
Kecamatan Tungkal Ilir	126.423.086,00	126.792.126,00	(369.040,00)
Kecamatan Tanjung Lago	468.283.433,00	93.248.574,00	375.034.859,00
Kecamatan Sembawa	136.207.220,00	136.942.409,00	(735.189,00)
Kecamatan Suak Tapeh	133.154.627,00	118.189.440,00	14.965.187,00
Kecamatan Banyuasin II	171.266.620,00	125.892.677,00	45.373.943,00
Kecamatan Makarti Jaya	196.321.723,00	149.905.731,00	46.415.992,00
Kecamatan Muara Padang	164.674.802,00	185.406.246,00	(20.731.444,00)
Kecamatan Muara Sugihan	563.121.667,00	113.472.483,00	449.649.184,00
Kecamatan Muara Telang	133.195.704,00	135.600.563,00	(2.404.859,00)
Kecamatan Air Salek	94.836.299,00	108.922.542,00	(14.086.243,00)
Kecamatan Sumber Marga Telang	156.422.981,00	121.246.843,00	35.176.138,00
Kecamatan Air Kumbang	135.874.167,00	136.613.012,00	(738.845,00)
Kecamatan Selat Penuguan	45.364.572,00	13.343.060,00	32.021.512,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	33.058.692,00	16.734.223,00	16.324.469,00
Inspektorat Daerah	496.419.600,00	592.693.847,00	(96.274.247,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	540.288.731,00	434.343.561,00	105.945.170,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.124.154.359,00	922.850.728,00	201.303.631,00
Badan Pendapatan Daerah	974.269.514,00	381.899.443,00	592.370.071,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	480.661.278,00	587.545.460,00	(106.884.182,00)
<b>Jumlah</b>	<b>268.658.964.522,20</b>	<b>236.141.402.002,26</b>	<b>32.517.562.519,94</b>

#### 5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp10.155.560.674,31. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp9.753.496.699,77 maka terdapat kenaikan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp402.063.974,54 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.59**  
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Beban Penyisihan Piutang Pajak	10.152.805.212,31	9.740.182.508,71	412.622.703,60
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.755.462,00	12.122.291,06	(9.366.829,06)
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.191.900,00	(1.191.900,00)
<b>Jumlah</b>	<b>10.155.560.674,31</b>	<b>9.753.496.699,77</b>	<b>402.063.974,54</b>

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang per masing-masing SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.4.60**  
**Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Dinas Kesehatan	0,00	60.000,00	(60.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	2.755.462,00	0,00	2.755.462,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	13.254.191,06	(13.254.191,06)
Dinas Pendapatan Daerah	10.152.805.212,31	9.740.182.508,71	412.622.703,60
<b>Jumlah</b>	<b>10.155.560.674,31</b>	<b>9.753.496.699,77</b>	<b>402.063.974,54</b>

#### 5.4.2.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain merupakan Beban atas Aset Ekstrakomptabel untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.811.312.675,28. Jika dibandingkan dengan Beban Lain-Lain Tahun 2019 sebesar Rp29.072.529.722,95 maka terdapat penurunan sebesar Rp15.261.217.047,67 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.61**  
**Beban Lain-Lain Tahun 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Alat - Alat Angkutan Non-Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	731.748.705,99	529.473.150,00	202.275.555,99
Belanja Peralatan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	132.017.188,00	743.461.945,00	(611.444.757,00)
Belanja Perlengkapan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	6.869.192.467,00	540.398.775,00	6.328.793.692,00
Belanja Kelengkapan Komputer Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	2.008.429.000,00	242.804.350,00	1.765.624.650,00



Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Meubelair Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	93.016.460,00	6.614.850.924,95	(6.521.834.464,95)
Belanja Peralatan Dapur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	10.252.000,00	96.388.604,00	(86.136.604,00)
Belanja Penghias Ruang RT Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	321.743.791,00	507.835.122,00	(186.091.331,00)
Belanja Alat - Alat Studio Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	0,00	4.684.000,00	(4.684.000,00)
Belanja Alat - Alat Kedokteran Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	3.203.083.316,00	328.023.978,00	2.875.059.338,00
Belanja Alat - Alat Laboratorium Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	28.210.000,00	2.660.000,00	25.550.000,00
Belanja Alat - Alat Olahraga Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	22.968.000,00	0,00	22.968.000,00
Belanja Alat - Alat Persampahan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	42.196.000,00	142.159.700,00	(99.963.700,00)
Belanja Aset Lainnya Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Belanja Modal	348.455.747,29	19.319.789.174,00	(18.971.333.426,71)
<b>Jumlah</b>	<b>13.811.312.675,28</b>	<b>29.072.529.722,95</b>	<b>(15.261.217.047,67)</b>

Perbandingan Beban Lain-Lain dengan Belanja Lain-Lain tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp9.884.127.177,99 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4.62**  
**Beban dan Belanja Lain-Lain Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Beban Alat - Alat Angkutan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	731.748.705,99	0,00	731.748.705,99
Beban Peralatan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	132.017.188,00	52.134.922,00	79.882.266,00
Beban Perlengkapan Kantor Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	6.869.192.467,00	132.737.000,00	6.736.455.467,00
Beban Kelengkapan Komputer Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	2.008.429.000,00	21.495.000,00	1.986.934.000,00
Beban Meubelair Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	93.016.460,00	45.976.750,00	47.039.710,00
Beban Peralatan Dapur Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	10.252.000,00	14.493.000,00	(4.241.000,00)
Beban Penghias Ruang RT Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	321.743.791,00	245.223.516,00	76.520.275,00
Beban Alat - Alat Kedokteran Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	3.203.083.316,00	3.254.165.102,00	(51.081.786,00)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Beban Alat - Alat Laboratorium Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	28.210.000,00	5.940.000,00	22.270.000,00
Beban Alat - Alat Olahraga Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	22.968.000,00	7.518.000,00	15.450.000,00
Beban Alat - Alat Persampahan Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	42.196.000,00	42.196.000,00	0,00
Beban Aset Lainnya Non - Kapitalisasi/Kategori Aset Tetap atau Beban Modal	348.455.747,29	105.306.207,29	243.149.540,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.811.312.675,28</b>	<b>3.927.185.497,29</b>	<b>9.884.127.177,99</b>

#### 5.4.2.13 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer adalah Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa merupakan Beban atas Bantuan Keuangan Desa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp118.635.533.355,78. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp123.328.563.599,61 maka terdapat penurunan sebesar (Rp4.693.030.243,83).

Perbandingan antara Beban dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Desa untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp415.956.152.489,78 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp297.320.619.134,00). Perbedaan tersebut merupakan dana desa yang disalurkan dari RKUN langsung ke rekening desa sebesar Rp296.569.512.200,00, dana desa tahun 2019 yang dibayar di tahun 2020 sebesar Rp947.855.086,00 dan koreksi atas tagihan BPJS Aparatur Desa Bulan September s.d. Desember 2020 sebesar (Rp196.748.152,00).

#### 5.4.2.14 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Beban atas Bantuan Keuangan Lainnya untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.292.564.886,00 berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lain tahun 2019 sebesar Rp1.275.946.834,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp16.618.052,00. Perbandingan antara Beban dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp1.292.564.886,00 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan.

### 5.4.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional menyajikan pendapatan dan beban Pemerintah Kabupaten Banyuwasin yang sifatnya tidak rutin.

#### 5.4.3.1 Surplus Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasional Lainnya dalam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp14.303.678.136,21. Jika dibandingkan dengan Surplus Non Operasional Lainnya tahun 2019 sebesar Rp2.391.062.519,28 menunjukkan

bahwa adanya kenaikan sebesar Rp11.912.615.616,93. Surplus Non Operasional Lainnya terdiri dari:

- a. Penilaian kembali tanah yang bernilai nol pada beberapa SKPD dengan nilai sebesar Rp13.634.282.300,00.
- b. Pengakuan kembali atas Piutang yang telah disisihkan tahun lalu yang terdiri dari penurunan penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp155.736,33, penurunan nilai penyisihan PBB sebesar Rp638.864.499,88, Piutang TGR sebesar Rp9.899.900,00, dan Piutang Taspen sebesar Rp20.475.700,00.

#### 5.4.3.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Defisit Penjualan Aset Non Lancar dalam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.011.538.161,00) berupa penghapusan nilai buku Aset Tetap berupa kendaraan yang telah diselesaikan tuntutan ganti kerugian.

**Tabel 5.4.63**  
**Rincian Saldo Defisit Penjualan Aset Non Lancar**

*(dalam rupiah)*

SKPD	Keterangan	Nilai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penghapusan Kendaraan Dinas BG 8888 JZ	339.500.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penghapusan Kendaraan Dinas BG 2407 JZ	21.390.625,00
Sekretariat Daerah	Penghapusan Kendaraan Dinas BG 1271 JZ	501.647.536,00
Sekretariat Daerah	Penghapusan Kendaraan Dinas BG 2051 JZ	149.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.011.538.161,00</b>

#### 5.4.3.3 Defisit Non Operasional Lainnya

Dalam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 diketahui bahwa terdapat Defisit Non Operasional Lainnya sebesar Rp41.734.947.128,43. Defisit tersebut terdiri dari:

- a. Penurunan nilai investasi pada penyertaan modal PDAM dan Sei Sembilang sebesar Rp41.569.491.128,43.
- b. Penurunan nilai aset dari gedung dan bangunan dari hasil inventarisasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp165.456.000,00.

#### 5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan Pos Laporan Operasional yang memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik berupa kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

##### 5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa

Untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 diketahui bahwa tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa.

#### 5.4.4.2 Beban Luar Biasa

Untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 diketahui bahwa tidak terdapat Beban Luar Biasa. Jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2019 sebesar Rp185.171.250,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp185.171.250,00.

Perbandingan antara Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga Tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp83.437.934.386,50) dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.64**  
**Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Belanja Tak Terduga	0,00	83.437.934.386,50	(83.437.934.386,50)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>83.437.934.386,50</b>	<b>(83.437.934.386,50)</b>

Perbedaan antara Beban Luar Biasa dan Belanja Tak Terduga sebesar (Rp83.437.934.386,50) dengan uraian berikut.

1. Penyesuaian Beban atas pengembalian dana desa yang disetorkan ke RKUN sebesar (Rp2.088.419.808,00).
2. Penyesuaian Beban atas Belanja Tak terduga sebesar (Rp81.349.514.578,50) yang terdiri dari:
  - a. Penyesuaian Beban atas Persediaan dari Belanja Tak Terduga sebesar (Rp990.584.660,00).
  - b. Penyesuaian Beban atas Aset Tetap dari Belanja Tak Terduga sebesar (Rp10.897.787.903,00).
  - c. Reklasifikasi Beban atas Beban Jasa dari Belanja Tak Terduga sebesar (Rp721.750.000,00).
  - d. Reklasifikasi Beban atas Beban Persediaan dari Belanja Tak Terduga sebesar (Rp16.018.832.311,50).
  - e. Reklasifikasi Beban atas Beban Bantuan Sosial dari Belanja Tak Terduga sebesar (Rp52.694.848.000,00).
  - f. Reklasifikasi Beban atas Beban Lain-Lain dari Belanja Tak Terduga sebesar (Rp10.711.704,00).
  - g. Penyesuaian Beban atas pengembalian bantuan langsung tunai dari Belanja Tak Terduga yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar (Rp15.000.000,00).

## 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas selama periode 31 Desember 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris. Rincian arus kas bersih dari masing-masing aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.5.1**  
**Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	250.840.780.869,41	430.534.124.801,24
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(594.038.173.542,29)	(429.786.974.189,48)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	194.918.939.050,13	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.049.877.735,00	(568.108.555,80)

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp250.840.780.869,41 dan Rp430.534.124.801,24 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.5.2**  
**Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	123.984.849.438,59	127.726.414.584,48
4	Penerimaan Retribusi Daerah	10.587.020.785,00	9.356.813.899,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.427.468.649,72	5.411.498.182,71
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	61.820.843.525,81	58.002.021.644,20
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	57.994.104.860,00	57.191.542.634,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	121.570.089.613,00	168.697.515.815,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	878.495.803.000,00	975.360.613.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	341.433.329.045,00	369.030.717.438,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	34.033.249.000,00	35.281.887.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.769.169.236,01	151.007.901.431,46
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	64.877.737.953,60	52.126.675.547,76
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah	422.775.027.155,00	413.177.316.928,00
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 15)</b>	<b>2.218.768.692.261,73</b>	<b>2.422.370.918.104,61</b>

No	Uraian	2020	2019
17	<b>Arus Keluar Kas</b>		
18	Pembayaran Pegawai	778.157.769.580,80	801.972.252.593,63
19	Pembayaran Barang	588.919.199.812,75	673.086.534.349,35
20	Pembayaran Bunga	6.071.257.122,86	1.591.500.000,00
21	Pembayaran Hibah	94.011.117.113,63	92.162.721.570,78
22	Pembayaran Bantuan Sosial	81.916.000,00	225.875.000,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan	417.248.717.375,78	421.482.773.539,61
24	Pembayaran Bantuan Subsidi	0,00	0,00
25	Pembayaran Belanja tak terduga	83.437.934.386,50	1.315.136.250,00
26	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s.d 25)</b>	<b>1.967.927.911.392,32</b>	<b>1.991.836.793.303,37</b>
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26)</b>	<b>250.840.780.869,41</b>	<b>430.534.124.801,24</b>

### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.218.768.692.261,73 merupakan pendapatan daerah dari laporan realisasi anggaran yang diterima melalui kas daerah. Apabila dikomparasikan antara pendapatan yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dan laporan arus masuk kas dari aktivitas operasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.5.3**  
**Komparasi Pendapatan LRA dan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi LAK**

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Penerimaan Pajak Daerah	123.984.849.438,59	123.984.849.438,59	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	10.587.020.785,00	10.587.020.785,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.427.468.649,72	6.427.468.649,72	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	61.820.843.525,81	61.820.843.525,81	0,00
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	57.994.104.860,00	57.994.104.860,00	0,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	126.808.026.768,00	121.570.089.613,00	5.237.937.155,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	878.495.803.000,00	878.495.803.000,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	341.433.329.045,00	341.433.329.045,00	0,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	34.033.249.000,00	34.033.249.000,00	0,00
11	Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.769.169.236,01	94.769.169.236,01	0,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	64.877.737.953,60	64.877.737.953,60	0,00
13	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	422.775.027.155,00	422.775.027.155,00	0,00
14	<b>Jumlah</b>	<b>2.224.006.629.416,73</b>	<b>2.218.768.692.261,73</b>	<b>5.237.937.155,00</b>

Terdapat selisih antara Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada LRA dengan arus masuk kas pada aktivitas operasi LAK sebesar Rp5.237.937.155,00 yang

disebabkan oleh adanya pemotongan kurang salur atas Dana Bagi Hasil Kehutanan sebesar Rp5.360.807,00 dan pemotongan kurang salur atas Dana Bagi Hasil Minerba-Royalty sebesar Rp5.232.576.348,00.

Berikut komposisi perbandingan antara Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Masuk Kas Pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2020.

**Gambar 5.5.1**  
**Perbandingan Pendapatan LRA dan Arus Masuk Kas LAK per 31 Desember 2020**



#### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.967.927.911.392,32 merupakan belanja operasi dari laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah. Apabila dikomparasikan antara belanja yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dan arus keluar kas dari aktivitas operasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.5.4**  
**Komparasi Belanja LRA dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi LAK**  
*(dalam rupiah)*

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Pembayaran Pegawai	778.157.769.580,80	778.157.769.580,80	0,00
2	Pembayaran Barang	588.919.199.812,75	588.919.199.812,75	0,00
3	Pembayaran Bunga	6.071.257.122,86	6.071.257.122,86	0,00
4	Pembayaran Hibah	94.011.117.113,63	94.011.117.113,63	0,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	81.916.000,00	81.916.000,00	0,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	417.248.717.375,78	417.248.717.375,78	0,00
7	Pembayaran Bantuan Subsidi	0,00	0,00	0,00
8	Pembayaran Belanja Tak Terduga	83.437.934.386,50	83.437.934.386,50	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.967.927.911.392,32</b>	<b>1.967.927.911.392,32</b>	<b>0,00</b>

Berikut komposisi perbandingan Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Keluar Kas Pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2020.

**Gambar 5.5.2**  
**Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Bantuan Keuangan LRA**  
**dan Arus Keluar Kas LAK per 31 Desember 2020**



### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan

Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2020 dan 2019 defisit sebesar Rp594.038.173.542,29 dan Rp429.786.974.189,48. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.5.5**  
**Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	119.600.000,00
4	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>119.600.000,00</b>
5	<b>Arus Keluar Kas</b>		
6	Perolehan Tanah	11.173.619.758,00	2.718.461.818,00
7	Perolehan Peralatan dan Mesin	86.207.313.243,95	115.271.959.386,79
8	Perolehan Gedung dan Bangunan	46.269.351.733,32	107.067.706.327,93
9	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	421.459.755.370,02	172.575.951.051,76
10	Perolehan Aset Tetap Lainnya	17.666.875.466,00	27.272.495.605,00
11	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.261.257.971,00	5.000.000.000,00
12	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (6 s.d 11)</b>	<b>594.038.173.542,29</b>	<b>429.906.574.189,48</b>
13	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (4-12)</b>	<b>(594.038.173.542,29)</b>	<b>(429.786.974.189,48)</b>



### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp594.038.173.542,29 merupakan belanja modal pada laporan realisasi anggaran dan penyertaan modal yang dikeluarkan melalui kas daerah. Apabila dikomparasikan belanja modal yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.5.6**  
**Komparasi Belanja LRA dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi LAK**  
*(dalam rupiah)*

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Perolehan Tanah	11.173.619.758,00	11.173.619.758,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	86.207.313.243,95	86.207.313.243,95	0,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	46.269.351.733,32	46.269.351.733,32	0,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	421.459.755.370,02	421.459.755.370,02	0,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	17.666.875.466,00	17.666.875.466,00	0,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.261.257.971,00	11.261.257.971,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>594.038.173.542,29</b>	<b>594.038.173.542,29</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp194.918.939.050,13 dan Rp0,00 mencerminkan penerimaan pendanaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pendanaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.5.7**  
**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2020	2019
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	273.067.043.387,57	0,00
4	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3)</b>	<b>273.067.043.387,57</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Arus Keluar Kas</b>		
6	Pembayaran Pokok Utang	78.148.104.337,44	0,00
7	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (6)</b>	<b>78.148.104.337,44</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (4-7)</b>	<b>194.918.939.050,13</b>	<b>0,00</b>

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp273.067.043.387,57 merupakan Penerimaan Pinjaman Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp78.148.104.337,44 merupakan Pengeluaran Pembayaran pokok utang pada Laporan Realisasi Anggaran.

#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.049.877.735,00 dan (Rp568.108.555,80) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.5.8**  
**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2020	2019
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)- PPKD	151.871.997.171,00	135.751.261.771,00
4	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)- Bendahara SKPD	9.169.339.209,00	11.357.417.430,06
5	Koreksi Kas tahun lalu	0,00	12.537.637,20
6	Pendapatan LRA yang Ditangguhkan	15.008.612,00	0,00
7	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 6)</b>	<b>161.056.344.992,00</b>	<b>147.121.216.838,26</b>
8	<b>Arus Keluar Kas</b>		
9	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)- PPKD	151.772.772.171,00	135.850.486.771,00
10	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)- Bendahara SKPD	8.233.695.086,00	11.837.086.289,06
11	Pengeluaran Rekening Penampungan PBB	0,00	1.752.334,00
12	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (9 s.d 11)</b>	<b>160.006.467.257,00</b>	<b>147.689.325.394,06</b>
13	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (7-12)</b>	<b>1.049.877.735,00</b>	<b>(568.108.555,80)</b>

Selanjutnya penjelasan rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) bendahara SKPD per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.5.9**  
**Rincian PFK per SKPD per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

SKPD	Arus Kas PFK Aktivitas Transitoris	
	Arus Masuk Kas	Arus Keluar Kas
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.498.451.523,00	1.546.824.231,00
Dinas Kesehatan	413.865.832,00	415.984.032,00
Rumah Sakit Umum Daerah	44.021.489,00	44.021.489,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	162.481.031,00	162.481.031,00

SKPD	Arus Kas PFK Aktivitas Transitoris	
	Arus Masuk Kas	Arus Keluar Kas
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	477.670.161,00	477.670.161,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	44.279.807,00	44.279.807,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	87.874.340,00	87.874.340,00
Dinas Sosial	48.659.763,00	82.639.149,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72.431.129,00	72.431.129,00
Dinas Ketahanan Pangan	88.357.823,00	88.357.823,00
Dinas Lingkungan Hidup	160.341.432,00	160.341.432,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.847.237,00	76.847.237,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.628.086,00	75.628.086,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	188.022.197,00	188.022.197,00
Dinas Perhubungan	66.652.950,00	66.652.950,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	165.535.345,00	165.535.345,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	151.650.669,00	151.650.669,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	83.782.678,00	83.782.678,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	133.762.757,00	133.762.757,00
Dinas Perikanan	66.545.288,00	66.545.288,00
Dinas Pertanian	132.478.219,00	132.478.219,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	59.188.238,00	59.188.238,00
Sekretariat Daerah	1.666.971.232,00	1.666.971.232,00
Sekretariat DPRD	304.788.271,00	304.788.271,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	66.300.894,00	66.300.894,00
Kecamatan Banyuasin I	59.326.552,00	59.326.552,00
Kecamatan Banyuasin III	165.983.649,00	165.983.649,00
Kecamatan Betung	69.088.540,00	69.088.540,00
Kecamatan Rantau Bayur	23.478.715,00	23.478.715,00
Kecamatan Pulau Rimau	19.792.500,00	19.792.500,00
Kecamatan Talang Kelapa	170.745.887,00	170.745.887,00
Kecamatan Rambutan	39.016.313,00	39.016.313,00
Kecamatan Tungkal Ilir	23.940.976,00	23.940.976,00
Kecamatan Tanjung Lago	20.885.444,00	20.885.444,00
Kecamatan Sembawa	27.071.678,00	27.071.678,00
Kecamatan Suak Tapah	21.570.208,00	21.570.208,00
Kecamatan Banyuasin II	25.654.579,00	25.654.579,00
Kecamatan Makarti Jaya	45.305.932,00	45.305.932,00
Kecamatan Muara Padang	21.839.416,00	0,00
Kecamatan Muara Sugihan	16.061.543,00	16.061.543,00
Kecamatan Muara Telang	20.681.940,00	20.681.940,00
Kecamatan Air Salek	18.377.616,00	18.377.616,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	30.121.020,00	30.121.020,00
Kecamatan Air Kumbang	20.878.492,00	20.878.492,00
Kecamatan Selat Penuguan	23.656.825,00	23.656.825,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	21.480.291,00	21.480.291,00
Inspektorat Daerah	31.105.597,00	31.105.597,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	269.961.098,00	269.961.098,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	360.507.233,00	360.507.233,00
Badan Pendapatan Daerah	181.959.678,00	183.684.677,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	104.259.096,00	104.259.096,00
<b>JUMLAH</b>	<b>9.169.339.209,00</b>	<b>8.233.695.086,00</b>

Penjelasan rincian saldo akhir arus kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.201.441.407,39 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp157.430.017.295,14 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.5.10**  
**Rincian Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

NO	Uraian	2020	2019
1	Kenaikan/Penurunan Kas	(147.228.575.887,75)	179.042.055,96
2	Saldo Awal Kas	157.430.017.295,14	157.250.975.239,18
<b>3</b>	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas Dibendahara Pengeluaran</b>	<b>10.201.441.407,39</b>	<b>157.430.017.295,14</b>
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir KAS</b>	<b>10.201.441.407,39</b>	<b>157.430.017.295,14</b>
5	Kas di Kas Daerah	2.345.445.063,72	37.622.729.581,25
6	Kas di Bendahara Penerimaan	207.100.860,00	6.589.700,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	225.839.463,00	47.025.861,00
8	Kas di Bendahara FKTP	1.367.017.664,88	1.773.830.037,80
9	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	1.164.855.599,79	2.246.845.658,09
10	Kas di Sekolah-BOS	4.391.182.756,00	15.732.996.457,00
11	Saldo Deposito	500.000.000,00	60.000.000.000,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	40.000.000.000,00

Kenaikan/Penurunan kas sebesar (Rp147.228.575.887,75) merupakan penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA sebesar Rp157.430.017.295,14. Dari penjumlahan tersebut menjadi saldo akhir Kas di BUD sebesar Rp10.201.441.407,39.

Saldo akhir kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran jika dijumlahkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara FKTP, Kas di BLUD, Deposito dan Saldo Kas sisa dana BOS maka saldo akhir kas sebesar Rp10.201.441.407,39 sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca namun apabila dibandingkan dengan SiLPA pada laporan realisasi anggaran terdapat perbedaan sebesar Rp36.048.028,00. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.5.11**  
**Rincian Perbandingan Saldo Akhir Kas dengan Silpa LRA Tahun 2020**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
<b>SILPA di LRA</b>	<b>9.169.031.876,39</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>10.201.441.407,39</b>
Kas Di Kas Daerah	2.345.445.063,72
Kas Di Bendahara Penerimaan	207.100.860,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	225.839.463,00
Kas di Bendahara FKTP	1.367.017.664,88
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	1.164.855.599,79
Kas di Sekolah – BOS	4.391.182.756,00
Saldo Deposito	500.000.000,00

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Selisih</b>	<b>(1.032.409.531,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih</b>	0,00
PFK Terhutang	
- Kecamatan Muara Padang	(21.839.416,00)
- Bendahara BOS	(995.561.503,00)
Pendapatan ditangguhkan atas jasa giro Puskesmas Tanjung Api-Api yang terdapat di rekening Puskesmas	(8.612,00)
Pendapatan ditangguhkan atas pengembalian belanja tidak terduga yang terdapat di rekening Dinsos	(15.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.032.409.531,00)</b>
<b>Selisih Saldo Akhir Kas dengan Silpa di LRA</b>	<b>0,00</b>

## 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Berikut penjelasan mengenai komponen Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.6.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal sebesar Rp4.190.709.969.521,60 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2019.

### 5.6.2. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional

Penambahan ekuitas dari surplus/defisit Laporan Operasional sebesar Rp21.163.053.381,81 merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel 5.6.1**  
**Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019
Pendapatan Operasional	1.969.835.806.659,94	2.071.422.525.485,03
Beban	1.920.229.946.124,91	1.932.770.300.722,10
Surplus Defisit dari kegiatan operasional	<b>49.605.860.535,03</b>	<b>138.652.224.762,93</b>
Surplus Defisit dari Non Operasional	(28.442.807.153,22)	(18.547.569.305,14)
Surplus Defisit sebelum pos luar biasa	<b>21.163.053.381,81</b>	<b>120.104.655.457,79</b>
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	(185.171.250,00)
Surplus Defisit setelah pos luar biasa	<b>21.163.053.381,81</b>	<b>119.919.484.207,79</b>

### 5.6.3 Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.6.2**  
**Koreksi Dampak Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar**

*(dalam rupiah)*

Uraian	2020	2019
Koreksi atas saldo kas FKTP	0,00	12.795.357,20
Koreksi Piutang tahun lalu	0,00	(167.687.534,00)
Koreksi Saldo Awal Piutang Lain-Lain	0,00	(15.025.588,00)
Koreksi lebih salur	(4.627.638.238,00)	(3.560.341.533,00)
Koreksi kurang salur	78.366.385.178,00	55.843.764.791,98
Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	167.687.534,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan	692.027.738,93	577.390.312,77
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	(4.251.838.314,25)	43.848.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu	8.747.619.889,00	(2.496.945,05)
Koreksi Saldo Awal Hutang Tahun Lalu	0,00	(257.720,00)

Uraian	2020	2019
Koreksi Pendapatan tahun lalu	0,00	(68.181.818,18)
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Lalu	337.452.751,24	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	(1.197.605.427,76)	(476.296.545,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Lalu	194.635.696,00	0,00
	<b>78.261.039.273,16</b>	<b>52.355.198.312,72</b>

### 5.6.3.1 Koreksi Lebih Salur

Koreksi Lebih Salur untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar (Rp4.627.638.238,00) merupakan koreksi atas lebih salur pendapatan DBH tahun lalu sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.6.3**  
**Koreksi Lebih Salur Dana Bagi Hasil**

Uraian	Lebih Salur
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	2.687.801.222,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	(41.158.509,00)
Bagi Hasil dari Minerba Iuran Tetap (Land-Rent)	1.980.995.516,00
Bagi Hasil dari Minerba Royalti	9,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.627.638.238,00</b>

### 5.6.3.2 Koreksi Kurang Salur

Koreksi Kurang Salur untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp78.366.385.178,00 merupakan koreksi atas kurang salur pendapatan DBH tahun lalu sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.6.4**  
**Koreksi Kurang Salur**

Uraian	Kurang Salur
Bagi Hasil dari PPh	6.128.097.191,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	22.136.683.091,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	37.669.210.207,00
Bagi Hasil dari Minerba Royalti	10.383.917.583,00
Bagi Hasil dari Panas Bumi	7.657.934,00
Bagi Hasil dari Kehutanan (PSDH / DR)	1.808.499.919,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	229.300.150,00
Bagi Hasil Pajak CHT	3.019.103,00
<b>Jumlah</b>	<b>78.366.385.178,00</b>

### 5.6.3.3 Koreksi Saldo Awal Persediaan

Koreksi nilai awal persediaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp692.027.738,93 merupakan koreksi pengakuan persediaan hibah berupa

aula Polres Banyuasin tahun 2018 yang dianggarkan dalam belanja hibah namun baru dilakukan penyerahan tahun 2020 sesuai dengan berita acara nomor 030/4610/BAST/DISPERKIMTAN/2020 tanggal 16 Januari 2020.

#### 5.6.3.4 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap

Koreksi saldo awal aset tetap untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berjumlah (Rp4.251.838.314,25) merupakan koreksi atas pencatatan saldo awal aset tetap di Neraca, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penghapusan aset tetap berupa kendaraan dinas BG 2748 JZ di Kecamatan Sumber Marga Telang yang telah dicatat dalam piutang TGR sebesar (Rp14.875.000,00).
2. Koreksi nilai aset tetap gedung dan bangunan dari hasil inventarisasi pada Dinas Perikanan yang dilaksanakan tahun 2019 sebesar (Rp95.810.742,00).
3. Koreksi nilai aset tetap berupa *land clearing* tanah untuk TPA pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp689.703.800,00).
4. Koreksi atas penimbunan yang masuk dalam aset gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp9.000.000,00).
5. Koreksi atas nilai bangunan gedung kantor dari hasil inventarisasi tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp322.532.323,25).
6. Koreksi atas nilai bangunan gedung kantor dari hasil inventarisasi tahun 2019 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar (Rp120.148.000,00).
7. Koreksi atas nilai bangunan gedung kantor dari hasil inventarisasi tahun 2019 pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp4.000.000,00).
8. Koreksi atas nilai bangunan gedung kantor dari hasil inventarisasi tahun 2019 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar (Rp539.686.000,00).
9. Koreksi atas nilai bangunan gedung kantor dari hasil inventarisasi tahun 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp122.000.000,00).
10. Koreksi atas normalisasi kolam retensi (pengerukan) Komplek Azhar tahap III di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa yang diakui sebagai aset sebesar (198.940.000,00).
11. Koreksi atas normalisasi sungai saluran sekunder pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun lalu sebesar (Rp17.739.339.419,00).
12. Koreksi atas normalisasi sungai tahun lalu pada Kecamatan Talang Kelapa sebesar (Rp296.958.300,00).
13. Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dinas Ketahanan Pangan berupa *vertical dryer* kapasitas 10 ton di KTM Telang sesuai berita acara nomor 163/BPDTTK/DPKTTTrans/01/2018 senilai Rp651.261.875,00.
14. Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dinas Ketahanan Pangan berupa bangunan produksi padi terintegrasi (RMP) dan Rumah Industri Pupuk organik granular (IPOG) di KTM Telang sesuai berita acara nomor 167/BPDTTK/DPKTTTrans/01/2018 senilai Rp6.388.661.333,00.
15. Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dinas Ketahanan Pangan berupa bangunan produksi padi terintegrasi (RMP) dan Rumah Industri Pupuk organik granular (IPOG) di KTM Telang sesuai berita acara nomor 171/BPDTTK/DPKTTTrans/01/2018 senilai Rp6.026.359.762,00.



16. Hibah dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan berupa bangunan gedung, peralatan kantor dan ternak sapi sesuai berita acara nomor B-849.1/PL.130/H/10/2019 senilai Rp2.563.172.300,00.
17. Hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa kendaraan sesuai berita acara nomor: 136/D.III.R/PL.06/BAST-MOLIN/12/2019 senilai Rp271.700.000,00.

### 5.6.3.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu

Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap tahun lalu senilai Rp8.747.619.889,00, dirinci per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.6.5**  
**Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu**

NO	Nama SKPD	Nilai Akumulasi
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	36.648.094,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.406.746.294,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	19.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.073.270,00
5	Dinas Sosial	5.565.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.440.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	360.890.625,00
8	Dinas Perhubungan	560.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.877.054,00
10	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.535.230,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	60.775.468,00
12	Dinas Perikanan	25.340.004,00
13	Sekretariat Daerah	685.320.244,00
14	Kecamatan Talang Kelapa	36.344.440,00
15	Kecamatan Sumber Marga Telaga	10.270.833,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.233.333,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.747.619.889,00</b>

### 5.6.3.6 Koreksi Pendapatan Dimuka Tahun Lalu

Koreksi pendapatan dimuka untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp337.452.751,24 merupakan koreksi saldo awal pendapatan dimuka atas pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah yang disebabkan perubahan kebijakan pengakuan pendapatan pajak daerah.

### 5.6.3.7 Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya

Koreksi saldo awal aset lainnya untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.197.605.427,76) terdiri dari koreksi kesalahan *double* pencatatan, tindak lanjut pembayaran atas kurang volume dan koreksi kesalahan saldo awal atas aset kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi atas kesalahan *double* pencatatan sebesar (Rp213.637.592,00), yang terdiri dari:
  - a. Koreksi atas dobel catat kendaraan dinas nomor BG9031JZ pada Dinas Sosial senilai (Rp5.565.000,00).
  - b. Koreksi atas dobel catat motor Kawasaki KLX Nomor Polisi B 6319PVQ senilai (Rp26.873.796,00), motor motor Kawasaki KLX Nopol B 6320 PVQ senilai (Rp26.873.796,00) dan motor Yamaha Jupiter Z CW Nomor Polisi BG 5667 JZ senilai (Rp13.325.000,00) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik.
  - c. Koreksi atas Dobel catat mobil Mitsubishi Kuda 4G18-325249 Nopol BG 1038 JZ di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai (Rp141.000.000,00).
2. Tindak lanjut pembayaran atas kurang volume pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp225.167.466,92), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar (Rp758.800.369,84).
3. Koreksi kesalahan saldo awal atas aset kondisi rusak berat sebesar Rp1,00.

#### **5.6.3.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Lalu**

Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya tahun lalu sebesar Rp194.635.696,00 merupakan koreksi penyusutan aset lainnya kendaraan bermotor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Libang sebesar Rp154.325.000,00 dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol sebesar Rp40.310.696,00.

#### **5.6.4 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir sebesar Rp4.290.134.062.176,57 merupakan hasil perhitungan saldo ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyesuaian terkait Organisasi Perangkat Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 tahun 2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Tipe A.

OPD berbentuk dinas daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
2. Dinas Kesehatan Tipe A;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe A;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
6. Dinas Sosial Tipe A;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
12. Dinas Perhubungan Tipe A;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe A;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
18. Dinas Perikanan Tipe A;
19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A;
20. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A;
21. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A.

OPD berbentuk badan daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tipe B;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A.

OPD berbentuk kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Banyuasin I Tipe A;
2. Kecamatan Banyuasin II Tipe A;
3. Kecamatan Banyuasin III Tipe A;
4. Kecamatan Betung Tipe A;
5. Kecamatan Suak Tapeh Tipe A;
6. Kecamatan Sembawa Tipe A;
7. Kecamatan Pulau Rimau Tipe A;
8. Kecamatan Rantau Bayur Tipe A;
9. Kecamatan Rambutan Tipe A;
10. Kecamatan Talang Kelapa Tipe A;
11. Kecamatan Tungal Ilir Tipe A;
12. Kecamatan Tanjung Lago Tipe A;
13. Kecamatan Muara Telang Tipe A;
14. Kecamatan Muara Padang Tipe A;
15. Kecamatan Muara Sugihan Tipe A;
16. Kecamatan Makarti Jaya Tipe A;
17. Kecamatan Air Salek Tipe A;
18. Kecamatan Air Kumbang Tipe A;
19. Kecamatan Sumber Marga Telang Tipe A;
20. Kecamatan Karang Agung Ilir Tipe A;
21. Kecamatan Selat Penuguan Tipe A.

Berikut Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin:

**Gambar VI.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin**



Bupati Banyuasin menjalankan pemerintahannya selama periode 2018-2023, dengan ketetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-6079 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan dilantik pada tanggal 18 September 2018

## 6.2 Dampak dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyuasin

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga pada sector perekonomian. Oleh karenanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi COVID-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan Program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.

### 6.2.1 Kondisi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, hingga tanggal 30 September 2020 di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terkontaminasi sebanyak 1.672 kasus kontak erat, 238 kasus suspek, 24 kasus probable dan 351 kasus konfirmasi

### 6.2.2 Dampak Ekonomi dan Sosial akibat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuasin

Perekonomian Kabupaten Banyuasin triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi ditengah pandemi COVID-19. Ekonomi Kabupaten Banyuasin dengan output riil sebesar Rp28.687.956,8-triliun tercatat tumbuh sebesar 5,22%, melambat signifikan dibandingkan pencapaian pada bulan Oktober 2020 yang tumbuh -1,8% dan mulai membaik pada bulan November 2020 yang tumbuh sebesar -0,7%. Secara umum, perlambatan perekonomian Kabupaten Banyuasin merupakan dampak penyebaran Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global sehingga menyebabkan penurunan volume perdagangan global.

Tren kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia serta Kabupaten Banyuasin menunjukkan peningkatan sejak Maret 2020 hingga saat ini juga menyebabkan aktivitas ekonomi baik dalam skala besar maupun dalam aktivitas ekonomi sektor informal menjadi sangat terbatas. Harga komoditas unggulan Kabupaten Banyuasin khususnya karet, sawit dan tanaman pangan mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan kinerja lapangan subsektor perkebunan dan tanaman pangan.

Tertundanya penyelesaian beberapa pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka pengalihan anggaran (*refocusing*) untuk penanggulangan penyebaran Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi menyebabkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk infrastruktur jalan dan jembatan menjadi tertunda. Oleh sebab itu dengan adanya Pinjaman Daerah melalui Skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuasin dapat terlaksana guna memperlancar roda perekonomian masyarakat.

Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi Kabupaten Banyuasin pada triwulan III 2020 bersumber dari menurunnya kinerja seluruh lapangan usaha utama,

yaitu lapangan usaha perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Industri pengolahan berkontraksi sebesar 0,11%. Penurunan ini disebabkan oleh kinerja industri pengolahan karet dan sawit yang berkontraksi cukup dalam akibat melemahnya permintaan dan harga komoditas dipasar global.

Sementara itu, lapangan usaha pertanian tanaman pangan dan perikanan serta peternakan mengalami pertumbuhan positif meskipun melambat sebesar 1,2 %. hal ini disebabkan oleh masih tingginya permintaan domestik sebagai dampak kebijakan pemerintah untuk menyerap produksi beras, telur dan ikan, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program bantuan sosial.

Kegiatan lapangan usaha perdagangan juga berkontraksi seiring dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan jam operasional perdagangan untukantisipasi penyebaran Pandemi Covid-19. Selain itu kinerja lapangan usaha konstruksi juga berkontraksi seiring dengan tertundanya pengerjaan sejumlah proyek dengan adanya protokol kesehatan dan social distancing

Angka kemiskinan Kabupaten Banyuasin pada laporan triwulan III mengalami peningkatan yang searah dengan kondisi nasional. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin pada September 2020 mencapai 92.558 orang atau 11,33 % dari total penduduk Kabupaten Banyuasin sebesar 816.934 jiwa. Kondisi ini sedikit meningkat dibandingkan perkembangan penduduk miskin pada September 2019 yang sebesar 11,32 % dari total penduduk Kabupaten Banyuasin sebesar 814.492 jiwa. Peningkatan penduduk miskin pada periode laporan merupakan dampak dari meluasnya penyebaran Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya aktifitas ekonomi sehingga menurunkan pendapatan penduduk. Menurunnya aktivitas ekonomi pelaku usaha juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah pekerja yang dirumahkan maupun di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kabupaten Banyuasin, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin mencatat sejak April s.d September 2020 sebanyak 1167 pekerja di Kabupaten Banyuasin terdampak pandemi Covid-19, terdiri dari 186 pekerja dirumahkan dan 937 orang merupakan pekerja informal.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin baik di daerah pada periode Juli 2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin menjadi 96.550 orang dibanding posisi Maret 2020 sebesar 86.895 orang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah perkotaan berpotensi lebih besar terkena dampak ekonomi penyebaran Pandemi Covid-19 dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial seperti penutupan tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan, menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini akibat adanya pembatasan aktivitas, dan pelemahan harga komoditas global pertanian dan perkebunan yang menyebabkan berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga serta tertundanya penyelesaian beberapa pembangunan Infrastruktur Proyek strategis Kabupaten Banyuasin dan akibat pengalihan anggaran untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi menyebabkan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk infrastruktur menjadi menurun.

Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupaya keras untuk memulihkan kondisi kegiatan perekonomian masyarakat tanpa memperburuk penyebaran COVID-19. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang dialami akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Kabupaten Banyuasin berencana akan mengusulkan Pinjaman PEN Daerah sebagai salah satu langkah untuk menutupi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam merealisasikan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Ada kriteria sebagai landasan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan Pinjaman PEN Daerah adalah :

1. Bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan area terdampak COVID-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian masyarakat terhambat; dan
2. Adanya kegiatan-kegiatan di daerah yang tertunda akibat refocusing dana untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

Pinjaman PEN Daerah akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dari dua prioritas utama pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memberikan pengaruh antara lain :

1. Tersedianya lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja pada prioritas infrastruktur jalan dan jembatan sebanyak 166.000 hari orang kerja (HOK), pada prioritas infrastruktur ketahanan pangan dan ekonomi sebanyak 16.000 hari orang kerja (HOK).
2. Membangkitkan perekonomian pada sektor material konstruksi pada prioritas infrastruktur jalan dan jembatan sebanyak 12 (dua belas) jenis material terdiri dari : agregat, tanah timbunan, batu kali, kawat, paku, pipa besi galvanis, geotekstil, semen, pasir, split, besi beton dan kayu.
3. Membangkitkan kegiatan perekonomian masyarakat di sekitar proyek antara lain kegiatan belanja makan minum dan belanja kebutuhan harian tenaga kerja proyek.
4. Pasca konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan diharapkan dapat menurunkan waktu tempuh sehingga dapat menurunkan ongkos angkut komoditi sehingga dapat meningkatkan daya saing harga komoditi, selain itu juga akan mendorong meningkatnya nilai daya saing daerah yang berdampak kepada gairah investasi di daerah.

Formatted: Header, Indent: Left: 1,25 cm

Formatted: Header

Formatted: Font: 8 pt

## VII. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Formatted: English (United Kingdom)

Formatted: English (United Kingdom)

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 secara keseluruhan.

Formatted



## APBD KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	PERDA NOMOR 07 TAHUN 2019	PERBUB NOMOR 32 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 95 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 100 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 120 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 162 TAHUN 2020	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 239 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 245 TAHUN 2020
		APBD INDUK	PERGESERAN I	REFOCUSING I	REFOCUSING II	REFOCUSING III	PERGESERAN V	APBD-PERUBAHAN	PERGESERAN I	PERGESERAN II
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.225.148.304.112,71</b>	<b>2.225.148.304.112,71</b>	<b>2.225.148.304.112,71</b>	<b>2.051.847.298.079,72</b>	<b>2.051.847.298.079,72</b>	<b>2.100.847.298.079,72</b>	<b>2.271.515.113.204,43</b>	<b>2.281.921.450.204,43</b>	<b>2.288.039.403.432,43</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>184.000.411.307,71</b>	<b>184.000.411.307,71</b>	<b>184.000.411.307,71</b>	<b>192.764.120.774,72</b>	<b>192.764.120.774,72</b>	<b>192.764.120.774,72</b>	<b>229.786.620.409,43</b>	<b>229.786.620.409,43</b>	<b>229.786.620.409,43</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	126.025.000.000,00	126.025.000.000,00	126.025.000.000,00	126.025.000.000,00	126.025.000.000,00	126.025.000.000,00	153.730.000.000,00	153.730.000.000,00	153.730.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.328.194.125,00	9.328.194.125,00	9.328.194.125,00	8.310.249.125,00	8.310.249.125,00	8.310.249.125,00	11.788.193.468,75	11.788.193.468,75	11.788.193.468,75
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.411.498.182,71	5.411.498.182,71	5.411.498.182,71	6.427.468.649,72	6.427.468.649,72	6.427.468.649,72	6.427.468.649,72	6.427.468.649,72	6.427.468.649,72
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.235.719.000,00	43.235.719.000,00	43.235.719.000,00	52.001.403.000,00	52.001.403.000,00	52.001.403.000,00	57.840.958.290,96	57.840.958.290,96	57.840.958.290,96
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.549.026.241.500,00</b>	<b>1.549.026.241.500,00</b>	<b>1.549.026.241.500,00</b>	<b>1.370.073.942.000,00</b>	<b>1.370.073.942.000,00</b>	<b>1.370.073.942.000,00</b>	<b>1.432.279.834.563,00</b>	<b>1.432.279.834.563,00</b>	<b>1.432.397.787.791,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	194.789.091.500,00	194.789.091.500,00	194.789.091.500,00	149.684.035.000,00	149.684.035.000,00	149.684.035.000,00	202.977.633.563,00	202.977.633.563,00	202.977.633.563,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.003.360.983.000,00	1.003.360.983.000,00	1.003.360.983.000,00	886.097.109.000,00	886.097.109.000,00	886.097.109.000,00	886.097.109.000,00	886.097.109.000,00	886.097.109.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	350.876.167.000,00	350.876.167.000,00	350.876.167.000,00	334.292.798.000,00	334.292.798.000,00	334.292.798.000,00	343.205.092.000,00	343.205.092.000,00	343.323.045.228,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>492.121.651.305,00</b>	<b>492.121.651.305,00</b>	<b>492.121.651.305,00</b>	<b>489.009.235.305,00</b>	<b>489.009.235.305,00</b>	<b>538.009.235.305,00</b>	<b>609.448.658.232,00</b>	<b>619.854.995.232,00</b>	<b>625.854.995.232,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	101.803.600.000,00	101.803.600.000,00	101.803.600.000,00	101.803.600.000,00	101.803.600.000,00	101.803.600.000,00	126.451.640.000,00	126.451.640.000,00	126.451.640.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.885.488.305,00	74.885.488.305,00	74.885.488.305,00	74.885.488.305,00	74.885.488.305,00	74.885.488.305,00	97.529.207.232,00	97.529.207.232,00	97.529.207.232,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.556.980.000,00	9.556.980.000,00	9.556.980.000,00	9.556.980.000,00	9.556.980.000,00	9.556.980.000,00	23.626.912.000,00	34.033.249.000,00	34.033.249.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.651.100.000,00	5.651.100.000,00	5.651.100.000,00	5.651.100.000,00	5.651.100.000,00	54.651.100.000,00	64.728.832.000,00	64.728.832.000,00	70.728.832.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	300.224.483.000,00	300.224.483.000,00	300.224.483.000,00	297.112.067.000,00	297.112.067.000,00	297.112.067.000,00	297.112.067.000,00	297.112.067.000,00	297.112.067.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.439.267.393.088,36</b>	<b>2.439.267.393.088,36</b>	<b>2.439.267.393.088,36</b>	<b>2.265.966.387.055,37</b>	<b>2.140.796.637.055,37</b>	<b>2.189.796.637.055,37</b>	<b>2.612.499.945.331,94</b>	<b>2.622.906.282.331,94</b>	<b>2.629.024.235.559,94</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.227.001.586.028,68</b>	<b>1.227.001.586.028,68</b>	<b>1.265.902.522.975,65</b>	<b>1.264.909.458.538,82</b>	<b>1.368.948.958.774,43</b>	<b>1.368.948.958.774,43</b>	<b>1.282.259.127.658,07</b>	<b>1.292.665.464.658,07</b>	<b>1.292.665.464.658,07</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	767.934.359.462,29	767.934.359.462,29	764.454.559.462,29	763.681.115.462,29	765.243.615.462,29	765.243.615.462,29	749.153.248.981,04	749.153.248.981,04	749.153.248.981,04
2.1.2	Belanja Bunga	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	6.180.000.000,00	6.180.000.000,00	6.180.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	23.275.200.000,00	23.275.200.000,00	23.275.200.000,00	23.343.800.000,00	23.343.800.000,00	23.343.800.000,00	23.018.800.000,00	23.018.800.000,00	23.018.800.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	424.306.632.090,01	424.306.632.090,01	424.306.632.090,01	421.194.216.090,01	421.194.216.090,01	421.194.216.090,01	421.004.417.284,50	421.004.417.284,50	418.915.997.476,50
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.885.394.476,38	3.885.394.476,38	46.266.131.423,35	49.090.326.986,52	151.567.327.222,13	151.567.327.222,13	82.902.661.392,53	93.308.998.392,53	95.397.418.200,53

NO	URAIAN	PERDA NOMOR 07 TAHUN 2019	PERBUB NOMOR 32 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 95 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 100 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 120 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 162 TAHUN 2020	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 239 TAHUN 2020	PERBUB NOMOR 245 TAHUN 2020
		APBD INDUK	PERGESERAN I	REFOCUSING I	REFOCUSING II	REFOCUSING III	PERGESERAN V	APBD-PERUBAHAN	PERGESERAN I	PERGESERAN II
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.212.265.807.059,68	1.212.265.807.059,68	1.173.364.870.112,71	1.001.056.928.516,55	771.847.678.280,94	820.847.678.280,94	1.330.240.817.673,87	1.330.240.817.673,87	1.336.358.770.901,87
2.2.1	Belanja Pegawai	53.895.483.000,00	53.975.533.000,00	51.747.986.000,00	34.314.168.000,00	34.042.668.000,00	34.042.668.000,00	42.690.221.500,00	42.690.221.500,00	42.690.221.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	705.280.659.327,77	705.200.609.327,77	673.762.411.093,57	560.510.435.403,21	475.088.632.478,09	482.088.632.478,09	688.530.255.595,19	688.530.255.595,19	694.648.208.823,19
2.2.3	Belanja Modal	453.089.664.731,91	453.089.664.731,91	447.854.473.019,14	406.232.325.113,34	262.716.377.802,85	304.716.377.802,85	599.020.340.578,68	599.020.340.578,68	599.020.340.578,68
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(214.119.088.975,65)</b>	<b>(214.119.088.975,65)</b>	<b>(214.119.088.975,65)</b>	<b>(214.119.088.975,65)</b>	<b>(88.949.338.975,65)</b>	<b>(88.949.338.975,65)</b>	<b>(340.984.832.127,51)</b>	<b>(340.984.832.127,51)</b>	<b>(340.984.832.127,51)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>									
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>287.319.088.975,65</b>	<b>287.319.088.975,65</b>	<b>287.319.088.975,65</b>	<b>287.319.088.975,65</b>	<b>162.149.338.975,65</b>	<b>162.149.338.975,65</b>	<b>430.501.991.249,51</b>	<b>430.501.991.249,51</b>	<b>430.501.991.249,51</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.250.438.975,65	75.250.438.975,65	75.250.438.975,65	75.250.438.975,65	75.250.438.975,65	75.250.438.975,65	157.434.947.861,94	157.434.947.861,94	157.434.947.861,94
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.068.650.000,00	212.068.650.000,00	212.068.650.000,00	212.068.650.000,00	86.898.900.000,00	86.898.900.000,00	273.067.043.387,57	273.067.043.387,57	273.067.043.387,57
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>73.200.000.000,00</b>	<b>73.200.000.000,00</b>	<b>73.200.000.000,00</b>	<b>73.200.000.000,00</b>	<b>73.200.000.000,00</b>	<b>73.200.000.000,00</b>	<b>89.517.159.122,00</b>	<b>89.517.159.122,00</b>	<b>89.517.159.122,00</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	11.369.054.785,00	11.369.054.785,00	11.369.054.785,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	78.148.104.337,00	78.148.104.337,00	78.148.104.337,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>214.119.088.975,65</b>	<b>214.119.088.975,65</b>	<b>214.119.088.975,65</b>	<b>214.119.088.975,65</b>	<b>88.949.338.975,65</b>	<b>88.949.338.975,65</b>	<b>340.984.832.127,51</b>	<b>340.984.832.127,51</b>	<b>340.984.832.127,51</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

**REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BANYUASIN  
PER 31 DESEMBER 2020**

NO	Desa	ANGGARAN	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5 (3-4)	6
<b>1</b>		<b>13.993.936.000,00</b>	<b>13.634.695.600,00</b>	<b>359.240.400,00</b>	
1	Sungai Rebo	1.779.354.000,00	1.779.354.000,00	0,00	
2	Sungai Gerong	1.106.486.000,00	1.106.486.000,00	0,00	
3	Merah Mata	1.667.623.000,00	1.667.623.000,00	0,00	
4	Perajen	1.103.996.000,00	1.103.996.000,00	0,00	
5	Cinta Manis Lama	1.193.198.000,00	1.193.198.000,00	0,00	
6	Perambahan	1.202.091.000,00	1.202.091.000,00	0,00	
7	Pematang Palas	1.320.415.000,00	1.320.415.000,00	0,00	
8	Tirto Sari	1.101.686.000,00	1.101.686.000,00	0,00	
9	Pulauborang	1.817.816.000,00	1.458.575.600,00	359.240.400,00	TIDAK SALUR TAHAP III (20%)
10	Perambahan Baru	843.102.000,00	843.102.000,00	0,00	
11	Duren Ijo	858.169.000,00	858.169.000,00	0,00	
<b>2</b>		<b>12.501.024.000,00</b>	<b>12.501.024.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Sungsang I	1.692.524.000,00	1.692.524.000,00	0,00	
2	Sungsang II	1.897.150.000,00	1.897.150.000,00	0,00	
3	Sungsang III	1.335.251.000,00	1.335.251.000,00	0,00	
4	Sungsang IV	1.224.899.000,00	1.224.899.000,00	0,00	
5	Teluk Payo	1.126.642.000,00	1.126.642.000,00	0,00	
6	Tanah Pilih	1.034.585.000,00	1.034.585.000,00	0,00	
7	Perajen Jaya	890.738.000,00	890.738.000,00	0,00	
8	Rimau Sungsang	1.208.192.000,00	1.208.192.000,00	0,00	
9	Marga Sungsang	1.215.502.000,00	1.215.502.000,00	0,00	
10	Muara Sungsang	875.541.000,00	875.541.000,00	0,00	
<b>3</b>		<b>17.318.464.000,00</b>	<b>17.318.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Langkan	998.959.000,00	998.959.000,00	0,00	
2	Pangkalan Panji	910.697.000,00	910.697.000,00	0,00	
3	Lubuk Saung	834.486.000,00	834.486.000,00	0,00	
4	Ujung Tanjung	904.393.000,00	904.393.000,00	0,00	
5	Sidang Mas	831.303.000,00	831.303.000,00	0,00	
6	Galang Tinggi	827.574.000,00	827.574.000,00	0,00	
7	Petaling	795.658.000,00	795.658.000,00	0,00	
8	Rimba Alai	796.067.000,00	796.067.000,00	0,00	
9	Pelajau Ilir	764.623.000,00	764.623.000,00	0,00	
10	Regan Agung	792.590.000,00	792.590.000,00	0,00	
11	Suka Mulia	804.514.000,00	804.514.000,00	0,00	
12	Tanjung Agung	760.980.000,00	760.980.000,00	0,00	
13	Tanjung Menang	817.618.000,00	817.618.000,00	0,00	
14	Sri Bandung	841.843.000,00	841.843.000,00	0,00	
15	Pelaju	786.774.000,00	786.774.000,00	0,00	
16	Tanjung Beringin	779.908.000,00	779.908.000,00	0,00	
17	Terentang	801.036.000,00	801.036.000,00	0,00	
18	Tanjung Kepayang	782.861.000,00	782.861.000,00	0,00	
19	Sukaraja Baru	807.269.000,00	807.269.000,00	0,00	
20	Terlangu	835.188.000,00	835.188.000,00	0,00	
21	Rimba Balai	844.123.000,00	844.123.000,00	0,00	
<b>4</b>		<b>15.556.490.000,00</b>	<b>15.556.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Teluk Betung	1.176.895.000,00	1.176.895.000,00	0,00	
2	Mukut	855.865.000,00	855.865.000,00	0,00	
3	Sumber Rejeki	1.099.417.000,00	1.099.417.000,00	0,00	
4	Dana Mulya	828.933.000,00	828.933.000,00	0,00	
5	Wana Mukti	980.738.000,00	980.738.000,00	0,00	
6	Budi Asih	921.366.000,00	921.366.000,00	0,00	
7	Rukun Makmur	893.666.000,00	893.666.000,00	0,00	
8	Nunggal Sari	1.025.233.000,00	1.025.233.000,00	0,00	
9	Majatra	866.346.000,00	866.346.000,00	0,00	
10	Wonosari	1.015.403.000,00	1.015.403.000,00	0,00	
11	Sumber Mulya	858.508.000,00	858.508.000,00	0,00	
12	Rawa Banda	868.643.000,00	868.643.000,00	0,00	
13	Senda Mukti	821.330.000,00	821.330.000,00	0,00	
14	Tirta Mulya	802.703.000,00	802.703.000,00	0,00	

NO	Desa	ANGGARAN	REALISASI	SISA	KET
15	Banjar Sari	823.525.000,00	823.525.000,00	0,00	
16	Buana Murti	925.177.000,00	925.177.000,00	0,00	
17	Tabuan Asri	792.742.000,00	792.742.000,00	0,00	
<b>5</b>		<b>10.041.654.000,00</b>	<b>10.041.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Pulau Rajak	779.039.000,00	779.039.000,00	0,00	
2	Bukit	1.070.805.000,00	1.070.805.000,00	0,00	
3	Sri Kembang	955.612.000,00	955.612.000,00	0,00	
4	Lubuk Karet	1.220.233.000,00	1.220.233.000,00	0,00	
5	Taja Mulya	1.475.920.000,00	1.475.920.000,00	0,00	
6	Taja Raya I	1.052.464.000,00	1.052.464.000,00	0,00	
7	Taja Indah	1.539.319.000,00	1.539.319.000,00	0,00	
8	Taja Raya II	828.787.000,00	828.787.000,00	0,00	
9	Suka Mulya	1.119.475.000,00	1.119.475.000,00	0,00	
<b>6</b>		<b>18.242.402.000,00</b>	<b>18.242.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Kebon Sahang	854.181.000,00	854.181.000,00	0,00	
2	Siju	1.038.685.000,00	1.038.685.000,00	0,00	
3	Tanah Lembak	902.611.000,00	902.611.000,00	0,00	
4	Parit	838.532.000,00	838.532.000,00	0,00	
5	Pelajau	943.755.000,00	943.755.000,00	0,00	
6	Suka Pindah	981.972.000,00	981.972.000,00	0,00	
7	Baru	822.044.000,00	822.044.000,00	0,00	
8	Tanjung Kerang	954.492.000,00	954.492.000,00	0,00	
9	Rambutan	955.215.000,00	955.215.000,00	0,00	
10	Tanjung Merbu	949.769.000,00	949.769.000,00	0,00	
11	Sako	828.917.000,00	828.917.000,00	0,00	
12	Gelebak Dalam	884.933.000,00	884.933.000,00	0,00	
13	Menten	951.557.000,00	951.557.000,00	0,00	
14	Pangkalan Gelebak	931.452.000,00	931.452.000,00	0,00	
15	Sungai Dua	1.042.445.000,00	1.042.445.000,00	0,00	
16	Sungaipinang	1.214.061.000,00	1.214.061.000,00	0,00	
17	Sungai Kedukan	1.471.904.000,00	1.471.904.000,00	0,00	
18	Durian Gadis	766.200.000,00	766.200.000,00	0,00	
19	Pulau Parang	909.677.000,00	909.677.000,00	0,00	
<b>7</b>		<b>15.045.014.000,00</b>	<b>15.045.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Muara Padang	1.335.929.000,00	1.335.929.000,00	0,00	
2	Tanjung Baru	1.155.124.000,00	1.155.124.000,00	0,00	
3	Karang Anyar	933.307.000,00	933.307.000,00	0,00	
4	Purwodadi	1.017.515.000,00	1.017.515.000,00	0,00	
5	Sumber Makmur	1.016.143.000,00	1.016.143.000,00	0,00	
6	Air Gading	856.162.000,00	856.162.000,00	0,00	
7	Tirto Raharjo	1.051.349.000,00	1.051.349.000,00	0,00	
8	Daya Utama	861.598.000,00	861.598.000,00	0,00	
9	Daya Makmur	1.082.928.000,00	1.082.928.000,00	0,00	
10	Sido Mulyo 18	883.720.000,00	883.720.000,00	0,00	
11	Sido Rejo	1.024.509.000,00	1.024.509.000,00	0,00	
12	Sido Mulyo 20	978.270.000,00	978.270.000,00	0,00	
13	Margo Mulyo 20	970.784.000,00	970.784.000,00	0,00	
14	Margo Sugihan	962.102.000,00	962.102.000,00	0,00	
15	Tirta Jaya	915.574.000,00	915.574.000,00	0,00	
<b>8</b>		<b>18.303.882.000,00</b>	<b>18.303.882.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Marga Rahayu	1.108.812.000,00	1.108.812.000,00	0,00	
2	Sumber Mulya	1.168.198.000,00	1.168.198.000,00	0,00	
3	Sumber Hidup	1.043.009.000,00	1.043.009.000,00	0,00	
4	Telang Rejo	1.068.977.000,00	1.068.977.000,00	0,00	
5	Telang Jaya	1.070.717.000,00	1.070.717.000,00	0,00	
6	Telang Makmur	1.112.193.000,00	1.112.193.000,00	0,00	
7	Telang Karya	1.282.585.000,00	1.282.585.000,00	0,00	
8	Panca Mukti	1.479.096.000,00	1.479.096.000,00	0,00	
9	Mukti Jaya	1.101.152.000,00	1.101.152.000,00	0,00	
10	Mekar Sari	1.137.882.000,00	1.137.882.000,00	0,00	
11	Talang Indah	1.244.743.000,00	1.244.743.000,00	0,00	
12	Mekar Mukti	945.779.000,00	945.779.000,00	0,00	
13	Upang Jaya	1.405.064.000,00	1.405.064.000,00	0,00	
14	Upang Karya	1.197.556.000,00	1.197.556.000,00	0,00	
15	Upang Cemara	892.492.000,00	892.492.000,00	0,00	

NO	Desa	ANGGARAN	REALISASI	SISA	KET
16	Upang Ceria	1.045.627.000,00	1.045.627.000,00	0,00	
<b>9</b>		<b>10.990.049.000,00</b>	<b>10.990.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Delta Upang	1.102.303.000,00	1.102.303.000,00	0,00	
2	Pendowo Harjo	922.649.000,00	922.649.000,00	0,00	
3	Pangestu	890.788.000,00	890.788.000,00	0,00	
4	Tirta Kencana	983.116.000,00	983.116.000,00	0,00	
5	Upang Makmur	1.157.203.000,00	1.157.203.000,00	0,00	
6	Upang Mulya	936.751.000,00	936.751.000,00	0,00	
7	Purwosari	857.497.000,00	857.497.000,00	0,00	
8	Tanjung Mas	1.198.930.000,00	1.198.930.000,00	0,00	
9	Tanjung Baru	858.198.000,00	858.198.000,00	0,00	
10	Sungai Semut	1.144.541.000,00	1.144.541.000,00	0,00	
11	Muara Baru	938.073.000,00	938.073.000,00	0,00	
<b>10</b>		<b>6.469.214.000,00</b>	<b>6.469.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Sungai Rengit	1.025.447.000,00	1.025.447.000,00	0,00	
2	Pangkalan Benteng	907.853.000,00	907.853.000,00	0,00	
3	Gasing	1.330.747.000,00	1.330.747.000,00	0,00	
4	Talang Buluh	840.089.000,00	840.089.000,00	0,00	
5	Sungai Rengat Murni	918.750.000,00	918.750.000,00	0,00	
6	Kenten Laut	1.446.328.000,00	1.446.328.000,00	0,00	
<b>11</b>		<b>24.908.325.000,00</b>	<b>24.908.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Muara Abab	1.081.063.000,00	1.081.063.000,00	0,00	
2	Tanjung Pasir	1.156.256.000,00	1.156.256.000,00	0,00	
3	Tanjung Tiga	1.225.722.000,00	1.225.722.000,00	0,00	
4	Rantau Bayur	1.184.081.000,00	1.184.081.000,00	0,00	
5	Pagar Bulan	1.190.519.000,00	1.190.519.000,00	0,00	
6	Kemang Bejalu	1.102.747.000,00	1.102.747.000,00	0,00	
7	Tanjung Menang	1.172.059.000,00	1.172.059.000,00	0,00	
8	Srijaya	1.189.094.000,00	1.189.094.000,00	0,00	
9	Sejagung	1.461.676.000,00	1.461.676.000,00	0,00	
10	Sungai Pinang	1.241.781.000,00	1.241.781.000,00	0,00	
11	Semuntul	1.429.778.000,00	1.429.778.000,00	0,00	
12	Lebung	1.771.050.000,00	1.771.050.000,00	0,00	
13	Lubuk Rengas	911.402.000,00	911.402.000,00	0,00	
14	Paldas	1.629.662.000,00	1.629.662.000,00	0,00	
15	Tebing Abang	1.402.611.000,00	1.402.611.000,00	0,00	
16	Talang Kemang	900.712.000,00	900.712.000,00	0,00	
17	Rantau Harapan	1.205.862.000,00	1.205.862.000,00	0,00	
18	Penandingan	854.681.000,00	854.681.000,00	0,00	
19	Sungai Naik	828.784.000,00	828.784.000,00	0,00	
20	Sungai Lilin	1.094.540.000,00	1.094.540.000,00	0,00	
21	Sukarela	874.245.000,00	874.245.000,00	0,00	
<b>12</b>		<b>16.474.838.000,00</b>	<b>16.474.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Telang Sari	897.388.000,00	897.388.000,00	0,00	
2	Mulya Sari	890.165.000,00	890.165.000,00	0,00	
3	Purwosari	1.065.293.000,00	1.065.293.000,00	0,00	
4	Sri Menanti	887.248.000,00	887.248.000,00	0,00	
5	Sebalik	1.227.299.000,00	1.227.299.000,00	0,00	
6	Tanjung Lago	1.521.958.000,00	1.521.958.000,00	0,00	
7	Kuala Puntian	1.226.993.000,00	1.226.993.000,00	0,00	
8	Suka Tani	952.025.000,00	952.025.000,00	0,00	
9	Suka Damai	1.084.290.000,00	1.084.290.000,00	0,00	
10	Banyu Urip	994.344.000,00	994.344.000,00	0,00	
11	Bangun Sari	1.173.072.000,00	1.173.072.000,00	0,00	
12	Sumber Mekar Mukti	1.047.472.000,00	1.047.472.000,00	0,00	
13	Muara Sugih	1.093.677.000,00	1.093.677.000,00	0,00	
14	Manggar Raya	956.188.000,00	956.188.000,00	0,00	
15	Bunga Karang	1.457.426.000,00	1.457.426.000,00	0,00	
<b>13</b>		<b>22.532.074.000,00</b>	<b>22.532.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Margo Mulyo 16	900.133.000,00	900.133.000,00	0,00	
2	Rejo Sari	1.088.638.000,00	1.088.638.000,00	0,00	
3	Daya Murni	1.039.311.000,00	1.039.311.000,00	0,00	
4	Daya Bangun Harjo	1.114.111.000,00	1.114.111.000,00	0,00	
5	Sumber Mulyo	948.503.000,00	948.503.000,00	0,00	
6	Sugih Waras	1.040.123.000,00	1.040.123.000,00	0,00	

NO	Desa	ANGGARAN	REALISASI	SISA	KET
7	Indrapura	1.108.221.000,00	1.108.221.000,00	0,00	
8	Cendana	1.041.199.000,00	1.041.199.000,00	0,00	
9	Argo Mulyo	1.046.126.000,00	1.046.126.000,00	0,00	
10	Tirta Harja	885.275.000,00	885.275.000,00	0,00	
11	Tirta Mulya	843.930.000,00	843.930.000,00	0,00	
12	Daya Kesuma	1.015.581.000,00	1.015.581.000,00	0,00	
13	Margo Rukun	933.720.000,00	933.720.000,00	0,00	
14	Ganesha Mukti	937.911.000,00	937.911.000,00	0,00	
15	Timbul Jaya	855.956.000,00	855.956.000,00	0,00	
16	Jalur Mulya	1.114.923.000,00	1.114.923.000,00	0,00	
17	Gilirang	1.337.692.000,00	1.337.692.000,00	0,00	
18	Juru Taro	1.517.610.000,00	1.517.610.000,00	0,00	
19	Kuala Sugihan	987.418.000,00	987.418.000,00	0,00	
20	Beringin Agung	1.042.351.000,00	1.042.351.000,00	0,00	
21	Mekar Jaya	882.130.000,00	882.130.000,00	0,00	
22	Sido Makmur	851.212.000,00	851.212.000,00	0,00	
<b>14</b>		<b>14.919.886.000,00</b>	<b>14.919.886.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Air Solok Batu	1.010.664.000,00	1.010.664.000,00	0,00	
2	Sri Mulyo	1.063.677.000,00	1.063.677.000,00	0,00	
3	Srikaton	1.070.025.000,00	1.070.025.000,00	0,00	
4	Sidoarjo	1.025.398.000,00	1.025.398.000,00	0,00	
5	Bintaran	942.842.000,00	942.842.000,00	0,00	
6	Damar Wulan	966.948.000,00	966.948.000,00	0,00	
7	Enggal Rejo	985.604.000,00	985.604.000,00	0,00	
8	Saleh Jaya	983.032.000,00	983.032.000,00	0,00	
9	Saleh Agung	967.303.000,00	967.303.000,00	0,00	
10	Saleh Mulya	791.042.000,00	791.042.000,00	0,00	
11	Saleh Mukti	1.070.511.000,00	1.070.511.000,00	0,00	
12	Saleh Makmur	1.086.342.000,00	1.086.342.000,00	0,00	
13	Upang	1.374.840.000,00	1.374.840.000,00	0,00	
14	Upang Marga	1.581.658.000,00	1.581.658.000,00	0,00	
<b>15</b>		<b>12.323.846.000,00</b>	<b>12.323.846.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Bentayan	1.007.881.000,00	1.007.881.000,00	0,00	
2	Teluk Tenggulang	1.031.820.000,00	1.031.820.000,00	0,00	
3	Suka Mulya	993.372.000,00	993.372.000,00	0,00	
4	Suka Raja	797.525.000,00	797.525.000,00	0,00	
5	Karang Anyar	789.637.000,00	789.637.000,00	0,00	
6	Karang Asem	828.089.000,00	828.089.000,00	0,00	
7	Marga Rahayu	818.622.000,00	818.622.000,00	0,00	
8	Sido Mulyo	850.726.000,00	850.726.000,00	0,00	
9	Keluang	1.066.077.000,00	1.066.077.000,00	0,00	
10	Bumi Serdang	801.857.000,00	801.857.000,00	0,00	
11	Karang Mulya	878.403.000,00	878.403.000,00	0,00	
12	Suka Karya	858.973.000,00	858.973.000,00	0,00	
13	Panca Mulya	788.946.000,00	788.946.000,00	0,00	
14	Suka Jaya	811.918.000,00	811.918.000,00	0,00	
<b>16</b>		<b>9.922.683.000,00</b>	<b>9.922.683.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Talang Ipuh	826.108.000,00	826.108.000,00	0,00	
2	Durian Daun	802.610.000,00	802.610.000,00	0,00	
3	Lubuk Lancang	1.081.197.000,00	1.081.197.000,00	0,00	
4	Biyuku	878.093.000,00	878.093.000,00	0,00	
5	Bengkuang	819.034.000,00	819.034.000,00	0,00	
6	Rimba Terap	839.550.000,00	839.550.000,00	0,00	
7	Sedang	972.749.000,00	972.749.000,00	0,00	
8	Tanjung Laut	1.088.778.000,00	1.088.778.000,00	0,00	
9	Air Senggeris	772.244.000,00	772.244.000,00	0,00	
10	Meranti	863.384.000,00	863.384.000,00	0,00	
11	Sukaraja	978.936.000,00	978.936.000,00	0,00	
<b>17</b>		<b>9.691.062.000,00</b>	<b>9.691.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Mainan	995.669.000,00	995.669.000,00	0,00	
2	Santan Sari	831.272.000,00	831.272.000,00	0,00	
3	Limau	1.048.805.000,00	1.048.805.000,00	0,00	
4	Rejodadi	869.770.000,00	869.770.000,00	0,00	
5	Lalang Sembawa	925.417.000,00	925.417.000,00	0,00	
6	Muara Damai	857.121.000,00	857.121.000,00	0,00	

NO	Desa	ANGGARAN	REALISASI	SISA	KET
7	Pulau Harapan	944.883.000,00	944.883.000,00	0,00	
8	Purwosari	851.631.000,00	851.631.000,00	0,00	
9	Limbang Mulia	780.747.000,00	780.747.000,00	0,00	
10	Sako Makmur	778.285.000,00	778.285.000,00	0,00	
11	Pulau Muning	807.462.000,00	807.462.000,00	0,00	
<b>18</b>		<b>12.079.330.000,00</b>	<b>12.079.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Terusan Dalam	1.226.519.000,00	1.226.519.000,00	0,00	
2	Karang Anyar	1.241.889.000,00	1.241.889.000,00	0,00	
3	Muara Telang	1.309.039.000,00	1.309.039.000,00	0,00	
4	Terusan Tengah	1.191.139.000,00	1.191.139.000,00	0,00	
5	Sumber Jaya	1.064.255.000,00	1.064.255.000,00	0,00	
6	Karang Baru	1.462.239.000,00	1.462.239.000,00	0,00	
7	Muara Telang Marga	1.239.786.000,00	1.239.786.000,00	0,00	
8	Terusan Muara	1.069.640.000,00	1.069.640.000,00	0,00	
9	Talang Lubuk	1.212.990.000,00	1.212.990.000,00	0,00	
10	Sri Tiga	1.061.834.000,00	1.061.834.000,00	0,00	
<b>19</b>		<b>14.979.051.000,00</b>	<b>14.979.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Cinta Manis Baru	1.002.478.000,00	1.002.478.000,00	0,00	
2	Sido Makmur	872.641.000,00	872.641.000,00	0,00	
3	Sidomulyo	1.006.572.000,00	1.006.572.000,00	0,00	
4	Nusa Makmur	1.034.236.000,00	1.034.236.000,00	0,00	
5	Rimba Jaya	1.063.936.000,00	1.063.936.000,00	0,00	
6	Teluk Tenggirik	1.183.986.000,00	1.183.986.000,00	0,00	
7	Sebusus	897.691.000,00	897.691.000,00	0,00	
8	Padang Rejo	770.264.000,00	770.264.000,00	0,00	
9	Kumbang Padang Permata	810.608.000,00	810.608.000,00	0,00	
10	Muara Baru	869.377.000,00	869.377.000,00	0,00	
11	Tirta Makmur	876.295.000,00	876.295.000,00	0,00	
12	Panca Mulya	843.973.000,00	843.973.000,00	0,00	
13	Budi Mulya	873.461.000,00	873.461.000,00	0,00	
14	Panca Desa	895.886.000,00	895.886.000,00	0,00	
15	Air Kumbang Bakti	811.018.000,00	811.018.000,00	0,00	
16	Sebokor	1.166.629.000,00	1.166.629.000,00	0,00	
<b>20</b>		<b>7.795.953.000,00</b>	<b>7.795.953.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Karang Sari	1.165.027.000,00	1.165.027.000,00	0,00	
2	Maju Ria	1.136.315.000,00	1.136.315.000,00	0,00	
3	Sri Agung	1.113.043.000,00	1.113.043.000,00	0,00	
4	Sumber Rejeki	1.190.624.000,00	1.190.624.000,00	0,00	
5	Tabala Jaya	1.150.525.000,00	1.150.525.000,00	0,00	
6	Jati Sari	925.751.000,00	925.751.000,00	0,00	
7	Mekar Sari	1.114.668.000,00	1.114.668.000,00	0,00	
<b>21</b>		<b>13.022.890.000,00</b>	<b>12.839.575.600,00</b>	<b>183.314.400,00</b>	
1	Penuguan	1.744.223.000,00	1.744.223.000,00	0,00	
2	Sumber Rejo	916.572.000,00	733.257.600,00	183.314.400,00	TIDAK SALUR TAHAP III (20%)
3	Sumber Mukti	1.345.721.000,00	1.345.721.000,00	0,00	
4	Sumber Agung	905.843.000,00	905.843.000,00	0,00	
5	Wonodadi	852.699.000,00	852.699.000,00	0,00	
6	Mekar Sari	1.112.097.000,00	1.112.097.000,00	0,00	
7	Songo Makmur	854.268.000,00	854.268.000,00	0,00	
8	Karang Manunggal	1.088.108.000,00	1.088.108.000,00	0,00	
9	Purwodadi	878.731.000,00	878.731.000,00	0,00	
10	Ringin Harjo	1.018.874.000,00	1.018.874.000,00	0,00	
11	Bumi Rejo	1.141.496.000,00	1.141.496.000,00	0,00	
12	Kelapa Dua	1.164.258.000,00	1.164.258.000,00	0,00	
	<b>Total</b>	<b>297.112.067.000,00</b>	<b>296.569.512.200,00</b>	<b>542.554.800,00</b>	

## RINCIAN BELANJA HIBAH UANG PPKD TAHUN 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>Belanja Hibah</b>	<b>23.018.800.000,00</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>1.132.850.000,00</b>	
<b>Belanja Hibah</b>	<b>23.018.800.000,00</b>	<b>21.885.950.000,00</b>	<b>1.132.850.000,00</b>	<b>95,08</b>
<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
<b>Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
Polres Banyuasin	750.000.000,00	750.000.000,00	-	100,00
Pengadilan Agama Kab. Banyuasin	-	-	-	-
<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>	<b>6.543.000.000,00</b>	<b>6.543.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>6.543.000.000,00</b>	<b>6.543.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Banyuasin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
Lembaga Pembina Adat (LPA) Kab. Banyuasin	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Banyuasin	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Banyuasin	183.000.000,00	183.000.000,00	-	100,00
Badan Narkotika (BNK) Kab. Banyuasin	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100,00
Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Banyuasin	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Banyuasin	900.000.000,00	900.000.000,00	-	100,00
Badan Amil Zakat Indonesia (BAZNAS) Kab. Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Banyuasin	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kab. Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
Pramuka Kwartir Kab. Banyuasin	700.000.000,00	700.000.000,00	-	100,00
Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kab. Banyuasin	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00
- Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Banyuasin	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
- Parisada Hindu Dharma Kelurahan Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin	-	-	-	-
Panitia Amal Kematian (PAKEM) Komplek Griya Gading Pesona Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab	-	-	-	-
GP Anshor Kab. Banyuasin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
Bantuan Dana Hibah Pengurus Cabang Fathayat Kabupaten Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
Karang Taruna Kabupaten Banyuasin	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
- BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Kabupaten Banyuasin	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00
- Himpunan Mahasiswa Banyuasin (HIMBA)	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
- Yayasan Azizah Sungai Dua Kecamatan Rambutan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
- PC Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
<b>Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat</b>	<b>14.460.800.000,00</b>	<b>14.592.950.000,00</b>	<b>1.107.850.000,00</b>	<b>100,91</b>
<b>Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Pendidikan</b>	<b>14.460.800.000,00</b>	<b>13.352.950.000,00</b>	<b>1.107.850.000,00</b>	<b>92,34</b>
- BOP PAUD + DANA CADANGAN BOP PAUD	14.160.800.000,00	13.352.950.000,00	807.850.000,00	94,30
BOP PAUD	11.139.000.000,00	5.304.300.000,00		
		5.030.700.000,00		
BOP Pendidikan Kesetaraan	3.021.800.000,00	1.518.650.000,00	3.850.000,00	50,26
		1.499.300.000,00		
<b>BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI</b>	<b>300.000.000,00</b>	-	<b>300.000.000,00</b>	-
Beasiswa Polstri	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-
<b>Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Dengan Kegiatan Bidang Keagamaan</b>	<b>1.265.000.000,00</b>	<b>1.240.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>98,02</b>
<b>Hibah Kepada Masjid</b>	<b>865.000.000,00</b>	<b>840.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
Masjid Al Muhajirin Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I	-	-	-	-
Masjid Jam' Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II	-	-	-	-
Masjid Taqwa Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III	-	-	-	-
Masjid Al- Muhajirin Desa Taja Raya II Kecamatan Betung	-	-	-	-
Masjid Quba Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur	-	-	-	-
Masjid Falahul Muhajirin Desa Rukun Makmur Kecamatan Pulau Rimau	-	-	-	-
Masjid Baitul Iman Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-	-
Masjid Baiturrahman Desa Telang Jaya Kecamatan Muara Telang	-	-	-	-
Masjid Al Khoiriyah Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang	-	-	-	-
Masjid Jami'atul Muslimin Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya	-	-	-	-
Masjid Miftahul Jannah Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-
Masjid Baiturrahman Desa Saleh Mukti Kecamatan Air Salek	-	-	-	-
Masjid Darussalam Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-
Masjid Al Hidayah Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan	-	-	-	-
Masjid Al Muhajirin Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir	-	-	-	-
Masjid Nurul Hikmah Desa Santan Sari Kecamatan Sembawa	-	-	-	-
Masjid Al Muttaqin Desa Durian Daun Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-
Masjid Al Muttaqin Desa Sido Makmur Kecamatan Air Kumbang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Aplahal Mukminun Desa Terusan Dalam Kecamatan Sumber Marga Telang	-	-	-	-
Masjid Jami Al Muttaqin Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-
Masjid Nurul Hidayah Desa Sumber Rejeki Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-
Masjid Jami Sabilul Huda Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Nurul Iman Desa Tanah Pilih Kecamatan Banyuasin II	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Hamidah Asy Syammari Talang Kebang Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Jami'atul Taqwa Desa Taja Raya II Kecamatan Betung	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Al Jihad Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Baiturrohm Desa Sumber Mulya Kecamatan Pulau Rimau	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Riyadul Muslimin Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Nurul Hijrah Desa Daya Utama Kecamatan Muara Padang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Musholla Nurul Huda Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Nurul Arifin Desa Suka damai Kecamatan Tanjung Lago	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Al Muhajirin Desa Bintaran Kecamatan Air Salek	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Sabillillah Desa Indrapura Kecamatan Muara Sugihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Jamik Ridwanullah Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Baitus Salam Dsn II Desa Suka Karya Kecamatan Tungkal Ilir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Al Muttaqin Desa Limau Kecamatan Sembawa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00



Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Masjid Nurul Hidayah Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Baiturrohman Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang	-	-	-	-
Masjid Hidayatullah Desa Talang Lubuk Kecamatan Sumber Marga Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Baiturrahman Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
Masjid Nurul Jadid Desa Tabala Jaya Kecamatan Karang Agung Ilir	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Al Azhar Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Annuroh Al Aly Yusuf Dsn III Desa Regan Agung Kec. Banyuasin III	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Darussalam Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Musholla Al Islah Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
Masjid Ittihadul Amlin Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
Masjid At Taqwa Desa Rimba Terap Kecamatan Suak Tapeh	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Nurul Huda Dsn V Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Musholla Al Istihoah Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Roudhotul Jannah Desa Talang Ipuh Kecamatan Suak Tapeh	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Musholla Nurul Iman Desa Muara Telang kecamatan Sumber Marga Telang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Musholla Al Amin Dsn III Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Masjid Al- Mukhlisin Jl. Tj. Siapi-Api Lr. Harapan Baru II Rt 014 Rw 001 Kel. Ti Keramat Kec. Talang Kelapa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
Panisada Hindu Dharma Kel. Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya Kab. Banyuasin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
Panitia Amal Kematian (PAKEM) Komplek Griya Gading Pesona Kelurahan Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
Masjid Al Hasyim Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
Masjid Besar Babussalam Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
Masjid At Taqwa Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Muhammad Gozhi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
Masjid Al Hikmah Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
Masjid Baitussahid Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
Masjid Nurul Huda Desa Sido Mulyo Kecamatan Air Kumbang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Masjid Al Muhajirin Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
Masjid Nurul Jannah Desa Persiapan Bukit Makmur Kecamatan Betung	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
Masjid Jihadul Muta'alimin Desa Plajau Ilir Kecamatan Banyuasin III	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
Mushola Alfalah Griya Alfalah Suka Jadi Kecamatan Talang Kelapa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Masjid Jam' Darussalm Desa Puau Punjung Kecamatan Sembawa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
<b>Yayasan</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Yayasan Tazkiah Kampung Quran desa Sri Tiga Kec. Sumber Marga Telang	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00

**RINCIAN BELANJA HIBAH BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN  
PER 31 DESEMBER 2020**

Nama OPD		Kegiatan	Nilai
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	1	Peningkatan Jln dan Halaman Parkir Kejaksaan Negeri P.Balai	989.618.000
<b>Jumlah</b>			<b>989.618.000</b>
<b>Sekretariat Daerah</b>	1	(Pengadaan Ambal) Pada Bagian Kesra Setda Kab. Ba	39.270.000,00
	2	(Pengadaan Lampu Hias Masjid Nurul Iman Pada Bag. Kesra Setda Kab. Ba	198.700.000,00
	3	Pengadaan Mimbar & Bedug) Pada Bag. Kesra Setda Kab. Ba	46.900.000,00
	4	Kegiatan Pelaksanaan Pemberangkatan Jema'ah Umroh Pada Bag. Kesra Setda Kab. Banyuasin Ta 2020	270.000.000,00
	5	Pengadaan Alat Hadro Utk Irmias & Majelis Taqlim Kec. Tig Kelapa	99.450.000,00
	6	Pengadaan Meubelair Pengadilan Agama Kab. Banyuasin	149.500.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>803.820.000,00</b>
<b>Dinas Perkebunan</b>	1	Pengadaan Bibit Karet Unggul Polybag Keg. Pemberdayaan Petani Karet melalui Bibit Karet Unggul Polybag	145.246.500,00
	2	Pekerjaan Pembangunan Gedung UPPB Keg. Sarana dan Prasarana Perkebunan/Peternakan	174.566.200,00
	3	pengadaan bibit kelapa dalam keg. pembinaan pelaku usaha perkebunan	187.140.625,00
	4	Pengadaan bibit ayam buras keg. pengembangan agribisnis peternakan	118.552.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>625.505.325,00</b>
<b>Dinas Perikanan</b>	1	pekerjaan pengadaan mesin pakan dan bahan baku pakan kegiatan pengelolaan pakan ikan	36.500.000,00
	2	pekerjaan paket percontohan budidaya lele di kolam terpal kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	185.520.000,00
	3	pekerjaan paket percontohan budidaya nila di kolam kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	101.055.000,00
	4	pekerjaan paket percontohan budidaya Patin di Kolam kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	197.520.000,00
	5	pekerjaan paket percontohan budidaya Gurame kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	152.600.000,00
	6	pekerjaan Pengadaan Coolbox Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	99.200.000,00
	7	pekerjaan pengadaan jaring ingsang kegiatan Pengadaan sarana dan alat bantu pengkapan ikan.	194.176.000,00
	8	pekerjaan paket percontohan budidaya nila dengan padi (MINAPADI) kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya.	93.720.000,00
	9	pekerjaan Paket budidaya ikan di kolam bundar kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya	84.800.000,00
	10	pekerjaan paket sarana produksi perikanan kegiatan peningkatan produksi perikanan budidaya	42.174.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.187.265.000,00</b>
<b>Kecamatan Makarti</b>	1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.280.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>35.280.000,00</b>
<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	1	Belanja Jasa hibah barang/jasa yang di serahkan kepada masyarakat	90.750.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>90.750.000,00</b>
<b>Dinas Sosial</b>	1	Pembinaan Karang Taruna, Organisasi Sosial, Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK Berprestasi	11.500.000,00
		Penanganan Orang Terganggu Mental Dan Gepeng	20.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>31.500.000,00</b>
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	1	Belanja peralatan Command Centre Polres Banyuasin	198.605.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>198.605.000,00</b>
<b>Dinas Kesehatan</b>	1	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	49.000.000,00
	2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	18.500.000,00
	3	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	3.150.000,00
	4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13.000.000,00
	5	Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja	83.750.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>167.400.000,00</b>
<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</b>	1	Pembangunan pagar lapangan voli Keg. Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	146.500.000,00
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>176.500.000,00</b>

Nama OPD		Kegiatan	Nilai
Dinas Perhubungan	1	Pekerjaan Belanja Pengadaan Speed Boat Kayu KDinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin	158.800.000,00
	2	Pekerjaan Belanja Pengadaan Speed Boat Fiber Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2020	114.350.000,00
	4	Pekerjaan Pengadaan Speedboat Kayu Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020	583.800.000,00
	5	Pekerjaan Pengadaan Moda Darat (Mobil Pick Up)	919.000.000,00
	<b>Total Dinas Perhubungan</b>		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>5.1.5.07 Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan</b>		
	1	Pengadaan Alat Kesenian Musik SMAN 1 BA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banyuasin Tahun 2020	129.200.000,00
	2	Belanja Hibah Pengadaan Drumband SMP Nurul Ilmi Talang Kelapa dengan Disdikbud Kab.Banyuasin TA.2020	99.667.000,00
	3	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTS Darul Ulum Pulau Rimau Disdikbud Kab.Banyuasin TA.	198.078.000,00
	4	Pembangunan Ruang Belajar Konstruksi Dua Lantai Pesantren Rt.18 Ds.Mulia Sari Kec.T.Lago Disdikbud Kab.Banyuasin TA.2020	1.479.381.000,00
	5	Pembangunan RKB MI Nurul Hidayah Ds.Telu Tenggulang Kec.T.Iilir Disdikbud Kab.Banyuasin TA.2020	198.978.000,00
	6	Pemb.RKB SD Islam Al Ahya Kel.Mariana Kec.BA I Disdikbud Kab.Banyuasin TA.2020	982.799.300,00
	7	Pembangunan PAUD Kartini Ds.Petaling pd Disdikbud Kab.Banyuasin	100.000.000,00
	8	Pembangunan PAUD Ar-Rahman Ds.Galang Tinggi pd Disdikbud Kab.Banyuasin	100.000.000,00
	9	Peningkatan Sarana Mutu Sekolah Berbasis IT SDIT Terpadu Istiqlal pd Disdikbud Kab.Banyuasin	99.720.000,00
	10	Pengadaan Mebeluer PAUD kec. Air Saleh pd Disdikbud Kab.Banyuasin	75.000.000,00
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Islam Terpadu IstiqlalDisdikbud Kab.Banyuasin Tahun 2020	149.999.300,00
	12	Pembangunan TPA Dusun Maknare Ds Lubuk Lancang Kec. Suak Tapeh Disdikbud Kab.Banyuasin TA.2020	148.500.000,00
	13	GU Nihil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020	24.600.000,00
<b>Jumlah Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan</b>			<b>3.785.922.600,00</b>
<b>5.1.5.08 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>			
	14	Penyelenggaraan PPD-AKN Bannyuasin	189.010.214,00
	15	Jasa Perencanaan Pemb.Gedung AKN Disdikbud Kab.Banyuasin TA.2020	29.827.000,00
	16	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	339.260.846,00
	17	Penyelenggaraan PPD-AKN Bannyuasin	920.504.586,00
	18	Pengadaan Perlengkapan Ruang Kuliah/Mobiler AKN Pd Keg. Penyelenggaraan PDD-AKN Banyuasin pada Disdikbud Kab Banyuasin	103.800.000,00
	19	Pembayaran Belanja Operasional PDD-AKN Banyuasin pada Kegiatan Penyelenggaraan PDD-AKN Banyuasin pada Disdik Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Desember Tahun 2020	27.609.295,00
	20	Pembayaran Belanja Pegawai PDD-AKN Banyuasin pada Kegiatan Penyelenggaraan PDD-AKN Banyuasin pada Disdik Kabupaten Banyuasin untuk Bulan Desember Tahun 2020	65.200.000,00
	21	Jasa Pengawasan Rehab Gedung AKN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banyuasin Thn.2020	35.000.000,00
	22	Rehabilitasi Ruang Belajar Kampus PD Polinela AKN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Banyuasin Thn.2020	786.739.800,00
	23	Penyelenggaraan PPD-AKN Bannyuasin	518.034.152,00
<b>5.1.5.08 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>			<b>3.014.985.893,00</b>
<b>Jumlah Hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>			<b>6.800.908.493,00</b>
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	Pembangunan JUT di Desa Srikaton Kec. Air Saleh 704m DInas DPTPH Kab. Banyuasin TA. 2020	99.995.000,00
	2	Pembangunan JUT di Desa Sidoarjo RT. 17 Kec. Air Saleh 1266mDInas DPTPH Kab. Banyuasin TA. 2020	199.994.600,00
	3	Pembangunan JUT di Desa Sido Mulyo Jalur 18 Kec. Muara Padang 1.475m DInas DPTPH Kab. Banyuasin TA. 2020	199.992.600,00
	4	Pembangunan JUT di Desa Sidoarjo RT.10 Kec. Air Saleh 1266mDInas DPTPH Kab. Banyuasin TA. 2020	199.994.600,00
	5	Pembangunan JUT di Desa Sido Mulyo RT 13 Kecamatan Muara Padang 1475m Dinas DPTPH Kab. Banyuasin TA. 2020	199.992.600,00
	6	Pembangunan JUT di Desa Sidoarjo Kec. Air Saleh 1226m DInas DPTPH Kab. Banyuasin TA. 2020	199.994.600,00
	7	Pembangunan JUT di Desa Sido Mulyo Jembatan 4 Kadus 4 Kec. Muara Padang 1.475mDInas DPTPH Kab. Banyuasin TA. 2020	199.992.600,00
	8	Alat Mesin Combine Harvester dan TR4 berdasarkan DInas DPTPH Kab. Banyuasin	1.876.017.462,00
	9	Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Kegiatan Pengembangan Tanaman Sayuran dan Obat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura TA 2020	111.881.000,00
	10	Pengadaan TR 2 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana PertanianDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura TA 2020	341.395.400,00
	11	Pengadaan Pompa Air TS 80 1 Paket Desa Sungai Rebo Kec. BA I DPTPH Kab. Banyuasin	66.525.000,00
	12	Pengadaan Mist Blower sebanyak 20 unit Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian DPTPH Kab. Banyuasin	70.220.000,00
	21	Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU sembilan) ke-9 pada DInas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Banyuasin	40.500.000,00

Nama OPD	Kegiatan	Nilai	
	22 Pengadaan Traktor Roda 4 dan Combine Harvester Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian DPTPH Kab. Banyuasin	1.082.821.462,00	
	23 Pengadaan Bibit Buah-Buah Keg. Pengembangan Tanaman Buah dan Hortikultura DPTPH Kab. Banyuasin	74.870.000,00	
	24 pembangunan Sumur Bor Kel. Sukomoro Kec. Talang KelapaKeg. PLA pd DPTPH Kab. Banyuasin	142.500.000,00	
	25 pembangunan Sumur Bor 1 Paket ds Langkan Kec. BA III Keg. PLA pd DPTPH Kab. Banyuasin	117.986.200,00	
	26 pembangunan Embung 1 unit ds Sidoharjo Kec. Air Saleh Keg. PLA pd DPTPH Kab. Banyuasin	114.000.000,00	
	27 pembangunan Embung 1 unit ds Talang Indah Kec. Muara Telang Keg. PLA pd DPTPH Kab. Banyuasin	114.000.000,00	
	28 pembangunan Sumur Bor desa Lalang Sembawa Kec. Sembawa Keg. PLA pd DPTPH Kab. Banyuasin	138.000.000,00	
	29 Pengadaan Mesin Diesel dan Pompa Air Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian DPTPH Kab. Banyuasin	41.638.000,00	
	30 Pengadaan Combine Harvester Besar Kubota Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian DPTPH Kab. Banyuasin	1.264.900.000,00	
	31 Pengadaan Hand Traktor Quick Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian DPTPH Kab. Banyuasin	117.374.800,00	
<b>Jumlah Hibah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura</b>		<b>7.014.585.924,00</b>	
<b>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>	<b>5.1.5.07 Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan</b>		
	1	Pembangunan Gapura Komplek Puspasari Rt. 09,10,23 Rw. 02 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa.	99.724.000,00
	2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Perkotaan Talang Gebang	99.774.000,00
	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Perkotaan Sri Cinta	99.770.000,00
	4	Lanjutan Pembangunan Masjid Muttaqin Desa Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III	149.889.010,00
	5	Keg. Rehab Masjid Darul Muslimin Desa Teluk Tenggirik Kec. Banyuasin I (Dana APBD)	99.780.000,00
	6	Pembangunan Masjid Al-Ansor Desa Rambutan Kec. Rambutan	99.779.000,00
	7	Pembangunan Pagar Madrasah LPNU Sungai Dua Kec. Rambutan	99.779.702,30
	8	Kegiatan Optimalisasi IPAL Komunal di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banyuasin (Dana APBD)	74.395.444,42
	9	Kegiatan Penyelesaian Pembuatan Menara Masjid Nurul Iman Desa Terentang Kec. Banyuasin III.	199.724.000,00
	10	Kegiatan Pembangunan Rumah Baca Sungai Dua Kec. Rambutan,	199.724.995,14
	11	Pembangunan Tempat Pemandian Sungai Dua Kec. Rambutan (Dana APBD)	189.724.000,00
	14	Pembuatan Tempat Wudhu dan Tempat Tedmon Masjid Nurul Jami' Dusun III Solok Mulia Kec. Air Salek	49.725.000,00
	15	Kegiatan Pengecatan Ponpes Nurul Iman Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III	199.826.000,00
	16	Kegiatan Rehab Ruang Belajar Ponpes Nurul Iman Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III	199.738.000,00
	17	Kegiatan Rehab Masjid Al-Ikhlas Desa Lubuk Rengas Kec. Rantau Bayur	69.806.800,00
	18	Pembuatan Lapangan Bola Tangkis Desa Rejodadi Kp 2 Kec. Sembawa.	99.725.000,00
	19	Pembuatan Pagar SDN 19 Sembawa Desa Muara Damai Kec. Sembawa	99.758.000,00
	20	Kegiatan Rehab Mushollah Baitul Jannah Desa Mainan Kec. Sembawa	99.779.000,00
	21	Pembangunan Jamban Skala Individu Desa Sidorejo Kec. Muara Padang.	172.500.000,00
	22	Pembangunan Jamban Skala Individu Desa Purwodadi Kec. Muara Padang.	90.000.000,00
	23	Pembangunan Jamban Skala Individu Desa Indrapura Kec. Muara Sugihan	90.000.000,00
	24	Pembangunan Jamban Skala Individu Desa Muara Padang	150.000.000,00
	25	Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individu program Hibah Air Limbah Setempat (Re-embes) (Dana APBD)	360.000.000,00
	26	Pembangunan Tangki Septik Individu program Hibah Air Limbah Setempat (Re-embes) (Dana APBD)	240.000.000,00
	27	Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Sungai Pinang Kec. Rantau Bayur	250.000.000,00
	28	Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Muara Padang Kec. Muara Padang,	250.000.000,00
	29	Pekerjaan Pembangunan tangki septik skala individual Desa Manggaraya Kecamatan Tanjung Lago (Dana DAK)	600.000.000,00
	30	Pekerjaan Pembangunan tangki septik skala individual Desa Suka Damai Kecamatan Tanjung Lago (Dana DAK)	702.000.000,00
	31	Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Suka Damai Kecamatan Tanjung Lago (Dana DAK)	550.000.000,00
	32	Pekerjaan Pembangunan tangki septik skala individual Desa Rukun Makmur Kecamatan Pulau Rimau (Dana DAK)	630.000.000,00
	33	Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Manggaraya Kecamatan Tanjung Lago (Dana DAK)	550.000.000,00
	34	Keg. Pembuatan WC Dan Tempat Wudhu Masjid Taqwa Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur	99.780.000,00
	35	Pembangunan Pagar dan Sumur Masjid Baitul Hikmah Desa Suka Mulya Kec. Betung	149.774.000,00
	36	Pembuatan Pagar Kantor Camat Air Salek	99.779.000,00
	37	Pembangunan Gedung TPA Nurul Hidayah Desa Daya Bangun Harjo Ds. III Kec. Muara Sugihan	104.845.300,00
	38	Pembuatan Pagar Kantor MWC NU Kecamatan Air Salek	99.670.000,00
	39	Keg. Pembuatan WC Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III.	149.736.000,00
	40	Pembangunan Tribun Mini Desa Enggal Rejo Kecamatan Air Salek	199.669.000,00

Nama OPD	Kegiatan	Nilai
	41 Kegiatan Rehab Mushollah SD IT Miftahul Ilmi Kec. Talang Kelapa	99.779.000,00
	42 Pembuatan WC dan Tempat Wudhu Masjid Al Sobar Desa Lubuk Saung Kec. Banyuasin III	149.835.000,00
	43 Pek. Rehab Masjid Nurul Hidayah Pondok Modern Darussalam Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago	74.670.000,00
	44 Rehab Masjid Sirotol Mustaqim Desa Margo Mulyo Kadus 4 Rt. 12 Kecamatan Muara Sugihan	199.669.000,00
	45 Pembangunan Gedung TK Al Qur'an Nurul Hikmah Desa Rejo Sari Kec. Muara Sugihan	199.736.000,00
	46 Pembangunan Gapura Masjid Darussalam Desa Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan	99.719.000,00
	47 Pembangunan Pagar dan Gapura Tempat Pemakaman Umum Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago (Dana P APBD)	149.724.000,00
	48 Lanjutan Pembangunan Masjid At Taqwa Rt. 02 Jalur 19 Desa Sumber Mulyo Kec. Pulau Rimau	199.779.000,00
	49 Kegiatan Pembuatan DAK Kaki Lima Masjid Taqwa di Dusun Talang Kebang Kel. Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III	199.779.000,00
	50 Kegiatan Pengecoran Jalan Mushollah Al-Falah Rt. 28 Rw. 08 Kel. Betung Kec. Betung	149.724.000,00
	51 Lanjutan Pembangunan Lokal Belajar MTS Khairul Hasbi Desa Paldas Kec. Rantau Bayur	99.834.000,00
	52 Lanjutan Pembangunan Mushollah SD Negeri 07 Desa Tirta Mulya Kec. Muara Sugihan.	99.778.000,00
	53 Keg. Pembangunan Teras Mushollah Alfalah Desa Lubuk Karet Kec. Betung (Dana P APBD)	199.770.000,00
	54 Pembangunan Gedung TPA Al-Hidayah Desa Mekar Mukti Kec. Muara Telang (Dana P APBD)	244.586.000,00
	55 Rehab Masjid di Komplek Perumahan Al Azhar Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa	149.252.000,00
	56 Pembuatan Menara Masjid Jami' Suhadak Rt. 17 Rw. 04 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III	199.725.000,00
	57 Kegiatan Rehab Kantor Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lag	199.779.000,00
	58 Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Sidomulyo 20 Kecamatan Muara Padang (Dana DAK)	550.000.000,00
	59 Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Sako Kecamatan Rambutan (Dana DAK)	550.000.000,00
	60 Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Marga Sugihan Kecamatan Muara Padang (Dana DAK)	550.000.000,00
	61 Pembangunan tangki septik skala individual Desa Purwodadi Kecamatan Muara Padang (Dana DAK)	1.200.000.000,00
	62 Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Muara Baru Kecamatan Makarti Jaya (Dana DAK)	550.000.000,00
	63 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh Perkotaan Karang Petai	99.724.000,00
	64 Pembuatan Gedung TPA Rhodatul Jannah Desa Marga Rahayu 1 Lokal Kec. Muara Telang	199.669.000,00
	65 Pembangunan Pintu Gerbang Pusat Rehabilitasi Mental Dan Pengobatan Yayasan Al-Ikhlas Kec. Talang Kelapa.	29.932.500,00
	66 Pembangunan TK/TPA Mushollah Assyuro Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa (Dana P APBD)	149.720.000,00
	67 Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang (Dana DAK)	550.000.000,00
	68 Perlengkapan Kantor PDAM	199.747.000,00
	69 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds Wonodadi Kec Selat Penuguan	426.000.000,00
	70 Pembuatan WC SMPN. 1 Kec. Banyuasin III	99.834.000,00
	71 Pembangunan tangki septik skala individual Desa Kumbang Padang Permata Kecamatan Air Kumbang (Dana DAK)	720.000.000,00
	72 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds Daya Makmur Kec Muara Padang	600.000.000,00
	73 Rehab Masjid At-Taubah Desa Bunga Karang Kec. Tanjung Lago	74.777.000,00
	74 Keg. Rehab Masjid Hayatul Iman Dusun I RT. 04 Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Lago.	199.723.000,00
	75 Pembuatan Pagar Masjid Taubatan Nasuha Kel. Mariana Kec. Banyuasin I	99.834.000,00
	76 Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama Ds Dana Mulya Kec. P. Rimau	553.000.000,00
	77 Kegiatan Pembangunan TPS 3R Desa Majatra Kecamatan Pulau Rimau	550.000.000,00
	78 Kegiatan Pembangunan TPS 3R Desa Purwodadi Kecamatan Selat Penuguan	550.000.000,00
	79 Kegiatan Rehab RKB SMPN 2 Pulau Rimau	199.779.000,00
	80 Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Komb MCK Ds Mukti Jaya Kec Muara Telang Kab. BA	525.000.000,00
	82 Pembangunan Asrama Tahfidz Pongpes Inayatullah Desa Gasing Kec. Talang Kelapa	159.819.000,00
	83 Pembangunan TPS 3R Desa Daya Makmur Kec. M. Padang Kab. BA	550.000.000,00
	84 Pembangunan TPS 3R Desa Indrapura Kec. M. Sugihan Kab. BA	550.000.000,00
	85 Pembangunan Mushollah Komplek Villa Asri Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa	199.776.000,00
	86 Pembangunan TPS 3R Desa Purwosari Kec. Sembawa Kab. BA	550.000.000,00
	87 Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Ds Durian Gadis Kec Rambutan	750.000.000,00
	88 Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Muara Padang Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin.	325.000.000,00
	89 Pembangunan Gapura 2 Unit Desa Indra pura Kec. Muara Sugihan,	99.713.000,00
	90 Pembangunan tangki septik skala individual Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang (Dana DAK)	960.000.000,00
	91 Pekerjaan Pembangunan TPS 3R Desa Saleh Jaya Kecamatan Air Salek (Dana DAK)	550.000.000,00
	92 Pembg tangki septik skala komunal Ds Penuguan Kec. Selat Penuguan	325.000.000,00
	93 Pembangunan TPS 3R Desa Tabuan Asri Kec. Pulau Rimau Kab. BA	550.000.000,00

Nama OPD	Kegiatan	Nilai
	94 Pembangunan Gedung Serba Guna Ponpes Nurul Iman Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III	199.616.000,00
	95 Kegiatan Pembangunan Gerbang Desa Paldas Kec. Rantau Bayur	99.660.000,00
	96 Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Sidorejo Kec. Muara Padang Kab. Banyuasin	325.000.000,00
	97 Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Tanjung Kerang Kec. Rambutan, Kontrak.	325.000.000,00
	98 Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal Desa Rambutan Kec. Rambutan	325.000.000,00
	99 Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Komb MCK Ds Telang Jaya Kec Muara Telang Kab.BA	525.000.000,00
	100 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas & Vol dr Saprass SPAM Ds Kelapa Dua Kec. S. Penuguan Kab. BA	549.976.000,00
	101 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Ds. Tjng Laut Kec. Suak Tape	551.740.000,00
	102 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Ds Sumber Rejo Kec. S. Penuguan Kab. BA	551.950.000,00
	103 Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Ds Purwosari Kec Sembawa,	551.000.000,00
	104 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM Ds Suka Mulya Kec. Tungkal Ilir,	549.575.000,00
	105 Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Telang Jaya Kec. M. Telang,	561.436.000,00
	106 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas & Vol dr Saprass SPAM Ds Suka Raja Kec. Tungkal Ilir	551.000.000,00
	107 Kegiatan Pembangunan TPS 3R Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang	550.000.000,00
	108 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas & Vol dr Saprass SPAM Ds Suka Damai Kec. T. Lago	552.960.000,00
	109 Pembangunan Tempat Wudhu dan Toilet Masjid Baitul Haq Lr. Pedada Desa Marga Sungsang Kecamatan BA II,	79.721.000,00
	110 Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Purwosari Kec. T. Lago	557.000.000,00
	111 Pembangunan Bak PAH Desa Mukti Jaya Kec. Muara Telang	556.992.000,00
	112 Kegiatan Pembangunan tangki septik skala individual Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan,	630.000.000,00
	113 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas & Vol dr Saprass SPAM Ds Rukun Makmur Kec. Pulau Rimau,	551.000.000,00
	114 peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas & Vol dr Sarpras SPAM Ds. Wonodadi Kec. S. Penuguan	551.000.000,00
	115 Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas & Vol dr Saprass SPAM Ds Sumber Agung Kec. S. Penuguan Kab. BA	549.990.000,00
	116 Pembangunan TPS 3R Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan (Dana DAK)	550.000.000,00
	117 Kapasitas TPS 3R Desa Sungsang III Kec. Banyuasin II Kab. BA	550.000.000,00
	118 Kegiatan Rehab Mushollah Nurul Hidayah Rt.06 Desa Merah Mata Kec.BA I	149.779.000,00
	119 Pembangunan Tembok Penahan Longsor Rencana Balai Serbaguna Ds. I Desa Merah Mata Rt. 03 Rw. 01 Kec. BA. I	99.669.000,00
	120 Pondasi Masjid Al Hairod Desa Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur	199.778.000,00
	121 Kegiatan Pembangunan TPS 3R Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan	550.000.000,00
	122 Kegiatan Rehab Sarana dan Prasarana Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam Kec. Rambutan (Dana P APBD)	149.778.000,00
	123 Pembangunan tangki septik skala komunal Desa Muara Baru Kecamatan Makarti Jaya (Dana DAK)	325.000.000,00
	124 Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Telang Rejo Kec. M. Telang	556.992.000,00
	125 Rehabilitasi Bangunan Masjid Dalam Desa Gelebak Dalam Kec. Rambutan	199.779.000,00
	126 Pembangunan Pagar Madrasah Tsanawiyah Ahlul Desa Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur	29.926.800,00
	127 Kegiatan Pembangunan tangki septik skala individual Desa Sumber Rejo Kecamatan Selat Penuguan	660.000.000,00
	128 Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Komb MCK Ds Telang Rejo Kec Muara Telang Kab.BA	525.000.000,00
	129 Rehab Masjid Muhajirin Desa Tabala Jaya Premier 6 Kecamatan Karang Agung Ilir	99.725.000,00
	130 Pembangunan Lapangan Volli Ball Perumahan Griya Sukajadi Permai I Rt. 22 Rw. 06 Kec. Talang Kelapa	24.769.000,00
	131 Kegiatan Pembangunan Mushollah Siswa SDN 11 Kec. Sembawa	99.885.000,00
	132 Pembangunan Pintu Gerbang Pusat Rehabilitasi Mental Dan Pengobatan Yayasan Al-Ikhlis Kec. Talang Kelapa	69.842.500,00
	133 Kegiatan Pemasangan Penampungan Air Hujan (PAH) Fiber Glass Perumahan Rt. 02 Dusun I Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II	99.862.000,00
	134 Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK Ds Marga Sugihan Kec. Muara Padang	555.000.000,00
	135 Pek. Rehab Tiang dan Plafon Masjid Fatahul Imam Jalan Kassmowiyono Dusun I Rt. 03 Desa Rejojadi Kec. Sembawa	99.873.000,00
	136 Kegiatan Pembuatan Sumur Bor Rt. 05 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III	99.864.000,00
	137 Pembangunan Masjid Muhajirin Desa Sembawa Kec. Sembawa.	49.888.000,00
	138 Lanjutan Pembangunan Gedung TPA Nurul Hidayah Desa Daya Bangun Harjo Ds. III Kec. Muara Sugihan	94.822.700,00
	139 Pembuatan Lapangan Bola Voly Desa Muara Telang Marga Kec. Sumber Marga Telang	49.885.000,00
	140 Rehab Masjid Rohmania Dusun I Desa Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur	79.886.000,00

Nama OPD		Kegiatan	Nilai
	141	Kegiatan Pembangunan Gedung Belajar Mts Al-Hijriah Desa Sumber Mukti Kec. Selat Penuguan	199.715.000,00
	142	Pembangunan Lanjutan Gedung Sekolah SMA Sanudin Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III	199.774.000,00
	143	Lanjutan Pembangunan Mushollah Al Hadi Desa Sido Mulyo Kec. Tungkal Ilir	139.757.000,00
	144	Pengecoran Halaman Pondok Pesantren Tahfis Al-Quraan An Nur Desa Suka Pindah Kec. Rambutan	49.887.000,00
	145	Pembangunan Mushola Budi Asih Kecamatan Pulau Rimau	199.721.000,00
	146	Kegiatan Pembangunan Gedung Paud Ananda Rt. 17 Dusun 01 Desa Salek Jaya Kec. Air Salek	194.590.000,00
	147	Kegiatan Pembangunan Mushollah Al Nurjannah Dusun IV Desa Terusan Dalam Kec. Sumber Marga Telang (Lanjutan)	149.833.000,00
	148	Pembangunan Pagar Kantor Camat Pulau Rimau.	199.603.000,00
	149	Penimbunan Lahan LPNU Desa Sungai Dua Kec. Rambutan	199.721.000,00
	150	Penimbunan Lahan LPNU Gedung Ansor Desa Tirta Sari Kec. Banyuasin I	99.779.000,00
	151	Pembangunan Canopy dan Pagar Masjid Taubatan Nasuha Kec. Banyuasin I	199.869.000,00
	152	Pembangunan Rumah Mudir Pondok Pesantren Tahfis Al Quraan An Nur Desa Suka Pindah Kec. Rambutan	199.656.000,00
	153	Kegiatan Rehab Sedang Rumah Dokter Kec. Banyuasin II.	199.513.000,00
	154	Penyelesaian Pembangunan Atap dan Lantai Mushollah Al-Ikhlis di Komplek Perumahan Azhar Belakang Rt. 23 A Rw. 10 Kel. Kenten	99.722.000,00
	155	Pembangunan Gedung TPA Rt. 17 Dusun 01 Desa Salek Jaya Kec. Air Salek.	104.624.000,00
	156	Kegiatan Pembuatan Mushollah, Wc Umum Tempat Wudhu dan Tedmond Desa Karang Baru Kec. Sumber Marga Telang	199.708.000,00
	157	Pembangunan Pagar Madrasah Tsanawiya Ahlul Desa Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur	69.829.200,00
	158	Kegiatan Pembuatan lapangan Volly Beserta Kelengkapannya Desa Beringin Agung Kec. Muara Sugihan	199.446.000,00
	159	Keg,Pembangunan PAUD Dusun 02 Desa Tebing Abang Kec. Rantau Bayur	99.722.000,00
	160	Pembangunan Kamar Mandi Masjid Miftahul Huda Desa Talang Sari Kec. Karang Agung Ilir	149.857.000,00
	161	Pembangunan Gedung Tahfiz Rt. 06 Dusun 02 Desa Salek Jaya Kec. Air Salek	99.512.000,00
	162	Pembuatan Sumur Bor Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa	49.865.000,00
	163	Kegiatan Rehab Masjid Al Ikhlas Desa Kemang Bejalu Kec. Rantau Bayur	129.686.200,00
	164	Kegiatan Rehab Masjid Baitul Rahman Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur	99.693.000,00
	165	Kegiatan Bedah Rumah Kecamatan Banyuasin II	100.000.000,00
	166	Pemasangan Canopy Masjid Jami' Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II	149.722.000,00
	167	keg Rehab Masjid Al-Muhajirin Ds Tanjung Pasir Kec. Rantau Bayur	99.724.000,00
	168	Kegiatan Pembangunan Menara Masjid Syuhada Dusun I Desa Galang Tinggi Kec. Banyuasin III	199.620.000,00
<b>Jumlah 5.1.5.07 Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan</b>			<b>45.575.129.151,86</b>
<b>5.1.5.08 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>			
	1	Keg. Interior Ruang Dandim 0430	157.724.000,00
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Kegiatan Karya Bakti TNI KODIM 0430 Kab. Banyuasin	1.000.000.000,00
	3	Bantuan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Secara Swadaya Di Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pangkalan Balai Kec. BA III Bulan Juli 2020	595.000.000,00
	4	Untuk Bantuan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Secara Swadaya Di Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pangkalan Balai Kec. BA III Bulan September 2020	1.071.000.000,00
	5	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Kejar (Dana P APBD)	1.973.985.619,77
	6	Kegiatan Penataan Bangunan Pengadilan Negeri Sukajadi (Dana P APBD)	394.015.600,00
	7	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Kejar (Tahap II) (Dana P APBD)	447.450.000,00
	8	Untuk Bantuan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni Secara Swadaya Di Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Pangkalan Balai Kec. BA III Bulan Oktober 2020	714.000.000,00
	9	Kegiatan Pemasangan Interior Gedung Kejar (Dana P APBD)	99.670.000,00
	10	Kegiatan Penataan Gedung Kejar (Dana P APBD)	199.505.000,00
<b>Jumlah 5.1.5.08 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>			<b>6.652.350.219,77</b>
<b>Jumlah hibah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</b>			<b>52.227.479.371,63</b>
<b>Total Keseluruhan Hibah Berupa Barang</b>			<b>72.125.167.113,63</b>

## DAFTAR BELANJA MODAL TANAH SKPD PER 31 DESEMBER 2020

No	NAMA SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Total	BELANJA MODAL MENJADI ASET 9=(4-8)
				Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Hutang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4-8)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.071.259.773,00	10.534.971.773,00	-	-	-	-	10.534.971.773,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	788.034.355,00	638.647.985,00	-	-	-	-	638.647.985,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatar	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	-	-	-	-	-	-
26	Kecamatan Banyuasin I	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Banyuasin II	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan Pulau Rimau	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Tungkal Ilir	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Banyuasin II	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Makarti Jaya	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Muara Padang	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Muara Telang	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Sumber Marga Telang	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Air Kumbang	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-
47	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
50	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>11.859.294.128,00</b>	<b>11.173.619.758,00</b>	-	-	-	-	<b>11.173.619.758,00</b>



## DAFTAR BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN SKPD PER 31 DESEMBER 2021

No	NAMA SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Total	BELANJA MODAL MENJADI ASET 9=(4-8)
				Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Hutang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4-8)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.746.736.290,00	32.495.483.253,00	-	4.459.641.242,00	-	4.459.641.242,00	28.035.842.011,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	592.000.000,00	584.464.800,00	-	-	-	-	584.464.800,00
3	Dinas Kesehatan	29.707.872.194,20	26.912.959.373,95	-	518.078.705,99	-	518.078.705,99	26.394.880.667,96
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.465.500.000,00	2.281.124.831,00	-	27.328.700,00	-	27.328.700,00	2.253.796.131,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	45.000.000,00	44.650.000,00	-	-	-	-	44.650.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	67.950.000,00	63.725.000,00	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	61.925.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	4.661.930.000,00	4.449.077.000,00	-	384.415.000,00	-	384.415.000,00	4.064.662.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatar	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	31.799.000,00	31.799.000,00	-	-	-	-	31.799.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	134.606.000,00	129.970.000,00	-	18.700.000,00	-	18.700.000,00	111.270.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	53.680.000,00	53.630.000,00	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	44.630.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.535.796.147,00	2.014.113.050,00	-	550.275,00	-	550.275,00	2.013.562.775,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	686.800.000,00	679.107.170,00	-	14.733.110,00	-	14.733.110,00	664.374.060,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	467.500.000,00	464.850.000,00	-	-	-	-	464.850.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	478.463.500,00	446.582.500,00	-	1.095.000,00	-	1.095.000,00	445.487.500,00
17	Dinas Perhubungan	460.330.650,00	456.826.650,00	-	2.850.000,00	-	2.850.000,00	453.976.650,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	720.331.904,00	716.393.904,00	18.859.604,00	-	-	18.859.604,00	697.534.300,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	143.900.000,00	143.242.000,00	-	15.290.000,00	-	15.290.000,00	127.952.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	77.298.000,00	77.000.000,00	-	-	-	-	77.000.000,00
21	Dinas Perikanan	134.100.000,80	133.600.000,00	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00	121.100.000,00
22	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	26.450.000,00	26.450.000,00	-	13.650.000,00	-	13.650.000,00	12.800.000,00
24	Sekretariat Daerah	9.967.658.000,00	9.842.991.820,00	-	372.595.300,00	-	372.595.300,00	9.470.396.520,00
25	Sekretariat DPRD	1.385.873.000,00	1.384.793.000,00	-	83.185.000,00	-	83.185.000,00	1.301.608.000,00
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	767.844.000,00	766.140.000,00	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	749.140.000,00
27	Kecamatan Banyuasin I	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	-	-	18.500.000,00
28	Kecamatan Banyuasin II	99.219.834,00	99.219.000,00	-	23.100.000,00	-	23.100.000,00	76.119.000,00
29	Kecamatan Betung	14.000.000,00	13.750.000,00	-	-	-	-	13.750.000,00
30	Kecamatan rantau Bayur	26.400.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	24.000.000,00
31	Kecamatan Pulau Rimau	63.860.000,00	63.860.000,00	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	55.860.000,00
32	Kecamatan Talang Kelapa	139.000.000,00	139.000.000,00	-	14.100.000,00	-	14.100.000,00	124.900.000,00
33	Kecamatan Rambutan	50.900.000,00	50.900.000,00	-	-	-	-	50.900.000,00
34	Kecamatan Tungkal Ilir	7.000.000,00	7.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	6.000.000,00
35	Kecamatan Tanjung Lago	73.500.000,00	70.997.000,00	-	-	-	-	70.997.000,00
36	Kecamatan Sembawa	49.500.000,00	49.500.000,00	-	-	-	-	49.500.000,00
37	Kecamatan Suak Tapeh	40.900.000,00	40.900.000,00	-	77.986,00	-	77.986,00	40.822.014,00
38	Kecamatan Banyuasin II	247.000.000,00	246.100.000,00	-	-	-	-	246.100.000,00
39	Kecamatan Makarti Jaya	22.050.000,00	22.050.000,00	-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	21.000.000,00
40	Kecamatan Muara Padang	26.505.000,00	23.508.892,00	-	-	-	-	23.508.892,00
41	Kecamatan Muara Sugihan	24.250.000,00	24.250.000,00	-	8.750.000,00	-	8.750.000,00	15.500.000,00
42	Kecamatan Muara Telang	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	-	-	19.700.000,00
43	Kecamatan Air Salek	12.000.000,00	11.500.000,00	-	-	-	-	11.500.000,00
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	47.349.000,00	47.349.000,00	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00	44.649.000,00
45	Kecamatan Air Kumbang	63.500.000,00	63.500.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	48.500.000,00
46	Kecamatan Selat Penuguan	68.660.000,00	68.660.000,00	-	7.560.000,00	-	7.560.000,00	61.100.000,00
47	Kecamatan Karang Agung Ilir	30.000.000,00	30.000.000,00	-	24.050.000,00	-	24.050.000,00	5.950.000,00
48	Inspektorat Daerah	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	-	-	7.480.000,00
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	146.500.000,00	144.923.000,00	-	-	-	-	144.923.000,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	246.000.000,00	244.400.000,00	-	-	-	-	244.400.000,00
51	Badan Pendapatan Daerah	481.077.817,68	477.293.000,00	-	-	-	-	477.293.000,00
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>91.384.270.337,68</b>	<b>86.207.313.243,95</b>	<b>18.859.604,00</b>	<b>6.057.800.318,99</b>	-	<b>6.076.659.922,99</b>	<b>80.130.653.320,96</b>

## DAFTAR BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN SKPD PER 31 DESEMBER 2020

No	NAMA SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Total	BELANJA MODAL MENJADI ASET
				Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Hutang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4-8)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.837.029.000,00	29.744.005.421,44	693.683.000,00	-	-	693.683.000,00	29.050.322.421,44
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.400.000.000,00	1.375.281.000,00	-	-	-	-	1.375.281.000,00
3	Dinas Kesehatan	9.745.000.000,00	9.634.087.392,53	707.801.600,00	178.870.000,00	-	886.671.600,00	8.747.415.792,53
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.987.362.760,00	1.678.653.214,97	-	-	-	-	1.678.653.214,97
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	600.000.000,00	599.284.000,00	-	-	-	-	599.284.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatar	190.000.000,00	189.780.000,00	189.780.000,00	-	-	189.780.000,00	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	75.000.000,00	74.475.000,00	-	-	-	-	74.475.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	200.000.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	644.400.000,00	642.867.000,00	-	-	-	-	642.867.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000,00	199.600.000,00	-	-	-	-	199.600.000,00
17	Dinas Perhubungan	745.798.591,00	741.964.591,00	9.952.000,00	-	-	9.952.000,00	732.012.591,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	505.000.000,00	504.676.256,38	-	-	-	-	504.676.256,38
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	253.700.000,00	106.650.000,00	-	-	-	-	106.650.000,00
27	Kecamatan Banyuasin I	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Banyuasin II	172.500.000,00	172.483.707,00	-	52.484.000,00	-	52.484.000,00	119.999.707,00
29	Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Pulau Rimau	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Tungkal Ilir	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Banyuasin II	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Makarti Jaya	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Muara Padang	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Muara Telang	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Air Kumbang	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00
46	Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-
47	Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-
48	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	111.000.000,00	110.544.200,00	-	-	-	-	110.544.200,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
51	Badan Pendapatan Daerah	250.000.000,00	249.999.950,00	-	-	-	-	249.999.950,00
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>46.961.790.351,00</b>	<b>46.269.351.733,32</b>	<b>1.601.216.600,00</b>	<b>231.354.000,00</b>	-	<b>1.832.570.600,00</b>	<b>44.436.781.133,32</b>

## DAFTAR BELANJA MODAL JJI SKPD PER 31 DESEMBER 2020

No	NAMA SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Total	BELANJA MODAL MENJADI ASET
				Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Hutang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4-8)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	283.977.556,00	256.320.374,00	-	-	-	-	256.320.374,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Kesehatan	172.863.426,00	161.226.789,00	-	-	-	-	161.226.789,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	34.649.658.400,00	34.448.655.581,79	-	-	-	-	34.448.655.581,79
6	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	382.322.194.000,00	374.010.597.872,23	1.727.635.193,46	-	-	1.727.635.193,46	372.282.962.678,77
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatar	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	745.000.000,00	743.040.000,00	-	-	-	-	743.040.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	49.948.200,00	49.948.200,00	-	-	-	-	49.948.200,00
13	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (liuidasi	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.960.430.115,00	7.928.532.666,00	-	-	-	-	7.928.532.666,00
17	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	13.836.425,00	13.836.425,00	-	-	-	-	13.836.425,00
21	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pertanian	281.000.000,00	279.700.000,00	-	-	-	-	279.700.000,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	90.000.000,00	89.800.000,00	-	-	-	-	89.800.000,00
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Banyuasin I	1.110.478.507,00	1.106.740.922,00	-	-	-	-	1.106.740.922,00
28	Kecamatan Banyuasin II	512.400.000,00	511.951.840,00	-	-	-	-	511.951.840,00
29	Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Pulau Rimau	1.347.807.700,00	1.347.157.700,00	374.751.700,00	-	-	374.751.700,00	972.406.000,00
32	Kecamatan Talang Kelapa	256.200.000,00	256.200.000,00	-	-	-	-	256.200.000,00
33	Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Tungkai Ilir	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Banyuasin II	256.200.000,00	256.047.000,00	-	-	-	-	256.047.000,00
39	Kecamatan Makarti Jaya	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Muara Padang	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Muara Telang	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Air Kumbang	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-
47	Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-
48	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
51	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>430.201.994.329,00</b>	<b>421.459.755.370,02</b>	<b>2.102.386.893,46</b>	-	-	<b>2.102.386.893,46</b>	<b>419.357.368.476,56</b>

## DAFTAR BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA SKPD PER 31 DESEMBER 2021

No	NAMA SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Total	BELANJA MODAL MENJADI ASET 9=(4-8)
				Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Hutang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4-8)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.021.768.103,00	16.092.550.336,00	-	1.442.549.915,00	-	1.442.549.915,00	14.650.000.421,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	393.200.000,00	392.200.000,00	-	-	-	-	392.200.000,00
3	Dinas Kesehatan	41.145.900,00	27.419.500,00	-	-	-	-	27.419.500,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatar	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	280.000.000,00	279.800.000,00	279.800.000,00	-	-	279.800.000,00	-
17	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	281.477.430,00	281.477.430,00	-	-	-	-	281.477.430,00
21	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	120.000.000,00	119.700.000,00	119.700.000,00	-	-	119.700.000,00	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	415.000.000,00	413.411.000,00	413.411.000,00	-	-	413.411.000,00	-
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	-	-	-	-	-	-
27	Kecamatan Banyuasin I	-	-	-	-	-	-	-
28	Kecamatan Banyuasin II	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-
30	Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Pulau Rimau	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Tungkal Ilir	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00
35	Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Banyuasin II	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00
39	Kecamatan Makarti Jaya	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Muara Padang	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Muara Telang	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Air Kumbang	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-
47	Kecamatan Karang Agung Ilir	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000,00
48	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.100.000,00	4.017.200,00	-	-	-	-	4.017.200,00
51	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>18.612.991.433,00</b>	<b>17.666.875.466,00</b>	<b>812.911.000,00</b>	<b>1.442.549.915,00</b>	-	<b>2.255.460.915,00</b>	<b>15.411.414.551,00</b>

## DAFTAR TOTAL BELANJA MODAL SKPD PER 31 DESEMBER 2020

No	NAMA SKPD	ANGGARAN BM	REALISASI BM	Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset			Total	BELANJA MODAL MENJADI ASET
				Pemeliharaan	Ekstrakomptabel	Hutang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4-8)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80.889.510.949,00	78.588.359.384,44	693.683.000,00	5.902.191.157,00	-	6.595.874.157,00	71.992.485.227,44
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.385.200.000,00	2.351.945.800,00	-	-	-	-	2.351.945.800,00
3	Dinas Kesehatan	39.666.881.520,20	36.735.693.055,48	707.801.600,00	696.948.705,99	-	1.404.750.305,99	35.330.942.749,49
4	Rumah Sakit Umum Daerah	4.602.862.760,00	3.959.778.045,97	-	27.328.700,00	-	27.328.700,00	3.932.449.345,97
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	46.365.918.173,00	45.627.561.354,79	-	-	-	-	45.627.561.354,79
6	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	383.178.178.355,00	374.712.970.857,23	1.727.635.193,46	1.800.000,00	-	1.729.435.193,46	372.983.535.663,77
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	4.661.930.000,00	4.449.077.000,00	-	384.415.000,00	-	384.415.000,00	4.064.662.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatar	190.000.000,00	189.780.000,00	189.780.000,00	-	-	189.780.000,00	-
9	Dinas Sosial	31.799.000,00	31.799.000,00	-	-	-	-	31.799.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	879.606.000,00	873.010.000,00	-	18.700.000,00	-	18.700.000,00	854.310.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	128.680.000,00	128.105.000,00	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	119.105.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.585.744.347,00	2.064.061.250,00	-	550.275,00	-	550.275,00	2.063.510.975,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	886.800.000,00	879.107.170,00	-	14.733.110,00	-	14.733.110,00	864.374.060,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.111.900.000,00	1.107.717.000,00	-	-	-	-	1.107.717.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.918.893.615,00	8.854.515.166,00	279.800.000,00	1.095.000,00	-	280.895.000,00	8.573.620.166,00
17	Dinas Perhubungan	1.206.129.241,00	1.198.791.241,00	9.952.000,00	2.850.000,00	-	12.802.000,00	1.185.989.241,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	720.331.904,00	716.393.904,00	18.859.604,00	-	-	18.859.604,00	697.534.300,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	648.900.000,00	647.918.256,38	-	15.290.000,00	-	15.290.000,00	632.628.256,38
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	372.611.855,00	372.313.855,00	-	-	-	-	372.313.855,00
21	Dinas Perikanan	134.100.000,80	133.600.000,00	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00	121.100.000,00
22	Dinas Pertanian	281.000.000,00	279.700.000,00	-	-	-	-	279.700.000,00
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	146.450.000,00	146.150.000,00	119.700.000,00	13.650.000,00	-	133.350.000,00	12.800.000,00
24	Sekretariat Daerah	9.967.658.000,00	9.842.991.820,00	-	372.595.300,00	-	372.595.300,00	9.470.396.520,00
25	Sekretariat DPRD	1.890.873.000,00	1.888.004.000,00	413.411.000,00	83.185.000,00	-	496.596.000,00	1.391.408.000,00
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1.021.544.000,00	872.790.000,00	-	17.000.000,00	-	17.000.000,00	855.790.000,00
27	Kecamatan Banyuasin I	1.128.978.507,00	1.125.240.922,00	-	-	-	-	1.125.240.922,00
28	Kecamatan Banyuasin II	784.119.834,00	783.654.547,00	-	75.584.000,00	-	75.584.000,00	708.070.547,00
29	Kecamatan Betung	14.000.000,00	13.750.000,00	-	-	-	-	13.750.000,00
30	Kecamatan rantau Bayur	26.400.000,00	24.000.000,00	-	-	-	-	24.000.000,00
31	Kecamatan Pulau Rimau	1.411.667.700,00	1.411.017.700,00	374.751.700,00	8.000.000,00	-	382.751.700,00	1.028.266.000,00
32	Kecamatan Talang Kelapa	395.200.000,00	395.200.000,00	-	14.100.000,00	-	14.100.000,00	381.100.000,00
33	Kecamatan Rambutan	50.900.000,00	50.900.000,00	-	-	-	-	50.900.000,00
34	Kecamatan Tungkal Ilir	8.300.000,00	8.300.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	7.300.000,00
35	Kecamatan Tanjung Lago	73.500.000,00	70.997.000,00	-	-	-	-	70.997.000,00
36	Kecamatan Sembawa	49.500.000,00	49.500.000,00	-	-	-	-	49.500.000,00
37	Kecamatan Suak Tapeh	40.900.000,00	40.900.000,00	-	77.986,00	-	77.986,00	40.822.014,00
38	Kecamatan Banyuasin II	528.200.000,00	527.147.000,00	-	-	-	-	527.147.000,00
39	Kecamatan Makarti Jaya	22.050.000,00	22.050.000,00	-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	21.000.000,00
40	Kecamatan Muara Padang	26.505.000,00	23.508.892,00	-	-	-	-	23.508.892,00
41	Kecamatan Muara Sugihan	24.250.000,00	24.250.000,00	-	8.750.000,00	-	8.750.000,00	15.500.000,00
42	Kecamatan Muara Telang	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	-	-	19.700.000,00
43	Kecamatan Air Salek	12.000.000,00	11.500.000,00	-	-	-	-	11.500.000,00
44	Kecamatan Sumber Marga Telang	47.349.000,00	47.349.000,00	-	2.700.000,00	-	2.700.000,00	44.649.000,00
45	Kecamatan Air Kumbang	108.500.000,00	108.500.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	93.500.000,00
46	Kecamatan Selat Penuguan	68.660.000,00	68.660.000,00	-	7.560.000,00	-	7.560.000,00	61.100.000,00
47	Kecamatan Karang Agung Ilir	60.000.000,00	60.000.000,00	-	24.050.000,00	-	24.050.000,00	35.950.000,00
48	Inspektorat Daerah	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	-	-	7.480.000,00
49	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	257.500.000,00	255.467.200,00	-	-	-	-	255.467.200,00
50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	250.100.000,00	248.417.200,00	-	-	-	-	248.417.200,00
51	Badan Pendapatan Daerah	731.077.817,68	727.292.950,00	-	-	-	-	727.292.950,00
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>599.020.340.578,68</b>	<b>582.776.915.571,29</b>	<b>4.535.374.097,46</b>	<b>7.731.704.233,99</b>	<b>-</b>	<b>12.267.078.331,45</b>	<b>570.509.837.239,84</b>

**REALISASI BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER TAHUN ANGGARAN 2020  
PER 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2020**

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020		
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA			TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK	
1	SDN 1 AIR KUMBANG	277.583,0	129.690.000,0	2.400.000,0	110.377.583,0	-	-	-	13.000.000,0	13.000.000,0	125.777.583,0	4.190.000,0	-	-	4.190.000,0		
2	SDN 2 AIR KUMBANG	1.370.000,0	91.260.000,0	1.800.000,0	74.139.000,0	-	-	-	16.627.500,0	16.627.500,0	92.566.500,0	63.500,0	934.274,0	-	934.274,0	997.774,0	
3	SDN 3 AIR KUMBANG	521,0	243.810.000,0	24.000.000,0	205.440.220,0	-	-	-	14.370.000,0	14.370.000,0	243.810.220,0	301,0	3.832.000,0	3.032.000,0	800.000,0	800.301,0	
4	SDN 4 AIR KUMBANG	-	186.030.000,0	25.800.000,0	145.034.000,0	1.500.000,0	-	-	13.696.000,0	15.196.000,0	186.030.000,0	-	2.765.750,0	2.765.750,0	-	-	
5	SDN 5 AIR KUMBANG	3.287.173,0	111.060.000,0	12.000.000,0	83.561.200,0	-	-	-	9.127.500,0	9.127.500,0	104.688.700,0	9.658.473,0	1.432.500,0	30.000,0	1.402.500,0	11.060.973,0	
6	SDN 6 AIR KUMBANG	10.840,0	178.920.000,0	17.800.000,0	142.312.500,0	4.380.000,0	-	-	14.427.500,0	18.807.500,0	178.920.000,0	10.840,0	1.650.000,0	1.650.000,0	-	10.840,0	
7	SDN 7 AIR KUMBANG	9.750.680,0	246.780.000,0	24.000.000,0	204.425.420,0	4.550.000,0	-	-	18.103.500,0	22.653.500,0	251.078.920,0	5.451.760,0	2.593.450,0	-	2.593.450,0	8.045.210,0	
8	SDN 8 AIR KUMBANG	-	96.860.000,0	6.600.000,0	77.100.400,0	-	-	-	10.142.000,0	10.142.000,0	93.842.400,0	2.817.600,0	690.000,0	345.000,0	345.000,0	3.162.600,0	
9	SDN 9 AIR KUMBANG	-	88.020.000,0	-	78.582.400,0	-	-	-	9.337.600,0	9.337.600,0	87.920.000,0	100.000,0	255.000,0	30.000,0	225.000,0	325.000,0	
10	SDN 10 AIR KUMBANG	837,0	122.220.000,0	8.200.000,0	101.670.172,0	-	-	-	12.349.800,0	12.349.800,0	122.219.972,0	865,0	1.011.000,0	435.000,0	576.000,0	576.865,0	
11	SDN 11 AIR KUMBANG	371.685,0	230.400.000,0	8.500.000,0	193.271.500,0	2.200.000,0	-	-	26.500.000,0	28.700.000,0	230.471.500,0	300.185,0	2.179.240,0	-	2.179.240,0	2.479.425,0	
12	SDN 12 AIR KUMBANG	2.446.500,0	248.490.000,0	-	216.046.500,0	-	-	-	23.000.000,0	23.000.000,0	239.046.500,0	11.890.000,0	1.312.500,0	-	1.312.500,0	13.202.500,0	
13	SDN 13 AIR KUMBANG	8.830.000,0	159.390.000,0	4.800.000,0	140.858.000,0	-	-	-	21.962.000,0	21.962.000,0	167.620.000,0	600.000,0	2.130.000,0	75.000,0	2.055.000,0	2.655.000,0	
14	SDN 14 AIR KUMBANG	1.390.872,0	87.210.000,0	10.000.000,0	67.144.000,0	6.700.000,0	-	-	4.736.000,0	11.436.000,0	88.580.000,0	20.872,0	1.029.546,0	75.000,0	954.546,0	975.418,0	
15	SDN 15 AIR KUMBANG	288.200,0	110.790.000,0	10.200.000,0	86.088.039,0	400.000,0	-	-	13.886.800,0	14.286.800,0	110.574.839,0	503.361,0	1.030.000,0	-	1.030.000,0	1.533.361,0	
16	SDN 16 AIR KUMBANG	1.469.500,0	177.210.000,0	1.500.000,0	147.367.500,0	6.000.000,0	-	-	22.052.000,0	28.052.000,0	178.919.500,0	1.760.000,0	100.000,0	100.000,0	-	1.760.000,0	
17	SDN 17 AIR KUMBANG	165.384,0	187.110.000,0	15.850.000,0	151.015.964,0	865.000,0	-	-	18.405.364,0	19.270.364,0	186.136.328,0	1.139.056,0	3.106.728,0	-	3.106.728,0	4.245.784,0	
18	SDN 18 AIR KUMBANG	756.500,0	165.330.000,0	-	142.406.100,0	-	-	-	15.647.200,0	15.647.200,0	158.053.300,0	8.033.200,0	3.075.000,0	100.000,0	2.975.000,0	11.008.200,0	
19	SDN 19 AIR KUMBANG	320.043,0	124.740.000,0	13.200.000,0	95.257.750,0	1.330.000,0	-	-	12.722.000,0	14.052.000,0	122.509.750,0	2.550.293,0	1.680.000,0	-	1.680.000,0	4.230.293,0	
20	SDN 20 AIR KUMBANG	967.700,0	57.780.000,0	5.600.000,0	45.307.700,0	1.500.000,0	-	-	6.301.500,0	7.801.500,0	58.709.200,0	38.500,0	600.000,0	-	600.000,0	638.500,0	
21	SDN 21 AIR KUMBANG	250.000,0	67.410.000,0	2.100.000,0	54.176.500,0	2.350.000,0	-	-	4.444.100,0	6.794.100,0	63.070.600,0	4.589.400,0	105.000,0	-	105.000,0	4.694.400,0	
22	SDN 1 AIR SALEK	29.671.565,0	325.440.000,0	11.700.000,0	307.259.000,0	-	-	-	33.119.000,0	33.119.000,0	352.078.000,0	3.033.565,0	3.787.000,0	-	3.787.000,0	6.820.565,0	
23	SDN 2 AIR SALEK	400.000,0	70.920.000,0	3.000.000,0	53.446.000,0	6.479.000,0	-	-	7.274.000,0	13.753.000,0	70.199.000,0	1.121.000,0	232.500,0	52.500,0	180.000,0	1.301.000,0	
24	SDN 3 AIR SALEK	176.754,0	166.950.000,0	6.400.000,0	142.022.722,0	3.350.000,0	-	-	13.760.000,0	17.110.000,0	165.532.722,0	1.711.000,0	1.594.032,0	660.500,0	-	660.500,0	2.254.532,0
25	SDN 4 AIR SALEK	-	157.320.000,0	3.600.000,0	139.720.000,0	-	-	-	14.000.000,0	14.000.000,0	157.320.000,0	-	-	-	-	-	
26	SDN 5 AIR SALEK	-	100.980.000,0	4.800.000,0	85.242.400,0	5.000.000,0	-	-	5.937.600,0	10.937.600,0	100.980.000,0	-	-	-	-	-	
27	SDN 6 AIR SALEK	-	100.170.000,0	5.400.000,0	83.932.500,0	3.900.000,0	-	-	6.937.500,0	10.837.500,0	100.170.000,0	-	187.500,0	-	187.500,0	187.500,0	
28	SDN 7 AIR SALEK	320.058,0	89.730.000,0	3.300.000,0	64.995.058,0	6.475.000,0	-	-	15.680.000,0	22.155.000,0	90.050.058,0	-	650.510,0	45.000,0	605.510,0	605.510,0	
29	SDN 8 AIR SALEK	80.000,0	132.480.000,0	12.000.000,0	110.078.000,0	4.520.000,0	-	-	5.794.000,0	10.314.000,0	132.922.000,0	168.000,0	1.664.200,0	-	1.664.200,0	1.832.200,0	
30	SDN 9 AIR SALEK	189.088,0	257.220.000,0	12.500.000,0	216.154.525,0	9.586.000,0	-	-	18.982.300,0	28.568.300,0	257.222.825,0	186.263,0	3.936.400,0	-	3.936.400,0	4.122.663,0	
31	SDN 10 AIR SALEK	188.840,0	215.190.000,0	12.000.000,0	157.663.000,0	9.000.000,0	-	-	23.900.000,0	32.900.000,0	202.563.000,0	12.815.840,0	3.924.000,0	-	3.924.000,0	16.739.840,0	
32	SDN 11 AIR SALEK	-	84.510.000,0	5.200.000,0	69.145.000,0	2.250.000,0	-	-	7.835.000,0	10.085.000,0	84.430.000,0	80.000,0	292.500,0	-	292.500,0	372.500,0	
33	SDN 12 AIR SALEK	49.993,0	145.530.000,0	1.200.000,0	118.526.000,0	11.135.000,0	-	-	8.596.090,0	19.731.090,0	139.457.090,0	6.122.903,0	2.032.000,0	-	2.032.000,0	8.154.903,0	
34	SDN 13 AIR SALEK	3.226.908,0	138.150.000,0	3.000.000,0	118.556.008,0	-	-	-	12.535.900,0	12.535.900,0	134.091.908,0	7.285.000,0	629.000,0	-	629.000,0	7.914.000,0	
35	SDN 14 AIR SALEK	952.069,0	128.880.000,0	12.600.000,0	86.115.700,0	17.770.000,0	-	-	13.346.300,0	31.116.300,0	129.832.000,0	1.594.032,0	1.598.069,0	-	1.598.069,0	1.598.069,0	
36	SDN 15 AIR SALEK	6.500,0	125.010.000,0	8.400.000,0	100.795.000,0	5.000.000,0	-	-	5.000.000,0	10.000.000,0	119.195.000,0	5.821.500,0	-	-	5.821.500,0	5.821.500,0	
37	SDN 16 AIR SALEK	789,0	117.270.000,0	1.200.000,0	95.333.400,0	-	-	-	20.375.000,0	20.375.000,0	116.908.400,0	362.389,0	365.000,0	-	365.000,0	727.389,0	
38	SDN 17 AIR SALEK	43,0	162.090.000,0	9.300.000,0	134.242.093,0	8.750.000,0	-	-	8.585.200,0	17.335.200,0	160.877.293,0	1.212.750,0	822.498,0	822.498,0	-	1.212.750,0	
39	SDN 18 AIR SALEK	500,0	166.140.000,0	5.700.000,0	145.600.000,0	8.100.000,0	-	-	-	8.100.000,0	159.400.000,0	6.740.500,0	1.887.500,0	557.500,0	1.330.000,0	8.070.500,0	
40	SDN 19 AIR SALEK	1.000,0	98.730.000,0	200.000,0	69.600.000,0	10.000.000,0	-	-	12.110.000,0	22.110.000,0	91.910.000,0	6.821.000,0	400.000,0	-	400.000,0	7.221.000,0	
41	SDN 20 AIR SALEK	-	140.760.000,0	3.400.000,0	128.990.500,0	7.500.000,0	-	-	869.500,0	8.369.500,0	140.760.000,0	-	300.000,0	-	300.000,0	300.000,0	
42	SDN 21 AIR SALEK	180.448,0	190.710.000,0	9.000.000,0	167.201.500,0	4.000.000,0	-	-	9.846.000,0	13.846.000,0	190.047.500,0	842.948,0	1.181.500,0	-	1.181.500,0	2.024.448,0	
43	SDN 22 AIR SALEK	-	90.360.000,0	2.400.000,0	79.339.100,0	2.520.000,0	-	-	6.100.900,0	8.620.900,0	90.360.000,0	-	407.000,0	90.000,0	407.000,0	317.000,0	
44	SDN 23 AIR SALEK	632.764,0	166.770.000,0	5.900.000,0	141.649.500,0	12.967.900,0	1.660.000,0	-	5.172.400,0	19.800.300,0	167.349.800,0	52.964,0	853.000,0	-	853.000,0	905.964,0	
45	SDN 24 AIR SALEK	735.167,0	109.170.000,0	4.765.000,0	84.036.500,0	-	-	-	21.065.500,0	21.065.500,0	109.867.000,0	38.167,0	-	-	38.167,0	38.167,0	
46	SDN 25 AIR SALEK	151.000,0	269.190.000,0	20.000.000,0	209.952.000,0	17.900.000,0	-	-	21.000.000,0	38.900.000,0	268.852.000,0	489.000,0	2.918.250,0	-	2.918.250,0	3.407.250,0	
47	SDN 1 BANYUASIN I	63,0	334.530.000,0	6.550.000,0	260.870.552,0	13.399.000,0	-	-	53.709.600,0	67.108.600,0	334.529.152,0	911,0	854.682,0	614.682,0	240.000,0	240.911,0	
48	SDN 2 BANYUASIN I	50.819,0	112.770.000,0	2.600.000,0	96.138.928,0	3.536.000,0	-	-	10.545.000,0	14.081.000,0	112.819.928,0	891,0	135.000,0	-	135.000,0	135.891,0	
49	SDN 3 BANYUASIN I	4.176,0	76.230.000,0	3.000.000,0	60.819.950,0	4.416.000,0	-	-	11.412.800,0	12.412.800,0	76.232.750,0	1.426,0	360.000,0	360.000,0	-	1.426,0	
50	SDN 4 BANYUASIN I	574.723,0	161.460.000,0	2.400.000,0	129.981.100,0	7.945.000,0	-	-	21.579.300,0	29.524.300,0	161.905.400,0	129.323,0	300.000,0	-	300.000,0	429.323,0	
51	SDN 5 BANYUASIN I	-	120.960.000,0	9.000.000,0	86.100.000,0	3.400.000,0	-	-	22.460.000,0	25.860.000,0	120.960.000,0	-	1.800.000,0	1.800.000,0	-	-	
52	SDN 6 BANYUASIN I	26.970,0	173.790.000,0	11.000.000,0	141.003.000,0	-	-	3.920.000,0	17.858.100,0	21.778.100,0	173.781.100,0	35.876,0	2.250.000,0	-	2.250.000,0	2.285.876,0	
53	SDN 7 BANYUASIN I	3.205.170,0	377.910.000,0	19.500.000,0	303.667.586,0	23.350.000,0	-	-	25.40								

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		REALISASI BELANJA							JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020
		SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA MODAL			TOTAL PENERIMAAN PAJAK	TOTAL PENGELUARAN PAJAK		
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2															
55	SDN 9 BANYUASIN I	6,0	127.800.000,0	6.600.000,0	90.339.976,0	7.500.000,0	-	-	23.360.000,0	30.860.000,0	127.799.976,0	30,0	1.335.271,0	-	1.335.271,0	1.335.301,0
56	SDN 10 BANYUASIN I	694.443,0	360.720.000,0	16.800.000,0	296.561.721,0	14.000.000,0	-	-	33.750.000,0	47.750.000,0	361.111.721,0	302.722,0	8.961.250,0	-	8.961.250,0	9.263.972,0
57	SDN 11 BANYUASIN I	383.103,0	181.800.000,0	4.700.000,0	141.422.874,0	5.548.000,0	-	-	30.217.000,0	35.765.000,0	181.887.874,0	295.229,0	295.000,0	200.000,0	95.000,0	390.229,0
58	SDN 12 BANYUASIN I	176.381,0	171.990.000,0	11.650.000,0	135.137.918,0	3.150.000,0	-	-	18.961.000,0	22.111.000,0	168.898.918,0	3.267.463,0	438.900,0	-	438.900,0	3.706.363,0
59	SDN 13 BANYUASIN I	10.912,0	195.750.000,0	1.400.000,0	167.369.174,0	6.225.000,0	-	-	7.175.300,0	13.400.300,0	182.169.474,0	13.591.438,0	2.316.800,0	-	2.316.800,0	15.908.238,0
60	SDN 14 BANYUASIN I	63,0	127.980.000,0	8.100.000,0	92.656.063,0	8.600.000,0	-	-	18.024.000,0	26.624.000,0	127.380.063,0	600.000,0	380.000,0	-	380.000,0	980.000,0
61	SDN 15 BANYUASIN I	2.349.824,0	140.040.000,0	3.000.000,0	101.527.660,0	11.850.000,0	-	-	26.012.100,0	37.862.100,0	142.389.760,0	64,0	938.750,0	938.750,0	-	64,0
62	SDN 16 BANYUASIN I	154,0	123.480.000,0	3.000.000,0	101.054.080,0	1.535.000,0	-	-	17.891.000,0	19.426.000,0	123.480.080,0	74,0	-	-	-	74,0
63	SDN 17 BANYUASIN I	232,0	134.010.000,0	9.600.000,0	99.400.608,0	5.000.000,0	-	-	20.000.000,0	25.000.000,0	134.000.608,0	9.624,0	1.346.800,0	1.346.800,0	-	9.624,0
64	SDN 18 BANYUASIN I	31.427,0	186.120.000,0	3.600.000,0	143.898.293,0	8.975.000,0	-	-	29.589.000,0	38.564.000,0	186.062.293,0	89.134,0	2.473.550,0	2.023.550,0	450.000,0	539.134,0
65	SDN 19 BANYUASIN I	1.086.964,0	254.700.000,0	8.700.000,0	193.776.716,0	4.825.000,0	-	-	44.940.000,0	49.765.000,0	252.241.716,0	3.545.248,0	3.830.700,0	2.900.900,0	929.800,0	4.475.048,0
66	SDN 20 BANYUASIN I	338.109,0	333.900.000,0	30.000.000,0	233.146.846,0	5.000.000,0	-	-	60.000.000,0	65.000.000,0	328.146.846,0	6.091.263,0	12.941.800,0	-	12.941.800,0	19.033.063,0
67	SDN 21 BANYUASIN I	133.276,0	148.050.000,0	3.000.000,0	117.828.413,0	5.000.000,0	-	-	22.354.100,0	27.354.100,0	148.182.513,0	763,0	487.500,0	-	487.500,0	488.263,0
68	SDN 22 BANYUASIN I	-	84.870.000,0	2.400.000,0	74.750.000,0	2.720.000,0	-	-	5.000.000,0	7.720.000,0	84.870.000,0	-	735.300,0	735.300,0	-	-
69	SDN 23 BANYUASIN I	1.200.759,0	189.990.000,0	6.400.000,0	154.939.988,0	6.800.000,0	-	-	21.700.000,0	28.500.000,0	189.839.988,0	1.350.771,0	900.000,0	600.000,0	300.000,0	1.650.771,0
70	SDN 24 BANYUASIN I	501,0	135.990.000,0	5.800.000,0	99.605.386,0	12.860.000,0	-	-	16.645.000,0	29.505.000,0	134.910.386,0	1.080.115,0	850.440,0	370.440,0	480.000,0	1.560.115,0
71	SDN 25 BANYUASIN I	654.236,0	161.460.000,0	2.600.000,0	152.347.673,0	450.000,0	-	-	-	450.000,0	155.397.673,0	6.716.563,0	205.000,0	-	205.000,0	6.921.563,0
72	SDN 26 BANYUASIN I	416,0	110.340.000,0	2.100.000,0	81.738.810,0	9.760.000,0	-	-	16.741.600,0	26.501.600,0	110.340.410,0	6,0	345.000,0	170.000,0	175.000,0	175.006,0
73	SDN 27 BANYUASIN I	1.122.224,0	156.600.000,0	4.600.000,0	123.410.394,0	3.825.000,0	-	-	21.796.000,0	25.621.000,0	153.631.394,0	4.090.830,0	145.000,0	-	145.000,0	4.235.830,0
74	SDN 28 BANYUASIN I	6.133.019,0	149.940.000,0	7.700.000,0	98.190.138,0	12.300.600,0	-	-	25.607.000,0	37.907.600,0	143.797.738,0	12.275.281,0	1.855.060,0	660.000,0	1.195.060,0	13.470.341,0
75	SDN 29 BANYUASIN I	-	156.510.000,0	3.000.000,0	125.078.800,0	3.600.000,0	-	-	24.561.200,0	28.161.200,0	156.240.000,0	270.000,0	1.309.000,0	1.309.000,0	-	270.000,0
76	SDN 30 BANYUASIN I	589.283,0	81.450.000,0	2.925.000,0	72.429.200,0	-	-	-	6.440.000,0	6.440.000,0	81.794.200,0	245.083,0	321.250,0	-	321.250,0	566.333,0
77	SDN 1 BANYUASIN II	29.510.565,0	662.130.000,0	7.300.000,0	514.063.000,0	57.215.000,0	-	-	70.009.100,0	127.224.100,0	648.587.100,0	43.053.465,0	12.965.500,0	-	12.965.500,0	56.018.965,0
78	SDN 2 BANYUASIN II	207,0	60.480.000,0	6.050.000,0	43.547.700,0	5.000.000,0	-	-	5.709.600,0	10.709.600,0	60.307.300,0	172.907,0	843.000,0	843.000,0	-	172.907,0
79	SDN 3 BANYUASIN II	48.815.800,0	582.480.000,0	14.400.000,0	460.619.500,0	62.795.000,0	-	1.574.100,0	-	64.369.100,0	539.388.600,0	91.907.200,0	20.979.750,0	18.614.150,0	2.365.600,0	94.272.800,0
80	SDN 4 BANYUASIN II	-	70.650.000,0	-	62.061.000,0	-	-	-	8.589.000,0	8.589.000,0	70.650.000,0	-	-	-	-	-
81	SDN 5 BANYUASIN II	4.640.000,0	112.230.000,0	8.850.000,0	91.879.850,0	-	-	-	2.413.000,0	2.413.000,0	103.142.850,0	13.727.150,0	696.500,0	-	696.500,0	14.423.650,0
82	SDN 6 BANYUASIN II	-	56.970.000,0	4.800.000,0	39.917.900,0	900.000,0	-	-	3.700.100,0	4.600.100,0	49.318.000,0	7.652.000,0	280.000,0	-	280.000,0	7.932.000,0
83	SDN 7 BANYUASIN II	2.890.192,0	557.460.000,0	25.100.000,0	455.546.800,0	47.880.000,0	-	-	31.805.600,0	79.685.600,0	560.332.400,0	17.792,0	14.826.390,0	5.519.690,0	9.306.700,0	9.324.492,0
84	SDN 8 BANYUASIN II	2.916.200,0	146.790.000,0	6.800.000,0	103.556.200,0	14.750.000,0	-	-	23.310.000,0	38.060.000,0	148.416.200,0	1.290.000,0	2.581.000,0	1.841.000,0	740.000,0	2.030.000,0
85	SDN 9 BANYUASIN II	22.806.000,0	574.380.000,0	24.200.000,0	480.506.000,0	51.400.000,0	-	-	20.020.000,0	71.420.000,0	576.126.000,0	21.060.000,0	13.336.340,0	9.134.540,0	4.201.800,0	25.261.800,0
86	SDN 10 BANYUASIN II	690.773,0	52.560.000,0	6.000.000,0	38.222.950,0	400.000,0	-	-	1.627.500,0	2.027.500,0	46.250.450,0	7.000.323,0	375.000,0	-	375.000,0	7.375.323,0
87	SDN 11 BANYUASIN II	576.252,0	129.240.000,0	8.400.000,0	101.092.500,0	1.300.000,0	-	-	10.000.600,0	11.300.600,0	120.793.100,0	9.023.152,0	964.600,0	-	964.600,0	9.987.752,0
88	SDN 12 BANYUASIN II	-	24.840.000,0	-	24.840.000,0	-	-	-	-	-	24.840.000,0	-	-	-	-	-
89	SDN 13 BANYUASIN II	-	27.540.000,0	3.800.000,0	21.580.500,0	-	-	-	1.715.800,0	1.715.800,0	27.096.300,0	443.700,0	190.000,0	190.000,0	-	443.700,0
90	SDN 14 BANYUASIN II	369,0	114.300.000,0	6.000.000,0	81.625.000,0	19.100.000,0	-	-	7.574.200,0	26.674.200,0	114.299.200,0	1.169,0	1.650.000,0	-	1.650.000,0	1.651.169,0
91	SDN 15 BANYUASIN II	85.831,0	293.940.000,0	15.000.000,0	230.466.520,0	10.150.000,0	-	-	30.740.000,0	40.890.000,0	286.356.520,0	7.669.311,0	5.060.100,0	-	5.060.100,0	12.729.411,0
92	SDN 2 BANYUASIN III	316,0	103.770.000,0	8.400.000,0	76.879.990,0	6.874.000,0	-	-	11.033.700,0	17.907.700,0	103.187.690,0	582.626,0	1.492.863,0	472.863,0	1.020.000,0	1.602.626,0
93	SDN 3 BANYUASIN III	25.306,0	102.960.000,0	7.800.000,0	80.049.917,0	2.000.000,0	-	-	11.075.000,0	13.075.000,0	100.924.917,0	2.060.389,0	896.000,0	-	896.000,0	2.956.389,0
94	SDN 4 BANYUASIN III	246.043,0	244.620.000,0	3.200.000,0	180.888.646,0	8.100.000,0	-	-	51.054.900,0	59.154.900,0	243.243.546,0	1.622.497,0	3.836.760,0	1.897.560,0	1.939.200,0	5.616.697,0
95	SDN 5 BANYUASIN III	13.738,0	346.050.000,0	12.850.000,0	250.968.135,0	41.619.000,0	-	-	39.940.100,0	81.559.100,0	345.377.235,0	686.503,0	8.391.913,0	6.380.415,0	2.011.498,0	2.698.011,0
96	SDN 6 BANYUASIN III	665,0	307.980.000,0	25.200.000,0	244.059.477,0	17.690.000,0	-	-	20.522.000,0	38.212.000,0	307.471.477,0	509.188,0	6.004.731,0	3.416.550,0	2.588.181,0	3.097.369,0
97	SDN 7 BANYUASIN III	253.927,0	114.030.000,0	6.000.000,0	95.326.047,0	5.500.000,0	-	-	6.422.500,0	11.922.500,0	113.248.547,0	1.035.380,0	1.234.000,0	-	1.234.000,0	2.269.380,0
98	SDN 8 BANYUASIN III	3.163.413,0	129.150.000,0	4.800.000,0	114.860.010,0	980.000,0	-	-	11.207.600,0	12.187.600,0	131.847.610,0	465.803,0	360.000,0	-	360.000,0	825.803,0
99	SDN 9 BANYUASIN III	50.103,0	137.070.000,0	8.100.000,0	105.253.761,0	4.700.000,0	-	-	19.016.000,0	23.716.000,0	137.069.761,0	50.342,0	1.003.000,0	-	1.003.000,0	1.053.342,0
100	SDN 10 BANYUASIN III	910.789,0	113.580.000,0	4.150.000,0	101.348.438,0	1.350.000,0	-	-	4.236.000,0	5.586.000,0	111.084.438,0	3.406.351,0	1.029.635,0	1.029.635,0	-	3.406.351,0
101	SDN 11 BANYUASIN III	221.789,0	176.760.000,0	5.950.000,0	135.195.385,0	3.450.000,0	-	-	23.679.200,0	27.129.200,0	168.274.585,0	8.707.204,0	1.871.100,0	1.871.100,0	-	8.707.204,0
102	SDN 12 BANYUASIN III	1.024.014,0	108.180.000,0	4.800.000,0	94.256.601,0	-	-	-	5.411.888,0	5.411.888,0	104.468.489,0	4.735.525,0	720.000,0	360.000,0	360.000,0	5.095.525,0
103	SDN 13 BANYUASIN III	748.371,0	369.810.000,0	15.000.000,0	258.918.907,0	13.400.000,0	-	-	61.995.000,0	75.395.000,0	349.313.907,0	21.244.464,0	9.282.141,0	7.360.019,0	1.922.122,0	23.166.586,0
104	SDN 14 BANYUASIN III	33.412,0	218.880.000,0	15.400.000,0	177.771.592,0	500.000,0	-	-	25.218.000,0	25.718.000,0	218.889.592,0	23.820,0	1.807.500,0	1.440.000,0	367.500,0	391.320,0
105	SDN 15 BANYUASIN III	514.302,0	315.270.000,0	18.100.000,0	227.615.472,0	9.975.000,0	-	-	59.723.600,0	69.698.600,0	315.					

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA					JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020		
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK	
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN								ASET TETAP LAINNYA
1	2															
111	SDN 21 BANYUASIN III	66.742,0	156.600.000,0	10.800.000,0	118.403.533,0	6.600.000,0	-	-	20.827.000,0	27.427.000,0	156.630.533,0	36.209,0	2.363.960,0	-	2.363.960,0	2.400.169,0
112	SDN 22 BANYUASIN III	378.602,0	118.350.000,0	5.950.000,0	103.523.278,0	3.650.000,0	-	-	5.491.700,0	9.141.700,0	118.614.978,0	113.624,0	1.240.000,0	-	1.240.000,0	1.353.624,0
113	SDN 23 BANYUASIN III	1.086.180,0	95.220.000,0	6.150.000,0	79.156.180,0	-	-	-	11.000.000,0	11.000.000,0	96.306.180,0	-	1.275.000,0	430.000,0	845.000,0	845.000,0
114	SDN 24 BANYUASIN III	12.451,0	164.970.000,0	6.050.000,0	145.700.680,0	8.900.000,0	-	-	4.313.400,0	13.213.400,0	164.964.080,0	18.371,0	1.707.500,0	-	1.707.500,0	1.725.671,0
115	SDN 25 BANYUASIN III	861,0	182.070.000,0	9.000.000,0	132.934.802,0	6.450.000,0	-	-	33.565.000,0	40.015.000,0	181.949.802,0	121.059,0	2.488.126,0	-	2.488.126,0	2.609.185,0
116	SDN 26 BANYUASIN III	571,0	88.560.000,0	4.800.000,0	65.610.065,0	10.940.000,0	-	-	7.150.000,0	18.090.000,0	88.500.065,0	60.506,0	1.720.920,0	-	1.720.920,0	1.781.426,0
117	SDN 27 BANYUASIN III	7.177.642,0	227.160.000,0	16.000.000,0	175.848.723,0	-	-	-	42.477.500,0	42.477.500,0	234.326.223,0	11.419,0	2.819.454,0	1.544.454,0	1.275.000,0	1.286.419,0
118	SDN 28 BANYUASIN III	576,0	149.040.000,0	8.400.000,0	137.044.101,0	-	-	-	1.340.400,0	1.340.400,0	146.784.501,0	2.256.075,0	1.675.727,0	410.000,0	1.265.727,0	3.521.802,0
119	SDN 29 BANYUASIN III	122,0	79.830.000,0	6.600.000,0	63.004.183,0	2.000.000,0	-	-	8.218.500,0	10.218.500,0	79.822.683,0	7.439,0	864.300,0	230.000,0	634.300,0	237.439,0
120	SDN 30 BANYUASIN III	849.236,0	209.340.000,0	9.200.000,0	160.497.967,0	28.300.000,0	-	-	12.126.400,0	40.426.400,0	210.124.367,0	64.869,0	5.337.800,0	3.057.800,0	2.280.000,0	2.344.869,0
121	SDN 31 BANYUASIN III	409,0	78.030.000,0	9.600.000,0	57.229.730,0	3.900.000,0	-	-	5.099.900,0	8.999.900,0	75.829.630,0	2.200.779,0	804.546,0	-	804.546,0	3.005.325,0
122	SDN 32 BANYUASIN III	149.042,0	194.490.000,0	9.200.000,0	135.472.000,0	9.750.000,0	-	-	14.796.000,0	24.546.000,0	169.218.000,0	25.421.042,0	2.656.906,0	-	2.656.906,0	28.077.948,0
123	SDN 33 BANYUASIN III	6.339.050,0	128.160.000,0	4.000.000,0	89.245.083,0	-	-	-	19.940.000,0	19.940.000,0	113.185.083,0	21.313.967,0	1.705.000,0	1.525.000,0	180.000,0	21.493.967,0
124	SDN 34 BANYUASIN III	332.680,0	148.680.000,0	10.800.000,0	114.947.460,0	800.000,0	-	-	22.453.000,0	23.253.000,0	149.000.460,0	12.220,0	1.140.000,0	760.000,0	380.000,0	392.220,0
125	SDN 35 BANYUASIN III	7.331.445,0	233.280.000,0	7.470.000,0	176.336.184,0	14.519.000,0	-	-	11.138.000,0	25.657.000,0	209.463.184,0	31.148.261,0	2.737.118,0	681.818,0	2.055.300,0	33.203.561,0
126	SDN 36 BANYUASIN III	1.420.830,0	58.770.000,0	3.600.000,0	48.150.953,0	-	-	-	8.294.500,0	8.294.500,0	60.045.453,0	145.377,0	180.000,0	-	180.000,0	325.377,0
127	SDN 37 BANYUASIN III	2,0	90.360.000,0	8.400.000,0	66.645.110,0	10.200.000,0	-	-	5.010.000,0	15.210.000,0	90.255.110,0	104.892,0	2.007.271,0	2.007.271,0	-	104.892,0
128	SDN 38 BANYUASIN III	343.558,0	89.730.000,0	10.800.000,0	65.808.000,0	1.200.000,0	-	-	12.000.000,0	13.200.000,0	89.808.000,0	265.558,0	799.800,0	-	799.800,0	1.065.358,0
129	SDN 39 BANYUASIN III	23.309,0	77.940.000,0	4.800.000,0	62.319.263,0	4.000.000,0	-	-	6.586.500,0	10.586.500,0	77.705.763,0	257.546,0	1.479.100,0	539.100,0	940.000,0	1.197.546,0
130	SDN 40 PERCOTOHAN BANYUASIN III	100.948,0	164.880.000,0	17.000.000,0	137.417.800,0	2.260.000,0	-	-	3.607.725,0	5.867.725,0	160.285.525,0	6.695.423,0	2.090.100,0	1.450.100,0	640.000,0	5.335.423,0
131	SDN 41 PLUS BANYUASIN III	1.945.495,0	226.800.000,0	10.800.000,0	164.519.500,0	13.820.000,0	-	-	39.198.500,0	53.018.500,0	228.338.000,0	407.495,0	5.606.640,0	1.730.000,0	3.876.640,0	4.284.135,0
132	SDN 1 BETUNG	17.081,0	248.670.000,0	18.800.000,0	196.270.440,0	7.400.000,0	-	-	24.750.000,0	32.150.000,0	247.220.440,0	1.466.641,0	750.000,0	-	750.000,0	2.216.641,0
133	SDN 2 BETUNG	7.697,0	202.770.000,0	16.800.000,0	143.094.996,0	28.310.000,0	-	-	14.516.800,0	42.826.800,0	202.721.796,0	55.901,0	3.838.862,0	1.275.000,0	2.563.862,0	2.619.763,0
134	SDN 3 BETUNG	-	136.620.000,0	21.400.000,0	98.557.000,0	11.000.000,0	-	-	5.593.000,0	16.593.000,0	136.550.000,0	70.000,0	2.774.636,0	-	2.774.636,0	2.844.636,0
135	SDN 4 BETUNG	4.709,0	169.380.000,0	7.600.000,0	152.247.263,0	2.800.000,0	-	-	6.686.800,0	9.486.800,0	169.334.063,0	50.646,0	977.454,0	547.454,0	430.000,0	480.646,0
136	SDN 5 BETUNG	714.399,0	481.230.000,0	19.200.000,0	378.857.342,0	40.110.000,0	-	-	41.487.900,0	47.597.900,0	479.655.242,0	2.289.157,0	8.416.000,0	5.201.000,0	3.215.000,0	5.504.157,0
137	SDN 6 BETUNG	14.473,0	257.490.000,0	25.250.000,0	176.053.445,0	20.940.000,0	-	-	35.246.100,0	56.186.100,0	257.489.545,0	14.928,0	5.691.500,0	4.107.500,0	1.584.000,0	1.598.928,0
138	SDN 7 BETUNG	51.007,0	197.190.000,0	11.600.000,0	163.946.749,0	16.800.000,0	-	-	4.894.200,0	21.694.200,0	197.240.949,0	58,0	1.894.154,0	1.894.154,0	-	58,0
139	SDN 8 BETUNG	1.480,0	117.090.000,0	8.000.000,0	86.500.568,0	400.000,0	-	-	11.721.200,0	12.121.200,0	106.621.768,0	10.469.712,0	1.078.200,0	-	1.078.200,0	11.547.912,0
140	SDN 9 BETUNG	-	171.270.000,0	18.000.000,0	120.215.000,0	18.075.000,0	-	-	5.040.000,0	23.115.000,0	161.330.000,0	9.940.000,0	3.440.000,0	1.650.000,0	1.790.000,0	11.730.000,0
141	SDN 10 BETUNG	3.174.261,0	265.410.000,0	9.000.000,0	232.768.500,0	9.090.000,0	-	-	10.692.000,0	19.782.000,0	261.550.500,0	7.033.761,0	740.000,0	-	740.000,0	7.773.761,0
142	SDN 11 BETUNG	46.038,0	194.310.000,0	12.275.000,0	151.659.774,0	7.560.000,0	-	-	22.813.600,0	30.373.600,0	194.308.374,0	47.664,0	1.922.750,0	1.352.750,0	570.000,0	617.664,0
143	SDN 12 BETUNG	79.085,0	595.170.000,0	21.000.000,0	492.716.086,0	21.990.000,0	-	-	59.462.500,0	81.452.500,0	595.168.586,0	80.499,0	4.631.087,0	-	4.631.087,0	4.711.586,0
144	SDN 13 BETUNG	-	134.280.000,0	11.400.000,0	87.427.000,0	-	-	-	6.354.000,0	6.354.000,0	105.181.000,0	29.099.000,0	585.000,0	-	585.000,0	29.684.000,0
145	SDN 14 BETUNG	25.614,0	296.820.000,0	22.850.000,0	216.111.038,0	27.080.000,0	-	-	30.677.000,0	57.757.000,0	296.718.038,0	127.576,0	4.150.000,0	-	4.150.000,0	4.277.576,0
146	SDN 15 BETUNG	-	114.390.000,0	18.000.000,0	83.640.000,0	5.750.000,0	-	-	7.000.000,0	12.750.000,0	114.390.000,0	-	2.145.000,0	1.095.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
147	SDN 16 BETUNG	2.566.581,0	242.730.000,0	18.400.000,0	193.103.000,0	8.000.000,0	-	-	23.284.000,0	31.284.000,0	242.787.000,0	2.509.581,0	1.989.800,0	-	1.989.800,0	4.499.381,0
148	SDN 17 BETUNG	74.505,0	259.650.000,0	22.000.000,0	191.390.286,0	20.055.000,0	-	-	26.213.400,0	46.268.400,0	259.658.686,0	65.819,0	4.474.997,0	-	4.474.997,0	4.540.816,0
149	SDN 18 BETUNG	4.350.000,0	53.550.000,0	-	47.133.800,0	6.030.000,0	-	-	4.435.700,0	10.465.700,0	57.599.500,0	300.500,0	380.000,0	380.000,0	300.500,0	
150	SDN 19 BETUNG	2.750.526,0	403.200.000,0	18.000.000,0	271.190.339,0	47.900.000,0	-	-	60.140.000,0	108.040.000,0	397.230.339,0	8.720.187,0	5.769.499,0	2.474.500,0	3.294.999,0	12.015.186,0
151	SDN 20 BETUNG	40.012,0	114.120.000,0	21.600.000,0	81.585.000,0	5.750.000,0	-	-	5.225.000,0	10.975.000,0	114.160.000,0	12,0	2.366.250,0	626.250,0	1.740.000,0	1.740.012,0
152	SDN 21 BETUNG	2.151.601,0	217.170.000,0	16.250.000,0	167.493.593,0	12.489.000,0	-	-	21.580.000,0	34.069.000,0	217.812.593,0	1.509.008,0	3.387.991,0	2.287.991,0	1.100.000,0	2.609.008,0
153	SDN 22 BETUNG	732.425,0	127.980.000,0	6.800.000,0	101.732.784,0	6.650.000,0	-	-	9.707.200,0	16.357.200,0	124.889.984,0	3.822.441,0	220.000,0	-	220.000,0	4.042.441,0
154	SDN 23 BETUNG	14,0	57.240.000,0	5.115.000,0	46.075.000,0	800.000,0	-	-	5.000.000,0	5.800.000,0	56.990.000,0	250.014,0	120.000,0	-	120.000,0	370.014,0
155	SDN 24 BETUNG	22.830,0	230.580.000,0	12.600.000,0	197.880.245,0	2.000.000,0	-	-	18.080.000,0	20.080.000,0	230.560.245,0	42.585,0	1.110.000,0	-	1.110.000,0	1.152.585,0
156	SDN 25 BETUNG	546,0	263.340.000,0	10.800.000,0	209.229.419,0	7.775.000,0	-	-	35.536.000,0	43.311.000,0	263.340.419,0	127,0	2.456.575,0	534.600,0	1.921.975,0	1.922.102,0
1																



NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL  SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA							JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA MODAL			TOTAL PENERIMAAN PAJAK	TOTAL PENGELUARAN PAJAK		
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2															
167	SDN 1 MAKARTI JAYA	50.000,0	254.970.000,0	4.800.000,0	212.994.000,0	4.600.000,0	-	-	20.200.000,0	24.800.000,0	242.594.000,0	12.426.000,0	840.000,0	-	840.000,0	13.266.000,0
168	SDN 2 MAKARTI JAYA	153.608,0	186.750.000,0	14.800.000,0	156.610.221,0	7.010.000,0	-	-	1.300.000,0	8.310.000,0	179.720.221,0	7.183.387,0	1.213.262,0	306.900,0	906.362,0	8.089.749,0
169	SDN 3 MAKARTI JAYA	65.075,0	318.960.000,0	16.800.000,0	299.359.675,0	31.154.000,0	-	-	11.308.400,0	42.462.400,0	318.622.075,0	403.000,0	5.606.059,0	-	5.606.059,0	6.009.059,0
170	SDN 4 MAKARTI JAYA	108.600,0	141.030.000,0	10.000.000,0	119.754.000,0	7.320.000,0	-	-	3.406.600,0	10.726.600,0	140.480.600,0	658.000,0	930.000,0	-	930.000,0	1.588.000,0
171	SDN 5 MAKARTI JAYA	4.579.988,0	134.640.000,0	9.520.000,0	105.364.907,0	10.850.000,0	-	-	8.000.000,0	18.850.000,0	133.734.907,0	5.485.081,0	1.080.000,0	-	1.080.000,0	6.565.081,0
172	SDN 6 MAKARTI JAYA	1.380,0	89.460.000,0	2.400.000,0	76.190.738,0	-	-	-	10.858.000,0	10.858.000,0	89.448.738,0	12.642,0	1.271.775,0	576.275,0	695.500,0	708.142,0
173	SDN 7 MAKARTI JAYA	-	37.080.000,0	2.400.000,0	32.350.000,0	-	-	-	2.330.000,0	2.330.000,0	37.080.000,0	-	360.000,0	-	360.000,0	360.000,0
174	SDN 8 MAKARTI JAYA	3.648,0	73.080.000,0	4.800.000,0	60.483.648,0	3.300.000,0	-	-	4.500.000,0	7.800.000,0	73.083.648,0	-	120.000,0	-	120.000,0	120.000,0
175	SDN 9 MAKARTI JAYA	3.764,0	125.640.000,0	6.600.000,0	108.122.951,0	671.000,0	-	2.500.000,0	7.662.700,0	10.833.700,0	125.556.651,0	87.113,0	1.032.000,0	-	1.032.000,0	1.119.113,0
176	SDN 10 MAKARTI JAYA	156.400,0	132.750.000,0	9.000.000,0	116.812.000,0	3.100.000,0	-	-	3.994.300,0	7.094.300,0	132.906.300,0	100,0	1.560.000,0	780.000,0	780.000,0	780.100,0
177	SDN 11 MAKARTI JAYA	-	91.170.000,0	3.900.000,0	76.998.200,0	300.000,0	-	-	9.971.800,0	10.271.800,0	91.170.000,0	-	219.000,0	-	219.000,0	219.000,0
178	SDN 12 MAKARTI JAYA	221.000,0	80.460.000,0	9.420.000,0	60.741.000,0	-	-	-	9.760.000,0	9.760.000,0	79.921.000,0	760.000,0	852.200,0	-	852.200,0	1.612.200,0
179	SDN 13 MAKARTI JAYA	-	180.630.000,0	9.800.000,0	152.700.000,0	3.210.000,0	-	-	14.919.840,0	18.129.840,0	180.629.840,0	160,0	1.610.000,0	912.500,0	697.500,0	697.660,0
180	SDN 14 MAKARTI JAYA	795,0	177.210.000,0	9.600.000,0	155.893.000,0	3.050.000,0	-	-	3.766.000,0	6.816.000,0	172.309.000,0	4.901.795,0	1.175.000,0	440.000,0	735.000,0	5.636.795,0
181	SDN 15 MAKARTI JAYA	-	211.770.000,0	6.000.000,0	177.306.000,0	12.464.000,0	-	-	16.000.000,0	28.464.000,0	211.770.000,0	-	1.055.000,0	-	1.055.000,0	1.055.000,0
182	SDN 16 MAKARTI JAYA	-	63.900.000,0	6.000.000,0	45.842.000,0	-	-	-	5.558.700,0	5.558.700,0	57.400.700,0	6.499.300,0	420.000,0	-	420.000,0	6.919.300,0
183	SDN 17 MAKARTI JAYA	-	210.780.000,0	7.200.000,0	181.823.000,0	2.546.000,0	-	-	12.611.000,0	15.157.000,0	204.180.000,0	6.600.000,0	2.312.500,0	340.000,0	1.972.500,0	8.572.500,0
184	SDN 18 MAKARTI JAYA	-	91.800.000,0	8.400.000,0	69.990.800,0	-	-	-	7.890.500,0	7.890.500,0	86.281.300,0	5.518.700,0	870.000,0	-	870.000,0	6.388.700,0
185	SDN 19 MAKARTI JAYA	50.000,0	59.220.000,0	4.050.000,0	45.375.000,0	1.400.000,0	-	-	970.000,0	2.370.000,0	51.795.000,0	7.475.000,0	382.500,0	-	382.500,0	7.857.500,0
186	SDN 1 MUARA PADANG	-	256.860.000,0	12.250.000,0	180.585.500,0	18.100.000,0	-	-	27.083.000,0	45.183.000,0	238.018.500,0	18.841.500,0	1.419.920,0	-	1.419.920,0	20.261.420,0
187	SDN 2 MUARA PADANG	331.700,0	132.660.000,0	8.000.000,0	108.675.000,0	1.850.000,0	-	-	14.312.800,0	16.162.800,0	132.837.800,0	153.900,0	1.719.000,0	1.119.000,0	600.000,0	753.900,0
188	SDN 3 MUARA PADANG	92.708,0	148.050.000,0	4.800.000,0	106.442.080,0	22.461.000,0	-	313.000,0	3.230.000,0	26.004.000,0	137.246.080,0	10.896.628,0	2.912.545,0	589.180,0	2.323.365,0	13.219.993,0
189	SDN 4 MUARA PADANG	-	135.270.000,0	2.300.000,0	106.513.300,0	13.850.000,0	-	-	12.606.700,0	26.456.700,0	135.270.000,0	-	740.000,0	-	740.000,0	740.000,0
190	SDN 5 MUARA PADANG	1.392,0	155.070.000,0	13.000.000,0	120.620.000,0	5.590.000,0	-	-	13.628.700,0	19.218.700,0	152.838.700,0	2.232.692,0	2.594.800,0	1.083.800,0	1.511.000,0	3.743.692,0
191	SDN 6 MUARA PADANG	650.151,0	139.230.000,0	8.500.000,0	112.130.250,0	4.248.000,0	-	-	14.113.000,0	18.361.000,0	138.991.250,0	888.901,0	1.383.200,0	1.123.200,0	260.000,0	1.148.901,0
192	SDN 7 MUARA PADANG	-	127.890.000,0	9.450.000,0	103.762.900,0	2.500.000,0	-	-	12.177.100,0	14.677.100,0	127.890.000,0	-	1.235.675,0	-	-	-
193	SDN 8 MUARA PADANG	1.434.600,0	143.370.000,0	-	118.822.600,0	3.429.000,0	-	-	14.413.500,0	17.842.500,0	136.665.100,0	8.139.500,0	519.100,0	519.100,0	-	8.139.500,0
194	SDN 9 MUARA PADANG	23,0	120.420.000,0	6.600.000,0	90.558.500,0	750.000,0	-	-	21.865.000,0	22.615.000,0	119.773.500,0	646.523,0	1.005.000,0	555.000,0	450.000,0	1.096.523,0
195	SDN 10 MUARA PADANG	-	121.860.000,0	7.200.000,0	92.749.400,0	990.000,0	-	-	20.920.600,0	21.910.600,0	121.860.000,0	-	509.500,0	509.500,0	-	-
196	SDN 11 MUARA PADANG	1.141.826,0	114.480.000,0	7.650.000,0	93.036.000,0	3.350.000,0	-	-	11.342.300,0	14.692.300,0	115.378.300,0	243.526,0	1.225.000,0	500.000,0	725.000,0	968.526,0
197	SDN 12 MUARA PADANG	-	201.060.000,0	6.200.000,0	169.860.000,0	3.950.000,0	-	-	20.055.000,0	24.005.000,0	200.065.000,0	995.000,0	1.012.900,0	-	1.012.900,0	2.007.900,0
198	SDN 13 MUARA PADANG	-	150.390.000,0	2.450.000,0	128.340.000,0	3.540.000,0	-	-	15.211.300,0	18.751.300,0	149.541.300,0	848.700,0	1.540.000,0	646.000,0	894.000,0	1.742.700,0
199	SDN 14 MUARA PADANG	-	158.670.000,0	9.650.000,0	115.110.000,0	5.750.000,0	-	-	28.160.000,0	33.910.000,0	158.670.000,0	-	1.175.000,0	875.000,0	300.000,0	300.000,0
200	SDN 15 MUARA PADANG	-	83.610.000,0	6.085.000,0	62.910.000,0	375.000,0	-	-	14.240.000,0	14.615.000,0	83.610.000,0	-	645.000,0	315.000,0	330.000,0	330.000,0
201	SDN 16 MUARA PADANG	329.428,0	159.120.000,0	8.400.000,0	127.813.228,0	3.200.000,0	-	-	20.000.000,0	23.200.000,0	159.413.228,0	36.200,0	1.110.000,0	700.000,0	410.000,0	446.200,0
202	SDN 17 MUARA PADANG	2.436.745,0	153.810.000,0	8.700.000,0	114.665.000,0	14.092.000,0	-	-	18.050.000,0	32.142.000,0	155.507.000,0	739.745,0	2.037.750,0	1.553.550,0	484.200,0	1.223.945,0
203	SDN 18 MUARA PADANG	250.276,0	178.380.000,0	13.200.000,0	144.064.279,0	2.500.000,0	-	-	16.497.000,0	25.000.000,0	176.261.279,0	2.368.997,0	2.961.000,0	1.331.000,0	1.630.000,0	3.998.997,0
204	SDN 19 MUARA PADANG	314.942,0	132.030.000,0	4.950.000,0	107.353.000,0	7.000.000,0	-	-	13.011.000,0	20.011.000,0	132.314.000,0	30.942,0	456.210,0	456.210,0	-	30.942,0
205	SDN 20 MUARA PADANG	-	112.950.000,0	6.000.000,0	92.812.000,0	2.440.000,0	-	-	11.698.000,0	14.138.000,0	112.950.000,0	-	458.000,0	458.000,0	-	-
206	SDN 21 MUARA PADANG	20.118,0	176.040.000,0	12.000.000,0	138.157.000,0	7.750.000,0	-	-	18.153.000,0	25.903.000,0	176.060.000,0	118,0	1.912.600,0	1.912.600,0	-	118,0
207	SDN 22 MUARA PADANG	2.240.100,0	103.770.000,0	2.700.000,0	89.157.500,0	3.570.000,0	-	-	10.232.600,0	13.802.600,0	105.660.100,0	350.000,0	702.814,0	522.814,0	180.000,0	530.000,0
208	SDN 1 MUARA SUGIHAN	10.000,0	138.420.000,0	3.600.000,0	125.341.600,0	5.000.000,0	-	-	4.488.400,0	9.488.400,0	138.430.000,0	-	1.142.453,0	-	1.142.453,0	1.142.453,0
209	SDN 2 MUARA SUGIHAN	36.112,0	190.080.000,0	10.100.000,0	163.338.000,0	5.480.000,0	-	-	11.160.000,0	16.640.000,0	190.078.000,0	38.112,0	966.100,0	490.000,0	514.212,0	-
210	SDN 3 MUARA SUGIHAN	2.800,0	181.980.000,0	-	148.965.300,0	4.000.000,0	-	-	28.645.700,0	32.645.700,0	181.611.000,0	371.800,0	1.731.636,0	881.636,0	850.000,0	1.221.800,0
211	SDN 4 MUARA SUGIHAN	340.000,0	139.860.000,0	5.200.000,0	117.959.000,0	3.170.000,0	-	-	14.881.000,0	18.881.000,0	138.040.000,0	2.160.000,0	2.237.300,0	1.527.700,0	709.600,0	2.869.600,0
212	SDN 5 MUARA SUGIHAN	173,0	165.330.000,0	-	153.060.000,0	-	-	-	9.140.000,0	9.140.000,0	162.200.000,0	3.130.173,0	1.166.363,0	766.363,0	400.000,0	3.530.173,0
213	SDN 6 MUARA SUGIHAN	520.300,0	126.720.000,0	3.000.000,0	122.380.400,0	-	-	-	1.859.900,0	1.859.900,0	127.240.300,0	-	2.061.893,0	1.860.893,0	201.000,0	201.000,0
214	SDN 7 MUARA SUGIHAN	-	171.540.000,0	6.900.000,0	143.816.300,0	14.893.500,0	-	-	5.930.200,0	20.823.700,0	171.540.000,0	-	3.602.545,0	1.679.895,0	1.922.650,0	-
215	SDN 8 MUARA SUGIHAN	330.000,0	79.920.000,0	3.300.000,0	70.145.000,0	-	-	-	6.805.000,0	6.805.000,0	80.250.000,0	-	777.180,0	247.630,0	529.544,0	529.544,0
216	SDN 9 MUARA SUGIHAN	12.962,0	267.390.000,0	7.800.000,0	227.235.000,0	20.375.000,0	-	-	11.992.800,0	32.367.800,0	267.402.800,0	162,0	1.799.500,0	-	1.799.500,0	1.799.662,0
217	SDN 10 MUARA SUGIHAN	-	201.150.000,0	8.400.000,0	173.080.000,0	10.670.000,0	-	-	9.000.000,0	19.670.000,0	201.150.000,0	-	1.770.000,0	-	1.770.000,0	-
218	SDN 11 MUARA SUGIHAN	-	198.900.000,0	2.000.000,0												

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA							JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK		
1	2					PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
223	SDN 16 MUARA SUGIHAN	715.500,0	131.220.000,0	8.400.000,0	112.237.000,0	-	-	-	11.298.500,0	11.298.500,0	131.935.500,0	-	608.550,0	146.650,0	461.900,0	461.900,0
224	SDN 17 MUARA SUGIHAN	2.370.438,0	196.110.000,0	6.000.000,0	160.705.000,0	27.180.000,0	-	-	3.536.000,0	30.716.000,0	197.421.000,0	1.059.438,0	4.405.400,0	1.536.800,0	2.868.600,0	3.928.038,0
225	SDN 18 MUARA SUGIHAN	-	114.030.000,0	3.000.000,0	99.689.900,0	-	-	-	10.340.100,0	10.340.100,0	113.030.000,0	1.000.000,0	927.945,0	609.545,0	318.400,0	1.318.400,0
226	SDN 19 MUARA SUGIHAN	769.700,0	125.280.000,0	4.200.000,0	101.582.300,0	8.580.000,0	-	-	11.687.400,0	20.267.400,0	126.049.700,0	-	1.002.750,0	117.000,0	885.750,0	885.750,0
227	SDN 20 MUARA SUGIHAN	-	103.680.000,0	-	99.124.500,0	-	-	-	4.555.500,0	4.555.500,0	103.680.000,0	-	562.272,0	-	562.272,0	562.272,0
228	SDN 21 MUARA SUGIHAN	-	62.370.000,0	-	61.800.000,0	-	-	-	-	-	61.800.000,0	570.000,0	-	-	-	570.000,0
229	SDN 22 MUARA SUGIHAN	-	81.450.000,0	4.050.000,0	70.140.300,0	2.780.000,0	-	-	4.479.700,0	7.259.700,0	81.450.000,0	-	1.470.450,0	450.000,0	1.020.450,0	1.020.450,0
230	SDN 23 MUARA SUGIHAN	126.798,0	129.600.000,0	7.200.000,0	85.643.000,0	18.450.000,0	-	-	17.779.000,0	36.229.000,0	129.072.000,0	654.798,0	2.049.000,0	-	2.049.000,0	2.703.798,0
231	SDN 24 MUARA SUGIHAN	1.378,0	137.700.000,0	6.600.000,0	102.258.000,0	5.600.000,0	-	-	20.450.800,0	26.050.800,0	134.908.800,0	2.792.578,0	2.134.000,0	535.000,0	1.599.000,0	4.391.578,0
232	SDN 25 MUARA SUGIHAN	-	143.730.000,0	-	134.955.000,0	-	-	-	6.545.000,0	6.545.000,0	141.500.000,0	2.230.000,0	679.999,0	329.999,0	350.000,0	2.580.000,0
233	SDN 1 MUARA TELANG	1.712.477,0	219.060.000,0	10.650.000,0	203.287.400,0	-	-	-	4.748.600,0	4.748.600,0	218.886.000,0	2.086.477,0	3.255.579,0	687.271,0	2.568.308,0	4.654.785,0
234	SDN 2 MUARA TELANG	69.040,0	124.290.000,0	10.800.000,0	105.995.000,0	2.480.000,0	-	-	2.438.800,0	4.918.800,0	121.713.800,0	2.645.240,0	716.000,0	-	716.000,0	3.361.240,0
235	SDN 3 MUARA TELANG	1.718.075,0	282.510.000,0	9.000.000,0	217.275.875,0	8.588.000,0	-	-	49.325.000,0	57.913.000,0	284.188.875,0	39.200,0	4.639.200,0	3.028.500,0	1.610.700,0	1.649.900,0
236	SDN 4 MUARA TELANG	441.434,0	168.390.000,0	5.900.000,0	148.638.504,0	7.290.000,0	-	-	5.761.900,0	13.051.900,0	167.990.404,0	1.241.030,0	3.217.300,0	534.000,0	2.683.300,0	3.924.330,0
237	SDN 5 MUARA TELANG	1.248.757,0	325.440.000,0	13.750.000,0	285.194.917,0	16.340.000,0	-	-	10.594.000,0	26.934.000,0	325.878.917,0	809.840,0	3.483.864,0	2.075.455,0	1.408.409,0	2.218.249,0
238	SDN 6 MUARA TELANG	1.807.277,0	210.780.000,0	9.000.000,0	169.098.253,0	9.407.000,0	-	-	24.427.000,0	33.834.000,0	211.932.253,0	655.024,0	4.326.924,0	3.354.216,0	972.708,0	1.627.732,0
239	SDN 7 MUARA TELANG	22.000,0	251.910.000,0	11.800.000,0	214.760.000,0	22.355.000,0	-	-	3.009.800,0	25.364.800,0	251.924.800,0	7.200,0	2.975.363,0	1.076.363,0	1.899.000,0	1.906.200,0
240	SDN 8 MUARA TELANG	39.383,0	264.510.000,0	8.000.000,0	216.439.850,0	3.647.000,0	-	-	36.316.000,0	39.963.000,0	264.402.850,0	146.533,0	3.237.000,0	1.067.000,0	2.170.000,0	2.316.533,0
241	SDN 9 MUARA TELANG	762.568,0	173.880.000,0	6.750.000,0	121.566.000,0	8.900.000,0	-	-	31.075.000,0	39.975.000,0	168.291.000,0	6.351.568,0	1.222.500,0	-	1.222.500,0	7.574.068,0
242	SDN 10 MUARA TELANG	706.100,0	110.250.000,0	4.500.000,0	92.456.100,0	14.000.000,0	-	-	-	14.000.000,0	110.956.100,0	-	535.000,0	240.000,0	295.000,0	550.000,0
243	SDN 11 MUARA TELANG	392,0	211.050.000,0	13.200.000,0	138.530.015,0	17.857.250,0	-	-	40.678.700,0	58.535.950,0	210.265.965,0	784.427,0	3.957.425,0	3.882.425,0	75.000,0	859.427,0
244	SDN 12 MUARA TELANG	112.600,0	42.300.000,0	-	38.112.000,0	500.000,0	-	-	500.000,0	1.000.000,0	39.112.000,0	3.300.600,0	-	-	-	3.300.600,0
245	SDN 13 MUARA TELANG	3.047.505,0	355.680.000,0	9.270.000,0	254.549.350,0	23.800.000,0	-	-	69.433.150,0	93.233.150,0	357.052.500,0	1.675.005,0	6.684.697,0	2.774.631,0	3.910.066,0	5.585.071,0
246	SDN 14 MUARA TELANG	352.563,0	89.370.000,0	18.200.000,0	62.236.600,0	1.000.000,0	-	-	910.800,0	1.910.800,0	82.347.400,0	7.375.163,0	1.124.075,0	489.075,0	635.000,0	8.010.163,0
247	SDN 15 MUARA TELANG	179.006,0	240.210.000,0	9.500.000,0	198.833.536,0	15.220.000,0	-	-	16.000.000,0	31.220.000,0	239.553.536,0	835.470,0	3.332.500,0	2.104.000,0	1.228.500,0	2.063.970,0
248	SDN 16 MUARA TELANG	21.87.635,0	133.110.000,0	9.250.000,0	112.907.000,0	8.200.000,0	-	-	2.500.000,0	10.700.000,0	132.857.000,0	2.440.635,0	3.744.500,0	3.362.000,0	382.500,0	3.823.135,0
249	SDN 17 MUARA TELANG	3.713.600,0	77.490.000,0	520.000,0	70.111.000,0	3.330.000,0	-	-	5.000.000,0	8.330.000,0	78.961.000,0	2.242.600,0	335.000,0	269.000,0	66.000,0	2.308.600,0
250	SDN 18 MUARA TELANG	150.983,0	169.110.000,0	11.100.000,0	140.695.750,0	7.975.000,0	-	-	8.575.000,0	16.550.000,0	168.345.750,0	915.233,0	1.698.881,0	1.082.681,0	616.200,0	1.531.433,0
251	SDN 19 MUARA TELANG	928.969,0	148.590.000,0	9.600.000,0	109.426.350,0	25.040.000,0	-	-	5.390.800,0	30.430.800,0	149.457.150,0	61.819,0	4.500.500,0	1.401.600,0	3.098.900,0	3.160.719,0
252	SDN 20 MUARA TELANG	210.800,0	102.330.000,0	5.515.000,0	89.331.050,0	2.430.000,0	-	-	2.170.000,0	4.600.000,0	99.446.050,0	3.094.750,0	1.277.350,0	127.500,0	1.149.850,0	4.244.600,0
253	SDN 21 MUARA TELANG	10.417,0	158.400.000,0	8.900.000,0	129.942.500,0	8.098.000,0	-	-	8.332.200,0	16.430.200,0	155.272.700,0	3.137.717,0	684.682,0	684.682,0	-	3.137.717,0
254	SDN 1 PULAU RIMAU	65,0	59.580.000,0	2.700.000,0	51.012.065,0	-	-	-	5.538.000,0	5.538.000,0	59.250.065,0	330.000,0	-	-	135.000,0	465.000,0
255	SDN 2 PULAU RIMAU	7.681.000,0	130.950.000,0	7.200.000,0	105.341.600,0	7.450.000,0	-	-	18.339.300,0	25.789.300,0	138.330.900,0	300.100,0	1.285.000,0	-	1.285.000,0	1.585.100,0
256	SDN 3 PULAU RIMAU	20.000,0	133.020.000,0	5.900.000,0	115.070.000,0	1.800.000,0	-	-	9.999.500,0	11.799.500,0	132.769.500,0	270.500,0	153.000,0	153.000,0	-	270.500,0
257	SDN 4 PULAU RIMAU	180.000,0	73.800.000,0	7.200.000,0	58.203.700,0	-	-	-	6.230.300,0	6.230.300,0	71.634.000,0	2.346.000,0	300.000,0	-	300.000,0	2.646.000,0
258	SDN 5 PULAU RIMAU	9.472.250,0	210.960.000,0	6.700.000,0	178.347.250,0	950.000,0	-	-	25.072.000,0	26.022.000,0	211.069.250,0	9.363.000,0	706.250,0	127.500,0	578.750,0	9.941.750,0
259	SDN 6 PULAU RIMAU	6.397.124,0	223.020.000,0	6.100.000,0	176.887.124,0	14.200.000,0	-	-	26.420.000,0	40.620.000,0	223.607.124,0	5.810.000,0	1.289.200,0	-	1.289.200,0	7.099.200,0
260	SDN 7 PULAU RIMAU	270.100,0	55.530.000,0	3.000.000,0	48.517.100,0	2.300.000,0	-	-	1.123.000,0	3.423.000,0	54.940.100,0	860.000,0	120.000,0	-	120.000,0	980.000,0
261	SDN 8 PULAU RIMAU	11.355.000,0	168.300.000,0	8.400.000,0	143.811.000,0	7.400.000,0	-	-	-	7.400.000,0	159.611.000,0	20.044.000,0	2.283.000,0	215.000,0	2.068.000,0	22.112.000,0
262	SDN 9 PULAU RIMAU	320.659,0	142.020.000,0	2.250.000,0	105.315.000,0	5.800.000,0	-	-	28.000.000,0	33.800.000,0	141.365.000,0	975.659,0	912.500,0	-	912.500,0	1.888.159,0
263	SDN 10 PULAU RIMAU	7.169.732,0	110.070.000,0	2.150.000,0	74.378.000,0	9.950.000,0	3.350.000,0	-	7.505.400,0	20.805.400,0	97.333.400,0	19.906.332,0	1.485.000,0	267.500,0	1.217.500,0	21.123.832,0
264	SDN 11 PULAU RIMAU	60.000,0	57.870.000,0	2.520.000,0	48.967.000,0	2.120.000,0	2.250.000,0	-	2.073.000,0	6.443.000,0	57.930.000,0	-	465.000,0	-	465.000,0	465.000,0
265	SDN 12 PULAU RIMAU	-	100.440.000,0	4.200.000,0	80.079.000,0	4.500.000,0	-	-	11.266.400,0	15.766.400,0	100.045.400,0	394.600,0	570.000,0	-	570.000,0	964.600,0
266	SDN 13 PULAU RIMAU	22.956,0	152.010.000,0	6.600.000,0	127.764.600,0	510.000,0	-	-	10.799.900,0	11.309.900,0	145.674.500,0	6.358.456,0	285.000,0	-	285.000,0	6.643.456,0
267	SDN 14 PULAU RIMAU	50,0	96.930.000,0	5.400.000,0	86.050.050,0	3.750.000,0	-	-	1.729.950,0	5.479.950,0	96.930.000,0	50,0	1.103.181,0	-	1.103.181,0	1.103.231,0
268	SDN 15 PULAU RIMAU	20.000,0	85.230.000,0	2.900.000,0	75.299.000,0	1.466.000,0	-	-	5.585.000,0	7.051.000,0	85.250.000,0	-	499.500,0	144.500,0	355.000,0	355.000,0
269	SDN 16 PULAU RIMAU	40.000,0	109.080.000,0	5.400.000,0	82.486.000,0	2.500.000,0	-	-	18.484.400,0	20.984.400,0	108.870.400,0	249.600,0	1.015.273,0	162.273,0	853.000,0	1.102.600,0
270	SDN 17 PULAU RIMAU	15.000,0	63.270.000,0	2.400.000,0	52.547.000,0	375.000,0	-	-	7.962.900,0	8.337.900,0	63.284.900,0	100,0	200.000,0	-	200.000,0	200.100,0
271	SDN 18 PULAU RIMAU	481.000,0	331.470.000,0	12.600.000,0	291.430.346,0	20.220.000,0	-	-	7.440.000,0	27.660.000,0	331.890.346,0	260.654,0	4.187.550,0	3.047.550,0	1.140.000,0	1.400.654,0
272	SDN 19 PULAU RIMAU	-	117.270.000,0	6.600.000,0	106.091.500,0	4.509.000,0	-	-	-	4.509.000,0	117.200.500,0	69.500,0	1.031.727,0	181.727,0	850.000,0	919.500,0
273	SDN 1 RAMBUTAN	2.940,0	163.980.000,0	6.600.000,0	111.312.184,0											

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		SALDO BOS REGULER			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL						TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGLUARAN PAJAK
							PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2																
279	SDN 7 RAMBUTAN	5.591,0	176.670.000,0	2.100.000,0	124.323.976,0	35.602.500,0	-	-	14.573.000,0	50.175.500,0	176.599.476,0	76.115,0	3.719.545,0	795.000,0	2.924.545,0	3.000.660,0	
280	SDN 8 RAMBUTAN	228.106,0	174.330.000,0	6.000.000,0	118.995.437,0	18.935.000,0	-	-	11.593.000,0	30.528.000,0	155.523.437,0	19.034.669,0	1.828.633,0	95.000,0	1.733.633,0	20.768.302,0	
281	SDN 9 RAMBUTAN	315.400,0	76.770.000,0	6.000.000,0	59.949.800,0	6.000.000,0	-	-	5.135.600,0	11.135.600,0	77.085.400,0	-	1.505.000,0	500.000,0	1.005.000,0	1.005.000,0	
282	SDN 10 RAMBUTAN	1.168.500,0	179.910.000,0	9.600.000,0	129.292.300,0	17.500.000,0	-	-	24.686.200,0	42.186.200,0	181.078.500,0	-	2.780.249,0	934.273,0	1.845.976,0	1.845.976,0	
283	SDN 11 RAMBUTAN	387,0	121.140.000,0	6.000.000,0	93.844.350,0	8.100.000,0	-	-	10.091.700,0	18.191.700,0	118.036.050,0	3.104.337,0	1.326.050,0	561.850,0	764.200,0	3.868.537,0	
284	SDN 12 RAMBUTAN	40.473,0	414.180.000,0	13.800.000,0	298.736.961,0	15.700.000,0	-	-	85.296.100,0	100.996.100,0	413.533.061,0	687.412,0	5.186.845,0	350.000,0	4.836.845,0	5.524.257,0	
285	SDN 13 RAMBUTAN	52.180,0	133.020.000,0	6.600.000,0	96.586.544,0	2.400.000,0	-	-	26.971.900,0	29.371.900,0	132.558.444,0	513.736,0	1.057.931,0	-	1.057.931,0	1.571.667,0	
286	SDN 14 RAMBUTAN	480.430,0	102.240.000,0	7.800.000,0	76.475.230,0	5.780.000,0	-	-	12.656.200,0	18.436.200,0	102.711.430,0	9.000,0	1.063.000,0	728.000,0	335.000,0	344.000,0	
287	SDN 15 RAMBUTAN	2.739.015,0	177.840.000,0	12.000.000,0	133.102.700,0	16.350.000,0	-	-	17.687.300,0	34.037.300,0	179.140.000,0	1.439.015,0	3.371.200,0	-	3.371.200,0	4.810.215,0	
288	SDN 16 RAMBUTAN	2.064.750,0	67.410.000,0	14.656.000,0	42.315.550,0	3.500.000,0	-	-	9.003.200,0	12.503.200,0	69.474.750,0	-	780.000,0	780.000,0	-	-	
289	SDN 17 RAMBUTAN	5.383.850,0	160.020.000,0	18.600.000,0	119.296.700,0	9.820.000,0	-	2.976.718,0	14.672.500,0	27.469.218,0	165.365.918,0	37.932,0	4.954.545,0	4.254.545,0	700.000,0	737.932,0	
290	SDN 18 RAMBUTAN	902,0	136.710.000,0	2.440.000,0	106.031.550,0	12.880.000,0	-	-	15.343.000,0	16.352,0	136.694.550,0	16.352,0	2.169.274,0	-	2.169.274,0	2.185.626,0	
291	SDN 19 RAMBUTAN	444.279,0	57.690.000,0	4.000.000,0	41.790.000,0	500.000,0	-	-	11.738.000,0	12.238.000,0	58.028.000,0	106.279,0	1.138.000,0	428.000,0	710.000,0	816.279,0	
292	SDN 20 RAMBUTAN	866,0	121.410.000,0	6.000.000,0	97.865.090,0	4.900.000,0	-	-	12.645.600,0	17.545.600,0	121.410.690,0	176,0	870.000,0	-	870.000,0	870.176,0	
293	SDN 21 RAMBUTAN	8.942,0	168.840.000,0	4.200.000,0	122.875.100,0	15.154.000,0	-	-	25.926.200,0	41.080.200,0	168.155.300,0	693.642,0	1.546.500,0	796.500,0	750.000,0	1.443.642,0	
294	SDN 22 RAMBUTAN	25.179,0	110.880.000,0	6.900.000,0	75.533.000,0	9.505.000,0	-	-	13.872.000,0	23.377.000,0	105.810.000,0	5.095.179,0	2.261.681,0	-	2.261.681,0	7.356.860,0	
295	SDN 23 RAMBUTAN	-	119.160.000,0	4.100.000,0	91.891.200,0	13.460.000,0	-	-	5.708.800,0	19.168.800,0	115.160.000,0	4.000.000,0	2.044.600,0	-	2.044.600,0	6.044.600,0	
296	SDN 24 RAMBUTAN	-	52.560.000,0	-	47.235.000,0	3.500.000,0	-	-	1.825.000,0	5.325.000,0	52.560.000,0	-	318.182,0	318.182,0	-	-	
297	SDN 1 RANTAU BAYUR	705,0	116.550.000,0	3.750.000,0	98.427.600,0	3.865.000,0	-	-	9.158.000,0	13.023.000,0	115.200.600,0	1.350.105,0	337.400,0	244.900,0	92.500,0	1.442.605,0	
298	SDN 2 RANTAU BAYUR	2.255.000,0	45.720.000,0	2.000.000,0	42.175.000,0	1.000.000,0	-	-	2.500.000,0	1.000.000,0	47.675.000,0	-	300.000,0	-	300.000,0	300.000,0	
299	SDN 3 RANTAU BAYUR	-	281.520.000,0	12.600.000,0	232.778.750,0	11.690.000,0	-	-	24.007.000,0	35.697.000,0	281.075.750,0	444.250,0	3.477.927,0	-	3.477.927,0	3.922.177,0	
300	SDN 4 RANTAU BAYUR	900,0	94.680.000,0	6.300.000,0	72.065.000,0	3.000.000,0	-	-	13.254.000,0	16.294.000,0	94.619.000,0	61.900,0	865.000,0	-	865.000,0	926.900,0	
301	SDN 5 RANTAU BAYUR	1.532.120,0	110.970.000,0	3.600.000,0	98.098.415,0	2.400.000,0	-	-	5.148.700,0	7.548.700,0	109.247.115,0	3.255.005,0	218.181,0	-	218.181,0	3.473.186,0	
302	SDN 6 RANTAU BAYUR	2.963.022,0	107.370.000,0	3.600.000,0	87.415.522,0	4.599.000,0	-	-	14.696.500,0	19.295.500,0	110.311.022,0	22.000,0	300.000,0	-	300.000,0	322.000,0	
303	SDN 7 RANTAU BAYUR	3.776.544,0	190.260.000,0	7.000.000,0	169.058.644,0	-	-	-	8.972.300,0	8.972.300,0	185.030.944,0	9.005.600,0	1.512.000,0	1.187.000,0	325.000,0	9.330.600,0	
304	SDN 8 RANTAU BAYUR	70.336,0	150.660.000,0	4.800.000,0	137.378.530,0	4.000.000,0	-	-	192.300,0	4.000.000,0	146.178.530,0	4.551.806,0	2.942.300,0	2.942.300,0	-	4.551.806,0	
305	SDN 9 RANTAU BAYUR	1.600.030,0	158.220.000,0	27.000.000,0	113.679.000,0	-	-	-	18.747.000,0	18.747.000,0	159.426.000,0	394.030,0	1.350.000,0	-	1.350.000,0	1.744.030,0	
306	SDN 10 RANTAU BAYUR	45.000,0	108.630.000,0	10.920.000,0	78.242.500,0	8.900.000,0	-	-	10.612.000,0	19.512.000,0	108.674.500,0	500,0	938.890,0	317.300,0	621.590,0	622.090,0	
307	SDN 11 RANTAU BAYUR	2.964.642,0	106.740.000,0	13.920.000,0	83.945.500,0	2.350.000,0	-	-	9.470.900,0	10.968.400,0	118.200.900,0	18.242,0	1.880.000,0	1.880.000,0	-	18.242,0	
308	SDN 12 RANTAU BAYUR	8.044.324,0	98.460.000,0	3.400.000,0	75.764.324,0	2.900.000,0	-	-	15.925.000,0	18.825.000,0	97.989.324,0	8.515.000,0	-	-	-	8.515.000,0	
309	SDN 13 RANTAU BAYUR	20.950,0	243.360.000,0	2.400.000,0	183.112.950,0	12.050.000,0	-	-	45.600.000,0	57.650.000,0	243.162.950,0	218.000,0	2.362.500,0	837.500,0	1.525.000,0	1.743.000,0	
310	SDN 14 RANTAU BAYUR	200,0	58.680.000,0	2.400.000,0	51.875.200,0	-	-	-	4.405.000,0	4.405.000,0	58.680.200,0	-	45.000,0	-	45.000,0	45.000,0	
311	SDN 15 RANTAU BAYUR	398,0	72.720.000,0	4.050.000,0	64.215.800,0	-	-	-	4.100.500,0	4.100.500,0	72.366.300,0	354.098,0	632.500,0	460.000,0	172.500,0	526.598,0	
312	SDN 16 RANTAU BAYUR	795.000,0	49.500.000,0	3.100.000,0	43.890.900,0	-	-	-	3.200.000,0	3.200.000,0	49.990.900,0	304.100,0	627.500,0	512.500,0	115.000,0	419.100,0	
313	SDN 17 RANTAU BAYUR	3.100.705,0	108.360.000,0	7.050.000,0	81.110.000,0	3.350.000,0	-	-	19.600.000,0	22.950.000,0	111.110.000,0	350.705,0	591.700,0	591.700,0	-	350.705,0	
314	SDN 18 RANTAU BAYUR	64.600,0	83.610.000,0	8.400.000,0	67.108.000,0	615.000,0	-	-	7.521.000,0	8.136.000,0	83.644.000,0	30.600,0	660.000,0	435.000,0	225.000,0	255.600,0	
315	SDN 19 RANTAU BAYUR	-	55.890.000,0	6.000.000,0	47.853.000,0	-	-	-	2.237.000,0	2.237.000,0	55.890.000,0	-	300.000,0	-	300.000,0	300.000,0	
316	SDN 20 RANTAU BAYUR	697.682,0	107.280.000,0	7.600.000,0	91.555.850,0	1.850.000,0	-	-	5.418.400,0	7.268.400,0	106.424.250,0	1.553.432,0	503.000,0	-	503.000,0	2.056.432,0	
317	SDN 21 RANTAU BAYUR	412.000,0	132.930.000,0	12.600.000,0	109.742.000,0	-	-	-	10.955.400,0	10.955.400,0	133.297.400,0	44.600,0	-	-	-	44.600,0	
318	SDN 22 RANTAU BAYUR	-	90.810.000,0	5.850.000,0	67.434.500,0	6.799.500,0	-	-	10.548.000,0	17.347.500,0	90.632.000,0	178.000,0	957.500,0	875.000,0	82.500,0	260.500,0	
319	SDN 23 RANTAU BAYUR	-	90.090.000,0	7.200.000,0	67.530.000,0	-	-	-	15.360.000,0	15.360.000,0	90.090.000,0	-	520.000,0	520.000,0	-	-	
320	SDN 24 RANTAU BAYUR	180.368,0	53.100.000,0	8.350.000,0	39.629.400,0	-	-	-	5.134.600,0	5.134.600,0	53.114.000,0	166.368,0	824.000,0	428.000,0	396.000,0	562.368,0	
321	SDN 25 RANTAU BAYUR	1.586.250,0	45.270.000,0	2.050.000,0	40.545.250,0	-	-	-	3.955.000,0	3.955.000,0	46.590.250,0	306.000,0	52.500,0	17.500,0	35.000,0	341.000,0	
322	SDN 26 RANTAU BAYUR	100.000,0	46.890.000,0	6.000.000,0	38.492.700,0	-	-	-	-	-	44.492.700,0	2.497.300,0	660.000,0	-	660.000,0	3.157.300,0	
323	SDN 27 RANTAU BAYUR	152.500,0	96.840.000,0	6.000.000,0	74.052.500,0	8.050.000,0	-	-	8.680.000,0	16.730.000,0	96.782.500,0	210.000,0	480.000,0	480.000,0	-	210.000,0	
324	SDN 28 RANTAU BAYUR	4.904.750,0	60.300.000,0	1.200.000,0	57.679.750,0	3.500.000,0	-	-	1.260.000,0	4.760.000,0	63.639.750,0	1.565.000,0	240.000,0	60.000,0	180.000,0	1.745.000,0	
325	SDN 29 RANTAU BAYUR	-	77.940.000,0	10.800.000,0	58.055.400,0	3.950.000,0	-	-	5.134.600,0	9.084.600,0	77.940.000,0	-	1.020.000,0	-	1.020.000,0	1.020.000,0	
326	SDN 30 RANTAU BAYUR	399,0	57.690.000,0														

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL						TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2															
335	SDN 2 SELAT PENUGUAN	-	82.710.000,0	1.200.000,0	66.310.000,0	-	-	-	15.200.000,0	15.200.000,0	82.710.000,0	-	-	-	-	-
336	SDN 3 SELAT PENUGUAN	19.000,0	180.810.000,0	4.800.000,0	141.789.000,0	-	-	-	33.120.000,0	33.120.000,0	179.709.000,0	1.120.000,0	943.750,0	943.750,0	-	1.120.000,0
337	SDN 4 SELAT PENUGUAN	100.000,0	137.250.000,0	6.600.000,0	97.630.000,0	1.400.000,0	-	-	19.900.000,0	21.300.000,0	125.530.000,0	11.820.000,0	1.742.375,0	325.500,0	1.416.875,0	13.236.875,0
338	SDN 5 SELAT PENUGUAN	2.880.000,0	261.630.000,0	13.200.000,0	205.413.000,0	3.870.500,0	-	-	38.745.000,0	42.615.500,0	261.228.500,0	3.281.500,0	1.629.825,0	240.000,0	1.389.825,0	4.671.325,0
339	SDN 6 SELAT PENUGUAN	-	149.490.000,0	2.400.000,0	106.199.000,0	12.850.000,0	-	-	26.970.000,0	39.820.000,0	148.419.000,0	1.071.000,0	1.134.850,0	-	1.134.850,0	2.205.850,0
340	SDN 7 SELAT PENUGUAN	-	110.160.000,0	6.600.000,0	82.413.000,0	550.000,0	-	-	20.597.000,0	550.000,0	110.160.000,0	-	1.043.000,0	165.000,0	878.000,0	878.000,0
341	SDN 8 SELAT PENUGUAN	690.185,0	113.670.000,0	6.600.000,0	91.875.000,0	1.650.000,0	-	-	13.020.000,0	14.670.000,0	113.145.000,0	1.215.185,0	780.000,0	450.000,0	330.000,0	1.545.185,0
342	SDN 9 SELAT PENUGUAN	277.995,0	98.190.000,0	4.200.000,0	79.320.000,0	980.000,0	-	-	13.693.700,0	14.673.700,0	98.193.700,0	274.295,0	120.000,0	-	120.000,0	394.295,0
343	SDN 10 SELAT PENUGUAN	-	62.370.000,0	1.700.000,0	48.502.000,0	2.900.000,0	-	-	9.268.000,0	12.168.000,0	62.370.000,0	-	241.273,0	-	241.273,0	241.273,0
344	SDN 11 SELAT PENUGUAN	624.800,0	85.680.000,0	1.000.000,0	65.930.000,0	3.274.800,0	-	-	15.600.000,0	18.874.800,0	85.804.800,0	500.000,0	-	-	-	500.000,0
345	SDN 12 SELAT PENUGUAN	1.950.000,0	149.670.000,0	9.600.000,0	113.744.000,0	3.900.000,0	-	-	3.000.000,0	21.376.000,0	28.276.000,0	151.620.000,0	-	1.606.045,0	-	1.606.045,0
346	SDN 13 SELAT PENUGUAN	1.148.102,0	189.540.000,0	1.200.000,0	141.836.000,0	5.730.000,0	-	-	2.800.000,0	34.092.000,0	185.658.000,0	5.030.102,0	-	15.000,0	-	5.030.102,0
347	SDN 14 SELAT PENUGUAN	8.320.000,0	184.410.000,0	11.300.000,0	119.541.000,0	9.800.000,0	-	-	43.996.000,0	53.796.000,0	184.637.000,0	8.093.000,0	1.055.000,0	1.055.000,0	-	8.093.000,0
348	SDN 1 SEMBAWA	10.058,0	54.360.000,0	7.200.000,0	46.368.000,0	800.000,0	-	-	-	800.000,0	54.368.000,0	2.058,0	-	-	410.000,0	412.058,0
349	SDN 2 SEMBAWA	217.032,0	107.820.000,0	10.400.000,0	83.196.714,0	10.400.000,0	-	-	3.881.500,0	14.281.500,0	107.878.214,0	158.818,0	2.240.000,0	-	2.240.000,0	2.398.818,0
350	SDN 3 SEMBAWA	6.906,0	115.650.000,0	14.400.000,0	81.216.623,0	17.925.000,0	-	-	1.645.200,0	19.570.200,0	115.186.823,0	470.083,0	4.477.000,0	462.000,0	4.015.000,0	4.485.083,0
351	SDN 4 SEMBAWA	447,0	278.640.000,0	13.800.000,0	217.667.947,0	40.799.000,0	-	-	6.372.900,0	47.171.900,0	278.639.847,0	600,0	8.505.400,0	-	8.505.400,0	8.506.000,0
352	SDN 5 SEMBAWA	-	160.740.000,0	3.920.000,0	125.538.000,0	18.045.000,0	-	-	13.237.000,0	31.282.000,0	160.740.000,0	-	3.486.650,0	2.800.150,0	686.500,0	686.500,0
353	SDN 6 SEMBAWA	34.369,0	118.530.000,0	6.600.000,0	94.661.000,0	9.850.000,0	-	-	7.448.100,0	17.298.100,0	118.559.100,0	5.269,0	1.616.700,0	-	1.616.700,0	1.621.969,0
354	SDN 7 SEMBAWA	215.022,0	93.960.000,0	8.400.000,0	75.412.375,0	5.900.000,0	-	-	4.291.000,0	10.191.000,0	94.003.375,0	171.647,0	2.100.600,0	-	2.100.600,0	2.272.247,0
355	SDN 8 SEMBAWA	6.863,0	112.770.000,0	4.800.000,0	95.690.356,0	6.840.000,0	-	-	3.830.300,0	10.670.300,0	111.160.656,0	1.616.207,0	1.844.500,0	899.500,0	945.000,0	2.561.207,0
356	SDN 9 SEMBAWA	22.798,0	146.070.000,0	19.200.000,0	115.385.010,0	2.500.000,0	-	-	8.441.100,0	10.941.100,0	145.526.110,0	566.688,0	2.620.000,0	2.620.000,0	-	566.688,0
357	SDN 10 SEMBAWA	161.354,0	255.420.000,0	18.000.000,0	202.003.871,0	20.600.000,0	-	-	13.949.400,0	34.549.400,0	254.553.271,0	1.028.083,0	5.758.000,0	-	5.758.000,0	6.786.083,0
358	SDN 11 SEMBAWA	4.610.867,0	137.430.000,0	7.800.000,0	107.883.669,0	7.849.000,0	-	-	7.769.000,0	15.618.000,0	131.301.669,0	10.739.198,0	2.636.362,0	2.012.362,0	624.000,0	11.363.198,0
359	SDN 12 SEMBAWA	4.335.004,0	310.050.000,0	13.200.000,0	273.760.800,0	19.467.000,0	-	-	2.913.000,0	22.380.000,0	309.340.800,0	5.044.204,0	2.304.527,0	-	2.304.527,0	7.348.731,0
360	SDN 13 SEMBAWA	1.442.920,0	219.510.000,0	18.500.000,0	143.954.037,0	24.150.000,0	-	-	32.420.000,0	24.150.000,0	219.024.037,0	1.928.883,0	6.720.000,0	6.580.000,0	140.000,0	2.068.883,0
361	SDN 14 SEMBAWA	982,0	234.990.000,0	8.900.000,0	184.778.884,0	13.160.000,0	-	-	18.520.000,0	31.680.000,0	225.358.884,0	9.632.098,0	7.362.930,0	-	7.362.930,0	16.995.028,0
362	SDN 15 SEMBAWA	3.020.553,0	133.740.000,0	7.500.000,0	85.181.250,0	32.645.000,0	-	-	6.024.500,0	38.669.500,0	131.350.750,0	5.409.803,0	3.587.000,0	2.292.500,0	1.294.500,0	6.704.303,0
363	SDN 16 SEMBAWA	655.000,0	111.060.000,0	7.127.000,0	97.651.460,0	-	-	-	6.149.000,0	6.149.000,0	110.927.460,0	787.540,0	1.115.020,0	165.000,0	950.020,0	1.737.560,0
364	SDN 17 SEMBAWA	6.974,0	133.740.000,0	15.300.000,0	99.852.172,0	13.000.000,0	-	-	5.526.100,0	18.526.100,0	133.678.272,0	68.702,0	4.749.310,0	855.000,0	3.894.310,0	3.963.012,0
365	SDN 18 SEMBAWA	-	132.210.000,0	9.600.000,0	110.287.000,0	11.600.000,0	-	-	723.000,0	12.323.000,0	132.210.000,0	-	2.585.100,0	-	2.585.100,0	2.585.100,0
366	SDN 19 SEMBAWA	5.086,0	114.030.000,0	7.200.000,0	74.584.454,0	23.700.000,0	-	-	8.550.400,0	32.250.400,0	114.034.854,0	232,0	3.320.000,0	-	3.320.000,0	3.320.232,0
367	SDN 20 SEMBAWA	1.727,0	24.750.000,0	4.200.000,0	15.696.000,0	-	-	-	4.594.100,0	4.594.100,0	24.490.100,0	261.627,0	260.000,0	-	260.000,0	521.627,0
368	SDN 21 SEMBAWA	-	133.830.000,0	9.000.000,0	98.643.800,0	17.676.200,0	-	-	8.510.000,0	26.186.200,0	133.830.000,0	-	2.961.300,0	1.711.300,0	1.250.000,0	1.250.000,0
369	SDN 22 SEMBAWA	2.533.109,0	212.310.000,0	12.000.000,0	153.341.834,0	27.770.000,0	-	-	18.250.800,0	46.020.800,0	211.362.634,0	3.480.475,0	6.381.000,0	-	6.381.000,0	9.861.475,0
370	SDN 23 SEMBAWA	2.844.415,0	36.090.000,0	4.000.000,0	29.357.800,0	-	-	-	931.000,0	931.000,0	34.288.800,0	4.645.615,0	370.000,0	-	370.000,0	5.015.615,0
371	SDN 24 SEMBAWA	-	26.280.000,0	4.800.000,0	21.480.000,0	-	-	-	-	-	26.280.000,0	-	320.000,0	-	320.000,0	320.000,0
372	SDN 25 SEMBAWA	-	23.940.000,0	3.600.000,0	20.340.000,0	-	-	-	-	-	23.940.000,0	-	295.000,0	-	295.000,0	295.000,0
373	SDN 1 SUAK TAPEH	899.994,0	188.190.000,0	5.900.000,0	152.326.671,0	5.559.727,0	-	-	24.495.200,0	30.054.927,0	188.281.598,0	808.396,0	2.147.804,0	1.577.804,0	570.000,0	1.378.396,0
374	SDN 2 SUAK TAPEH	10.000,0	44.550.000,0	900.000,0	34.602.000,0	-	-	-	9.058.000,0	9.058.000,0	44.560.000,0	-	-	-	-	-
375	SDN 3 SUAK TAPEH	2.277,0	232.740.000,0	8.400.000,0	194.108.000,0	17.900.000,0	-	-	12.253.800,0	30.153.800,0	232.661.800,0	80.477,0	2.350.000,0	1.700.000,0	650.000,0	730.477,0
376	SDN 4 SUAK TAPEH	277.544,0	142.560.000,0	4.000.000,0	115.828.562,0	11.870.000,0	-	-	9.678.100,0	21.548.100,0	141.376.662,0	1.460.882,0	2.826.000,0	2.526.000,0	300.000,0	1.760.882,0
377	SDN 5 SUAK TAPEH	145.505,0	201.330.000,0	1.000.000,0	174.457.500,0	6.000.000,0	-	-	19.915.700,0	25.915.700,0	201.373.200,0	102.305,0	2.462.500,0	1.472.500,0	990.000,0	1.092.305,0
378	SDN 6 SUAK TAPEH	460.000,0	221.310.000,0	13.200.000,0	175.474.614,0	20.690.000,0	-	-	12.404.500,0	33.094.500,0	221.769.114,0	886,0	3.371.500,0	3.371.500,0	-	886,0
379	SDN 7 SUAK TAPEH	144.431,0	83.610.000,0	3.950.000,0	65.745.000,0	4.000.000,0	-	-	10.000.000,0	14.000.000,0	83.695.000,0	59.431,0	100.000,0	-	100.000,0	159.431,0
380	SDN 8 SUAK TAPEH	-	41.220.000,0	6.000.000,0	30.720.000,0	-	-	-	4.400.000,0	4.400.000,0	41.120.000,0	100.000,0	540.000,0	150.000,0	390.000,0	490.000,0
381	SDN 9 SUAK TAPEH	658.000,0	54.450.000,0	3.600.000,0	48.971.000,0	-	-	-	2.537.000,0	2.537.000,0	55.108.000,0	-	311.000,0	-	311.000,0	311.000,0
382	SDN 10 SUAK TAPEH	-	105.300.000,0	-	92.377.300,0	2.500.000,0	-	-	10.422.700,0	10.422.700,0	105.300.000,0	-	250.000,0	-	250.000,0	250.000,0
383	SDN 11 SUAK TAPEH	22.671,0	74.340.000,0	6.000.000,0	59.933.200,0	3.000.000,0	-	-	4.596.800,0	7.596.800,0	73.530.000,0	832.671,0	860.000,0	255.000,0	605.000,0	1.437.671,0
384	SDN 12 SUAK TAPEH	2,0	295.380.000,0	24.000.000,0	206.500.000,0	8.880.000,0	-	-	56.000.000,0	64.880.000,0	295.380.000,0	2,0	3.703.850,0	2.102.850,0	1.601.000,0	1.601.002,0
385	SDN 13 SUAK TAPEH	121.911,0	95.400.000,0	5.400.000,0	70.194.700,0	2.600.000,0	-	-	17.323.800,0	19.923.800,0	95.518.500,0	3.411,0	570.000,0	-	570.000,0	573.411,0
386	SDN 14 SUAK TAPEH	790.000,0	75.510.000,0	3.200.000,0	51.016.850,0	6.680.000,0	-	-	14.099.100,0	20.779.100,0						

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		REALISASI BELANJA							JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL BELANJA MODAL							
1	2																
391	SDN 4 SUMBER MARGA TELANG	-	144.990.000,0	3.000.000,0	123.436.800,0	259.600,0	-	-	18.249.600,0	18.509.200,0	144.946.000,0	44.000,0	112.500,0	-	112.500,0	156.500,0	
392	SDN 5 SUMBER MARGA TELANG	154,0	121.590.000,0	4.600.000,0	108.239.271,0	-	-	-	6.125.000,0	6.125.000,0	118.964.271,0	2.625.883,0	410.000,0	-	410.000,0	3.035.883,0	
393	SDN 6 SUMBER MARGA TELANG	41,0	329.130.000,0	6.600.000,0	246.705.000,0	20.838.000,0	-	-	54.987.000,0	75.825.000,0	329.130.000,0	41,0	3.642.681,0	-	-	41,0	
394	SDN 7 SUMBER MARGA TELANG	400,0	87.300.000,0	7.700.000,0	71.572.400,0	500.000,0	-	-	7.228.000,0	7.728.000,0	87.000.400,0	300.000,0	360.000,0	-	360.000,0	660.000,0	
395	SDN 8 SUMBER MARGA TELANG	-	147.780.000,0	9.900.000,0	123.592.700,0	2.400.000,0	-	-	11.887.300,0	14.287.300,0	147.780.000,0	-	962.500,0	577.500,0	385.000,0	385.000,0	
396	SDN 9 SUMBER MARGA TELANG	285,0	201.960.000,0	9.300.000,0	176.200.680,0	3.500.000,0	-	-	11.445.000,0	14.945.000,0	200.445.680,0	1.514.605,0	477.500,0	-	-	1.992.105,0	
397	SDN 10 SUMBER MARGA TELANG	876.700,0	321.660.000,0	5.400.000,0	260.927.500,0	17.294.000,0	-	-	22.749.000,0	40.043.000,0	306.370.500,0	16.166.200,0	8.163.000,0	6.648.500,0	1.514.500,0	17.680.700,0	
398	SDN 11 SUMBER MARGA TELANG	-	122.850.000,0	15.600.000,0	98.300.000,0	4.500.000,0	-	-	3.800.000,0	8.300.000,0	122.200.000,0	650.000,0	1.630.000,0	985.000,0	645.000,0	1.295.000,0	
399	SDN 12 SUMBER MARGA TELANG	12.054,0	118.080.000,0	3.600.000,0	93.977.300,0	800.000,0	-	-	18.322.700,0	19.122.700,0	116.700.000,0	1.392.054,0	180.000,0	-	-	1.572.054,0	
400	SDN 13 SUMBER MARGA TELANG	76.221,0	223.380.000,0	6.000.000,0	183.849.000,0	2.990.000,0	-	-	18.545.600,0	21.535.600,0	211.384.600,0	12.071.621,0	1.983.500,0	-	1.983.500,0	14.055.121,0	
401	SDN 1 TALANG KELAPA	49.434,0	617.490.000,0	22.200.000,0	417.447.592,0	104.123.724,0	-	-	64.388.400,0	168.512.124,0	608.159.716,0	9.379.718,0	21.427.003,0	10.623.275,0	10.803.728,0	20.183.446,0	
402	SDN 2 TALANG KELAPA	127.373,0	960.210.000,0	28.560.000,0	691.944.510,0	146.735.000,0	-	-	90.000.500,0	957.240.010,0	957.240.010,0	3.097.363,0	28.903.225,0	8.121.300,0	20.781.925,0	23.879.288,0	
403	SDN 3 TALANG KELAPA	700.759,0	186.480.000,0	11.400.000,0	146.723.900,0	7.985.000,0	-	-	21.071.400,0	29.056.400,0	187.180.300,0	459,0	2.916.609,0	2.271.609,0	645.000,0	645.459,0	
404	SDN 4 TALANG KELAPA	1.980.041,0	275.040.000,0	12.081.500,0	158.188.110,0	14.650.000,0	-	-	51.188.600,0	65.838.600,0	266.031.174,0	10.988.867,0	3.502.500,0	-	-	10.988.867,0	
405	SDN 5 TALANG KELAPA	132.491,0	272.610.000,0	14.400.000,0	217.562.336,0	9.829.000,0	-	-	29.800.000,0	39.629.000,0	271.591.336,0	1.151.155,0	4.750.448,0	2.422.723,0	2.327.725,0	3.478.880,0	
406	SDN 6 TALANG KELAPA	9.845.820,0	345.240.000,0	15.600.000,0	242.261.165,0	36.382.200,0	-	-	40.881.000,0	77.263.200,0	335.124.365,0	20.061.455,0	9.473.177,0	7.582.177,0	1.891.000,0	21.952.455,0	
407	SDN 7 TALANG KELAPA	160.345,0	591.300.000,0	19.700.000,0	401.938.596,0	137.475.000,0	-	-	15.496.000,0	152.971.000,0	574.609.596,0	16.850.749,0	23.240.500,0	23.240.500,0	-	16.850.749,0	
408	SDN 8 TALANG KELAPA	9.663,0	531.990.000,0	23.105.000,0	380.540.370,0	36.200.000,0	-	-	85.703.400,0	121.903.400,0	525.548.770,0	6.450.893,0	13.872.950,0	9.410.950,0	4.462.000,0	10.912.893,0	
409	SDN 9 TALANG KELAPA	655.048,0	243.900.000,0	12.000.000,0	165.715.048,0	23.870.000,0	-	-	42.400.000,0	66.270.000,0	243.985.048,0	570.000,0	3.835.000,0	3.400.000,0	435.000,0	1.005.000,0	
410	SDN 10 TALANG KELAPA	4.516.214,0	537.930.000,0	12.000.000,0	384.517.298,0	57.780.000,0	-	-	85.577.000,0	143.357.000,0	539.874.298,0	2.571.916,0	1.865.000,0	-	1.865.000,0	4.436.916,0	
411	SDN 11 TALANG KELAPA	15.040.028,0	306.900.000,0	18.000.000,0	221.190.028,0	25.950.000,0	-	-	56.200.000,0	82.150.000,0	321.340.028,0	600.000,0	9.762.100,0	8.245.900,0	1.516.200,0	2.116.200,0	
412	SDN 12 TALANG KELAPA	9.410.924,0	562.860.000,0	27.600.000,0	445.425.572,0	28.250.000,0	-	-	56.270.400,0	84.520.400,0	557.345.972,0	14.724.952,0	14.644.525,0	12.815.350,0	1.829.175,0	16.554.127,0	
413	SDN 13 TALANG KELAPA	108.796,0	368.550.000,0	21.150.000,0	250.654.094,0	29.790.000,0	-	-	67.050.400,0	96.840.000,0	368.644.494,0	14.302,0	5.623.000,0	-	5.623.000,0	5.637.302,0	
414	SDN 14 TALANG KELAPA	794,0	275.040.000,0	14.750.000,0	206.658.416,0	32.910.000,0	-	-	16.339.200,0	49.249.200,0	270.657.616,0	4.383.178,0	4.732.500,0	4.732.500,0	-	4.383.178,0	
415	SDN 15 TALANG KELAPA	86,0	251.640.000,0	6.400.000,0	222.374.371,0	3.350.000,0	-	-	6.743.000,0	10.093.000,0	238.867.371,0	12.772.715,0	5.307.580,0	5.307.580,0	-	12.772.715,0	
416	SDN 16 TALANG KELAPA	3.642.884,0	433.800.000,0	19.200.000,0	304.820.728,0	55.150.000,0	-	-	48.549.900,0	92.722.628,0	427.720.628,0	103.699.900,0	13.563.600,0	10.827.600,0	2.976.000,0	12.698.256,0	
417	SDN 17 TALANG KELAPA	197,0	279.360.000,0	12.000.000,0	170.827.889,0	52.945.750,0	-	-	37.180.500,0	92.060.250,0	274.888.139,0	4.472.058,0	10.491.050,0	9.061.750,0	1.429.300,0	5.901.358,0	
418	SDN 18 TALANG KELAPA	137.605,0	296.190.000,0	12.300.000,0	197.712.981,0	32.815.000,0	-	-	53.158.400,0	85.973.400,0	295.986.381,0	341.224,0	6.381.350,0	1.493.900,0	4.887.450,0	5.228.674,0	
419	SDN 19 TALANG KELAPA	3.372.421,0	586.170.000,0	19.800.000,0	440.929.266,0	50.230.000,0	-	-	74.811.600,0	125.041.600,0	585.770.866,0	3.771.555,0	15.162.685,0	11.710.685,0	3.452.000,0	7.223.555,0	
420	SDN 20 TALANG KELAPA	20.402,0	541.620.000,0	18.300.000,0	371.638.617,0	57.375.000,0	8.343.000,0	-	76.761.300,0	142.479.300,0	532.417.917,0	9.222.485,0	5.547.900,0	3.327.200,0	2.220.700,0	11.443.185,0	
421	SDN 21 TALANG KELAPA	10.812.986,0	408.330.000,0	18.000.000,0	304.934.136,0	16.010.500,0	-	-	75.628.300,0	414.652.936,0	414.652.936,0	4.490.050,0	12.935.122,0	6.896.539,0	6.038.583,0	10.528.633,0	
422	SDN 22 TALANG KELAPA	7.078.500,0	487.980.000,0	20.000.000,0	355.722.374,0	41.178.000,0	-	-	77.580.000,0	118.758.000,0	494.480.374,0	578.126,0	9.661.650,0	9.266.450,0	395.200,0	973.326,0	
423	SDN 23 TALANG KELAPA	4.371.550,0	520.380.000,0	13.200.000,0	370.531.396,0	67.140.000,0	-	-	67.855.900,0	136.423.800,0	520.155.196,0	4.596.354,0	8.531.800,0	8.531.800,0	-	4.596.354,0	
424	SDN 24 TALANG KELAPA	126.804,0	608.220.000,0	19.950.000,0	406.687.236,0	110.468.200,0	-	-	70.842.079,0	181.310.279,0	607.947.515,0	399.289,0	19.196.683,0	7.094.845,0	12.101.838,0	12.501.127,0	
425	SDN 25 TALANG KELAPA	236.540,0	305.280.000,0	11.700.000,0	220.719.856,0	50.845.000,0	-	-	14.557.500,0	65.402.500,0	297.822.356,0	7.694.184,0	6.825.200,0	2.074.450,0	4.750.750,0	12.444.934,0	
426	SDN 26 TALANG KELAPA	2.303.245,0	326.610.000,0	12.000.000,0	215.575.516,0	41.490.000,0	-	-	59.839.200,0	101.329.200,0	328.904.716,0	8.529,0	7.644.761,0	5.334.492,0	2.310.269,0	2.318.798,0	
427	SDN 27 TALANG KELAPA	15.108,0	324.000.000,0	15.000.000,0	192.346.159,0	60.984.500,0	-	-	54.844.100,0	115.828.600,0	323.174.759,0	840.349,0	4.247.000,0	3.510.500,0	736.500,0	1.576.849,0	
428	SDN 28 TALANG KELAPA	-	167.580.000,0	10.800.000,0	129.530.000,0	10.900.000,0	-	-	16.017.300,0	26.917.300,0	167.247.300,0	332.700,0	2.242.818,0	1.110.745,0	1.132.073,0	1.464.773,0	
429	SDN 29 TALANG KELAPA	237,0	375.210.000,0	17.910.000,0	251.282.500,0	51.804.000,0	-	-	51.064.800,0	102.868.800,0	372.061.300,0	3.148.937,0	10.553.190,0	5.410.520,0	5.142.670,0	8.291.607,0	
430	SDN 30 TALANG KELAPA	458,0	289.170.000,0	16.800.000,0	239.494.807,0	24.360.000,0	-	-	4.300.000,0	28.660.000,0	284.954.807,0	4.215.651,0	10.751.739,0	1.924.670,0	8.827.069,0	10.042.720,0	
431	SDN 31 TALANG KELAPA	366,0	193.590.000,0	9.600.000,0	138.164.933,0	18.355.000,0	-	-	27.380.300,0	45.735.300,0	193.500.233,0	90.133,0	885.000,0	465.000,0	420.000,0	510.133,0	
432	SDN 32 TALANG KELAPA	330.640,0	651.240.000,0	20.810.000,0	489.642.966,0	74.625.000,0	-	-	61.873.600,0	136.498.600,0	646.951.566,0	4.619.074,0	13.752.914,0	-	13.752.914,0	18.371.988,0	
433	SDN 33 TALANG KELAPA	75.802,0	434.880.000,0	18.000.000,0	324.771.412,0	54.034.350,0	-	-	38.150.000,0	92.184.350,0	434.955.762,0	40,0	6.706.910,0	-	6.706.910,0	6.706.910,0	
434	SDN 34 TALANG KELAPA	81,0	383.220.000,0	19.200.000,0	289.322.348,0	45.000.000,0	-	-	29.696.000,0	74.696.000,0	383.218.348,0	1.733,0	9.996.090,0	5.720.000,0	4.276.090,0	4.277.823,0	
435	SDN 35 TALANG KELAPA	9.630,0	561.600.000,0	12.000.000,0	366.705.938,0	128.955.000,0	-	-	53.884.850,0	182.839.850,0	561.545.788,0	63.842,0	15.777.925,0	9.471.925,0	6.306.842,0	6.306.842,0	
436	SDN 36 TALANG KELAPA	1.780,0	116.460.000,0	10.200.000,0	88.964.518,0	7.020.000,0	-	-	5.398.000,0	12.418.000,0	111.582.518,0	4.879.262,0	2.060.000,0	1.875.000,0	185.000,0	5.064.262,0	
437	SDN 37 TALANG KELAPA	685.900,0	217.800.000,0	4.500.000,0	179.975.325,0	4.900.000,0	-	-	16.244.800,0	21.144.800,0	205.620.125,0	12.865.775,0	2.852.210,0	-	2.852.210,0	15.717.985,0	
438	SDN 1 TANJUNG LAGO	143.543,0	250.020.000,0	13.250.000,0	201.040.088,0	13.699.000,0	-	-	22.138.000,0	35.837.000,0	250.127.088,0	36.455,0	2.371.500,0	-	-	36.455,0	
439	SDN 2 TANJUNG LAGO	311,0	160.020.000,0	8.700.000,0</													

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA							JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA								
1	2																
447	SDN 10 TANJUNG LAGO	67.686,0	154.620.000,0	6.300.000,0	103.494.698,0	35.305.000,0	-	-	4.748.400,0	40.053.400,0	149.848.098,0	4.839.588,0	5.068.050,0	388.050,0	4.680.000,0	9.519.588,0	
448	SDN 11 TANJUNG LAGO	675.120,0	296.550.000,0	20.400.000,0	234.618.100,0	22.500.000,0	-	-	11.500.000,0	34.000.000,0	289.018.100,0	8.207.020,0	4.574.100,0	3.174.100,0	1.400.000,0	9.607.020,0	
449	SDN 12 TANJUNG LAGO	660.000,0	200.340.000,0	20.400.000,0	124.296.421,0	43.115.000,0	-	-	13.188.000,0	56.303.000,0	200.999.421,0	579,0	7.215.660,0	7.215.660,0	-	579,0	
450	SDN 13 TANJUNG LAGO	3.381.300,0	234.000.000,0	13.200.000,0	163.443.450,0	43.582.250,0	-	-	17.155.600,0	60.737.850,0	237.381.300,0	-	4.051.500,0	4.051.500,0	-	-	
451	SDN 14 TANJUNG LAGO	125,0	177.210.000,0	12.000.000,0	137.134.000,0	16.740.000,0	-	-	10.658.200,0	27.398.200,0	176.532.200,0	677.925,0	2.279.000,0	-	2.279.000,0	2.956.925,0	
452	SDN 15 TANJUNG LAGO	198,0	106.110.000,0	8.200.000,0	77.749.991,0	10.363.000,0	-	-	9.797.000,0	20.160.000,0	106.109.991,0	207,0	770.000,0	770.000,0	-	207,0	
453	SDN 16 TANJUNG LAGO	57.342,0	188.460.000,0	7.950.000,0	168.837.335,0	-	-	-	10.007.400,0	10.007.400,0	186.794.735,0	1.722.607,0	1.688.350,0	-	1.688.350,0	3.410.957,0	
454	SDN 17 TANJUNG LAGO	-	127.530.000,0	10.600.000,0	104.641.400,0	2.100.000,0	-	-	9.702.600,0	11.802.600,0	127.044.000,0	486.000,0	1.940.000,0	1.940.000,0	-	486.000,0	
455	SDN 18 TANJUNG LAGO	6.750,0	28.800.000,0	1.400.000,0	24.406.750,0	1.000.000,0	-	-	2.000.000,0	3.000.000,0	28.806.750,0	-	55.000,0	-	55.000,0	55.000,0	
456	SDN 19 TANJUNG LAGO	8.466,0	274.680.000,0	7.200.000,0	231.143.466,0	24.310.000,0	-	-	12.035.000,0	36.345.000,0	274.688.466,0	-	2.301.250,0	781.250,0	1.520.000,0	1.520.000,0	
457	SDN 20 TANJUNG LAGO	220.416,0	263.880.000,0	16.800.000,0	215.791.000,0	6.500.000,0	-	7.750.000,0	10.870.000,0	25.120.000,0	257.711.000,0	6.389.416,0	1.740.000,0	-	1.740.000,0	8.129.416,0	
458	SDN 21 TANJUNG LAGO	150.000,0	39.240.000,0	3.000.000,0	33.545.000,0	-	-	-	2.820.000,0	2.820.000,0	39.365.000,0	25.000,0	-	-	-	25.000,0	
459	SDN 22 TANJUNG LAGO	-	249.930.000,0	14.400.000,0	191.557.800,0	17.400.000,0	-	-	26.572.200,0	43.972.200,0	249.930.000,0	-	3.608.000,0	3.608.000,0	-	-	
460	SDN 23 TANJUNG LAGO	3.000,0	44.730.000,0	1.350.000,0	31.832.000,0	10.200.000,0	-	-	-	10.200.000,0	43.382.000,0	1.351.000,0	567.500,0	-	567.500,0	1.918.500,0	
461	SDN 24 TANJUNG LAGO	-	180.540.000,0	16.800.000,0	135.947.000,0	12.850.000,0	-	-	14.943.000,0	27.793.000,0	180.540.000,0	-	4.005.000,0	4.005.000,0	-	-	
462	SDN 1 TUNGKAL ILIR	94,0	63.360.000,0	3.600.000,0	55.060.000,0	-	-	-	4.700.000,0	4.700.000,0	63.360.000,0	94,0	-	-	-	94,0	
463	SDN 2 TUNGKAL ILIR	221.739,0	122.490.000,0	4.500.000,0	81.021.000,0	25.000.000,0	-	-	11.969.000,0	36.969.000,0	122.490.000,0	221.739,0	450.000,0	-	450.000,0	671.739,0	
464	SDN 3 TUNGKAL ILIR	325.842,0	279.270.000,0	4.500.000,0	251.276.000,0	22.945.000,0	-	-	-	22.945.000,0	278.721.000,0	874.842,0	4.046.700,0	590.200,0	3.456.500,0	4.331.342,0	
465	SDN 4 TUNGKAL ILIR	330.011,0	144.180.000,0	5.400.000,0	109.360.000,0	6.350.000,0	-	-	3.000.000,0	9.350.000,0	124.110.000,0	20.400.011,0	771.364,0	-	771.364,0	21.171.375,0	
466	SDN 5 TUNGKAL ILIR	-	164.160.000,0	8.200.000,0	144.374.000,0	5.250.000,0	-	-	4.402.000,0	9.652.000,0	162.226.000,0	1.934.000,0	1.472.500,0	737.500,0	735.000,0	2.669.000,0	
467	SDN 6 TUNGKAL ILIR	1.076.100,0	128.070.000,0	3.450.000,0	118.244.600,0	6.500.000,0	-	-	951.500,0	7.451.500,0	128.146.100,0	-	1.325.000,0	675.000,0	650.000,0	650.000,0	
468	SDN 7 TUNGKAL ILIR	84,0	163.440.000,0	9.000.000,0	128.040.000,0	11.400.000,0	-	-	15.000.000,0	26.400.000,0	163.440.000,0	84,0	3.190.643,0	3.190.643,0	-	84,0	
469	SDN 8 TUNGKAL ILIR	-	159.300.000,0	2.400.000,0	140.354.700,0	3.989.000,0	-	950.000,0	11.606.300,0	16.545.300,0	159.300.000,0	-	-	-	-	-	
470	SDN 9 TUNGKAL ILIR	-	150.930.000,0	11.900.000,0	133.512.000,0	1.800.000,0	-	-	3.668.000,0	5.468.000,0	150.880.000,0	50.000,0	575.000,0	-	575.000,0	625.000,0	
471	SDN 10 TUNGKAL ILIR	29,0	71.280.000,0	3.600.000,0	62.540.000,0	-	-	-	5.140.000,0	5.140.000,0	71.280.000,0	29,0	240.000,0	240.000,0	-	29,0	
472	SDN 11 TUNGKAL ILIR	1.056,0	104.040.000,0	6.050.000,0	89.772.700,0	-	-	-	8.218.300,0	8.218.300,0	104.041.000,0	56,0	-	-	-	56,0	
473	SDN 12 TUNGKAL ILIR	-	71.100.000,0	6.000.000,0	60.749.100,0	1.800.000,0	-	-	2.550.900,0	4.350.900,0	71.100.000,0	-	200.000,0	-	200.000,0	200.000,0	
474	SDN 13 TUNGKAL ILIR	4.650.990,0	222.390.000,0	9.600.000,0	178.680.000,0	9.200.000,0	-	-	27.290.000,0	36.490.000,0	224.770.000,0	2.270.990,0	1.234.200,0	-	1.234.200,0	3.505.190,0	
475	SDN 14 TUNGKAL ILIR	-	157.050.000,0	1.450.000,0	130.584.000,0	10.700.000,0	-	-	7.566.000,0	18.266.000,0	150.300.000,0	6.750.000,0	500.000,0	-	500.000,0	7.250.000,0	
476	SDN 15 TUNGKAL ILIR	5.230.417,0	238.770.000,0	6.000.000,0	204.885.000,0	7.650.000,0	-	-	16.813.200,0	24.463.200,0	235.348.200,0	8.652.217,0	-	-	-	8.652.217,0	
477	SDN 16 TUNGKAL ILIR	-	45.360.000,0	4.400.000,0	38.395.000,0	-	-	-	-	-	42.795.000,0	2.565.000,0	220.000,0	-	220.000,0	2.785.000,0	
478	SDN 17 TUNGKAL ILIR	87.310,0	76.770.000,0	6.550.000,0	67.965.000,0	-	-	-	2.297.000,0	2.297.000,0	76.812.000,0	45.310,0	180.000,0	-	180.000,0	225.310,0	
479	SDN 18 TUNGKAL ILIR	1.098.155,0	183.780.000,0	7.900.000,0	155.718.700,0	9.995.000,0	-	-	8.966.900,0	18.961.900,0	182.580.600,0	2.297.555,0	2.326.015,0	931.220,0	1.394.795,0	3.692.350,0	
480	SDN 19 TUNGKAL ILIR	-	112.410.000,0	1.300.000,0	101.132.000,0	1.300.000,0	-	-	7.000.000,0	8.300.000,0	112.382.000,0	28.000,0	-	-	225.000,0	253.000,0	
481	SDN 20 TUNGKAL ILIR	695,0	94.680.000,0	7.200.000,0	76.100.000,0	4.200.000,0	-	-	7.180.000,0	11.380.000,0	94.680.000,0	695,0	750.000,0	750.000,0	-	695,0	
482	SDN 21 TUNGKAL ILIR	640.196,0	116.010.000,0	6.000.000,0	102.480.496,0	4.164.000,0	-	-	944.000,0	5.108.000,0	113.588.496,0	3.061.700,0	764.000,0	664.000,0	100.000,0	3.161.700,0	
483	SDN 22 TUNGKAL ILIR	-	275.670.000,0	3.400.000,0	212.223.000,0	22.710.000,0	-	-	37.137.000,0	59.847.000,0	275.470.000,0	200.000,0	1.270.000,0	-	1.270.000,0	1.470.000,0	
484	SDN 23 TUNGKAL ILIR	9.004.676,0	226.260.000,0	6.000.000,0	188.702.000,0	22.304.676,0	-	1.500.000,0	16.758.000,0	40.562.676,0	235.264.676,0	-	2.651.500,0	-	2.651.500,0	2.651.500,0	
485	SDN 24 TUNGKAL ILIR	486,0	134.910.000,0	3.600.000,0	121.810.000,0	6.300.000,0	-	-	3.150.000,0	9.450.000,0	134.860.000,0	50.486,0	1.715.200,0	-	1.715.200,0	1.765.686,0	
	JUMLAH SDN	660.360.335,0	85.255.020.000,0	4.139.579.500,0	66.674.288.393,0	5.387.185.777,0	20.283.000,0	41.695.718,0	8.232.281.336,0	13.681.445.831,0	84.495.313.724,0	1.420.066.611,0	1.194.596.100,0	544.979.237,0	649.616.863,0	2.069.683.474,0	
1	SMPN 1 AIR KUMBANG	3.735,0	419.540.000,0	33.600.000,0	299.731.327,0	46.290.921,0	-	-	17.010.000,0	63.300.921,0	396.632.248,0	22.911.487,0	9.139.738,0	4.985.588,0	4.154.150,0	27.065.637,0	
2	SMPN 2 AIR KUMBANG	29.859,0	133.980.000,0	15.000.000,0	109.015.146,0	1.980.000,0	-	-	7.993.800,0	9.973.800,0	133.989.946,0	20.913,0	1.330.000,0	690.000,0	640.000,0	660.913,0	
3	SMPN 3 AIR KUMBANG	3.879.829,0	149.820.000,0	12.300.000,0	103.494.260,0	3.350.000,0	-	-	18.244.200,0	21.594.200,0	137.388.460,0	16.311.369,0	1.835.907,0	1.625.907,0	210.000,0	16.521.369,0	
4	SMPN 4 AIR KUMBANG	186,0	100.760.000,0	4.200.000,0	85.470.186,0	2.250.000,0	-	-	8.840.000,0	11.090.000,0	100.760.186,0	-	-	-	-	-	
5	SMPN 1 AIR SALEK	75.016,0	443.960.000,0	35.100.000,0	372.599.000,0	26.585.000,0	-	-	9.698.000,0	36.283.000,0	443.982.000,0	53.016,0	9.032.160,0	9.032.160,0	-	53.016,0	
6	SMPN 2 AIR SALEK	7.205.345,0	323.400.000,0	22.750.000,0	274.065.033,0	8.700.000,0	-	-	19.866.200,0	28.566.200,0	325.381.233,0	5.224.112,0	2.633.650,0	110.000,0	2.523.650,0	7.747.762,0	
7	SMPN 3 AIR SALEK	-	220.110.000,0	11.800.000,0	168.698.500,0	19.000.000,0	-	-	19.773.600,0	38.773.600,0	219.272.100,0	837.900,0	2.016.500,0	-	2.016.500,0	2.854.400,0	
8	SMPN 4 AIR SALEK	14.436,0	342.870.000,0	9.800.000,0	270.483.450,0	23.650.000,0	-	-	38.826.000,0	62.476.000,0	342.7						

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	SALDO BOS REGULER	ALOKASI DANA BOS REGULER	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
					BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL						TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK
							PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2																
16	SMPN 1 BANYUASIN III	336.150,0	771.210.000,0	22.200.000,0	697.326.150,0	13.153.460,0	-	-	23.230.000,0	36.383.460,0	755.909.610,0	15.636.540,0	22.841.095,0	8.784.900,0	14.056.195,0	29.692.735,0	
17	SMPN 2 BANYUASIN III	167,0	633.160.000,0	29.300.000,0	520.907.960,0	54.425.320,0	-	-	28.491.000,0	82.916.320,0	633.124.280,0	35.887,0	29.645.064,0	29.645.064,0	-	35.887,0	
18	SMPN 3 BANYUASIN III	315.101,0	34.210.000,0	3.850.000,0	26.139.000,0	3.280.000,0	-	-	1.255.000,0	4.535.000,0	315.000,0	1.101,0	-	-	315.000,0	316.101,0	
19	SMPN 4 BANYUASIN III	2.301.270,0	330.110.000,0	18.000.000,0	268.962.540,0	4.585.000,0	-	-	39.953.000,0	44.538.000,0	331.500.540,0	910.730,0	10.953.140,0	6.566.300,0	4.386.840,0	5.297.570,0	
20	SMPN 5 BANYUASIN III	1.904,0	286.220.000,0	22.470.000,0	218.971.284,0	10.125.000,0	-	-	33.000.000,0	43.125.000,0	284.566.284,0	1.655.620,0	4.146.064,0	4.146.064,0	-	1.655.620,0	
21	SMPN 1 BETUNG	59.733,0	782.320.000,0	42.900.000,0	556.157.330,0	29.742.500,0	-	6.000.000,0	141.334.300,0	177.076.800,0	776.134.130,0	6.245.603,0	18.980.300,0	15.778.500,0	3.201.800,0	9.447.403,0	
22	SMPN 2 BETUNG	15.725,0	201.300.000,0	14.500.000,0	178.180.797,0	3.250.000,0	-	-	5.250.000,0	8.500.000,0	201.180.797,0	134.928,0	1.380.900,0	300.000,0	1.080.900,0	1.215.828,0	
23	SMPN 3 BETUNG	8.935,0	180.950.000,0	1.500.000,0	169.575.500,0	1.800.000,0	-	-	2.300.000,0	4.100.000,0	175.175.500,0	5.783.435,0	702.500,0	345.000,0	357.500,0	6.140.935,0	
24	SMPN 1 KARANG AGUNG ILIR	4.858.668,0	226.930.000,0	21.000.000,0	184.945.500,0	5.549.000,0	-	-	15.504.000,0	21.053.000,0	226.998.500,0	4.790.168,0	4.120.900,0	1.335.000,0	2.785.900,0	7.576.068,0	
25	SMPN 2 KARANG AGUNG ILIR	100,0	300.300.000,0	17.500.000,0	252.099.000,0	16.700.000,0	-	3.500.000,0	10.500.000,0	30.700.000,0	300.299.000,0	1.100,0	6.585.000,0	1.865.000,0	4.720.000,0	4.721.100,0	
26	SMPN 1 MAKARTI JAYA	2.321.919,0	617.650.000,0	51.963.900,0	504.159.340,0	-	-	-	62.958.500,0	62.958.500,0	619.081.740,0	890.179,0	2.197.500,0	1.185.000,0	1.012.500,0	1.902.679,0	
27	SMPN 2 MAKARTI JAYA	217.858,0	170.830.000,0	12.600.000,0	117.556.819,0	10.640.000,0	-	-	29.368.400,0	40.008.400,0	170.165.219,0	882.639,0	1.667.500,0	-	1.667.500,0	2.550.139,0	
28	SMPN 3 MAKARTI JAYA	-	187.550.000,0	11.880.000,0	128.358.000,0	21.375.000,0	-	-	25.032.000,0	46.407.000,0	186.645.000,0	905.000,0	2.750.000,0	1.695.000,0	1.055.000,0	1.960.000,0	
29	SMPN 4 MAKARTI JAYA	-	124.630.000,0	7.700.000,0	103.292.200,0	2.495.000,0	-	-	10.762.800,0	13.257.800,0	124.250.000,0	380.000,0	960.000,0	-	960.000,0	1.340.000,0	
30	SMPN 1 MUARA PADANG	648,0	357.830.000,0	25.300.000,0	297.335.456,0	20.245.000,0	-	-	14.950.000,0	35.195.000,0	357.830.456,0	192,0	4.748.000,0	2.597.000,0	2.151.000,0	2.151.192,0	
31	SMPN 2 MUARA PADANG	296.446,0	341.880.000,0	22.700.000,0	279.631.490,0	4.440.000,0	-	-	35.385.000,0	39.825.000,0	342.156.490,0	19.956,0	3.145.100,0	2.175.100,0	970.000,0	989.956,0	
32	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	190.485,0	292.490.000,0	17.700.000,0	216.889.000,0	3.010.000,0	-	-	55.080.000,0	58.090.000,0	292.679.000,0	1.485,0	4.859.492,0	1.411.180,0	3.448.312,0	3.448.797,0	
33	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	164.299,0	394.240.000,0	14.400.000,0	300.284.100,0	24.260.000,0	-	-	55.286.000,0	79.546.000,0	394.230.100,0	174.199,0	4.393.183,0	1.705.455,0	2.687.728,0	2.861.927,0	
34	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	3.600.000,0	238.590.000,0	10.400.000,0	189.768.400,0	20.900.000,0	-	-	21.121.600,0	42.021.600,0	242.190.000,0	-	4.445.900,0	676.500,0	3.769.400,0	3.769.400,0	
35	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	285.000,0	235.290.000,0	20.000.000,0	173.325.000,0	18.250.000,0	-	-	24.000.000,0	42.250.000,0	235.575.000,0	-	2.082.500,0	2.082.500,0	-	-	
36	SMPN 5 MUARA SUGIHAN	48.074,0	34.100.000,0	3.000.000,0	26.736.000,0	-	-	-	1.274.000,0	1.274.000,0	31.010.000,0	3.138.074,0	75.000,0	-	75.000,0	3.213.074,0	
37	SMPN 6 MUARA SUGIHAN	2.510.000,0	31.130.000,0	-	30.705.000,0	-	-	-	1.800.000,0	1.800.000,0	32.505.000,0	1.135.000,0	-	-	-	1.135.000,0	
38	SMPN 1 MUARA TELANG	24.695,0	612.260.000,0	44.200.000,0	478.688.240,0	49.975.000,0	-	-	39.390.000,0	89.365.000,0	612.253.240,0	31.455,0	11.129.450,0	7.122.950,0	4.006.500,0	4.037.955,0	
39	SMPN 2 MUARA TELANG	9.029.703,0	226.270.000,0	13.600.000,0	182.779.700,0	13.180.000,0	-	-	22.680.000,0	35.860.000,0	232.239.700,0	3.060.003,0	2.218.000,0	898.000,0	1.320.000,0	4.380.003,0	
40	SMPN 3 MUARA TELANG	784.200,0	114.620.000,0	10.400.000,0	103.784.200,0	1.220.000,0	-	-	-	1.220.000,0	115.404.200,0	-	270.909,0	120.909,0	150.000,0	150.000,0	
41	SMPN 1 PULAU RIMAU	851.900,0	334.510.000,0	25.260.000,0	272.041.500,0	10.000.000,0	-	-	27.595.400,0	37.595.400,0	334.896.900,0	465.000,0	7.009.960,0	5.422.500,0	1.587.460,0	2.052.460,0	
42	SMPN 2 PULAU RIMAU	-	308.220.000,0	17.949.500,0	194.145.000,0	7.622.500,0	-	-	87.673.000,0	95.295.500,0	307.390.000,0	830.000,0	3.347.400,0	2.445.000,0	902.400,0	1.732.400,0	
43	SMPN 3 PULAU RIMAU	-	30.030.000,0	2.550.000,0	18.072.500,0	9.210.000,0	-	-	-	9.210.000,0	29.832.500,0	197.500,0	634.545,0	272.727,0	361.818,0	559.318,0	
44	SMPN 1 RAMBUTAN	25.978.454,0	735.460.000,0	61.545.000,0	551.538.954,0	73.541.000,0	-	-	74.807.000,0	148.348.000,0	761.431.954,0	6.500,0	13.221.168,0	5.449.268,0	7.771.900,0	7.778.400,0	
45	SMPN 2 RAMBUTAN	85.251,0	343.090.000,0	10.600.000,0	272.562.443,0	39.696.000,0	-	-	19.999.900,0	59.695.900,0	342.858.343,0	316.908,0	5.795.250,0	3.619.500,0	2.175.750,0	2.492.658,0	
46	SMPN 3 RAMBUTAN	3.310.500,0	125.400.000,0	16.650.000,0	97.946.500,0	7.300.000,0	-	-	6.814.000,0	14.114.000,0	128.710.500,0	-	1.886.300,0	1.586.300,0	300.000,0	300.000,0	
47	SMPN 4 RAMBUTAN	184.000,0	151.580.000,0	11.850.000,0	107.151.000,0	8.450.000,0	-	2.300.000,0	22.009.000,0	32.759.000,0	151.760.000,0	4.000,0	1.270.700,0	967.700,0	303.000,0	307.000,0	
48	SMPN 1 RANTAU BAYUR	5.800.362,0	233.420.000,0	18.000.000,0	207.163.176,0	5.865.000,0	-	-	5.002.000,0	10.867.000,0	236.030.176,0	3.190.186,0	3.330.850,0	1.900.600,0	1.430.250,0	4.620.436,0	
49	SMPN 2 RANTAU BAYUR	3.450.477,0	97.790.000,0	11.100.000,0	73.672.000,0	2.500.000,0	-	-	11.768.000,0	14.268.000,0	99.400.000,0	2.200.477,0	805.000,0	-	805.000,0	9.005.477,0	
50	SMPN 3 RANTAU BAYUR	8.759.110,0	296.010.000,0	18.000.000,0	268.175.250,0	-	-	-	14.469.000,0	14.469.000,0	300.644.250,0	4.124.860,0	5.883.440,0	-	5.883.440,0	10.008.300,0	
51	SMPN 4 RANTAU BAYUR	229.917,0	189.420.000,0	9.600.000,0	157.374.000,0	2.000.000,0	-	-	14.719.000,0	16.719.000,0	183.693.000,0	5.956.917,0	2.265.200,0	-	2.265.200,0	8.222.117,0	
52	SMPN 5 RANTAU BAYUR	71.393,0	129.250.000,0	25.200.000,0	83.172.011,0	3.225.000,0	-	-	11.295.000,0	14.520.000,0	122.892.011,0	6.429.382,0	2.054.500,0	1.427.000,0	627.500,0	7.056.882,0	
53	SMPN 6 RANTAU BAYUR	3.458.913,0	207.790.000,0	21.930.000,0	158.245.478,0	5.062.000,0	-	-	24.899.000,0	29.961.000,0	210.136.478,0	1.112.435,0	630.000,0	-	630.000,0	1.742.435,0	
54	SMPN 7 RANTAU BAYUR	35.300,0	268.180.000,0	12.000.000,0	207.625.300,0	22.250.000,0	-	-	26.100.000,0	48.350.000,0	267.975.300,0	240.000,0	2.886.370,0	-	2.886.370,0	3.126.370,0	
55	SMPN 1 SELAT PENUGUAN	50.000,0	432.300.000,0	26.400.000,0	311.786.000,0	5.369.000,0	-	-	44.435.000,0	53.659.000,0	391.845.000,0	40.505.000,0	7.293.900,0	1.682.500,0	5.611.400,0	46.116.400,0	
56	SMPN 1 SEMBAWA	590.294,0	1.033.780.000,0	51.900.000,0	700.435.130,0	32.906.100,0	-	-	245.646.000,0	278.552.100,0	1.030.887.230,0	3.483.064,0	30.974.586,0	19.676.900,0	11.297.686,0	14.780.750,0	
57	SMPN 2 SEMBAWA	3.198,0	757.460.000,0	26.400.000,0	676.135.228,0	29.674.000,0	-	-	22.855.100,0	52.529.100,0	755.064.328,0	2.398.870,0	19.974.904,0	19.974.904,0	-	2.398.870,0	
58	SMPN 3 SEMBAWA	50.100,0	95.480.000,0	4.200.000,0	75.541.709,0	6.249.000,0	-	-	8.798.000,0	15.047.000,0	94.788.709,0	741.391,0	453.500,0	180.000,0	273.500,0	1.014.891,0	
59	SMPN 1 SUKATAPEH	166.820,0	454.300.000,0	36.350.000,0	334.121.370,0	34.492.000,0	-	-	47.025.000,0	81.517.000,0	451.988.370,0	2.478.450,0	9.017.968,0	7.057.605,0	1.960.363,0	4.438.813,0	
60	SMPN 2 SUKATAPEH	850.000,0	121.220.000,0	-	109.936.200,0	-	-	-	12.078.800,0	12.078.800,0	122.015.000,0	55.000,0	-	-	55.000,0	55.000,0	
61	SMPN 3 SUKATAPEH	75.787,0	286.990.000,0	18.000.000,0	226.265.550,0	4.200.000,0	-	-	28.912.000,0	33.112.000,0	277.377.550,0	9.688.237,0	5.098.450,0	-	5.098.450,0	14.786.687,0	
62	SMPN 1 SUMBER MARGA TELANG	400.000,0	174.680.000,0	11.400.000,0	126.778.900,0	2.700.000,0	-	-	33.400.000,0	36.100.000,0	174.278.900,0	801.100,0	2.524.000,0	2.524.000,0	-	801.100,0	
63	SMPN 2 SUMBER MARGA TELANG	9.938.266,0	225.170.000,0	1.000.000,0	199.055.710,0	7.900.000,0	-	3.200.000,0	18.855.000,0	29.955.000,0	230.010.710,0	5.097.556,0	3.359.346,0	2.516.538,0	842.808,0	5.940.364,0	
64	SMPN 3 SUMBER MARGA TELANG	720.000,0	219.340.000,0	6.000.000,0	183.346.500,0	-	-	-	30.114.000,0	30.114.000,0	219.460.500,0	599.500,0	-	-	-	599.500,0	
65	SMPN 1 TALANG KELAPA	396.105,0	1.155.220														

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		REALISASI BELANJA							JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		SALDO AWAL	ALOKASI DANA BOS REGULER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL							TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGLUARAN PAJAK
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA								
1	2																
72	SMPN 2 TANJUNG LAGO	4.030.097,0	590.920.000,0	28.500.000,0	433.144.471,0	39.400.000,0	-	-	80.430.000,0	119.830.000,0	581.474.471,0	13.475.626,0	9.119.670,0	3.342.400,0	5.777.270,0	19.252.896,0	
73	SMPN 3 TANJUNG LAGO	1.068.000,0	186.780.000,0	13.200.000,0	153.905.000,0	2.500.000,0	-	-	17.670.000,0	20.170.000,0	187.275.000,0	573.000,0	1.707.500,0	-	1.707.500,0	2.280.500,0	
74	SMPN 4 TANJUNG LAGO	400.325,0	166.430.000,0	9.000.000,0	134.713.650,0	7.020.000,0	-	-	12.755.000,0	19.775.000,0	163.488.650,0	3.341.675,0	-	-	-	3.341.675,0	
75	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	20.000,0	253.220.000,0	8.750.000,0	227.077.000,0	2.300.000,0	-	2.000.000,0	13.090.000,0	17.390.000,0	253.217.000,0	23.000,0	450.000,0	-	450.000,0	473.000,0	
76	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	211.000,0	249.480.000,0	24.450.000,0	178.432.000,0	36.318.000,0	-	-	10.280.000,0	46.598.000,0	249.480.000,0	211.000,0	3.347.850,0	-	3.347.850,0	3.558.850,0	
77	SMPN 3 TUNGKAL ILIR	-	207.020.000,0	13.200.000,0	158.027.000,0	3.900.000,0	-	-	31.893.000,0	35.793.000,0	207.020.000,0	-	2.106.900,0	2.106.900,0	-	-	
	JUMLAH SMPN	122.701.911,0	24.756.710.000,0	1.478.259.300,0	19.327.246.348,0	1.104.993.601,0	-	21.300.000,0	2.725.679.400,0	3.851.973.001,0	24.657.478.649,0	221.933.262,0	440.812.165,0	274.123.318,0	166.688.847,0	388.622.109,0	
	JUMLAH TOTAL	783.062.246,0	110.011.730.000,0	5.617.838.800,0	86.001.534.741,0	6.492.179.378,0	20.283.000,0	62.995.718,0	10.957.960.736,0	17.533.418.832,0	109.152.792.373,0	1.641.999.873,0	1.635.408.265,0	819.102.555,0	816.305.710,0	2.458.305.583,0	



**REALISASI BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021  
PER 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2020**

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	ALOKASI DANA BOS AFIRMASI	REALISASI BELANJA							JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020
		SALDO BOS AFIRMASI		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA MODAL			TOTAL PENERIMAAN PAJAK	TOTAL PENGELUARAN PAJAK		
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2															
1	SDN 1 AIR KUMBANG	66.000.000	-	-	-	66.000.000	-	-	-	66.000.000	66.000.000	-	-	-	-	-
2	SDN 2 AIR KUMBANG	50.000.000	60.000.000	-	9.900.000	90.767.000	-	-	6.030.000	96.797.000	106.697.000	3.303.000	-	-	-	3.303.000
3	SDN 4 AIR KUMBANG	-	60.000.000	-	14.064.000	36.952.000	-	-	8.976.000	45.928.000	59.992.000	8.000	-	-	-	8.000
4	SDN 6 AIR KUMBANG	-	60.000.000	-	22.424.000	28.480.000	-	-	9.096.000	37.576.000	60.000.000	-	1.037.400	-	1.037.400	1.037.400
5	SDN 7 AIR KUMBANG	-	60.000.000	-	9.900.000	35.389.998	-	-	13.443.000	48.832.998	58.732.998	1.267.002	-	-	-	1.267.002
6	SDN 11 AIR KUMBANG	76.000.000	-	-	-	71.976.000	-	-	-	71.976.000	71.976.000	4.024.000	-	-	-	4.024.000
7	SDN 13 AIR KUMBANG	78.000.000	60.000.000	-	29.282.000	98.953.000	-	-	9.765.000	108.718.000	138.000.000	-	1.104.400	-	1.104.400	1.104.400
8	SDN 14 AIR KUMBANG	34.000.000	-	-	-	34.000.000	-	-	-	34.000.000	34.000.000	-	-	-	-	-
9	SDN 15 AIR KUMBANG	64.000.000	-	-	-	64.000.000	-	-	-	64.000.000	64.000.000	-	-	-	-	-
10	SDN 16 AIR KUMBANG	-	60.000.000	-	19.055.000	31.660.000	-	-	9.042.000	40.702.000	59.757.000	243.000	-	-	-	243.000
11	SDN 17 AIR KUMBANG	-	60.000.000	-	21.022.000	28.189.998	-	-	9.873.000	38.062.998	59.084.998	915.002	-	-	-	915.002
12	SDN 19 AIR KUMBANG	72.000.000	60.000.000	-	24.331.000	100.136.000	-	-	7.533.000	107.669.000	132.000.000	-	-	-	-	-
13	SDN 2 AIR SALEK	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-
14	SDN 3 AIR SALEK	72.000.000	-	-	-	72.000.000	-	-	-	72.000.000	72.000.000	-	-	-	-	-
15	SDN 5 AIR SALEK	58.000.000	-	-	-	58.000.000	-	-	-	58.000.000	58.000.000	-	-	-	-	-
16	SDN 6 AIR SALEK	62.000.000	-	-	-	62.000.000	-	-	-	62.000.000	62.000.000	-	-	-	-	-
17	SDN 7 AIR SALEK	68.000.000	-	-	-	68.000.000	-	-	-	68.000.000	68.000.000	-	-	-	-	-
18	SDN 11 AIR SALEK	58.000.000	-	-	-	49.100.000	-	-	-	49.100.000	49.100.000	8.900.000	-	-	-	8.900.000
19	SDN 12 AIR SALEK	68.000.000	-	-	-	68.000.000	-	-	-	68.000.000	68.000.000	-	-	-	-	-
20	SDN 13 AIR SALEK	72.000.000	-	-	-	72.000.000	-	-	-	72.000.000	72.000.000	-	-	-	-	-
21	SDN 15 AIR SALEK	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-
22	SDN 16 AIR SALEK	66.000.000	-	-	-	66.000.000	-	-	-	66.000.000	66.000.000	-	-	-	-	-
23	SDN 19 AIR SALEK	56.000.000	-	-	-	56.000.000	-	-	-	56.000.000	56.000.000	-	-	-	-	-
24	SDN 20 AIR SALEK	72.000.000	-	-	-	72.000.000	-	-	-	72.000.000	72.000.000	-	-	-	-	-
25	SDN 22 AIR SALEK	44.000.000	-	-	-	38.000.000	-	-	-	38.000.000	38.000.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000
26	SDN 23 AIR SALEK	66.000.000	-	-	-	66.000.000	-	-	-	66.000.000	66.000.000	-	-	-	-	-
27	SDN 24 AIR SALEK	58.000.000	-	-	-	58.000.000	-	-	-	58.000.000	58.000.000	-	-	-	-	-
28	SDN 3 BANYUASIN I	60.000.000	60.000.000	-	31.922.000	84.202.000	-	-	3.858.000	88.060.000	119.982.000	18.000	3.419.200	3.419.200	-	18.000
29	SDN 5 BANYUASIN I	56.000.000	60.000.000	-	21.310.000	88.184.000	-	-	6.506.000	94.690.000	116.000.000	-	250.000	250.000	-	-
30	SDN 16 BANYUASIN I	64.000.000	-	-	-	64.000.000	-	-	-	64.000.000	64.000.000	-	-	-	-	-
31	SDN 18 BANYUASIN I	-	60.000.000	-	33.865.000	15.000.000	-	-	9.651.000	24.651.000	58.516.000	1.484.000	1.483.800	1.483.800	-	1.484.000
32	SDN 27 BANYUASIN I	-	60.000.000	-	21.300.000	30.159.000	-	-	8.541.000	38.700.000	60.000.000	-	-	-	-	-
33	SDN 29 BANYUASIN I	78.000.000	60.000.000	-	29.300.000	100.133.000	-	-	8.538.000	108.671.000	137.971.000	29.000	1.680.000	1.680.000	-	29.000
34	SDN 30 BANYUASIN I	-	60.000.000	-	9.900.000	41.914.993	-	3.000.000	4.098.000	49.012.993	58.912.993	1.087.007	814.500	814.500	-	1.087.007
35	SDN 1 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	11.600.000	12.799.997	-	-	30.816.000	43.615.997	55.215.997	4.784.003	220.000	-	220.000	5.004.003
36	SDN 2 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	13.588.000	28.179.991	-	-	2.511.000	30.690.991	44.278.991	15.721.009	-	-	-	15.721.009
37	SDN 3 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	22.597.000	7.999.997	-	-	29.403.000	37.402.997	59.999.997	3	929.700	929.700	-	3
38	SDN 4 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	16.680.000	31.594.991	-	-	3.711.000	35.305.991	51.985.991	8.014.009	1.805.800	-	1.805.800	9.819.809
39	SDN 5 BANYUASIN II	44.000.000	60.000.000	-	14.200.000	66.549.994	-	-	6.975.000	73.524.994	87.724.994	16.275.006	25.000	-	25.000	16.300.006
40	SDN 6 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	10.660.000	32.309.991	-	-	2.790.000	35.099.991	45.759.991	14.240.009	831.000	-	831.000	15.071.009
41	SDN 7 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	-	17.899.997	-	-	27.690.000	45.589.997	45.589.997	14.410.003	-	-	-	14.410.003
42	SDN 9 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	-	17.899.997	-	-	26.235.000	44.134.997	44.134.997	15.865.003	-	-	-	15.865.003
43	SDN 10 BANYUASIN II	36.000.000	60.000.000	-	780.000	69.749.991	-	-	3.222.000	72.971.991	73.751.991	22.248.009	-	-	-	22.248.009
44	SDN 11 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	9.900.000	21.549.994	-	-	-	21.549.994	31.449.994	28.550.006	-	-	-	28.550.006

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		ALOKASI DANA BOS AFIRMASI	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020
		SALDO BOS AFIRMASI	BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				TOTAL BELANJA MODAL			TOTAL PENERIMAAN PAJAK	TOTAL PENGELUARAN PAJAK		
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2															
45	SDN 12 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	10.216.000	19.949.994	-	-	-	19.949.994	30.165.994	29.834.006	245.000	-	245.000	30.079.006
46	SDN 13 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	20.020.000	32.799.991	-	-	1.857.000	34.656.991	54.676.991	5.323.009	1.000.000	-	1.000.000	6.323.009
47	SDN 14 BANYUASIN II	-	60.000.000	-	10.965.000	43.050.000	-	-	5.985.000	49.035.000	60.000.000	-	3.681.362	-	3.681.362	3.681.362
48	SDN 3 BANYUASIN III	72.000.000	-	-	-	71.975.951	-	-	-	71.975.951	71.975.951	24.049	-	-	-	24.049
49	SDN 8 BANYUASIN III	74.000.000	-	-	-	73.975.000	-	-	-	73.975.000	73.975.000	25.000	-	-	-	25.000
50	SDN 9 BANYUASIN III	74.000.000	-	-	-	73.975.000	-	-	-	73.975.000	73.975.000	25.000	-	-	-	25.000
51	SDN 10 BANYUASIN III	76.000.000	-	-	-	69.043.619	-	-	-	69.043.619	69.043.619	6.956.381	6.904.381	6.904.381	-	6.956.381
52	SDN 12 BANYUASIN III	72.000.000	-	-	-	72.000.000	-	-	-	72.000.000	72.000.000	-	-	-	-	-
53	SDN 16 BANYUASIN III	62.000.000	-	-	-	61.981.000	-	-	-	61.981.000	61.981.000	19.000	-	-	-	19.000
54	SDN 17 BANYUASIN III	66.000.000	-	-	-	65.958.000	-	-	-	65.958.000	65.958.000	42.000	-	-	-	42.000
55	SDN 18 BANYUASIN III	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-
56	SDN 19 BANYUASIN III	40.000.000	-	-	-	39.991.991	-	-	-	39.991.991	39.991.991	8.009	-	-	-	8.009
57	SDN 20 BANYUASIN III	56.000.000	60.000.000	-	10.000.000	101.768.000	-	-	4.221.000	105.989.000	115.989.000	11.000	4.127.500	-	4.127.500	4.138.500
58	SDN 23 BANYUASIN III	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-
59	SDN 31 BANYUASIN III	42.000.000	-	-	-	42.000.000	-	-	-	42.000.000	42.000.000	-	-	-	-	-
60	SDN 36 BANYUASIN III	50.000.000	60.000.000	-	11.700.000	94.733.996	-	-	3.366.000	98.099.996	109.799.996	200.004	1.823.637	-	1.823.637	2.023.641
61	SDN 38 BANYUASIN III	60.000.000	60.000.000	-	15.234.000	100.560.000	-	-	4.185.000	104.745.000	119.979.000	21.000	-	-	-	21.000
62	SDN 8 BETUNG	54.000.000	-	-	-	53.985.000	-	-	-	53.985.000	53.985.000	15.000	-	-	-	15.000
63	SDN 9 BETUNG	80.000.000	-	-	56.000	79.944.000	-	-	-	79.944.000	80.000.000	-	-	-	-	-
64	SDN 20 BETUNG	74.000.000	-	-	-	74.000.000	-	-	-	74.000.000	74.000.000	-	-	-	-	-
65	SDN 22 BETUNG	52.000.000	-	-	-	51.986.000	-	-	-	51.986.000	51.986.000	14.000	4.726.011	4.726.011	-	14.000
66	SDN 24 BETUNG	78.000.000	-	-	-	77.973.000	-	-	-	77.973.000	77.973.000	27.000	-	-	-	27.000
67	SDN 5 KARANG AGUNG ILIR	80.000.000	-	-	61.227.000	7.500.000	-	3.500.000	7.773.000	18.773.000	80.000.000	-	1.050.000	-	1.050.000	1.050.000
68	SDN 7 KARANG AGUNG ILIR	62.000.000	-	-	6.691.000	38.200.000	-	1.500.000	5.709.000	45.409.000	52.100.000	9.900.000	3.820.000	-	3.820.000	13.720.000
69	SDN 8 KARANG AGUNG ILIR	74.000.000	-	-	1.000.000	47.500.000	-	-	9.402.000	56.902.000	57.902.000	16.098.000	3.435.000	-	3.435.000	19.533.000
70	SDN 3 MAKARTI JAYA	-	60.000.000	-	9.900.000	33.008.001	-	-	17.043.000	50.051.001	59.951.001	48.999	247.500	-	247.500	296.499
71	SDN 4 MAKARTI JAYA	-	60.000.000	-	28.793.000	22.810.000	-	-	8.397.000	31.207.000	60.000.000	-	-	-	-	-
72	SDN 7 MAKARTI JAYA	52.000.000	60.000.000	-	10.648.800	86.034.200	-	-	3.222.000	89.256.200	99.905.000	12.095.000	-	-	-	12.095.000
73	SDN 8 MAKARTI JAYA	46.000.000	-	-	304.600	45.695.400	-	-	-	45.695.400	46.000.000	-	-	-	-	-
74	SDN 10 MAKARTI JAYA	-	60.000.000	-	9.900.000	42.680.000	-	-	6.729.000	49.409.000	59.309.000	691.000	-	-	-	691.000
75	SDN 11 MAKARTI JAYA	-	60.000.000	-	-	36.840.000	-	-	5.724.000	42.564.000	42.564.000	17.436.000	-	-	-	17.436.000
76	SDN 12 MAKARTI JAYA	-	60.000.000	-	22.674.000	31.800.000	-	-	5.526.000	37.326.000	60.000.000	-	910.600	-	910.600	910.600
77	SDN 13 MAKARTI JAYA	76.000.000	60.000.000	-	5.210.600	101.649.400	-	-	9.135.000	110.784.400	115.995.000	20.005.000	-	-	-	20.005.000
78	SDN 15 MAKARTI JAYA	70.000.000	-	-	4.609.400	65.390.600	-	-	-	65.390.600	70.000.000	-	-	-	-	-
79	SDN 16 MAKARTI JAYA	44.000.000	60.000.000	-	18.095.000	68.722.800	-	-	3.546.000	72.268.800	90.363.800	13.636.200	747.000	-	747.000	14.383.200
80	SDN 17 MAKARTI JAYA	80.000.000	-	-	5.611.400	74.388.600	-	-	-	74.388.600	80.000.000	-	-	-	-	-
81	SDN 18 MAKARTI JAYA	62.000.000	60.000.000	-	25.209.000	90.232.200	-	-	4.851.000	95.083.200	120.292.200	1.707.800	300.000	-	300.000	2.007.800
82	SDN 1 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	10.811.600	28.000.888	-	-	11.640.000	39.640.888	50.452.488	9.547.512	-	-	-	9.547.512
83	SDN 2 MUARA PADANG	64.000.000	-	-	3.950.000	59.991.800	-	-	-	59.991.800	63.941.800	58.200	300.000	300.000	-	58.200
84	SDN 4 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	9.900.000	42.798.000	-	-	7.302.000	50.100.000	60.000.000	-	-	-	-	-
85	SDN 5 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	9.900.000	36.064.809	-	-	8.292.000	44.356.809	54.256.809	5.743.191	2.704.037	2.704.037	-	5.743.191
86	SDN 6 MUARA PADANG	80.000.000	60.000.000	-	15.060.000	115.991.598	-	-	7.434.000	123.425.598	138.485.598	1.514.402	596.000	356.000	240.000	1.754.402
87	SDN 7 MUARA PADANG	70.000.000	60.000.000	-	20.061.600	102.513.400	-	-	7.425.000	109.938.400	130.000.000	-	-	-	-	-
88	SDN 8 MUARA PADANG	56.000.000	60.000.000	-	10.800.000	92.078.098	-	-	-	92.078.098	102.878.098	13.121.902	-	-	-	13.121.902
89	SDN 9 MUARA PADANG	64.000.000	60.000.000	-	17.762.920	99.812.076	-	-	-	99.812.076	117.574.996	6.425.004	-	-	-	6.425.004
90	SDN 11 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	13.900.500	39.766.498	-	-	6.333.000	46.099.498	59.999.998	2	-	-	-	2

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		ALOKASI DANA BOS AFIRMASI	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020
		SALDO BOS AFIRMASI	SALDO BOS AFIRMASI		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL									
							PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA			TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK		
1	2															
91	SDN 13 MUARA PADANG	68.000.000	-	-	4.400.000	63.591.000	-	-	-	63.591.000	67.991.000	9.000	-	-	-	9.000
92	SDN 15 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	17.000.000	38.719.000	-	-	4.281.000	43.000.000	60.000.000	-	3.218.780	3.218.780	-	-
93	SDN 17 MUARA PADANG	78.000.000	60.000.000	-	14.378.000	115.535.000	-	-	7.788.000	123.323.000	137.701.000	299.000	-	-	-	299.000
94	SDN 18 MUARA PADANG	70.000.000	-	-	3.300.000	65.390.600	-	-	-	65.390.600	68.690.600	1.309.400	-	-	-	1.309.400
95	SDN 19 MUARA PADANG	66.000.000	60.000.000	-	18.612.300	98.927.698	-	-	8.460.000	107.387.698	125.999.998	2	-	-	-	2
96	SDN 20 MUARA PADANG	70.000.000	60.000.000	-	19.921.900	104.177.100	-	-	5.901.000	110.078.100	130.000.000	-	202.190	202.190	-	-
97	SDN 21 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	12.100.000	36.833.278	-	-	9.360.000	46.193.278	58.293.278	1.706.722	-	-	-	1.706.722
98	SDN 22 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	14.444.500	38.768.253	-	-	5.787.000	44.555.253	58.999.753	1.000.247	-	-	-	1.000.247
99	SDN 1 MUARA SUGIHAN	72.000.000	60.000.000	-	9.900.000	112.431.000	-	-	8.469.000	120.900.000	130.800.000	1.200.000	-	-	-	1.200.000
100	SDN 2 MUARA SUGIHAN	-	60.000.000	-	9.900.000	39.758.000	-	-	10.215.000	49.973.000	59.873.000	127.000	-	-	-	127.000
101	SDN 3 MUARA SUGIHAN	-	60.000.000	-	9.900.000	36.609.991	-	-	10.170.000	46.779.991	56.679.991	3.320.009	3.328.220	3.328.220	-	3.320.009
102	SDN 4 MUARA SUGIHAN	66.000.000	60.000.000	-	10.820.985	106.808.996	-	-	8.370.000	115.178.996	125.999.981	19	5.998.107	5.998.107	-	19
103	SDN 5 MUARA SUGIHAN	74.000.000	-	-	-	73.975.000	-	-	-	73.975.000	73.975.000	25.000	-	-	-	25.000
104	SDN 6 MUARA SUGIHAN	76.000.000	60.000.000	-	10.769.978	118.132.226	-	-	6.597.000	124.729.226	135.499.204	500.796	-	-	-	500.796
105	SDN 8 MUARA SUGIHAN	58.000.000	60.000.000	-	8.246.000	85.163.000	-	-	4.791.000	89.954.000	98.200.000	19.800.000	-	-	-	19.800.000
106	SDN 9 MUARA SUGIHAN	-	60.000.000	-	9.900.000	35.790.455	-	-	14.026.000	49.816.455	59.716.455	283.545	3.253.661	3.253.661	-	283.545
107	SDN 10 MUARA SUGIHAN	-	60.000.000	-	9.900.000	38.840.459	-	-	10.847.000	49.687.459	59.587.459	412.541	3.552.755	3.552.755	-	412.541
108	SDN 11 MUARA SUGIHAN	76.000.000	-	-	26.000	75.974.000	-	-	-	75.974.000	76.000.000	-	-	-	-	-
109	SDN 12 MUARA SUGIHAN	-	60.000.000	-	9.900.000	31.659.997	-	-	10.062.000	41.721.997	51.621.997	8.378.003	3.777.725	3.777.725	-	8.378.003
110	SDN 13 MUARA SUGIHAN	68.000.000	-	-	-	67.978.000	-	-	-	67.978.000	67.978.000	22.000	-	-	-	22.000
111	SDN 15 MUARA SUGIHAN	80.000.000	60.000.000	-	9.900.000	120.132.000	-	-	7.617.000	127.749.000	137.649.000	2.351.000	-	-	-	2.351.000
112	SDN 16 MUARA SUGIHAN	70.000.000	-	-	-	69.977.000	-	-	-	69.977.000	69.977.000	23.000	-	-	-	23.000
113	SDN 17 MUARA SUGIHAN	-	60.000.000	-	10.849.994	37.659.996	-	-	11.490.000	49.149.996	59.999.990	10	-	-	-	10
114	SDN 18 MUARA SUGIHAN	64.000.000	60.000.000	-	13.689.977	95.670.472	-	-	6.300.000	101.970.472	115.660.449	8.339.551	-	-	-	8.339.551
115	SDN 19 MUARA SUGIHAN	70.000.000	-	-	-	69.977.000	-	-	-	69.977.000	70.000.000	-	-	-	-	-
116	SDN 20 MUARA SUGIHAN	64.000.000	60.000.000	-	10.462.000	107.639.997	-	-	5.898.000	113.537.997	123.999.997	3	-	-	-	3
117	SDN 22 MUARA SUGIHAN	58.000.000	60.000.000	-	10.520.000	102.443.000	-	-	4.377.000	106.820.000	117.340.000	660.000	-	-	-	660.000
118	SDN 23 MUARA SUGIHAN	56.000.000	60.000.000	-	1.635.987	90.513.995	-	-	7.842.000	98.355.995	99.991.982	16.008.018	-	-	-	16.008.018
119	SDN 24 MUARA SUGIHAN	74.000.000	60.000.000	-	9.900.000	111.654.998	-	-	7.752.000	119.406.998	129.306.998	4.693.002	-	-	-	4.693.002
120	SDN 25 MUARA SUGIHAN	68.000.000	60.000.000	-	16.512.000	104.828.000	-	-	6.660.000	111.488.000	128.000.000	-	-	-	-	-
121	SDN 1 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	19.635.000	28.259.998	-	-	11.640.000	39.899.998	59.534.998	465.002	1.214.999	439.090	775.909	1.240.911
122	SDN 2 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	16.484.000	29.349.991	-	-	6.666.000	36.015.991	52.499.991	7.500.009	337.000	-	337.000	7.837.009
123	SDN 3 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	11.132.000	36.430.000	-	-	12.438.000	48.868.000	60.000.000	-	1.704.550	1.704.550	-	-
124	SDN 4 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	9.926.000	41.530.000	-	-	8.544.000	50.074.000	60.000.000	-	1.950.000	-	1.950.000	1.950.000
125	SDN 5 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	9.900.000	31.974.000	-	-	18.126.000	50.100.000	60.000.000	-	1.777.490	-	1.777.490	1.777.490
126	SDN 8 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	18.569.000	26.980.000	-	-	14.451.000	41.431.000	60.000.000	-	1.263.000	-	1.263.000	1.263.000
127	SDN 10 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	12.522.000	16.699.994	-	-	24.896.800	41.596.794	54.118.794	5.881.206	-	-	-	5.881.206
128	SDN 12 MUARA TELANG	54.000.000	-	-	-	53.433.000	-	-	-	53.433.000	53.433.000	567.000	-	-	-	567.000
129	SDN 13 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	13.307.000	30.250.000	-	-	16.443.000	46.693.000	60.000.000	-	1.678.000	-	1.678.000	1.678.000
130	SDN 14 MUARA TELANG	52.000.000	60.000.000	-	24.217.000	79.037.794	-	-	5.367.000	84.404.794	108.621.794	3.378.206	1.681.700	-	1.681.700	5.059.906
131	SDN 16 MUARA TELANG	76.000.000	60.000.000	-	22.666.000	106.371.000	-	-	6.963.000	113.334.000	136.000.000	-	-	-	-	-
132	SDN 17 MUARA TELANG	46.000.000	60.000.000	-	22.974.000	76.946.000	-	-	4.215.000	81.161.000	104.135.000	1.865.000	-	-	-	1.865.000
133	SDN 19 MUARA TELANG	78.000.000	60.000.000	-	28.146.000	101.579.744	-	-	8.274.000	109.853.744	137.999.744	256	10.387.702	9.152.702	1.235.000	1.235.256
134	SDN 20 MUARA TELANG	52.000.000	60.000.000	-	17.850.000	88.552.000	-	-	5.580.000	94.132.000	111.982.000	18.000	-	-	-	18.000
135	SDN 21 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	13.460.000	31.441.750	-	-	8.820.000	40.261.750	53.721.750	6.278.250	511.750	-	511.750	6.790.000
136	SDN 2 PULAU RIMAU	68.000.000	-	-	408.000	57.983.000	-	-	-	57.983.000	58.391.000	9.609.000	-	-	-	9.609.000

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		ALOKASI DANA BOS AFIRMASI	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		SALDO BOS AFIRMASI			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL						TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK
							PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2																
137	SDN 3 PULAU RIMAU	68.000.000	60.000.000	-	9.900.000	91.955.991	-	-	8.928.000	100.883.991	110.783.991	17.216.009	-	-	-	17.216.009	
138	SDN 4 PULAU RIMAU	42.000.000	60.000.000	-	9.918.000	73.039.000	-	-	3.783.000	76.822.000	86.740.000	15.260.000	-	-	-	15.260.000	
139	SDN 5 PULAU RIMAU	-	60.000.000	-	9.900.000	19.700.000	-	-	10.761.000	30.461.000	40.361.000	19.639.000	-	-	-	19.639.000	
140	SDN 6 PULAU RIMAU	-	60.000.000	-	9.900.000	18.699.996	-	-	11.607.000	30.306.996	40.206.996	19.793.004	-	-	-	19.793.004	
141	SDN 7 PULAU RIMAU	52.000.000	60.000.000	-	20.009.000	89.672.000	-	-	2.319.000	91.991.000	112.000.000	-	-	-	-	-	
142	SDN 8 PULAU RIMAU	-	60.000.000	-	9.900.000	21.699.996	-	-	8.874.000	30.573.996	40.473.996	19.526.004	1.972.725	1.972.725	-	19.526.004	
143	SDN 9 PULAU RIMAU	70.000.000	60.000.000	-	23.829.000	99.370.000	-	-	6.777.000	106.147.000	129.976.000	24.000	1.310.000	-	1.310.000	1.334.000	
144	SDN 10 PULAU RIMAU	58.000.000	-	-	-	57.982.982	-	-	-	57.982.982	57.982.982	17.018	-	-	-	17.018	
145	SDN 11 PULAU RIMAU	-	60.000.000	-	10.500.000	26.700.000	-	-	2.790.000	29.490.000	39.990.000	20.010.000	-	-	-	20.010.000	
146	SDN 13 PULAU RIMAU	76.000.000	60.000.000	-	9.900.000	98.647.994	-	-	7.890.000	106.537.994	116.437.994	19.562.006	-	-	-	19.562.006	
147	SDN 14 PULAU RIMAU	62.000.000	-	-	38.000	61.961.980	-	-	-	61.961.980	61.999.980	20	-	-	-	20	
148	SDN 16 PULAU RIMAU	56.000.000	-	-	16.000	55.984.000	-	-	-	55.984.000	56.000.000	-	-	-	-	-	
149	SDN 17 PULAU RIMAU	48.000.000	60.000.000	-	17.400.000	75.676.000	-	-	3.024.000	78.700.000	96.100.000	11.900.000	681.818	-	681.818	12.581.818	
150	SDN 18 PULAU RIMAU	-	60.000.000	-	15.859.800	28.369.197	-	-	15.771.000	44.140.197	59.999.997	3	1.336.362	1.336.362	-	3	
151	SDN 19 PULAU RIMAU	48.000.000	60.000.000	-	27.105.000	74.975.991	-	-	5.919.000	80.894.991	107.999.991	9	8.194.106	6.816.006	1.378.100	1.378.109	
152	SDN 5 RAMBUTAN	72.000.000	-	-	-	71.976.000	-	-	-	71.976.000	71.976.000	24.000	6.543.291	6.543.291	-	24.000	
153	SDN 9 RAMBUTAN	-	60.000.000	-	10.325.500	45.550.500	-	-	4.047.000	49.597.500	59.923.000	77.000	-	-	-	77.000	
154	SDN 13 RAMBUTAN	54.000.000	-	-	15.000	53.985.000	-	-	-	53.985.000	54.000.000	-	-	-	-	-	
155	SDN 14 RAMBUTAN	-	60.000.000	-	9.900.000	43.187.000	-	-	6.913.000	50.100.000	60.000.000	-	1.028.700	1.028.700	-	-	
156	SDN 17 RAMBUTAN	-	60.000.000	-	9.900.000	41.352.000	-	-	8.748.000	50.100.000	60.000.000	-	-	-	-	-	
157	SDN 18 RAMBUTAN	72.000.000	-	-	-	71.976.000	-	-	-	71.976.000	71.976.000	24.000	6.543.271	6.543.271	-	24.000	
158	SDN 19 RAMBUTAN	-	60.000.000	-	-	38.900.000	-	-	6.120.000	45.020.000	45.020.000	14.980.000	-	-	-	14.980.000	
159	SDN 20 RAMBUTAN	-	60.000.000	-	-	39.600.000	-	-	6.450.000	46.050.000	46.050.000	13.950.000	-	-	-	13.950.000	
160	SDN 22 RAMBUTAN	-	60.000.000	-	9.900.000	30.000.000	-	-	6.333.000	36.333.000	46.233.000	13.767.000	454.545	-	454.545	14.221.545	
161	SDN 24 RAMBUTAN	40.000.000	60.000.000	-	28.800.000	67.992.000	-	-	2.769.000	70.761.000	99.561.000	439.000	1.709.090	1.254.545	454.545	893.545	
162	SDN 2 RANTAU BAYUR	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	3.635.643	3.635.643	-	-	
163	SDN 3 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	9.900.000	34.499.994	-	-	11.016.000	45.515.994	55.415.994	4.584.006	1.409.090	-	1.409.090	5.993.096	
164	SDN 4 RANTAU BAYUR	56.000.000	-	-	-	55.984.000	-	-	-	55.984.000	55.984.000	16.000	5.089.467	5.089.467	-	16.000	
165	SDN 5 RANTAU BAYUR	50.000.000	60.000.000	-	3.176.000	77.619.994	-	-	12.690.000	90.309.994	93.485.994	16.514.006	995.400	-	995.400	17.509.406	
166	SDN 6 RANTAU BAYUR	66.000.000	60.000.000	-	12.328.000	104.149.000	-	-	5.481.000	109.630.000	121.958.000	4.042.000	-	-	-	4.042.000	
167	SDN 9 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	6.114.000	40.899.996	-	-	8.286.000	49.185.996	55.299.996	4.700.004	3.262.725	1.972.725	1.290.000	5.990.004	
168	SDN 11 RANTAU BAYUR	56.000.000	60.000.000	-	21.771.000	83.783.993	-	-	5.229.000	89.012.993	110.783.993	5.216.007	720.000	-	720.000	5.936.007	
169	SDN 12 RANTAU BAYUR	68.000.000	60.000.000	-	20.834.000	99.678.000	-	-	7.488.000	107.166.000	128.000.000	-	-	-	-	-	
170	SDN 13 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	16.200.000	35.229.996	-	-	8.370.000	43.599.996	59.799.996	200.004	4.775.725	2.872.725	1.903.000	2.103.004	
171	SDN 14 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	10.404.000	46.800.000	-	-	2.796.000	49.596.000	60.000.000	-	1.363.635	-	1.363.635	1.363.635	
172	SDN 15 RANTAU BAYUR	48.000.000	60.000.000	-	20.989.000	74.751.714	-	-	5.580.000	80.331.714	101.320.714	6.679.286	951.500	-	951.500	7.630.786	
173	SDN 16 RANTAU BAYUR	48.000.000	-	-	-	47.988.000	-	-	-	47.988.000	47.988.000	12.000	-	-	-	12.000	
174	SDN 18 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	20.000.000	34.912.000	-	-	4.489.100	39.401.100	59.401.100	598.900	3.718.900	-	3.718.900	4.317.800	
175	SDN 19 RANTAU BAYUR	50.000.000	60.000.000	-	13.500.000	83.473.986	-	4.000.000	3.120.000	90.593.986	104.093.986	5.906.014	690.909	-	690.909	6.596.923	
176	SDN 20 RANTAU BAYUR	62.000.000	60.000.000	-	22.535.000	92.481.000	-	-	5.697.000	98.178.000	120.713.000	1.287.000	450.000	-	450.000	1.737.000	
177	SDN 21 RANTAU BAYUR	62.000.000	-	-	1.900	61.998.100	-	-	-	61.998.100	62.000.000	-	-	-	-	-	
178	SDN 23 RANTAU BAYUR	56.000.000	60.000.000	-	25.182.000	85.683.993	-	-	5.118.000	90.801.993	115.983.993	16.007	540.000	540.000	-	16.007	
179	SDN 24 RANTAU BAYUR	36.000.000	-	-	6.000	35.994.000	-	-	-	35.994.000	36.000.000	-	-	-	-	-	
180	SDN 25 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	2.758.000	41.033.000	-	-	2.934.000	43.967.000	46.725.000	13.275.000	1.400.000	-	1.400.000	14.675.000	
181	SDN 26 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	20.341.000	31.407.271	-	-	3.069.000	34.476.271	54.817.271	5.182.729	-	-	-	5.182.729	
182	SDN 27 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	22.825.000	22.280.000	-	-	4.995.000	27.275.000	50.100.000	9.900.000	1.976.998	1.976.998	-	9.900.000	

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		ALOKASI DANA BOS AFIRMASI	REALISASI BELANJA					JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		SALDO BOS AFIRMASI	BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			TOTAL BELANJA MODAL			TOTAL PENERIMAAN PAJAK	TOTAL PENGELUARAN PAJAK			
						PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN								ASET TETAP LAINNYA
1	2															
183	SDN 28 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	4.400.000	31.000.000	-	-	3.225.000	34.225.000	38.625.000	21.375.000	458.000	458.000	-	21.375.000
184	SDN 29 RANTAU BAYUR	46.000.000	60.000.000	-	21.547.000	74.388.979	-	-	4.053.000	78.441.979	99.988.979	6.011.021	7.489.903	6.489.903	1.000.000	7.011.021
185	SDN 30 RANTAU BAYUR	54.000.000	-	-	-	49.077.261	-	-	-	49.077.261	49.077.261	4.922.739	-	-	-	4.922.739
186	SDN 31 RANTAU BAYUR	48.000.000	-	-	-	47.975.987	-	-	-	47.975.987	47.975.987	24.013	-	-	-	24.013
187	SDN 32 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	15.128.000	31.000.000	-	-	13.538.000	44.538.000	59.666.000	334.000	3.284.400	-	3.284.400	3.618.400
188	SDN 33 RANTAU BAYUR	70.000.000	-	-	46.000	69.954.000	-	-	-	69.954.000	70.000.000	-	6.359.470	6.359.470	-	-
189	SDN 34 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	17.900.000	37.599.994	-	-	4.398.000	41.997.994	59.897.994	102.006	3.556.997	2.629.997	927.000	1.029.006
190	SDN 35 RANTAU BAYUR	48.000.000	60.000.000	-	22.911.000	77.699.988	-	-	7.389.000	85.088.988	107.999.988	12	2.000.000	2.000.000	-	12
191	SDN 37 RANTAU BAYUR	74.000.000	-	-	-	73.975.000	-	-	-	73.975.000	73.975.000	25.000	-	-	-	25.000
192	SDN 1 SELAT PENUGUAN	38.000.000	-	-	-	37.986.000	-	-	-	37.986.000	37.986.000	14.000	-	-	-	14.000
193	SDN 2 SELAT PENUGUAN	56.000.000	-	-	16.000	55.984.000	-	-	-	55.984.000	56.000.000	-	4.907.739	4.907.739	-	-
194	SDN 6 SELAT PENUGUAN	78.000.000	-	-	32.000	77.931.890	-	-	-	77.931.890	77.963.890	36.110	7.084.717	7.084.717	-	36.110
195	SDN 10 SELAT PENUGUAN	46.000.000	-	-	11.000	45.989.000	-	-	-	45.989.000	46.000.000	-	-	-	-	-
196	SDN 12 SELAT PENUGUAN	64.000.000	-	-	-	63.980.000	-	-	-	63.980.000	63.980.000	20.000	-	-	-	20.000
197	SDN 14 SELAT PENUGUAN	76.000.000	-	-	26.000	75.973.973	-	-	-	75.973.973	75.999.973	27	-	-	-	27
198	SDN 9 SEMBAWA	74.000.000	-	-	-	73.956.000	-	-	-	73.956.000	73.956.000	44.000	-	-	-	44.000
199	SDN 16 SEMBAWA	-	60.000.000	-	22.717.350	30.089.996	-	-	6.315.000	36.404.996	59.122.346	877.654	-	-	-	877.654
200	SDN 19 SEMBAWA	54.000.000	-	-	-	53.999.770	-	-	-	53.999.770	53.999.770	230	-	-	-	230
201	SDN 24 SEMBAWA	30.000.000	60.000.000	-	27.198.000	61.500.000	-	-	1.302.000	62.802.000	90.000.000	-	440.000	-	440.000	440.000
202	SDN 25 SEMBAWA	26.000.000	60.000.000	-	36.611.000	47.998.000	-	-	1.389.000	49.387.000	85.998.000	2.000	515.000	-	515.000	517.000
203	SDN 2 SUAK TAPEH	46.000.000	60.000.000	-	22.442.000	75.838.000	-	-	-	75.838.000	98.280.000	7.720.000	1.052.000	-	1.052.000	8.772.000
204	SDN 4 SUAK TAPEH	68.000.000	-	-	44.000	67.956.000	-	-	-	67.956.000	68.000.000	-	-	-	-	-
205	SDN 5 SUAK TAPEH	-	60.000.000	-	26.953.000	18.483.800	-	-	10.335.000	28.818.800	55.771.800	4.228.200	728.200	-	728.200	4.956.400
206	SDN 7 SUAK TAPEH	54.000.000	-	-	30.000	53.970.000	-	-	-	53.970.000	54.000.000	-	-	-	-	-
207	SDN 9 SUAK TAPEH	42.000.000	-	-	18.000	41.982.000	-	-	-	41.982.000	42.000.000	-	-	-	-	-
208	SDN 10 SUAK TAPEH	58.000.000	-	-	17.000	57.983.000	-	-	-	57.983.000	58.000.000	-	-	-	-	-
209	SDN 11 SUAK TAPEH	54.000.000	-	-	-	53.969.984	-	-	-	53.969.984	53.969.984	30.016	-	-	-	30.016
210	SDN 13 SUAK TAPEH	66.000.000	-	-	42.000	65.958.000	-	-	-	65.958.000	66.000.000	-	-	-	-	-
211	SDN 1 SUMBER MARGA TELANG	-	60.000.000	-	22.000.000	5.000.000	-	-	8.562.000	13.562.000	35.562.000	24.438.000	-	-	-	24.438.000
212	SDN 2 SUMBER MARGA TELANG	78.000.000	60.000.000	-	17.362.000	106.672.996	-	-	7.767.000	114.439.996	131.801.996	6.198.004	4.316.225	900.000	3.416.225	9.614.229
213	SDN 4 SUMBER MARGA TELANG	-	60.000.000	-	28.006.999	18.599.997	-	-	7.293.000	25.892.997	53.899.996	6.100.004	-	-	-	6.100.004
214	SDN 5 SUMBER MARGA TELANG	-	60.000.000	-	14.655.000	28.600.000	-	-	6.816.000	35.416.000	50.071.000	9.929.000	449.500	-	449.500	10.378.500
215	SDN 7 SUMBER MARGA TELANG	46.000.000	60.000.000	-	15.253.110	86.272.090	-	-	4.407.000	90.679.090	105.932.200	67.800	-	-	-	67.800
216	SDN 8 SUMBER MARGA TELANG	72.000.000	60.000.000	-	14.709.000	84.690.200	-	-	-	84.690.200	99.399.200	32.600.800	1.750.000	-	1.750.000	34.350.800
217	SDN 9 SUMBER MARGA TELANG	-	60.000.000	-	6.256.500	30.900.000	-	-	-	30.900.000	37.156.500	22.843.500	449.500	-	449.500	23.293.000
218	SDN 11 SUMBER MARGA TELANG	66.000.000	-	-	-	65.999.560	-	-	-	65.999.560	65.999.560	440	-	-	-	440
219	SDN 12 SUMBER MARGA TELANG	78.000.000	60.000.000	-	23.123.000	103.372.996	-	-	6.477.000	109.849.996	132.972.996	5.027.004	-	-	-	5.027.004
220	SDN 9 TALANG KELAPA	74.000.000	-	-	50.000	73.950.000	-	-	-	73.950.000	74.000.000	-	-	-	-	-
221	SDN 2 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	9.900.000	39.670.000	-	-	8.493.000	48.163.000	58.063.000	1.937.000	-	-	-	1.937.000
222	SDN 6 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	9.450.000	28.445.450	-	-	-	28.445.450	37.895.450	22.104.550	2.679.544	2.354.544	325.000	22.429.550
223	SDN 8 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	15.000.000	29.000.000	-	-	16.000.000	45.000.000	60.000.000	-	1.620.000	1.620.000	-	-
224	SDN 9 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	20.346.000	34.200.000	-	-	5.454.000	39.654.000	60.000.000	-	1.794.600	1.794.600	-	-
225	SDN 11 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	-	43.600.000	-	-	16.400.000	60.000.000	60.000.000	-	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000
226	SDN 14 TANJUNG LAGO	62.000.000	60.000.000	-	20.118.000	91.700.000	-	-	10.182.000	101.882.000	122.000.000	-	-	-	-	-
227	SDN 15 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	9.968.000	43.900.000	-	-	6.132.000	50.032.000	60.000.000	-	1.990.000	-	1.990.000	1.990.000
228	SDN 16 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	9.900.000	23.999.991	-	-	9.585.000	33.584.991	43.484.991	16.515.009	-	-	-	16.515.009

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		ALOKASI DANA BOS AFIRMASI	REALISASI BELANJA					JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020		
		SALDO BOS AFIRMASI	SALDO BOS AFIRMASI		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK	
							PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN								ASET TETAP LAINNYA
1	2																
229	SDN 17 TANJUNG LAGO	50.000.000	-	-	-	45.442.717	-	-	-	45.442.717	45.442.717	4.557.283	-	-	-	4.557.283	
230	SDN 18 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	19.710.000	37.500.000	-	-	2.790.000	40.290.000	60.000.000	-	1.262.000	-	1.262.000	1.262.000	
231	SDN 19 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	9.900.000	36.200.000	-	-	13.900.000	50.100.000	60.000.000	-	1.820.000	-	1.820.000	1.820.000	
232	SDN 23 TANJUNG LAGO	44.000.000	-	-	-	43.988.010	-	-	-	43.988.010	43.988.010	11.990	-	-	-	11.990	
233	SDN 24 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	13.400.000	37.717.000	-	-	8.883.000	46.600.000	60.000.000	-	3.949.999	3.949.999	-	-	
234	SDN 1 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	
235	SDN 2 TUNGKAL ILIR	60.000.000	-	-	36.000	59.964.000	-	-	-	59.964.000	60.000.000	-	-	-	-	-	
236	SDN 3 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	9.900.000	17.999.996	-	-	-	17.999.996	27.899.996	32.100.004	-	-	-	32.100.004	
237	SDN 4 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	9.900.000	38.164.000	-	-	7.437.000	45.601.000	55.501.000	4.499.000	-	-	-	4.499.000	
238	SDN 5 TUNGKAL ILIR	68.000.000	-	-	44.000	67.956.000	-	-	-	67.956.000	68.000.000	-	-	-	-	-	
239	SDN 7 TUNGKAL ILIR	52.000.000	-	-	28.000	51.972.000	-	-	-	51.972.000	52.000.000	-	-	-	-	-	
240	SDN 8 TUNGKAL ILIR	66.000.000	-	-	42.000	65.958.000	-	-	-	65.958.000	66.000.000	-	-	-	-	-	
241	SDN 9 TUNGKAL ILIR	72.000.000	-	-	48.000	71.952.000	-	-	-	71.952.000	72.000.000	-	-	-	-	-	
242	SDN 11 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	19.900.000	34.493.000	-	-	5.574.000	40.067.000	59.967.000	33.000	-	-	-	33.000	
243	SDN 12 TUNGKAL ILIR	42.000.000	60.000.000	-	9.918.000	67.382.000	-	-	4.734.000	72.116.000	82.034.000	19.966.000	-	-	-	19.966.000	
244	SDN 13 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	19.900.000	20.594.235	-	-	-	20.594.235	40.494.235	19.505.765	-	-	-	19.505.765	
245	SDN 14 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	9.900.000	23.999.991	-	-	-	23.999.991	33.899.991	26.100.009	-	-	-	26.100.009	
246	SDN 15 TUNGKAL ILIR	76.000.000	60.000.000	-	19.900.000	94.999.994	-	-	11.298.000	106.297.994	126.197.994	9.802.006	-	-	-	9.802.006	
247	SDN 17 TUNGKAL ILIR	44.000.000	-	-	-	44.000.000	-	-	-	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	-	
248	SDN 18 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	9.900.000	32.000.000	-	-	7.005.000	39.005.000	48.905.000	11.095.000	-	-	-	11.095.000	
249	SDN 19 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	9.900.000	24.000.000	-	-	6.120.000	30.120.000	40.020.000	19.980.000	-	-	-	19.980.000	
250	SDN 20 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	
251	SDN 21 TUNGKAL ILIR	58.000.000	60.000.000	-	9.900.000	90.824.398	-	-	6.117.000	96.941.398	106.841.398	11.158.602	-	-	-	11.158.602	
252	SDN 22 TUNGKAL ILIR	-	60.000.000	-	9.900.000	23.999.991	-	-	-	23.999.991	33.899.991	26.100.009	-	-	-	26.100.009	
253	SDN 23 TUNGKAL ILIR	76.000.000	60.000.000	-	9.952.000	119.910.000	-	-	6.138.000	126.048.000	136.000.000	-	-	-	-	-	
254	SDN 24 TUNGKAL ILIR	68.000.000	60.000.000	-	44.000	67.956.000	-	-	-	67.956.000	68.000.000	60.000.000	-	-	-	60.000.000	
JUMLAH SDN		9.780.000.000	9.780.000.000	-	2.454.089.200	14.616.577.519	-	12.000.000	1.210.572.900	15.839.150.419	18.293.239.619	1.266.760.381	218.668.151	140.326.836	78.341.315	1.345.101.696	
1	SMPN 1 AIR KUMBANG	-	60.000.000	-	20.950.000	36.550.000	-	-	2.500.000	39.050.000	60.000.000	-	2.559.000	-	2.559.000	2.559.000	
2	SMPN 2 AIR KUMBANG	-	60.000.000	-	31.700.000	28.300.000	-	-	-	28.300.000	60.000.000	-	632.500	-	632.500	632.500	
3	SMPN 3 AIR KUMBANG	104.000.000	60.000.000	-	30.693.000	128.285.000	-	-	-	128.285.000	158.978.000	5.022.000	545.000	-	545.000	5.567.000	
4	SMPN 4 AIR KUMBANG	80.000.000	60.000.000	-	24.174.000	110.664.000	-	-	-	110.664.000	134.838.000	5.162.000	2.028.200	2.028.200	-	5.162.000	
5	SMPN 4 BANYUASIN I	-	60.000.000	-	10.860.000	49.140.000	-	-	-	49.140.000	60.000.000	-	2.690.000	-	2.690.000	2.690.000	
6	SMPN 5 BANYUASIN I	118.000.000	-	-	-	118.000.000	-	-	-	118.000.000	118.000.000	-	-	-	-	-	
7	SMPN 2 BANYUASIN II	86.000.000	60.000.000	-	21.243.000	113.889.000	-	-	-	113.889.000	135.132.000	10.868.000	4.364.300	-	4.364.300	15.232.300	
8	SMPN 3 BANYUASIN III	36.000.000	60.000.000	-	18.123.000	77.125.000	-	-	-	77.125.000	95.248.000	752.000	2.410.000	-	2.410.000	3.162.000	
9	SMPN 5 BANYUASIN III	186.000.000	-	-	-	184.380.000	-	-	-	184.380.000	184.380.000	1.620.000	-	-	-	1.620.000	
10	SMPN 2 BETUNG	196.000.000	60.000.000	-	26.000.000	229.799.828	-	-	229.799.828	255.799.828	255.799.828	200.172	17.908.961	15.636.348	2.272.613	2.472.785	
11	SMPN 3 BETUNG	142.000.000	60.000.000	-	23.330.000	149.470.000	-	-	-	149.470.000	172.800.000	29.200.000	1.500.000	-	1.500.000	30.700.000	
12	SMPN 2 MAKARTI JAYA	148.000.000	-	-	12.270.000	135.575.000	-	-	-	135.575.000	147.845.000	155.000	-	-	-	155.000	
13	SMPN 3 MAKARTI JAYA	-	60.000.000	-	31.382.000	25.877.000	-	-	-	25.877.000	57.259.000	2.741.000	2.741.000	-	2.741.000	5.482.000	
14	SMPN 4 MAKARTI JAYA	94.000.000	-	-	7.014.000	86.985.800	-	-	-	86.985.800	93.999.800	200	-	-	-	200	
15	SMPN 1 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	46.500.000	13.500.000	-	-	-	13.500.000	60.000.000	-	2.454.900	-	2.454.900	2.454.900	
16	SMPN 2 MUARA PADANG	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	4.555.000	4.555.000	-	-	
17	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	5.186.361	-	5.186.361	5.186.361	
18	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	200.000.000	60.000.000	-	1.760.000	258.240.000	-	-	-	258.240.000	260.000.000	-	5.119.000	-	5.119.000	5.119.000	

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL		ALOKASI DANA BOS AFIRMASI	REALISASI BELANJA					JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		SALDO BOS AFIRMASI			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					TOTAL PENERIMAAN PAJAK	TOTAL PENGELUARAN PAJAK			
							PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN							ASET TETAP LAINNYA
1	2															
19	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	184.000.000	-	-	800.000	183.200.000	-	-	-	183.200.000	184.000.000	-	-	-	-	
20	SMPN 5 MUARA SUGIHAN	50.000.000	-	-	260.000	49.740.000	-	-	-	49.740.000	50.000.000	-	-	-	-	
21	SMPN 1 MUARA TELANG	-	60.000.000	-	57.530.000	2.050.000	-	-	-	2.050.000	59.580.000	420.000	2.543.800	-	2.543.800	
22	SMPN 2 MUARA TELANG	156.000.000	60.000.000	-	32.820.000	182.680.000	-	-	-	182.680.000	215.500.000	500.000	17.452.700	13.880.000	3.572.700	
23	SMPN 3 MUARA TELANG	86.000.000	60.000.000	-	27.620.000	111.650.000	-	-	-	111.650.000	139.270.000	6.730.000	2.790.000	-	2.790.000	
24	SMPN 1 PULAU RIMAU	-	60.000.000	-	9.900.000	44.100.000	-	-	-	44.100.000	54.000.000	6.000.000	360.000	-	360.000	
25	SMPN 2 PULAU RIMAU	-	60.000.000	-	7.000.000	35.077.000	-	-	-	35.077.000	42.077.000	17.923.000	-	-	-	
26	SMPN 4 RAMBUTAN	-	60.000.000	-	20.046.000	39.875.000	-	-	-	39.875.000	59.921.000	79.000	3.625.000	3.625.000	-	
27	SMPN 2 RANTAU BAYUR	72.000.000	60.000.000	-	20.457.000	101.520.000	-	-	-	101.520.000	121.977.000	10.023.000	3.816.700	-	3.816.700	
28	SMPN 4 RANTAU BAYUR	134.000.000	60.000.000	-	1.000.000	174.900.000	-	17.690.000	-	192.590.000	193.590.000	410.000	2.800.000	-	2.800.000	
29	SMPN 5 RANTAU BAYUR	106.000.000	-	-	40.000	105.960.000	-	-	-	105.960.000	106.000.000	-	-	-	-	
30	SMPN 6 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	38.300.000	21.700.000	-	-	-	21.700.000	60.000.000	-	3.268.318	1.306.818	1.961.500	
31	SMPN 7 RANTAU BAYUR	-	60.000.000	-	11.400.000	47.500.000	-	-	1.100.000	48.600.000	60.000.000	-	-	-	-	
32	SMPN 3 SEMBAWA	78.000.000	-	-	540.000	77.460.000	-	-	-	77.460.000	78.000.000	-	-	-	-	
33	SMPN 2 SUAK TAPEH	78.000.000	60.000.000	-	55.884.000	78.000.000	-	-	-	78.000.000	133.884.000	4.116.000	4.057.700	-	4.057.700	
34	SMPN 1 SUMBER MARGA TELANG	130.000.000	60.000.000	-	36.123.000	143.750.000	-	-	-	143.750.000	179.873.000	10.127.000	-	-	-	
35	SMPN 3 SUMBER MARGA TELANG	144.000.000	60.000.000	-	40.000.000	164.000.000	-	-	-	164.000.000	204.000.000	-	-	-	-	
36	SMPN 2 TALANG KELAPA	186.000.000	-	-	-	185.919.000	-	-	-	185.919.000	185.919.000	81.000	-	-	-	
37	SMPN 2 TANJUNG LAGO	-	60.000.000	-	10.423.000	18.500.000	-	4.000.000	-	22.500.000	32.923.000	27.077.000	1.850.000	-	1.850.000	
38	SMPN 3 TANJUNG LAGO	130.000.000	-	-	1.060.000	128.940.000	-	-	-	128.940.000	130.000.000	-	31.358.181	31.358.181	-	
39	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	168.000.000	60.000.000	-	54.228.000	173.560.000	-	-	-	173.560.000	227.788.000	212.000	500.000	-	500.000	
40	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	198.000.000	60.000.000	-	16.550.000	241.450.000	-	-	-	241.450.000	258.000.000	-	-	-	-	
41	SMPN 3 TUNGKAL ILIR	142.000.000	-	-	1.360.000	140.640.000	-	-	-	140.640.000	142.000.000	-	-	-	-	
JUMLAH SMPN		3.432.000.000	1.800.000.000	-	749.340.000	4.317.951.628	-	21.690.000	3.600.000	4.343.241.628	5.092.581.628	139.418.372	129.116.621	72.389.547	56.727.074	
JUMLAH TOTAL		13.212.000.000	11.580.000.000	-	3.203.429.200	18.934.529.147	-	33.690.000	1.214.172.900	20.182.392.047	23.385.821.247	1.406.178.753	347.784.772	212.716.383	135.068.389	

**REALISASI BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020  
PER 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2020**

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL			ALOKASI DANA BOS KINERJA	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		TOTAL SALDO AWAL	SALDO PAJAK	SALDO BOS KINERJA		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL						TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK
								PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2																	
1	SDN 9 AIR KUMBANG	-	-	-	60.000.000	-	24.500.000	30.160.000	-	-	5.340.000	35.500.000	60.000.000	-	1.442.091	327.191	1.114.900	1.114.900
2	SDN 10 AIR KUMBANG	-	-	-	60.000.000	-	10.000.000	42.620.000	-	-	6.510.000	49.130.000	59.130.000	870.000	495.000	-	495.000	1.365.000
3	SDN 18 AIR KUMBANG	-	-	-	60.000.000	-	12.867.000	38.240.000	-	-	8.673.000	46.913.000	59.780.000	220.000	-	-	-	220.000
4	SDN 18 BANYUASIN III	-	-	-	60.000.000	-	3.042.000	51.999.990	-	-	2.958.000	54.957.990	57.999.990	2.000.010	3.363.633	3.363.633	-	2.000.010
5	SDN 26 BANYUASIN III	63.000.000	-	63.000.000	-	-	-	63.000.000	-	-	-	63.000.000	63.000.000	-	-	-	-	-
6	SDN 31 BANYUASIN III	-	-	-	60.000.000	-	24.900.000	29.699.996	-	-	4.470.000	34.169.996	59.099.996	930.004	-	-	-	930.004
7	SDN 23 BETUNG	-	-	-	60.000.000	-	15.418.000	31.580.000	-	-	3.399.000	34.979.000	50.397.000	9.603.000	-	-	-	9.603.000
8	SDN 2 MAKARTI JAYA	-	-	-	60.000.000	-	22.261.000	24.180.000	-	-	9.759.000	33.939.000	56.200.000	3.800.000	101.000	-	101.000	3.901.000
9	SDN 8 MAKARTI JAYA	-	-	-	60.000.000	-	20.990.000	34.759.998	-	-	4.089.000	38.848.998	59.838.998	161.002	-	-	-	161.002
10	SDN 15 MAKARTI JAYA	-	-	-	60.000.000	-	13.120.500	36.769.500	-	-	10.110.000	46.879.500	60.000.000	-	-	-	-	-
11	SDN 19 MAKARTI JAYA	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	26.940.000	-	-	5.859.000	32.799.000	42.699.000	17.301.000	-	-	-	17.301.000
12	SDN 2 MUARA PADANG	-	-	-	60.000.000	-	14.200.000	38.351.038	-	-	7.446.000	45.797.038	59.997.038	2.962	900.000	900.000	-	2.962
13	SDN 3 MUARA PADANG	-	-	-	60.000.000	-	15.791.000	36.308.928	-	-	7.899.000	44.207.928	59.998.928	1.072	-	-	-	1.072
14	SDN 10 MUARA PADANG	-	-	-	60.000.000	-	17.095.000	35.426.000	-	-	7.479.000	42.905.000	60.000.000	-	-	-	-	-
15	SDN 11 MUARA PADANG	67.000.000	-	67.000.000	-	-	5.555.000	61.195.200	-	-	-	61.195.200	66.750.200	249.800	-	-	-	249.800
16	SDN 13 MUARA PADANG	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	37.573.259	-	-	7.995.000	45.568.259	55.468.259	4.531.741	-	-	-	4.531.741
17	SDN 14 MUARA PADANG	-	-	-	60.000.000	-	12.878.500	37.437.000	-	-	8.799.000	46.236.000	59.114.500	885.500	-	-	-	885.500
18	SDN 16 MUARA PADANG	99.000.000	-	99.000.000	60.000.000	-	19.766.980	128.736.813	-	-	7.485.000	136.221.813	155.988.793	3.011.207	387.000	-	387.000	3.398.207
19	SDN 18 MUARA PADANG	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	31.234.998	-	-	-	31.234.998	41.134.998	18.865.002	-	-	-	18.865.002
20	SDN 21 MUARA PADANG	113.000.000	-	113.000.000	-	-	8.959.000	104.041.000	-	-	-	104.041.000	113.000.000	-	-	-	-	-
21	SDN 7 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	9.913.636	32.652.940	-	-	10.098.000	42.750.940	52.664.576	7.335.424	-	-	-	7.335.424
22	SDN 13 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	10.679.987	37.304.997	-	-	-	37.304.997	47.984.984	12.015.016	-	-	-	12.015.016
23	SDN 14 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	11.420.000	39.295.000	-	-	8.838.000	48.133.000	59.553.000	447.000	-	-	-	447.000
24	SDN 16 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	10.279.994	37.595.224	-	-	6.744.000	44.339.224	54.619.218	5.380.782	-	-	-	5.380.782
25	SDN 19 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	9.929.998	35.725.236	-	-	8.004.000	43.729.236	53.659.234	6.340.766	-	-	-	6.340.766
26	SDN 21 MUARA SUGIHAN	57.000.000	-	57.000.000	60.000.000	-	9.925.000	103.330.000	-	-	3.744.000	107.074.000	117.000.000	-	-	-	-	-
27	SDN 6 MUARA TELANG	-	-	-	60.000.000	-	29.900.000	19.360.000	-	-	10.740.000	30.100.000	60.000.000	-	1.049.545	-	1.049.545	1.049.545
28	SDN 7 MUARA TELANG	-	-	-	60.000.000	-	26.954.000	19.960.000	-	-	13.086.000	33.046.000	60.000.000	-	2.530.826	1.632.726	898.100	898.100
29	SDN 11 MUARA TELANG	-	-	-	60.000.000	-	26.479.000	18.980.000	-	-	11.541.000	30.521.000	57.000.000	3.000.000	1.040.000	1.040.000	-	3.000.000
30	SDN 12 MUARA TELANG	-	-	-	60.000.000	-	3.000.000	37.539.997	-	-	2.484.000	40.023.997	43.023.997	16.976.003	-	-	-	16.976.003
31	SDN 1 PULAU RIMAU	-	-	-	60.000.000	-	13.780.000	28.650.000	-	-	3.420.000	32.070.000	45.850.000	14.150.000	-	-	-	14.150.000
32	SDN 2 PULAU RIMAU	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	23.999.991	-	-	8.928.000	32.927.991	42.827.991	17.172.009	-	-	-	17.172.009
33	SDN 10 PULAU RIMAU	-	-	-	60.000.000	-	29.753.000	24.700.000	-	-	5.547.000	30.247.000	60.000.000	-	-	-	-	-
34	SDN 15 PULAU RIMAU	-	-	-	60.000.000	-	15.900.000	36.260.000	-	-	4.425.000	40.685.000	56.585.000	3.415.000	-	-	-	3.415.000
35	SDN 16 RAMBUTAN	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	46.652.991	-	-	3.447.000	50.099.991	59.999.991	9	4.821.187	4.366.643	454.544	454.543
36	SDN 2 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	16.244.000	33.200.000	-	3.000.000	2.556.000	38.756.000	55.000.000	5.000.000	2.907.000	2.907.000	-	5.000.000
37	SDN 4 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	15.488.000	39.399.991	-	-	5.112.000	44.511.991	59.999.991	9	3.694.543	2.454.543	1.240.000	1.240.000
38	SDN 16 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	14.187.000	40.799.991	-	-	2.817.000	43.616.991	57.803.991	2.196.009	3.834.543	3.834.543	-	2.196.009
39	SDN 21 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	17.400.000	36.090.000	-	-	6.510.000	42.600.000	60.000.000	-	-	-	-	-
40	SDN 22 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	3.000.000	41.962.000	-	-	4.638.000	46.600.000	49.600.000	10.400.000	-	-	-	10.400.000
41	SDN 24 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	21.392.000	32.700.000	-	-	3.906.000	36.606.000	57.998.000	2.002.000	1.424.272	213.636	1.210.636	3.212.636
42	SDN 30 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	35.126.000	20.545.450	-	-	2.760.000	23.305.450	58.431.450	1.568.550	2.207.900	-	2.207.900	3.776.450
43	SDN 31 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	18.000.000	30.200.000	-	4.000.000	4.470.000	38.670.000	56.670.000	3.330.000	1.509.091	-	1.509.091	4.839.091
44	SDN 33 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	27.648.000	27.599.993	-	-	4.545.000	32.144.993	59.792.993	207.007	3.023.634	3.023.634	-	207.007
45	SDN 37 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	25.815.000	27.000.000	-	-	7.185.000	34.185.000	60.000.000	-	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000
46	SDN 19 SEMBAWA	-	-	-	60.000.000	-	37.129.000	16.999.994	-	-	6.171.000	22.870.994	59.999.994	6	2.422.900	-	2.422.900	2.422.906
47	SDN 9 SUAK TAPEH	-	-	-	60.000.000	-	16.123.000	31.050.000	-	-	3.129.000	34.179.000	50.302.000	9.698.000	381.818	-	381.818	10.079.818
48	SDN 6 SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	26.699.996	-	-	-	26.699.996	36.999.996	23.400.004	-	-	-	23.400.004
49	SDN 30 TALANG KELAPA	143.000.000	-	143.000.000	-	-	-	142.878.900	-	-	-	142.878.900	142.878.900	121.100	-	-	-	121.100
50	SDN 4 TANJUNG LAGO	99.000.000	-	99.000.000	-	-	-	98.960.000	-	-	-	98.960.000	98.960.000	40.000	-	-	-	40.000
51	SDN 17 TANJUNG LAGO	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	43.350.000	-	-	6.723.000	50.073.000	59.973.000	27.000	3.983.179	3.518.179	465.000	492.000
52	SDN 20 TANJUNG LAGO	-	-	-	60.000.000	-	9.900.000	37.100.000	-	-	13.000.000	50.100.000	60.000.000	-	1.150.000	-	1.150.000	1.150.000
53	SDN 21 TANJUNG LAGO	-	-	-	60.000.000	-	17.500.000	40.000.000	-	-	2.500.000	42.500.000	60.000.000	-	-	-	-	-
54	SDN 23 TANJUNG LAGO	-	-	-	60.000.000	-	22.752.000	33.900.000	-	-	3.348.000	37.248.000	60.000.000	-	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000



NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL			ALOKASI DANA BOS KINERJA	REALISASI BELANJA						JUMLAH TOTAL REALISASI BELANJA	SALDO AKHIR (SALDO MURNI BOS)	TOTAL POTONGAN DAN SETORAN PAJAK TAHUN 2020 (BUKU KAS PAJAK)		TOTAL SALDO PAJAK PER 31 DESEMBER 2020 YANG BELUM DISETOR (SALDO BUKU KAS PAJAK)	TOTAL SALDO KAS AKHIR PER 31 DES 2020	
		TOTAL SALDO AWAL	SALDO PAJAK	SALDO BOS KINERJA		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL						TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL PENERIMAAN PAJAK			TOTAL PENGELUARAN PAJAK
								PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA							
1	2																	
55	SDN 24 TANJUNG LAGO	113.000.000	-	113.000.000	-	-	112.905.967	-	-	-	112.905.967	112.905.967	94.033	10.264.179	10.264.179	-	94.033	
56	SDN 2 TUNGKAL ILIR	-	-	-	60.000.000	-	655.500	33.330.500	-	-	6.114.000	39.444.500	40.100.000	19.900.000	-	-	19.900.000	
57	SDN 22 TUNGKAL ILIR	135.000.000	-	135.000.000	-	-	-	134.884.000	-	-	-	134.884.000	116.000	-	-	-	116.000	
	JUMLAH SDN	889.000.000	-	889.000.000	3.000.000.000	-	816.919.095	2.543.516.878	-	7.000.000	294.800.000	2.845.316.878	3.662.235.973	226.764.027	56.133.341	37.845.907	18.287.434	245.051.461
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	SMPN 2 AIR SALEK	235.000.000	-	235.000.000	-	-	-	235.000.000	-	-	-	235.000.000	235.000.000	-	21.383.273	21.167.273	216.000	216.000
2	SMPN 5 BANYUASIN I	-	-	-	60.000.000	-	32.330.000	6.000.000	-	-	21.670.000	27.670.000	60.000.000	-	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000
3	SMPN 1 BANYUASIN II	-	-	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	5.454.545	-	5.454.545	5.454.545
4	SMPN 2 MAKARTI JAYA	-	-	-	60.000.000	-	22.446.000	37.500.000	-	-	-	37.500.000	59.946.000	54.000	4.144.700	-	4.144.700	4.198.700
5	SMPN 2 MAKARTI JAYA	-	-	-	60.000.000	-	12.800.000	14.725.000	-	-	-	14.725.000	27.525.000	32.475.000	2.615.000	-	2.615.000	35.090.000
6	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	1.500.000	58.177.000	-	-	-	58.177.000	59.877.000	323.000	3.136.364	3.136.364	-	323.000
7	SMPN 4 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	10.023.000	48.177.000	-	-	-	48.177.000	58.200.000	1.800.000	-	-	-	1.800.000
8	SMPN 5 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	27.250.000	28.910.000	-	-	3.840.000	32.750.000	60.000.000	-	-	-	-	-
9	SMPN 6 MUARA SUGIHAN	-	-	-	60.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	57.000.000	300.000	-	300.000	57.300.000
10	SMPN 3 RAMBUTAN	-	-	-	60.000.000	-	22.225.000	37.775.000	-	-	-	37.775.000	60.000.000	-	3.370.454	3.370.454	-	-
11	SMPN 5 RANTAU BAYUR	-	-	-	60.000.000	-	20.000.000	33.000.000	-	-	6.944.400	39.944.400	59.944.400	55.600	3.297.000	-	3.297.000	3.352.600
12	SMPN 3 SEMBAWA	-	-	-	60.000.000	-	12.470.000	34.900.000	-	-	-	34.900.000	47.370.000	12.630.000	2.160.000	-	2.160.000	14.790.000
13	SMPN 2 SUMBER MARGA TELANG	-	-	-	60.000.000	-	42.000.000	17.050.000	-	-	-	17.050.000	59.050.000	950.000	2.422.725	-	2.422.725	3.372.725
14	SMPN 2 TANJUNG LAGO	425.000.000	-	425.000.000	-	-	600.000	420.940.000	-	-	-	420.940.000	421.540.000	3.460.000	38.267.273	38.267.273	-	3.460.000
15	SMPN 3 TANJUNG LAGO	-	-	-	60.000.000	-	19.923.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	59.923.000	77.000	4.571.818	681.818	3.890.000	3.967.000
16	SMPN 4 TANJUNG LAGO	145.000.000	-	145.000.000	60.000.000	-	36.270.000	156.876.000	-	-	-	156.876.000	193.146.000	11.854.000	12.976.364	12.976.364	-	11.854.000
	JUMLAH SMPN	805.000.000	-	805.000.000	840.000.000	-	259.837.000	1.232.030.000	-	-	32.454.400	1.264.484.400	1.524.321.400	120.678.600	105.499.516	79.599.546	25.899.970	146.578.570
	JUMLAH TOTAL	1.694.000.000	-	1.694.000.000	3.840.000.000	-	1.076.756.095	3.775.546.878	-	7.000.000	327.254.400	4.109.801.278	5.186.557.373	347.442.627	161.632.857	117.445.453	44.187.404	391.630.031

**DAFTAR PIUTANG TP/TGR  
Per 31 DESEMBER 2020**

No.	Nama	SKPD	Jenis Kasus (tahun)	Jumlah Kerugian	Saldo Awal	Mutasi Tambah 2020	Tgl. Angsuran	Angsuran Tahun 2020	Koreksi	Saldo Per 31 Des 2020	Keterangan
<b>A. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN</b>											
	Idris Sutakakki	Dinas Pertanian	TP 2006	28.314.525,00	6.814.525,00	-	01/10/2020	500.000,00		6.314.525,00	
<b>Sub Jumlah TP</b>				<b>28.314.525,00</b>	<b>6.814.525,00</b>	<b>-</b>		<b>500.000,00</b>		<b>6.314.525,00</b>	
<b>B. TUNTUTAN GANTI RUGI</b>											
1	a. Haryanto (SK Pembebanan Sementara)	Disnakertrans	TGR 2013	13.200.000	5.000.000,00		29/05/2020	5.000.000		-	
	b. Hasibuan	Disnakertrans			6.550.000,00					6.550.000,00	Surat Bupati Banyuasin Nomor : 700/1618/IRDA/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal : Tindak Lanjut Hasil Audit
2	H.M. Sanusi Hamid, MM	Ketua BAZ Kab. Banyuasin	TGR 2014	12.000.000,00	10.000.000,00		26/03/2020 29/12/2020	8.500.000,00 1.500.000,00		-	
3	Rayen Supriyan	Penyuluh, Pertanian dan Peternakan Desa Sumber Mekar Mukti, Ds. Kuala Puntian Kec. Tanjung Lago pada BP4K Kab. Banyuasin	TGR 2015	10.000.000,00	5.566.000,00		30/03/2020	5.566.000,00		-	
4	Adam, S.Pd., M.Si	Guru SDN 19 Talang Kelapa pindah ke SDN 33 Tlg Kelapa	TGR 2017	179.810.560,00	176.160.560,00		30/03/2020 05/08/2020 19/08/2020	300.000,00 200.000,00 1.000.000,00		174.660.560,00	
5	Rizaludin, Sh., M.Si	Kasi Penata Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuasin	TGR -2018	14.000.000,00	400.000,00		07/01/2020 11/02/2020 09/03/2020 21/07/2020	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00		-	
6	Amir Hamzah, S.Pd.i	Kepala Seksi PMD Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin	TGR -2018	11.000.000,00	3.180.000,00		10/01/2020 03/02/2020 02/03/2020 01/04/2020 04/05/2020 14/10/2020	460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 880.000,00		-	
7	Tri Yudha Rasman, A.Md	Penyuluhan Perikanan Kecamatan Tanjung Lago BRPPUPP Jakabaring	TGR -2018	5.000.000	5.000.000,00					5.000.000,00	
8	Bambang Wirawan, SE, MM, Ak., CA	Pit. Kepala BPKAD Kab. Banyuasin	TGR-2019	39.140.000	35.876.200,00		23/12/2020	1.632.000,00		34.244.200,00	Catatan: Berdasarkan SKTJM dibagi menjadi Piutang sebesar Rp 24.460.366,67 dan aset lain-lain sebesar Rp 11.415.833,33
9	drg. Laila Ahza	Ka. UPT Puskesmas Sembawa	TGR-2019	12.000.000	12.000.000,00		27/01/2020 13/02/2020 02/06/2020 27/07/2020 18/08/2020	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00		-	
10	Zainudin, SH	Lurah Kenten Th. 2019	TGR-2020	61.800.225,16		61.800.225,16	07/02/2020 20/03/2020	10.000.000,00 51.800.225,16		-	
<b>Sub Jumlah/TGR</b>				<b>357.950.785,16</b>	<b>259.732.760,00</b>	<b>61.800.225,16</b>		<b>101.078.225,16</b>	<b>-</b>	<b>220.454.760,00</b>	
<b>Sub Jumlah TP/TGR</b>				<b>386.265.310,16</b>	<b>266.547.285,00</b>	<b>61.800.225,16</b>		<b>101.578.225,16</b>	<b>-</b>	<b>226.769.285,00</b>	

Catatan :

TGR seluruhnya dimasukan ke piutang TP/TGR (lancar) karena :

- 1 SKTJM a.n Haryanto tertanggal 17 Juli 2013 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Agustus 2013 s.d. bulan September 2015. SK Bupati Banyuasin
- 2 SKTJM a.n Adam, S.Pd., M.Si Nomor 957/6/MJ-TPTGR/2017 tanggal 15 Juni 2017 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Juli 2017 s.d. Juni 2019
- 3 SKTJM a.n Tri Yudha Rasman, A.Md Nomor : 957/006/MJ-TPTGR/2018 tanggal 12 Nopember 2018 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tmt bulan Desember 2018 s.d. Mei 2019
- 4 SKTJM a.n Bambang Wirawan, SE, MM, Ak.,CA Nomor 957/01/TPKD/2019 tanggal 31 Juli 2019 menyebutkan bahwa jumlah kerugian/kekurangan tersebut diganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tmt bulan Agustus 2019 s.d. Juli 2021
- 5 Karena masa pengembalian tersebut hanya menyebutkan jangka waktu pengembalian, maka piutang tersebut selalu ada kemungkinan dapat diselesaikan selama setahun, dan oleh karenanya dalam neraca disajikan sebagai piutang lancar.

**TP/TGR (KASUS KERUGIAN DAERAH YANG SEDANG DALAM PROSES PENETAPAN PEMBEBANAN)  
Per 31 DESEMBER 2020**

NO	NAMA	SKPD	TP/TGR	PENJELASAN	NILAI ASET
1	Arif Maulana	Lurah Makarti Jaya yang Mutasi ke BKD Muba	TGR (2005)	Pengambilan barang inventaris berupa motor dinas Yamaha RXS BG. 8491 BZ.	-
2	Pahrudin Putra Jaya bin Marzuki	TNI AD	TGR 2008	Kehilangan motor dinas Sekretariat Daerah Merk Honda Mega Pro Tahun 2005 BG. 5372 JZ pada Hari minggu tanggal 11 Mei 2008	15.000.000,00
3	Munawaroh, A.Ma.Pd	Kepala Sekolah SDN 2 Lubuk Lancang Kec. Betung	TGR (2004)	Pembayaran gaji kepada Pegawai yang tidak melaksanakan tugas an. Pardi	12.769.500,00
4	Firmansyah	Kepala Dinas PUBM	TGR (2005)	Kehilangan barang inventaris tanggal 11 April 2011	-
5	Iskandar Zulkarnain	Kepala BKD	TGR (2005)	Kehilangan barang inventaris dan uang tunai tanggal 12 Maret 2005	-
<b>Jumlah</b>					<b>27.769.500,00</b>



No.	Nama	TOTAL PIUTANG					ANGSURAN 2008		ANGSURAN 2010		ANGSURAN 2012		ANGSURAN 2013		ANGSURAN 2014		ANGSURAN 2015		ANGSURAN 2016		ANGSURAN 2018		JUMLAH ANGSURAN	SALDO	KET				
		Thn. 2003	Thn. 2004	Thn. 2005	Thn. 2006	Thn. 2008	Jumlah	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah	Tgl. Setor	Jumlah				Tgl. Setor			
64	NASRUL HALIM, SH			18.390.000	14.000.000	2.620.500	35.010.500																35.010.500	-	lunas				
													2.620.500	20-06-2013															
													14.000.000	20-06-2013															
													15.290.000	20-06-2013															
													3.100.000	21-05-2013															
65	H. HAZNAR HAMID			17.600.000	15.000.000	3.435.600	36.035.600																3.000.000	-	33.035.600				
66	BAMBANG BEROHIM			15.990.000	15.000.000		30.990.000																			30.990.000			
67	SARJANI			17.390.000	15.000.000	3.319.000	35.709.000									3.000.000	04-03-2014									35.709.000			
68	SLAMET SOMO SEXTOND				13.500.000	4.107.000	17.607.000	5.500.000	09-10-2008				4.107.000	04-11-2013										17.607.000	-	lunas			
								5.000.000	02-05-2008																				
								1.500.000	09-09-2008																				
								1.500.000	22-09-2008																				
69	SUNARDI STEPHANUS HARADI/ SITI KARYANI				15.000.000		15.000.000																			15.000.000			
70	A. KORDIAN, AR				15.000.000		15.000.000								1.500.000	10-03-2014								7.000.000	-	8.000.000			
															3.500.000	01-04-2014													
															2.000.000	06-05-2014													
71	ROILAN H. ROZALI			7.500.000	2.103.700		9.603.700								7.500.000	13-02-2014								7.500.000	-	2.103.700			
72	JUFRianto			15.000.000	2.905.700		17.905.700								2.905.700	27-01-2014								17.905.700	-	lunas			
															6.094.300	27-01-2014													
															8.905.700	14-11-2014													
73	A. YANI					2.793.000	2.793.000																						
74	ABD. RIFQEE S					2.805.000	2.805.000																						
75	AMNUDDIN, S. Sos					732.700	732.700								732.700	06-05-2013													
76	Drs. Nandawati					220.400	220.400								220.400	06-05-2013													
77	Fahri Siregar, SH					615.500	615.500								615.500	23-01-2014													
78	Galot Setoko					723.400	723.400								723.400	07-01-2014													
79	H. Agus Salam					2.298.500	2.298.500																						
80	H. Hendri Z. S. Ag					3.911.600	3.911.600								3.911.600	28-01-2014													
81	H. M. Basir DA					815.600	815.600								815.600	28-03-2013													
82	Herawati					865.500	865.500								865.500	22-01-2014													
83	Ihram Hadi, S. Hut					2.198.300	2.198.300								2.198.300	14-02-2014													
84	Ir. Wala K. NM					331.900	331.900								331.900	11-11-2013													
		2.795.143.373	3.720.588.692	568.093.000	570.000.000	105.873.200	7.759.698.265	13.500.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	220.699.020	-	640.206.810	-						260.000	-	4.000	-	884.699.830	6.877.069.035.00	-

**REKAPITULASI BEBAN DIBAYAR DIMUKA TAHUN ANGGARAN 2015  
KABUPATEN BANYUJASIN  
PER 31 DESEMBER 2020**

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020		Nilai per 31 - 12 -2020		Ket	
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah Jatuh Tempo/Digunakan	Belum Jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak		Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>TAHUN LALU</b>												
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1358 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	15.220.000,00	2.536.666,67	12.683.333,33	12.683.333,33	15.220.000,00	-	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1360 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	15.220.000,00	2.536.666,67	12.683.333,33	12.683.333,33	15.220.000,00	-	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 9112 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	14.888.700,00	2.481.450,00	12.407.250,00	12.407.250,00	14.888.700,00	-	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1367 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	11.933.500,00	1.988.916,67	9.944.583,33	9.944.583,33	11.933.500,00	-	
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 9055 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	14.826.100,00	2.471.016,67	12.355.083,33	12.355.083,33	14.826.100,00	-	
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1259 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	15.188.700,00	2.531.450,00	12.657.250,00	12.657.250,00	15.188.700,00	-	
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1279 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	10.040.000,00	1.673.333,33	8.366.666,67	8.366.666,67	10.040.000,00	-	
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 9007 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	15.523.500,00	2.587.250,00	12.936.250,00	12.936.250,00	15.523.500,00	-	
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1157 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	10.422.000,00	1.737.000,00	8.685.000,00	8.685.000,00	10.422.000,00	-	
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1158 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	10.422.000,00	1.737.000,00	8.685.000,00	8.685.000,00	10.422.000,00	-	
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1343 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	13.342.000,00	2.223.666,67	11.118.333,33	11.118.333,33	13.342.000,00	-	
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1166 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	12.100.000,00	2.016.666,67	10.083.333,33	10.083.333,33	12.100.000,00	-	
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1281 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	14.594.000,00	2.432.333,33	12.161.666,67	12.161.666,67	14.594.000,00	-	
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1137 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	12.303.000,00	2.050.500,00	10.252.500,00	10.252.500,00	12.303.000,00	-	
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1095 JZ	34022219001510	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	22/10/2019	22/10/2020	12.587.000,00	2.097.833,33	10.489.166,67	10.489.166,67	12.587.000,00	-	
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>198.610.500,00</b>	<b>33.101.750,00</b>	<b>165.508.750,00</b>	<b>165.508.750,00</b>	<b>198.610.500,00</b>	-	
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1358 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	10.268.450,00		855.704,17	855.704,17	9.412.745,83		
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1360 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	10.268.450,00		855.704,17	855.704,17	9.412.745,83		
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 9112 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	11.188.830,00		932.402,50	932.402,50	10.256.427,50		
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1362 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	6.396.800,00		533.066,67	533.066,67	5.863.733,33		
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1259 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	8.552.800,00		712.733,33	712.733,33	7.840.066,67		
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1279 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	6.292.500,00		524.375,00	524.375,00	5.768.125,00		
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 9007 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	7.619.150,00		634.929,17	634.929,17	6.984.220,83		
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1157 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	6.796.060,00		566.338,33	566.338,33	6.229.721,67		
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1343 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	7.788.075,00		649.006,25	649.006,25	7.139.068,75		
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Asuransi Kendaraan BG 1095 JZ	3402220001414	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	16/11/2020	16/11/2021	8.123.960,00		676.996,67	676.996,67	7.446.963,33		
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>83.295.075,00</b>	<b>-</b>	<b>6.941.256,26</b>	<b>6.941.256,26</b>	<b>76.353.818,74</b>		
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>TOTAL A+B</b>						<b>281.905.575,00</b>	<b>33.101.750,00</b>	<b>165.508.750,00</b>	<b>172.450.006,26</b>	<b>205.551.756,26</b>	<b>76.353.818,74</b>	
31	Dinas Kesehatan	<b>TAHUN LALU</b>												
32	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Avanza E 1. M/T BG 1306 JZ	15022119000698	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	3.698.000,00	2.157.166,67	1.540.833,33	1.540.833,33	3.698.000,00	-	
33	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Avanza E 1. A/T BG 1314 JZ	15022119000699	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	3.965.000,00	2.312.916,67	1.652.083,33	1.652.083,33	3.965.000,00	-	
34	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Avanza E 1. M/T BG 1312 JZ	15022119000700	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	3.698.000,00	2.157.166,67	1.540.833,33	1.540.833,33	3.698.000,00	-	
35	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Avanza E 1. A/T BG 1309 JZ	15022119000701	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	3.965.000,00	2.312.916,67	1.652.083,33	1.652.083,33	3.965.000,00	-	
36	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Honda/HRV RU1 1. S BG 1339 JZ	15022119000702	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	4.914.000,00	2.866.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	4.914.000,00	-	
37	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Avanza E 1. M/T BG 1316 JZ	15022119000703	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	3.698.000,00	2.157.166,67	1.540.833,33	1.540.833,33	3.698.000,00	-	
38	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 G DC M/T BG 9087 JZ	15022119000704	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	5.087.000,00	2.967.416,67	2.119.583,33	2.119.583,33	5.087.000,00	-	
39	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota /Hiace Commuter M/T BG 7018 JZ	15022119000705	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	8.947.000,00	5.219.083,33	3.727.916,67	3.727.916,67	8.947.000,00	-	
40	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Mitsubishi/Strada Triton DC 2.5 Exceed A/T BG 9063 JZ	15022119000706	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	11/05/2019	11/05/2020	5.039.000,00	2.939.416,67	2.099.583,33	2.099.583,33	5.039.000,00	-	
41	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux Pick Up 2.0L M/T BG 9085 JZ	15022119000962	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	6.947.000,00	2.315.666,67	4.631.333,33	4.631.333,33	6.947.000,00	-	
42	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Suzuki AVI 414F SDX (4x2) M/T BG 1211 JZ	15022119000942	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	4.438.550,00	1.479.516,67	2.959.033,33	2.959.033,33	4.438.550,00	-	
43	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Suzuki AVI414F SDX (4x2) M/T BG 1213 JZ	15022119000943	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	4.438.550,00	1.479.516,67	2.959.033,33	2.959.033,33	4.438.550,00	-	
44	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Suzuki AVI414F SDX (4x2) M/T BG 1210 JZ	15022119000980	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	4.857.500,00	1.619.166,67	3.238.333,33	3.238.333,33	4.857.500,00	-	
45	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 G DC (4x4) M/T BG 9088 JZ	15022119000941	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	7.857.000,00	2.619.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	7.857.000,00	-	
46	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux Pick Up BG 9101 JZ	15022119000960	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	3.194.000,00	1.064.666,67	2.129.333,33	2.129.333,33	3.194.000,00	-	
47	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Suzuki GC415V APV DLX BG 1257 JZ	15022119000944	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	4.429.000,00	1.476.333,33	2.952.666,67	2.952.666,67	4.429.000,00	-	
48	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 G Double Cabin (4x4) M/T BG 9038 JZ	15022119001094	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	20/08/2019	20/08/2020	5.132.000,00	1.710.666,67	3.421.333,33	3.421.333,33	5.132.000,00	-	
49	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 E GLX 4X4 M/T 2014 BG 1275 JZ	15022119001468	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	21/10/2019	21/10/2020	5.677.000,00	946.166,67	4.730.833,33	4.730.833,33	5.677.000,00	-	
50	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Strada CR 2.5 GLS 4X4 2008 BG 8038 JZ	15022119001467	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	21/10/2019	21/10/2020	4.878.140,00	813.023,33	4.065.116,67	4.065.116,67	4.878.140,00	-	
51	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Inovov 2.0 2016 BG 1332 JZ	15022119001465	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	21/10/2019	21/10/2020	5.350.000,00	891.666,67	4.458.333,33	4.458.333,33	5.350.000,00	-	
52	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan KIA BG 9110 JZ	15022119001464	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	21/10/2019	21/10/2020	4.499.000,00	749.833,33	3.749.166,67	3.749.166,67	4.499.000,00	-	
53	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Outlander 2.0 L 2012 BG 1191 JZ	15022119001466	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	21/10/2019	21/10/2020	5.502.600,00	917.100,00	4.585.500,00	4.585.500,00	5.502.600,00	-	

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
54	Dinas Kesehatan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova DLS 2015 BG 1322 JZ (Ambulance)	1502219001463	Asuransi Mitra Pelindung Mustika	12 bulan	21/10/2019	21/10/2020	4.914.000,00	819.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	4.914.000,00	-	
55	Dinas Kesehatan	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>115.125.340,00</b>	<b>43.991.073,37</b>	<b>71.134.266,63</b>	<b>71.134.266,63</b>	<b>115.125.340,00</b>	<b>-</b>	
56	Dinas Kesehatan	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
57	Dinas Kesehatan													
58	Dinas Kesehatan													
59	Dinas Kesehatan													
60	Dinas Kesehatan	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
61	Dinas Kesehatan	<b>TOTAL A+B</b>						<b>115.125.340,00</b>	<b>43.991.073,37</b>	<b>71.134.266,63</b>	<b>71.134.266,63</b>	<b>115.125.340,00</b>	<b>-</b>	
62														
63	Rumah Sakit Umum Daerah	<b>TAHUN LALU</b>												
64	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Nissan/Livina 1.5 X-Gear (4x2) M/T BG 1319 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	4.496.500,00	1.498.833,33	2.997.666,67	2.997.666,67	4.496.500,00	-	
65	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki/GC415V APV DLX M/T BG 1100 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	3.759.250,00	1.253.083,33	2.506.166,67	2.506.166,67	3.759.250,00	-	
66	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki/GC415V APV DLX M/T BG 1018 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	3.759.250,00	1.253.083,33	2.506.166,67	2.506.166,67	3.759.250,00	-	
67	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Innova E BG 1082 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	4.481.330,00	1.493.776,67	2.987.553,33	2.987.553,33	4.481.330,00	-	
68	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota/New Avanza 1.3G M/T BG 1287 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	3.803.150,00	1.267.716,67	2.535.433,33	2.535.433,33	3.803.150,00	-	
69	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Honda/HR-V RUI 1. E E CVT CKD BG 70 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	5.064.850,00	1.688.283,33	3.376.566,67	3.376.566,67	5.064.850,00	-	
70	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki/GC415V APV SDX M/T BG 9010 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	4.173.360,00	1.391.120,00	2.782.240,00	2.782.240,00	4.173.360,00	-	
71	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki/GC415V APV SDX M/T BG 9011 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	4.173.360,00	1.391.120,00	2.782.240,00	2.782.240,00	4.173.360,00	-	
72	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki/GC415V APV SDX M/T BG 9012 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	4.173.360,00	1.391.120,00	2.782.240,00	2.782.240,00	4.173.360,00	-	
73	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan KIA K2700 Ransus Ambulance BG 9123 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	5.488.750,00	1.829.583,33	3.659.166,67	3.659.166,67	5.488.750,00	-	
74	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan KIA K2700 Ransus Ambulance BG 9125 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	5.488.750,00	1.829.583,33	3.659.166,67	3.659.166,67	5.488.750,00	-	
75	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Hino WU342R-HKMTJ33 Truck BG 8091 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	5.020.750,00	1.673.583,33	3.347.166,67	3.347.166,67	5.020.750,00	-	
76	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CRV 1.5 TC CVT CJD BG 1365 JZ	No.3402210819000012 Tanggal 21/08/2019	PT. Malacca Trust Insurance	12 bulan	21/08/2019	21/08/2020	5.946.250,00	1.982.083,33	3.964.166,67	3.964.166,67	5.946.250,00	-	
77	Rumah Sakit Umum Daerah	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>59.828.910,00</b>	<b>19.942.970,00</b>	<b>39.885.940,00</b>	<b>39.885.940,00</b>	<b>59.828.910,00</b>	<b>-</b>	
78	Rumah Sakit Umum Daerah	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
79	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CRV BG 1365 JZ	No Polis 14.30.11.0093.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	6.977.885,00			1.744.471,25	1.744.471,25	5.233.413,75	Dana BLUD
80	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Honda HRV BG 70 JZ	No Polis 14.30.11.0094.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	7.768.250,00			1.942.062,50	1.942.062,50	5.826.187,50	Dana BLUD
81	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Avanza BG 1287 JZ	No Polis 14.30.11.0095.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	4.524.500,00			1.131.125,00	1.131.125,00	3.393.375,00	Dana BLUD
82	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV BG 9010 JZ	No Polis 14.30.11.0096.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	4.908.350,00			1.227.087,50	1.227.087,50	3.681.262,50	Dana BLUD
83	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV BG 9011 JZ	No Polis 14.30.11.0097.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	4.908.350,00			1.227.087,50	1.227.087,50	3.681.262,50	Dana BLUD
84	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV BG 9012 JZ	No Polis 14.30.11.0098.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	4.908.350,00			1.227.087,50	1.227.087,50	3.681.262,50	Dana BLUD
85	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV BG 1100 JZ	No Polis 14.30.11.0099.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	3.318.750,00			829.687,50	829.687,50	2.489.062,50	Dana BLUD
86	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV BG 9124 JZ	No Polis 14.30.11.0100.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	6.277.675,00			1.569.418,75	1.569.418,75	4.708.256,25	Dana BLUD
87	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV BG 9125 JZ	No Polis 14.30.11.0101.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	6.277.675,00			1.569.418,75	1.569.418,75	4.708.256,25	Dana BLUD
88	Rumah Sakit Umum Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV BG 8091 JZ	No Polis 14.30.11.0102.09.20 Tanggal 07/09/2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	07/09/2020	07/09/2021	6.451.086,00			1.612.771,50	1.612.771,50	4.838.314,50	Dana BLUD
89	Rumah Sakit Umum Daerah	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>56.320.871,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.080.217,75</b>	<b>14.080.217,75</b>	<b>42.240.653,25</b>	
90	Rumah Sakit Umum Daerah	<b>TOTAL A+B</b>						<b>116.149.781,00</b>	<b>19.942.970,00</b>	<b>39.885.940,00</b>	<b>53.966.157,75</b>	<b>73.909.127,75</b>	<b>42.240.653,25</b>	
91	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<b>TAHUN LALU</b>												
92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Nissan Frontier Navara 2.5 BG 9008 JZ	3402219000357	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	28/03/2019	28/03/2020	7.537.000,00	5.652.750,00	1.884.250,00	1.884.250,00	7.537.000,00	-	
93	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Toyota Rush 1.5 S A/T TBA Nomor mesin 2NR-F826501 Tgl 12 April 2019	3402219000557	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	10/04/2019	10/04/2020	7.420.740,00	4.947.160,00	2.473.580,00	2.473.580,00	7.420.740,00	-	

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31 - 12 -2020			Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
94	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 Q AT BG 1304 JZ Tgl 04 September 2019	34022219001263	PT. Asuransi Ramayana, Tbk	12 bulan	15/09/2019	15/09/2020	8.384.200,00	2.096.050,00		6.288.150,00	6.288.150,00	8.384.200,00	-	
95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Nisan X-Trail BG 1069 JZ	14.30.11.0006.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	27/12/2019	27/12/2020	6.705.065,00	-		6.705.065,00	6.705.065,00	6.705.065,00	-	
96	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Daihatsu Terios TX M/T BG 1075 JZ	14.30.11.0001.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	27/12/2019	27/12/2020	5.748.475,00	-		5.748.475,00	5.748.475,00	5.748.475,00	-	
97	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Daihatsu Terios TX M/T BG 1076 JZ	14.30.11.0002.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	27/12/2019	27/12/2020	5.748.475,00	-		5.748.475,00	5.748.475,00	5.748.475,00	-	
98	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Daihatsu Terios TX M/T BG 1077 JZ	14.30.11.0003.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	27/12/2019	27/12/2020	5.748.475,00	-		5.748.475,00	5.748.475,00	5.748.475,00	-	
99	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Isuzu Panther Touring BG 1079 JZ	14.30.11.0005.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	27/12/2019	27/12/2020	9.349.755,00	-		9.349.755,00	9.349.755,00	9.349.755,00	-	
100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Isuzu Panther Touring BG 1078 JZ	14.30.11.0004.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	27/12/2019	27/12/2020	9.349.755,00	-		9.349.755,00	9.349.755,00	9.349.755,00	-	
101	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Asuransi Kendaraan Nisan Frontier 3.0 TD 4x4 Double Cabin BG 8012 JZ	14.30.11.0007.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	27/12/2019	27/12/2020	897.000,00	-		897.000,00	897.000,00	897.000,00	-	
102	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>66.888.940,00</b>	<b>12.695.960,00</b>		<b>54.192.980,00</b>	<b>54.192.980,00</b>	<b>66.888.940,00</b>	-	
103	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
104	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan														
105	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan														
106	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<b>SUB JUMLAH B</b>						-	-		-	-	-		
107	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<b>TOTAL A+B</b>						<b>66.888.940,00</b>	<b>12.695.960,00</b>		<b>54.192.980,00</b>	<b>54.192.980,00</b>	<b>66.888.940,00</b>	-	
108	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<b>TAHUN LALU</b>													
109	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 9073 JZ)	34022219000182	Asuransi Ramayana	12 bulan	28/01/2019	28/01/2020	6.674.600,00	6.118.383,33		556.216,67	556.216,67	6.674.600,00	-	
110	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1353 JZ)	34022219000183	Asuransi Ramayana	12 bulan	28/01/2019	28/01/2020	5.720.110,00	5.243.434,17		476.675,83	476.675,83	5.720.110,00	-	
111	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1351 JZ)	34022219000181	Asuransi Ramayana	12 bulan	28/01/2019	28/01/2020	6.966.700,00	6.386.141,67		580.558,33	580.558,33	6.966.700,00	-	
112	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 8015 JZ)	34022219000210	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	6.889.500,00	5.574.583,33		1.114.916,67	1.114.916,67	6.889.500,00	-	
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 9019 JZ)	34022219000209	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	5.810.000,00	4.841.666,67		968.333,33	968.333,33	5.810.000,00	-	
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 8057 JZ)	34022219000208	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	5.968.600,00	4.973.833,33		994.766,67	994.766,67	5.968.600,00	-	
115	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 43 JZ)	34022219000207	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	6.404.500,00	5.337.083,33		1.067.416,67	1.067.416,67	6.404.500,00	-	
116	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1967 JZ)	34022219000206	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	5.539.800,00	4.616.500,00		923.300,00	923.300,00	5.539.800,00	-	
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1013 JZ)	34022219000205	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	5.539.800,00	4.616.500,00		923.300,00	923.300,00	5.539.800,00	-	
118	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1012 JZ)	34022219000204	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	5.539.800,00	4.616.500,00		923.300,00	923.300,00	5.539.800,00	-	
119	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1111 JZ)	34022219000203	Asuransi Ramayana	12 bulan	03/02/2019	03/02/2020	5.539.800,00	4.616.500,00		923.300,00	923.300,00	5.539.800,00	-	
120	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>66.393.210,00</b>	<b>56.941.125,83</b>		<b>9.452.084,17</b>	<b>9.452.084,17</b>	<b>66.393.210,00</b>	-	
121	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
122	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 9073 JZ)	1702012000030	Asuransi ASPAN	12 bulan	24/02/2020	24/02/2021	6.709.000,00			5.590.833,33	5.590.833,33	1.118.166,67		
123	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1351 JZ)	1702012000031	Asuransi ASPAN	12 bulan	24/02/2020	24/02/2021	9.004.000,00			7.503.333,33	7.503.333,33	1.500.666,67		
124	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 8042 JZ)	1702012000032	Asuransi ASPAN	12 bulan	24/02/2020	24/02/2021	4.999.400,00			4.166.166,67	4.166.166,67	833.233,33		
125	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 1353 JZ)	1702012000033	Asuransi ASPAN	12 bulan	24/02/2020	24/02/2021	6.310.750,00			5.258.958,33	5.258.958,33	1.051.791,67		
126	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Asuransi Kendaraan Dinas (BG. 8131 JZ)	1702012000034	Asuransi ASPAN	12 bulan	24/02/2020	24/02/2021	12.818.000,00			10.681.666,67	10.681.666,67	2.136.333,33		
127	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>39.841.150,00</b>	<b>-</b>		<b>33.200.958,33</b>	<b>33.200.958,33</b>	<b>6.640.191,67</b>		
128	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<b>TOTAL A+B</b>						<b>106.234.360,00</b>	<b>56.941.125,83</b>		<b>9.452.084,17</b>	<b>42.653.042,50</b>	<b>99.594.168,33</b>	<b>6.640.191,67</b>	
129	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>TAHUN LALU</b>													
130	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik														
131	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>SUB JUMLAH A</b>						-	-		-	-	-		
132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
133	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Kijang Innova Tahun 2008 (BG. 1022 JZ)	14.30.11.0008.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	820.200,00			751.850,00	751.850,00	68.350,00		
134	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Minibus Avanza Tahun 2011 (BG. 1126 JZ)	14.30.11.0009.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	4.677.200,00			4.287.433,33	4.287.433,33	389.766,67		



No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
									10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
135	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Minibus Avanza Tahun 2012 (BG. 1198 JZ)	14.30.11.0010.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	5.126.600,00			4.699.383,33	4.699.383,33	427.216,67	
136	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Rush 1.5 Tahun 2013 (BG. 1236 JZ)	14.30.11.0011.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	4.705.760,00			4.313.813,33	4.313.813,33	392.146,67	
137	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Nissan Tahun 2013 (BG. 39 J)	14.30.11.0012.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	4.921.850,00			4.511.695,83	4.511.695,83	410.154,17	
138	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Minibus Avanza Tahun 2013 (BG. 1270 JZ)	14.30.11.0013.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	4.242.710,00			3.889.150,83	3.889.150,83	353.559,17	
139	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Mitsubishi Triton Tahun 2018 (BG. 9130 JZ)	14.30.11.0014.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	7.337.000,00			6.725.583,33	6.725.583,33	611.416,67	
140	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Venture Tahun 2017 (BG. 1345 JZ)	14.30.11.0014.01.20	PT. Asuransi Umum Videi	12 bulan	08/01/2020	08/01/2021	5.390.600,00			4.941.383,33	4.941.383,33	449.216,67	
141	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>37.221.920,00</b>	-	-	<b>34.120.093,31</b>	<b>34.120.093,31</b>	<b>3.101.826,69</b>	
142	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>TOTAL A+B</b>						<b>37.221.920,00</b>	-	-	<b>34.120.093,31</b>	<b>34.120.093,31</b>	<b>3.101.826,69</b>	
143	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>TAHUN LALU</b>												
144	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								-	-	-	-	-	
145	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>SUB JUMLAH A</b>						-	-	-	-	-	-	
146	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
147	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Asuransi Kendaraan Dinas Avanza (BG. 1378 JZ)	3402210120000011	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	15/01/2020	15/01/2021	4.906.000,00			4.497.166,67	4.497.166,67	408.833,33	
148	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Hilux (BG. 8124 JZ)	3402210120000011	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	15/01/2020	15/01/2021	4.977.700,00			4.562.891,67	4.562.891,67	414.808,33	
149	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Hilux (BG. 9056 JZ)	3402210120000011	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	15/01/2020	15/01/2021	5.114.000,00			4.687.833,33	4.687.833,33	426.166,67	
150	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Asuransi Kendaraan Dinas Toyota Fortuner (BG. 1264 JZ)	3402210120000011	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	15/01/2020	15/01/2021	5.951.500,00			5.455.541,67	5.455.541,67	495.958,33	
151	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>20.949.200,00</b>	-	-	<b>19.203.433,34</b>	<b>19.203.433,34</b>	<b>1.745.766,66</b>	
152	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>TOTAL A+B</b>						<b>20.949.200,00</b>	-	-	<b>19.203.433,34</b>	<b>19.203.433,34</b>	<b>1.745.766,66</b>	
153	Dinas Sosial	<b>TAHUN LALU</b>												
154	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 9065 JZ	FP3302011900001	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2019	25/01/2020	5.830.000,00	5.344.166,67	485.833,33	485.833,33	5.830.000,00	-	
155	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 1110 JZ	FP3302011900001	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2019	25/01/2020	5.413.000,00	4.961.916,67	451.083,33	451.083,33	5.413.000,00	-	
156	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 1151 JZ	FP3302011900001	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2019	25/01/2020	5.286.500,00	4.845.958,33	440.541,67	440.541,67	5.286.500,00	-	
157	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 1112 JZ	FP3302011900001	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2019	25/01/2020	5.896.000,00	5.404.666,67	491.333,33	491.333,33	5.896.000,00	-	
158	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 9025 JZ	FP3302011900001	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2019	25/01/2020	5.574.500,00	5.109.958,33	464.541,67	464.541,67	5.574.500,00	-	
159	Dinas Sosial	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>28.000.000,00</b>	<b>25.666.666,67</b>	<b>2.333.333,33</b>	<b>2.333.333,33</b>	<b>28.000.000,00</b>	-	
160	Dinas Sosial	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
161	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan TBA Toyota New Kijang Innova 2.4 M/T Diesel Tahun 2019	1702011900175	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2020	25/01/2021	8.872.375,00			8.133.010,42	8.133.010,42	739.364,58	
162	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 1110 JZ Xenia Tahun 2011	1702011900175	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2020	25/01/2021	4.408.225,00			4.040.872,92	4.040.872,92	367.352,08	
163	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 1112 JZ Toyota Avanza Tahun 2010	1702011900175	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2020	25/01/2021	4.525.750,00			4.148.604,17	4.148.604,17	377.145,83	
164	Dinas Sosial	Asuransi Kendaraan BG 9025 JZ Toyota Hilux 2.5 G	1702011900175	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	25/01/2020	25/01/2021	6.686.500,00			6.129.291,67	6.129.291,67	557.208,33	
165	Dinas Sosial	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>24.492.850,00</b>	-	-	<b>22.451.779,18</b>	<b>22.451.779,18</b>	<b>2.041.070,82</b>	
166	Dinas Sosial	<b>TOTAL A+B</b>						<b>52.492.850,00</b>	<b>25.666.666,67</b>	<b>2.333.333,33</b>	<b>24.785.112,51</b>	<b>24.785.112,51</b>	<b>2.041.070,82</b>	
167	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>TAHUN LALU</b>												
168	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 53 JZ	1702011900051 TGL 24-04-2019	PT. ASURANSI ASPAN	12 bulan	24/04/2019	24/04/2020	5.123.450,00	3.415.633,33	1.707.816,67	1.707.816,67	5.123.450,00	-	
169	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 9002 JZ	1702011900051 TGL 24-04-2019	PT. ASURANSI ASPAN	12 bulan	24/04/2019	24/04/2020	7.441.200,00	4.960.800,00	2.480.400,00	2.480.400,00	7.441.200,00	-	
170	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 1207 JZ	1702011900051 TGL 24-04-2019	PT. ASURANSI ASPAN	12 bulan	24/04/2019	24/04/2020	4.675.960,00	3.117.306,67	1.558.653,33	1.558.653,33	4.675.960,00	-	
171	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 1098 JZ	1702011900051 TGL 24-04-2019	PT. ASURANSI ASPAN	12 bulan	24/04/2019	24/04/2020	4.972.050,00	3.314.700,00	1.657.350,00	1.657.350,00	4.972.050,00	-	
172	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 1222 JZ	1702011900051 TGL 24-04-2019	PT. ASURANSI ASPAN	12 bulan	24/04/2019	24/04/2020	5.093.700,00	3.395.800,00	1.697.900,00	1.697.900,00	5.093.700,00	-	
173	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 1146 JZ	1702011900051 TGL 24-04-2019	PT. ASURANSI ASPAN	12 bulan	24/04/2019	24/04/2020	4.299.150,00	2.866.100,00	1.433.050,00	1.433.050,00	4.299.150,00	-	
174	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 9006 JZ	1702011900051 TGL 24-04-2019	PT. ASURANSI ASPAN	12 bulan	24/04/2019	24/04/2020	2.197.900,00	1.465.266,67	732.633,33	732.633,33	2.197.900,00	-	
175	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>33.803.410,00</b>	<b>22.535.606,67</b>	<b>11.267.803,33</b>	<b>11.267.803,33</b>	<b>33.803.410,00</b>	-	
176	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
177	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Asuransi Kendaraan BG 1359 JZ	34022220000499 TGL 11-05-2020	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	05/05/2020	05/05/2021	9.310.100,00			5.430.891,67	5.430.891,67	3.879.208,33	
178	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>9.310.100,00</b>	-	-	<b>5.430.891,67</b>	<b>5.430.891,67</b>	<b>3.879.208,33</b>	
179	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>TOTAL A+B</b>						<b>43.113.510,00</b>	<b>22.535.606,67</b>	<b>11.267.803,33</b>	<b>16.698.695,00</b>	<b>39.234.301,67</b>	<b>3.879.208,33</b>	
180	Dinas Ketahanan Pangan	<b>TAHUN LALU</b>												
181	Dinas Ketahanan Pangan								-	-	-	-	-	

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
182	Dinas Ketahanan Pangan	<b>SUB JUMLAH A</b>						-	-	-	-	-	-	-
183	Dinas Ketahanan Pangan	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
184	Dinas Ketahanan Pangan													
185	Dinas Ketahanan Pangan	<b>SUB JUMLAH B</b>						-	-	-	-	-	-	-
186	Dinas Ketahanan Pangan	<b>TOTAL A+B</b>						-	-	-	-	-	-	-
187	Dinas Lingkungan Hidup	<b>TAHUN LALU</b>												
188	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1074 JZ Innova Tahun 2010	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	6.900.100,00	5.750.083,33	1.150.016,67	1.150.016,67	6.900.100,00	-	-
189	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1231 JZ Terios F700RG TX MT Tahun 2013	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	5.503.450,00	4.586.208,33	917.241,67	917.241,67	5.503.450,00	-	-
190	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 9020 JZ Hilux 2.5 E Double Cabin (4x4) M/T Tahun 2013	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	7.731.600,00	6.443.000,00	1.288.600,00	1.288.600,00	7.731.600,00	-	-
191	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 8047 JZ BT-50 Tahun 2008	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	4.199.150,00	3.499.291,67	699.858,33	699.858,33	4.199.150,00	-	-
192	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1235 JZ Toyota New Avanza Tahun 2013	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	5.503.450,00	4.586.208,33	917.241,67	917.241,67	5.503.450,00	-	-
193	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1240 JZ Toyota New Avanza Tahun 2013	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	5.503.450,00	4.586.208,33	917.241,67	917.241,67	5.503.450,00	-	-
194	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1127 JZ Toyota Avanza Tahun 2011	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	5.344.800,00	4.454.000,00	890.800,00	890.800,00	5.344.800,00	-	-
195	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1172 JZ Innova Tahun 2012	1702011900011	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	6.925.850,00	5.771.541,67	1.154.308,33	1.154.308,33	6.925.850,00	-	-
196	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5958 JZ Honda Revo	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	391.125,00	325.937,50	65.187,50	65.187,50	391.125,00	-	-
197	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5960 JZ Honda Revo	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	391.125,00	325.937,50	65.187,50	65.187,50	391.125,00	-	-
198	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5961 JZ Honda Revo	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	391.125,00	325.937,50	65.187,50	65.187,50	391.125,00	-	-
199	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5962 JZ Honda Revo	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	391.125,00	325.937,50	65.187,50	65.187,50	391.125,00	-	-
200	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5942 JZ Kawasaki LX 150C	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	670.500,00	558.750,00	111.750,00	111.750,00	670.500,00	-	-
201	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5959 JZ Honda Revo	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	391.125,00	325.937,50	65.187,50	65.187,50	391.125,00	-	-
202	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 2008 JZ Honda Megapro GL 15A1RR	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	670.500,00	558.750,00	111.750,00	111.750,00	670.500,00	-	-
203	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 2435 JZ Honda Megapro GL 15A1RR	1702021900005	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	10/02/2019	10/02/2020	702.500,00	585.416,67	117.083,33	117.083,33	702.500,00	-	-
204	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kecelakaan	PK/PA-0000035088/EA	PT. Asuransi Jiwasraya	12 bulan	01/08/2019	09/08/2020	13.725.000,00	4.575.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	13.725.000,00	-	-
205	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kecelakaan	530.003354 (N)	PT. Chubb General Insurance Indonesia	12 bulan	31/07/2019	30/07/2020	13.725.000,00	5.718.500,00	8.006.250,00	8.006.250,00	13.725.000,00	-	-
206	Dinas Lingkungan Hidup	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>79.060.975,00</b>	<b>53.302.895,83</b>	<b>25.758.079,17</b>	<b>25.758.079,17</b>	<b>79.060.975,00</b>	-	-
207	Dinas Lingkungan Hidup	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
208	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5958 JZ Honda Revo	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	373.150,00			310.958,33	310.958,33	62.191,67	
209	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5960 JZ Honda Revo	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	373.150,00			310.958,33	310.958,33	62.191,67	
210	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5961 JZ Honda Revo	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	373.150,00			310.958,33	310.958,33	62.191,67	
211	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5962 JZ Honda Revo	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	373.150,00			310.958,33	310.958,33	62.191,67	
212	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5942 JZ Kawasaki LX 150C	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	636.550,00			530.458,33	530.458,33	106.091,67	
213	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 5959 JZ Honda Revo	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	373.150,00			310.958,33	310.958,33	62.191,67	
214	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 2008 JZ Honda Megapro GL 15A1RR	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	636.550,00			530.458,33	530.458,33	106.091,67	
215	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 2435 JZ Honda Megapro GL 15A1RR	3402050220000001	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	686.550,00			572.125,00	572.125,00	114.425,00	
216	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1074 JZ Innova Tahun 2010	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	6.472.500,00			5.393.750,00	5.393.750,00	1.078.750,00	
217	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1231 JZ Terios F700RG TX MT Tahun 2013	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	5.129.200,00			4.274.333,33	4.274.333,33	854.866,67	
218	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 9020 JZ Hilux 2.5 E Double Cabin (4x4) M/T Tahun 2013	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	6.582.500,00			5.485.416,67	5.485.416,67	1.097.083,33	
219	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 8047 JZ Mazda BT-50 Tahun 2008	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	5.748.600,00			4.790.500,00	4.790.500,00	958.100,00	
220	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1235 JZ Toyota New Avanza Tahun 2013	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	5.129.200,00			4.274.333,33	4.274.333,33	854.866,67	
221	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1240 JZ Toyota New Avanza Tahun 2013	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	5.129.200,00			4.274.333,33	4.274.333,33	854.866,67	
222	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1127 JZ Toyota New Avanza Tahun 2011	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	4.912.000,00			4.093.333,33	4.093.333,33	818.666,67	
223	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 1172 JZ Innova Tahun 2012	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	6.452.700,00			5.377.250,00	5.377.250,00	1.075.450,00	
224	Dinas Lingkungan Hidup	Asuransi Kendaraan BG 8130 JZ Toyota Hilux 2.5 E Double Cabin Tahun 2019	3402210220000003	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	8.324.750,00			6.937.291,67	6.937.291,67	1.387.458,33	
225	Dinas Lingkungan Hidup	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>57.706.050,00</b>	-	-	<b>48.088.374,97</b>	<b>48.088.374,97</b>	<b>9.617.675,03</b>	
226	Dinas Lingkungan Hidup	<b>TOTAL A+B</b>						<b>136.767.025,00</b>	<b>53.302.895,83</b>	<b>25.758.079,17</b>	<b>73.846.454,14</b>	<b>127.149.349,97</b>	<b>9.617.675,03</b>	
227	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>TAHUN LALU</b>												

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020			Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
228	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova Tahun 2008 BG 1117 JZ	34022219000305 Tgl 21 Februari 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	28/02/2019	28/02/2020	5.199.700,00	4.333.083,33	866.616,67	866.616,67	5.199.700,00	-	-	
229	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Nissan Xtrail Tahun 2011 BG 57 J	34022219000532 Tgl 08 April 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	21/04/2019	21/04/2020	5.675.200,00	3.783.466,67	1.891.733,33	1.891.733,33	5.675.200,00	-	-	
230	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Hilux DC G MT Tahun 2014 BG 9037 JZ	34022219000533 Tgl 08 April 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	21/04/2019	21/04/2020	6.738.100,00	4.492.066,67	2.246.033,33	2.246.033,33	6.738.100,00	-	-	
231	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Hilux DC G MT Tahun 2015 BG 9045 JZ	34022219000531 Tgl 08 April 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	21/04/2019	21/04/2020	7.279.500,00	4.853.000,00	2.426.500,00	2.426.500,00	7.279.500,00	-	-	
232	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Toyota New Kijang Innova BG TBA	34022219001508 Tgl 23 Oktober 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	21/10/2019	21/10/2020	5.559.850,00	926.641,67	4.633.208,33	4.633.208,33	5.559.850,00	-	-	
233	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 M/T BG 1215 JZ	34022219001620 Tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	20/11/2019	20/11/2020	5.154.250,00	429.520,83	4.724.729,17	4.724.729,17	5.154.250,00	-	-	
234	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 Tahun 2013 BG 1216 JZ	34022219001619 Tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	20/11/2019	20/11/2020	5.154.250,00	429.520,83	4.724.729,17	4.724.729,17	5.154.250,00	-	-	
235	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 Tahun 2013 BG 1217 JZ	34022219001618 Tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	20/11/2019	20/11/2020	5.154.250,00	429.520,83	4.724.729,17	4.724.729,17	5.154.250,00	-	-	
236	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Hilux Tahun 2013 BG 9069 JZ	34022219001637 Tgl 20 Nopember 2019	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	20/11/2019	20/11/2020	5.358.600,00	446.550,00	4.912.050,00	4.912.050,00	5.358.600,00	-	-	
237	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>SUB JUMLAH A</b>							<b>61.273.700,00</b>	<b>20.123.370,83</b>	<b>31.150.329,17</b>	<b>31.150.329,17</b>	<b>61.273.700,00</b>	-	-
238	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
239	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova Tahun 2019 BG 1397 JZ	34022220001199 Tgl 09 Oktober 2020	PT. Asuransi Ramayana Tbk	12 bulan	21/10/2020	21/10/2021	9.060.200,00	-	-	1.510.033,33	1.510.033,33	7.550.166,67	-	
240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>SUB JUMLAH B</b>							<b>9.060.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.510.033,33</b>	<b>1.510.033,33</b>	<b>7.550.166,67</b>	-
241	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>TOTAL A+B</b>							<b>60.333.900,00</b>	<b>20.123.370,83</b>	<b>31.160.329,17</b>	<b>32.660.362,50</b>	<b>52.783.733,33</b>	<b>7.550.166,67</b>	-
242	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>TAHUN LALU</b>													
243	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Toyota / Kijang Innova BG 38 J (Mini Bus )	M01-06-09-00000254	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	6.687.000,00	1.671.750,00	5.015.250,00	5.015.250,00	6.687.000,00	-	-	
244	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Daihatsu / Terios TX - MT BG 1096 JZ (Mini Bus )	M01-06-09-00000252	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	6.215.750,00	1.553.937,50	4.661.812,50	4.661.812,50	6.215.750,00	-	-	
245	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Toyota / Kijang Innova BG 1273 JZ (Mini Bus )	M01-06-09-00000253	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	7.410.750,00	1.852.687,50	5.558.062,50	5.558.062,50	7.410.750,00	-	-	
246	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Toyota / Hilux BG 1249 JZ (Mobil )	M01-06-09-00000260	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	10.188.500,00	2.547.125,00	7.641.375,00	7.641.375,00	10.188.500,00	-	-	
247	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Toyota / Hilux BG 9075 JZ (Mobil )	M01-06-09-00000261	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	10.188.500,00	2.547.125,00	7.641.375,00	7.641.375,00	10.188.500,00	-	-	
248	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Daihatsu / Terios BG 1299JZ (Mini Bus )	M01-06-09-00000251	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	5.393.000,00	1.348.250,00	4.044.750,00	4.044.750,00	5.393.000,00	-	-	
249	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Daihatsu / Terios 1301 JZ (Mini Bus )	M01-06-09-00000262	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	5.393.000,00	1.348.250,00	4.044.750,00	4.044.750,00	5.393.000,00	-	-	
250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nissan / Frontier BG 9021 JZ (Mobil )	M01-06-09-00000283	PT.Asuransi tob	12 Bulan	15/09/2019	15/09/2020	8.363.700,00	2.090.925,00	6.272.775,00	6.272.775,00	8.363.700,00	-	-	
251	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Yamaha Mio Soul GT BG 5835 JZ (Sepeda Motor )	M02-06-12-00003168	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	126.600,00	-	126.600,00	126.600,00	126.600,00	-	-	
252	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Honda Vario M/T BG 2782 JZ	M02-06-12-00003167	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	288.000,00	-	288.000,00	288.000,00	288.000,00	-	-	
253	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Honda Vario M/T BG 2783 JZ	M02-06-12-2019-0003172	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	288.000,00	-	288.000,00	288.000,00	288.000,00	-	-	
254	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Honda Vario M/T BG 2784 JZ	M02-06-12-00003169	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	288.000,00	-	288.000,00	288.000,00	288.000,00	-	-	
255	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Yamaha Mio GT BG 2574 JZ (Sepeda Motor )	M02-06-12-00003165	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	161.800,00	-	161.800,00	161.800,00	161.800,00	-	-	
256	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Yamaha Mio GT BG 2573 JZ (Sepeda Motor )	M02-06-12-00003166	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2019	161.800,00	-	161.800,00	161.800,00	161.800,00	-	-	
257	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Yamaha Mio GT BG 2572 JZ (Sepeda Motor )	M02-06-12-00003171	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	161.800,00	-	161.800,00	161.800,00	161.800,00	-	-	
258	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Yamaha Vixion GT BG 2404 JZ (Sepeda Motor )	M02-06-12-00003163	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	267.400,00	-	267.400,00	267.400,00	267.400,00	-	-	
259	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Honda AF11202 BG 2711 JZ (Sepeda Motor)	M02-06-12-00003162	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	214.600,00	-	214.600,00	214.600,00	214.600,00	-	-	
260	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Honda AF11202 BG 2710 JZ (Sepeda Motor)	M02-06-12-00003170	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	214.600,00	-	214.600,00	214.600,00	214.600,00	-	-	
261	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Honda AF11202 BG 2708 JZ (Sepeda Motor)	M02-06-12-00003164	PT.Asuransi tob	12 Bulan	26/12/2019	26/12/2020	214.600,00	-	214.600,00	214.600,00	214.600,00	-	-	
262	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>SUB JUMLAH A</b>							<b>62.227.400,00</b>	<b>14.960.050,00</b>	<b>47.267.350,00</b>	<b>47.267.350,00</b>	<b>62.227.400,00</b>	-	-
263	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
264	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Toyota / Kijang Innova BG 38 J	M01-06-09-2020-00000595 Tgl 29 September 2020	PT. Asuransi Total Bersama	12 Bulan	15/09/2020	15/09/2021	5.000.000,00	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00	-	
265	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>SUB JUMLAH B</b>							<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	-
266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>TOTAL A+B</b>							<b>67.227.400,00</b>	<b>14.960.050,00</b>	<b>47.267.350,00</b>	<b>48.517.350,00</b>	<b>63.477.400,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	-
267	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>TAHUN LALU</b>													
268	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 35 J	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	5.275.150,00	2.197.979,17	3.077.170,83	3.077.170,83	5.275.150,00	-	-	
269	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 8066 JZ	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	6.230.050,00	2.595.854,17	3.634.195,83	3.634.195,83	6.230.050,00	-	-	
270	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 8071 JZ	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	6.761.500,00	2.817.291,67	3.944.208,33	3.944.208,33	6.761.500,00	-	-	
271	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 1276 JZ	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	4.714.600,00	1.964.416,67	2.750.183,33	2.750.183,33	4.714.600,00	-	-	

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020			Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
272	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 7017 JZ	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	11.267.550,00	4.694.812,50	6.572.737,50	6.572.737,50	11.267.550,00	-	-	
273	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 7016 JZ	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	5.753.000,00	2.397.083,33	3.355.916,67	3.355.916,67	5.753.000,00	-	-	
274	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 9083 JZ	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	5.723.000,00	2.384.583,33	3.338.416,67	3.338.416,67	5.723.000,00	-	-	
275	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan BG 1031 JZ	3402210719000006 tgl 10 Juli 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	03/07/2019	03/07/2020	3.851.500,00	1.604.791,67	2.246.708,33	2.246.708,33	3.851.500,00	-	-	
276	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>49.576.350,00</b>	<b>20.656.812,50</b>	<b>28.919.537,50</b>	<b>28.919.537,50</b>	<b>49.576.350,00</b>	-	-	
277	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
278	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innov V BG 35 J	1702012000109 tgl 11 Agustus 2020	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	06/08/2020	06/08/2021	5.241.200,00			1.747.066,67	1.747.066,67	3.494.133,33		
279	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Strada BG 8066 JZ	1702012000109 tgl 11 Agustus 2021	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	06/08/2020	06/08/2021	4.858.500,00			1.619.500,00	1.619.500,00	3.239.000,00		
280	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Strada BG 9083 JZ	1702012000109 tgl 11 Agustus 2022	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	06/08/2020	06/08/2021	4.781.250,00			1.593.750,00	1.593.750,00	3.187.500,00		
281	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan Hino Bus BG 7016 JZ	1702012000109 tgl 11 Agustus 2023	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	06/08/2020	06/08/2021	2.680.750,00			893.583,33	893.583,33	1.787.166,67		
282	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan Isuzu NKR 55 CO E2-1 LWB Micro Bus BG 7016 JZ	1702012000109 tgl 11 Agustus 2024	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	06/08/2020	06/08/2021	4.884.250,00			1.628.083,33	1.628.083,33	3.256.166,67		
283	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Asuransi Kendaraan Mitsubishi L300 BG 9103 JZ	1702012000109 tgl 11 Agustus 2025	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	06/08/2020	06/08/2021	3.545.750,00			1.181.916,67	1.181.916,67	2.363.833,33		
284	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>25.991.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.663.900,00</b>	<b>8.663.900,00</b>	<b>17.327.800,00</b>		
285	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>TOTAL A+B</b>						<b>75.568.050,00</b>	<b>20.656.812,50</b>	<b>28.919.537,50</b>	<b>37.583.437,50</b>	<b>58.240.250,00</b>	<b>17.327.800,00</b>		
286	Dinas Perhubungan	<b>TAHUN LALU</b>													
287	Dinas Perhubungan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innov All New V M/T Diesel BG 1031 JS	1900907906 tgl 20 Maret 2019	Asuransi Astra Buana	12 bulan	16/04/2019	16/04/2020	7.800.000,00	5.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	-	-	
288	Dinas Perhubungan	Asuransi Kendaraan Tarios TX No Mesin DCS4054 BG 1150 JZ	1702011900142 tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	28/11/2019	28/11/2020	3.724.187,00	310.348,92	3.413.838,08	3.413.838,08	3.724.187,00	-	-	
289	Dinas Perhubungan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innov Diesel New V M/T No Mesin 2KD646841 BG 1305 JZ	1702011900142 tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	28/11/2019	28/11/2020	4.277.200,00	356.433,33	3.920.766,67	3.920.766,67	4.277.200,00	-	-	
290	Dinas Perhubungan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux New 2.0 G Double Cab BG 9026 JZ	1702011900143 tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	16/12/2019	16/12/2020	5.284.050,00	-	5.284.050,00	5.284.050,00	5.284.050,00	-	-	
291	Dinas Perhubungan	Asuransi Kendaraan Daihatsu No. Mesin DEE4169 BG 1263 JZ	1702011900143 tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	16/12/2019	16/12/2020	3.521.000,00	-	3.521.000,00	3.521.000,00	3.521.000,00	-	-	
292	Dinas Perhubungan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 G Vnt No Mesin 2KDS166129 BG 9023 JZ	1702011900143 tgl 18 Nopember 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	16/12/2019	16/12/2020	5.340.000,00	-	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	-	-	
293	Dinas Perhubungan	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>29.946.437,00</b>	<b>5.866.782,25</b>	<b>24.079.654,75</b>	<b>24.079.654,75</b>	<b>29.946.437,00</b>	-	-	
294	Dinas Perhubungan	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
295	Dinas Perhubungan														
296	Dinas Perhubungan	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
297	Dinas Perhubungan	<b>TOTAL A+B</b>						<b>29.946.437,00</b>	<b>5.866.782,25</b>	<b>24.079.654,75</b>	<b>24.079.654,75</b>	<b>29.946.437,00</b>	-	-	
298	Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>TAHUN LALU</b>													
299	Dinas Komunikasi dan Informatika	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5 D GLX 4x4 M/T BG 1223 JZ	1702011900097 tgl 27 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	01/09/2019	01/09/2020	8.946.500,00	2.236.625,00	6.709.875,00	6.709.875,00	8.946.500,00	-	-	
300	Dinas Komunikasi dan Informatika	Asuransi Kendaraan Nissan X-Trail 2.0 2 WD MT BG 44 JZ	1702011900097 tgl 27 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	01/09/2019	01/09/2020	6.336.800,00	1.584.200,00	4.752.600,00	4.752.600,00	6.336.800,00	-	-	
301	Dinas Komunikasi dan Informatika	Asuransi Kendaraan New Avanza 1.3 G M/T BG 1071 JZ	1702011900097 tgl 27 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	01/09/2019	01/09/2020	6.506.800,00	1.626.700,00	4.880.100,00	4.880.100,00	6.506.800,00	-	-	
302	Dinas Komunikasi dan Informatika	Asuransi Kendaraan Suzuki APV GC415 APV STD BG 1142 JZ	1702011900097 tgl 27 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	01/09/2019	01/09/2020	6.269.960,00	1.567.490,00	4.702.470,00	4.702.470,00	6.269.960,00	-	-	
303	Dinas Komunikasi dan Informatika	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innov BG 1115 JZ	1702011900097 tgl 27 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	01/09/2019	01/09/2020	7.585.750,00	1.896.437,50	5.689.312,50	5.689.312,50	7.585.750,00	-	-	
304	Dinas Komunikasi dan Informatika	Asuransi Kendaraan Isuzu New Panther BG 1131 JZ	1702011900097 tgl 27 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	01/09/2019	01/09/2020	7.283.250,00	1.820.812,50	5.462.437,50	5.462.437,50	7.283.250,00	-	-	
305	Dinas Komunikasi dan Informatika	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Strada C1 2.8 AM DC GLX (4x4) M/T BG 56 JZ	1702011900097 tgl 27 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	01/09/2019	01/09/2020	5.947.000,00	1.486.750,00	4.460.250,00	4.460.250,00	5.947.000,00	-	-	
306	Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>48.876.060,00</b>	<b>12.219.015,00</b>	<b>36.657.045,00</b>	<b>36.657.045,00</b>	<b>48.876.060,00</b>	-	-	
307	Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
308	Dinas Komunikasi dan Informatika														

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
309	Dinas Komunikasi dan Informatika	SUB JUMLAH B							-	-	-	-	-	-
310	Dinas Komunikasi dan Informatika	TOTAL A+B						48.876.060,00	12.219.015,00	36.657.045,00	36.657.045,00	48.876.060,00	-	-
311	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	TAHUN LALU												
312	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 1346 JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	6.640.000,00	5.533.333,33	1.106.666,67	1.106.666,67	6.640.000,00	-	-
313	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 9033 JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	5.844.300,00	4.870.250,00	974.050,00	974.050,00	5.844.300,00	-	-
314	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 8067 JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	5.437.700,00	4.531.416,67	906.283,33	906.283,33	5.437.700,00	-	-
315	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 1050 JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	4.137.040,00	3.447.533,33	689.506,67	689.506,67	4.137.040,00	-	-
316	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 1292 JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	4.105.000,00	3.420.833,33	684.166,67	684.166,67	4.105.000,00	-	-
317	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan TBA NO MESIN 2GD0624994	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	4.912.000,00	4.093.333,33	818.666,67	818.666,67	4.912.000,00	-	-
318	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 1086 JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	4.233.160,00	3.527.833,33	705.326,67	705.326,67	4.233.160,00	-	-
319	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 1124JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	3.255.320,00	2.712.766,67	542.553,33	542.553,33	3.255.320,00	-	-
320	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 8095JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	5.474.000,00	4.561.666,67	912.333,33	912.333,33	5.474.000,00	-	-
321	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 8094 JZ	110000221031900234	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	20/02/2019	20/02/2020	5.546.000,00	4.621.666,67	924.333,33	924.333,33	5.546.000,00	-	-
322	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	SUB JUMLAH A						49.584.520,00	41.320.433,33	8.264.086,67	8.264.086,67	49.584.520,00	-	-
323	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	TAHUN BERJALAN												
324	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 1346 JZ	110000221032000189 tanggal 23 Maret 2020	PT. Jasaraharja Putera	12 bulan	23/03/2020	23/03/2021	7.585.200,00		5.688.900,00	5.688.900,00	1.896.300,00		
325	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 9033 JZ	110000221032000189 tanggal 23 Maret 2020	PT. Jasaraharja Putera	12 bulan	23/03/2020	23/03/2021	6.364.200,00		4.773.150,00	4.773.150,00	1.591.050,00		
326	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 1292 JZ	110000221032000189 tanggal 23 Maret 2020	PT. Jasaraharja Putera	12 bulan	23/03/2020	23/03/2021	4.495.100,00		3.371.325,00	3.371.325,00	1.123.775,00		
327	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 8116 JZ	110000221032000189 tanggal 23 Maret 2020	PT. Jasaraharja Putera	12 bulan	23/03/2020	23/03/2021	9.783.000,00		7.337.250,00	7.337.250,00	2.445.750,00		
328	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG JZ	110000221032000189 tanggal 23 Maret 2020	PT. Jasaraharja Putera	12 bulan	23/03/2020	23/03/2021	9.783.000,00		7.337.250,00	7.337.250,00	2.445.750,00		
329	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 8095 JZ	110000221032000189 tanggal 23 Maret 2020	PT. Jasaraharja Putera	12 bulan	23/03/2020	23/03/2021	5.583.750,00		4.187.812,50	4.187.812,50	1.395.937,50		
330	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Asuransi Kendaraan BG 8094 JZ	110000221032000189 tanggal 23 Maret 2020	PT. Jasaraharja Putera	12 bulan	23/03/2020	23/03/2021	5.800.150,00		4.350.112,50	4.350.112,50	1.450.037,50		
331	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	SUB JUMLAH B						49.394.400,00	-	-	37.045.800,00	37.045.800,00	12.348.600,00	
332	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	TOTAL A+B						98.978.920,00	41.320.433,33	8.264.086,67	45.309.886,67	86.630.320,00	12.348.600,00	
333	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	TAHUN LALU												
334	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	SUB JUMLAH A							-	-	-	-	-	
335	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	TAHUN BERJALAN												
336	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	SUB JUMLAH B							-	-	-	-	-	
337	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Asuransi Kendaraan TBA Daihatsu All New Terios XAT. Del Tahun 2019	1702012000007	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	22/01/2020	22/01/2021	6.839.500,00		6.269.541,67	6.269.541,67	569.958,33		
338	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Asuransi Kendaraan BG 1399 JZ Toyota Kijang Innova Tahun 2019	1702012000007	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	22/01/2020	22/01/2021	10.769.000,00		9.871.583,33	9.871.583,33	897.416,67		
339	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Asuransi Kendaraan BG 1278 JZ Toyota Rush 1.5 G MIT Tahun 2014	1702012000007	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	22/01/2020	22/01/2021	6.629.500,00		6.077.041,67	6.077.041,67	552.458,33		
340	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	SUB JUMLAH B						24.238.000,00	-	-	22.218.166,67	22.218.166,67	2.019.833,33	
341	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	TOTAL A+B						24.238.000,00	-	-	22.218.166,67	22.218.166,67	2.019.833,33	
342	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	TAHUN LALU												
343	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Innova V BG 1355 JZ	306.601.200.19.00002/000/00 Tgl. 14 Januari 2019	PT. Asuransi Jasindo Oto Plus	12 bulan	11/01/2019	11/01/2020	4.475.750,00		4.102.770,83	372.979,17	372.979,17	4.475.750,00	-
344	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	SUB JUMLAH A						4.475.750,00	4.102.770,83	372.979,17	372.979,17	4.475.750,00	-	
345	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	TAHUN BERJALAN												
346	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova BG 1355 JZ	3402210220000004	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	31/01/2020	31/01/2021	5.131.500,00		4.703.875,00	4.703.875,00	427.625,00		
347	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Fortuner BG 38 J	3402210220000004	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	31/01/2020	31/01/2021	6.177.000,00		5.662.250,00	5.662.250,00	514.750,00		
348	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	SUB JUMLAH B						11.308.500,00	-	-	10.366.125,00	10.366.125,00	942.375,00	
349	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	TOTAL A+B						15.784.250,00	4.102.770,83	372.979,17	10.739.104,17	14.841.875,00	942.375,00	
350	Dinas Perikanan	TAHUN LALU												
351	Dinas Perikanan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova BG 1372 JZ	1702011900074 Tgl. 18 Juni 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	18/06/2019	18/06/2020	5.528.250,00		2.764.125,00	2.764.125,00	5.528.250,00	-	
352	Dinas Perikanan	Asuransi Kendaraan Terios Nomor Mesin DCG2745 BG 1134 JZ	M01-06-12-2019-00000455 Tgl. 04 Desember 2019	PT. Asuransi Total Bersama	12 bulan	29/11/2019	29/11/2020	4.620.000,00		385.000,00	4.235.000,00	4.620.000,00	-	
353	Dinas Perikanan	Asuransi Kendaraan Strada Nomor Mesin 4D56UCFF5502 BG 9044 JZ	340221119000027 Tgl. 29 Nopember 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 bulan	28/11/2019	28/11/2020	6.208.000,00		5.173.333,33	5.690.666,67	6.208.000,00	-	
354	Dinas Perikanan	SUB JUMLAH A						16.356.250,00	3.666.458,33	12.689.791,67	12.689.791,67	16.356.250,00	-	
355	Dinas Perikanan	TAHUN BERJALAN												

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020			Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
356	Dinas Perikanan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova BG 1372 JZ	1702011900074 Tgl. 26 Juni 2020	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	18/06/2020	18/06/2021	5.528.250,00			2.764.125,00	2.764.125,00	2.764.125,00		
357	Dinas Perikanan	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>5.528.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.764.125,00</b>	<b>2.764.125,00</b>	<b>2.764.125,00</b>		
358	Dinas Perikanan	<b>TOTAL A+B</b>						<b>21.884.500,00</b>	<b>3.666.458,33</b>	<b>12.689.791,67</b>	<b>15.453.916,67</b>	<b>19.120.375,00</b>	<b>2.764.125,00</b>		
359	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	<b>TAHUN LALU</b>													
360	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 1255 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	5.790.000,00	1.930.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	5.790.000,00	-		
361	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 9102 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	6.378.000,00	2.126.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00	6.378.000,00	-		
362	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 1129 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	6.805.000,00	2.268.333,33	4.536.666,67	4.536.666,67	6.805.000,00	-		
363	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 1277 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	4.652.000,00	1.550.666,67	3.101.333,33	3.101.333,33	4.652.000,00	-		
364	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 1113 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	5.581.600,00	1.860.533,33	3.721.066,67	3.721.066,67	5.581.600,00	-		
365	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 1221 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	5.290.640,00	1.763.546,67	3.527.093,33	3.527.093,33	5.290.640,00	-		
366	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 9042 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	7.156.500,00	2.385.500,00	4.771.000,00	4.771.000,00	7.156.500,00	-		
367	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	Asuransi Kendaraan BG 9035 JZ	1702011900088 / 01 Agustus 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 Bulan	06/08/2019	06/08/2020	6.150.500,00	2.050.166,67	4.100.333,33	4.100.333,33	6.150.500,00	-		
368	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>47.804.240,00</b>	<b>15.934.746,67</b>	<b>31.869.493,33</b>	<b>31.869.493,33</b>	<b>47.804.240,00</b>	<b>-</b>		
369	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
370	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural														
371	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
372	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural	<b>TOTAL A+B</b>						<b>47.804.240,00</b>	<b>15.934.746,67</b>	<b>31.869.493,33</b>	<b>31.869.493,33</b>	<b>47.804.240,00</b>	<b>-</b>		
373	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<b>TAHUN LALU</b>													
374	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
375	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<b>TAHUN BERJALAN</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
376	Dinas Perkebunan dan Peternakan														
377	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Asuransi Kendaraan Toyota Hiluc 2.4 V Double Cabin BG 8137 JZ	340221062000015 / 01 Juli 2020	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	29/06/2020	29/06/2021	5.885.000,00			2.942.500,00	2.942.500,00	2.942.500,00		
378	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>5.885.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.942.500,00</b>	<b>2.942.500,00</b>	<b>2.942.500,00</b>		
379	Dinas Perkebunan dan Peternakan	<b>TOTAL A+B</b>						<b>5.885.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.942.500,00</b>	<b>2.942.500,00</b>	<b>2.942.500,00</b>		
380	Sekretariat Daerah	<b>TAHUN LALU</b>													
381	Sekretariat Daerah	Asuransi Rumah Dinas Jabatan (Bupati, Wabup, Setda, As I, II, III Kabag Umum, Adm, PUM, Hukum dan ham, organisasi, kesra, adpem, Dharma Wanita) premi asuransi property all risk	1701041900006 tgl 14 Januari 2019	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	01/01/2019	01/01/2020	177.166.745,00	162.402.849,58	14.763.895,42	14.763.895,42	177.166.745,00	-		
382	Sekretariat Daerah	Asuransi Rumah Dinas Jabatan (Bupati, Wabup, Setda, As I, II, III Kabag Umum, Adm, PUM, Hukum dan ham, organisasi, kesra, adpem, Dharma Wanita) asuransi Gempa Bumi Indonesia	1701021900001 tgl 14 Januari 2019	PT. Asuransi ASPAN	12 bulan	01/01/2019	01/01/2020	22.569.736,00	20.688.924,67	1.880.811,33	1.880.811,33	22.569.736,00	-		
383	Sekretariat Daerah	Asuransi Gedung Kantor (Kantor Bupati Banyuasin, Gedung Graha Sedulang Setudung, Gedung Auditorium dan Mess Pemkab Banyuasin) asuransi property all risk	05131100250219 tgl 14 Januari 2019	PT. BERDIKARI INSURANCE	12 bulan	01/01/2019	31/12/2019	135.828.006,00	135.828.006,00	-	-	135.828.006,00	-		
384	Sekretariat Daerah	Asuransi Gedung Kantor (Kantor Bupati Banyuasin, Gedung Graha Sedulang Setudung, Gedung Auditorium dan Mess Pemkab Banyuasin) asuransi Earthquake Insurance	05171100260219 tgl 14 Januari 2019	PT. BERDIKARI INSURANCE	12 bulan	01/01/2019	31/12/2019	63.311.465,00	63.311.465,00	-	-	63.311.465,00	-		
385	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan	FP1502011900003 tgl 14 Januari 2019	PT. ASURANSI INTRA ASIA	12 bulan	01/01/2019	31/12/2019	199.998.352,00	199.998.352,00	-	-	199.998.352,00	-		
386	Sekretariat Daerah	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>598.874.304,00</b>	<b>582.229.597,25</b>	<b>16.644.706,75</b>	<b>16.644.706,75</b>	<b>598.874.304,00</b>	<b>-</b>		
387	Sekretariat Daerah	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
388	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1073 JZ Innova Tahun 2008	14.30.11.0019.02.20 / 31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.302.200,00			4.302.200,00	4.302.200,00	-		
389	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1027 JZ Avanza Tahun 2008	14.30.11.0018.02.20 / 31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	2.566.700,00			2.566.700,00	2.566.700,00	-		
390	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1001 JZ Innova Tahun 2010	14.30.11.0020.02.20/ 31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	3.407.000,00			3.407.000,00	3.407.000,00	-		
391	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 67 JZ Honda CRV Tahun 2012	14.30.11.0021.02.20/ 31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.524.250,00			4.524.250,00	4.524.250,00	-		
392	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 9003 JZ Nissan Navara Tahun 2012	14.30.11.0022.02.20/ 31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.900.300,00			4.900.300,00	4.900.300,00	-		

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020			Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
393	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1320 JZ Toyota Fortuner Tahun 2012	14.30.11.0023.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	6.892.100,00			6.892.100,00	6.892.100,00	-		
394	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 9022 JZ Suzuki APV Tahun 2013	14.30.11.0024.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	3.918.800,00			3.918.800,00	3.918.800,00	-		
395	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1881 JZ Toyota Innova V Tahun 2013	14.30.11.0025.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	3.853.900,00			3.853.900,00	3.853.900,00	-		
396	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1230 JZ Toyota Innova Tahun 2013	14.30.11.0026.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	3.973.800,00			3.973.800,00	3.973.800,00	-		
397	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1245 JZ Hyundai Tahun 2013	14.30.11.0027.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.093.700,00			4.093.700,00	4.093.700,00	-		
398	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1268 JZ Ford Everest Tahun 2013	14.30.11.0028.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.693.200,00			4.693.200,00	4.693.200,00	-		
399	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1260 JZ Mitsubishi Outlander Tahun 2013	14.30.11.0029.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.532.500,00			5.532.500,00	5.532.500,00	-		
400	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1286 JZ Toyota Innova Tahun 2014	14.30.11.0031.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.440.320,00			4.440.320,00	4.440.320,00	-		
401	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1 JZ Toyota Land Cruiser Tahun 2013	14.30.11.0030.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	9.377.000,00			9.377.000,00	9.377.000,00	-		
402	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1272 JZ Isuzu Tersi G T Tahun 2014	14.30.11.0032.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.715.000,00			4.715.000,00	4.715.000,00	-		
403	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 8129 JZ Toyota Hilux Tahun 2014	14.30.11.0033.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.715.000,00			4.715.000,00	4.715.000,00	-		
404	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 9043 JZ Nissan Navara 2.5 L Tahun 2014	14.30.11.0034.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.898.120,00			4.898.120,00	4.898.120,00	-		
405	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1290 JZ Toyota Hi-Ace Tahun 2014	14.30.11.0035.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	3.287.000,00			3.287.000,00	3.287.000,00	-		
406	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1289 JZ Toyota Hi-Ace Tahun 2014	14.30.11.0036.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	3.287.000,00			3.287.000,00	3.287.000,00	-		
407	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 9054 JZ Toyota Hilux Tahun 2015	14.30.11.0040.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	6.938.600,00			6.938.600,00	6.938.600,00	-		
408	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1344 JZ Toyota Innova Venturer Tahun 2017	14.30.11.0041.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	6.066.600,00			6.066.600,00	6.066.600,00	-		
409	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1347 JZ Toyota Innova Venturer Tahun 2017	14.30.11.0042.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	6.066.600,00			6.066.600,00	6.066.600,00	-		
410	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 8113 JZ Toyota Hilux DC Tahun 2018	14.30.11.0043.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	7.440.000,00			7.440.000,00	7.440.000,00	-		
411	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1363 JZ Toyota Innova Tahun 2018	14.30.11.0040.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	7.549.000,00			7.549.000,00	7.549.000,00	-		
412	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1364 JZ Toyota Fortuner Tahun 2018	14.30.11.0045.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.033.000,00			5.033.000,00	5.033.000,00	-		
413	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 8120 JZ Toyota Hilux SC Tahun 2019	14.30.11.0047.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.547.140,00			4.547.140,00	4.547.140,00	-		
414	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1366 JZ Toyota Fortuner Tahun 2018	14.30.11.0046.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.033.000,00			5.033.000,00	5.033.000,00	-		
415	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1379 JZ Toyota Avanza Tahun 2019	14.30.11.0048.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.660.500,00			4.660.500,00	4.660.500,00	-		
416	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1376 JZ Toyota Innova Ven Tahun 2019	14.30.11.0054.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.237.000,00			5.237.000,00	5.237.000,00	-		
417	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 7021 JZ Toyota Hi Ace Tahun 2019	14.30.11.0055.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.366.840,00			5.366.840,00	5.366.840,00	-		
418	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1369 JZ Toyota Innova Ven Tahun 2019	14.30.11.0053.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.237.000,00			5.237.000,00	5.237.000,00	-		
419	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1375 JZ Toyota Innova V Tahun 2019	14.30.11.0049.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.697.000,00			4.697.000,00	4.697.000,00	-		
420	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1377 JZ Toyota Innova V Tahun 2019	14.30.11.0050.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.697.000,00			4.697.000,00	4.697.000,00	-		
421	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1370 JZ Toyota Innova V Tahun 2019	14.30.11.0051.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	4.697.000,00			4.697.000,00	4.697.000,00	-		
422	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 8121 JZ Toyota Hilux DC Tahun 2019	14.30.11.0052.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.148.920,00			5.148.920,00	5.148.920,00	-		
423	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1374 JZ Toyota Fortuner VR2 Tahun 2019	14.30.11.0056.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	6.185.600,00			6.185.600,00	6.185.600,00	-		
424	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1 JZ Toyota Vellfire Tahun 2014	14.30.11.0037.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.770.775,00			5.770.775,00	5.770.775,00	-		
425	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 1402 JZ Toyota Innova Tahun 2015	14.30.11.0038.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	5.042.000,00			5.042.000,00	5.042.000,00	-		
426	Sekretariat Daerah	Asuransi Kendaraan BG 6 JZ Toyota Fortuner Tahun 2015	14.30.11.0039.02.20/31 Januari 2020	PT. Asuransi Umum Videi	12 Bulan	31/01/2020	31/12/2020	6.895.000,00			6.895.000,00	6.895.000,00	-		
427	Sekretariat Daerah	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>199.686.465,00</b>			<b>199.686.465,00</b>	<b>199.686.465,00</b>			
428	Sekretariat Daerah	<b>TOTAL A+B</b>						<b>798.560.769,00</b>	<b>582.229.597,25</b>	<b>16.644.706,75</b>	<b>216.331.171,75</b>	<b>798.560.769,00</b>			
429	Sekretariat DPRD	<b>TAHUN LALU</b>													
430	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2120 JZ	34020505190000001/16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	303.200,00	176.866,67	126.333,33	126.333,33	303.200,00	-		
431	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2134 JZ	34020505190000001/16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-		
432	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2118 JZ	34020505190000001/16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-		
433	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2123 JZ	34020505190000001/16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-		
434	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2119 JZ	34020505190000001/16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-		
435	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2137 JZ	34020505190000001/16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-		

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31 - 12 - 2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
436	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2132 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
437	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2410 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
438	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2121 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
439	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2136 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
440	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2135 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
441	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2122 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
442	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5610 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	274.300,00	160.008,33	114.291,67	114.291,67	274.300,00	-	-
443	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2133 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
444	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5607 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	274.300,00	160.008,33	114.291,67	114.291,67	274.300,00	-	-
445	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5608 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	274.300,00	160.008,33	114.291,67	114.291,67	274.300,00	-	-
446	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5939 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	206.780,00	120.621,67	86.158,33	86.158,33	206.780,00	-	-
447	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5941 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	206.780,00	120.621,67	86.158,33	86.158,33	206.780,00	-	-
448	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5943 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	206.780,00	120.621,67	86.158,33	86.158,33	206.780,00	-	-
449	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5940 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	206.780,00	120.621,67	86.158,33	86.158,33	206.780,00	-	-
450	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5612 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	274.300,00	160.008,33	114.291,67	114.291,67	274.300,00	-	-
451	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5606 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	274.300,00	160.008,33	114.291,67	114.291,67	274.300,00	-	-
452	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5611 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	274.300,00	160.008,33	114.291,67	114.291,67	274.300,00	-	-
453	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5006 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	200.450,00	116.929,17	83.520,83	83.520,83	200.450,00	-	-
454	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5909 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	274.300,00	160.008,33	114.291,67	114.291,67	274.300,00	-	-
455	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2409 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
456	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2138 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
457	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2411 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	253.200,00	147.700,00	105.500,00	105.500,00	253.200,00	-	-
458	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 5044 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	158.250,00	92.312,50	65.937,50	65.937,50	158.250,00	-	-
459	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1048 JZ	34020505190000001 / 16 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	158.250,00	92.312,50	65.937,50	65.937,50	158.250,00	-	-
460	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2 J	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.865.000,00	3.421.250,00	2.443.750,00	2.443.750,00	5.865.000,00	-	-
461	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1777 JZ	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.368.550,00	3.131.654,17	2.236.895,83	2.236.895,83	5.368.550,00	-	-
462	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1237 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.588.300,00	3.259.841,67	2.328.458,33	2.328.458,33	5.588.300,00	-	-
463	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 92 J TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.588.300,00	3.259.841,67	2.328.458,33	2.328.458,33	5.588.300,00	-	-
464	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1248 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.588.300,00	3.259.841,67	2.328.458,33	2.328.458,33	5.588.300,00	-	-
465	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1186 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.481.200,00	3.197.366,67	2.283.833,33	2.283.833,33	5.481.200,00	-	-
466	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1187 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.481.200,00	3.197.366,67	2.283.833,33	2.283.833,33	5.481.200,00	-	-
467	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1188 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.481.200,00	3.197.366,67	2.283.833,33	2.283.833,33	5.481.200,00	-	-
468	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1189 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.481.200,00	3.197.366,67	2.283.833,33	2.283.833,33	5.481.200,00	-	-
469	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1252 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	6.930.900,00	4.043.025,00	2.887.875,00	2.887.875,00	6.930.900,00	-	-
470	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1251 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	6.930.900,00	4.043.025,00	2.887.875,00	2.887.875,00	6.930.900,00	-	-
471	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1354 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	4.869.200,00	2.840.366,67	2.028.833,33	2.028.833,33	4.869.200,00	-	-
472	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 8028 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.585.000,00	3.257.916,67	2.327.083,33	2.327.083,33	5.585.000,00	-	-
473	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 7019 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	6.784.250,00	3.957.479,17	2.826.770,83	2.826.770,83	6.784.250,00	-	-
474	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 7 J TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	6.323.200,00	3.688.533,33	2.634.666,67	2.634.666,67	6.323.200,00	-	-
475	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 8 J TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	6.323.200,00	3.688.533,33	2.634.666,67	2.634.666,67	6.323.200,00	-	-
476	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1094 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	4.828.700,00	2.816.741,67	2.011.958,33	2.011.958,33	4.828.700,00	-	-
477	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 9 JZ TBA	34022105190000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	6.323.200,00	3.688.533,33	2.634.666,67	2.634.666,67	6.323.200,00	-	-



No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31 - 12 - 2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
									10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	
478	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 17 J TBA	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	5.268.400,00	3.073.233,33	2.195.166,67	2.195.166,67	5.268.400,00	-	
479	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1147 JZ TBA	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	4.517.160,00	2.635.010,00	1.882.150,00	1.882.150,00	4.517.160,00	-	
480	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1140 JZ TBA	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	4.586.480,00	2.675.446,67	1.911.033,33	1.911.033,33	4.586.480,00	-	
481	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1001 XL TBA	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	9.959.250,00	5.809.562,50	4.149.687,50	4.149.687,50	9.959.250,00	-	
482	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1111 XX	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	8.204.750,00	4.786.104,17	3.418.645,83	3.418.645,83	8.204.750,00	-	
483	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1112 XX	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	8.204.750,00	4.786.104,17	3.418.645,83	3.418.645,83	8.204.750,00	-	
484	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1113 XX	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	8.204.750,00	4.786.104,17	3.418.645,83	3.418.645,83	8.204.750,00	-	
485	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan TBA BLACK	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	6.769.250,00	3.948.729,17	2.820.520,83	2.820.520,83	6.769.250,00	-	
486	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1250 JZ TBA	3402210519000014 / 24 Mei 2019	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	16/05/2019	16/05/2020	1.347.400,00	785.983,33	561.416,67	561.416,67	1.347.400,00	-	
487	Sekretariat DPRD	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>169.249.360,00</b>	<b>98.728.793,33</b>	<b>70.520.566,67</b>	<b>70.520.566,67</b>	<b>169.249.360,00</b>	-	
488	Sekretariat DPRD	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
489	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 2 J	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	5.866.250,00			3.316.979,17	3.316.979,17	2.369.270,83	
490	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1237 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	5.747.760,00			3.352.860,00	3.352.860,00	2.394.900,00	
491	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 92 J	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	5.747.760,00			3.352.860,00	3.352.860,00	2.394.900,00	
492	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1248 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	5.747.760,00			3.352.860,00	3.352.860,00	2.394.900,00	
493	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 7019 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	6.889.500,00			3.902.208,33	3.902.208,33	2.787.291,67	
494	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 7 J	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	6.294.600,00			3.671.850,00	3.671.850,00	2.622.750,00	
495	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 8 J	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	6.294.600,00			3.671.850,00	3.671.850,00	2.622.750,00	
496	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 9 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	6.294.600,00			3.671.850,00	3.671.850,00	2.622.750,00	
497	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1507 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	5.148.000,00			3.003.000,00	3.003.000,00	2.145.000,00	
498	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1380 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	9.879.500,00			5.763.041,67	5.763.041,67	4.116.458,33	
499	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1382 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	8.172.850,00			4.767.495,83	4.767.495,83	3.405.354,17	
500	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1383 JZ	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	8.172.850,00			4.767.495,83	4.767.495,83	3.405.354,17	
501	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 1384 Z	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	8.172.850,00			4.767.495,83	4.767.495,83	3.405.354,17	
502	Sekretariat DPRD	Asuransi Kendaraan BG 17 J	3402210520000013 / 18 Mei 2020	Malacca Trust Wuwungan Insurance	12 Bulan	18/05/2020	18/05/2021	6.739.500,00			3.931.375,00	3.931.375,00	2.808.125,00	
503	Sekretariat DPRD	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>94.788.380,00</b>	-	-	<b>55.293.221,66</b>	<b>55.293.221,66</b>	<b>38.495.158,34</b>	
504	Sekretariat DPRD	<b>TOTAL A+B</b>						<b>264.037.740,00</b>	<b>98.728.793,33</b>	<b>70.520.566,67</b>	<b>125.813.785,33</b>	<b>224.542.581,66</b>	<b>38.495.158,34</b>	
505	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<b>TAHUN LALU</b>												
506	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Asuransi Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 G MT BG 1167 JZ	P60301100870002 / 24 Juli 2019	PT. ASURANSI BINTANG Tbk	12 Bulan	26/07/2019	26/07/2020	4.732.200,00	1.971.750,00	2.760.450,00	2.760.450,00	4.732.200,00	-	
507	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Asuransi Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 G MT BG 1169 JZ	P60301100870002 / 24 Juli 2019	PT. ASURANSI BINTANG Tbk	12 Bulan	26/07/2019	26/07/2020	4.732.200,00	1.971.750,00	2.760.450,00	2.760.450,00	4.732.200,00	-	
508	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova E BG 411 J	P60301100870002 / 24 Juli 2019	PT. ASURANSI BINTANG Tbk	12 Bulan	26/07/2019	26/07/2020	5.044.600,00	2.101.916,67	2.942.683,33	2.942.683,33	5.044.600,00	-	
509	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 3.0 E DC BG 8181 JZ	P60301100870002 / 24 Juli 2019	PT. ASURANSI BINTANG Tbk	12 Bulan	26/07/2019	26/07/2020	5.586.560,00	2.327.733,33	3.258.826,67	3.258.826,67	5.586.560,00	-	
510	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Asuransi Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 G MT BG 1170 JZ	P60301100870002 / 24 Juli 2019	PT. ASURANSI BINTANG Tbk	12 Bulan	26/07/2019	26/07/2020	4.732.200,00	1.971.750,00	2.760.450,00	2.760.450,00	4.732.200,00	-	
511	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 G DC BG 9074 JZ	P60301100870002 / 24 Juli 2019	PT. ASURANSI BINTANG Tbk	12 Bulan	26/07/2019	26/07/2020	8.124.000,00	3.385.000,00	4.739.000,00	4.739.000,00	8.124.000,00	-	
512	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>32.951.760,00</b>	<b>13.729.900,00</b>	<b>19.221.860,00</b>	<b>19.221.860,00</b>	<b>32.951.760,00</b>	-	
513	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
514	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)										-	-	-	
515	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<b>SUB JUMLAH B</b>						-	-	-	-	-	-	
516	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<b>TOTAL A+B</b>						<b>32.951.760,00</b>	<b>13.729.900,00</b>	<b>19.221.860,00</b>	<b>19.221.860,00</b>	<b>32.951.760,00</b>	-	
517	Kecamatan Banyuwasin	<b>TAHUN LALU</b>												
518	Kecamatan Banyuwasin													
519	Kecamatan Banyuwasin	<b>SUB JUMLAH A</b>						-	-	-	-	-	-	
520	Kecamatan Banyuwasin	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
521	Kecamatan Banyuwasin													
522	Kecamatan Banyuwasin	<b>SUB JUMLAH B</b>						-	-	-	-	-	-	
523	Kecamatan Banyuwasin	<b>TOTAL A+B</b>						-	-	-	-	-	-	
524	Kecamatan Banyuwasin II	<b>TAHUN LALU</b>												

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31 - 12 - 2020			Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
525	Kecamatan Banyuwangi II														
526	Kecamatan Banyuwangi II	SUB JUMLAH A													
527	Kecamatan Banyuwangi II	TAHUN BERJALAN													
528	Kecamatan Banyuwangi II	SUB JUMLAH B													
529	Kecamatan Banyuwangi II	TOTAL A+B													
530	Kecamatan Banyuwangi II														
531	Kecamatan Betung	TAHUN LALU													
532	Kecamatan Betung														
533	Kecamatan Betung	SUB JUMLAH A													
534	Kecamatan Betung	TAHUN BERJALAN													
535	Kecamatan Betung														
536	Kecamatan Betung	SUB JUMLAH B													
537	Kecamatan Betung	TOTAL A+B													
538	Kecamatan Rantau Bayur	TAHUN LALU													
539	Kecamatan Rantau Bayur	Asuransi Kendaraan BG 9059 JZ	11.900.0000.08923	PT. Asuransi Sinar Mas	12 bulan	25/01/2019	25/01/2020	4.604.900,00	4.221.158,33	383.741,67	383.741,67	4.604.900,00			
540	Kecamatan Rantau Bayur	SUB JUMLAH A						4.604.900,00	4.221.158,33	383.741,67	383.741,67	4.604.900,00			
541	Kecamatan Rantau Bayur	TAHUN BERJALAN													
542	Kecamatan Rantau Bayur	Asuransi Kendaraan	12.000.0000.00977	PT. Asuransi Sinar Mas	12 bulan	25/01/2020	25/01/2021	4.604.900,00			4.221.158,33	4.221.158,33	383.741,67		
543	Kecamatan Rantau Bayur	SUB JUMLAH B						4.604.900,00			4.221.158,33	4.221.158,33	383.741,67		
544	Kecamatan Rantau Bayur	TOTAL A+B						9.209.800,00	4.221.158,33	383.741,67	4.604.900,00	8.826.058,33	383.741,67		
545	Kecamatan Pulau Rimau	TAHUN LALU													
546	Kecamatan Pulau Rimau														
547	Kecamatan Pulau Rimau	SUB JUMLAH A													
548	Kecamatan Pulau Rimau	TAHUN BERJALAN													
549	Kecamatan Pulau Rimau														
550	Kecamatan Pulau Rimau	SUB JUMLAH B													
551	Kecamatan Pulau Rimau	TOTAL A+B													
552	Kecamatan Talang Kelapa	TAHUN LALU													
553	Kecamatan Talang Kelapa	Asuransi Kendaraan BG 9079 JZ	1702011900019	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	27/02/2019	27/02/2020	7.684.000,00	6.403.333,33	1.280.666,67	1.280.666,67	7.684.000,00			
554	Kecamatan Talang Kelapa	SUB JUMLAH A						7.684.000,00	6.403.333,33	1.280.666,67	1.280.666,67	7.684.000,00			
555	Kecamatan Talang Kelapa	TAHUN BERJALAN													
556	Kecamatan Talang Kelapa	Asuransi Kendaraan Hilux 2.5 Double Cabin BG 9079 JZ	1702012000026	PT. Asuransi Puma Artanugraha	12 bulan	27/02/2020	27/02/2021	7.689.800,00			6.408.166,67	6.408.166,67	1.281.633,33		
557	Kecamatan Talang Kelapa	SUB JUMLAH B						7.689.800,00			6.408.166,67	6.408.166,67	1.281.633,33		
558	Kecamatan Talang Kelapa	TOTAL A+B						15.373.800,00	6.403.333,33	1.280.666,67	7.688.833,34	14.092.166,67	1.281.633,33		
559	Kecamatan Rambutar	TAHUN LALU													
560	Kecamatan Rambutar														
561	Kecamatan Rambutar	SUB JUMLAH A													
562	Kecamatan Rambutar	TAHUN BERJALAN													
563	Kecamatan Rambutar														
564	Kecamatan Rambutar	SUB JUMLAH B													
565	Kecamatan Rambutar	TOTAL A+B													
566	Kecamatan Tungalili	TAHUN LALU													
567	Kecamatan Tungalili														
568	Kecamatan Tungalili	SUB JUMLAH A													
569	Kecamatan Tungalili	TAHUN BERJALAN													
570	Kecamatan Tungalili														
571	Kecamatan Tungalili	SUB JUMLAH B													
572	Kecamatan Tungalili	TOTAL A+B													
573	Kecamatan Tanjung Lago	TAHUN LALU													
574	Kecamatan Tanjung Lago	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 ED CAB No. Mesin 2KDS597867 BG 9084 JZ	15.151.50.2019.0135-0 Tgl. 20 Nopember 2018	PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara	12 bulan	19/11/2019	19/11/2020	6.237.000,00	519.750,00	5.717.250,00	5.717.250,00	6.237.000,00			
575	Kecamatan Tanjung Lago	SUB JUMLAH A						6.237.000,00	519.750,00	5.717.250,00	5.717.250,00	6.237.000,00			
576	Kecamatan Tanjung Lago	TAHUN BERJALAN													
577	Kecamatan Tanjung Lago	Asuransi Kendaraan	15.151.50.2019.0118-0 Tgl. 21 Desember 2020	PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara	12 bulan	21/12/2020	21/12/2021	5.945.000,00					5.945.000,00		
578	Kecamatan Tanjung Lago	SUB JUMLAH B						5.945.000,00					5.945.000,00		
579	Kecamatan Tanjung Lago	TOTAL A+B						12.182.000,00	519.750,00	5.717.250,00	5.717.250,00	6.237.000,00	5.945.000,00		
580	Kecamatan Sembawa	TAHUN LALU													
581	Kecamatan Sembawa	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux All New DC 2.5 E 4x4 Diesel M/T BG 9067 JZ	1900672306 Tgl. 1 April 2019	Asuransi Astra Buana	12 bulan	04/04/2019	04/04/2020	6.629.062,50	4.419.375,00	2.209.687,50	2.209.687,50	6.629.062,50			
582	Kecamatan Sembawa	SUB JUMLAH A						6.629.062,50	4.419.375,00	2.209.687,50	2.209.687,50	6.629.062,50			
583	Kecamatan Sembawa	TAHUN BERJALAN													
584	Kecamatan Sembawa	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux All New DC 2.5 E 4x4 Diesel M/T BG 9067 JZ	2009209510 Tgl. 8 April 2020	Asuransi Astra Buana	12 bulan	04/04/2020	04/04/2021	7.366.500,00			4.911.000,00	4.911.000,00	2.455.500,00		
585	Kecamatan Sembawa	SUB JUMLAH B						7.366.500,00			4.911.000,00	4.911.000,00	2.455.500,00		
586	Kecamatan Sembawa	TOTAL A+B						13.995.562,50	4.419.375,00	2.209.687,50	7.120.687,50	11.540.062,50	2.455.500,00		
587	Kecamatan Suak Tapeh	TAHUN LALU													
588	Kecamatan Suak Tapeh														
589	Kecamatan Suak Tapeh	SUB JUMLAH A													
590	Kecamatan Suak Tapeh	TAHUN BERJALAN													
591	Kecamatan Suak Tapeh														

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
592	Kecamatan Suak Tapeh	SUB JUMLAH B						-	-	-	-	-	-	-
593	Kecamatan Suak Tapeh	TOTAL A+B						-	-	-	-	-	-	-
594	Kecamatan Banyuasin II	TAHUN LALU												
595	Kecamatan Banyuasin II	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux BG 9081 JZ	1702281600075 Tl. 23 April 2019	PT. Lippo General Insurance	12 bulan	27/03/2019	27/03/2020	5.670.000,00	4.252.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	5.670.000,00	-	-
596	Kecamatan Banyuasin II	SUB JUMLAH A						5.670.000,00	4.252.500,00	1.417.500,00	1.417.500,00	5.670.000,00	-	-
597	Kecamatan Banyuasin II	TAHUN BERJALAN												
598	Kecamatan Banyuasin II	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux BG 9081 JZ	1702281600075	PT. Lippo General Insurance	12 bulan	27/03/2020	27/03/2021	5.005.000,00			3.753.750,00	3.753.750,00	1.251.250,00	-
599	Kecamatan Banyuasin II	Asuransi Kendaraan Yamaha BG 3196 JZ	306.605.110.20.00009/000000 Tgl 15 Juni 2020	Asuransi Jasindo	12 bulan	11/06/2020	11/06/2021	299.200,00			149.600,00	149.600,00	149.600,00	-
599	Kecamatan Banyuasin II	Asuransi Kendaraan Yamaha BG 3197 JZ	306.605.110.20.00009/000000 Tgl 15 Juni 2020	Asuransi Jasindo	12 bulan	11/06/2020	11/06/2021	299.200,00			149.600,00	149.600,00	149.600,00	-
600	Kecamatan Banyuasin II	Asuransi Kendaraan Yamaha BG 3198 JZ	306.605.110.20.00009/000000 Tgl 15 Juni 2020	Asuransi Jasindo	12 bulan	11/06/2020	11/06/2021	243.440,00			121.720,00	121.720,00	121.720,00	-
599	Kecamatan Banyuasin II	SUB JUMLAH B						5.846.840,00	-	-	4.174.670,00	4.174.670,00	1.672.170,00	-
600	Kecamatan Banyuasin II	TOTAL A+B						11.516.840,00	4.252.500,00	1.417.500,00	5.592.170,00	9.844.670,00	1.672.170,00	-
601	Kecamatan Makarti Jayi	TAHUN LALU												
602	Kecamatan Makarti Jaya	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux All New DC 2.5 E 4x4 BG 9089 JZ	1804245384 TGL. 10 Januari 2019	Asuransi Astra Buana	12 bulan	20/01/2019	20/01/2020	7.516.500,00	6.890.125,00	626.375,00	626.375,00	7.516.500,00	-	-
603	Kecamatan Makarti Jayi	SUB JUMLAH A						7.516.500,00	6.890.125,00	626.375,00	626.375,00	7.516.500,00	-	-
604	Kecamatan Makarti Jaya	TAHUN BERJALAN												
605	Kecamatan Makarti Jaya	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux All New DC 2.5 E 4x4 BG 9089 JZ	1906712310 TGL. 14 Januari 2020	Asuransi Astra Buana	12 bulan	20/01/2020	20/01/2021	7.516.500,00			6.890.125,00	6.890.125,00	626.375,00	-
606	Kecamatan Makarti Jayi	SUB JUMLAH B						7.516.500,00	-	-	6.890.125,00	6.890.125,00	626.375,00	-
607	Kecamatan Makarti Jayi	TOTAL A+B						15.033.000,00	6.890.125,00	626.375,00	7.516.500,00	14.406.625,00	626.375,00	-
608	Kecamatan Muara Padang	TAHUN LALU												
609	Kecamatan Muara Padang	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
610	Kecamatan Muara Padang	TAHUN BERJALAN						-	-	-	-	-	-	-
611	Kecamatan Muara Padang	SUB JUMLAH B						-	-	-	-	-	-	-
612	Kecamatan Muara Padang	TOTAL A+B						-	-	-	-	-	-	-
613	Kecamatan Muara Padang	TAHUN LALU												
614	Kecamatan Muara Padang	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
615	Kecamatan Muara Sugihan	TAHUN LALU												
616	Kecamatan Muara Sugihan	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
617	Kecamatan Muara Sugihan	TAHUN BERJALAN						-	-	-	-	-	-	-
618	Kecamatan Muara Sugihan	SUB JUMLAH B						-	-	-	-	-	-	-
619	Kecamatan Muara Sugihan	TOTAL A+B						-	-	-	-	-	-	-
620	Kecamatan Muara Sugihan	TAHUN LALU												
621	Kecamatan Muara Sugihan	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
622	Kecamatan Muara Sugihan	TAHUN BERJALAN						-	-	-	-	-	-	-
623	Kecamatan Muara Telang	TAHUN LALU												
624	Kecamatan Muara Telang	Asuransi Kendaraan BG 9076 JZ	9022319120008	Pan Pacific Insurance	12 bulan	07/12/2019	07/12/2020	4.931.000,00	-	4.931.000,00	4.931.000,00	4.931.000,00	-	-
625	Kecamatan Muara Telang	SUB JUMLAH A						4.931.000,00	-	4.931.000,00	4.931.000,00	4.931.000,00	-	-
626	Kecamatan Muara Telang	TAHUN BERJALAN												
627	Kecamatan Muara Telang	Asuransi Kendaraan	09022320120016	Pan Pacific Insurance	12 bulan	07/12/2020	07/12/2021	4.931.000,00	-	-	-	-	4.931.000,00	-
628	Kecamatan Muara Telang	SUB JUMLAH B						4.931.000,00	-	-	-	-	4.931.000,00	-
629	Kecamatan Muara Telang	TOTAL A+B						9.862.000,00	-	4.931.000,00	4.931.000,00	4.931.000,00	4.931.000,00	-
629	Kecamatan Air Salek	TAHUN LALU												
630	Kecamatan Air Salek	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
631	Kecamatan Air Salek	TAHUN BERJALAN						-	-	-	-	-	-	-
632	Kecamatan Air Salek	SUB JUMLAH B						-	-	-	-	-	-	-
633	Kecamatan Air Salek	TOTAL A+B						-	-	-	-	-	-	-
634	Kecamatan Air Salek	TAHUN LALU												
635	Kecamatan Air Salek	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
636	Kecamatan Air Salek	TAHUN BERJALAN						-	-	-	-	-	-	-
637	Kecamatan Sumber Marqa Telang	TAHUN LALU												
638	Kecamatan Sumber Marqa Telang	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 BG 9082 JZ	09022319080006 Tgl. 02 Agustus 2019	PT. Pan Pacific Insurance	12 bulan	05/08/2019	05/08/2020	5.942.500,00	1.980.833,33	3.961.666,67	3.961.666,67	5.942.500,00	-	-
639	Kecamatan Sumber Marqa Telang	SUB JUMLAH A						5.942.500,00	1.980.833,33	3.961.666,67	3.961.666,67	5.942.500,00	-	-
640	Kecamatan Sumber Marqa Telang	TAHUN BERJALAN												
641	Kecamatan Sumber Marqa Telang	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.5 BG 9082 JZ	09022320080008 Tgl. 13 Agustus 2020	PT. Pan Pacific Insurance	12 bulan	05/08/2020	05/08/2021	5.690.000,00			1.896.666,67	1.896.666,67	3.793.333,33	-
642	Kecamatan Sumber Marqa Telang	SUB JUMLAH B						5.690.000,00	-	-	1.896.666,67	1.896.666,67	3.793.333,33	-
643	Kecamatan Sumber Marqa Telang	TOTAL A+B						11.632.500,00	1.980.833,33	3.961.666,67	5.858.333,34	7.839.166,67	3.793.333,33	-
644	Kecamatan Air Kumbanq	TAHUN LALU												
645	Kecamatan Air Kumbanq	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
646	Kecamatan Air Kumbanq	TAHUN BERJALAN						-	-	-	-	-	-	-
647	Kecamatan Air Kumbanq	SUB JUMLAH B						-	-	-	-	-	-	-
648	Kecamatan Air Kumbanq	TOTAL A+B						-	-	-	-	-	-	-
649	Kecamatan Air Kumbanq	TAHUN LALU												
650	Kecamatan Selat Penugai	SUB JUMLAH A						-	-	-	-	-	-	-
651	Kecamatan Selat Penugai	TAHUN BERJALAN						-	-	-	-	-	-	-
652	Kecamatan Selat Penugai	SUB JUMLAH B						-	-	-	-	-	-	-
653	Kecamatan Selat Penugai	TOTAL A+B						-	-	-	-	-	-	-
654	Kecamatan Selat Penugai	TAHUN LALU												
655	Kecamatan Selat Penugai	SUB JUMLAH B						-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020		Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17
656	Kecamatan Selat Perungguai	<b>TOTAL A+B</b>							-	-	-	-	-	
657	Kecamatan Karang Agung III	<b>TAHUN LALU</b>												
658	Kecamatan Karang Agung III													
659	Kecamatan Karang Agung III	<b>SUB JUMLAH A</b>												
660	Kecamatan Karang Agung III	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
661	Kecamatan Karang Agung Iilir	Asuransi Kendaraan Jupiter BG 3193 JZ	306.605.110.20.00008/000/00	Asuransi Jasindo	12 bulan	11/06/2020	11/06/2021	314.160,00			157.080,00	157.080,00	157.080,00	
662	Kecamatan Karang Agung Iilir	Asuransi Kendaraan Jupiter BG 3194 JZ	306.605.110.20.00008/000/00	Asuransi Jasindo	12 bulan	11/06/2020	11/06/2021	314.160,00			157.080,00	157.080,00	157.080,00	
663	Kecamatan Karang Agung Iilir	Asuransi Kendaraan Jupiter BG 3195 JZ	306.605.110.20.00008/000/00	Asuransi Jasindo	12 bulan	11/06/2020	11/06/2021	253.912,00			126.956,00	126.956,00	126.956,00	
662	Kecamatan Karang Agung III	<b>SUB JUMLAH B</b>						882.232,00				441.116,00	441.116,00	441.116,00
663	Kecamatan Karang Agung III	<b>TOTAL A+B</b>						882.232,00				441.116,00	441.116,00	441.116,00
664	Inspektora Daerah	<b>TAHUN LALU</b>												
665	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Nissan X Trail New 2.0 No. Mesin MR20029838R BG 1214 JZ	1902531915 Tgl. 2 September 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	05/09/2019	05/09/2020	7.070.392,00	1.767.598,00	5.302.794,00	5.302.794,00	7.070.392,00		
666	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Mitsubishi Triton New 2.5 BG 9070 JZ	1903631096 Tgl. 2 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2019	15/12/2020	8.180.750,00	-	8.180.750,00	8.180.750,00	8.180.750,00		
667	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Kijang Innova BG 1512 JZ	1903631089 Tgl. 2 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2019	15/12/2020	5.278.655,00	-	5.278.655,00	5.278.655,00	5.278.655,00		
668	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Kijang Innova BG 1182 JZ	1903631058 Tgl. 2 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2019	15/12/2020	972.687,00	-	972.687,00	972.687,00	972.687,00		
669	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Terios TX BG 1163 JZ	1903631072 Tgl. 2 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2019	15/12/2020	5.627.750,00	-	5.627.750,00	5.627.750,00	5.627.750,00		
670	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Terios No. Mesin DCY4366 BG 1162 JZ	1903631065 Tgl. 2 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2019	15/12/2020	5.930.000,00	-	5.930.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00		
671	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush BG 1352 JZ	1903631041 Tgl. 2 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2019	15/12/2020	6.463.025,00	-	6.463.025,00	6.463.025,00	6.463.025,00		
672	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Kijang Innova No. Mesin TTRA321231 BG 51 J	1903635722 Tgl. 2 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	29/12/2019	29/12/2020	8.565.000,00	-	8.565.000,00	8.565.000,00	8.565.000,00		
673	Inspektora Daerah	<b>SUB JUMLAH A</b>						48.088.259,00	1.767.598,00	46.320.661,00	46.320.661,00	48.088.259,00		
674	Inspektora Daerah	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
675	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Kijang Innova No. Mesin TTRA321231 BG 51 J	2083838334 Tgl. 16 Desember 2020	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	29/12/2020	29/12/2021	8.287.400,00	-	-	-	-	8.287.400,00	
676	Inspektora Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush BG 1352 JZ	2083454497 Tgl. 16 Desember 2020	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2020	15/12/2021	6.484.425,00	-	-	-	-	6.484.425,00	
677	Inspektora Daerah	<b>SUB JUMLAH B</b>						14.771.825,00	-	-	-	-	14.771.825,00	
678	Inspektora Daerah							62.860.084,00	1.767.598,00	46.320.661,00	46.320.661,00	48.088.259,00	14.771.825,00	
679	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<b>TAHUN LALU</b>												
680	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Nissan X-Trail 2.0 2WD MT BG 24 J	1702011900030 Tgl. 11 Maret 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	09/03/2019	09/03/2020	6.255.400,00	4.691.550,00	1.563.850,00	1.563.850,00	6.255.400,00		
681	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova G BG 1010 JZ	1702011900030 Tgl. 11 Maret 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	09/03/2019	09/03/2020	6.372.800,00	4.779.600,00	1.593.200,00	1.593.200,00	6.372.800,00		
682	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux / Double Cabin 2016 BG 9092 JZ	1702011900030 Tgl. 11 Maret 2019	PT. Asuransi Puma Artanugraha (ASPAN)	12 bulan	09/03/2019	09/03/2020	10.076.000,00	7.557.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	10.076.000,00		
683	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova BG 1057 JZ	09V01121900002 Tgl. 26 Desember 2019	PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama	12 bulan	20/12/2019	20/12/2020	6.975.500,00	-	6.975.500,00	6.975.500,00	6.975.500,00		
684	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Toyota Avanza BG 1064 JZ	09V01121900002 Tgl. 26 Desember 2019	PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama	12 bulan	20/12/2019	20/12/2020	5.284.000,00	-	5.284.000,00	5.284.000,00	5.284.000,00		
685	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Daihatsu Terios BG 1002 JZ	09V01121900002 Tgl. 26 Desember 2019	PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama	12 bulan	20/12/2019	20/12/2020	5.135.900,00	-	5.135.900,00	5.135.900,00	5.135.900,00		
686	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Nissan Livina BG 1109 JZ	09V01121900002 Tgl. 26 Desember 2019	PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama	12 bulan	20/12/2019	20/12/2020	4.605.800,00	-	4.605.800,00	4.605.800,00	4.605.800,00		
687	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux BG 1174XQ	09V01121900002 Tgl. 26 Desember 2019	PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama	12 bulan	20/12/2019	20/12/2020	7.873.358,00	-	7.873.358,00	7.873.358,00	7.873.358,00		
688	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<b>SUB JUMLAH A</b>						52.578.758,00	17.028.150,00	35.550.608,00	35.550.608,00	52.578.758,00		
689	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<b>TAHUN BERJALAN</b>												
690	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux / Double Cabin 2016 BG 9092 JZ	09V01032000002 Tgl. 19 Maret 2020	PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama	12 bulan	18/03/2020	18/03/2021	7.983.000,00	-	-	5.987.250,00	5.987.250,00	1.995.750,00	
691	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<b>SUB JUMLAH B</b>						7.983.000,00	-	-	5.987.250,00	5.987.250,00	1.995.750,00	
692	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<b>TOTAL A+B</b>						60.561.758,00	17.028.150,00	35.550.608,00	41.537.858,00	58.568.008,00	1.995.750,00	
693	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<b>TAHUN LALU</b>												
694	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T BG 1168 JZ	1900995894 Tgl. 20 Maret 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	14/03/2019	14/03/2020	5.731.150,00	4.298.362,50	1.432.787,50	1.432.787,50	5.731.150,00		
695	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Daihatsu Terios New TX M/T BG 1209 JZ	1901025255 Tgl. 26 Maret 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	13/03/2019	13/03/2020	5.158.475,00	3.868.856,25	1.289.618,75	1.289.618,75	5.158.475,00		
696	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Suzuki APV 1.5 GE Power Steering BG 1156 JZ	1900995900 Tgl. 20 Maret 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	14/03/2019	14/03/2020	4.221.760,00	3.166.320,00	1.055.440,00	1.055.440,00	4.221.760,00		
697	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 G 4x4 M/T Diesel BG 1707X	1900257626 Tgl. 15 Januari 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	10/01/2019	10/01/2020	10.018.500,00	9.183.625,00	834.875,00	834.875,00	10.018.500,00		
698	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Nissan New X-Trail 2.0 BG 45 J	1902152059 Tgl. 24 Juni 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	18/06/2019	18/06/2020	6.750.075,00	3.375.037,50	3.375.037,50	3.375.037,50	6.750.075,00		
699	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush New M/T BG 1072 JZ	1902152202 Tgl. 24 Juni 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	18/06/2019	18/06/2020	5.954.280,00	2.977.140,00	2.977.140,00	2.977.140,00	5.954.280,00		

No	SKPD	Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Perjanjian/Kontrak/SPK					Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31-12-2020			Ket
				Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innov All New G Lux A/T Diesel TBA 2019	1902173795 Tgl. 25 Juni 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	21/06/2019	21/06/2020	9.177.000,00	4.588.500,00	4.588.500,00	4.588.500,00	9.177.000,00	-		
701	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Gedung Kantor	11900000091264 Tgl. 24 Juli 2019	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	22/07/2019	22/07/2020	25.025.000,00	10.427.083,33	14.597.916,67	14.597.916,67	25.025.000,00	-		
702	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush All New TRD M/T BG1387 JZ 2019	190328986 Tgl. 23 September 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	09/09/2019	09/09/2020	6.125.000,00	1.531.250,00	4.593.750,00	4.593.750,00	6.125.000,00	-		
703	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush New S M/T BG1195 JZ	1903288337 Tgl. 23 September 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	09/09/2019	09/09/2020	5.419.950,00	1.354.987,50	4.064.962,50	4.064.962,50	5.419.950,00	-		
704	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota New Avanza G 1.3 M/T Minor Change BG1070JZ 2019	1903289792 Tgl. 23 September 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	09/09/2019	09/09/2020	4.947.300,00	1.236.825,00	3.710.475,00	3.710.475,00	4.947.300,00	-		
705	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innov All New G A/T BG 34 J 2016	1903624838 Tgl. 12 Desember 2019	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	15/12/2019	15/12/2020	6.247.500,00	-	6.247.500,00	6.247.500,00	6.247.500,00	-		
706	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>94.775.990,00</b>	<b>46.007.987,08</b>	<b>48.768.002,92</b>	<b>48.768.002,92</b>	<b>94.775.990,00</b>	-		
707	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
708	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux New Double Cabin 2.4 G 4x4 M/T Diesel BG 8112 JZ Tahun 2018	1906464219 Tgl. 14 Januari 2020	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	10/01/2020	10/01/2021	9.270.862,00			8.498.290,17	8.498.290,17	772.571,83		
709	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario ESP 150 Hitam BG 2769 JZ	12.000.0000.38236 Tgl. 09 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	347.500,00			260.625,00	260.625,00	86.875,00		
710	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Hitam BG 3255 JZ	12.000.0000.38279 Tgl. 09 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
711	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Merah BG 3245 JZ	12.000.0000.38319 Tgl. 09 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
712	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Blade 110 R Hitam Merah BG 2443 JZ	12.000.0000.38367 Tgl. 09 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	242.000,00			181.500,00	181.500,00	60.500,00		
713	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CB 150 M/T White Red BG 2635 JZ	12.000.0000.38794 Tgl. 09 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	389.700,00			292.275,00	292.275,00	97.425,00		
714	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Silver BG 3248 JZ	12.000.0000.39283 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
715	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Silver BG 3249 JZ	12.000.0000.39300 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
716	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda ACB2122B033 A/T Coklat BG 2627 JZ	12.000.0000.39316 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	431.900,00			323.925,00	323.925,00	107.975,00		
717	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Hitam BG 3253 JZ	12.000.0000.39360 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
718	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Biru BG 3252 JZ	12.000.0000.39716 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
719	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Hitam BG 3254 JZ	12.000.0000.39874 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
720	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CB 150R Putih Merah BG 2634 JZ	12.000.0000.39922 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	431.900,00			323.925,00	323.925,00	107.975,00		
721	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CB 150R Putih Merah BG 2633 JZ	12.000.0000.39989 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	389.700,00			292.275,00	292.275,00	97.425,00		
722	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Blade 110R Hitam Merah BG 2442 JZ	12.000.0000.40000 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	242.000,00			181.500,00	181.500,00	60.500,00		
723	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CB 150R Putih Merah BG 2630 JZ	12.000.0000.40015 Tgl. 10 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	389.700,00			292.275,00	292.275,00	97.425,00		
724	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Silver BG 3250 JZ	12.000.0000.40101 Tgl. 11 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
725	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Merah BG 3244 JZ	12.000.0000.40260 Tgl. 11 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
726	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Merah BG 3247 JZ	12.000.0000.40922 Tgl. 12 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
727	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Biru BG 3246 JZ	12.000.0000.41354 Tgl. 12 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
728	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CB 150R White Red BG 2629 JZ	12.000.0000.45022 Tgl. 16 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	389.700,00			292.275,00	292.275,00	97.425,00		
729	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Biru BG 3251 JZ	12.000.0000.46490 Tgl. 20 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
730	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda CB 150R White Red BG 2628 JZ	12.000.0000.46496 Tgl. 20 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	389.700,00			292.275,00	292.275,00	97.425,00		
731	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario AT 150 Silver BG 3243 JZ	12.000.0000.47595 Tgl. 24 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	621.800,00			466.350,00	466.350,00	155.450,00		
732	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario ACB2122B033 A/T Biru BG 2639 JZ	12.000.0000.47598 Tgl. 24 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	431.900,00			323.925,00	323.925,00	107.975,00		
733	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Honda Vario ACB2122B033 A/T Hitam BG 2636 JZ	12.000.0000.47608 Tgl. 24 Maret 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	02/03/2020	02/03/2021	431.900,00			323.925,00	323.925,00	107.975,00		
734	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innov All New G Lux A/T Diesel BG 1205 XO 2019	2033605868 Tgl. 29 Juni 2020	PT. Asuransi Astra Buana	12 bulan	21/06/2020	21/06/2021	8.514.000,00			4.257.000,00	4.257.000,00	4.257.000,00		
735	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush All New TRD M/T BG 1387 JZ 2019	2055972821 Tgl. 24 Agustus 2020	PT. Asuransi Astra Buana	Asuransi	09/09/2020	09/09/2021	5.622.200,00			1.405.550,00	1.405.550,00	4.216.650,00		
736	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Asuransi Gedung Kantor	12.000.0000.96839 Tgl. 10 Juli 2020	PT. Asuransi Sinarmas	12 bulan	22/07/2020	22/07/2021	25.025.000,00			10.427.083,33	10.427.083,33	14.597.916,67		
737	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>61.023.062,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.031.173,50</b>	<b>34.031.173,50</b>	<b>26.991.888,50</b>		
738	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<b>TOTAL A+B</b>						<b>155.799.052,00</b>	<b>46.007.987,08</b>	<b>48.768.002,92</b>	<b>82.799.176,42</b>	<b>128.807.163,50</b>	<b>26.991.888,50</b>		
739	Badan Pendapatan Daerah	<b>TAHUN LALU</b>													
740	Badan Pendapatan Daerah	<b>SUB JUMLAH A</b>													
741	Badan Pendapatan Daerah	<b>SUB JUMLAH B</b>													
742	Badan Pendapatan Daerah	<b>TAHUN BERJALAN</b>													

No	SKPD	Perjanjian/Kontrak/SPK							Nilai per 01-01-2020			Nilai per 31 - 12 -2020			Ket
		Uraian	Nomor dan Tanggal perjanjian	Penerima	Jangka waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Nilai Asuransi(Rp)	Sudah jatuh Tempo/Digunakan	Belum jatuh Tempo/Beban Dibayar Dimuka	Beban jatuh tempo di 2020	Sudah jatuh Tempo/ menjadi hak	Belum jatuh Tempo/ Beban Dibayar Dimuka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9-10)	12	13=(10+12)	14=(9-3)	17	
743	Badan Pendapatan Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Kijang Innova No. Mesin 2GD-FTV Tahun 2019	1120202121900009 Tgl. 17 Desember 2019	PT. Asuransi Mega Pratama	12 bulan	17/12/2019	17/12/2020	9.742.000,00			9.742.000,00	9.742.000,00	-		
744	Badan Pendapatan Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Hilux 2.4 G Double Cabin BG 8135 JZ Tahun 2019	1120202022000001 Tgl. 07 Februari 2020	PT. Asuransi Mega Pratama	12 bulan	07/02/2020	07/02/2021	5.482.000,00			4.568.333,33	4.568.333,33	913.666,67		
745	Badan Pendapatan Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush 1.5 S M/T BG 1404 JZ Tahun 2019	1120202022000003 Tgl. 07 Februari 2020	PT. Asuransi Mega Pratama	12 bulan	10/02/2020	10/02/2021	5.701.000,00			4.750.833,33	4.750.833,33	950.166,67		
746	Badan Pendapatan Daerah	Asuransi Kendaraan Toyota Rush 1.5 G A/T BG 1401 JZ Tahun 2019	1120202022000002 Tgl. 07 Februari 2020	PT. Asuransi Mega Pratama	12 bulan	07/02/2020	07/02/2021	5.374.000,00			4.478.333,33	4.478.333,33	895.666,67		
747	Badan Pendapatan Daerah	<b>SUB JUMLAH B</b>						<b>26.299.000,00</b>	-	-	<b>23.539.499,99</b>	<b>23.539.499,99</b>	<b>2.759.500,01</b>		
748	Badan Pendapatan Daerah	<b>TOTAL A+B</b>						<b>26.299.000,00</b>	-	-	<b>23.539.499,99</b>	<b>23.539.499,99</b>	<b>2.759.500,01</b>		
749	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>TAHUN LALU</b>													
750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asuransi Kendaraan Avanza BG 1333 JZ	110000221011900221	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	22/01/2019	22/01/2020	4.680.800,00	4.290.733,33	390.066,67	390.066,67	4.680.800,00	-		
751	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asuransi Kendaraan BG 1433 JZ	110000221011900221	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	22/01/2019	22/01/2020	4.085.895,00	3.745.403,75	340.491,25	340.491,25	4.085.895,00	-		
752	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asuransi Kendaraan BG 33 J	110000221011900221	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	22/01/2019	22/01/2020	5.592.375,00	5.126.343,75	466.031,25	466.031,25	5.592.375,00	-		
753	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asuransi Kendaraan BG 1317 JZ	110000221011900221	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	22/01/2019	22/01/2020	4.505.500,00	4.130.041,67	375.458,33	375.458,33	4.505.500,00	-		
754	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asuransi Kendaraan BG 1133 JZ	110000221011900221	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	22/01/2019	22/01/2020	5.510.900,00	5.051.658,33	459.241,67	459.241,67	5.510.900,00	-		
755	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Asuransi Kendaraan BG 1340 J	110000221011900221	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	12 bulan	22/01/2019	22/01/2020	6.140.200,00	5.628.516,67	511.683,33	511.683,33	6.140.200,00	-		
756	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>SUB JUMLAH A</b>						<b>30.515.670,00</b>	<b>27.972.697,50</b>	<b>2.542.972,50</b>	<b>2.542.972,50</b>	<b>30.515.670,00</b>	-		
757	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>TAHUN BERJALAN</b>													
758	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
759	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>SUB JUMLAH B</b>						-	-	-	-	-	-		
760	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>TOTAL A+B</b>						<b>30.515.670,00</b>	<b>27.972.697,50</b>	<b>2.542.972,50</b>	<b>2.542.972,50</b>	<b>30.515.670,00</b>	-		
	<b>JUMLAH</b>	<b>TOTAL A+B</b>						<b>3.004.648.825,50</b>	<b>1.223.180.286,26</b>	<b>860.900.769,24</b>	<b>1.478.658.936,87</b>	<b>2.701.839.223,13</b>	<b>302.809.602,37</b>		

DAFTAR SALDO PERSEDIAAN  
Per 31 Desember 2020

NO	Nama SKPD	Bahan Habis Pakai								Bahan material				Bahan Yang akan diserahkan			Jumlah Persediaan
		ATK	Alat Listrik	Alat Kebersihan	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	Belanja Cetak/Penggunaan	Bahan Bakar Minyak	Habis Pakai Lainnya	Jumlah	Bibit Tanaman dan Ternak	Obat-obatan dan Bahan Kimia	Bahan Makanan	Jumlah	Hibah	Bantuan Sosial	Jumlah	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	32.828.142,00	4.970.000,00	5.815.520,00	5.585.309,00	43.017.900,00	300.000,00	127.074.550,00	219.591.421,00	-	7.649.032.846,59	-	7.649.032.846,59	-	-	-	7.868.624.267,59
3	Rumah Sakit Umum Daerah	58.361.036,00	19.352.460,00	137.515.066,00	-	-	-	3.128.218.182,00	3.343.446.744,00	-	2.112.586.530,00	388.171.161,49	2.500.757.691,49	-	-	-	5.844.204.435,49
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.787.000,00	1.700.000,00	836.000,00	-	-	-	-	5.323.000,00	-	-	-	-	93.840.360.264,39	-	93.840.360.264,39	93.845.683.264,39
5	Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	3.285.000,00	-	-	-	1.785.000,00	-	854.300,00	5.924.300,00	-	-	-	-	-	-	-	5.924.300,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	209.805,00	-	-	-	-	-	107.197.000,00	107.406.805,00	-	-	-	-	-	15.780.000,00	15.780.000,00	123.186.805,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.701.500,00	-	-	-	-	-	-	1.701.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.701.500,00
8	Dinas Sosial	1.735.000,00	-	-	-	-	-	23.400.000,00	25.135.000,00	-	-	54.605.000,00	54.605.000,00	-	33.813.500,00	33.813.500,00	113.553.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.702.000,00	405.000,00	4.068.300,00	-	535.000,00	-	-	9.710.300,00	-	-	-	-	-	-	-	9.710.300,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	465.000,00	-	-	-	-	-	-	465.000,00	-	2.450.000,00	-	2.450.000,00	-	-	-	2.915.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	468.875.700,00	684.000,00	19.703.500,00	-	868.534.810,00	-	-	1.357.798.010,00	-	-	-	-	-	-	-	1.357.798.010,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.787.500,00	-	901.000,00	-	-	-	-	14.688.500,00	-	-	-	-	-	-	-	14.688.500,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	245.000,00	-	-	-	-	-	448.683.214,00	448.928.214,00	-	-	-	-	-	-	-	448.928.214,00
15	Dinas Perhubungan	2.763.200,00	-	-	-	-	-	-	2.763.200,00	-	-	-	-	-	-	-	2.763.200,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	372.000,00	375.000,00	-	-	-	-	-	747.000,00	-	-	-	-	90.750.000,00	-	90.750.000,00	91.497.000,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.175.000,00	-	276.000,00	450.000,00	-	-	-	3.901.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.901.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	41.692.750,00	205.500,00	3.603.000,00	3.238.600,00	-	-	-	48.739.850,00	-	-	-	-	-	-	-	48.739.850,00
20	Dinas Perikanan	713.000,00	-	74.100,00	212.000,00	573.250,00	-	-	1.572.350,00	75.000,00	-	4.872.000,00	4.947.000,00	-	-	-	6.519.350,00
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.445.500,00	-	934.000,00	6.000,00	-	-	-	3.385.500,00	-	64.308.600,00	-	64.308.600,00	-	-	-	67.694.100,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	645.000,00	-	-	-	-	-	-	645.000,00	-	6.700.000,00	-	6.700.000,00	-	-	-	7.345.000,00
23	Sekretariat Daerah	2.841.600,00	-	-	-	-	-	46.844.000,00	49.685.600,00	-	-	-	-	-	-	-	49.685.600,00
24	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU (PTSP)	4.697.000,00	-	-	-	-	-	-	4.697.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.697.000,00
26	Kecamatan Banyuwasin I	175.000,00	-	-	-	-	-	-	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	175.000,00
27	Kecamatan Banyuwasin III	1.218.500,00	-	-	-	-	-	-	1.218.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.218.500,00
28	Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kecamatan rantau Bayur	99.000,00	-	-	-	-	-	-	99.000,00	-	-	-	-	-	-	-	99.000,00
30	Kecamatan Pulau Rimau	261.000,00	-	-	24.000,00	50.000,00	-	-	335.000,00	-	-	-	-	-	-	-	335.000,00
31	Kecamatan Talang Kelapa	275.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	335.000,00	-	-	-	-	-	-	-	335.000,00
32	Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Tungkai Ilir	45.000,00	-	23.500,00	-	-	-	-	68.500,00	-	-	-	-	-	-	-	68.500,00
34	Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Banyuwasin II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Makarti Jaya	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
39	Kecamatan Muara Padang	351.250,00	250.000,00	89.500,00	-	-	-	-	690.750,00	-	-	-	-	-	-	-	690.750,00
40	Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Muara Telang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Sumber Merga Telang	560.000,00	-	250.000,00	150.000,00	-	-	-	960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	960.000,00
44	Kecamatan Air Kumbang	260.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	260.000,00
45	Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Inspektorat Daerah	1.658.250,00	700.000,00	183.500,00	-	-	-	-	2.541.750,00	-	-	-	-	-	-	-	2.541.750,00
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.318.950,00	1.541.500,00	-	-	-	-	-	12.860.450,00	-	-	-	-	-	-	-	12.860.450,00

NO	Nama SKPD	Bahan Habis Pakai								Bahan material				Bahan Yang akan diserahkan			Jumlah Persediaan
		ATK	Alat Listrik	Alat Kebersihan	Belanja Perangko, Materiil Dan Benda Pos Lainnya	Belanja Cetak/Penggunaan	Bahan Bakar Minyak	Habis Pakai Lainnya	Jumlah	Bibit Tanaman dan Ternak	Obat-obatan dan Bahan Kimia	Bahan Makanan	Jumlah	Hibah	Bantuan Sosial	Jumlah	
49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	67.744.808,00	12.843.000,00	1.398.000,00	-	184.433.697,00	-	-	266.419.505,00	-	-	-	-	-	-	-	266.419.505,00
50	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Badan Pendapatan Daerah	2.050.000,00	1.898.000,00	129.000,00	-	1.022.900,00	-	-	5.099.900,00	-	-	-	-	-	-	-	5.099.900,00
52	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.840.500,00	-	-	-	1.842.000,00	-	-	3.682.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.682.500,00
JUMLAH		736.234.991,00	44.924.460,00	175.583.986,00	6.253.309,00	1.105.483.157,00	300.000,00	3.682.271.246,00	5.951.051.149,00	75.000,00	9.835.077.976,59	447.648.161,49	10.282.801.138,08	93.931.110.264,39	49.593.500,00	93.980.703.764,39	110.214.556.051,47



KABUPATEN BANYUASIN  
REKAPITULASI PERSEDIAAN  
PER 31 DESEMBER 2020

No	Nama Persediaan	Saldo Awal	Uraian Belanja	Reklas antar Beban	Koreksi Tambah BPK	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke aset Tetap	Beban Persediaan	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Subsidi	Reklas antar Beban	Koreksi Kurang BPK	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	351.608.943,00	Belanja Alat Tulis Kantor	5.463.089.123,00	16.238.000,00	16.132.018.083,00	-	15.747.392.035,00	-	-	-	-	-	15.747.392.035,00	736.234.991,00
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31.172.860,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	411.249.297,00	-	2.233.659.843,00	-	2.219.908.243,00	-	-	-	-	-	2.219.908.243,00	44.924.460,00
3	Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya	1.616.000,00	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	447.428.508,00	-	704.197.208,00	-	699.559.899,00	-	-	-	-	-	699.559.899,00	6.253.309,00
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	224.223.550,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.133.339.357,00	-	4.550.651.679,00	21.900.000,00	4.577.391.243,00	-	-	-	-	-	4.599.291.243,00	175.583.986,00
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	62.543.170,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	69.709.094,00	114.900.000,00	2.603.149.742,00	-	2.665.692.912,00	-	-	-	-	-	2.665.692.912,00	-
6	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	27.779.200,00	-	27.779.200,00	-	-	-	-	-	27.779.200,00	-
7	Persediaan Isi tabung gas	-	Belanja Pengisian Tabung Gas	-	-	143.465.083,00	-	143.165.083,00	-	-	-	-	-	143.165.083,00	300.000,00
8	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	-	-	5.598.211.682,00	-	-	-	-	-	5.598.211.682,00	-	5.598.211.682,00	-
9	Persediaan habis pakai lainnya	2.849.003.466,00	Belanja Habis Pakai Peralatan dan Perlengkapan lainnya	4.331.931.989,75	11.727.828.795,60	29.504.910.341,36	2.145.000,00	30.941.085.179,71	-	-	-	-	656.630.563,65	31.599.860.743,36	754.053.064,00
10	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Persediaan BLUD	844.541.620,00	-	9.927.008.031,10	-	0,00	-	-	-	1.335.196.792,50	5.463.593.056,60	6.798.789.849,10	3.128.218.182,00
11	Persediaan Bahan baku bangunan	-	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.882.380.052,00	-	4.779.715.302,00	-	4.779.715.302,00	-	-	-	-	-	4.779.715.302,00	-
12	Persediaan Bahan/bibit tanaman	-	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	106.220.272,00	-	296.642.672,00	-	296.642.672,00	-	-	-	-	-	296.642.672,00	-
13	Persediaan Bibit temak	4.350.000,00	Belanja Bibit Temak	-	-	118.625.000,00	-	122.900.000,00	-	-	-	-	-	122.900.000,00	75.000,00
14	Persediaan Bahan obat-obatan	10.571.004.557,12	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.032.892.823,75	280.635.000,00	10.530.995.633,27	-	11.328.005.813,80	-	-	-	-	-	11.328.005.813,80	9.773.994.376,59
15	Persediaan Bahan kimia	194.053.700,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	40.495.000,00	-	494.503.400,00	-	627.473.500,00	-	-	-	-	-	627.473.500,00	61.083.600,00
16	Persediaan Bahan Makanan Pakok	576.658.521,42	Belanja Persediaan Makanan Pakok	62.854.802,50	9.185.122.512,50	9.786.048.615,00	-	9.906.532.374,93	-	-	-	8.527.000,00	-	9.915.059.374,93	447.648.161,49
17	Persediaan Barang Hadiah Yang Akan Diserahkan	-	Belanja Hadiah	232.923.400,00	35.280.000,00	782.897.600,00	-	782.897.600,00	-	-	-	-	-	782.897.600,00	-
18	Persediaan Material/Bahan Lainnya	-	Belanja Bahan Percorbohan	48.719.000,00	-	1.330.428.500,00	-	1.330.428.500,00	-	-	-	-	-	1.330.428.500,00	-
19	Persediaan Barang Cetak	1.112.684.982,00	Belanja Cetak	1.889.657.868,00	6.643.000,00	10.710.573.693,00	-	10.717.775.518,00	-	-	-	-	-	10.717.775.518,00	1.105.483.157,00
20	Persediaan Barang Cetak	-	Belanja Pengandaan	3.416.052.210,00	50.000.000,00	7.502.049.464,00	-	7.501.999.464,00	-	-	-	50.000,00	-	7.502.049.464,00	-
21	Persediaan Barang Cetak	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
22	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	-	-	800.200.000,00	-	800.200.000,00	-	-	-	-	-	800.200.000,00	-
23	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Sipil Haran (PSH)	-	-	331.793.000,00	-	331.793.000,00	-	-	-	-	-	331.793.000,00	-
24	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	38.918.300,00	-	38.918.300,00	-	-	-	-	-	38.918.300,00	-
25	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Dinas Haran (PDH)	-	-	632.313.125,00	-	632.313.125,00	-	-	-	-	-	632.313.125,00	-
26	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-
27	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	224.741.500,00	-	224.741.500,00	-	-	-	-	-	224.741.500,00	-
28	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Dinas Lapangan (PDL)	-	-	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	-	-	-	-	19.200.000,00	-
29	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	31.800.000,00	1.825.769.500,00	-	1.825.769.500,00	-	-	-	-	-	1.825.769.500,00	-
30	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Tas Kerja	-	-	7.350.000,00	-	7.350.000,00	-	-	-	-	-	7.350.000,00	-
31	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	421.500.000,00	-	421.500.000,00	-	-	-	-	-	421.500.000,00	-
33	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	1.163.279.657,00	-	1.163.279.657,00	-	-	-	-	-	1.163.279.657,00	-
34	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Pakaian Olahraga	6.570.000,00	-	830.118.000,00	-	830.118.000,00	-	-	-	-	-	830.118.000,00	-

No	Nama Persediaan	Saldo Awal	Uraian Belanja	Reklas antar Beban	Koreksi Tambah BPK	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke aset Tetap	Beban Persediaan	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Subsidi	Reklas antar Beban	Koreksi Kurang BPK	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
35	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	41.183.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	293.155.655,00	-	2.907.335.655,00	-	-	206.269.500,00	-	-	293.155.655,00	35.280.000,00	534.705.155,00	2.413.813.500,00
36	Persediaan Barang Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan	-	Belanja Barang Kepada Lembaga Masyarakat Untuk Produk atau Jasa Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	5.496.310.833,63	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat	-	-	27.900.285.446,70	-	-	24.908.987.056,05	-	-	-	-	24.908.987.056,05	6.487.609.224,28
38	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	198.800.000,00	-	-	-	-	-	-
39	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	3.481.565.000,00	10.173.117.000,00	-	-	10.173.117.000,00	-	-	-	-	10.173.117.000,00	-
40	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	-	5.330.617.200,00	13.768.464.624,00	-	-	13.640.714.624,00	-	-	-	37.000.000,00	13.677.714.624,00	90.750.000,00
41	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	2.721.652.000,00	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	-	-	17.775.056.697,44	-	-	13.627.337.000,00	-	-	-	-	13.627.337.000,00	6.869.371.697,44
42	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	99.010.000,00	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.010.000,00
43	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	8.442.717.473,69	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	-	-	8.632.235.010,00	-	-	1.894.320.000,00	-	-	-	-	1.894.320.000,00	15.180.632.483,69
44	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian	-	-	153.800.000,00	-	-	153.800.000,00	-	-	-	-	153.800.000,00	-
45	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	867.590.000,00	Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	-	-	719.994.000,00	-	-	146.500.000,00	-	-	-	-	146.500.000,00	1.441.084.000,00
46	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Pemerintah Pusat	-	-	199.747.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	199.747.000,00
47	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	560.311.825,00	-	-	560.311.825,00	-	-	-	-	560.311.825,00	-
48	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	-	-	3.357.735.600,00	-	-	3.357.735.600,00	-	-	-	-	3.357.735.600,00	-
49	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Adat Istiadat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	-	Hibah Barang Modal yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non-Profesional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Persediaan	Saldo Awal	Uraian Belanja	Reklas antar Beban	Koreksi Tambah BPK	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke aset Tetap	Beban Persediaan	Beban Hibah	Beban Bantuan Sosial	Beban Subsidi	Reklas antar Beban	Koreksi Kurang BPK	Jumlah Mutasi Kurang	Saldo Akhir
51	Persediaan Barang Hibah Yang Akan Diserahkan	25.559.912.378,74	Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Desa	-	-	35.692.203.444,42	-	-	2.069.209.964,18	-	-	-	-	2.069.209.964,18	58.182.905.858,98
52	Persediaan Barang Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan	-	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	-	-	32.000.000,00	-	-	-	32.000.000,00	-	-	-	32.000.000,00	-
53	Persediaan Barang Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan	-	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Kemiskina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Persediaan Barang Bantuan Sosial Yang Akan Diserahkan	59.552.802,50	Bantuan Sosial Barang/Jasa Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Dengan Tujuan Penanggulangan Bencana	-	52.695.648.000,00	52.745.564.000,00	-	-	-	52.744.764.000,00	-	43.772.802,50	800.000,00	52.789.336.802,50	15.780.000,00
55	Persediaan habis pakai lainnya	-	Belanja Barang/Jasa yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Persediaan Barang Hadiah Yang Akan Diserahkan	-	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Persediaan Barang Hadiah Yang Akan Diserahkan	-	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Masyarakat	-	-	42.780.000,00	-	42.780.000,00	-	-	-	-	-	42.780.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>59.266.848.638,10</b>		<b>24.774.042.155,00</b>	<b>82.956.277.508,10</b>	<b>298.769.344.156,29</b>	<b>24.045.000,00</b>	<b>110.760.307.621,44</b>	<b>70.937.102.569,23</b>	<b>52.776.764.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.935.544.495,65</b>	<b>5.586.673.056,60</b>	<b>247.821.636.742,92</b>	<b>110.214.556.051,47</b>



**MUTASI ASET TETAP TANAH  
PER 31 DESEMBER 2020  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

(dalam rupiah)

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	BM MENJADI ASET	Atribut		Hasil Penilaian	Reklasifikasi Belanja Modal	Mutasi SKPD	Total Mutasi Tambah	Hibah	Hasil Inventarisasi		Reklasifikasi Belanja Modal	Mutasi SKPD Aset Tetap	Total Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2020
			Tim Pengadaan	Hibah Kementerian						Pengurangan	Reklasifikasi Jasa				
1	3	4		5			6	7		8	9	10	11	12	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.392.144.146,00	-	-	-	7.482.116.000,00	-	-	7.482.116.000,00	-	-	-	-	-	-	39.874.260.146,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	538.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538.000.000,00
Dinas Kesehatan	10.595.894.000,00	-	-	-	581.010.000,00	-	-	581.010.000,00	-	-	-	-	-	-	11.176.904.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	6.198.447.346,00	10.534.971.773,00	-	-	21.934.633.000,00	1.554.869.500,00	-	34.024.474.273,00	(1.256.000.000,00)	(199.833.000,00)	(479.779.000,00)	-	(1.935.612.000,00)	38.287.309.619,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	102.476.655.683,96	638.647.985,00	9.300.000,00	-	1.512.000.000,00	33.980.100,00	-	2.193.928.085,00	-	-	-	-	-	-	104.670.583.768,96
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	1.240.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.500.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.107.280.471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(972.247.000,00)	(972.247.000,00)	5.135.033.471,00
Dinas Ketahanan Pangan	551.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.167.600.378,00	-	-	-	1.910.270.000,00	-	-	1.910.270.000,00	(689.703.800,00)	-	-	-	(689.703.800,00)	4.388.166.578,00	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	552.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	563.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563.000.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	580.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.000.000,00
Dinas Perhubungan	6.086.884.810,00	-	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	(300.000.000,00)	-	-	-	(300.000.000,00)	5.789.884.810,00	
Dinas Komunikasi dan Informatika	541.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.194.409.525,03	-	-	24.500.000,00	-	154.905.640,79	-	179.405.640,79	-	-	-	-	-	-	4.373.815.165,82
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	623.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.000.000,00
Dinas Perikanan	940.500.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940.500.428,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.043.799.082,00	-	-	-	-	-	972.247.000,00	972.247.000,00	-	-	-	-	-	-	3.016.046.082,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	376.080.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.080.080,00
Sekretariat Daerah	175.488.774.122,00	-	-	-	-	-	-	-	(648.850.000,00)	-	-	-	-	(648.850.000,00)	174.839.924.122,00
Sekretariat DPRD	3.670.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.670.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Banyuasin I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Banyuasin III	5.444.433.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.444.433.940,00
Kecamatan Betung	155.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.400.000,00
Kecamatan rantau Bayur	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000,00
Kecamatan Pulau Rimau	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00
Kecamatan Talang Kelapa	1.639.000.002,00	-	-	-	591.016.800,00	-	-	591.016.800,00	-	-	-	-	-	-	2.230.016.802,00
Kecamatan Rambutan	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00
Kecamatan Tungkal Ilir	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000,00
Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Banyuasin II	34.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.700.000,00
Kecamatan Makarti Jaya	320.736.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.736.750,00
Kecamatan Muara Padang	41.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.300.000,00
Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Muara Telang	171.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.000.000,00
Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sumber Marga Telang	807.016.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807.016.000,00
Kecamatan Air Kumbang	843.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.480.000,00
Kecamatan Selat Penuqan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	BM MENJADI ASET	Atribut	Hibah	Hasil Penilaian	Reklasifikasi	Mutasi SKPD	Total Mutasi Tambah	Hibah	Hasil Inventarisasi	Reklasifikasi	Mutasi SKPD	Total Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2020
			Tim Pengadaan	Kementerian		Belanja Modal				Pengurangan	Reklasifikasi			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Inspektorat Daerah	541.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	490.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490.000.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	526.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	17.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.200.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	552.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>370.674.136.763,99</b>	<b>11.173.619.758,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>21.959.133.000,00</b>	<b>13.634.282.300,00</b>	<b>188.885.740,79</b>	<b>972.247.000,00</b>	<b>47.937.467.798,79</b>	<b>(2.204.850.000,00)</b>	<b>(689.703.800,00)</b>	<b>(199.833.000,00)</b>	<b>(479.779.000,00)</b>	<b>(4.546.412.800,00)</b>	<b>414.065.191.762,78</b>

**MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN  
PER 31 DESEMBER 2020  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

(dalam rupiah)

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	BM MENJADI ASET	Mutasi Tambah										Total Mutasi Tambah		
			Atribusi	Hibah		Reklasifikasi Dari Belanja Barang dan Jasa		Hutang 2020	Reklasifikasi	BTT	CSR	Mutasi SKPD			
				Tim Pengadaan	Kementerian	APBN	Aset tetap							BOS/JKN	Belanja Modal
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	156.016.812.533,88	28.035.842.011,00	-	-	2.255.420.000,00	-	-	-	3.035.540.800,00	-	-	-	-	33.326.802.811,00	
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.260.211.897,00	584.464.800,00	-	-	-	-	-	-	392.200.000,00	-	-	-	-	976.664.800,00	
Dinas Kesehatan	115.018.058.917,11	26.394.880.667,96	-	-	288.480.000,00	32.222.408,65	172.112.180,00	2.161.790.815,00	-	175.330.000,00	-	-	-	29.224.816.071,61	
Rumah Sakit Umum Daerah	44.773.303.847,89	2.253.796.131,00	-	-	551.450.000,00	-	-	-	-	9.943.873.607,00	-	-	-	12.749.119.738,00	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Desa	11.715.650.455,48	44.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.650.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	38.025.105.915,00	61.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.925.000,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan	19.051.425.044,00	4.064.662.000,00	-	-	25.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.089.862.000,00	
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran	7.648.601.592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393.616.000,00	393.616.000,00	
Dinas Sosial	3.176.618.816,00	31.799.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.600.000,00	329.399.000,00	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.292.853.540,00	111.270.000,00	-	-	183.355.000,00	-	-	-	-	-	-	-	340.620.000,00	635.245.000,00	
Dinas Kelahanan Pangan	4.486.704.874,10	44.630.000,00	-	-	6.677.621.637,00	2.990.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.725.241.637,00	
Dinas Lingkungan Hidup	20.803.353.353,00	2.013.562.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.013.562.775,00	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.711.277.137,20	664.374.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664.374.060,00	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.539.185.920,00	464.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.850.000,00	
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	12.025.453.056,00	445.487.500,00	-	-	271.700.000,00	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	24.395.000,00	743.332.500,00	
Dinas Perhubungan	18.683.577.121,00	453.976.650,00	-	-	3.385.614.467,00	-	-	-	1.362.774.292,00	-	-	-	-	5.202.365.409,00	
Dinas Komunikasi dan Informatika	14.435.840.299,02	697.534.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.615.000,00	790.149.300,00	
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Me	17.949.881.744,15	127.952.000,00	-	-	-	-	-	-	8.965.000,00	-	-	-	-	136.917.000,00	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.320.766.685,00	77.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.000.000,00	
Dinas Perikanan	8.142.285.073,00	121.100.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.100.000,00	
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	18.199.538.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.601.400.000,00	2.601.400.000,00	
Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.037.262.100,00	12.800.000,00	-	-	647.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660.200.000,00	
Sekretariat Daerah	91.077.079.978,00	9.470.396.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.511.200,00	9.973.907.720,00	
Sekretariat DPRD	33.321.107.311,23	1.301.608.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.608.000,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S	4.469.855.472,00	749.140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.140.000,00	
Kecamatan Banyuwasin I	944.012.500,00	18.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.500.000,00	
Kecamatan Banyuwasin III	1.073.879.750,00	76.119.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.119.000,00	
Kecamatan Betung	596.312.118,00	13.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.750.000,00	
Kecamatan rantau Bayur	901.487.500,00	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	
Kecamatan Pulau Rimau	1.027.541.100,00	55.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.860.000,00	
Kecamatan Talang Kelapa	1.042.822.000,00	124.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.900.000,00	
Kecamatan Rambutan	845.246.000,00	50.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.900.000,00	
Kecamatan Tungalilir	734.163.498,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14.160.000,00	-	-	20.160.000,00	
Kecamatan Tanjung Lago	838.230.500,00	70.997.000,00	-	-	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99.997.000,00	
Kecamatan Sembawa	746.317.100,00	49.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.500.000,00	
Kecamatan Suak Tapeh	657.043.000,00	40.822.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.822.014,00	
Kecamatan Banyuwasin II	921.021.089,00	246.100.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	271.100.000,00	
Kecamatan Makarti Jaya	1.077.031.365,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	
Kecamatan Muara Padang	1.038.298.500,00	23.508.892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.508.892,00	
Kecamatan Muara Sugihan	853.018.800,00	15.500.000,00	-	-	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.500.000,00	
Kecamatan Muara Telang	926.696.500,00	19.700.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	
Kecamatan Air Salek	912.651.000,00	11.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500.000,00	
Kecamatan Sumber Marga Telang	941.416.225,00	44.649.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.649.000,00	
Kecamatan Air Kumbang	811.229.500,00	48.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.500.000,00	
Kecamatan Selat Penuguan	153.970.000,00	61.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.100.000,00	
Kecamatan Karang Agung Ilir	131.625.000,00	5.950.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	35.950.000,00	
Inspektoralat Daerah	5.629.356.381,00	7.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.480.000,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelit	6.264.590.067,00	144.923.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.923.000,00	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.114.193.321,75	244.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.400.000,00	
Badan Pendapatan Daerah	7.362.405.393,35	477.293.000,00	-	-	-	-	-	169.507.800,00	-	-	-	-	-	646.800.800,00	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	4.640.494.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>730.366.863.487,16</b>	<b>80.130.653.320,96</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>11.223.691.104,00</b>	<b>3.120.850.000,00</b>	<b>206.470.208,65</b>	<b>172.112.180,00</b>	<b>2.161.790.815,00</b>	<b>4.854.480.092,00</b>	<b>10.119.203.607,00</b>	<b>14.160.000,00</b>	<b>4.253.757.200,00</b>	<b>116.258.168.527,61</b>		

(dalam rupiah)

NAMA SKPD	Mutasi Kurang										Total Mutasi Kurang	Saldo Audited 2020
	Hibah	Ekstra Kompatabel		Reklas Ke Barang Jasa APBD	Reklas Ke Barang Jasa Aset BOS	Penghapusan TP-TGR	Reklasifikasi			Mutasi SKPD Aset Tetap		
		BTT	Barang Jasa				Belanja Modal	Pinjam Pakai	Hasil Inventarisasi			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(198.800.000,00)	-	(22.270.000,00)	-	(1.702.513.112,00)	-	(69.950.100,00)	-	-	-	(1.993.533.212,00)	187.350.082.132,88
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	(447.200.000,00)	-	-	-	(447.200.000,00)	5.789.676.697,00
Dinas Kesehatan	-	(3.900.000,00)	(107.017.280,00)	(346.560.010,00)	-	-	(4.355.611.069,95)	-	-	-	(4.813.088.359,95)	139.429.786.628,77
Rumah Sakit Umum Daerah	-	(10.711.704,00)	-	(24.880.400,00)	-	-	-	-	-	-	(35.592.104,00)	57.486.831.481,89
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.760.300.455,48
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.087.030.915,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.110.880.000,00)	-	-	-	-	-	(212.746.000,00)	(369.976.000,00)	-	-	(3.693.602.000,00)	19.447.685.044,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.042.217.592,00
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	(16.156.500,00)	-	-	(16.156.500,00)	3.489.861.316,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.804.800.000,00)	(2.804.800.000,00)	6.123.298.540,00
Dinas Kelangkaan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(268.564.200,00)	(268.564.200,00)	10.943.382.311,10
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	(165.015.700,00)	-	-	(50.600.000,00)	-	(345.500.000,00)	(31.547.000,00)	(592.662.700,00)	22.224.253.428,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.375.651.197,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	(6.070.000,00)	-	(360.890.625,00)	-	(2.552.000,00)	-	-	(369.512.625,00)	4.634.523.295,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	(500.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	(500.000,00)	12.768.285.556,00
Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.885.942.530,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.225.989.599,02
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.086.798.744,15
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.397.766.685,00
Dinas Perikanan	-	-	-	(3.244.000,00)	-	-	-	-	-	-	(3.244.000,00)	8.261.141.073,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.800.938.487,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.697.462.100,00
Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	(650.647.536,00)	(248.866.400,00)	(897.000.000,00)	-	(851.246.000,00)	(2.647.759.936,00)	98.403.227.762,00
Sekretariat DPRD	-	-	-	(4.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	(4.000.000,00)	34.618.715.311,23
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	-	-	(318.240.000,00)	-	-	-	-	-	-	(318.240.000,00)	4.900.755.472,00
Kecamatan Banyuwasin I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962.512.500,00
Kecamatan Banyuwasin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149.998.750,00
Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.062.118,00
Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.487.500,00
Kecamatan Pulau Rimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.083.401.100,00
Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.167.722.000,00
Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896.146.000,00
Kecamatan Tungal Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.323.498,00
Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938.227.500,00
Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795.817.100,00
Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.865.014,00
Kecamatan Banyuwasin II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192.121.089,00
Kecamatan Makarti Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.098.031.365,00
Kecamatan Muara Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.061.807.392,00
Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897.518.800,00
Kecamatan Muara Telang	-	-	(300.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	(300.000,00)	946.396.500,00
Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.151.000,00
Kecamatan Sumber Marga Telang	-	-	-	-	-	(14.875.000,00)	-	-	-	-	(14.875.000,00)	971.190.225,00
Kecamatan Air Kumbang	-	-	-	(9.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	(9.000.000,00)	850.729.500,00
Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.070.000,00
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.575.000,00
Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.636.836.381,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.409.513.067,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(297.600.000,00)	(297.600.000,00)	10.060.993.321,75
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	(8.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	(8.000.000,00)	8.001.206.193,35
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.640.494.110,00
<b>Jumlah</b>	<b>(3.309.680.000,00)</b>	<b>(14.611.704,00)</b>	<b>(130.087.280,00)</b>	<b>(885.010.110,00)</b>	<b>(1.702.513.112,00)</b>	<b>(1.026.413.161,00)</b>	<b>(5.384.973.569,95)</b>	<b>(1.285.684.500,00)</b>	<b>(345.500.000,00)</b>	<b>(4.253.757.200,00)</b>	<b>(18.338.230.636,95)</b>	<b>828.286.801.377,82</b>



**MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN**  
**PER 31 DESEMBER 2020**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

(dalam rupiah)

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	Mutasi Tambah							Mutasi Kurang								Saldo Akhir 2020			
		BM MENJADI ASET	Hibah	Reklasifikasi Dari Belanja Barang dan Jasa	Reklasifikasi		BTT	Mutasi SKPD	Total Mutasi Tambah	Hibah	Hasil Inventarisasi	Ekstra Kompetensi		Reklasifikasi	Mutasi SKPD	Total Mutasi Kurang				
					Kementerian	DED Lebih dari 4 Tahun						Aset tetap	Belanja Modal					Barang Jasa	Belanja Modal	Aset Tetap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	543.084.718.592,57	29.050.322.421,44	-	-	-	-	-	720.444.000,00	29.770.786.421,44	-	-	-	-	(20.283.000,00)	(4.921.685.000,00)	-	(4.941.968.000,00)	567.813.517.014,01		
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8.059.894.707,39	1.375.281.000,00	-	-	-	-	-	-	1.375.281.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.435.145.707,39		
Dinas Kesehatan	175.216.805.929,71	8.747.415.792,53	-	2.428.618.500,00	-	4.348.900,00	634.298.000,00	389.305.000,00	12.201.984.792,53	-	-	-	-	-	-	-	-	187.416.790.722,24		
Rumah Sakit Umum Daerah	14.302.432.677,70	1.878.653.214,97	-	-	-	-	-	5.084.750.000,00	6.743.403.214,97	-	-	-	-	-	-	-	-	21.045.835.892,67		
Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	66.046.424.823,24	599.284.000,00	1.050.000.000,00	694.716.000,00	-	-	-	-	2.344.000.000,00	(353.319.000,00)	-	-	-	-	(25.262.111.559,78)	(25.615.430.559,78)	42.774.994.283,46			
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	5.774.534.085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.774.534.085,00		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	9.196.450.030,00	-	-	-	-	196.786.000,00	-	-	196.786.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.393.236.030,00		
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadatan Kebakaran dan Penyelamatan	3.305.924.200,00	-	-	-	-	-	-	298.190.000,00	298.190.000,00	-	(13.173.000,00)	-	-	-	-	-	(13.173.000,00)	3.590.941.200,00		
Dinas Sosial	1.751.384.000,00	-	-	-	-	-	-	953.828.090,85	953.828.090,85	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705.212.090,85		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.578.801.243,00	199.000.000,00	-	-	-	-	-	-	199.000.000,00	-	-	-	-	-	-	(1.424.393.700,00)	(1.424.393.700,00)	31.353.407.543,00		
Dinas Ketahanan Pangan	8.462.213.000,00	74.475.000,00	6.388.661.333,00	-	-	-	-	961.202.653,60	7.424.338.986,60	-	-	-	-	-	-	-	-	15.886.551.986,60		
Dinas Lingkungan Hidup	6.535.565.000,00	-	-	-	-	50.600.000,00	-	-	50.600.000,00	-	(9.000.000,00)	-	-	-	-	-	(9.000.000,00)	6.577.163.000,00		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.218.036.500,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.418.036.500,00		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.391.766.515,00	642.867.000,00	-	-	-	-	-	-	642.867.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.034.633.515,00		
Dinas Pengendalian Penduduk, Dinas Perhubungan	9.180.691.400,00	199.600.000,00	-	-	-	-	-	-	199.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.380.291.400,00		
Dinas Perhubungan	15.561.804.292,62	732.012.591,00	-	-	-	-	-	-	732.012.591,00	-	(4.000.000,00)	-	-	-	(332.564.000,00)	(336.564.000,00)	15.957.252.883,62			
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.768.902.373,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(322.532.323,25)	-	-	-	-	-	(322.532.323,25)	5.446.370.050,00		
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	98.947.810.230,61	504.676.256,38	-	-	-	-	-	-	504.676.256,38	-	(165.456.000,00)	-	-	-	(163.870.640,79)	(329.326.640,79)	99.123.168.846,20			
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	10.272.616.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(120.148.000,00)	-	-	-	-	-	(120.148.000,00)	10.152.468.000,00		
Dinas Perikanan	14.272.796.083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(95.810.742,00)	-	-	-	-	-	(95.810.742,00)	14.176.984.341,00		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	26.623.192.597,21	-	-	-	-	-	-	1.424.393.700,00	1.424.393.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.047.588.297,21		
Dinas Perkebunan dan Peternakan	6.676.277.620,00	-	1.841.772.300,00	-	-	-	-	-	1.841.772.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.521.049.920,00		
Sekretariat Daerah	78.215.252.066,00	-	-	-	49.815.000,00	-	-	9.218.279.374,41	9.286.094.374,41	-	(539.886.000,00)	-	-	-	-	(2.189.000.000,00)	(2.728.686.000,00)	82.754.660.404,41		
Sekretariat DPRD	45.895.337.364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.895.337.364,00		
Dinas Penanaman Modal dan	3.173.246.000,00	106.650.000,00	-	-	-	-	-	1.914.607.440,92	2.021.257.440,92	-	-	-	-	-	-	-	-	5.194.503.440,92		
Kecamatan Banyuwangi I	875.669.000,00	-	-	-	-	-	-	74.343.000,00	74.343.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	950.012.000,00		
Kecamatan Banyuwangi III	3.176.303.004,35	119.999.707,00	-	-	-	-	-	233.730.000,00	353.729.707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.530.032.711,35		
Kecamatan Belung	1.505.353.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.505.353.000,00		
Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kecamatan Pulau Rimau	3.258.451.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.258.451.000,00		
Kecamatan Talang Kelapa	2.199.958.064,89	-	-	-	-	-	-	1.285.298.000,00	1.285.298.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.485.256.064,89		
Kecamatan Rambutan	344.840.000,00	-	-	-	-	-	-	199.240.000,00	199.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	544.080.000,00		
Kecamatan Tungkal Ilir	1.487.963.000,00	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	(25.000.000,00)	-	-	(25.000.000,00)	-	1.487.963.000,00		
Kecamatan Tanjung Lago	-	-	1.263.175.500,00	-	-	-	-	-	1.263.175.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.263.175.500,00		
Kecamatan Sembawa	1.717.819.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.717.819.000,00		
Kecamatan Suak Tapah	1.614.720.000,00	-	-	-	-	-	-	293.755.000,00	293.755.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.908.475.000,00		
Kecamatan Banyuwangi II	747.776.600,00	-	-	-	-	-	-	1.159.318.000,00	1.159.318.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907.094.600,00		
Kecamatan Makarti Jaya	248.900.000,00	-	-	-	-	-	-	443.945.000,00	443.945.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	692.845.000,00		
Kecamatan Muara Padang	2.316.012.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.316.012.000,00		
Kecamatan Muara Sughan	-	-	1.307.857.500,00	-	-	-	-	-	1.307.857.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307.857.500,00		
Kecamatan Muara Telang	1.172.478.000,00	-	-	-	-	-	-	398.591.000,00	398.591.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.571.069.000,00		
Kecamatan Air Salek	136.232.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.232.000,00		
Kecamatan Sumber Marga Telang	-	-	-	-	-	-	-	1.653.285.000,00	1.653.285.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.653.285.000,00		
Kecamatan Air Kumbang	1.702.937.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.747.937.000,00		
Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Inspektorat Daerah	4.187.961.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.187.961.000,00		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.342.721.576,00	110.544.200,00	-	-	-	-	-	-	110.544.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.453.265.776,00		
Badan Pengelola Keuangan dan	4.967.154.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(122.000.000,00)	-	-	-	-	-	(122.000.000,00)	4.845.154.000,00		

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	Mutasi Tambah								Mutasi Kurang								Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2020
		BM MENJADI ASET	Hibah Kementerian	Reklasifikasi Dari Belanja Barang dan Jasa	Reklasifikasi		BTT	Mutasi SKPD	Total Mutasi Tambah	Hibah	Hasil Inventarisasi Pengurangan	Ekstra Kompetebel		Reklas Ke Barang Jasa BOS	Reklasifikasi Belanja Modal	Mutasi SKPD Aset Tetap			
					DED Lebih dari 4 Tahun	Aset tetap						Belanja Modal	Barang Jasa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Badan Pendapatan Daerah	619.325.000,00	249.999.950,00	-	-	-	-	-	2.189.000.000,00	2.438.999.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.058.324.950,00
Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Mansia	4.355.068.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.355.068.070,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.237.493.494.645,54</b>	<b>44.436.781.133,32</b>	<b>12.050.466.633,00</b>	<b>3.146.334.900,00</b>	<b>49.815.000,00</b>	<b>251.735.500,00</b>	<b>634.296.000,00</b>	<b>28.875.505.259,78</b>	<b>89.444.934.026,10</b>	<b>(353.319.000,00)</b>	<b>(1.391.806.065,25)</b>	<b>-</b>	<b>(25.000.000,00)</b>	<b>(20.283.000,00)</b>	<b>(5.418.119.640,78)</b>	<b>(28.875.505.259,78)</b>	<b>(36.084.032.965,82)</b>	<b>1.290.854.395.705,82</b>	

MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI, JARINGAN  
 PER 31 DESEMBER 2020  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

(Dalam Rupiah)

NAMA SKPD	BALDO AUDITED 2019	BM MENJADI ASET	Mutasi Tambah						Total Mutasi Tambah	Mutasi Kurang				Total Mutasi Kurang	Saldo Audited 2020					
			Hibah	Reklasifikasi Dari Belanja Barang dan Jasa	Hutang 2020	Reklasifikasi	BTT	Mutasi SKPD		Hibah	Normalisasi	Reklasifikasi	Mutasi SKPD							
																Kementerian	Aset tetap	Belanja Modal	Reklasifikasi	Mutasi SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.640.864.308,00	256.320.374,00	-	-	-	2.283.485.000,00	-	228.548.000,00	2.738.353.374,00	-	-	(33.394.900,00)	-	-	(33.394.900,00)	7.345.822.782,00				
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	65.331.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.331.000,00				
Dinas Kesehatan	13.550.470.900,42	161.226.798,00	-	-	5.000.000,00	4.355.611.069,95	150.000.000,00	-	4.671.837.855,85	-	-	-	-	-	-	18.282.308.759,37				
Rumah Sakit Umum Daerah	2.446.748.710,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.446.748.710,87				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	293.468.807.508,41	34.448.655.581,79	-	-	53.905.366.148,00	1.708.593.000,00	-	-	90.062.614.729,79	4.837.578.000,00	(198.940.000,00)	-	(2.321.198.000,00)	(7.357.716.000,00)	376.173.706.238,20					
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	2.246.889.148.039,90	372.282.962.678,77	-	-	15.641.950.165,00	-	-	-	402.734.977.898,16	-	(17.739.319.419,00)	-	(33.013.769.967,94)	(50.753.109.386,94)	2.598.871.016.561,12					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	4.280.463.100,00	-	-	-	-	15.960.000,00	-	-	15.960.000,00	-	-	-	-	-	-	4.296.423.100,00				
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	83.922.359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.922.359,00				
Dinas Sosial	184.448.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.448.600,00				
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.019.151.634,00	743.040.000,00	-	-	7.581.558.000,00	-	-	-	8.324.598.000,00	-	-	-	(1.379.384.840,00)	(1.379.384.840,00)	58.964.354.794,00					
Dinas Ketahanan Pangan	74.884.332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.884.332,00				
Dinas Lingkungan Hidup	14.979.137.825,00	49.948.200,00	-	-	-	-	-	-	49.948.200,00	-	-	-	-	-	-	15.029.086.025,00				
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	407.932.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.932.000,00				
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	319.812.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.812.000,00				
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.895.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.895.000,00				
Dinas Perhubungan	92.853.007.402,05	7.928.532.666,00	-	-	-	-	-	-	7.928.532.666,00	-	-	-	(1.030.210.292,00)	(1.030.210.292,00)	99.851.329.776,05					
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.137.044.397,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.137.044.397,80				
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.524.584.213,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.524.584.213,64				
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	130.861.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.861.176,00				
Dinas Perikanan	10.950.288.878,00	13.836.425,00	-	-	-	-	-	-	13.836.425,00	-	-	-	-	-	-	10.964.125.303,00				
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	7.365.326.040,00	-	-	-	-	-	-	1.379.384.840,00	1.379.384.840,00	-	-	-	-	-	-	8.744.710.880,00				
Dinas Perhubungan dan Peternakan	888.514.041,00	279.700.000,00	-	-	-	-	-	-	279.700.000,00	-	-	-	(224.000.000,00)	(224.000.000,00)	844.514.041,00					
Sekretariat Daerah	3.324.363.475,00	-	-	-	-	149.366.400,00	-	-	274.535.000,00	-	-	-	-	-	-	3.748.264.875,00				
Sekretariat DPRD	1.712.837.000,00	-	-	-	-	-	-	-	423.901.400,00	-	-	-	-	-	-	1.712.837.000,00				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	132.980.000,00	89.800.000,00	-	-	-	-	-	-	89.800.000,00	-	-	-	-	-	-	222.780.000,00				
Kecamatan Banyuwasin I	418.193.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.193.200,00				
Kecamatan Banyuwasin III	1.106.740.922,00	1.106.740.922,00	-	-	-	-	-	-	1.106.740.922,00	-	-	-	-	-	-	2.213.481.844,00				
Kecamatan Belung	517.958.650,00	511.951.840,00	-	-	-	-	-	-	74.376.000,00	-	-	-	-	-	-	1.104.286.490,00				
Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Kecamatan Pulau Rimau	2.171.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.171.600,00				
Kecamatan Talang Kelapa	1.278.159.800,00	972.406.000,00	-	-	-	-	-	-	972.406.000,00	-	(296.958.300,00)	-	-	(296.958.300,00)	1.953.607.500,00					
Kecamatan Rambutan	-	256.200.000,00	-	-	-	-	-	-	256.200.000,00	-	-	-	-	-	-	256.200.000,00				
Kecamatan Tungalir	3.110.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110.000,00				
Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Kecamatan Sembawa	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00				
Kecamatan Suak Tapeh	61.566.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.566.200,00				
Kecamatan Banyuwasin II	-	-	-	-	-	-	-	199.287.000,00	199.287.000,00	-	-	-	-	-	-	199.287.000,00				
Kecamatan Makarti Jaya	225.000.000,00	256.047.000,00	-	-	-	-	-	-	443.000.000,00	-	-	-	-	-	-	699.047.000,00				
Kecamatan Muara Padang	25.210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.210.000,00				
Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-	1.101.452.000,00	1.101.452.000,00	-	-	-	-	-	-	1.101.452.000,00				
Kecamatan Muara Telang	13.855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.855.000,00				
Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Kecamatan Sumber Marga Telang	34.991.457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.991.457,00				
Kecamatan Air Kumbang	36.870.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.870.400,00				
Kecamatan Selet Pengagan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Inspektoraat Daerah	49.767.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.767.000,00				
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	66.678.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.678.564,00				
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	656.153.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.153.487,00				
Badan Pendapatan Daerah	24.726.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.726.324,00				
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	205.191.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.191.000,00				
<b>Jumlah</b>	<b>2.782.378.264.116,09</b>	<b>419.357.368.476,96</b>	<b>61.486.924.148,00</b>	<b>17.355.543.165,00</b>	<b>14.810.065.054,39</b>	<b>6.774.422.469,95</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>3.700.582.840,00</b>	<b>523.634.906.153,90</b>	<b>(4.837.578.000,00)</b>	<b>(18.235.237.719,00)</b>	<b>(33.394.900,00)</b>	<b>(34.267.980.259,94)</b>	<b>(3.700.582.840,00)</b>	<b>(61.074.773.718,94)</b>	<b>3.224.938.396.551,05</b>				

**MUTASI ASET TETAP LAINNYA  
PER 31 DESEMBER 2020  
PEMERITAH KABUPATEN BANYUASIN**

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	BM MENJADI ASET				Total Mutasi Tambah				Total Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2020	
			Hibah		Mutasi SKPD		Reklasifikasi	Reklas Ke Barang Jasa Aset BOS	Reklas Ke Barang Jasa APBD			Mutasi SKPD
			Kementerian	Belanja Modal			Belanja Modal					Aset Tetap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.523.463.196,39	14.650.000.421,00	-	60.700.100,00	-	14.710.700.521,00	(358.090.800,00)	(258.621.364,00)	-	-	(616.712.164,00)	75.617.451.553,39
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	248.808.000,00	392.200.000,00	-	-	-	392.200.000,00	(392.200.000,00)	-	-	-	(392.200.000,00)	248.808.000,00
Dinas Kesehatan	14.878.000,00	27.419.500,00	-	-	-	27.419.500,00	(4.349.500,00)	-	(23.070.000,00)	-	(27.419.500,00)	14.878.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	146.490.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.490.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	76.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(59.850.000,00)	(59.850.000,00)	16.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	11.332.319.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.332.319.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	932.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932.625.000,00
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.573.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.573.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	56.955.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.955.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	77.705.636,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.705.636,50
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	178.141.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.141.700,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.770.122.300,00	281.477.430,00	-	-	-	281.477.430,00	(199.750.000,00)	-	(81.727.430,00)	-	(281.477.430,00)	3.770.122.300,00
Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	125.080.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.080.000,00
Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	74.000.000,00	-	-	74.000.000,00	-	-	-	-	-	74.000.000,00
Sekretariat Daerah	276.331.000,00	-	-	99.500.000,00	59.850.000,00	159.350.000,00	-	-	-	-	-	435.681.000,00
Sekretariat DPRD	646.085.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.085.100,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00
Kecamatan Banyuwasin I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Banyuwasin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Rimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Tungkal Ilir	-	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	1.300.000,00
Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Banyuwasin II	-	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	(25.000.000,00)	-	-	-	(25.000.000,00)	-

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	BM MENJADI ASET	Hibah			Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi				Total Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2020	
			Kementerian		Mutasi SKPD		Belanja Modal	Belanja Modal	Reklas Ke Barang Jasa Aset BOS	Reklas Ke Barang Jasa APBD			Mutasi SKPD Aset Tetap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Kecamatan Makarti Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecamatan Muara Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecamatan Muara Sugihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecamatan Muara Telang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecamatan Air Salek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecamatan Air Kumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecamatan Selat Penuguan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kecamatan Karang Agung Ilir	-	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-	-	-	(30.000.000,00)	-	
Inspektorat Daerah	74.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.000.000,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	301.035.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.035.200,00	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.030.000,00	4.017.200,00	-	-	-	4.017.200,00	-	-	-	-	-	19.047.200,00	
Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.641.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.641.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>79.895.433.832,89</b>	<b>15.411.414.551,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>160.200.100,00</b>	<b>59.850.000,00</b>	<b>15.705.464.651,00</b>	<b>(1.009.390.300,00)</b>	<b>(258.621.364,00)</b>	<b>(104.797.430,00)</b>	<b>(59.850.000,00)</b>	<b>(1.432.659.094,00)</b>	<b>94.168.239.389,89</b>	

**MUTASI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**PER 31 DESEMBER 2020**  
**PEMERITAH KABUPATEN BANYUASIN**

(dalam rupiah)

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	Mutasi Tambah			Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi		Mutasi SKPD Aset Tetap	Total Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2020
		Reklasifikasi	DED Tahun Berjalan	Mutasi SKPD		Belanja Modal	DED Lebih dari 4 Tahun			
		Belanja Modal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	933.236.900,00	-	-	-	-	-	(193.500.000,00)	-	(193.500.000,00)	739.736.900,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.312.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312.400.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.665.330.168,21	-	458.760.000,00	-	458.760.000,00	-	(1.146.118.000,00)	(3.926.385.000,00)	(5.072.503.000,00)	20.051.587.168,21
Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang	108.399.408.340,51	33.013.769.967,94	-	-	33.013.769.967,94	(33.980.100,00)	(3.166.555.000,00)	-	(3.200.535.100,00)	138.212.643.208,45
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.737.802.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.737.802.000,00
Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.311.534.000,00	-	-	-	-	-	(1.311.534.000,00)	-	(1.311.534.000,00)	-
Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	164.347.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	164.347.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	302.175.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	302.175.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	153.673.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	153.673.000,00
Dinas Perikanan	779.271.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	779.271.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Daerah	-	-	-	3.926.385.000,00	3.926.385.000,00	-	(49.815.000,00)	-	(49.815.000,00)	3.876.570.000,00
Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Banyuasin I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Banyuasin III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Betung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan rantau Bayur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Rimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Talang Kelapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Tungkal Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Tanjung Lago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sembawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Suak Tapeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NAMA SKPD	SALDO AUDITED 2019	Mutasi Tambah			Total Mutasi Tambah	Reklasifikasi		Mutasi SKPD Aset Tetap	Total Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2020
		Reklasifikasi	DED Tahun Berjalan	Mutasi SKPD		Belanja Modal	DED Lebih dari 4 Tahun			
		Belanja Modal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kecamatan Banyuasin II		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Makarti Jaya		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Muara Padang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Muara Sugihan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Muara Telang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Air Salek		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sumber Marga Telang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Air Kumbang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Selat Penuguan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Karang Agung Ilir		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspektorat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Pendapatan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>139.759.178.408,72</b>	<b>33.013.769.967,94</b>	<b>458.760.000,00</b>	<b>3.926.385.000,00</b>	<b>37.398.914.967,94</b>	<b>(33.980.100,00)</b>	<b>(5.867.522.000,00)</b>	<b>(3.926.385.000,00)</b>	<b>(9.827.887.100,00)</b>	<b>167.330.206.276,66</b>

**RINCIAN UTANG FIHAK KETIGA  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020**

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
20/03/2020	Kecamatan Muara Padang	202.500,00	PPh 21
20/03/2020	Kecamatan Muara Padang	1.800.000,00	PPh 21
31/08/2020	Kecamatan Muara Padang	337.500,00	PPh 21
31/08/2020	Kecamatan Muara Padang	3.000.000,00	PPh 21
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	270.000,00	PPh 21
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	2.400.000,00	PPh 21
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	156.818,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	37.500,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	102.272,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	92.045,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	47.727,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	54.545,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	54.545,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	95.454,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	62.166,00	PPh 22
03/02/2020	Kecamatan Muara Padang	123.750,00	PPh 22
06/03/2020	Kecamatan Muara Padang	20.454,00	PPh 22
16/03/2020	Kecamatan Muara Padang	24.545,00	PPh 22
31/08/2020	Kecamatan Muara Padang	95.454,00	PPh 22
31/08/2020	Kecamatan Muara Padang	306.818,00	PPh 22
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	103.636,00	PPh 22
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	67.500,00	PPh 22
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	70.909,00	PPh 22
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	47.727,00	PPh 22
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	133.636,00	PPh 22
29/12/2020	Kecamatan Muara Padang	201.750,00	PPh 22
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	432.000,00	PPh 23
03/02/2020	Kecamatan Muara Padang	40.000,00	PPh 23
03/02/2020	Kecamatan Muara Padang	24.000,00	PPh 23
03/02/2020	Kecamatan Muara Padang	150.000,00	PPh 23
03/02/2020	Kecamatan Muara Padang	100.000,00	PPh 23
06/03/2020	Kecamatan Muara Padang	132.000,00	PPh 23
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	24.000,00	PPh 23
29/12/2020	Kecamatan Muara Padang	70.000,00	PPh 23
29/12/2020	Kecamatan Muara Padang	40.000,00	PPh 23
29/12/2020	Kecamatan Muara Padang	66.000,00	PPh 23
29/12/2020	Kecamatan Muara Padang	250.000,00	PPh 23
29/12/2020	Kecamatan Muara Padang	125.000,00	PPh 23
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	145.454,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	1.045.454,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	250.000,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	681.818,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	136.363,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	613.636,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	318.181,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	363.636,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	363.636,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	636.363,00	PPn
20/01/2020	Kecamatan Muara Padang	414.444,00	PPn
03/02/2020	Kecamatan Muara Padang	825.000,00	PPn
06/03/2020	Kecamatan Muara Padang	136.364,00	PPn
31/08/2020	Kecamatan Muara Padang	636.363,00	PPn
31/08/2020	Kecamatan Muara Padang	136.363,00	PPn
31/08/2020	Kecamatan Muara Padang	2.045.454,00	PPn
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	108.636,00	PPn
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	690.909,00	PPn
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	138.182,00	PPn
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	472.727,00	PPn
28/12/2020	Kecamatan Muara Padang	318.182,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 AIR SALEK	30.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 BANYUASIN III	450.000,00	PS 21



Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 11 Rambutan	90.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	234.091,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 AIR KUMBANG	337.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 AIR KUMBANG	800.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 AIR KUMBANG	1.200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 AIR KUMBANG	809.090,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 AIR KUMBANG	1.030.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 AIR KUMBANG	2.055.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 AIR KUMBANG	465.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 AIR KUMBANG	1.030.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 AIR KUMBANG	1.680.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 AIR KUMBANG	345.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 AIR KUMBANG	225.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 AIR KUMBANG	1.350.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 AIR KUMBANG	500.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 AIR KUMBANG	67.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 AIR KUMBANG	105.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 20 AIR KUMBANG	600.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 AIR SALEK	3.787.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 AIR SALEK	230.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 AIR SALEK	900.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 AIR SALEK	1.330.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 AIR SALEK	446.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 AIR SALEK	254.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 23 AIR SALEK	501.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 AIR SALEK	960.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 AIR SALEK	65.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 AIR SALEK	90.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 AIR SALEK	460.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 AIR SALEK	187.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 AIR SALEK	120.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 AIR SALEK	45.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 AIR SALEK	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 AIR SALEK	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 BANYUASIN I	1.800.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 BANYUASIN I	240.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 BANYUASIN I	615.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 BANYUASIN I	450.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 23 BANYUASIN I	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 BANYUASIN I	2.250.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 BANYUASIN I	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 20 BANYUASIN I	4.500.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 BANYUASIN I	120.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 BANYUASIN I	1.260.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 BANYUASIN I	235.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 BANYUASIN I	95.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 BANYUASIN I	487.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 BANYUASIN I	380.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 24 BANYUASIN I	480.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 BANYUASIN I	327.272,00	PS 21
28/12/2020	SDN 25 BANYUASIN I	205.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 28 BANYUASIN I	810.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 27 BANYUASIN I	145.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 BANYUASIN I	135.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 26 BANYUASIN I	175.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 30 BANYUASIN I	321.250,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 BANYUASIN II	15.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 BANYUASIN II	320.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 BANYUASIN II	823.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 KARANG AGUNG ILIR	690.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 KARANG AGUNG ILIR	614.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 KARANG AGUNG ILIR	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 KARANG AGUNG ILIR	615.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 KARANG AGUNG ILIR	1.260.000,00	PS 21

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 11 BANYUASIN II	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 KARANG AGUNG ILIR	227.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 KARANG AGUNG ILIR	390.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 BANYUASIN II	240.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 BANYUASIN II	362.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 BANYUASIN II	280.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 BANYUASIN II	375.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 BANYUASIN III	537.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 BANYUASIN III	967.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 BANYUASIN III	545.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 BANYUASIN III	1.385.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 BANYUASIN III	1.535.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 BANYUASIN III	367.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 35 BANYUASIN III	945.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 30 BANYUASIN III	690.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 24 BANYUASIN III	1.207.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 27 BANYUASIN III	875.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 BANYUASIN III	1.497.273,00	PS 21
28/12/2020	SDN 25 BANYUASIN III	1.477.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 32 BANYUASIN III	218.181,00	PS 21
28/12/2020	SDN 28 BANYUASIN III	550.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 BANYUASIN III	450.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 BANYUASIN III	240.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 41 PLUS BANYUASIN III	24.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 34 BANYUASIN III	380.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 BANYUASIN III	787.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 33 BANYUASIN III	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 40 PERCONTOHAN BANYUASIN III	640.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 BANYUASIN III	675.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 BANYUASIN III	720.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 BANYUASIN III	1.870.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 BANYUASIN III	1.020.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 BANYUASIN III	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 39 BANYUASIN III	540.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 26 BANYUASIN III	260.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 38 BANYUASIN III	540.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 29 BANYUASIN III	230.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 23 BANYUASIN III	37.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 36 BANYUASIN III	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 31 BANYUASIN III	450.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 BETUNG	1.500.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 BETUNG	660.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 BETUNG	792.727,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 BETUNG	3.150.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 BETUNG	510.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 BETUNG	3.275.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 24 BETUNG	1.110.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 25 BETUNG	758.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 BETUNG	1.080.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 BETUNG	260.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 26 BETUNG	900.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 BETUNG	1.327.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 BETUNG	750.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 BETUNG	450.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 BETUNG	570.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 BETUNG	450.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 BETUNG	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 BETUNG	220.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 BETUNG	585.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 BETUNG	2.250.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 BETUNG	1.050.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 20 BETUNG	1.740.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 27 BETUNG	750.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 BETUNG	810.000,00	PS 21

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 23 BETUNG	120.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 MAKARTI JAYA	2.100.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 MAKARTI JAYA	502.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 Makarti Jaya	1.360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 MAKARTI JAYA	697.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 MAKARTI JAYA	270.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 MAKARTI JAYA	590.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 MAKARTI JAYA	520.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 MAKARTI JAYA	1.080.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 MAKARTI JAYA	750.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 MAKARTI JAYA	930.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 MAKARTI JAYA	780.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 MAKARTI JAYA	219.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 MAKARTI JAYA	870.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 MAKARTI JAYA	130.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 MAKARTI JAYA	382.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 MAKARTI JAYA	120.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 MAKARTI JAYA	420.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 MAKARTI JAYA	645.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 MAKARTI JAYA	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 MUARA PADANG	575.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 MUARA PADANG	1.425.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 MUARA PADANG	580.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 MUARA PADANG	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 MUARA PADANG	400.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 MUARA PADANG	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 MUARA PADANG	509.840,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 MUARA PADANG	260.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 MUARA PADANG	330.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 MUARA PADANG	294.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 MUARA PADANG	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 MUARA SUGIHAN	150.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 MUARA SUGIHAN	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 MUARA SUGIHAN	240.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 MUARA SUGIHAN	280.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 MUARA SUGIHAN	855.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 MUARA SUGIHAN	345.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 MUARA SUGIHAN	420.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 MUARA SUGIHAN	101.250,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 MUARA SUGIHAN	65.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 MUARA TELANG	742.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 MUARA TELANG	572.736,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 MUARA TELANG	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 MUARA TELANG	735.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 MUARA TELANG	317.150,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 MUARA TELANG	1.080.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 MUARA TELANG	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 MUARA TELANG	75.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 MUARA TELANG	350.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 MUARA TELANG	390.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 MUARA TELANG	405.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 MUARA TELANG	472.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 MUARA TELANG	382.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 MUARA TELANG	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 MUARA TELANG	570.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 20 MUARA TELANG	858.250,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 MUARA TELANG	295.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 MUARA TELANG	66.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 MUARA TELANG	635.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 PULAU RIMAU	210.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 SELAT PENUGUAN	930.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 PULAU RIMAU	240.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 PULAU RIMAU	210.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 PULAU RIMAU	900.000,00	PS 21

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 12 SELAT PENUGUAN	960.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 SELAT PENUGUAN	495.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 PULAU RIMAU	285.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 PULAU RIMAU	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 PULAU RIMAU	540.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 SELAT PENUGUAN	75.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 SELAT PENUGUAN	690.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 PULAU RIMAU	247.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 PULAU RIMAU	222.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 SELAT PENUGUAN	330.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 PULAU RIMAU	135.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 PULAU RIMAU	427.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 PULAU RIMAU	570.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 PULAU RIMAU	270.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 SELAT PENUGUAN	120.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 PULAU RIMAU	255.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 PULAU RIMAU	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 SELAT PENUGUAN	30.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 PULAU RIMAU	105.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 PULAU RIMAU	240.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 PULAU RIMAU	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 RAMBUTAN	1.575.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 RAMBUTAN	135.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 RAMBUTAN	1.300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 RAMBUTAN	615.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 RAMBUTAN	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 RAMBUTAN	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 RAMBUTAN	700.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 RAMBUTAN	210.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 RAMBUTAN	1.582.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 Rambutan	410.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 RAMBUTAN	1.682.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 RAMBUTAN	750.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 RAMBUTAN	1.026.750,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 RAMBUTAN	241.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 20 RAMBUTAN	380.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 Rambutan	350.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 RAMBUTAN	975.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 RAMBUTAN	645.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 23 RAMBUTAN	455.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 RAMBUTAN	335.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 RAMBUTAN	405.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 RAMBUTAN	315.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 RANTAU BAYUR	1.220.909,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 RANTAU BAYUR	325.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 RANTAU BAYUR	1.350.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 RANTAU BAYUR	462.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 RANTAU BAYUR	92.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 RANTAU BAYUR	172.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 37 RANTAU BAYUR	420.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 RANTAU BAYUR	82.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 RANTAU BAYUR	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 20 RANTAU BAYUR	455.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 RANTAU BAYUR	665.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 RANTAU BAYUR	225.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 29 RANTAU BAYUR	720.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 31 RANTAU BAYUR	720.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 30 RANTAU BAYUR	172.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 RANTAU BAYUR	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 RANTAU BAYUR	45.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 25 RANTAU BAYUR	10.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 34 RANTAU BAYUR	445.800,00	PS 21
28/12/2020	SDN 26 RANTAU BAYUR	660.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 24 RANTAU BAYUR	571.000,00	PS 21

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 12 SEMBAWA	690.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 SEMBAWA	2.160.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 SEMBAWA	2.525.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 SEMBAWA	1.112.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 22 SEMBAWA	2.275.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 SEMBAWA	480.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 SEMBAWA	875.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 SEMBAWA	1.350.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 SEMBAWA	204.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 SEMBAWA	1.440.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 SEMBAWA	585.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 SEMBAWA	723.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 SEMBAWA	1.350.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 SEMBAWA	630.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 SEMBAWA	1.870.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 sembawa	1.143.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 SEMBAWA	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 SEMBAWA	410.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 23 Sembawa	370.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 24 SEMBAWA	610.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 25 SEMBAWA	195.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 SUAK TAPEH	870.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 SUAK TAPEH	305.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 1 SUAK TAPEH	205.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 SUAK TAPEH	80.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 SUAK TAPEH	570.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 SUAK TAPEH	605.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 SUAK TAPEH	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 SUAK TAPEH	390.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 SUMBER MARGA TELANG	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 SUMBER MARGA TELANG	112.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 SUMBER MARGA TELANG	477.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 SUMBER MARGA TELANG	385.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 SUMBER MARGA TELANG	90.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 SUMBER MARGA TELANG	112.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 SUMBER MARGA TELANG	410.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 SUMBER MARGA TELANG	645.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 SUMBER MARGA TELANG	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 2 TALANG KELAPA	2.776.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 8 TALANG KELAPA	570.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 33 TALANG KELAPA	2.700.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 TALANG KELAPA	135.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 TALANG KELAPA	1.115.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 TALANG KELAPA	1.140.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 TALANG KELAPA	780.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 13 TALANG KELAPA	1.380.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 TALANG KELAPA	765.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 TALANG KELAPA	195.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 TALANG KELAPA	1.025.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 25 TALANG KELAPA	1.361.250,00	PS 21
28/12/2020	SDN 26 TALANG KELAPA	600.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 30 TALANG KELAPA	2.617.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 TALANG KELAPA	1.125.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 TALANG KELAPA	1.253.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 TALANG KELAPA	1.050.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 29 TALANG KELAPA	1.234.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 TALANG KELAPA	435.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 31 TALANG KELAPA	420.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 28 TALANG KELAPA	725.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 TALANG KELAPA	645.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 36 TALANG KELAPA	185.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 11 TANJUNG LAGO	510.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 6 TANJUNG LAGO	1.070.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 TANJUNG LAGO	825.000,00	PS 21

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 3 TANJUNG LAGO	540.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 20 TANJUNG LAGO	840.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 TANJUNG LAGO	545.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 10 TANJUNG LAGO	885.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 TANJUNG LAGO	1.050.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 14 TANJUNG LAGO	790.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 TANJUNG LAGO	55.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 23 TANJUNG LAGO	67.500,00	PS 21
28/12/2020	SDN 3 TUNGKAL ILIR	549.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 23 TUNGKAL ILIR	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 18 TUNGKAL ILIR	285.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 9 TUNGKAL ILIR	575.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 5 TUNGKAL ILIR	360.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 21 TUNGKAL ILIR	100.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 4 TUNGKAL ILIR	240.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 19 TUNGKAL ILIR	95.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 12 TUNGKAL ILIR	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 16 TUNGKAL ILIR	220.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 17 TUNGKAL ILIR	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 AIR KUMBANG	1.240.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 AIR KUMBANG	460.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 AIR SALEH	2.070.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 4 AIR SALEH	1.090.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 AIR SALEH	1.140.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 BANYUASIN I	4.662.250,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 Banyuasin I	1.724.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 4 BANYUASIN I	1.266.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 BANYUASIN I	345.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 BANYUASIN II	750.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 KARANG AGUNG ILIR	950.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 KARANG AGUNG ILIR	1.245.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 BANYUASIN III	1.695.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 4 BANYUASIN III	1.500.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 BANYUASIN III	315.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 BETUNG	2.245.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 BETUNG	990.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 BETUNG	357.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 MAKARTI JAYA	1.012.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 MAKARTI JAYA	645.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 4 MAKARTI JAYA	960.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 MAKARTI JAYA	605.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 MUARA PADANG	970.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 MUARA PADANG	200.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	480.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	1.784.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	579.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 MUARA TELANG	2.182.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 MUARA TELANG	1.320.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 MUARA TELANG	150.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 SELAT PENUGUAN	270.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 PULAU RIMAU	510.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 RAMBUTAN	1.680.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 RAMBUTAN	357.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 RAMBUTAN	300.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 RANTAU BAYUR	1.318.250,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 4 RANTAU BAYUR	960.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 6 RANTAU BAYUR	630.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 5 RANTAU BAYUR	627.500,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 RANTAU BAYUR	555.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 SEMBAWA	1.582.100,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 SEMBAWA	70.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 SUAK TAPEH	1.125.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 TANJUNG LAGO	2.402.960,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 TANJUNG LAGO	781.500,00	PS 21

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SMPN 3 TANJUNG LAGO	1.405.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	450.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 RANTAU BAYUR	2.510.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 TALANG KELAPA	1.110.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 5 BANYUASIN I	680.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 5 MUARA SUGIHAN	75.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 37 TALANG KELAPA	190.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 AIR KUMBANG	210.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 4 TALANG KELAPA	1.755.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 25 AIR SALEK	1.320.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 2 BANYUASIN II	150.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 7 RANTAU BAYUR	1.200.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 15 SUAK TAPEH	120.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 4 RAMBUTAN	135.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 6 TALANG KELAPA	550.000,00	PS 21
28/12/2020	SMPN 3 PULAU RIMAU	180.000,00	PS 21
28/12/2020	SDN 7 KARANG AGUNG ILIR	48.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 3 BANYUASIN III	896.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 23 BANYUASIN III	270.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 25 BETUNG	580.475,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 1 MAKARTI JAYA	45.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 2 MAKARTI JAYA	101.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 13 MUARA PADANG	494.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 16 MUARA PADANG	210.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 3 MUARA PADANG	441.800,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 4 MUARA PADANG	740.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 9 MUARA PADANG	450.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 17 MUARA SUGIHAN	354.600,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 19 MUARA SUGIHAN	60.750,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 21 MUARA TELANG	66.750,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 5 PULAU RIMAU	368.750,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 16 PULAU RIMAU	55.500,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 14 PULAU RIMAU	69.545,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 11 Rambutan	42.300,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 32 RANTAU BAYUR	49.800,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 5 Rantau Bayur	1.213.581,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 20 RANTAU BAYUR	48.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 16 RANTAU BAYUR	115.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 3 SEMBAWA	765.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 7 sembawa	202.500,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 20 SEMBAWA	260.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 12 SUMBER MARGA TELANG	180.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 24 TALANG KELAPA	1.420.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 18 TUNGKAL ILIR	48.886,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 2 AIR KUMBANG	180.000,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 5 RANTAU BAYUR	3.297.000,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 1 SUAK TAPEH	1.524.000,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 3 SUAK TAPEH	225.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 5 KARANG AGUNG ILIR	1.050.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 7 KARANG AGUNG ILIR	90.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 8 KARANG AGUNG ILIR	138.375,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 6 BETUNG	4.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 3 MAKARTI JAYA	1.736.400,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 1 MUARA PADANG	169.920,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 3 MUARA PADANG	448.300,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 5 SELAT PENUGUAN	360.825,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 6 PULAU RIMAU	89.200,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 21 SEMBAWA	15.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 24 SEMBAWA	150.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 25 SEMBAWA	615.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 1 SUAK TAPEH	106.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 7 SUAK TAPEH	20.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 10 SUMBER MARGA TELANG	112.000,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 2 TALANG KELAPA	486.000,00	Ps 22

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 33 TALANG KELAPA	232.460,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 21 TALANG KELAPA	147.500,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 28 TALANG KELAPA	126.000,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 4 AIR SALEH	161.125,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 2 MAKARTI JAYA	252.500,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 1 SEMBAWA	237.950,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 2 TANJUNG LAGO	445.970,00	Ps 22
28/12/2020	SMPN 6 TALANG KELAPA	17.500,00	Ps 22
28/12/2020	SDN 12 AIR KUMBANG	975.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 AIR KUMBANG	1.393.450,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 AIR KUMBANG	1.370.150,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 AIR KUMBANG	2.076.728,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 AIR KUMBANG	1.037.400,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 AIR KUMBANG	2.975.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 AIR KUMBANG	1.104.400,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 AIR KUMBANG	606.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 AIR KUMBANG	1.114.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 AIR KUMBANG	52.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 AIR KUMBANG	454.546,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 AIR KUMBANG	866.774,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 AIR SALEK	3.706.400,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 AIR SALEK	3.024.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 21 AIR SALEK	1.181.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 AIR SALEK	214.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 AIR SALEK	375.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 23 AIR SALEK	352.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 AIR SALEK	300.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 AIR SALEK	704.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 AIR SALEK	1.937.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 AIR SALEK	275.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 AIR SALEK	1.138.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 AIR SALEK	400.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 22 AIR SALEK	197.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 AIR SALEK	560.510,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 AIR SALEK	112.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 BANYUASIN I	7.161.250,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 BANYUASIN I	314.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 BANYUASIN I	8.441.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 BANYUASIN I	2.196.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 BANYUASIN I	330.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 BANYUASIN I	203.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 BANYUASIN I	1.007.999,00	PPn
28/12/2020	SDN 28 BANYUASIN I	385.060,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 BANYUASIN II	13.170.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 BANYUASIN II	2.365.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 BANYUASIN II	3.881.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 BANYUASIN II	8.483.700,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 KARANG AGUNG ILIR	1.367.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 KARANG AGUNG ILIR	1.863.545,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 KARANG AGUNG ILIR	1.839.545,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 KARANG AGUNG ILIR	249.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 KARANG AGUNG ILIR	225.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 BANYUASIN II	604.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 KARANG AGUNG ILIR	3.820.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 KARANG AGUNG ILIR	3.810.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 BANYUASIN II	1.805.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 BANYUASIN II	500.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 BANYUASIN II	359.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 BANYUASIN II	5.331.362,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 BANYUASIN II	831.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 BANYUASIN II	1.000.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 BANYUASIN II	245.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 BANYUASIN III	1.384.622,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 BANYUASIN III	1.043.998,00	PPn



Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 6 BANYUASIN III	2.043.181,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 BANYUASIN III	3.225.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 BANYUASIN III	1.939.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 35 BANYUASIN III	1.110.300,00	PPn
28/12/2020	SDN 30 BANYUASIN III	1.590.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 24 BANYUASIN III	500.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 27 BANYUASIN III	400.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 21 BANYUASIN III	866.687,00	PPn
28/12/2020	SDN 25 BANYUASIN III	1.010.626,00	PPn
28/12/2020	SDN 32 BANYUASIN III	2.438.725,00	PPn
28/12/2020	SDN 28 BANYUASIN III	715.727,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 BANYUASIN III	784.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 BANYUASIN III	120.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 41 PLUS BANYUASIN III	3.852.640,00	PPn
28/12/2020	SDN 22 BANYUASIN III	565.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 BANYUASIN III	283.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 BANYUASIN III	1.700.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 39 BANYUASIN III	400.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 26 BANYUASIN III	1.460.920,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 BANYUASIN III	4.192.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 38 BANYUASIN III	259.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 23 BANYUASIN III	537.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 36 BANYUASIN III	1.823.637,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 BANYUASIN III	587.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 31 BANYUASIN III	354.546,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 BETUNG	3.131.087,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 BETUNG	2.555.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 BETUNG	2.502.272,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 BETUNG	1.000.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 BETUNG	1.479.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 BETUNG	1.199.997,00	PPn
28/12/2020	SDN 25 BETUNG	583.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 BETUNG	500.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 BETUNG	480.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 26 BETUNG	818.181,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 BETUNG	1.236.362,00	PPn
28/12/2020	SDN 21 BETUNG	650.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 BETUNG	1.340.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 BETUNG	250.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 BETUNG	524.636,00	PPn
28/12/2020	SDN 27 BETUNG	259.545,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 BETUNG	268.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 MAKARTI JAYA	2.017.159,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 MAKARTI JAYA	292.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 Makarti Jaya	612.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 MAKARTI JAYA	636.362,00	PPn
28/12/2020	SDN 15 MAKARTI JAYA	465.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 MAKARTI JAYA	215.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 MAKARTI JAYA	282.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 MAKARTI JAYA	300.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 MAKARTI JAYA	565.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 MAKARTI JAYA	747.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 MAKARTI JAYA	1.117.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 MUARA PADANG	1.250.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 MUARA PADANG	437.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 MUARA PADANG	86.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 MUARA PADANG	1.050.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 MUARA PADANG	400.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 MUARA PADANG	587.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 MUARA PADANG	923.425,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 MUARA PADANG	484.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 MUARA PADANG	240.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 MUARA PADANG	431.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 MUARA SUGIHAN	1.799.500,00	PPn

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 17 MUARA SUGIHAN	2.364.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 MUARA SUGIHAN	4.179.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 MUARA SUGIHAN	236.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 MUARA SUGIHAN	1.770.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 MUARA SUGIHAN	400.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 MUARA SUGIHAN	524.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 25 MUARA SUGIHAN	350.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 MUARA SUGIHAN	181.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 MUARA SUGIHAN	201.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 MUARA SUGIHAN	1.067.650,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 MUARA SUGIHAN	850.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 MUARA SUGIHAN	797.453,00	PPn
28/12/2020	SDN 24 MUARA SUGIHAN	1.599.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 MUARA SUGIHAN	405.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 MUARA SUGIHAN	709.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 MUARA SUGIHAN	1.615.681,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 MUARA SUGIHAN	318.400,00	PPn
28/12/2020	SDN 23 MUARA SUGIHAN	2.049.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 MUARA SUGIHAN	562.272,00	PPn
28/12/2020	SDN 22 MUARA SUGIHAN	919.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 MUARA SUGIHAN	464.544,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 MUARA TELANG	2.443.399,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 MUARA TELANG	5.015.330,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 MUARA TELANG	2.617.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 MUARA TELANG	2.698.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 MUARA TELANG	1.293.550,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 MUARA TELANG	2.264.217,00	PPn
28/12/2020	SDN 15 MUARATELANG	1.028.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 MUARA TELANG	1.672.253,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 MUARA TELANG	226.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 MUARA TELANG	4.228.300,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 MUARA TELANG	750.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 21 MUARA TELANG	445.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 MUARA TELANG	3.973.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 MUARA TELANG	483.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 MUARA TELANG	291.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 MUARA TELANG	1.681.700,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 PULAU RIMAU	930.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 SELAT PENUGUAN	99.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 PULAU RIMAU	960.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 PULAU RIMAU	1.168.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 SELAT PENUGUAN	646.045,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 SELAT PENUGUAN	921.875,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 PULAU RIMAU	925.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 SELAT PENUGUAN	1.134.850,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 PULAU RIMAU	1.688.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 SELAT PENUGUAN	350.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 SELAT PENUGUAN	188.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 PULAU RIMAU	1.975.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 PULAU RIMAU	995.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 PULAU RIMAU	370.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 PULAU RIMAU	463.636,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 PULAU RIMAU	300.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 15 PULAU RIMAU	100.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 SELAT PENUGUAN	211.273,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 PULAU RIMAU	15.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 PULAU RIMAU	225.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 PULAU RIMAU	681.818,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 RAMBUTAN	3.261.845,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 RAMBUTAN	155.090,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 RAMBUTAN	1.059.997,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 RAMBUTAN	708.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 RAMBUTAN	1.533.633,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 RAMBUTAN	181.000,00	PPn

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 7 RAMBUTAN	2.714.545,00	PPn
28/12/2020	SDN 15 RAMBUTAN	1.788.700,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 Rambutan	1.435.976,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 RAMBUTAN	673.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 RAMBUTAN	31.181,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 RAMBUTAN	1.928.274,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 RAMBUTAN	490.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 Rambutan	281.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 RAMBUTAN	500.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 22 RAMBUTAN	2.071.226,00	PPn
28/12/2020	SDN 23 RAMBUTAN	1.589.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 RAMBUTAN	600.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 RAMBUTAN	454.544,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 RAMBUTAN	395.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 24 RAMBUTAN	454.545,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 RANTAU BAYUR	3.666.108,00	PPn
28/12/2020	SDN 32 RANTAU BAYUR	6.818.300,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 RANTAU BAYUR	3.428.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 RANTAU BAYUR	1.290.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 RANTAU BAYUR	159.090,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 RANTAU BAYUR	720.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 15 RANTAU BAYUR	951.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 37 RANTAU BAYUR	1.800.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 RANTAU BAYUR	450.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 RANTAU BAYUR	1.440.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 RANTAU BAYUR	3.718.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 29 RANTAU BAYUR	1.300.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 28 RANTAU BAYUR	180.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 31 RANTAU BAYUR	2.131.891,00	PPn
28/12/2020	SDN 30 RANTAU BAYUR	2.207.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 RANTAU BAYUR	690.909,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 RANTAU BAYUR	1.363.635,00	PPn
28/12/2020	SDN 25 RANTAU BAYUR	1.425.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 34 RANTAU BAYUR	927.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 24 RANTAU BAYUR	1.035.636,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 SEMBAWA	1.614.527,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 SEMBAWA	6.345.400,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 SEMBAWA	3.233.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 SEMBAWA	6.250.430,00	PPn
28/12/2020	SDN 22 SEMBAWA	4.106.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 SEMBAWA	140.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 SEMBAWA	206.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 SEMBAWA	3.019.310,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 SEMBAWA	1.235.100,00	PPn
28/12/2020	SDN 15 SEMBAWA	1.294.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 SEMBAWA	420.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 SEMBAWA	800.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 SEMBAWA	360.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 SEMBAWA	227.020,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 SEMBAWA	4.392.900,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 SEMBAWA	986.700,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 SEMBAWA	1.380.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 sembawa	754.600,00	PPn
28/12/2020	SDN 21 SEMBAWA	875.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 SUAK TAPEH	731.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 SUAK TAPEH	1.413.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 SUAK TAPEH	650.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 SUAK TAPEH	259.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 SUAK TAPEH	300.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 SUAK TAPEH	250.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 SUAK TAPEH	454.545,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 SUAK TAPEH	1.052.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 SUAK TAPEH	512.818,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 SUMBER MARGA TELANG	6.771.525,00	PPn

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SDN 10 SUMBER MARGA TELANG	1.222.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 SUMBER MARGA TELANG	1.871.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 9 SUMBER MARGA TELANG	449.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 SUMBER MARGA TELANG	1.750.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 SUMBER MARGA TELANG	4.216.425,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 SUMBER MARGA TELANG	449.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 TALANG KELAPA	17.519.925,00	PPn
28/12/2020	SDN 1 TALANG KELAPA	10.803.728,00	PPn
28/12/2020	SDN 8 TALANG KELAPA	3.892.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 32 TALANG KELAPA	13.752.914,00	PPn
28/12/2020	SDN 24 TALANG KELAPA	10.681.838,00	PPn
28/12/2020	SDN 33 TALANG KELAPA	3.774.450,00	PPn
28/12/2020	SDN 12 TALANG KELAPA	1.694.175,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 TALANG KELAPA	750.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 TALANG KELAPA	2.220.700,00	PPn
28/12/2020	SDN 21 TALANG KELAPA	4.751.083,00	PPn
28/12/2020	SDN 35 TALANG KELAPA	6.306.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 34 TALANG KELAPA	4.276.090,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 TALANG KELAPA	2.672.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 22 TALANG KELAPA	395.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 TALANG KELAPA	4.243.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 TALANG KELAPA	2.211.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 TALANG KELAPA	1.696.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 TALANG KELAPA	3.862.450,00	PPn
28/12/2020	SDN 25 TALANG KELAPA	3.389.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 26 TALANG KELAPA	1.710.269,00	PPn
28/12/2020	SDN 30 TALANG KELAPA	6.209.569,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 TALANG KELAPA	1.202.725,00	PPn
28/12/2020	SDN 27 TALANG KELAPA	736.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 TALANG KELAPA	175.800,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 TALANG KELAPA	466.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 29 TALANG KELAPA	3.908.170,00	PPn
28/12/2020	SDN 28 TALANG KELAPA	281.073,00	PPn
28/12/2020	SDN 11 TANJUNG LAGO	2.790.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 TANJUNG LAGO	1.090.250,00	PPn
28/12/2020	SDN 7 TANJUNG LAGO	1.730.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 TANJUNG LAGO	3.340.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 TANJUNG LAGO	1.516.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 20 TANJUNG LAGO	2.050.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 16 TANJUNG LAGO	1.143.350,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 TANJUNG LAGO	808.750,00	PPn
28/12/2020	SDN 10 TANJUNG LAGO	3.795.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 TANJUNG LAGO	975.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 TANJUNG LAGO	1.489.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 15 TANJUNG LAGO	1.990.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 17 TANJUNG LAGO	465.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 TANJUNG LAGO	1.262.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 23 TANJUNG LAGO	1.900.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 3 TUNGKAL ILIR	2.907.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 13 TUNGKAL ILIR	1.234.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 23 TUNGKAL ILIR	2.351.500,00	PPn
28/12/2020	SDN 14 TUNGKAL ILIR	500.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 18 TUNGKAL ILIR	1.060.909,00	PPn
28/12/2020	SDN 22 TUNGKAL ILIR	1.270.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 24 TUNGKAL ILIR	1.715.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 5 TUNGKAL ILIR	375.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 4 TUNGKAL ILIR	531.364,00	PPn
28/12/2020	SDN 6 TUNGKAL ILIR	650.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 19 TUNGKAL ILIR	130.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 2 TUNGKAL ILIR	450.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 AIR KUMBANG	5.472.650,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 AIR KUMBANG	632.500,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 AIR SALEH	669.650,00	PPn
28/12/2020	SMPN 4 AIR SALEH	1.601.400,00	PPn

Tanggal BKU	Nama OPD	Utang Pajak	Jenis Pajak
28/12/2020	SMPN 3 AIR SALEH	876.500,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 Banyuasin I	3.998.587,00	PPn
28/12/2020	SMPN 4 BANYUASIN I	4.567.500,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 BANYUASIN I	1.014.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 BANYUASIN II	9.641.815,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 KARANG AGUNG ILIR	3.770.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 KARANG AGUNG ILIR	1.540.900,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 BANYUASIN III	12.361.195,00	PPn
28/12/2020	SMPN 4 BANYUASIN III	2.886.840,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 BANYUASIN III	2.410.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 BETUNG	956.800,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 BETUNG	2.363.513,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 BETUNG	1.500.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 MAKARTI JAYA	3.151.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 4 MAKARTI JAYA	2.615.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 MAKARTI JAYA	4.954.700,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 MUARA PADANG	4.405.900,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 MUARA SUGIHAN	1.973.637,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 MUARA SUGIHAN	6.850.173,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 MUARA SUGIHAN	8.309.400,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 MUARA TELANG	4.367.800,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 MUARA TELANG	3.572.700,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 MUARA TELANG	2.790.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 PULAU RIMAU	1.947.460,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 SELAT PENUGUAN	5.341.400,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 PULAU RIMAU	392.400,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 RAMBUTAN	6.091.900,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 RAMBUTAN	1.818.250,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 RANTAU BAYUR	112.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 4 RANTAU BAYUR	4.105.200,00	PPn
28/12/2020	SMPN 6 RANTAU BAYUR	1.961.500,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 RANTAU BAYUR	4.066.700,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 SEMBAWA	9.477.636,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 SEMBAWA	2.363.500,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 SUAK TAPEH	436.363,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 SUAK TAPEH	3.748.450,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 SUAK TAPEH	4.057.700,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 SUMBER MARGA TELANG	3.265.533,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 TANJUNG LAGO	3.654.720,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 TANJUNG LAGO	6.399.800,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 TANJUNG LAGO	4.192.500,00	PPn
28/12/2020	SMPN 1 TUNGKAL ILIR	500.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 TUNGKAL ILIR	3.347.850,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 RANTAU BAYUR	3.373.440,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 TALANG KELAPA	1.181.545,00	PPn
28/12/2020	SMPN 5 BANYUASIN I	1.400.000,00	PPn
28/12/2020	SDN 37 TALANG KELAPA	2.662.210,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 AIR KUMBANG	545.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 4 TALANG KELAPA	2.181.200,00	PPn
28/12/2020	SDN 25 AIR SALEK	1.598.250,00	PPn
28/12/2020	SMPN 2 BANYUASIN II	5.723.800,00	PPn
28/12/2020	SMPN 6 MUARA SUGIHAN	300.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 7 RANTAU BAYUR	1.686.370,00	PPn
28/12/2020	SMPN 4 RAMBUTAN	168.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 5 TALANG KELAPA	950.000,00	PPn
28/12/2020	SMPN 3 PULAU RIMAU	181.818,00	PPn
		<b>1.017.400.919,00</b>	

**DAFTAR UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA  
KABUPATEN BANYUASIN  
PER 31 DESEMBER 2020**

(dalam rupiah)

Mutasi Utang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Mutasi Utang							Koreksi Utang Aset	Koreksi Utang Beban	Saldo Akhir Utang per 31 MARET 2020			KET			
					Beban	Aset Tetap		Penambahan Utang Tahun 2020			No. SP2D	Pengurangan Utang Tahun 2020 (OPD)					Beban	Aset	Jumlah Pembayaran		Beban	Aset	Jumlah Utang
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan		Beban	Aset	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15=13+14	16	17	18=7+9-13+17	19=7+10-14+16	20=18+19	24			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. ABADI PERKASA	Pembangunan Pos Jaga SDN 41 Plus BA III pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Banyuasin Thn.2017	425/203/SPK/Dikdas/Dikporapar/APBD/2017	49.637.000,00	-	2.481.850,00	2.481.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.481.850,00	2.481.850,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. OETAMA DJAJA PERKASA	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 06 Muara Telang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Banyuasin Thn.2017	425/03/SPK/Dikdas/Dikporapar/APBD/2017	197.760.000,00	-	9.888.000,00	9.888.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.888.000,00	9.888.000,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. LIMA SAUDARA	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 17 Makarti Jaya pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Banyuasin Thn.2017	425/111/SPK/Dikdas/Dikporapar/APBD/2017	198.840.000,00	-	9.942.000,00	9.942.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.942.000,00	9.942.000,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. OETAMA DJAJA PERKASA	Pembangunan Gedung Sekolah (USB) SMPN 3 Tungkallir pada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Banyuasin TA.2017	420/132/SPK/PPK/Dikdikporapar/APBD/2017	842.905.745,16	-	42.145.287,00	42.145.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.145.287,00	42.145.287,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. PELABUHAN ALAM	Pemasangan Conblock PDD AKN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	420/052/SPK/Pendidikan/APBD/2016 (24-06-16)	149.649.000,00	7.482.450,00	-	7.482.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.482.450,00	-	7.482.450,00			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. MUTIARA SYAMS	Pembuatan Selasar Penghubung PDD AKN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	420/067/SPK/Pendidikan/APBD/2016 (24-06-16)	148.923.000,00	7.446.150,00	-	7.446.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.446.150,00	-	7.446.150,00			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. ORJAJA	Pengadaan Pintu Fingerprint pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	420/08.1/SPK/PPK-Sek/Pendidikan/2016 (27-01-16)	149.700.000,00	7.485.000,00	-	7.485.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.485.000,00	-	7.485.000,00			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. RANDIKA ARUNG PALAKKA	Pembuatan Kantin Kampus PDD AKN pada Dinas Pendidikan Kab. Banyuasin Tahun 2016	420/144/Sekr/SPK/Pendidikan/APBD/2016 (07-09-16)	100.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. ANANDA JAYA	Pembangunan Saung PDD AKN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	420/236/SPK/PPK-Sek/Pendidikan/APBD/2016 (15-08-16)	59.966.000,00	2.998.300,00	-	2.998.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.998.300,00	-	2.998.300,00			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. RAMADHANI	Pembangunan Green House PDD AKN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	420/240/SPK/PPK-Sek/Pendidikan/APBD/2016 (15-08-16)	79.990.000,00	3.999.500,00	-	3.999.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.999.500,00	-	3.999.500,00			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. PUTRA LABA	Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SDN 17 Makarti Jaya Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016	425/257/SPK/PPK-Dikdas/Pendidikan/APBD/2016 (31-08-16)	215.630.000,00	-	10.781.500,00	10.781.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.781.500,00	10.781.500,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. YOANDA PUTRA	Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SDN 20 Muara Telang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015	425/189/PPK-SPK/Pendidikan/APBD/2015 tgl. 05/06/2015	198.199.000,00	-	9.909.950,00	9.909.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.909.950,00	9.909.950,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. ECHARIO PRATAMA	Pembangunan Sarana Gedung Sekolah (MCK) SDN 7 Muara Telang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015	425/176/PPK-SPK/Pendidikan/APBD/2015 tgl. 05/06/2015	93.103.000,00	-	4.655.150,00	4.655.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.655.150,00	4.655.150,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. ECHARIO PRATAMA	Pembangunan Sarana Gedung Sekolah (MCK) SDN 2 Muara Telang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015	425/177/PPK-SPK/Pendidikan/APBD/2015 tgl. 05/06/2015	93.093.000,00	-	4.654.650,00	4.654.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.654.650,00	4.654.650,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. ALDAFFI PUTRA HK	Rehabilitasi Laboratorium Fisika SMAN 1 Makarti Jaya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015	420/020/PPK/Dikmen/Pendidikan-APBD/2015 tgl. 04/08/2015	118.571.000,00	-	5.928.550,00	5.928.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.928.550,00	5.928.550,00				
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. Duta Lebung	Rehabilitasi Gedung TK/PAUD Maju Bersama Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014	420/95.L/SKPPK-PL/PNF/Pendidikan/APBD/2014	18.181.922,00	909.096,00	-	909.096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909.096,00	-	909.096,00			

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Mutasi Hutang						Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET			
					Beban	Aset Tetap		Penambahan Hutang Tahun 2020			No. SP2D	Pengurangan Hutang Tahun 2020 (OPD)				Jumlah Pembayaran	Beban	Aset		Jumlah Hutang		
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan		Beban	Aset									
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. Bintang Harapan	Pembangunan Muahallat SMAN 1 Muara Sugihan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014	425/20/PPK-SPK/Pendidikan/2014	50.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. Indah Permata	Pembangunan Gedung PAUD/TK Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014	420/95.e/SKPPK-PL/PNF/Pendidikan/APB/D/2014	99.880.000,00	4.994.000,00	-	4.994.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.994.000,00	-	4.994.000,00	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. Indah Permata	Pembangunan Gedung PAUD/TK Desa Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimau pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014	420/96.f/SKPPK-PL/Pendidikan/APBD/2014	99.770.000,00	4.988.500,00	-	4.988.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.988.500,00	-	4.988.500,00	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. LS	REHABILITASI KANTOR UPT RANTAU BAYUR (REJUMBUK)	425/20/Pendidikan/2013	137.773.000,00	-	6.888.650,00	6.888.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.888.650,00	6.888.650,00	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. Fa	RK 1 lokal SMP Ar-Rahma TJ. Lago	425/65/DAK-SMP/PEND/2012	147.170.000,00	7.358.500,00	-	7.358.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.358.500,00	-	7.358.500,00	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. Do	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 10 Muara Sugihan Kecamatan Muara Sugihan	425/123/SP/DAK.SD/Pen/2012	153.200.000,00	-	7.660.000,00	7.660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.660.000,00	7.660.000,00	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. Di	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 25 Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau	425/132/SP/DAK.SD/Pen/2012	152.000.000,00	-	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000,00	7.600.000,00	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV. MU	Rehabilitasi 4 (empat) Ruang Kelas SDN 14 Ar Saleh Kecamatan Air Saleh	425/137/SP/DAK.SD/Pen/2012	327.674.000,00	-	16.383.700,00	16.383.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.383.700,00	16.383.700,00	
<b>JUMLAH OPD</b>				<b>3.881.615.667,16</b>	<b>52.661.496,00</b>	<b>141.419.287,00</b>	<b>194.080.783,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>52.661.496,00</b>	<b>141.419.287,00</b>	<b>194.080.783,00</b>	
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	CV. Cahya Nagara	Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Kec. Tanjung Lago Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	027/1184.a/SPKP/Parsenpor-OR/2014 Tgl. 11/10/2014	342.746.000,00	17.137.300,00	-	17.137.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.137.300,00	-	17.137.300,00	Mutasi Dari DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	CV. LaBe	Pekerjaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	027/933/SPK/Parsenpor-OR/2013 tgl. 31/07/2013	490.450.000,00	24.522.500,00	-	24.522.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.522.500,00	-	24.522.500,00	Mutasi Dari DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	CV. HBS	Pekerjaan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kampung Sawah Besar	027/932/Parsenpor-OR/2013 tgl 31/07/2013	342.927.000,00	17.146.350,00	-	17.146.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.146.350,00	-	17.146.350,00	Mutasi Dari DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	CV. SRM	Pembangunan Lapangan Basket di Lingkungan Komplek Rumah Dinas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	027/1145/Parsenpor-OR/2012 tgl. 24/10/2012	367.450.000,00	18.372.500,00	-	18.372.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.372.500,00	-	18.372.500,00	Mutasi Dari DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
<b>JUMLAH OPD</b>				<b>1.543.573.000,00</b>	<b>77.178.650,00</b>	-	<b>77.178.650,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>77.178.650,00</b>	-	<b>77.178.650,00</b>	
Dinas Kesehatan	PT. MEDTRACOS ESANA PRIMA	Belanja Obat-obatan dan BMHP RSP dan Puskesmas berdasarkan SPH : 900/72/SPH/KES/2020	027/032/SPK/DAK/KES/2020	337.379.000,00	-	-	337.379.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.379.000,00	-	337.379.000,00	
Dinas Kesehatan	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	Belanja Obat-obatan dan BMHP pada RSP dan Puskesmas Berdasarkan SPH : 900/73/SPH/KES/2020	027/033/SPK/PRK/KES/2020	472.436.280,00	-	-	472.436.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472.436.280,00	-	472.436.280,00	
Dinas Kesehatan	PT. PARIT PADANG GLOBAL	Belanja Obat-obatan dan BMHP pada RSP dan Puskesmas Berdasarkan SPH : 900/74/SPH/KES/2020	027/034/SPK/PRK/KES/2020	235.074.900,00	-	-	235.074.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.074.900,00	-	235.074.900,00	

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang										Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET
					Saldo Awal Tahun 2020		Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020				Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020						
					Beban	Aset Tetap	Jumlah	Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020						Beban	Aset	Jumlah Hutang	
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan	No. SP2D	Beban	Aset	Jumlah Pembayaran						
Dinas Kesehatan	PT. KARYA PRATAMA	Pengadaan Belanja Alat Kedokteran Umum Berdasarkan SPH : 900/76/SPH/KES/2020	027/673/SPK/PRK/KES/2020	253.459.600,00	-	-	-	-	253.459.600,00	253.459.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	253.459.600,00	253.459.600,00
Dinas Kesehatan	PT. ANUGRAH YADEN UTAMA	Pengadaan Alat Kedokteran Umum berdasarkan SPH : 900/76/SPH/KES/2020	027/685/SPK/PRK/KES/2020	784.296.115,00	-	-	-	-	784.296.115,00	784.296.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	784.296.115,00	784.296.115,00
Dinas Kesehatan	PT. BUMA INDONESIA	PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM berdasarkan SPH : 900/77/SPH/KES/2020	027/694/SPK/PRK/KES/2020	303.600.100,00	-	-	-	-	303.600.100,00	303.600.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	303.600.100,00	303.600.100,00
Dinas Kesehatan	PT. PERMANA PUTRA MANDIRI	Belanja Alat Kesehatan RSP Makarti Jaya	027/701/SPK/PRK/KES/2020	820.435.000,00	-	-	-	-	820.435.000,00	820.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	820.435.000,00	820.435.000,00
Dinas Kesehatan	RSUP. Dr. Muhammad Hoesin Palembang	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim JAMPERSAL Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 900/06/SPH/KES/2020 Tgl 12 Januari 2021	Nomor: 441/275/KES/2020	297.005.936,00	-	-	-	-	297.005.936,00	297.005.936,00	-	-	-	-	-	-	-	297.005.936,00	-	297.005.936,00
Dinas Kesehatan	RS Muhammadiyah	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim JAMPERSAL Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 900/07/SPH/KES/2020 Tgl 12 Januari 2021	Nomor: 667/KES-BA/2020	303.294.200,00	-	-	-	-	303.294.200,00	303.294.200,00	-	-	-	-	-	-	-	303.294.200,00	-	303.294.200,00
Dinas Kesehatan	RS Pelabuhan Palembang	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim JAMPERSAL Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 900/08/SPH/KES/2020 Tgl 12 Januari 2021	Nomor: 668/KES-BA/2020	494.132.900,00	-	-	-	-	494.132.900,00	494.132.900,00	-	-	-	-	-	-	-	494.132.900,00	-	494.132.900,00
Dinas Kesehatan	RS Islam Siti Khadjah	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim JAMPERSAL Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 900/09/SPH/KES/2020 Tgl 12 Januari 2021	Nomor: 665/KES-BA/2020	30.248.200,00	-	-	-	-	30.248.200,00	30.248.200,00	-	-	-	-	-	-	-	30.248.200,00	-	30.248.200,00
Dinas Kesehatan	RS. MUHAMMADIYAH	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim Program Transisi JAMSOSKES Sumseil Semesta ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 0001/SPH/1.02.01.01/2020 Tgl 30 Desember 2020	027/893/KES-BA/2020	57.014.200,00	-	-	-	-	57.014.200,00	57.014.200,00	-	-	-	-	-	-	-	57.014.200,00	-	57.014.200,00
Dinas Kesehatan	RS. ISLAM SITI KHODIJAH PALEMBANG	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim Program Transisi JAMSOSKES Sumseil Semesta ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 0002/SPH/1.02.01.01/2020 Tgl 30 Desember 2020	027/900/KES-BA/2020	199.230.700,00	-	-	-	-	199.230.700,00	199.230.700,00	-	-	-	-	-	-	-	199.230.700,00	-	199.230.700,00
Dinas Kesehatan	RSUP Dr. Rivai Abdullah	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim Program Transisi JAMSOSKES Sumseil Semesta ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 0003/SPH/1.02.01.01/2020 Tgl 30 Desember 2020	027/034/KES-BA/2020	134.117.700,00	-	-	-	-	134.117.700,00	134.117.700,00	-	-	-	-	-	-	-	134.117.700,00	-	134.117.700,00
Dinas Kesehatan	RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim Program Transisi JAMSOSKES Sumseil Semesta ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor: 0004/SPH/1.02.01.01/2020 Tgl 30 Desember 2020	027/94/KES-BA/2020	797.254.212,00	-	-	-	-	797.254.212,00	797.254.212,00	-	-	-	-	-	-	-	797.254.212,00	-	797.254.212,00



Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Mutasi Hutang							Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET		
					Beban	Aset Tetap		Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020			No. SP2D			Pembayaran Tahun 2020 (OPD)		Beban		Aset	Jumlah Hutang
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan	Beban	Aset	Jumlah Pembayaran									
																	Beban	Aset				
Dinas Kesehatan	BRJS Kesehatan Kantor Cabang Palembang	Hutang pekerjaan bayar premi asuransi peserta JKN/KIS yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten banyuasin pada program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 berdasarkan SPH Nomor : 0005/SPH/1.02.01.01/2020 tanggal 30 Desember 2020	027/66/PKS/Kes/2020	1.746.045.105,00	-	-	-	1.746.045.105,00	-	-	1.746.045.105,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dinas Kesehatan	RS MUHAMMADIYAH	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim JAMSOSKES Sumsel Semesta Tahun 2018 yang baru diakui di Tahun 2019 berdasarkan SPH Nomor : 0006/SPH/1.02.01.01/2019 Tgl 31 Desember 2019	027/900/002.1/KES-BA/2018 Tgl. 02 Januari 2018	70.908.500,00	70.908.500,00	-	-	-	-	-	3591/LS/1.02.01.1.6.01/5.2/U/2020	70.908.500,00	-	-	70.908.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	RS. MUHAMMADIYAH PALEMBANG	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim Program Transisi JAMSOSKES Sumsel Semesta ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 berdasarkan SPH Nomor : 0007/SPH/1.02.01.01/2019 Tgl 31 Desember 2019	027/02.1/MOU/KES-BA/2019 Tgl. 02 Januari 2019	114.491.000,00	114.491.000,00	-	-	-	-	-	3631/LS/1.02.01.1.6.01/5.2/U/2020	114.491.000,00	-	-	114.491.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	RSUP Dr.Mohammad Hoessin Palembang	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim Program Transisi JAMSOSKES Sumsel Semesta ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 berdasarkan SPH Nomor : 0009/SPH/1.02.01.01/2019 Tgl 31 Desember 2019	027/05.1/PKS/KES-BA/2019 Tgl. 02 Januari 2019	174.764.100,00	174.764.100,00	-	-	-	-	-	3639/LS/1.02.01.1.6.01/5.2/U/2020	174.764.100,00	-	-	174.764.100,00	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	RS. ISLAM SITI KHODIJAH PALEMBANG	Hutang pekerjaan pembayaran Klaim Program Transisi JAMSOSKES Sumsel Semesta ke Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2019 berdasarkan SPH Nomor : 0008/SPH/1.02.01.01/2019 Tgl 31 Desember 2019	027/04.1/PKS/KES-BA/2019 Tgl. 02 Januari 2019 Tgl. 02 Januari 2019	92.370.800,00	92.370.800,00	-	-	-	-	-	3640/LS/1.02.01.1.6.01/5.2/U/2020	92.370.800,00	-	-	92.370.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	RS Muhammadiyah	Hutang Klaim kegiatan Jaminan Peralinan (JAMPERSAL) Tahun 2019	MoU Nomor : 800/89.1/KES-BA/2019 Tgl. 02 Januari 2019	531.655.100,00	531.655.100,00	-	-	-	-	-	3407/LS/1.02.01.3.2.10/5.2/BOK/U/20 20	531.655.000,00	-	-	531.655.000,00	-	(100,00)	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	RS Pelabuhan Palembang	Hutang Klaim kegiatan Jaminan Peralinan (JAMPERSAL) Tahun 2019	MoU Nomor : 800/87.1/KES-BA/2019 Tgl. 02 Januari 2019	527.521.600,00	527.521.600,00	-	-	-	-	-	3412/LS/1.02.01.3.2.10/5.2/BOK/U/20 20	527.521.600,00	-	-	527.521.600,00	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	RS Islam Siti Khadjjah Palembang	Hutang Klaim kegiatan Jaminan Peralinan (JAMPERSAL) Tahun 2019	MoU Nomor : 90.1/MoUKES-BA/2019 Tgl. 02 Januari 2019	38.740.900,00	38.740.900,00	-	-	-	-	-	3413/LS/1.02.01.3.2.10/5.2/BOK/U/20 20	38.741.000,00	-	-	38.741.000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	RSUP Dr.Muhammad Hoessin Palembang	Hutang Klaim kegiatan Jaminan Peralinan (JAMPERSAL) Tahun 2019	MoU Nomor : 1897/KES-BA/2019 Tgl. 02 Januari 2019	482.019.300,00	482.019.300,00	-	-	-	-	-	3414/LS/1.02.01.3.2.10/5.2/BOK/U/20 20	482.019.300,00	-	-	482.019.300,00	-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	CV. HR	Pekerjaan Pembangunan Poskesdes Sumber Mulya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2012	027/1238/SPK/KES/2012 Tgl. 27/09/2012	169.600.000,00	-	4.211,00	4.211,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.211,00	4.211,00	-	-	-
Dinas Kesehatan	CV. Epe	Pembangunan Poskesdes Tanah Putih Kec. Banyuasin II	900/867/SPP/KES/VII/20 11	199.000.000,00	-	9.950.000,00	9.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.950.000,00	9.950.000,00	-	-	-
<b>JUMLAH OPD</b>				<b>9.666.095.448,00</b>	<b>2.032.471.300,00</b>	<b>9.954.211,00</b>	<b>2.042.425.511,00</b>	<b>5.103.233.333,00</b>	<b>2.161.790.815,00</b>	<b>7.265.024.148,00</b>	-	<b>2.032.471.300,00</b>	-	<b>2.032.471.300,00</b>	-	-	-	<b>5.103.233.333,00</b>	<b>2.171.745.026,00</b>	<b>7.274.978.359,00</b>	-	-
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Asia Lab Universal Pratama	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BHP	467/Insfar/RSUD/2020 472 a/Insfar/RSUD/2020	79.642.178,00	-	-	79.642.178,00	-	-	79.642.178,00	-	-	-	-	-	-	-	79.642.178,00	-	79.642.178,00	HUTANG BLUD	
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Anugrah Argon Medica	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat-obatan	354/Insfar/RSUD/2020	7.897.252,00	-	-	7.897.252,00	-	-	7.897.252,00	-	-	-	-	-	-	-	7.897.252,00	-	7.897.252,00	HUTANG BLUD	
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Alexa Medika Palembang	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	526/Insfar/RSUD/2020	14.926.742,00	-	-	14.926.742,00	-	-	14.926.742,00	-	-	-	-	-	-	-	14.926.742,00	-	14.926.742,00	HUTANG BLUD	
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Mensa Binasukses	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan BMHP	534/Insfar/RSUD/2020	7.653.633,08	-	-	7.653.633,08	-	-	7.653.633,08	-	-	-	-	-	-	-	7.653.633,08	-	7.653.633,08	HUTANG BLUD	

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Mutasi Hutang						Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET	
					Beban	Aset Tetap		Penambahan Hutang Tahun 2020			No. SP2D	Pengurangan Hutang Tahun 2020				Jumlah Pembayaran	Beban	Aset		Jumlah Hutang
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan		Beban	Aset							
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Asia Lab Universal Pratama	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BHP	506/Insfar/RSUD/2020 537.a/Insfar/RSUD/2020	65.034.750,00			-	65.034.750,00			65.034.750,00						65.034.750,00		65.034.750,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan dan BMHP	532/Insfar/RSUD/2020	29.783.936,00			-	29.783.936,00			29.783.936,00						29.783.936,00		29.783.936,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Enseval Putera Megatradng	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan dan BMHP	533/Insfar/RSUD/2020	13.001.909,28			-	13.001.909,28			13.001.909,28						13.001.909,28		13.001.909,28	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Parit Panjang	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	538.a/Insfar/RSUD/2020	4.891.942,00			-	4.891.942,00			4.891.942,00						4.891.942,00		4.891.942,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Parit Panjang	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	542.a/Insfar/RSUD/2020 557/Insfar/RSUD/2020	14.795.110,00			-	14.795.110,00			14.795.110,00						14.795.110,00		14.795.110,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Tempo	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	536/Insfar/RSUD/2020	6.825.750,00			-	6.825.750,00			6.825.750,00						6.825.750,00		6.825.750,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Mensa Binasukes	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan dan BMHP	547/Insfar/RSUD/2020	5.760.480,00			-	5.760.480,00			5.760.480,00						5.760.480,00		5.760.480,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Alexa Medika Palembang	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	552/Insfar/RSUD/2020	44.770.000,00			-	44.770.000,00			44.770.000,00						44.770.000,00		44.770.000,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Doe Ni Roha	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	548/Insfar/RSUD/2020	13.530.000,00			-	13.530.000,00			13.530.000,00						13.530.000,00		13.530.000,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Enseval Putera Megatradng	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	544/Insfar/RSUD/2020	1.285.625,00			-	1.285.625,00			1.285.625,00						1.285.625,00		1.285.625,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Parit Padang Global	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan dan BMHP	543.a/Insfar/RSUD/2020 540/Insfar/RSUD/2020 574/Insfar/RSUD/2020	29.333.018,00			-	29.333.018,00			29.333.018,00						29.333.018,00		29.333.018,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Millennium Pharmaco International	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan dan BMHP	543.a/Insfar/RSUD/2020 554.a/Insfar/RSUD/2020 568.a/Insfar/RSUD/2020 567/Insfar/RSUD/2020 569/Insfar/RSUD/2020 581/Insfar/RSUD/2020	91.330.322,16			-	91.330.322,16			91.330.322,16						91.330.322,16		91.330.322,16	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Anugrah Argon Medica	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	553/Insfar/RSUD/2020	16.848.000,00			-	16.848.000,00			16.848.000,00						16.848.000,00		16.848.000,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Antarmitra Sembada	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	571.a/Insfar/RSUD/2020	18.157.920,00			-	18.157.920,00			18.157.920,00						18.157.920,00		18.157.920,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Tri Sapta Jaya	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan dan BHP	566/Insfar/RSUD/2020	17.801.187,28			-	17.801.187,28			17.801.187,28						17.801.187,28		17.801.187,28	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Indofarma Global Medika	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	537/Insfar/RSUD/2020	13.658.270,00			-	13.658.270,00			13.658.270,00						13.658.270,00		13.658.270,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Kimia Farma	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan dan BMHP	543/Insfar/RSUD/2020 552.a/Insfar/RSUD/2020 558/Insfar/RSUD/2020 561/Insfar/RSUD/2020	21.300.464,00			-	21.300.464,00			21.300.464,00						21.300.464,00		21.300.464,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Merapi Utama Pharma	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	570/Insfar/RSUD/2020	5.536.815,00			-	5.536.815,00			5.536.815,00						5.536.815,00		5.536.815,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	555.a/Insfar/RSUD/2020 572/Insfar/RSUD/2020	12.228.315,00			-	12.228.315,00			12.228.315,00						12.228.315,00		12.228.315,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Anugrah Argon Medica	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BHP	445/084.a/SP/RSUD/2020	23.100.000,00			-	23.100.000,00			23.100.000,00						23.100.000,00		23.100.000,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT Asia Lab Universal Pratama	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan BHP	554/Insfar/RSUD/2020	178.000.000,00			-	178.000.000,00			178.000.000,00						178.000.000,00		178.000.000,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PL Antar mitra Sembada	Kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	571.c/Insfar/RSUD/2020	240.350,00			-	240.350,00			240.350,00						240.350,00		240.350,00	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Asia Lab Universal Pratama	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	356/Insfar/RSUD/2019 395/Insfar/RSUD/2019	60.819.770,00	60.819.770,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	60.819.770,00			60.819.770,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Endo Indonesia	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	272.a/Insfar/RSUD/2019	3.059.997,00	3.059.997,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	3.059.997,00			3.059.997,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Indofarma Global Medika	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	411.a/Insfar/RSUD/2019	1.980.922,64	1.980.922,64		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	1.980.922,64			1.980.922,64			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Sinergi Persada Medica	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	398.a/Insfar/RSUD/2019	982.300,00	982.300,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	982.300,00			982.300,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Inti Medika Alkesindo	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	296/Insfar/RSUD/2019	947.036,75	947.036,75		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	947.036,75			947.036,75		947.036,75		-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Alexa Medika Palembang	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	414/Insfar/RSUD/2019	5.541.800,00	5.541.800,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	5.541.800,00			5.541.800,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Bina San Prima	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	414/Insfar/RSUD/2019	6.150.573,00	6.150.573,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	6.150.573,00			6.150.573,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Indofarma Global Medika	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	424.a/Insfar/RSUD/2019	7.405.669,00	7.405.669,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	7.405.669,00			7.405.669,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Anugerah Pharmindo Lestari	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	425/Insfar/RSUD/2019 426/Insfar/RSUD/2019	37.958.129,00	37.958.129,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	37.958.129,00			37.958.129,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Asia Lab Universal Pratama	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	406.a/Insfar/RSUD/2019	5.940.000,00	5.940.000,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	5.940.000,00			5.940.000,00			-		-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Asido Bima	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	424/Insfar/RSUD/2019	2.150.500,00	2.150.500,00		-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	2.150.500,00			2.150.500,00			-		-	HUTANG BLUD

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Mutasi Hutang						Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET	
					Beban	Aset Tetap		Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020					Jumlah Pembayaran	Beban	Aset		Jumlah Hutang
								No. SP2D	Beban	Aset	Beban	Aset								
													Jumlah Penambahan							
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Asido Bima	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	449/Insfar/RSUD/2019	7.315.000,00	7.315.000,00	-	7.315.000,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	7.315.000,00	-	7.315.000,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Esa Buana Husada	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	454/Insfar/RSUD/2019	7.469.000,00	7.469.000,00	-	7.469.000,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	7.469.000,00	-	7.469.000,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Tempo	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	463/Insfar/RSUD/2019	5.361.600,00	5.361.600,00	-	5.361.600,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	5.361.600,00	-	5.361.600,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Parit padang Global	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	477/Insfar/RSUD/2019	62.927.975,00	62.927.975,00	-	62.927.975,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	62.927.975,00	-	62.927.975,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Merga Utama Pharma	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	478/Insfar/RSUD/2019	2.566.377,00	2.566.377,00	-	2.566.377,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	2.566.377,00	-	2.566.377,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Millennium Phamason International	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	458/Insfar/RSUD/2019 470/Insfar/RSUD/2019 482/Insfar/RSUD/2019	54.306.928,50	54.306.928,50	-	54.306.928,50	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	54.306.928,50	-	54.306.928,50	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Saba Indomedika Jaya	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	445/27/SP- BLUD/RSUD/2019	139.712.866,00	139.712.866,00	-	139.712.866,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	139.712.866,00	-	139.712.866,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Anugerah Argon Medica	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	461/Insfar/RSUD/2019 486/Insfar/RSUD/2019 462/Insfar/RSUD/2019	76.004.349,00	76.004.349,00	-	76.004.349,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	76.004.349,00	-	76.004.349,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Alkha Medika Palembang	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	467/Insfar/RSUD/2019	4.722.960,00	4.722.960,00	-	4.722.960,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	4.722.960,00	-	4.722.960,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Antar Mitra Sembada	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	468/Insfar/RSUD/2019 478 a/Insfar/RSUD/2019 481/Insfar/RSUD/2019 489/Insfar/RSUD/2019	43.025.739,00	43.025.739,00	-	43.025.739,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	43.025.739,00	-	43.025.739,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Asia Lab Universal Pratama	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	473/Insfar/RSUD/2019	58.813.688,00	58.813.688,00	-	58.813.688,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	58.813.688,00	-	58.813.688,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Indofarma Global Medika	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	465/Insfar/RSUD/2019	7.022.340,00	7.022.340,00	-	7.022.340,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	7.022.340,00	-	7.022.340,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. United Dico Citas	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	479/Insfar/RSUD/2019 485/Insfar/RSUD/2019	15.069.120,00	15.069.120,00	-	15.069.120,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	15.069.120,00	-	15.069.120,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Mensa Bina Sukses	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	484/Insfar/RSUD/2019 492/Insfar/RSUD/2019	5.943.724,00	5.943.724,00	-	5.943.724,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	5.943.724,00	-	5.943.724,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Perla Valent	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	457/Insfar/RSUD/2019	8.168.985,00	8.168.985,00	-	8.168.985,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	8.168.985,00	-	8.168.985,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Trisapta Jaya	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	456/Insfar/RSUD/2019 476/Insfar/RSUD/2019 461/Insfar/RSUD/2019	26.765.734,60	26.765.734,60	-	26.765.734,60	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	26.765.734,60	-	26.765.734,60	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Parit Panjang	kegiatan/pekerjaan Pengadaan BMHP	474/Insfar/RSUD/2019	3.941.080,00	3.941.080,00	-	3.941.080,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	3.941.080,00	-	3.941.080,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Dos Ni Roha	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	484 a/Insfar/RSUD/2019 487/Insfar/RSUD/2019	6.230.400,00	6.230.400,00	-	6.230.400,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	6.230.400,00	-	6.230.400,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Anugerah Pharmedo Lestari	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	425/Insfar/RSUD/2019	8.236.625,00	8.236.625,00	-	8.236.625,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	8.236.625,00	-	8.236.625,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Rajawali Nusindo	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	469/Insfar/RSUD/2019 490/Insfar/RSUD/2019	2.533.978,50	2.533.978,50	-	2.533.978,50	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	2.533.978,50	-	2.533.978,50	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Sinergi Persada Medica	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	477 a/Insfar/RSUD/2019	419.734,00	419.734,00	-	419.734,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 05 Maret 2020	419.734,00	-	419.734,00	-	-	-	HUTANG BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	PT. Kmia Farma	kegiatan/pekerjaan Pengadaan Obat- obatan	472/Insfar/RSUD/2019 485 a/Insfar/RSUD/2019	15.513.595,00	15.513.595,00	-	15.513.595,00	-	-	-	-	-	Sudah dibayar melalui BLUD Tgl 27 Februari 2020	15.513.595,00	-	15.513.595,00	-	-	-	HUTANG BLUD
			<b>JUMLAH OPD</b>	<b>1.432.342.464,79</b>	<b>695.008.495,99</b>		<b>695.008.495,99</b>	<b>737.333.968,80</b>		<b>737.333.968,80</b>				<b>695.008.495,99</b>		<b>695.008.495,99</b>			<b>737.333.968,80</b>	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PUTRI TUNGGAL	Pembangunan Taman Sehat dan Fasilitas Olahraga Di Desa Paldas Kec. Rantau Bayur	03/23/SPK/PPK- 06/APBD/DISPERKIMTA N/2019	193.940.000,00	9.697.000,00	-	9.697.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.697.000,00	-	9.697.000,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KHARISMA ADAWYAH	Pengecoran Jalan Desa Sukarela Dusun II Kec. Rantau Bayur	03/16/SPK/PPK- 04/APBD/DISPERKIMTA N/2019	199.084.000,00	-	9.954.200,00	9.954.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.954.200,00	-	9.954.200,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PUTRI TUNGGAL	Rehab. Jalan Penghubung Dari Desa Tajir Indah Menuju Desa Paldas Kec. Rantau Bayur	03/20/SPK/PPK- 04/APBD/DISPERKIMTA N/2019	194.084.000,00	-	9.704.200,00	9.704.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.704.200,00	-	9.704.200,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Abadi Perkasa	Pembangunan Pagar Pesantren Nurul Iman Desa Ujung Tanjung Banyuasin III	03/14/SPK/PPK- 04/APBD/DISPERKIMTA N/2018	198.820.000,00	9.941.000,00	-	9.941.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.941.000,00	-	9.941.000,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Karya Mandiri	Pembangunan Masjid Mustaqim Desa Plajau Ulu Rt. 3 Qw. 1 Kec. Banyuasin III	03/05/SPK/PPK- 04/APBD/DISPERKIMTA N/2018	148.792.000,00	7.439.600,00	-	7.439.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.439.600,00	-	7.439.600,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Karya Mandiri	Pengecoran Jalan Purbolingga Rt. 45 Rv. 12 Kel. Betung Kec. Betung	03/01/SPK/PPK- 04/APBD/DISPERKIMTA N/2018	188.846.000,00	-	9.442.300,00	9.442.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.442.300,00	-	9.442.300,00	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Karya Mandiri	Pengecoran Jalan Mahmud Rt. 47 Rv. 12 A Kel. Betung Kec. Betung	03/02/SPK/PPK- 04/APBD/DISPERKIMTA N/2018	198.780.000,00	-	9.939.000,00	9.939.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.939.000,00	-	9.939.000,00	-

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang												Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET	
					Saldo Awal Tahun 2020			Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020			No. SP2D	Pembayaran Tahun 2020 (OPD)				Jumlah Pembayaran	Beban	Aset		Jumlah Hutang
					Beban	Aset Tetap	Jumlah	Beban	Aset	Jumlah Penambahan	Beban	Aset	Beban		Aset	Jumlah Hutang							
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Amin Bahagia	Pengecoran Jalan Rt. 40 Kel. Rimba Asam Kec. Betung-	03/16/SPK/PPK-09/APBD/DISPERKIMTA N/2018	198.818.000,00	-	9.940.900,00	9.940.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.940.900,00	9.940.900,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Amin Bahagia	Pengecoran Jalan Rimba Kemamp. Kayuara Residen Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III-	03/12/SPK/PPK-03/APBD/DISPERKIMTA N/2018	148.944.000,00	-	7.447.200,00	7.447.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.447.200,00	7.447.200,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KARYA SETIA KAWAN	Lanjutan Pembangunan Masjid Jam' Darussalam Desa Wonosari Kec. Pulau Rindu	03/07/SPK/PPK-07/APBD/DISPERKIMTA N/2017	97.025.000,00	4.851.250,00	-	4.851.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.851.250,00	-	4.851.250,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KARYA SETIA KAWAN	Pembangunan Asrama Ponpes Air Salek Kec. Air Salek	03/01/SPK/PPK-04/DISPERKIMTAN/2017	97.257.000,00	4.862.850,00	-	4.862.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.862.850,00	-	4.862.850,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. SRI UTAMA PERKASA	Pengecoran Jalan Rw. 03 Kec. Talang Kelapa	03/08/SPK/PPK-01/APBD/DISPERKIMTA N/2017	196.917.000,00	-	9.845.850,00	9.845.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845.850,00	9.845.850,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PRIMA INDAH	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Kelurahan Kedondong Raya Kec. Banyuasin III	03/02/SPK/PPK-07/APBD/DISPERKIMTA N/2017	196.987.000,00	-	9.849.350,00	9.849.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.849.350,00	9.849.350,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. HP ARCHITECTS	Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun II Desa Sumber Hidup Kec. Muara Telang	03/10/SPK/PPK-04/APBD/PUCK/2016 (31/08-16)	99.150.000,00	-	4.957.500,00	4.957.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.957.500,00	4.957.500,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. HP ARCHITECTS	Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun I Desa Sumber Hidup Kec. Muara Telang	03/11/SPK/PPK-04/APBD/PUCK/2016 (31/08-16)	99.170.000,00	-	4.958.500,00	4.958.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.958.500,00	4.958.500,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KARYA SELATI MANDIRI	Rehab Kantor Majelis Wakil Cabang NU Muara Padang Kec. Muara Padang	03/16/SPK/PPK-03/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	99.234.000,00	4.961.700,00	-	4.961.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.961.700,00	-	4.961.700,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Bintang Kejora	Pembangunan Pagar Beton Madrasah Diniyah Alhidayah Kel. Betung Kec. Betung	03/16/SPK/PPK-06/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	99.275.000,00	4.963.750,00	-	4.963.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.963.750,00	-	4.963.750,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. BINTANG KEJORA	Pembangunan Pagar Stainless Masjid Alhidayah Kel. Betung Kec. Betung	03/17/SPK/PPK-06/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	49.250.000,00	2.462.500,00	-	2.462.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462.500,00	-	2.462.500,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. BINTANG KEJORA	Pembangunan Pagar Stainless Masjid Baitul Hikmah Desa Suka Mulya Kec. Betung	03/18/SPK/PPK-06/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	49.200.000,00	2.460.000,00	-	2.460.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.460.000,00	-	2.460.000,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. H. KOSIM	Pengecoran Jalan Lingkungan Dan Halaman Samping SD Kelurahan Kenten Kec. Talang Kelapa	03/20/SPK/PPK-05/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	149.384.000,00	-	7.469.200,00	7.469.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.469.200,00	7.469.200,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. H. KOSIM	Pengecoran Jalan Lingkungan Lorong Bahagia Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	03/23/SPK/PPK-05/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	49.385.000,00	2.469.250,00	-	2.469.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.469.250,00	2.469.250,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PT. Mas Bungaran	Kegiatan Pengecoran Jalan RL07 Dusun III Desa Sungai Gerong Kec. Banyuasin I	03/23/SPK/PPK-07/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	99.320.000,00	4.966.000,00	-	4.966.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.966.000,00	4.966.000,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. BERSAMA	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Pangkalan Gelebak Kec. Rambutan	03/28/SPK/PPK-07/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	99.355.000,00	4.967.750,00	-	4.967.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.967.750,00	4.967.750,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KEMANG AGUNG	Pengecoran Jalan Lingkungan Lt. Anal I - II Rt. 25 Rw. 11 Kec. Talang Kelapa	03/32/SPK/PPK-07/APBD/PUCK/2016 (22/07-16)	99.380.000,00	4.969.000,00	-	4.969.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.969.000,00	4.969.000,00	-		
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. BANGUN CIPTA PERSADA	Renovasi Gedung Pengadilan Negeri Sukajadi Kabupaten Banyuasin	02/SPK/APBD/PPK-09/PUCK/2015 TGL. 10/11/2015	99.368.000,00	4.968.400,00	-	4.968.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.968.400,00	-	4.968.400,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. FRAGAI INDOTAMA	Rehab Masjid Desa Duran Gadie Kec. Rambutan;	18/SPK/PPK-02/PUCK/2015 TGL. 29/06/2015	99.381.000,00	4.969.050,00	-	4.969.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.969.050,00	-	4.969.050,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. ANUGERAH KENCANA	Rehab rangan Masjid Besar Al-Muhajirin Sukajadi Kec. Talang Kelapa+	06/SPK/P-APBD/PPK-02/PUCK/2015 TGL. 10/11/2015	99.341.000,00	4.967.050,00	-	4.967.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.967.050,00	-	4.967.050,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. HABINUBI	Pembangunan menara masjid jlnad Dusun IV Desa Lubuk Lancang Kec. Suak Tapeh+	07/SPK/P-APBD/PPK-02/PUCK/2015 TGL. 28/10/2015	149.365.000,00	7.468.250,00	-	7.468.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.468.250,00	-	7.468.250,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. ZUKA	Pembangunan Muaholath di Desa Enggal Rejo Kec. Air Salek+	28/SPK/PPK-01/PAPABD/PUCK/2015	99.345.000,00	4.967.250,00	-	4.967.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.967.250,00	-	4.967.250,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. DUL SALAM	Pembangunan Lapangan Bola Volley Desa Sri Agung Kec. Banyuasin II+	29/SPK/PPK-01/P-APBD/PUCK/2015	39.273.000,00	1.963.650,00	-	1.963.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963.650,00	-	1.963.650,00	-	
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. IMAM BERSAUDARA	Pembangunan Balai Desa di Dusun 4 Desa Simulyo Kec. Air Saleh	02/SPK/APBD/PPK-11/PUCK/2015	149.470.000,00	7.473.500,00	-	7.473.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.473.500,00	7.473.500,00	-		



Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang										Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET
					Saldo Awal Tahun 2020		Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020										
					Beban	Aset Tetap	Jumlah	Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020 (OPD)									
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan	No. SP2D	Beban	Aset	Jumlah Pembayaran						
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. FRAGAI INDOTAMA	Pengecoran Jalan Talang Andong Sungai Dua Kec. Rambutan*	27/SPK/PPK-07/PUCK/2014	99.541.000,00	-	4.977.050,00	4.977.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.977.050,00	4.977.050,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. LIMA SAUDARA	Pembuatan Dua Buah Lapangan Bola Volly Sri Agung dan Sumber Rejeki Kec. Banyuasin II*	05/SPK/PPK-05/PUCK/2014	49.439.000,00	-	2.471.950,00	2.471.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.471.950,00	2.471.950,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. FRAGAI INDOTAMA	Pengecoran Jalan Lingkungan Desa Sungai Kedukan Rt. 05 Kec. Rambutan*	29/SPK/PPK-07/PUCK/2014	49.687.000,00	-	2.484.350,00	2.484.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.484.350,00	2.484.350,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. FRAGAI INDOTAMA	Tambah Sulam Lobang Parah Talang Andong Desa Sungai Dua Kec. Rambutan*	28/SPK/PPK-07/PUCK/2014	49.708.000,00	-	2.485.400,00	2.485.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.485.400,00	2.485.400,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KARYA SAKTI MITRA SAKTI	Pengecoran Jalan Batas Sungai Kedukan dan Gerbang Batas Kenten Kec. Talang Kelapa	09/SPK/PPK-07/PUCK/2014	199.464.000,00	-	9.973.200,00	9.973.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.973.200,00	9.973.200,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Putra Laba	Lanjutan Jalan Cor Beton Dusun I Desa Pangestu Rt. 2 Kec. Makarti Jaya*	26/SPK/PPK-02/PUCK/2014	99.507.000,00	-	4.975.350,00	4.975.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.975.350,00	4.975.350,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. HARUMI RATTIA	Pembangunan Jalan Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya*	36/SPK/PPK-02/PUCK/2014	99.502.000,00	-	4.975.100,00	4.975.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.975.100,00	4.975.100,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PUTRA LABA	Jalan Cor Beton Dusun I Desa Purwosari Kec. Makarti Jaya*	45/SPK/PPK-02/PUCK/2014	99.504.000,00	-	4.975.200,00	4.975.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.975.200,00	4.975.200,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PRATAMA YUDHA	Pembangunan Polek Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago (Tahap I)	07/KONTRAK/PPK-10/PUCK/2014	536.440.000,00	-	26.822.000,00	26.822.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.822.000,00	26.822.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Zuka	Bantuan Pembangunan Masjid dan Mushollah Kec. Muara Telang*	15/SPK/PPK-10/PUCK/2014	149.834.000,00	-	7.491.700,00	7.491.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.491.700,00	7.491.700,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. CEMARA KARYA ABADI	Pembangunan Jerambah Titian Beton Lr. Gelora Darat Desa Sungsang IV Kec. Banyuasin II*	25/SPK/PPK-13/PUCK/2014	49.740.000,00	-	2.487.000,00	2.487.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.487.000,00	2.487.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. CEMARA KARYA ABADI	Pembangunan Jalan di Dalam Kecamatan Muara Telang*	38/SPK/PPK-10/PUCK/2014	14.865.000,00	-	743.250,00	743.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743.250,00	743.250,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. CEMPAKA MAS	Pembangunan Jalan Desa Sumber Jaya Kec. Muara Telang*	39/SPK/PPK-10/PUCK/2014	39.750.000,00	-	1.987.500,00	1.987.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.987.500,00	1.987.500,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KARYA SETIA KAWAN	Pembangunan Jalan Desa Margalrayu Kec. Muara Telang*	40/SPK/PPK-10/PUCK/2014	34.325.000,00	-	1.716.250,00	1.716.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.716.250,00	1.716.250,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Kinar Yoshie	Pembangunan Jembatan Penghubung Perbatasan Desa Daya Kusuma Menuju Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan	41/SPK/APBD/PPK-20/DAK-PDT/PUCK/2014	199.329.000,00	-	9.966.450,00	9.966.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.966.450,00	9.966.450,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Kinar Yoshie	Pembangunan Jembatan Penghubung Perbatasan Desa Sido Makmur Menuju Desa Margu Rukun Kec. Muara Sugihan	43/SPK/APBD/PPK-20/DAK-PDT/PUCK/2014	199.238.000,00	-	9.961.900,00	9.961.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.961.900,00	9.961.900,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. GEMA DAYA PRATAMA	Pengecoran Jalan Pakri Roti Rt. 52/18 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa*	07/SPK/PPK-09/PUCK/2014	49.714.000,00	-	2.485.700,00	2.485.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.485.700,00	2.485.700,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. RAPIH FINISHING	Bantuan Masjid Dalam Kec. Rambutan*	20/SPK/APBD/PPK-07/PUCK/2014	54.445.000,00	-	2.722.250,00	2.722.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.722.250,00	2.722.250,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Fragai Indotama	Pengecoran dan Penimbunan Jalan Desa Balie Makmur Kec. Banyuasin I*	51/SPK/PPK-02/PUCK/2014	99.525.000,00	-	4.976.250,00	4.976.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.976.250,00	4.976.250,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. FRAGAI INDOTAMA	Pembangunan Jerambah Titian Desa Pulau Borang Kec. Banyuasin I*	52/SPK/PPK-02/PUCK/2014	99.415.000,00	-	4.970.750,00	4.970.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.970.750,00	4.970.750,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. FRAGAI INDOTAMA	Pembangunan Los Pasar Kalangan Desa Rimba Ala Kec. Banyuasin III*	03/SPK/PPK-03/PUCK/2014	199.455.000,00	-	9.972.750,00	9.972.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.972.750,00	9.972.750,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. FRAGAI INDOTAMA	Pembangunan Jalan Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa*	10/SPK/PPK-17/PUCK/2014	49.698.000,00	-	2.484.900,00	2.484.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.484.900,00	2.484.900,00



Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang										Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET				
					Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020						No. SP2D	Pembayaran Tahun 2020 (OPD)			Jumlah Pembayaran	Beban	Aset	Jumlah Hutang
					Beban	Aset Tetap		Beban	Aset	Jumlah Penambahan	Beban	Aset	Beban	Aset										
																		Beban	Aset					
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. MU	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Terusan Muara Kec. Muara Telang	02/03/SPK/PPK-PP.III/PUCK/2012 Tgl 15 Oktober 2012	99.445.000,00	-	4.972.250,00	4.972.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.972.250,00	4.972.250,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. MU	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Terusan Tengah Kec. Muara Telang	03/03/SPK/PPK-PP.III/PUCK/2012 Tgl 15 Oktober 2012	99.420.000,00	-	4.971.000,00	4.971.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.971.000,00	4.971.000,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PU	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Terusan Dalam Kec. Muara Telang	04/03/SPK/PPK-PP.III/PUCK/2012 TGL 15-10-12	99.425.000,00	-	4.971.250,00	4.971.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.971.250,00	4.971.250,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PU	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Telang Lubuk Kec. Muara Telang	05/03/SPK/PPK-PP.III/PUCK/2012 Tgl 15-10-2012	99.430.000,00	-	4.971.500,00	4.971.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.971.500,00	4.971.500,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Dih	Pengecoran Jalan Lingkungan 1 Kelurahan Makarti Jaya	02/03/SPK/PPK-TRTB.I/PUCK/2012 Tgl 15 Oktober 2012	99.351.000,00	-	4.967.550,00	4.967.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.967.550,00	4.967.550,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Dih	Pengecoran Lorong Garuda LK. III Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya	03/03/SPK/PPK-TRTB.I/PUCK/2012, Tgl. 15-10-2012	99.351.000,00	-	4.967.550,00	4.967.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.967.550,00	4.967.550,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. BI	Pembangunan Jembatan Desa Sido Erangal Rep. Kec. Air Saleh	08/03/SPK/PPK-OP.III/PUCK/2012 Tgl 13 September 2012	99.383.000,00	-	4.969.150,00	4.969.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.969.150,00	4.969.150,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Aji	Pembangunan WTP Mini Desa Taji Mulya Kecamatan Betung	06/01/PPK-P2L.I/PUCK/2012 tgl. 01-10-2012	218.381.000,00	-	10.919.050,00	10.919.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.919.050,00	10.919.050,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. RM	Pembangunan MCK Desa Tira Mulya Kec. Makarti Jaya	05/14/PPK-PU.PUCK/2010, tgl 07 Oktober 2010	88.950.000,00	-	4.447.500,00	4.447.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.447.500,00	4.447.500,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KbN	Pengecoran Jalan Lingkungan Desa Penuguan Kec. Pulau Rimbau	03/04/PPK-TRTB.III/PUCK/2011	157.856.000,00	-	7.892.800,00	7.892.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.892.800,00	7.892.800,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. BJC	Pengecoran Lrg. Karet Desa Merah Mata Kec. Banyuasin II	03/03/PPK-TRTB.I/PUCK/2011	146.867.000,00	-	7.343.350,00	7.343.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.343.350,00	7.343.350,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. KbN	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Regan Agung Kec. Banyuasin III	03/13/PPK-P2L.I/PUCK/2011	117.566.000,00	-	5.878.300,00	5.878.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.878.300,00	5.878.300,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. PU	Pengecoran Jalan Lingkungan Dalam Desa Muara Adab Kec. Rantau Bayur	02/02/PPK-OP.II/PUCK/2011	99.386.000,00	-	4.969.300,00	4.969.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.969.300,00	4.969.300,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	CV. Mu 'z	Pengecoran Lorong Lukman Ds. III Rt. 9 Desa Tirtosari Kec. Banyuasin	02/01/PPK-TRTB.I/11/PUCK/2011	99.719.000,00	-	4.985.950,00	4.985.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.985.950,00	4.985.950,00				
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. PT. MPC 2. PT. PKS	Kegiatan Pengembangan sistem Air Bawah (Rp. 79.556.896 dan Rp. 80.045.450)	1. KONTRAK 06/01/PPK-FAB/PUCK/2010 tgl. 12-8-10 2. KONTRAK 06/03/PPK-FAB/PUCK/2010 tgl. 12-8-2010	-	-	80.045.450,00	80.045.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.045.450,00	80.045.450,00				
				<b>14.292.886.000,00</b>	<b>80.943.300,00</b>	<b>1.159.988.075,00</b>	<b>1.240.931.375,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80.943.300,00</b>	<b>1.159.988.075,00</b>	<b>1.240.931.375,00</b>			
Dinas Perhubungan	PT. IP	Pembuatan Taman dan Pembuatan Lampu Jalan Paket I		191.300.000,00	-	191.300.000,00	191.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.300.000,00	191.300.000,00				
Dinas Perhubungan	PT. IP	Pembuatan Taman dan Pembuatan Lampu Jalan Paket I		290.800.000,00	-	290.800.000,00	290.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.800.000,00	290.800.000,00				
Dinas Perhubungan	CV. Belva Makmur	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Dusun I Sengkung Desa Santan Sari Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin	027/618-IV/Tamben/2016 Tgl. 18 Agustus 2016	139.627.000,00	-	6.981.350,00	6.981.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.981.350,00	6.981.350,00				
Dinas Perhubungan	CV. Belva Makmur	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Dusun II Talang Kapur Desa Muara Damai Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin	027/620-IV/Tamben/2016 Tgl. 18 Agustus 2016	139.630.000,00	-	6.981.500,00	6.981.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.981.500,00	6.981.500,00				
Dinas Perhubungan	CV. Dua Putra Mitra Abadi	Pengadaan dan Pemasangan LPU di Jalan Puncung Jaya Dusun 03 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Kegiatan Pengembangan LPU	027/807-IV/Tamben/2016	137.800.000,00	-	6.890.000,00	6.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.890.000,00	6.890.000,00				
				<b>899.157.000,00</b>	<b>-</b>	<b>502.952.850,00</b>	<b>502.952.850,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>502.952.850,00</b>	<b>502.952.850,00</b>				



Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Mutasi Hutang							Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET
					Beban	Aset Tetap		Penambahan Hutang Tahun 2020			No. SP2D	Pengurangan Hutang Tahun 2020		Jumlah Pembayaran			Pembayaran Tahun 2020 (OPD)			
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan		Beban	Aset				Jumlah Pembayaran			
																		Beban	Aset	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. ROTARI PERSADA	Peningkatan Ruas Jalan Muara Padang - Muara Sugihan Kecamatan Muara Padang PPK - Jhon Esa Putra, ST., M.Si Pelaksana PT. ROTARI PERSADA Direktur H. M. SYAFARUDDIN, ST	620/02/MP-MS/PPK-BSSB/Kontrak/PUTR/2019, add I : 620/02a/MP-MS/PPK-BSSB/Kontrak/PUTR/2020, add II : 620/02 b/MP-MS/PPK-BSSB/Kontrak/PUTR/2020 Tanggal 20 Mei 2020	80.961.948.500,00	-	-	-	-	4.048.097.425,00	4.048.097.425,00	-	-	-	-	-	-	-	4.048.097.425,00	4.048.097.425,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. CITRA KURNIA WAWAY	Peningkatan Jalan dari Simpang Lubuk Lancang Kec. Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau (Lanjutan) PPK: Syafrizal, ST., MM Rekanan : PT. CITRA KURNIA WAWAY Direktur : Erwan Gustian, SH	620/02/SL/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2019 Tanggal 16 Desember 2019, Addendum I : 620/02 a/SL/PPK-BSSB/ADDENDUM/PUTR/2020 Tanggal 16 Januari 2020, Addendum II : 620/02 b/SL/PPK-BSSB/ADDENDUM/PUTR/2020 Tanggal 03 Juni 2020	76.089.923.800,00	-	-	-	-	3.804.496.190,00	3.804.496.190,00	-	-	-	-	-	-	-	3.804.496.190,00	3.804.496.190,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. BINTANG ANUGRAH JAYA	Pembangunan Jalan Poros Kabupaten, BA I Air Salek (Banyuanan I) Prambahan jalur 10 Kec. Air Salek) PPK : Herri Kurniawan, ST. Pelaksana PT. BINTANG ANUGRAH JAYA, Direktur JIMMY CHANDRA	No Kontrak : 620/02/JPK/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2019 Tanggal 16 Desember 2019, Add I : 620/13/ADDM/JPK/PPK-BSSB/PUTR/2020 Tanggal 31 Januari 2020, Add II : 620/14/ADDM/JPK/PPK-BSSB/PUTR/2020 Tanggal 22 April 2020, Add III : 620/19/ADDM/JPK/PPK-BSSB/PUTR/2020 Tanggal 03 Juni 2020, Add IV : 620/20/ADDM/JPK/PPK-BSSB/PUTR/2020 Tanggal 04 September 2020	48.692.424.350,31	-	-	-	-	2.434.621.217,52	2.434.621.217,52	-	-	-	-	-	-	-	2.434.621.217,52	2.434.621.217,52	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. BUANA ASA	Pengecoran Jalan Poros Sukamulya - Talang Petak Kec. BA III, PPK : Nikman, ST. Pelaksana PT. BUANA ASA, Direktur DENI SANTOSA	No Kontrak : 620/02/SM-TP/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2019 Tanggal 18 Desember 2019, Add I : 620/05/SM-TP/PPK-BSSB/ADD-KONTRAK/PUTR/2020 Tanggal 03 Februari 2020, Add II : 620/08/SM-TP/PPK-BSSB/ADDII-KONTRAK/PUTR/2020 Tanggal 27 Mei 2020	38.633.007.401,85	-	-	-	-	1.931.650.370,09	1.931.650.370,09	-	-	-	-	-	-	-	1.931.650.370,09	1.931.650.370,09	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. ARTHA GRAHA MAKMUR	Pengaspalan Jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kec. Betung, PPK: Andre Lumena, ST., MM, Pelaksana : PT. ARTHA GRAHA MAKMUR, Direktur : Yullyanto	No Kontrak : 620/02/LK-TR-TM/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2019 Tanggal 19 Desember 2019, add I : 620/02 a/LK-TR-TM/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2020, add II : 620/02 b/LK-TR-TM/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2020 Tanggal 27 Mei 2020	30.177.330.557,03	-	-	-	-	1.508.866.527,85	1.508.866.527,85	-	-	-	-	-	-	-	1.508.866.527,85	1.508.866.527,85	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. GADANG BERLIAN	Peningkatan Jalan Sungai Dua - Prajen Kec. Rambutan PPK : Arafik, ST, an. PT. Gadang Berlian, Direktur : Dimas Rifano, SE	No Kontrak : 620/02/PP/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2019 Tanggal 16 Desember 2019	13.469.923.178,51	-	-	-	-	673.496.158,93	673.496.158,93	-	-	-	-	-	-	-	673.496.158,93	673.496.158,93	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. CAHAYA NUSANTARA SUKSES	Rehabilitasi Jalan Kelurahan Tanah Mas Kec. Talang Kelapa, PPK: Hendra Budiman, ST., M.Si, Pelaksana : PT. CAHAYA NUSANTARA SUKSES, Direktur : Bandar Arifin, ST	No Kontrak : 620/02/KTM/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2019 Tanggal 30 Desember 2019, Addendum : 620/19/ADDKTM/PPK-BSSB/KONTRAK/PUTR/2020 Tanggal 16 Maret 2020	8.176.743.300,00	-	-	-	-	408.837.165,00	408.837.165,00	-	-	-	-	-	-	-	408.837.165,00	408.837.165,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. ARYA PRATAMA	Perkerasan Jalan Penghubung ke Desa Keluang Desa Bentayan Kec. Tungkai Ilir	02/PKRSN-KLNS/SP/PPK/PUBM/2016 tgl 19 September 2016	198.107.000,00	9.905.350,00	9.905.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.905.350,00	9.905.350,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. ARYA PRATAMA	Pengerasan Jalan Desa Margas Rahayu Kec. Tungkai Ilir	02/G MRG-RHY/SP/PPK/PUBM/2016 tgl 19 September 2016	198.160.000,00	9.908.000,00	9.908.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.908.000,00	9.908.000,00	

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang											Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET	
					Saldo Awal Tahun 2020		Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020			No. SP2D	Pembayaran Tahun 2020 (OPD)				Jumlah Pembayaran	Beban	Aset		Jumlah Hutang
					Beban	Aset Tetap	Jumlah	Beban	Aset	Jumlah Penambahan	Beban	Aset		Jumlah								
															Beban							
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BUDI	Rehabilitasi Jalan Menuju Pondok Pesantren Sabili Hasana Desa Purwosari Kec. Sembawa	02/SBL/HISANAH/SPKP/PK/PUBM/2015 tgl. 13 November 2015	198.315.000,00	9.915.750,00	-	9.915.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.915.750,00	-	9.915.750,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CAHYA NAGARA	Pengecoran Jalan Talang Kacang Kec. Banyuasin II (Lanjutan)	02/PK-TL-KACANG/SPKP/PPK/PUBM/2015, 6 Juli 2015	198.120.000,00	-	9.906.000,00	9.906.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.906.000,00	9.906.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Kapita Jaya	Pengecoran Jalan Poros Mas Minggu RT. 53 Sukajadi Kec. Talang Kelapa	06/177/POROS/PPK/KGNTRAK/PUBM/2015 tgl 24 Agustus 2015	390.782.000,00	-	19.539.100,00	19.539.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.539.100,00	19.539.100,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. KAPITA JAYA	Pengecoran Jalan Lingkungan Komplek Azhar Permai Blok. 1 RT 12 Kel.Kerten Kec. Talang Kelapa	02/AZHAR-PRM/SPKP/PPK/PUBM/2015 tgl 6/7/2015	64.000.000,00	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. CEMARA KARYA ABADI	Pembangunan Jalan Setapak Jl. Talang Keramat Lorong Sidan Rt. 14 Kec. Talang Kelapa	06/LRG-BIDAN/PPK/KONTRAK/PUBM/2015 tgl 24 August 2015	391.126.000,00	-	19.556.300,00	19.556.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.556.300,00	19.556.300,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BINTANG HARAPAN	Pembangunan Pengecoran Jalan/Lorong Dalam Lingkungan Ds. Gelebak Dalam Kec. Rambutan	02/LK-GLBK-DLM/SPKP/PPK/PUBM/2015 tgl 06 Juli 2015	198.250.000,00	-	9.912.500,00	9.912.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.912.500,00	9.912.500,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Excon Contraco	Pengecoran Jalan Rt.02 Menuju TPU Sedongkok Kel. Betung Kec. Betung	02/SONGKOK/SPK/PPK/PUBM/2015 tgl 16 April 2015	148.835.000,00	-	7.441.750,00	7.441.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.441.750,00	7.441.750,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BUMI SRWIJAYA PERKASA	Cor Beton Jalan RT.04 Desa Sukamulya Kec. Betung	02/SUKAMULYA/SPK/PPK/PUBM/2015 tgl 13 Nopember 2015	98.570.000,00	-	4.928.500,00	4.928.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.928.500,00	4.928.500,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. ARIOCHO GROUP	Penyekatan dan Pematatan Jalan Penghubung Primer 1 ke Primer 3 Selat Kuningan dari Desa Sumber Rejo ke Desa Songo Makmur kec. Pulau Renu	06/SLT-KUNINGAN/PPK/PUBM/2015	98.408.000,00	-	4.920.400,00	4.920.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.920.400,00	4.920.400,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. PUTRA LABA	Pembangunan Jerambah Lorong Cempaka Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II (Lanjutan)	02/CEMPAKA/SPK/PPK/PUBM/2015, 6 Juli 2015	98.498.000,00	-	4.924.900,00	4.924.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.924.900,00	4.924.900,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. VILAR INDAH PERKASA	Pembangunan Jembatan Penghubung Lr. Jambu Ujung RT. 01 Desa Pandowo Harjo Kec. Makarti Jaya (Tahap II)	02/SPK/LR-JAMBU/PPK/PUBM/2015 tgl 30-04-2015	28.986.000,00	-	1.449.300,00	1.449.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.449.300,00	1.449.300,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. ZUKA	Pembangunan Jembatan Cor SPD Dusun III Desa Talang Sari RT.12 Kec. Tanjung Lago	02/TL-SARI/SPK/PPK/PUBM/2015 tgl 06 Juli 2015	98.500.000,00	-	4.925.000,00	4.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.925.000,00	4.925.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. CITRA SEJAHTERA UTAMA	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur	06/189-2-BT-RB/PPK/KONTRAK/PUBM/2015, 05 Oktober 2015	293.970.000,00	-	14.698.500,00	14.698.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.698.500,00	14.698.500,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. CIPTA GRIYA PERSADA	Perencanaan Teknis Kegiatan DID - Wilayah Daratan	03/PRC-DID-DIKONTRAK/PUBM/2014 Tanggal 25 Agustus 2014	49.500.000,00	-	49.500.000,00	49.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.500.000,00	49.500.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. PERMATA KREASINDO KONSULTAN	Perencanaan Teknis Kegiatan DID - Wilayah Perairan	03/PRC-DID-DIKONTRAK/PUBM/2014 Tanggal 25 Agustus 2014	49.200.000,00	-	49.200.000,00	49.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.200.000,00	49.200.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. SINAR TENANG	Pengecoran Jalan Dusun III Desa Cinta Manis Lama Kec. Banyuasin I	02/D.III-CM/SPK/PPK/PUBM/2014 Tanggal 1 Juli 2014	147.000.000,00	-	147.000.000,00	147.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.000.000,00	147.000.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. LANGGENG BERSAMA	Pengerasan Jalan Poros Dusun Selpa Desa Menten Kec. Rambutan (Tahap III)	02/SELPA/SPK/PPK/PUBM/2014 tgl 01/07/2014	98.797.000,00	-	4.939.850,00	4.939.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.939.850,00	4.939.850,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. SINAR TENANG	Pembangunan Jalan Desa Muara Baru Arah ke Sungai Musi Kec. Makarti Jaya	02/MB-ASM/SPK/PPK/PUBM/2014 Tanggal 02 Mei 2014	98.944.000,00	-	4.947.200,00	4.947.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.947.200,00	4.947.200,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. PUTRA LABA	Pengecoran Jalan/Lorong Kedondong Desa Cinta Manis Baru Kec. Air Kumbang	06/196-KEDONDONG/PK/KONTRAK/PUBM/2014 Tanggal 11 Juli 2014	290.781.000,00	-	14.539.050,00	14.539.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.539.050,00	14.539.050,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TPK. DESA MUARA SUGIH	Pembangunan Jalan Desa Muara Sugih Kec. Tanjung Lago	13/IMS-TL/PPK-DIK/PUBM/2014 Tanggal 23 Juli 2014	170.000.000,00	-	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.000.000,00	102.000.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TPK. DESA PRAJEN JAYA	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Prajen Jaya RT. 06 Part Gantung Kec. Banyuasin II	197/PJ-BATI/PPK-DIK/PUBM/2014 Tanggal 23 Juli 2014	25.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TPK. DESA TANJUNG BARU	Pembangunan Jalan Desa Tanjung Baru Kec. Muara Padang (Tahap II)	9/ABT/MB-MP/PPK-DIK/PUBM/2014 Tanggal 23 Oktober 2014	20.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00			
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. WJ	Pengecoran Jalan Mentan Sungai Pinang Kec. Rambutan	02/MSP/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 17 September 2012	196.218.000,00	-	9.810.900,00	9.810.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.810.900,00	9.810.900,00			

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang										Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET			
					Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020			No. SP2D			Pembayaran Tahun 2020 (OPD)		Jumlah Pembayaran		Beban	Aset	Jumlah Hutang
					Beban	Aset Tetap		Beban	Aset	Jumlah Penambahan	Beban	Aset	Jumlah Pembayaran										
																	Beban	Aset					
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. AP	Penimbunan dengan Galian Tanah Setempat Desa Durian Gadis kec. Rambutan	02/DG/SPK/PPK/PUBM2/012 Tgl. 29 Oktober 2012	48.903.000,00	-	2.445.150,00	2.445.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.445.150,00	2.445.150,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. CMAP	Pembuatan Siring Pasangan Desa Siju Kec. Rambutan (Tahap II)	02/SJU/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 29 Oktober 2012	97.904.000,00	-	4.895.200,00	4.895.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.895.200,00	4.895.200,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Zu	Penyiapan Badan Jalan Penghubung Nunggal Sari Menuju Rawa Banda Kec. Pulau Rima	02/NSRB/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 17 Oktober 2012	195.900.000,00	-	9.795.000,00	9.795.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.795.000,00	9.795.000,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. NPM	Pembangunan Jembatan Desa Muara Baru Kec. Banyuasin II	02/DMB/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 17 Oktober 2012	122.228.000,00	-	6.111.400,00	6.111.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.111.400,00	6.111.400,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BRPs	Penimbunan dengan Galian Tanah Setempat Lr. Mawar Menuju Jalan TAA Desa Sungsang III Kec. Banyuasin II	Nomor : 02/LM-TAA/SPK/PPK/PUBM/2012 tanggal 12 Oktober 2012	97.743.000,00	-	4.887.150,00	4.887.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.887.150,00	4.887.150,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. NPM	Penimbunan Jalan Keliling dengan Galian Tanah Setempat di Komplek Pondok Pesantren Nurul Wathan Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II	Nomor : 02/PNNW/SPK/PPK/PUBM/2012 tanggal 12 Oktober 2012	97.844.000,00	-	4.892.200,00	4.892.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.892.200,00	4.892.200,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Bih	Pengecoran Jalan Dalam Desa Daya Kusuma Kec. Muara sugihan	AZHAR SAMIRI CV. SUKIT INDAH JI. R. Sukanto No. 63A Kec. Kemuning Kel. Pipa Raja Palembang	97.807.000,00	-	4.890.350,00	4.890.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.890.350,00	4.890.350,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Bih	Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan	Nomor : 02/BJT-DK/SPK/PPK/PUBM/2012 tanggal 17 September 2012	97.736.000,00	-	4.886.800,00	4.886.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.886.800,00	4.886.800,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. KJ	Pengecoran Jalan Desa Marga Rahayu Kec. Muara Telang	NOMOR : 02/DMR/PPK/KONTRAK/PUBM/2012 TANGGAL 2 NOPEMBER 2012	244.695.000,00	-	12.234.750,00	12.234.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.234.750,00	12.234.750,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Rfg	Pembangunan Jalan Desa Lebung	NOMOR : 02/LEBUNG/SPK/PPK/PUBM/2012 TANGGAL : 17 OKTOBER 2012	146.863.000,00	-	7.343.150,00	7.343.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.343.150,00	7.343.150,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BPM	Pengecoran Jalan Desa Durian Gadis Kecamatan Rambutan	02/DG/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 17 Oktober 2012	195.899.000,00	-	9.794.950,00	9.794.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.794.950,00	9.794.950,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BPM	Pengecoran Jalan/Lorong Tembusan Desa Rambutan Kecamatan Rambutan	02/DRL/SPK/PPK/PUBM2/012 Tgl. 17 Oktober 2012	97.924.000,00	-	4.896.200,00	4.896.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.896.200,00	4.896.200,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BPM	Pengecoran Jalan/Lorong Virus Desa Mariana Kecamatan Banyuasin I	02/VDM/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 17 Oktober 2012	97.933.000,00	-	4.896.650,00	4.896.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.896.650,00	4.896.650,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. BRPs	Penimbunan Dengan Tanah Setempat Ruas Jalan Desa Tabala Jaya-Majuria Karang Agung Ulu Kec. BA II	02/TJ-N/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 17 Oktober 2012	195.611.000,00	-	9.780.550,00	9.780.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.780.550,00	9.780.550,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. MB	Pembangunan Jembatan Sriagung	02/SRIA/UNG/SPK/PPK/PUBM/2012 Tgl. 12 Oktober 2012	97.778.000,00	-	4.888.900,00	4.888.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.888.900,00	4.888.900,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. KaKo	Pengecoran Jalan Dalam Kota Kecamatan Betung, Ji. Gotong Royong dan Pangeran Dikurdi	04/044/PPK/KONTRAK/PUBM/2008 tanggal 31 Juli 2008	979.782.000,00	-	12.247.275,00	12.247.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.247.275,00	12.247.275,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. SePu	Pengecoran Jalan Bina Sakti (BPDS) Kec. Betung	04/046/PPK/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 31 Juli 2008	977.671.000,00	-	12.220.887,00	12.220.887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.220.887,00	12.220.887,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. CC	Pengecoran Jalan Desa Gilelak Dalam Kec. Rambutan	04/061/PPK/KONTRAK/PUBM/2008 tanggal 31 Juli 2008	783.145.000,00	-	9.789.312,00	9.789.312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.789.312,00	9.789.312,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. DP	Pengecoran Jalan Dalam Kota Kecamatan Betung - Ji. M. Rob	04/062/PPK/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 31 Juli 2008	195.389.000,00	-	9.769.450,00	9.769.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.769.450,00	9.769.450,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. MK	Pembangunan Jembatan Desa Bintaran (Jembatan No. 1) Kec. Air Salek	04/105/PPK/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 31 Juli 2008	113.327.000,00	-	5.666.350,50	5.666.350,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.666.350,50	5.666.350,50				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. JB	Pembangunan Jembatan Desa Bintaran (Jembatan No. 2) Kec. Air Salek	04/106/PPK/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 31 Juli 2008	113.199.000,00	-	5.659.950,50	5.659.950,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.659.950,50	5.659.950,50				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. RAPra	Pembangunan Jembatan Desa Damar Wulan Menuju Dermaga - Jembatan SDU VII Primer 6 Kec. Air Salek	05/05/PPK-PL/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 17 Oktober 2008	99.581.000,00	-	4.979.050,00	4.979.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.979.050,00	4.979.050,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. HMa	Pengecoran Jalan Cinta Manis Lama Kec. Banyuasin I	05/06/PPK-PL/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 17 Oktober 2008	99.597.000,00	-	4.979.850,00	4.979.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.979.850,00	4.979.850,00				
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. KR	Pembuatan Box Culvert Tipe Single (2x2) Desa Bengkulu Kec. Betung	05/17/PPK-PL/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 17 Oktober 2008	99.568.000,00	-	4.978.400,00	4.978.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.978.400,00	4.978.400,00				

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang										Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET
					Saldo Awal Tahun 2020		Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020				Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020						
					Jumlah	Beban	Aset Tetap	Beban	Aset	Jumlah Penambahan	Pembayaran Tahun 2020 (OPD)		Jumlah Pembayaran	Beban			Aset	Jumlah Hutang		
											No. SP2D	Jumlah								
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. JB	Pembuatan Box Culvert Type Single (2x2) Desa Mukut Kec. Pulau Rimau	05/18/PPK-PL/KONTRAK/PUBM/2008 Tanggal 17 Oktober 2008	99.541.000,00	-	4.977.050,00	4.977.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.977.050,00	4.977.050,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. LUM	Pengecoran Jalan Menuju Desa Tanjung Laga	07/43/PPK-KONTRAK/PUBMIX/2006 Tanggal 14 September 2006	99.490.000,00	-	4.974.500,00	4.974.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.974.500,00	4.974.500,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Dr	Pembangunan Jembatan Desa dan Jembatan I - Muara Jalur VIII Desa Karang Baru Jembatan Desa SPD 1	07/44/PPK-KONTRAK/PUBMIX/2006 Tanggal 14 September 2006	99.502.000,00	-	4.975.100,00	4.975.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.975.100,00	4.975.100,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. JB	Pembangunan Box Culvert Taja Raya II Type Single 1/1	07/PPK-KONTRAK/PUBMIX/2006 tanggal 28 November 2006	99.000.000,00	-	2.475.000,00	2.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.475.000,00	2.475.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. LLLA	Penimbunan Oprt Box Culvert Jalan Baru Talang Andong - Sungai Dua Kec. Rambutan	05/PPK-PL/TASD/KONTRAK/PU BM/2010 tanggal 11 November 2010	94.500.000,00	-	94.500.000,00	94.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.500.000,00	94.500.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Seja	Pembangunan Box Culvert Type Single Uk. (3x3) Jalan Desa Baru Kec. Rambutan - Box Culvert No. 01	05/PPK-PL/DB-1/KONTRAK/PUBM/2010 Tanggal 22 September 2010	99.550.000,00	-	4.977.500,00	4.977.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.977.500,00	4.977.500,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Ra	Perkuatan Jembatan Beton Air Gading Kec. Muara Padang	05/GADING/PPK-PL/KONTRAK/PUBM/2010 Tanggal 01 April 2010	99.000.000,00	-	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	4.950.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Ra	Perbaikan Tembok Penahan Tanah Jembatan Muara Padang Kec. Muara Padang	05/PENAHAN/PPK-PL/KONTRAK/PUBM/2010 Tanggal 01 April 2010	99.000.000,00	-	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	4.950.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. AAA	pengawasan kegiatan rehabilitasi / penataan bundaran tugu ketahanan pangan dan jalan sekitar tugu dengan aspal hotmix kecamatan banyuasin III	03/02/PPK/PENGKONT/RAK/PU BM/2010 Tanggal 01 April 2010	49.610.000,00	-	2.480.500,00	2.480.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.480.500,00	2.480.500,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. DMM	Pengecoran Jalan Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago	05/02/PM-L/PPK/KONTRAK/PUBM/2011 tanggal 8 Juni 2011	196.993.000,00	-	9.849.650,00	9.849.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.849.650,00	9.849.650,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. ASI	Pengecoran Jalan Serasi Kec. Talang Kelapa	01/51/SPK/PPK/PUBM/2011 tanggal 29 September 2011	98.751.000,00	-	4.937.550,00	4.937.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.937.550,00	4.937.550,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. IqP	Pengecoran Halaman Rumah Dinas Kajari Banyuasin	01/HRDK/SPK/PPK/PUBM/2011 tanggal 22 Nopember 2011	49.277.000,00	-	2.463.850,00	2.463.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.463.850,00	2.463.850,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. R-D	Pembangunan Box Culvert Type Single Uk. (2x2) Desa Sungai Gerong Kec. Banyuasin I	Nomor : tanggal 8 Juni 2011	197.230.000,00	-	9.861.500,00	9.861.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.861.500,00	9.861.500,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. JU	Pembuatan Box Culvert Type Single Uk. (1x1) JI. Thalib Wali Pangkalan Balai	01/TW/SPK/PPK/PUBM/2011 tanggal 22 Nopember 2011	49.257.000,00	-	2.462.850,00	2.462.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.462.850,00	2.462.850,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Sharif Pratama	Normalisasi Saluran Sungai Rebonbung Di Sungai Rebo Kec. Banyuasin I	No : 02/02/SPK/PL/PPK-PP/PU/PENG/2016 Tanggal 15 Agustus 2016	197.000.000,00	-	9.850.000,00	9.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.850.000,00	9.850.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Nayfan Jaya	Normalisasi Sungai Desa Gilirang Kecamatan Muara Sugihan	No : 03/01/SP/PPK-PP/PU/PENG/2016 Tanggal 18 Agustus 2016	294.660.000,00	-	14.733.000,00	14.733.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.733.000,00	14.733.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Sharif Pratama	Normalisasi Anak Sungai Desa Sebokor Kec. Air Kumbang	No : 03/06/SP/PPK-PP/PU/PENG/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 addendum No : 03.A/06/SP/PPK-PP/PU/PENG/2016 Tanggal 09 September 2016	294.700.000,00	-	14.735.000,00	14.735.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.735.000,00	14.735.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Aldaffi Putra HK	Rehabilitasi Saluran Sekunder Desa Pendowo Hesa Kecamatan Markati Jaya	No : 15/08/SP/PPK-PP/PU/PENG/2016 Tanggal 18 Agustus 2016	363.300.000,00	-	18.165.000,00	18.165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.165.000,00	18.165.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Bakti Usang Rimau	Pembangunan dan Peningkatan Jar Pengairan Desa Rimau Sungaang Kec. Banyuasin II	No : 37/SPK/PPK-PP/PU/PENG/2015 Tanggal 02 November 2015	196.000.000,00	-	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800.000,00	9.800.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Cahaya Musi Artha Persada	Pek. Rehabilitasi Jar Pengairan Desa Sumber Hidup Kec. Muara Telang	03/42/SPK/PPK-PP/PU/PENG/2014 Tanggal 07 Juli 2014	185.000.000,00	-	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.250.000,00	9.250.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. Cahaya Musi Artha Persada	Pek. Rehabilitasi Jar Pengairan Desa Telang Makmur Kec. Muara Telang	03/43/SPK/PPK-PP/PU/PENG/2014 Tanggal 07 Juli 2014	185.000.000,00	-	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.250.000,00	9.250.000,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. PL	Rehabilitasi Jaringan Pengairan Sekunder Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau	02/SPK/PPK-PB/PU-PENG/2013 Tgl. 5 Februari 2013	199.380.000,00	-	9.969.000,00	9.969.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.969.000,00	9.969.000,00	

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang										Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET		
					Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020			Koreksi Hutang Aset			Koreksi Hutang Beban	Beban	Aset		Jumlah Hutang	
					Beban	Aset Tetap		Beban	Aset	Jumlah Penambahan	No. SP2D	Beban	Aset									Jumlah Pembayaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. K8n	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan di Desa Tanjung Mas	04/SP/KBP/PU Peng/2011	396.653.000,00	-	19.832.650,00	19.832.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.832.650,00	19.832.650,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	CV. KR	Rehabilitasi Saluran Primer 19 Telang II Kec. Tanjung Lago	07/SP/KBP/PU Peng/2011	462.226.000,00	-	23.111.300,00	23.111.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.111.300,00	23.111.300,00	
<b>JUMLAH OPD</b>				<b>309.648.015.087,70</b>	<b>9.915.750,00</b>	<b>992.612.525,00</b>	<b>1.002.528.275,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.915.750,00</b>	<b>15.802.677.579,39</b>	<b>15.812.593.329,39</b>
Dinas Lingkungan Hidup	CV. BMF	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor	012/PPK/SPK/TU.PGK/D KPP/2012 Tgl. 2 Juli 2012	78.000.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00	
Dinas Lingkungan Hidup	CV. LiBe	Pengadaan Pembuatan Pagar Tempat Pemakaman Umum Pedada Kab. Banyuasin	02/001/PPK-PU/SPK/DKPP/2012 Tgl. 8 Okt 2012	99.175.000,00	-	4.958.750,00	4.958.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.958.750,00	4.958.750,00	
Dinas Lingkungan Hidup	CV. KJ	Pemeliharaan Gedung Kantor	15/PPK/SPK/TU.PGK/DK P2/2011 Tgl. 15 Juli 2011	36.596.000,00	-	1.829.800,00	1.829.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.829.800,00	1.829.800,00	
<b>JUMLAH OPD</b>				<b>213.771.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.688.550,00</b>	<b>10.688.550,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.688.550,00</b>	<b>10.688.550,00</b>
Dinas Perikanan	CV. Cahya Nagara	Pekerjaan Pembuatan Hatchery Gurami	027/26/PPK-HG-PERIK-PB/VI/2014 Tgl. 09 Juni 2014	198.915.000,00	-	9.945.750,00	9.945.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.945.750,00	9.945.750,00	
Dinas Perikanan	CV. Cahya Nagara	Pekerjaan Pembuatan Bak-bak Sortasi Benih Ikan	027/29/PPK-BSBI-PERIK-PB/VI/2014 Tgl. 12 Juni 2014	197.795.000,00	-	9.889.750,00	9.889.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.889.750,00	9.889.750,00	
Dinas Perikanan	CV. Bara Pembangunan	Pekerjaan Pembuatan Jaringan Jalan Kompleks	027/15/SPK/PPK/PERIK/2014 Tgl. 26 Agustus 2014	324.500.000,00	-	16.225.000,00	16.225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.225.000,00	16.225.000,00	
Dinas Perikanan	CV. Pny	Pembuatan Bak-bak Perbenihan	027/05/HACT/PPK/BAK-BBI/VI/2013	134.000.000,00	-	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	6.700.000,00	
Dinas Perikanan	CV. MKC	Pembuatan Hatchery Skala Rumah Tangga	027/05/HSRT-TJLG/PPK/BBI/VI/2013	189.200.000,00	-	9.460.000,00	9.460.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.460.000,00	9.460.000,00	
Dinas Perikanan	CV. CTP	Pembuatan Hatchery Skala Rumah Tangga	027/05/HSRT-TJLG/PPK/BBI/VI/2013	109.200.000,00	-	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.460.000,00	5.460.000,00	
Dinas Perikanan	CV. SCo	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas	027/03/PPK/PWS-BBI/VI/2013	45.000.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	
Dinas Perikanan	CV. TW	Penyelesaian Plester Dinding Kolam dan Saluran	027/02/PPK/PLS-BBI/VI/2013	772.500.000,00	-	38.625.000,00	38.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.625.000,00	38.625.000,00	
Dinas Perikanan	CV. PI	Penyelesaian Pintu Air	027/05/PTA/PPK/BBI/IX/2013	50.000.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
Dinas Perikanan	CV. DPM	Penyelesaian Pembangunan Laboratorium	027/05/LAB/PPK/BBI/VI/2013	50.000.000,00	-	9.910.000,00	9.910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.910.000,00	9.910.000,00	
Dinas Perikanan	CV. Dac	Pembangunan Menara Tangki Air	027/25/PPK/BBI/IX/2012	39.748.000,00	-	1.987.400,00	1.987.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.987.400,00	1.987.400,00	
Dinas Perikanan	CV. LK	Pembangunan Jalan Produksi Masuk BBI	027/02/JP/PPK/BBI/IX/2012	407.996.000,00	-	20.399.800,00	20.399.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.399.800,00	20.399.800,00	
Dinas Perikanan	CV. DM	Pembangunan Kolam Penampungan Air Bersih BBI	027/02/KPAB/PPK/BBI/IX/2012	106.325.000,00	-	5.316.250,00	5.316.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.316.250,00	5.316.250,00	
Dinas Perikanan	CV. LK	Pembangunan Saluran Pbuangan Air Kotor BBI	027/02/SPAK/PPK/BBI/IX/2012	186.467.000,00	-	9.323.350,00	9.323.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.323.350,00	9.323.350,00	
Dinas Perikanan	CV. KA	Konstruksi Ponton Apung TPI	523/02/SP/TANGKAP/PERIK/2012	959.252.000,00	-	47.962.600,00	47.962.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.962.600,00	47.962.600,00	
<b>JUMLAH OPD</b>				<b>3.770.896.000,00</b>	<b>-</b>	<b>238.704.900,00</b>	<b>238.704.900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238.704.900,00</b>	<b>238.704.900,00</b>
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	CV. Alya Amani	Pembuatan Jalan Usaha Tani sepanjang 7 KM di Ds. Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago Keg. Pengolahan Lahan dan Air	521.3/1/SP/Pertanak-Sapras/DAK/2016 (28-07-16)	746.848.000,00	37.342.400,00	-	37.342.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.342.400,00	-	37.342.400,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	CV. Tiga Berlian	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Upang Induk Kec. Air Saleh Sepanjang 5 KM (Paket IV) Keg Pengolahan Lahan dan Air	521.3/2/SP/Pertanak-Sapras/DAK/2016 (28-07-16)	534.637.000,00	26.731.850,00	-	26.731.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.731.850,00	-	26.731.850,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	CV. Adi Guna Putra	Pembuatan TAM 140 Ha di Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan Kegiatan Pengolahan Lahan dan Air	521.3/12/SP/Pertanak-Sapras/2015 tanggal 30 Juli 2015	191.900.000,00	9.595.000,00	-	9.595.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.595.000,00	-	9.595.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	SkJ	Konstruksi (JUT) sepanjang 3,0 km di Desa Upang Makmur	66/SP/Pertanak-Sapras/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013	293.089.000,00	14.654.450,00	-	14.654.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.654.450,00	-	14.654.450,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	CV. WC	Pembangunan Mushollah Tahap II Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	521/25/SPK/Pertanak-Sekret/2012 Tgl. 25 Juni 2012	36.653.000,00	1.832.650,00	-	1.832.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.832.650,00	-	1.832.650,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	CV. AP	Pembuatan Saluran/Parit Halaman Kantor pada Dinas Pendidikan dan Peternakan Keg. Pembangunan Gedung Kantor	520/21/SPK/Pertanak-Sekret/2012 Tgl. 13 Juli 2012	98.602.000,00	4.930.100,00	-	4.930.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.930.100,00	-	4.930.100,00

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Mutasi Hutang						Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET		
					Beban	Aset Tetap		Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020					Jumlah Pembayaran	Beban	Aset		Jumlah Hutang	
								Beban	Aset	Jumlah Penambahan	No. SP2D	Beban	Aset								
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	CV. NB	Pengadaan Konstruksi Jalan Usahatani (JUT) Sepanjang 7 KM di Desa Borang Kec. BA I Keg. Pengolahan Lahan dan Air	07/SA/Pertanak/IX/2012 Tgl. 10 Sept 2012	171.553.000,00	-	8.577.650,00	8.577.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.577.650,00	8.577.650,00		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	CV. NSI	Pengadaan Konstruksi Jalan Usahatani (JUT) sepanjang 5 KM di Kec. Rambutan Keg. Pengolahan Lahan dan Air	10/SP/Pertanak/IX/2012 Tgl. 12 Sept 2012	122.466.000,00	-	6.123.300,00	6.123.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.123.300,00	6.123.300,00		
				<b>2.195.748.000,00</b>	<b>73.669.250,00</b>	<b>36.118.150,00</b>	<b>109.787.400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>73.669.250,00</b>	<b>36.118.150,00</b>	<b>109.787.400,00</b>	
Dinas Perkebunan dan Peternakan	CV. KSD Syah	Pembuatan Partit Pusbungsan Puskeswan Tanjung Lago Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	524/7/60/SPK-DAK/Pertanak-PTK/2015 tanggal 22 Mei 2015	74.150.000,00	-	3.707.500,00	3.707.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.707.500,00	3.707.500,00		
Dinas Perkebunan dan Peternakan	CV. BH (Bintang Harapan)	Pembuatan kandang ternak ayam di Kec Rambutan	524/105.b/SPK/Pertanak-PP/2013 tanggal 21 Oktober 2013	59.450.000,00	-	2.972.500,00	2.972.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.972.500,00	2.972.500,00		
Dinas Perkebunan dan Peternakan	CV. JUI (Jaya Utama)	Pembuatan Kandang Ternak Kambing di Kec. Tungkal Ilir Keg. Pengembangan Agribisnis Peternakan	524/247/SPK/Pertanak-PP/2012 Tgl. 05 Nov 2012	40.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00		
				<b>173.600.000,00</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>8.680.000,00</b>	<b>8.680.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.680.000,00</b>	<b>8.680.000,00</b>		
Sekretariat Daerah	CV. Media Solution	Rehab Rangan Ruang Kabag Humas dan Protokol Seldi Kabupaten Banyuasin	027/349/SPK/IX/2015 tgl. 30/10/2015	126.500.000,00	6.325.000,00	-	6.325.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.325.000,00	-	6.325.000,00	
				<b>126.500.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.325.000,00</b>	-	<b>6.325.000,00</b>	
Sekretariat DPRD	CV. PERMATA	Pemasangan Tiang Bendera Pada Kantor Sekretariat DPRD Kab. Banyuasin	600/094/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2015	19.500.000,00	-	975.000,00	975.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975.000,00	975.000,00		
Sekretariat DPRD	CV. ANUGRAH PRATAMA INSAANI	Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua III DPRD Kab. Banyuasin	600/058/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2015	28.530.000,00	1.426.500,00	-	1.426.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.426.500,00	-	1.426.500,00	
Sekretariat DPRD	CV. ANUGRAH PRATAMA INSAANI	Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD Kab. Banyuasin	600/060/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2015	28.630.000,00	1.431.500,00	-	1.431.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.431.500,00	-	1.431.500,00	
Sekretariat DPRD	CV. ILHAM BINTANG	Pemeliharaan Gedung Paripurna DPRD Pada Kantor Sekretariat DPRD Kab. Banyuasin	600/053/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2015	57.760.000,00	2.888.000,00	-	2.888.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.888.000,00	-	2.888.000,00	
Sekretariat DPRD	DUTA LEBUNG	Pekerjaan Rehab Lantai Teras Depan Gedung Paripurna DPRD Kab. Banyuasin	600/10/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2017	24.850.000,00	1.242.500,00	-	1.242.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.242.500,00	-	1.242.500,00	
Sekretariat DPRD	SINAR JAYA	Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD Kab. Banyuasin	601/076/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2016 (19-10-16)	98.580.000,00	4.929.000,00	-	4.929.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.929.000,00	-	4.929.000,00	
Sekretariat DPRD	MALIKCO	Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi / WC Ruang Bupati di Gedung Paripurna	601/111/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2016 (11-11-16)	83.500.000,00	4.175.000,00	-	4.175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.175.000,00	-	4.175.000,00	
Sekretariat DPRD	CV. KURNIA SUBUR	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kab. Banyuasin	601/048/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2015 tgl. 08/06/2015	149.000.000,00	7.450.000,00	-	7.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.450.000,00	-	7.450.000,00	
Sekretariat DPRD	CV. Putra Pandawa	Pekerjaan Rehab/ Renovasi Taman Rumah Dinas Ketua DPRD Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	601/054/PPK/SPK-UMUM/SETWAN/2015	98.100.000,00	4.905.000,00	-	4.905.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.905.000,00	-	4.905.000,00	
Sekretariat DPRD	LIMA SAUDARA	Pekerjaan Penggantian Pintu Samping Gedung Paripurna Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	027/128/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2014 Tgl. 21 Nove 2014	99.000.000,00	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	-	4.950.000,00	
Sekretariat DPRD	CV. TJ	Pekerjaan Pembuatan Rolling Door Garasi Mobil Pool Keg. Pembangunan Gedung Kantor Setwan Kab. Banyuasin	027/080/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2012	48.437.500,00	2.421.875,00	-	2.421.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.421.875,00	-	2.421.875,00	
Sekretariat DPRD	CV. SDS	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Belakang Gedung Fraksi	027/118/PPK-UMUM/SPK/SETWAN/2012	196.080.000,00	-	9.804.000,00	9.804.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.804.000,00	-	9.804.000,00	
Sekretariat DPRD	CV. HR	Pekerjaan Pembuatan Rumah-Rumahan Genset untuk Rumah Dinas Wakil Ketua I, II dan III	601/107/PPK/SPK-UMUM/SETWAN/2012	59.310.000,00	-	2.965.500,00	2.965.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.965.500,00	-	2.965.500,00	

Mutasi Hutang Antar OPD	Nama Rekanan	Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Mutasi Hutang										Koreksi Hutang Aset	Koreksi Hutang Beban	Saldo Akhir Hutang per 31 MARET 2020			KET			
					Saldo Awal Tahun 2020		Jumlah	Penambahan Hutang Tahun 2020			Pengurangan Hutang Tahun 2020			No. SP2D			Pembayaran Tahun 2020 (OPD)		Jumlah Pembayaran		Beban	Aset	Jumlah Hutang
					Beban	Aset Tetap		Beban	Aset	Jumlah Penambahan	Beban	Aset	Jumlah				Beban	Aset					
Sekretariat DPRD	CV. JIL	Pemeliharaan Pembuatan Peralatan Jemuran Beton Rumah Dinas Wakil Ketua I	601/135/PPK/SPK-UMUM/SETWAN/2012	25.800.000,00	-	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290.000,00	1.290.000,00			
Sekretariat DPRD	CV. TJ	Pekerjaan Pembuatan Pagar Stainless dalam Ruang Rapat Paripurna & Pemasangan Wallpaper Ruang Tunggu Bupati di Gedung Paripurna	601/202/PPK/SPK-UMUM/SETWAN/2012	53.950.000,00	-	2.424.500,00	2.424.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.424.500,00	2.424.500,00			
Sekretariat DPRD	CV. JIL	Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Banyuwangi	601/163/PPK/SPK-UMUM/SETWAN/2012	51.000.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000,00	2.550.000,00			
Sekretariat DPRD	CV. AEC	Pekerjaan Pemeliharaan Kantor Sekretariat DPRD	601/167/PPK/SPK-UMUM/SETWAN/2012	79.400.000,00	-	3.970.000,00	3.970.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.970.000,00	3.970.000,00			
Sekretariat DPRD	CV. RA	Pekerjaan Rehab Ringan Rumdim Wakil Ketua I	601/141/PPK/SPK-UMUM/SETWAN/2012	74.457.000,00	-	3.722.850,00	3.722.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.722.850,00	3.722.850,00			
Sekretariat DPRD	CV. APe	Pemeliharaan Rumah dinas Wakil Ketua II DPRD	027/102/SPK/SETWAN/2011	19.900.000,00	-	995.000,00	995.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995.000,00	995.000,00			
			<b>JUMLAH OPD</b>	<b>1.295.784.500,00</b>	<b>28.447.500,00</b>	<b>36.068.725,00</b>	<b>64.516.225,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.447.500,00</b>	<b>36.068.725,00</b>	<b>64.516.225,00</b>		
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	CV. PALKER JAYA	PERBAIKAN INTERIOR RUANG RAPAT	10/SPK-PPK-01/DPPKAD/2016 (16-05-16)	194.000.000,00	9.700.000,00	-	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700.000,00	-	9.700.000,00		
			<b>JUMLAH OPD</b>	<b>194.000.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.700.000,00</b>		
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Bantuan Keuangan Pemprov Sumsel	Pengembalian sisa/kelebihan Bantuan Keuangan dari Pemprov Sumsel kepada penkab BA Sesuai Srt Edaran Gubernur Sumsel No 900/00503/BPKAD/14 tgl 14.03.2014		-	-	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00		
			<b>JUMLAH OPD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		
			<b>TOTAL</b>	<b>349.333.686.167,65</b>	<b>3.066.320.741,99</b>	<b>3.137.737.273,00</b>	<b>6.204.108.014,99</b>	<b>5.840.567.301,80</b>	<b>16.971.855.869,39</b>	<b>22.812.423.171,19</b>	<b>-</b>	<b>2.727.479.795,99</b>	<b>-</b>	<b>2.727.479.795,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.179.408.247,80</b>	<b>20.109.643.142,39</b>	<b>26.289.051.390,19</b>		

